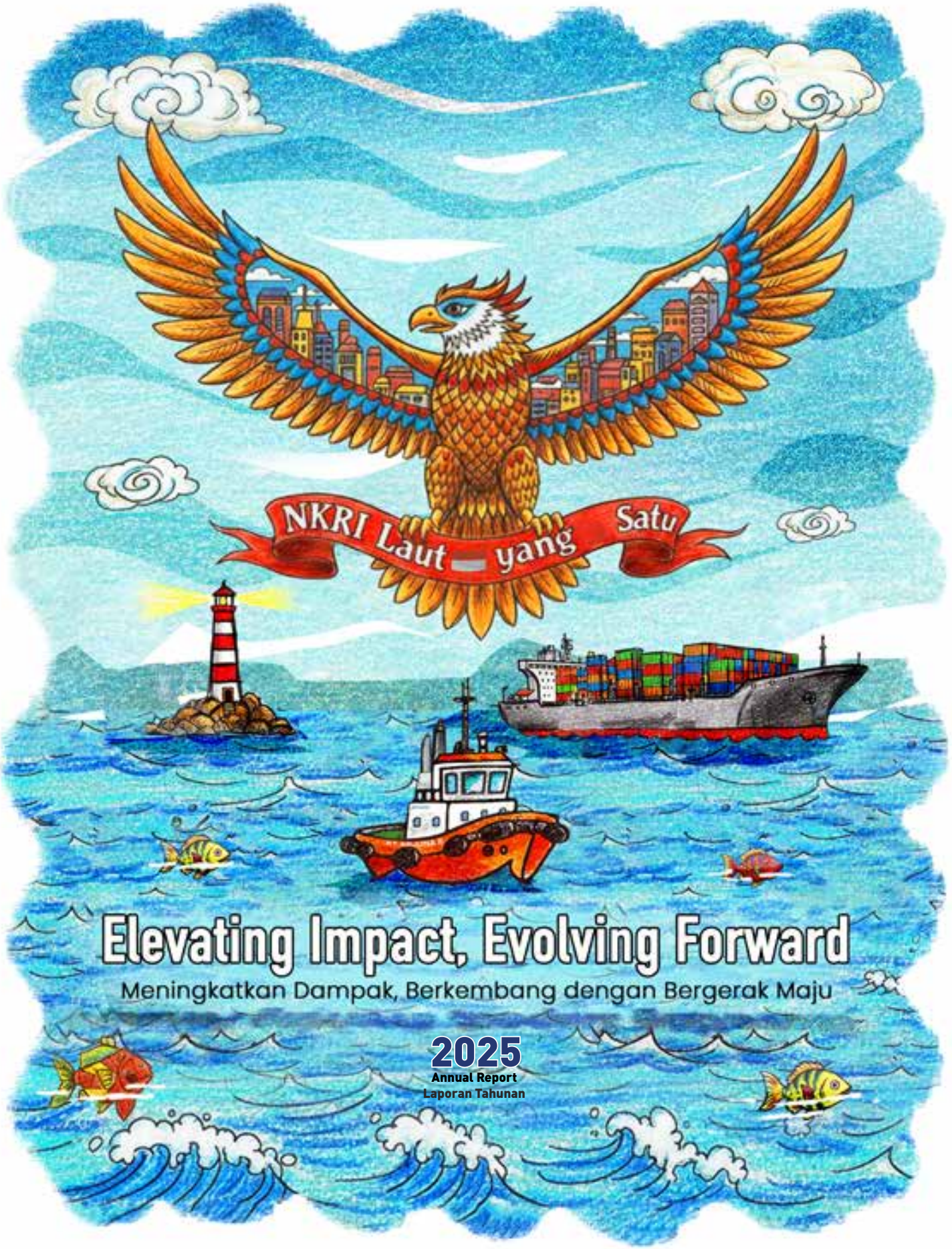
Danantara Indonesia

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA



Elevating Impact, Evolving Forward

Meningkatkan Dampak, Berkembang dengan Bergerak Maju

2025
Annual Report
Laporan Tahunan

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

PELINDO

JASA MARITIM

JASA ARMADA INDONESIA

Tentang Laporan Tahunan IPCM 2025

About the 2025 IPCM Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan tema "**Elevating Impact, Evolving Forward**". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk serta masa depan keberlanjutan bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Welcome to the Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, themed "Elevating Impact, Evolving Forward." This theme was selected based on a comprehensive analysis and in-depth assessment of the facts and business developments of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as well as the future sustainability of its business.

Buku ini Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

This Annual Report has been prepared in accordance with the Company's Articles of Association; Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; Law No. 11 of 2020 on Job Creation; and Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

Laporan Tahunan ini terdiri dari beberapa bab, meliputi Kilas Kinerja, Laporan Manajemen, Profil Perusahaan, Analisis dan Pembahasan Manajemen, Fungsi Pendukung Bisnis, Tata Kelola Perusahaan, dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

This Annual Report consists of several chapters, including Performance Highlights, Management Report, Company Profile, Management's Discussion and Analysis, Business Support Functions, Corporate Governance, and Social and Environmental Responsibility.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Indonesia.

References to the currency units "Rupiah," "Rp," or "IDR" refer to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States of America. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penyebutan kata "IPCM" didefinisikan sebagai PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang menjalankan bisnis utamanya di bidang Jasa Pelayanan Kapal (Pemanduan dan Penundaan), Jasa Pengelolaan Kapal dan Jasa Pengangkutan dan lainnya.

The term "IPCM" refers to PT Jasa Armada Indonesia Tbk, a company with main business activities in Vessel Services (Pilotage and Towage), Vessel Services, Freight and Other services.

Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di portal resmi PT Jasa Armada Indonesia Tbk yaitu www.ipcmarine.co.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Laporan Tahunan 2025 PT Jasa Armada Indonesia Tbk, silahkan menghubungi:

The Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk is presented in two languages, namely Bahasa Indonesia and English, using font types and sizes that are easy to read and printed in good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the official portal of PT Jasa Armada Indonesia Tbk at www.ipcmarine.co.id. For further information regarding the 2025 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, please contact:

PT Jasa Armada Indonesia Tbk
(IPCM)

Gedung Pelindo Tower, Lantai 8 & 9 Pelindo Tower,
Jl Yos Sudarso No. 9, Rawabadak Utara, Kec.Koja, Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230
E-mail: corsec@ipcmarine.co.id





Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundangundangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PT Jasa Armada Indonesia Tbk serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

This Annual Report contains statements regarding the financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which are classified as forward-looking statements under applicable laws and regulations, except for statements of a historical nature. Such statements involve risks and uncertainties and may cause actual results to differ materially from those reported.

The forward-looking statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of PT Jasa Armada Indonesia Tbk and the business environment in which the Company operates. The statements contained in this Annual Report do not constitute a guarantee of future performance, as actual results may differ due to various factors beyond the control of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Tema
Laporan Tahunan 2025
2025 Annual Report Theme



Elevating Impact, Evolving Forward

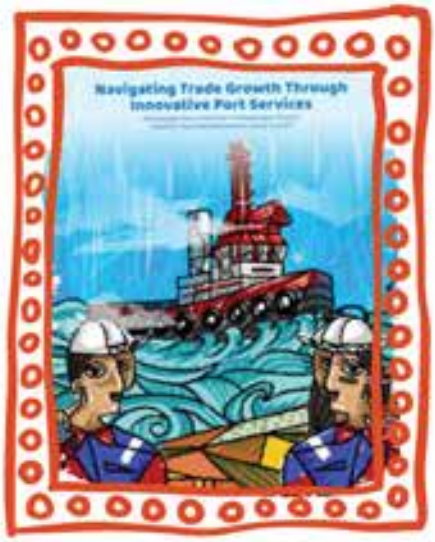
Meningkatkan Dampak, Berkembang dengan Bergerak Maju

PT Jasa Armada Indonesia (IPCM) Tbk. sepanjang tahun 2025 terus memperkuat perannya sebagai penyedia layanan maritim terintegrasi dengan fokus pada peningkatan kualitas dan keandalan operasional. Selaras dengan tema **"Elevating Impact, Evolving Forward"**, IPCM mengoptimalkan layanan pemanduan dan penundaan kapal guna mendukung kelancaran arus logistik nasional. IPCM juga memperluas kapabilitas jasa pengepilan sebagai bagian dari komitmen menjaga keselamatan dan efisiensi operasional pelabuhan. Dalam sektor pengangkutan laut, IPCM menunjukkan pertumbuhan kinerja melalui peningkatan utilisasi armada dan penguatan jaringan layanan. Kegiatan penyewaan kapal terus dikembangkan dengan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan dan dinamika industri. Selain itu, pengoperasian kapal dilakukan dengan standar keselamatan tinggi serta penerapan praktik terbaik berbasis teknologi. Transformasi berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan langkah progresif ini, IPCM menegaskan komitmennya untuk melangkah maju sebagai mitra strategis dalam ekosistem maritim Indonesia.

Throughout 2025, PT Jasa Armada Indonesia (IPCM) has strengthened its role as an integrated company providing maritime services that has been focusing on the improvement of operational quality and reliability. In line with the theme **"Elevating Impact, Evolving Forward"**, IPCM optimized its pilotage and towage services to support the national logistics. IPCM also expanded the capabilities of its towage services as part of its commitment for the safety and efficiency of port operations. For the maritime transportation, IPCM grew its performance by increasing fleet utilization and strengthening its service network. Ship chartering activities continued to be developed with an adaptive approach to customer needs and industry dynamics. In addition, vessel operations are carried out with high safety standards and the implementation of technology-based best practices. Continuous transformation is key to increasing competitiveness while creating added value for stakeholders. With this progressive step, IPCM emphasizes its commitment to moving forward as a strategic partner in Indonesia's maritime ecosystem.



Kesinambungan Tema
Theme Continuity



2024

"Navigating Trade Growth Through Innovative Port Services"

"Menavigasi Pertumbuhan Perdagangan Melalui Layanan Jasa Kepelabuhanan yang Inovatif"

PT Jasa Armada Indonesia Tbk berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas layanan maritim melalui strategi yang tepat dan terarah. Sebagai pemimpin dalam industri jasa maritim, IPCM berfokus pada navigasi strategis yang tidak hanya memastikan kelancaran operasional tetapi juga menghadirkan solusi unggul serta layanan jasa kepelabuhanan yang inovatif bagi pelanggan, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini diwujudkan melalui komitmen IPCM dalam penerapan strategi Perusahaan yang berbentuk optimalisasi pelayanan, kesiapan armada dan Awak Kapal, perawatan kapal serta peningkatan kerja sama dengan mitra, pembaruan armada dalam bentuk pembangunan kapal serta efektivitas pola kerja yang mengutamakan unsur keselamatan dalam pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal.

Sejalan dengan kinerja positif yang juga dicatatkan IPCM di 2024, IPCM optimis untuk dapat melampaui kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta tetap mempertahankan fundamental Perusahaan yang baik. Meskipun tantangan eksternal tetap ada, IPCM memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan berinovasi, didukung oleh strategi yang adaptif dan fokus pada keberlanjutan operasional. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2024 juga mencerminkan visi IPCM untuk mencapai pertumbuhan yang strategis guna memperluas dampak positif yang dapat diberikan, sehingga memperkokoh posisinya sebagai penyedia layanan maritim unggulan di Indonesia.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk is fully committed to continuously enhancing the quality of its maritime services through well-targeted and effective strategies. As a leader in the maritime service industry, IPCM focuses on strategic navigation that not only ensures smooth operations but also delivers superior solutions and innovative port services to its customers, partners, and all stakeholders. This is realized through IPCM's commitment to implementing corporate strategies that include service optimization, fleet and crew readiness, vessel maintenance, and strengthened partnerships, renewal of production tools through vessel construction and the adoption of effective work patterns that prioritize safety in pilotage and tugging services.

Aligned with the positive performance recorded by IPCM in 2024, the Company remains optimistic about surpassing previous achievements while maintaining strong business fundamentals. Despite ongoing external challenges, IPCM holds the potential to continue growing and innovating, supported by adaptive strategies and a strong focus on operational sustainability. Furthermore, the efforts made throughout 2024 reflect IPCM's vision of achieving strategic growth to expand its positive impact, thereby reinforcing its position as a leading maritime service provider in Indonesia.



2023

"Accelerating Trade Through Marine Collaboration"

"Memajukan Perdagangan melalui Kolaborasi Maritim"

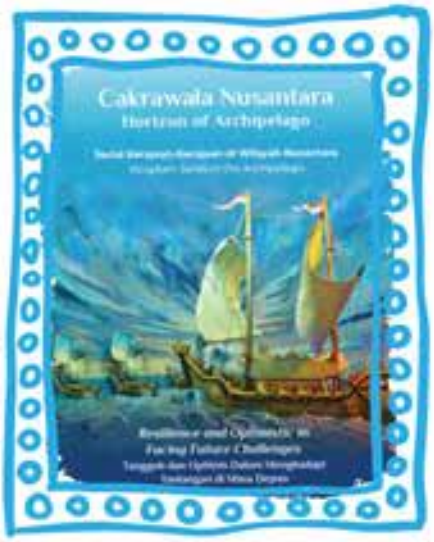
Pada tahun 2023, PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengedepankan strategi bisnisnya pada kolaborasi di tengah persaingan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang semakin ketat saat ini. Selain itu, sebagai bagian dari ekosistem pelabuhan (Pelindo), IPCM juga memiliki peran dalam *accelerating trade* dengan memfokuskan diri pada peningkatan nilai dari ekspansi market / penambahan pasar baru yang dijalankan. Strategi ini diyakini akan semakin memantapkan posisi Perusahaan dalam merealisasikan visinya "menjadi penyedia jasa *marine* terdepan dalam ekosistem maritim indonesia serta global."

Tema "Accelerating Trade Through Marine Collaboration" menjadi refleksi dari IPCM yang terus memfokuskan diri pada kolaborasi dengan Badan Usaha Pelabuhan lainya untuk memperlancar arus keluar masuk perdagangan yang dapat memberikan nilai tambah serta ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah proaktif ini, semakin mengokohkan kehadiran dan peran IPCM bagi kemajuan bangsa dan negara indonesia tercinta.

In 2023, PT Jasa Armada Indonesia Tbk prioritized its business strategy on collaboration amid the increasingly intense competition among Port Business Entities (BUPs). Moreover, as part of the port ecosystem (Pelindo), IPCM also plays a vital role in accelerating trade by focusing on enhancing value through business expansion. This strategy is believed to further strengthen the Company's position in realizing its vision of "becoming the leading marine service provider within Indonesia's and the global maritime ecosystem."

The theme "Accelerating Trade Through Marine Collaboration" reflects IPCM's continued focus on collaboration with various companies licensed as port business entities, aiming to facilitate the flow of trade and create added value and a sustainable business ecosystem. Through these proactive steps, IPCM continues to solidify its presence and role in advancing Indonesia, our beloved nation.





2022

"Resilience and Optimistic In Facing Future Challenges"

"Tangguh dan Optimis Dalam Menghadapi Tantangan di Masa Depan"

Tema laporan tahunan ini adalah Tangguh dan Optimis Dalam Menghadapi Tantangan di Masa Depan, yang menggambarkan optimisme dan perjuangan Perseroan dalam melewati masa-masa krisis sepanjang tahun 2022.

Tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan bagi semua elemen masyarakat termasuk para pelaku usaha, tidak terkecuali bagi PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Bagi IPCM, tahun-tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran bagi pengelolaan perusahaan untuk bertahan dan merumuskan strategi yang tepat keluar dari krisis. Keberhasilan IPCM melewati masa-masa krisis tergambar dari pencapaian kinerja positif yang menggembirakan dan memiliki tren meningkat.

Keberhasilan tersebut berkat kerjasama yang baik seluruh jajaran manajemen dan karyawan IPCM dan didukung oleh kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap layanan bisnis yang dilakukan oleh IPCM. IPCM berkomitmen terus melangkah cepat menuju masa depan dengan melakukan berbagai rumusan strategis, inovasi pengembangan layanan yang kompetitif dan unggul, serta transformasi dan penguatan implementasi *Good Corporate Governance*. Hal ini bertujuan untuk semakin mengokohkan kehadiran dan peran IPCM bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

The theme of this annual report is Resilience and Optimistic in Facing Future Challenges, which describes the optimism and struggles of the Company in getting through times of crisis throughout 2022.

The year 2022 is a year of revival for all elements of society including business people, with no exception for PT Jasa Armada Indonesia Tbk. For IPCM, the challenging years due to the COVID-19 pandemic provided valuable lessons for the management of the Company to survive and formulate the best strategy to get out of the crisis. The success of IPCM through times of crisis is reflected in the achievement of positive performance that is encouraging and has an increasing trend.

This success is due to the good cooperation of all levels of management and employees of IPCM and is supported by the trust of stakeholders in the business services carried out by IPCM. IPCM is committed to continuing to move forward towards the future by carrying out various strategic formulations and innovations in developing competitive and superior services, as well as transforming and strengthening the implementation of good corporate governance. This aims to further strengthen the presence and role of IPCM for the progress of our beloved nation and country of Indonesia.

PELINDO

JASA MARITIM

JASA ARMADA INDONESIA

Daftar Isi
Table of Content

Tentang Laporan Tahunan IPCM 2025 About the 2025 IPCM Annual Report	3
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability	4
Tema Laporan Tahunan 2025 2025 Annual Report Theme	5
Kesinambungan Tema Theme Continuity	6
Daftar Isi Table of Content	10
Sekilas Tentang IPCM Ipcm at a Glance	12
Pencapaian Terbaik IPCM IPCM'S Best Achievement	14
Kinerja ESG IPCM IPCM's ESG Performance	16

Kilas Kinerja 2025
2025 Performance Highlights



Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Highlights	20
Informasi Saham Stock Information	24
Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar Information on Outstanding Bonds, Sharia Bond, or Convertible Bonds	26
Peristiwa Penting Significant Events	27

Laporan Manajemen
Management Report



Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	42
Laporan Direksi Report of the Board of Directors	50
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Jasa Armada Indonesia Tbk Responsibility Statement of Members of the Board of Commissioners on the 2025 Annual Report of Pt Jasa Armada Indonesia Tbk	66
Surat Pernyataan Anggota Direktur Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 Pt Jasa Armada Indonesia Tbk Responsibility Statement of Members of the Board of Directors on the 2025 Annual Report of Pt Jasa Armada Indonesia Tbk	67

Profil Perusahaan
Company Profile



Identitas dan Informasi Umum Perusahaan General Information and Company Identity	70
Akses Terhadap Perusahaan Termasuk Kantor Cabang Atau Perwakilan Access to Company, including Branch and Representative Offices	72
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	74
Jejak Langkah Milestones	78
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Corporate Vision, Mission, and Culture	80
Makna Logo Perusahaan Meaning of Company Logo	86
Kegiatan Usaha Business Activities	87
Wilayah Operasional Perusahaan Operational Areas of the Company	90
Keanggotaan dalam Asosiasi Membership in Associations	92
Struktur Organisasi Organizational Structure	94
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	96
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	110
Profil Pejabat Eksekutif Profile of Executive Officers	120
Demografi Pekerja Employee Demographics	130
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	132
Informasi Pembelian/Penjualan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Purchase/Sales Information of Company Shares by the Board of Commissioners and Board of Directors	136
Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan Information Regarding Main/Controlling Shareholders	138
Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama List of Subsidiaries, Associate Entities, and Joint Ventures	138
Struktur Grup Group Structure	140
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology of Share Listing Issuance and/or Listing	141



Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities 142

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals 143

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications 144

Informasi Website Perusahaan
Information on the company website 150

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis



Tinjauan Perekonomian dan Industri
Economic Industrial Review 154

Tinjauan Operasional
Operational Review 164

Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha
Performance Review by Business Segment 166

Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review 179

Fungsi Penunjang Bisnis
Business Support Function



Sumber Daya Manusia
Human Resources 216

Teknologi Informasi
Information Technology 227

Sistem Manajemen Mutu
Quality Management System 236

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance



Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Policy 242

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan
Development of the Implementation of Good Corporate Governance Within the Company 248

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Structure 254

Dewan Komisaris
Board of Commissioners 271

Komisaris Independen
Independent Commissioner 279

Direksi
Board of Directors 281

Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi
Transparency Regarding Board of Commissioners and Directors 293



Organ Pendukung Dewan Komisaris
Board of Commissioners Supporting Organ 321

Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs of the Board of Directors 344

Auditor Eksternal
External Auditor 353

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System 357

Perkara Hukum
Legal Issues 370

Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions 371

Akses Informasi dan Data Perusahaan
Information Access and Company Data 372

Kode Etik
Code of Conduct 375

Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi
Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies 380

Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*
Insider Trading Prevention Policy 386

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Goods Services Procurement Policy 387

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Violation Reporting System 389

Transparansi Praktik *Bad Governance*
Transparency of Bad Governance Practices 393

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of Public Company Governance Guidelines 394

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines 400

Penerapan ASEAN *Corporate Governance Scorecards*
Implementation of ASEAN Corporate Governance Scorecards 454

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibilities



Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Governance of Social and Environmental Responsibility 474

Laporan Keuangan
Financial Report



Referensi Silang SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
Cross-Reference NO. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies 572



Sekilas Tentang IPCM

IPCM at a Glance

Pemegang Saham
Shareholders

- **PT Pelindo Jasa Maritim** 76,89%
- **PT Multi Terminal Indonesia** 0,11%
- **Masyarakat** | Public 23.00%

Produk dan Jasa
Products and Services

- **Jasa Pelayanan Kapal**
  Vessel Services
- **Jasa Pengangkutan dan Lainnya**
  Freight and Other Services

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Bidang Usaha
Business Line

Penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
Providing and operating vessels services, passengers, goods, and port-related activities.

Wilayah Operasi
Operating Areas

11 Pelabuhan Umum Pelindo Regional 2, 7 Wilayah Pelimpahan BUP PT Jasa Armada Indonesia (JAI) Tbk, 7 KSO.
11 Pelindo Regional 2 Public Ports, 7 Ports/ TUKS/Tersus/Waters, 7 Joint Operation.

Produk atau Jasa Utama dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan IPCM

Main Product or Service and the Contribution towards IPCM's Revenues

Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar Pelabuhan, dalam hal ini Produk atau Jasa Utama Perusahaan dalam Pelayanan Jasa Kapal adalah meliputi:

1. Jasa Pandu;
2. Jasa Tunda;
3. Jasa Pengelolaan Kapal;
4. Jasa Pengangkutan dan Lainnya;

Vessel Service is an operational support for vessels from port entry to departure and in this regard, the Company's main products or services in Marine Services include:

1. Pilotage Services;
2. Tug Services;
3. Fleet Management Services;
4. Freight and Other Services;



Layanan inti berupa pemanduan dan penundaan kapal dalam ekosistem pelabuhan. Didukung SDM profesional dan armada andal, IPCM memastikan pergerakan kapal berlangsung aman, tertib, dan efisien, mulai dari alur pelayaran hingga sandar. Layanan ini membantu navigasi dan manuver kapal, terutama kapal besar, serta mendukung kelancaran logistik maritim Indonesia.

Our core services involve vessel pilotage and pilot-assisted maneuvering within the port ecosystem. Backed by a professional workforce and a reliable fleet, IPCM ensures that vessel movements are safe, orderly, and efficient, from navigation through to berthing. These services assist with the navigation and maneuvering of vessels—particularly large ships—and support the smooth operation of Indonesia's maritime logistics.

Jasa Pelayanan Kapal (Pemanduan & Penundaan Kapal)
(Ship Pilotage and Tug Services)



Merupakan kegiatan usaha Perusahaan bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam bidang pengelolaan dan perawatan kapal motor Pandu yang digunakan untuk mobilisasi petugas pandu dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemanduan kapal di seluruh wilayah perairan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2.

This is a business activity in which the Company collaborates with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in the management and maintenance of pilot boats used to transport pilots in the performance of their vessel pilotage duties throughout the waters of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2.

Jasa Pengelolaan Kapal
Fleet Management Services



Merupakan kegiatan usaha Perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material atau barang dan hasil produksi antar wilayah Pelabuhan, serta menjadi salah satu segmen Produk atau Jasa Utama Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mengelola layanan penyewaan kapal sebagai bagian dari diversifikasi portofolio jasanya.

A Company's business in transporting materials or goods and production outputs between port areas, and it serves as one of the Company's main product or service segments. In addition, the Company also manages vessel chartering services as part of its service portfolio diversification.

Jasa Pengangkutan dan Lainnya
Freight and Other Services



Pencapaian Terbaik IPCM

IPCM'S Best Achievement

Kinerja Keuangan
Financial Performance

Pendapatan
Revenues

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2025 tercatat sebesar:
Revenues in 2025 amounted to:

Rp1,47
Triliun | Trillion

Jumlah Aset
Total Assets

Per 31 Desember 2025, jumlah aset tercatat sebesar:
As of December 31, 2025, total assets amounted to:

Rp1,71
Triliun | Trillion



Total Ekuitas
Total Equity

Total Ekuitas di tahun 2025 tercatat sebesar:
Total Equity in 2025 amounted to:

Rp1,36
Triliun | Trillion



Total Laba
Total Income

Di tahun 2025, Total Laba berhasil dibukukan sebesar:
In 2025 Total Income amounted to:

Rp196,44
Miliar | Billion

Kinerja Per Segmen Usaha
Performance by Business Segment

Jasa Pelayanan Kapal
Vessel Services

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2025 tercatat sebesar:
Revenues in 2025 amounted to:

Rp1,43
Triliun | Trillion



Jasa Pengangkutan dan Lainnya
Freight and Other Services

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2025 tercatat sebesar:
Revenues in 2025 amounted to:

Rp49,67
Miliar | Billion



Assessment GCG
GCG Assessment

POJK 21/POJK.04/2015
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Public Companies Governance Guideline

Telah Memenuhi Seluruh Rekomendasi (5 Aspek, 8 Prinsip, 25 Rekomendasi)

Has Met All Recommendations (5 Aspects, 8 Principles, 25 Recommendations)

ASEAN Corporate Governance Scorecard

124,67
Skor | Score

Leadership in Corporate Governance (Level 5)
Predikat | Predicate



Kinerja ESG IPCM

IPCM'S ESG Performance

Kinerja Lingkungan Hidup

Environmental Performance

Penggunaan Energi

Energy Usage

Konsumsi Energi Listrik

Electricity Consumption

925.602.416	640.688,32	2.306,48
Rupiah	KWh	Gj

Pengurangan Emisi

Emission Reduction

Emisi Cakupan 1 (BBM) Emission Scope 1 (Fuel)	Emisi Cakupan 2 (Listrik) Emission Scope 2 (Electricity)	Emisi Cakupan 3 (Dinas via Pesawat) Emission Scope 3 (Office Travel via Airplane)
51.056.668,80 $kgCO_2$ eq	598.402,89 $kgCO_2$ eq	91.761 $kgCO_2$ eq

Kinerja Sosial

Social Performance

Ketenagakerjaan

Employment

Jumlah Pekerja (Penugasan Pelindo, PKWT, TAD) Total Employees (Pelindo Secondment Employees, PKWT, Outsourced Personnel)	Rata-rata Jam Pelatihan Training Hour Average	Biaya Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Costs
839	9,60	Rp1,34
Orang Person	Jam/Orang Hour/Person	Miliar Billion

Pekerja
Employee

Indeks Engagement Pekerja
Employee Engagement Index

4,40

Indeks Kepuasan Pekerja
Employee Satisfaction Index

4,20

Konsumen
Customer

Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey

Sangat Baik
Very Good

Program CSR
CSR Program

1.307

CSR Pendidikan dan Agama
CSR Education and Religion

681

CSR Kewirausahaan
CSR Entreprenurship

55

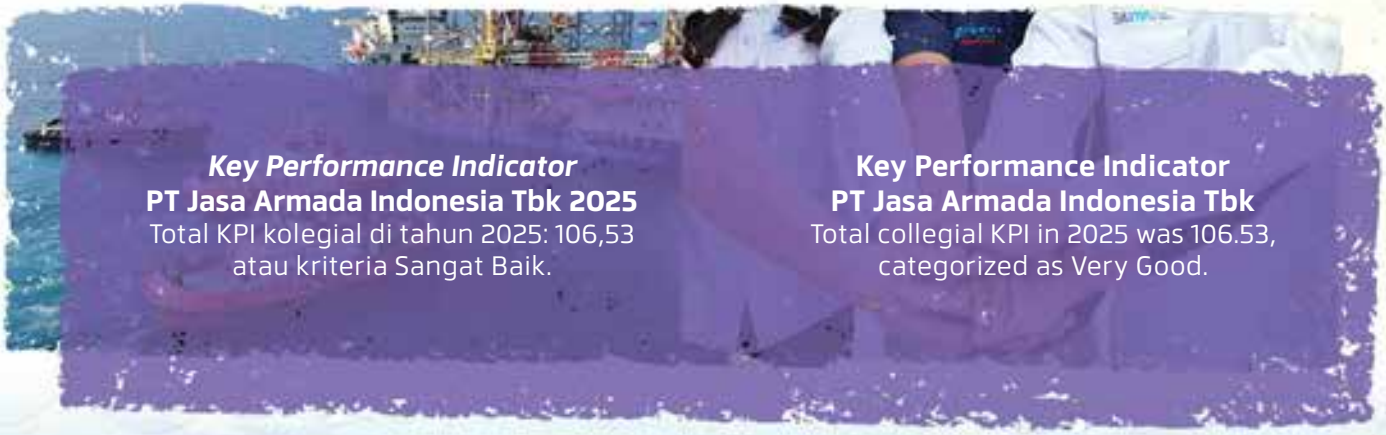
CSR Olahraga dan Seni Budaya
CSR Sports and Culture

10

CSR Sosial dan Lingkungan
CSR Social and Environment

507

Kinerja Tata Kelola
Governance Performance



Key Performance Indicator
PT Jasa Armada Indonesia Tbk 2025
Total KPI kolegial di tahun 2025: 106,53 atau kriteria Sangat Baik.

Key Performance Indicator
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Total collegial KPI in 2025 was 106.53, categorized as Very Good.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

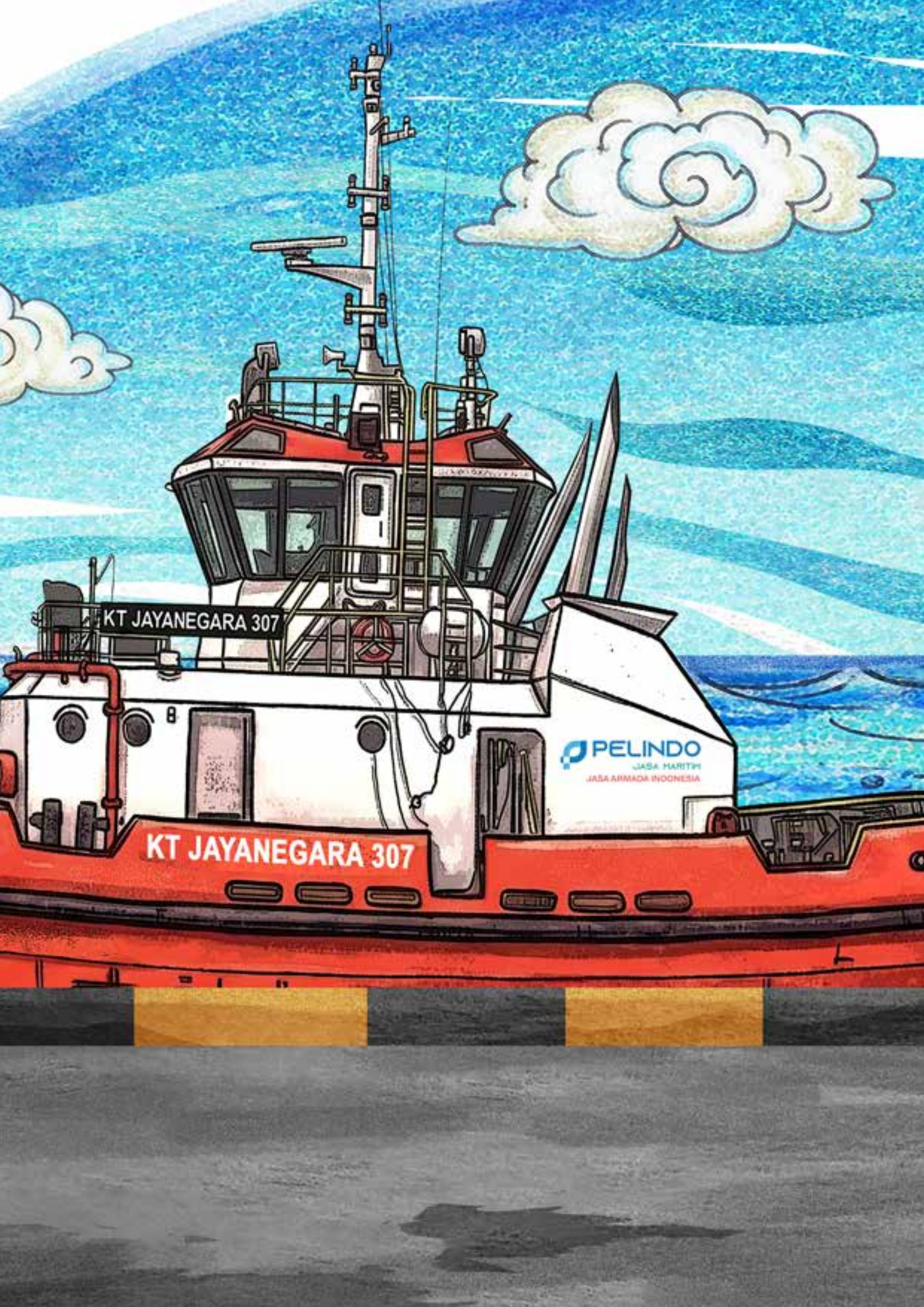
Kilas Kinerja 2025

2025 Performance Highlights



Tahun 2025 mencatatkan pencapaian terbaik Perusahaan dengan pendapatan Rp1,47 triliun dan laba tumbuh 17,74%, merefleksikan konsistensi strategi dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan transparan bagi seluruh pemangku kepentingan.

In 2025, the Company recorded its best performance, achieving revenue of Rp1.47 trillion and profit growth of 17.74%, reflecting the consistency of its strategy in creating sustainable and transparent value for all stakeholders.


KT JAYANEGARA 307
PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA
KT JAYANEGARA 307



Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
In millions of rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Pendapatan Revenues	**1.474.808**	1.345.030	1.138.537	980.168	820.161	9,65	15,80
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	**(1.045.017)**	(926.893)	(777.612)	(677.622)	(572.345)	12,74	16,24
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	**(181.484)**	(203.273)	(186.618)	(117.608)	(90.379)	(10,72)	19,04
Laba Bruto Gross Profit	**429.791**	418.137	360.925	302.547	247.816	2,79	14,76
Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya Other Operating Income (Expenses)	**(1.046)**	(5.696)	(9.452)	(10.924)	(1.560)	(81,64)	(9,51)
Laba Usaha* Income from Operations	**247.221**	209.168	183.759	174.014	158.997	18,19	11,67
Pendapatan Keuangan* Finance Income	**17.406**	16.168	14.958	14.142	14.977	7,66	3,83
Beban Keuangan Finance Expenses	**(9.375)**	(11.148)	(2.773)	(2.117)	(3.008)	(15,90)	32,87
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	**255.252**	214.188	195.944	186.039	170.966	19,17	10,54
Beban Pajak Penghasilan Corporate Income Tax Expenses	**(58.814)**	(47.345)	(38.282)	(35.384)	(34.383)	24,22	14,36
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	**196.438**	166.843	157.662	150.655	136.583	17,74	9,51
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Distributed to Owners of Parent Entity	**196.438**	166.843	157.662	150.655	136.583	17,74	9,51
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	**196.438**	166.843	157.662	150.655	136.583	17,74	9,51
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Distributed to Owners of Parent Entity	**196.438**	166.843	157.662	150.655	136.583	17,74	9,51
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh) Basic Earnings per Share (Full Amount)	**37,22**	31,62	29,88	28,55	25,88	17,71	9,51

*) Reklasifikasi
*) Reclassification

Pendapatan
Revenue

(Rp-Juta) | (Rp-Million)



Laba Usaha
Operating Income

(Rp-Juta) | (Rp-Million)



Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

(Rp-Juta) | (Rp-Million)





POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
In millions of rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Total Aset Total Assets	1.714.517	1.649.981	1.522.135	1.488.208	1.427.875	3,91	4,68
Total Liabilitas Total Liabilities	354.723	360.871	281.615	291.689	271.462	(1,70)	6,92
Total Ekuitas - Neto Total Equity - Net	1.359.794	1.289.110	1.240.520	1.196.519	1.156.413	5,48	4,13

Total Aset
Total Assets

(Rp-Juta) | (Rp-Million)



Total Liabilitas
Total Liabilities

(Rp-Juta) | (Rp-Million)



Total Ekuitas
Total Equity

(Rp-Juta) | (Rp-Million)



ARUS KAS

CASH FLOWS

Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
In millions of rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021	YoY 2024-2025 (%)	CAGR 2021-2025 (%)
Arus kas dari Aktivitas Operasi* Cash Flows from Operating Activities	**355.728**	329.457	(16.243)	126.483	303.448	7,97	4,05
Arus kas untuk Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	**(29.710)**	(26.148)	(14.522)	(3.426)	(106.541)	13,62	(27,33)
Arus kas untuk Aktivitas Pendanaan* Cash Flows for Financing Activities	**(244.975)**	(239.041)	(132.146)	(206.967)	(117.474)	2,48	20,17
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**81.042**	64.268	(162.911)	(83.910)	79.433	26,10	0,50
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	**473.084**	408.816	571.727	665.637	576.204	15,72	(4,81)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	**554.126**	473.084	408.816	571.727	655.637	17,13	(4,12)

*) Reklasifikasi
*) Reclassification

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	**158**	134	149	196	245
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	**289**	265	324	315	319
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Debt to Assets Ratio (%)	**21**	22	19	20	19
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	**26**	28	23	24	23
Rasio Kolektabilitas Piutang Receivables Collectability					
Rasio Perputaran Piutang (kali) Receivable Turnover (times)	**4**	3	11	9	8
Rasio Perputaran Piutang Harian (hari) Average Collection Period (days)	**94**	129	29	38	46
Rasio Keuangan Lainnya Other Financial Ratios					
Marjin Laba (%) Profit Margin (%)	**13**	12	14	15	17
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (%)	**14**	13	13	13	12
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Aset (%) Return on Assets (%)	**11**	10	10	10	10

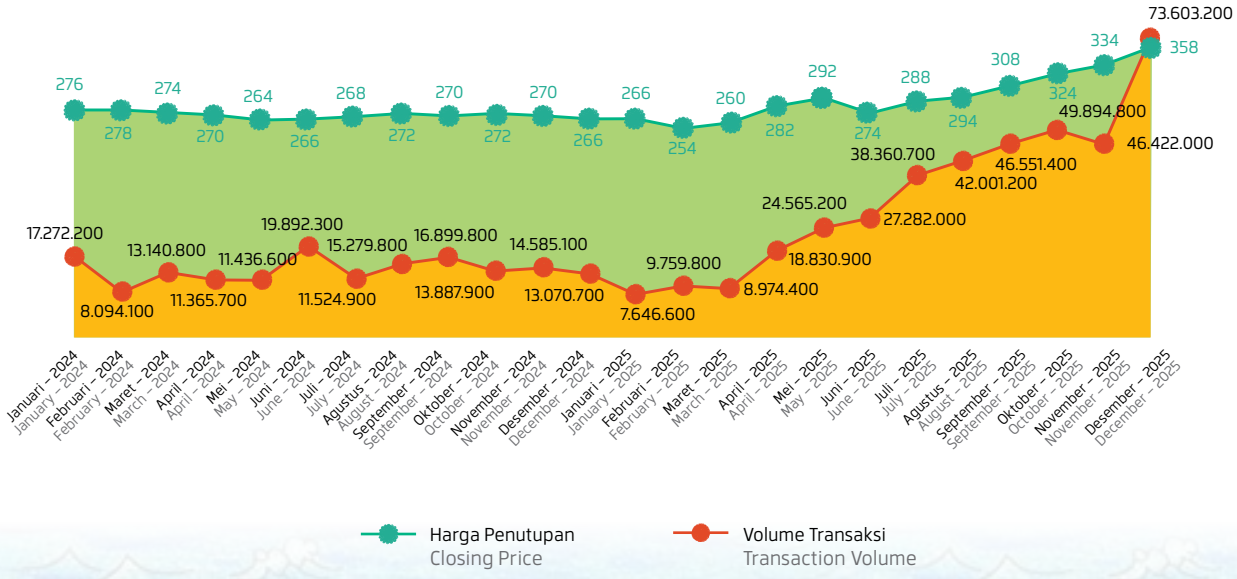


Informasi Saham
Stock Information

Kode saham: IPCM
Bursa Perdagangan Saham: Bursa Efek Indonesia (BEI)
Ticker code: IPCM
Stock Exchange: Indonesia Stock Exchange (IDX)

Periode Period	Harga per Saham Price per Share				Jumlah Saham Beredar (lembar) Issued Shares (share)	Volume Transaksi (lembar) Transaction Volume (share)	Kapitalisasi Pasar (Rp triliun) Market Capitalization (Rp trillion)
	Pembukaan Opening	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
2025							
Triwulan I Quarter I	266	270	238	260	5.276.771.300	26.380.800	1.374.050.886.000
Triwulan II Quarter II	260	304	246	274	5.276.771.300	70.678.100	1.448.038.241.400
Triwulan III Quarter III	274	312	264	308	5.276.771.300	116.913.300	1.627.721.818.800
Triwulan IV Quarter IV	308	372	302	358	5.284.811.100	169.920.000	1.891.962.373.800
2024							
Triwulan I Quarter I	280	288	272	274	5.276.771.300	38.507.100	1.448.038.241.400
Triwulan II Quarter II	274	280	260	266	5.276.771.300	42.694.600	1.405.759.752.600
Triwulan III Quarter III	266	274	260	270	5.276.771.300	43.704.500	1.426.898.997.000
Triwulan IV Quarter IV	270	274	256	266	5.276.771.300	41.543.700	1.405.759.752.600

Grafik Pergerakan Harga Saham Tahun 2024- 2025
Share Movement Chart 2024-2025



AKSI KORPORASI

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat kegiatan aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan. Dengan demikian, tidak tersedia informasi mengenai pelaksanaan aksi korporasi, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), pembagian dividen saham, penerbitan saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal yang mengakibatkan perubahan harga saham yang menyertainya.

PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*)

Hingga 31 Desember 2025, perdagangan saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia tetap berjalan tanpa pernah mengalami penghentian sementara (*suspension*) maupun pembatalan pencatatan saham (*delisting*). Adapun saham Perusahaan pun terus diperdagangkan hingga akhir periode tersebut.

CORPORATE ACTIONS

Throughout 2025, the Company did not perform any corporate actions. Accordingly, there is no information available regarding the implementation of corporate actions, including stock splits, reverse stock splits, stock dividend distributions, issuance of bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, or increases and decreases in capital that would result in changes to the share price.

TEMPORARY SUSPENSION OF SHARE TRADING AND/ OR DELISTING

As of December 31, 2025, the Company's shares continued to be traded on the Indonesia Stock Exchange without experiencing any temporary suspension of trading or delisting. The Company's shares remained actively traded through the end of the reporting period.



Informasi Mengenai Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi yang Masih Beredar

Information on Outstanding Bonds, Sharia Bond, or Convertible Bonds

OBLIGASI/SUKUK/OBLIGASI KONVERSI YANG BEREDAR (*OUTSTANDING*)

Pada tahun 2025, Perusahaan tidak melakukan penerbitan obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk pada Laporan Tahunan ini.

OUTSTANDING BONDS/SUKUK/CONVERTIBLE BONDS

In 2025, the Company did not issue any bonds, sharia bonds, or convertible bonds. Therefore, there is no information in this Annual Report regarding the amount of outstanding bonds/sharia bonds/convertible bonds, interest or return rates, maturity dates, or bond/sukuk ratings.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Information on Other Sources of Funding

Hingga 31 Desember 2025, Perusahaan belum memiliki pencatatan atas sumber pendanaan lainnya.

As of December 31, 2025, the Company had not recorded any other sources of funding.

Peristiwa Penting
Significant Events

Januari | January



1 Januari 2025
January 1, 2025

Last Call, First Call

Last Call Ship dan *First Call Ship* yang dilaksanakan pada pergantian tahun 2024–2025 di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai bentuk apresiasi terhadap kapal terakhir yang lepas tali dan kapal pertama yang bersandar. Kegiatan ini melibatkan PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) dengan dukungan armada kapal tunda, di mana Kapal Tunda Jayakarta I dan Bima II membantu pelepasan *last call ship* MV MSC Sijing, sementara Kapal Tunda Jayakarta I bersama Aqila Harbour menyandarkan *first call ship* MV Meratus Lembar.

Last Call Ship and First Call Ship are carried out at the change from 2024 to 2025 at Tanjung Priok Port as an appreciation to the last ship to come off and the first ship to lean on. This activity involves PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) with fleet support tugboat , where the Jayakarta I and Bima II tugboats assisted the release of the last call ship MV MSC Sijing , while the Jayakarta I Tugboat together with Aqila Harbour docked the first call ship MV Meratus Lembar.



13 Januari 2025
January 13, 2025

CEO *Direction*

Awal tahun 2025 tepatnya pada 13 Januari 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengawali langkah strategis melalui kegiatan *cascading* arahan dari holding Pelindo Group yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi internal manajemen. Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan capaian dan perjalanan perusahaan sepanjang tahun 2024 sekaligus menyusun langkah strategis ke depan.

At the beginning of 2025, precisely on January 13, 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk initiated a strategic step by cascading activity directions from the Pelindo Group holding, which were implemented through internal management discussions. These activities aimed to reflect on the Company's achievements and journey throughout 2024, while also formulating strategic steps for the future.



16 Januari 2025
January 16, 2025

Penandatanganan Kerjasama Langlang Tarakan
Signing of the Langlang Tarakan Cooperation Agreement

Pada 16 Januari 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) menjalin kolaborasi strategis dengan PT Langlang Laju Layang melalui penandatanganan perjanjian kerja sama penyediaan kapal tunda untuk mendukung layanan penundaan kapal di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara.

On January 16, 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) entered into a strategic collaboration with PT Langlang Laju Layang through the signing of a cooperation agreement for the provision of tugboat services to support ship towing operations at Tarakan Port, North Kalimantan.



Februari | February



11 Februari 2025
February 11, 2025

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025
Financial Services Industry Outlook 2025 Meeting

Pada 11 Februari 2025 di Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) berpartisipasi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 (PTIJK 2025) yang mengusung tema "Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional". Kegiatan ini dihadiri oleh Dessy Emastari selaku Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko yang mewakili IPCM, sekaligus mengikuti rangkaian Seminar Pengembangan Sektor Jasa Keuangan bertajuk "Unlocking Potential Financial Derivatives Development".
On February 11, 2025, in Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) participated in the Financial Services Industry Annual Meeting 2025 (PTIJK 2025), which carried the theme "Strengthening a Stable and Inclusive Financial Services Sector to Support National Priority Programs." The event was attended by Dessy Goldfish, Director of Finance, HR, and Risk Management, representing IPCM. The Company also took part in a series of Financial Services Sector Development Seminars titled "Unlocking the Potential of Financial Derivatives Development".



24 Februari 2025
February 24, 2025

Rapat Kerja SPJM Group
SPJM Group Working Meeting

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menghadiri Rapat Kerja Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Group pada 24–25 Februari 2025 di Surabaya bersama jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Dewan Komisaris, dan Direksi SPJM Group. Mengusung tema "Providing Service Excellence and Consistently Exceeding Customer Expectations to Build Thriving Business".
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) attended the Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Subholding Group Working Meeting on February 24–25, 2025, in Surabaya, together with representatives from PT Pelabuhan Indonesia (Persero), the Board of Commissioners, and the Board of Directors of the SPJM Group. The meeting carried the theme "Providing Service Excellence and Consistently Exceeding Customer Expectations to Build a Thriving Business".



28 Februari 2025
February 28, 2025

Rapat Kerja IPCM 2025
IPCM 2025 Working Meeting

Pada 28 Februari 2025 di Ciawi, Bogor, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menyelenggarakan Rapat Kerja (RAKER) 2025 yang dihadiri oleh Direksi PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), Dewan Komisaris, serta jajaran manajemen. Mengusung tema "Navigating Sustainable Services to Build Business Resilience", kegiatan ini bertujuan menyelaraskan strategi perusahaan yang inovatif dan berbasis manajemen risiko.
On February 28, 2025, in Ciawi, Bogor, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) held its 2025 Working Meeting (RAKER), which was attended by the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), the Board of Commissioners, and management. The meeting carried the theme "Navigating Sustainable Services to Build Business Resilience", and the activity aimed to align innovative and risk-based business strategies across the organization.

Maret | March



18 Maret 2025
March 18, 2025

Samuel Sekuritas Meeting
Samuel Securities Meeting

Pada 18 Maret 2024 di Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) berkolaborasi dengan IPCC dan PII menyelenggarakan Diskusi Pasar Modal dan Proyeksi Ekonomi bersama Samuel Sekuritas yang melibatkan jajaran manajerial serta ekonom senior. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembaruan terkait perkembangan pasar modal dan proyeksi kondisi perekonomian.
On March 18, 2025, in Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM), in collaboration with IPCC and PII, organized a Capital Market and Economic Projection Discussion with Samuel Securities. The event involved managerial-level participants as well as a senior economist. This activity aimed to provide updates on capital market developments and economic outlook projections.



19 Maret 2025
March 19, 2025

JWELL dan TJSL Berbagi Ramadhan
JWELL and TJSL Ramadan Sharing

Pada Rabu, 19 Maret 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) kembali menyelenggarakan program J-Well (JAI Wellness) sebagai bagian dari JANGKAR (JAI Ngajak Bicara) yang berfokus pada *Employee Wellbeing Program*. Kegiatan yang dilaksanakan secara *hybrid* ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1446 H dengan tema "Menjadi Pribadi yang Berarti: Menyelaraskan Diri dengan Tujuan Ilahi". Menghadirkan dr. Aisah Dahlan sebagai pembicara.
On Wednesday, March 19, 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) once again organized the J-Well (JAI Wellness) program as part of JANGKAR (JAI Ngajak Talk), focusing on the Employee Wellbeing Program. The activity was conducted in a hybrid format and held during the holy month of Ramadan 1446 H, carrying the theme "Becoming a Meaningful Person: Aligning Yourself with Divine Purpose." The session featured Dr. Aisah Dahlan as the speaker.



21 Maret 2025
March 21, 2025

Meeting Kesiapan Arus Mudik 1446 H
1446 H Eid Homecoming Flow Readiness Meeting

Menjelang arus mudik Lebaran 1446 H/2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menyatakan kesiapan penuh dalam memberikan layanan pemanduan dan penundaan kapal secara optimal guna mendukung kelancaran transportasi laut bagi para pemudik. Kesiapan ini menjadi bagian dari komitmen Perusahaan dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta memastikan pelayanan yang andal selama periode mudik berlangsung.
In preparation for the 1446 H/2025 Eid homecoming (mudik) period, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) expressed its full readiness to provide pilotage and towing services optimally to support the smooth flow of sea transportation for travelers. This readiness reflects the Company's commitment to maintaining port operational continuity, enhancing maritime safety, and ensuring reliable services during the homecoming period.





26 Maret 2025
March 26, 2025

Mudik Bersama Pelindo Group 2025
Pelindo Group 2025 Free Homecoming Program

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) sebagai bagian dari Pelindo Group turut mendukung program Mudik Gratis Pelindo Group 2025 bertema "Mudik Aman Sampai Tujuan" yang dilaksanakan pada 26 Maret 2025 di Lapangan 223x, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Direksi IPCM dan menjadi bagian dari pelepasan ribuan pemudik oleh manajemen Pelindo. Program ini merupakan wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam mendukung masyarakat merayakan Idul Fitri di kampung halaman serta sejalan dengan arahan Kementerian BUMN.

As part of the Pelindo Group, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) participated in supporting the 2025 Free Homecoming Program under the theme "Safe Homecoming to Your Destination," held on March 26, 2025, at Field 223x, Tanjung Priok Port, Jakarta. The event was attended by IPCM's Board of Directors and formed part of the official send-off for thousands of travelers by Pelindo management. This program represents the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) initiative to support the public in celebrating Eid al-Fitr in their hometowns, in line with the direction of the Ministry of SOE.

April | April



22 April 2025
April 22, 2025

***Training Of Trainee* (TOT) SIGAP SPJM**

Pada 22–25 April 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) mengikuti pelatihan Aplikasi SIGAP Fase 1 (Pre-Go Live) yang diselenggarakan oleh *Subholding* Pelindo Jasa Maritim (SPJM) di Kantor Pusat dan *Central Workshop* (CWS) Area 1 IPCM. Pelatihan yang dipimpin oleh SVP Kapal dan Pengelolaan Alur SPJM ini bertujuan untuk mempersiapkan implementasi sistem manajemen pemeliharaan alat apung.

On April 22–25, 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) participated in the SIGAP Phase 1 (Pre-Go Live) training organized by the Pelindo Jasa Maritim (SPJM) Subholding. The training was held at IPCM's Head Office and Central Workshop (CWS) Area 1. The program was led by SPJM's SVP of Ship and Channel Management and aimed to support the implementation of a maintenance management system for floating equipment.



28 April 2025
April 28, 2025

Mou Pelayanan Jasa Kapal dengan PT Sekawan Terminal Samudera di Palembang
Mou of Cooperation Agreement with PT Sekawan Terminal Samudera in Palembang

Pada 28 April 2025 di Palembang, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menandatangani Nota Kesepahaman dengan BUP PT Sekawan Terminal Samudera (PT STS) terkait pelayanan jasa kapal dan sub-unit usaha, yang dihadiri oleh Direktur Utama masing-masing perusahaan. Kerja sama ini bertujuan membangun sinergi usaha yang saling menguntungkan melalui optimalisasi sumber daya, khususnya dalam pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah *Ship to Ship* (STS) Ambang Luar Sungai Musi, Sumatera Selatan.

On April 28, 2025, in Palembang, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) signed a Memorandum of Understanding with PT Sekawan Terminal Samudera (PT STS), a Port Business Entity (BUP), concerning ship service operations and related business sub-units. The signing was attended by the Presidents Director of both companies. This collaboration aims to build mutually beneficial synergies through the optimization of resources, particularly in pilotage and towing services in the Ship-to-Ship (STS) area at the outer anchorage of the Musi River, South Sumatra.

Mei | May



28-30 April 2025
April 28-30, 2025

Survei Kepuasan Pelanggan STS Palembang
Customer Satisfaction Survey, STS Palembang

Pada 28–30 April 2025 di Palembang, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menyelenggarakan kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) dan Customer Awards Tahun 2024 di wilayah *Ship to Ship* (STS) Ambang Luar Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dibuka oleh General Manager Area IV IPCM dan dihadiri oleh 25 pengguna jasa, dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan pelanggan sekaligus meningkatkan mutu layanan.
On April 28-30, 2025, in Palembang, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) conducted a Customer Satisfaction Survey (SKP) along with the 2024 Customer Awards in the Ship-to-Ship (STS) area at the outer anchorage of the Musi River, South Sumatra. The event was officially opened by the General Manager of IPCM Area IV and attended by 25 service users. It aimed to measure customer satisfaction levels while enhancing service quality.



7 Mei 2025
May 7, 2025

Kunjungan Kerja Stockbit
Working Visit to Stockbit

Pada tanggal 7 Mei 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengunjungi Kantor PT Stockbit Sekuritas Digital. Kunjungan ini membahas beberapa kegiatan bersama yang akan dijalankan dan mengupdate perkembangan ekonomi saat ini serta kondisi IPCM.
On May 7, 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) conducted a working visit to the office of PT Stockbit Digital Securities. The visit discussed several potential collaborative initiatives, as well as updates on current economic developments and IPCM's business performance.



21-22 Mei 2025
May 21-22, 2025

Musyawarah Cabang (MUSCAB) DPC SPPI JAI
DPC SPPI JAI Branch Conference (MUSCAB)

Pada 21–22 Mei 2025 di Bandung, DPC SPPI Bersatu PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menyelenggarakan Musyawarah Cabang (MUSCAB) yang dihadiri oleh jajaran manajemen, termasuk Direktur Armada dan Operasi serta Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi organisasi, menyelaraskan program kerja, serta meningkatkan sinergi antar anggota dalam mendukung kinerja perusahaan, dan berlangsung dengan lancar serta partisipatif.
On May 21-22, 2025, in Bandung, the DPC SPPI Bersatu of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) held its Branch Conference (MUSCAB), attended by management, including the Director of Fleet and Operations as well as the Director of Finance, HR, and Risk Management. The event aimed to strengthen organizational coordination, align work programs, and enhance synergy among members in supporting the Company's performance. The conference was conducted smoothly and in a participatory manner.



26 Mei 2025
May 26, 2025

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Bukit Prima Bahari
Signing of a Memorandum of Understanding with PT Bukit Prima Bahari

Pada 26 Mei 2025 di Gedung Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menjalin kerja sama strategis dengan PT Bukit Prima Bahari (BPB) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pelayanan *customer priority* jasa kapal dan sub-unit usaha di wilayah STS Ambang Luar Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan.
On May 26, 2025, at Kadin Tower, Kuningan, South Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) established a strategic cooperation with PT Bukit Prima Bahari (BPB) through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU). The cooperation covers priority ship services and related business sub-units in the Ship-to-Ship (STS) outer anchorage area of the Musi River, Palembang, South Sumatra.



Juni | June



26 – 27 Mei 2025
May 26 – 27, 2025

Indonesian Maritime Week (IMW) 2025 - Womens Forum

Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Shanti Puruhita, berpartisipasi sebagai pembicara dalam Women's Forum yang merupakan bagian dari Indonesia Maritime Week 2025 di Jakarta Convention Center (JCC). Mengusung tema "An Ocean of Opportunities for Women: Women's Participation in Male-Dominated Maritime Industry" dengan sub tema "Navigating New Horizons, Break the Limits", forum ini menjadi wadah untuk mendorong peran perempuan di industri maritim.

Shanti Puruhita, Director of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM), participated as a speaker in the Women's Forum, part of Indonesia Maritime Week 2025 held at the Jakarta Convention Center (JCC). Carrying the theme "An Ocean of Opportunities for Women: Women's Participation in a Male-Dominated Maritime Industry" and the sub-theme "Navigating New Horizons, Break the Limits," the forum served as a platform to promote and strengthen the role of women in the maritime industry.



11 Juni 2025
June 11, 2025

Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) Pelabuhan Laiwui Obimayor Maluku Utara
Customer Satisfaction Survey (SKP) of Laiwui Port, Obimayor, North Maluku

Pada 11 Juni 2025 diLaiwui, Maluku Utara, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menyelenggarakan kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) Tahun 2024 di wilayah Laiwui Obimayor Maluku Utara. Kegiatan ini bertujuan mengukur tingkat kepuasan pelanggan sekaligus meningkatkan mutu layanan.

On June 11, 2025, in Laiwui, North Maluku, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) conducted a Customer Satisfaction Survey (SKP) for 2024 in the Laiwui Port area, Obimayor, North Maluku. The activity aimed to measure customer satisfaction levels while improving service quality.



12 Juni 2025
June 12, 2025

Pengenalan *Hybrid* Sistem Motor Pandu
Introduction of Hybrid Pilot Boat Engine System

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) terus berkontribusi dalam mewujudkan pelabuhan ramah lingkungan melalui inovasi pengurangan emisi armada, yang pada tahun 2025 diwujudkan melalui peluncuran Sistem *Hybrid* pada *Auxiliary Engine* Kapal Pandu di Stasiun Pandu Pelabuhan Tanjung Priok, bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia. Inovasi yang dikembangkan oleh tim IPCM Area I dan V ini merupakan hasil kompetisi Pelindo Idea Tingkat SPJM Group Tahun 2024 dan telah mencapai tahap *Final Showcase* sebelum direalisasikan dalam operasional. Kegiatan ini menunjukkan komitmen IPCM dalam menghadirkan solusi berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi dan kinerja layanan maritim.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) continues to contribute to the development of environmentally friendly ports through emission reduction innovations in its fleet. In 2025, this commitment was realized through the introduction of a Hybrid System for the pilot boat auxiliary engine at the Tanjung Priok Port Pilot Station, in conjunction with the commemoration of World Oceans Day. This innovation was developed by IPCM Area I and Area V teams and originated from the Pelindo Idea Competition at the SPJM Group level in 2024, where it reached the Final Showcase stage before being implemented operationally. This initiative reflects IPCM's commitment to delivering sustainable solutions while enhancing efficiency and maritime service performance.

Juli | July



18 Juni 2025
June 18, 2025

RUPST Tahun Buku 2026
AGMS of 2026 Fiscal Year

Pada 18 Juni 2025 di Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 yang membahas dan menyetujui penggunaan laba Perusahaan serta perubahan susunan pengurus. Kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemegang saham sekaligus penegasan komitmen IPCM dalam menjaga kinerja positif ke depan. RUPST berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan apresiasi kepada seluruh pemegang saham, pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan atas dukungan yang terus mendorong pertumbuhan dan inovasi perusahaan di industri maritim Indonesia.
On June 18, 2025, in Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2024 fiscal year which discussed and approved the appropriation of the Company's profit and changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners. The AGMS serves as a form of accountability to shareholders and reaffirms IPCM's commitment to maintaining positive performance going forward. The meeting was conducted smoothly and concluded with appreciation to all shareholders, customers, business partners, and stakeholders for their continued support in driving the Company's growth and innovation in Indonesia's maritime industry.



10 Juli 2025
July 10, 2025

HUT IPCM Ke-12 "Beyond Maritime Resilience"
IPCM 12th Anniversary "Beyond Maritime Resilience"

Pada 10 Juli 2025 di Kantor Pusat PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM), diselenggarakan peringatan HUT IPCM ke-12 mengusung tema "Beyond Maritime Resilience". Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen dan insan IPCM serta menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen perusahaan ke depan.
On July 10, 2025, at the Head Office of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM), the Company celebrated its 12th anniversary under the theme "Beyond Maritime Resilience." The event was attended by IPCM's management and employees and served as a moment for reflection as well as strengthening the company's commitment going forward.



22 Juli 2025
July 22, 2025

***Coffee Morning Stakeholder* & Pengguna Jasa Pelindo Regional 2 Palembang**
Coffee Morning with Stakeholders & Service Users of Pelindo Regional 2 Palembang

Kegiatan *Coffee Morning Stakeholder* & Pengguna Jasa Pelindo Regional 2 Palembang yang diselenggarakan 22 Juli 2025 merupakan forum komunikasi dan sinergi antara Pelindo Group bersama para pemangku kepentingan serta pengguna jasa kepelabuhanan di wilayah Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi, menyerap masukan, serta meningkatkan kualitas layanan operasional guna mendukung kelancaran arus logistik dan distribusi komoditas nasional.
The Coffee Morning event with stakeholders and service users of Pelindo Regional 2 Palembang, held on July 22, 2025, served as a communication and synergy forum between the Pelindo Group, stakeholders, and port service users in the Palembang area. The activity aimed to strengthen collaboration, gather feedback, and enhance service quality to support the smooth flow of national logistics and commodity distribution.





25 Juli 2025
July 25, 2025

Kerja sama PT Jasa Armada Indonesia Tbk dan PT TPB
Cooperation between PT Jasa Armada Indonesia Tbk and PT TPB

Telah dilakukan penandatanganan komitmen pelayanan Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal Di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Wilayah Pelabuhan Banten. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal untuk kapal-kapal yang diageni oleh PT Titra Permai Bahari.
A commitment agreement for pilotage and towage services in Class I mandatory pilotage waters within the Banten Port Area has been signed. This was done to optimize pilotage and towage services for vessels represented by PT Titra Permai Bahari.



26 Juli 2025
July 26, 2025

Medan Investor Meeting and Connectivity 2025
Medan Investor Meeting and Connectivity 2025

Pada 25 Juli 2025 di Medan, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) turut berpartisipasi dalam Medan Investor Meeting and Connectivity 2025 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam kegiatan ini, IPCM hadir sebagai pemateri dalam diskusi panel dengan tujuan memperkuat komunikasi dengan investor serta mendukung pengembangan ekosistem pasar modal di wilayah Sumatera Utara.
On July 25, 2025, in Medan, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) participated in the Medan Investor Meeting and Connectivity 2025 organized by the Indonesia Stock Exchange (IDX). In this event, IPCM participated as a speaker in a panel discussion, aiming to strengthen communication with investors and support the development of the capital market ecosystem in the North Sumatra region.

Agustus | August



7 Agustus 2025
August 7, 2025

Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
Cooperation Agreement with the North Jakarta District Attorney's Office

Pada 7 Agustus 2025 di Pelindo Tower, Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) sebagai bagian dari Pelindo Group menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
On August 7, 2025, at Pelindo Tower, Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM), as part of the Pelindo Group, signed a Cooperation Agreement with the North Jakarta District Attorney's Office. This collaboration aims to optimize the implementation of the duties and functions of both parties in the fields of civil law and state administration.



8 Agustus 2025
August 8, 2025

***Coffee Morning* dalam Rangka Koordinasi Lintas Sektoral di Pelabuhan Tanjung Priok**
Coffee Morning as Part of Cross-Sectoral Coordination at Tanjung Priok Port

Kegiatan *Coffee Morning* dalam rangka koordinasi lintas sektoral di Pelabuhan Tanjung Priok pada 8 Agustus 2025 merupakan forum sinergi antar pemangku kepentingan kepelabuhanan yang melibatkan operator pelabuhan, regulator, serta pengguna jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi operasional, menyelaraskan kebijakan, serta mengidentifikasi berbagai peluang peningkatan efisiensi dalam mendukung kelancaran arus kapal dan logistik nasional di pelabuhan terbesar di Indonesia.
The Coffee Morning activity held on August 8, 2025, as part of cross-sectoral coordination at Tanjung Priok Port, serves as a synergy forum among port management stakeholders, including operators, regulators, and service users. This activity aims to strengthen operational coordination, align policies, and identify opportunities to improve efficiency in supporting the smooth flow of ships and national logistics at Indonesia's largest port.



21 Agustus 2025
August 21, 2025

Survei Kepuasan Pelanggan Area 5 IPCM 2025
IPCM 2025 Customer Satisfaction Survey at Area 5

Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan Area 5 IPCM 2025 pada 21 Agustus 2025 merupakan bagian dari komitmen PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) dalam memastikan kualitas layanan yang berorientasi pada kebutuhan dan ekspektasi pengguna jasa. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan pemanduan dan penundaan kapal, sekaligus mengidentifikasi area peningkatan guna mendukung kinerja operasional yang lebih optimal.
The IPCM 2025 Customer Satisfaction Survey for Area 5, conducted on August 21, 2025, is part of PT Jasa Armada Indonesia Tbk's (IPCM) commitment to ensuring service quality that is aligned with the needs and expectations of service users. This survey aims to measure customer satisfaction with pilotage and towage services, while also identifying areas for improvement to support more optimal operational performance.



26 Agustus 2025
August 26, 2025

Sinergi TJSL INSA dan IPCM
TJSL Synergy between INSA and IPCM

Pada 26 Agustus 2025 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) bersama INSA melaksanakan kegiatan penanaman mangrove dalam rangka program TJSL sekaligus peringatan HUT INSA ke-58. Kegiatan ini bertujuan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir melalui semangat kolaborasi.
On August 26, 2025, at Angke Kapuk Nature Tourism Park, North Jakarta, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM), in collaboration with INSA, carried out a mangrove planting activity under the TJSL program, in conjunction with the 58th anniversary of INSA. This initiative aims to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) and preserve coastal ecosystems through a spirit of collaboration.

September | September



4-6 September 2025
September 4-6, 2025

Asia - Pacific Maritime Pilots, Vietnam
Asia-Pacific Maritime Pilots Forum, Vietnam

Kegiatan Asia-Pacific Maritime Pilots di Vietnam pada 4–6 September 2025 yang diikuti oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) merupakan forum internasional yang mempertemukan para praktisi pemanduan kapal untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam meningkatkan keselamatan serta efisiensi layanan, sekaligus mencerminkan komitmen IPCM dalam mengadopsi standar global, memperkuat kompetensi SDM, dan memperluas jejaring internasional guna meningkatkan daya saing serta mendukung peran strategis perusahaan dalam ekosistem maritim nasional.
The Asia-Pacific Maritime Pilots event held in Vietnam on September 4–6, 2025, and attended by PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM), is an international forum that brings together maritime pilotage practitioners to share knowledge, experiences, and best practices in enhancing safety and service efficiency. The event also reflects IPCM's commitment to adopting global standards, strengthening human resource competencies, and expanding international networks to enhance competitiveness and support the Company's strategic role in the national maritime ecosystem.





9 September 2025
September 9, 2025

IPCM *Public Expose* 2025
IPCM Public Expose 2025

Pada 9 September 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) berpartisipasi dalam *Public Expose* (Pubex) *Live* 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
On September 9, 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) participated in the Public Expose (Pubex) Live 2025, which was held virtually by the Indonesia Stock Exchange, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, and Indonesian Central Securities Depository, with the support of the Financial Services Authority (OJK).



17 September 2025
September 17, 2025

RAKERCAB SPPI Bersatu DPC PT JAI Tbk 2025
SPPI Bersatu Branch Executive Committee Meeting of the PT JAI Tbk Branch 2025

Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) Tahun 2025 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia Bersatu (SPPIB) PT JAI Tbk dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara manajemen dan serikat pekerja dalam menyelaraskan program kerja serta mendukung kinerja Perusahaan.
The 2025 Branch Working Meeting (RAKERCAB) of the Branch Leadership Council (DPC) of the United Indonesian Port Workers Union (SPPIB) of PT JAI Tbk was held on September 17, 2025. This activity aimed to strengthen synergy between management and the labor union in aligning work programs and supporting the company's performance.

Oktober | October



9 – 10 Oktober 2025
October 9 – 10, 2025

***Management Walkthrough* Direksi dan Dewan Komisaris Area V**
Management Walkthrough by the Board of Directors and Board of Commissioners at Area V

Pada 9–10 Oktober 2025, jajaran Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) melaksanakan *Management Walkthrough* di wilayah operasional Area V, yakni Pelabuhan Patimban dan Cirebon, sebagai bagian dari komitmen terhadap keselamatan kerja (K3), efisiensi operasional, dan penguatan budaya kerja positif.
On October 9–10, 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) conducted a Management Walkthrough in the operational area of Area V, covering Patimban and Cirebon Ports. This activity reflects the Company's commitment to occupational health and safety (OHS), operational efficiency, and the strengthening of a positive work culture.



10 Oktober 2025
October 10, 2025

Pelindo Mengajar SMK Pelayaran Buana Bahari
Pelindo Teaches at Buana Bahari Maritime Vocational School

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) sebagai bagian dari Pelindo Group berpartisipasi dalam program Pelindo Mengajar 2025 yang dilaksanakan di SMK Pelayaran Buana Bahari, Cirebon. Dalam kegiatan ini, Direktur Utama IPCM hadir sebagai narasumber dengan berbagi pengalaman dan wawasan mengenai industri kepelabuhanan kepada para siswa.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM), as part of the Pelindo Group, participated in the Pelindo Mengajar 2025 program held at Buana Bahari Maritime Vocational School, Cirebon. On this occasion, IPCM's President Director attended as a speaker, sharing insights and experiences related to the port industry with students.



27 Oktober 2025
October 27, 2025

***Kick Off Meeting* Audit Laporan Keuangan 2025 IPCM**
Audit Kick-Off Meeting for IPCM 2025 Financial Statements

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) mengadakan *Kick Off Meeting* Audit Laporan Keuangan 2025 bersama Ernst & Young (EY) sebagai penanda dimulainya proses audit. Kegiatan ini bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG), dan berlangsung secara profesional sebagai bagian dari komitmen IPCM dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) held a Kick-Off Meeting for the 2025 Financial Statement Audit with Ernst & Young (EY), marking the commencement of the audit process. This activity aims to ensure transparency, accountability, and the professional and continuous implementation of good corporate governance (GCG), as part of IPCM's commitment to maintaining stakeholder trust.



13 November 2025
November 13, 2025

Penandatanganan PT JAI Tbk dan PT PBP
Signing of Cooperation Agreement between PT JAI Tbk and PT PBP

Pada 13 November 2025 di Pelindo Tower, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Pelabuhan Bukit Prima terkait pelayanan jasa penundaan kapal di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik PT Bukit Asam Tbk. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi usaha serta mendukung kelancaran operasional dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), dan berlangsung dengan lancar sebagai wujud komitmen peningkatan layanan maritim.
On November 13, 2025, at Pelindo Tower, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) signed a cooperation agreement with PT Pelabuhan Bukit Prima regarding vessel mooring services at the Private-Use Terminal (TUKS) owned by PT Bukit Asam Tbk. This collaboration aims to strengthen business synergy and support operational efficiency by prioritizing the principles of Good Corporate Governance, and proceeded smoothly as a manifestation of the commitment to improving maritime services.



27 November 2025
November 27, 2025

Audit Sistem Manajemen Terpadu
Integrated Management System Audit

Kegiatan Audit Sistem Manajemen Terpadu PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) Tahun 2026 merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap penerapan standar manajemen perusahaan yang mencakup aspek operasional, keselamatan, kualitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Audit ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai standar yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keandalan layanan Perusahaan.
The Integrated Management System Audit of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) for 2026 is a comprehensive evaluation process of the Company's management standards, covering operational, safety, quality, and regulatory compliance aspects. This audit aims to ensure that all business processes are carried out in accordance with established standards, while also identifying opportunities for continuous improvement to enhance effectiveness, efficiency, and service reliability.



Desember | December



8 Desember 2025

December 8 , 2025

IPCM Mendapatkan 3 Penghargaan pada Annual Report Award 2024
IPCM Wins Three Awards at the 2024 Annual Report Awards

PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) yang merupakan bagian dari Pelindo Group kembali menorehkan prestasi dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2024 yang diselenggarakan di Bursa Efek Indonesia dengan meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu Juara 1 BUMN Klaster 1T–5T, Juara Umum Klaster 1T–5T, dan Juara Umum Perusahaan Go Public Non Keuangan.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM), part of the Pelindo Group, once again achieved notable recognition at the Annual Report Award 2024 held at the Indonesia Stock Exchange, securing three awards simultaneously: 1st Place in the BUMN Cluster (IDR 1T–5T), Overall Champion in the BUMN Cluster (IDR 1T–5T), and Overall Champion in the Non-Financial Public Company category.



10 Desember 2025

December 10, 2025

Survei Kepuasan Pelanggan di Terminal Khusus (Tersus) PT Nusantara Regas
Customer Satisfaction Survey at PT Nusantara Regas's Dedicated Terminal

Pada 10 Desember 2025 telah dilakukan Survei Kepuasan Pelanggan untuk pelayanan jasa kapal di Terminal Khusus (Tersus) PT Nusantara Regas. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan, ketidakpuasan dan loyalitas pelanggan, serta menilai persepsi pelanggan secara objektif terhadap kinerja PT Jasa Armada Indonesia Tbk di Terminal Khusus (Tersus) PT Nusantara Regas.
On December 10, 2025, a Customer Satisfaction Survey was conducted regarding vessel services at the Special Terminal of PT Nusantara Regas. This initiative was undertaken to measure customer satisfaction, dissatisfaction, and loyalty, as well as to objectively assess customer perceptions of the performance of PT Jasa Armada Indonesia Tbk at the Special Terminal of PT Nusantara Regas.



18 Desember 2025

December 18, 2025

Wujud Peduli Lingkungan, IPCM Tanam Mangrove di Kabupaten Bekasi
Environmental Care Initiative: IPCM Plants Mangroves in Bekasi Regency

Pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) berkolaborasi dengan PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) melaksanakan kegiatan penanaman 2.000 pohon mangrove sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan pesisir. Kegiatan ini bertujuan menjaga ekosistem, mencegah abrasi, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitar.
On December 18, 2025, in Bekasi Regency, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM), in collaboration with PT Energi Pelabuhan Indonesia, carried out the planting of 2,000 mangrove trees as part of its commitment to coastal environmental preservation. This initiative aims to protect ecosystems, prevent coastal abrasion, and support environmental sustainability for surrounding communities.



23 Desember 2025

December 23, 2025

MoU Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus antara PT JAI Tbk dan PT Nusantara Regas

MoU on Ship Services at Special Terminals between PT JAI Tbk and PT Nusantara Regas

Pada 23 Desember 2025 di Gedung Wisma Nusantara Lt. 19, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) melanjutkan kerja sama dengan PT Nusantara Regas sebagai operator FSRU Jawa Barat dalam pelayanan jasa kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas. Kerja sama ini bertujuan menjaga kepastian distribusi *Liquefied Natural Gas* (LNG) guna mendukung kelancaran operasional regasifikasi yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan listrik di Jakarta dan Jawa Barat. Kegiatan ini mencerminkan komitmen kedua Perusahaan dalam memperkuat keandalan infrastruktur energi nasional.

On December 23, 2025, at the 19th Floor of Wisma Nusantara Building, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) strengthened its cooperation with PT Nusantara Regas, the operator of the West Java FSRU, in providing ship services at its Special Terminal. This collaboration aims to ensure the reliability of Liquefied Natural Gas (LNG) distribution to support regasification operations, which play a vital role in meeting electricity demand in Jakarta and West Java. The initiative reflects both companies' commitment to strengthening national energy infrastructure reliability.



24 Desember 2025

December 24, 2025

IPCM Pastikan Kesiapan Pelayanan Pada Nataru 2025

IPCM Ensures Service Readiness During Christmas and New Year 2025

Pada 24 Desember 2025, IPCM Pastikan Kesiapan Pelayanan pada Nataru 2025 merupakan langkah strategis PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) dalam memastikan kesiapan operasional layanan pemanduan dan penundaan kapal selama periode Natal dan Tahun Baru yang identik dengan peningkatan aktivitas pelayaran dan distribusi logistik. Persiapan ini mencakup kesiapan armada, optimalisasi sumber daya manusia, serta penguatan aspek keselamatan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan kepelabuhanan.

On December 24, 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) ensured service readiness for the Christmas and New Year 2025 period, a strategic step to maintain optimal pilotage and towage services amid increased shipping activity and logistics distribution. Preparations included fleet readiness, optimization of human resources, and strengthening safety measures, as well as coordination with all port stakeholders.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Laporan Manajemen
Management Report



Dewan Komisaris dan Direksi memastikan seluruh agenda strategis dieksekusi secara terukur dan akuntabel, dengan transparansi tata kelola sebagai landasan kepercayaan dalam setiap pengambilan keputusan sepanjang tahun.

The Board of Commissioners and the Board of Directors ensured that all strategic agendas were executed in a measurable and accountable manner, with governance transparency serving as the foundation of trust in every decision-making process throughout the year.





Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

Pencapaian skor ACGS sebesar 124,67 poin mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengarahkan Perusahaan pada jalur pertumbuhan yang sehat, sekaligus memperkuat fondasi tata kelola menuju *Leadership in Corporate Governance*.
The ACSG score of 124.67 poin represents the success of the management team in directing the Company towards more favorable growth, while also strengthening the corporate governance foundation to become the Leader in Corporate Governance.

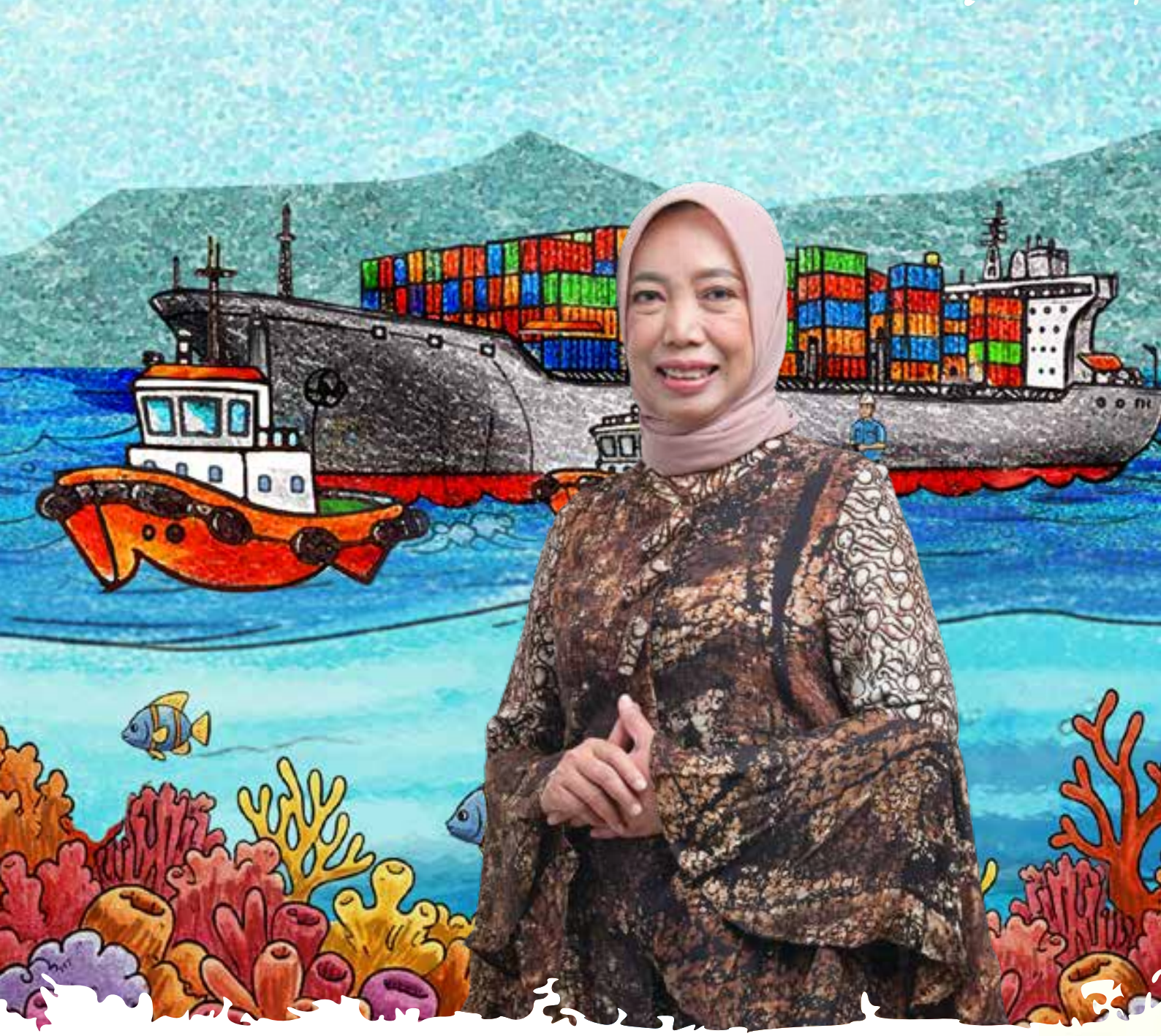
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Honorable Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinan Perusahaan melalui tahun 2025 dengan berbagai pencapaian kinerja yang patut disyukuri. Pada Laporan Tahunan ini, Dewan Komisaris menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tahun buku 2025, sebagai bagian dari tanggung jawab dalam memastikan pengelolaan Perusahaan berlangsung secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap arah strategi serta kebijakan-kebijakan penting yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direksi dalam pengelolaan Perusahaan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil oleh manajemen

We give praise and thanks to God Almighty for His mercy and grace, which have enabled the Company to achieve various milestones worthy of gratitude in 2025. In this Annual Report, the Board of Commissioners presents a report on the performance of its supervisory functions throughout the 2025 fiscal year, as part of its responsibility to ensure that the Company is managed effectively and in accordance with the principles of good corporate governance.

In carrying out these duties, the Board of Commissioners actively oversees the strategic direction and key policies established and executed by the Board of Directors in managing the Company. This oversight is conducted to ensure that every strategic step from the management aligns with the Company's interests and remains within



sejalan dengan kepentingan Perusahaan, serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Perekonomian global sepanjang tahun 2025 berada dalam fase pertumbuhan yang relatif moderat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% pada 2025, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi yang berada di kisaran 3,7%. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan di negara-negara maju, di mana kelompok ekonomi maju diperkirakan hanya tumbuh sekitar 1,6%, sementara negara berkembang tetap menjadi motor utama pertumbuhan global dengan tingkat pertumbuhan di atas 4%. Selain itu, meningkatnya fragmentasi perdagangan global, ketidakpastian kebijakan ekonomi, serta kondisi keuangan global yang lebih ketat turut memengaruhi

the framework of applicable laws, regulations, and the principles of good corporate governance.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTS

Throughout 2025, the global economy remained in a relatively moderate growth phase amid rising economic and geopolitical uncertainty. The IMF projected global economic growth of 3.2% in 2025, lower than the pre-pandemic average growth rate of around 3.7%. This deceleration is mainly driven by weaker growth in advanced economies, which are projected to grow by only about 1.6%, while emerging economies remain the primary engine of global growth, with rates exceeding 4%. Additionally, increased fragmentation of global trade, economic policy uncertainty, and tighter global financial conditions are also influencing the dynamics of international trade. Given that more than 80% of global goods trade is transported by sea, global economic



dinamika perdagangan internasional. Mengingat lebih dari 80% perdagangan barang dunia diangkut melalui jalur laut, perkembangan ekonomi global memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas perdagangan maritim dan permintaan layanan transportasi laut serta jasa kepelabuhanan.

Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diprakirakan berada pada kisaran 4,7%–5,5%, didukung oleh permintaan domestik yang solid, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta inflasi yang tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Stabilitas ini juga diperkuat oleh sinergi kebijakan antara pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk pengembangan konektivitas logistik dan pelabuhan, turut mendorong efisiensi distribusi barang dan mobilitas perdagangan antarwilayah di Indonesia. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan aktivitas pelayaran dan pergerakan kapal di berbagai pelabuhan nasional, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan layanan maritim seperti pemanduan dan penundaan kapal.

Apabila dilihat dari perspektif industri, perdagangan laut global masih mengalami pertumbuhan meskipun dengan laju yang lebih moderat. Berdasarkan analisis *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), volume perdagangan laut dunia tercatat mencapai sekitar 12,72 miliar ton pada 2024 dengan pertumbuhan sekitar 2,2%, mencerminkan pemulihan aktivitas perdagangan global pasca gangguan rantai pasok dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, pada 2025 pertumbuhan perdagangan laut diperkirakan melambat menjadi sekitar 0,5%, sementara perdagangan peti kemas diproyeksikan tumbuh sekitar 1,4%. Dalam jangka menengah hingga 2030, perdagangan maritim global diperkirakan kembali tumbuh stabil dengan rata-rata sekitar 2% per tahun. Perlambatan jangka pendek tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian perdagangan global, perubahan struktur rantai pasok internasional, serta meningkatnya regulasi lingkungan dalam sektor pelayaran. Selain itu, dinamika geopolitik di sejumlah jalur pelayaran strategis juga memicu perubahan rute pelayaran global yang berdampak pada peningkatan jarak tempuh dan biaya logistik.

Perkembangan ekonomi global dan stabilitas ekonomi domestik tersebut turut membentuk lingkungan usaha pada industri maritim, sehingga memiliki pengaruh bagi PT Jasa Armada Indonesia Tbk sebagai penyedia layanan pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan Indonesia. Pertumbuhan perdagangan regional, peningkatan aktivitas pelabuhan nasional, serta penguatan konektivitas logistik domestik berpotensi mendorong peningkatan pergerakan kapal di pelabuhan Indonesia. Dengan demikian, meskipun industri maritim global menghadapi tantangan berupa ketidakpastian perdagangan dan perlambatan pertumbuhan, peluang pertumbuhan tetap terbuka seiring dengan meningkatnya peran Indonesia dalam jaringan perdagangan maritim regional dan global.

developments have a significant impact on maritime trade activities and the demand for maritime transport and port services.

Amidst these global dynamics, Indonesia's economy has demonstrated relatively strong resilience. According to Bank Indonesia's report, national economic growth in 2025 is projected to range approximatel 4.7%–5.5%, supported by strong domestic demand, maintained financial system stability, and inflation that remains within the target range of 2.5±1%. Such stability is further reinforced by policy coordination between the government and monetary authorities in maintaining a balance between macroeconomic stability and growth momentum. Furthermore, accelerated infrastructure development, including the expansion of logistics connectivity and port facilities, is driving greater efficiency in goods distribution and inter-regional trade mobility across Indonesia. These conditions are contributing to increased shipping activity and vessel traffic at various national ports, which in turn is boosting demand for maritime services such as pilotage and towage.

From an industry perspective, global maritime trade continues to grow, albeit at a more moderate pace. According to an analysis by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), global maritime trade volume is projected to reach approximately 12.72 billion tons in 2024, with growth of around 2.2%, reflecting the recovery of global trade activity following supply chain disruptions in recent years. However, in 2025, maritime trade growth is projected to slow down to around 0.5%, while container trade is projected to grow by approximately 1.4%. In the medium term through 2030, global maritime trade is expected to return to stable growth, averaging around 2% per year. This short-term slowdown is influenced by global trade uncertainties, changes in the structure of international supply chains, and increasing environmental regulations in the shipping sector. Additionally, geopolitical dynamics in several strategic shipping lanes are also triggering changes in global shipping routes, leading to increased distances and logistics costs.

Global economic developments and domestic economic stability contribute to shaping the business environment in the maritime industry, thereby influencing PT Jasa Armada Indonesia Tbk as a provider of vessel pilotage and towage services in Indonesian ports. Growth in regional trade, increased activity at national ports, and strengthened domestic logistics connectivity have the potential to drive an increase in vessel traffic at Indonesian ports. Therefore, despite the challenges facing the global maritime industry, such as trade uncertainty and slowing economic growth, the potential for growth remains as Indonesia's role in regional and global maritime trade networks continues to expand.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan fungsi manajerial secara efektif dan profesional sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi tahun 2025 sebesar 106,53 dengan Kriteria Sangat Baik. Dewan Komisaris memandang positif kinerja Direksi sepanjang tahun 2025. Penilaian tersebut didasarkan pada pencapaian kinerja Perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan yang solid serta kemampuan manajemen dalam menjaga stabilitas operasional di tengah dinamika industri maritim yang terus berkembang. Perusahaan dapat menghadapi arus tantangan dan memanfaatkan peluang melalui berbagai kebijakan strategis dan langkah pengelolaan yang tepat. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi mampu mengarahkan Perusahaan untuk tetap berada pada jalur pertumbuhan yang sehat serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Secara keuangan, Perusahaan berhasil mencatatkan pendapatan neto sebesar Rp1,47 triliun pada tahun 2025, meningkat 9,65% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp1,35 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut turut diikuti oleh perbaikan kinerja operasional, yang tercermin dari laba usaha sebesar Rp247,22 miliar, tumbuh 18,19% secara tahunan. Selain itu, laba tahun berjalan mencapai Rp196,44 miliar, meningkat 17,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan Direksi dalam mengoptimalkan potensi bisnis Perusahaan sekaligus menjaga efisiensi operasional.

Kemudian pada posisi keuangan, Perusahaan juga menunjukkan fundamental yang semakin kuat. Pada akhir tahun 2025, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp1,71 triliun, meningkat 3,91% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara total ekuitas mencapai Rp1,36 triliun, tumbuh 5,48% secara tahunan. Di sisi lain, total liabilitas tercatat sebesar Rp354,72 miliar, mengalami penurunan 1,70% dibandingkan tahun 2024. Struktur keuangan yang semakin sehat tersebut menunjukkan bahwa Direksi mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi usaha dan pengelolaan risiko keuangan secara *prudent*.

Kinerja positif juga tercermin pada pengelolaan arus kas Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, arus kas dari aktivitas operasi tercatat sebesar Rp355,73 miliar, meningkat 7,97% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa aktivitas operasional Perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang kuat untuk mendukung kebutuhan investasi dan pendanaan. Selain itu, posisi kas dan setara kas pada akhir tahun mencapai Rp554,13 miliar, meningkat 17,13% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memberikan fleksibilitas keuangan yang memadai bagi Perusahaan dalam mendukung pengembangan usaha di masa mendatang.

Berdasarkan berbagai capaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan secara efektif. Strategi yang diterapkan dinilai mampu mendorong

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors demonstrated strong performance throughout 2025, showing the ability to execute their managerial roles with precision and agility. This is evidenced by the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) score for 2025 reaching 106.53 which is categorized as excellent. The Board of Commissioners has a positive view of the Board of Directors' performance in 2025. This assessment reflects the Company's strong growth and management's ability to maintain operational stability in a dynamic maritime industry. The Company effectively addressed challenges and seized opportunities through strategic policies and sound management. The Board of Commissioners believes the Board of Directors has kept the Company on a path of healthy growth, delivering value to shareholders and stakeholders.

From a financial perspective, the Company recorded net revenue of Rp1.47 trillion in 2025, an increase of 9.65% compared to Rp1.35 trillion in 2024. This revenue growth was accompanied by improved operational performance, as reflected in the operating profit of Rp247.22 billion, which grew by 18.19% year-over-year. Additionally, net income for the year reached Rp196.44 billion, an increase of 17.74% compared to the previous year. This growth in performance reflects the Board of Directors' success in optimizing the Company's business potential while maintaining operational efficiency.

In terms of financial position, the Company also demonstrated stronger fundamentals. At the end of 2025, the Company's total assets stood at Rp1.71 trillion, an increase of 3.91% compared to the previous year, while total equity reached Rp1.36 trillion, growing 5.48% year-over-year. Furthermore, total liabilities stood at Rp354.72 billion, a decrease of 1.70% compared to 2024. This sound financial structure indicates that the Board of Directors has successfully maintained a balance between business expansion and prudent financial risk management.

These positive results are also reflected in the Company's cash flow management. Throughout 2025, cash flow from operating activities totaled Rp355.73 billion, an increase of 7.97% compared to the previous year, indicating that the Company's operations are capable of generating strong cash flow to support investment and financing needs. Additionally, the cash and cash equivalents balance at year-end reached Rp554.13 billion, an increase of 17.13% compared to the previous year, thereby providing the Company with sufficient financial flexibility to support future business development.

Given these achievements, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors has effectively carried out its management duties. The strategies implemented are viewed as capable of driving performance growth



pertumbuhan kinerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha Perusahaan. Dewan Komisaris juga melihat bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas layanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan capaian tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kinerja Direksi sepanjang tahun 2025. Dewan Komisaris berharap Direksi dapat terus mempertahankan kinerja positif tersebut serta semakin meningkatkan daya saing Perusahaan di tengah dinamika industri maritim yang terus berkembang. Sinergi yang kuat antara Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat terus terjaga guna mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan secara berkelanjutan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha Perusahaan ke depan masih menunjukkan peluang pertumbuhan yang positif, meskipun tetap berada dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Aktivitas perdagangan nasional yang terus berkembang, sebagaimana tercermin dari kinerja ekspor dan surplus neraca perdagangan Indonesia, menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan aktivitas transportasi laut dan layanan kepelabuhanan. Mengingat sebagian besar perdagangan internasional Indonesia dilakukan melalui jalur laut, peningkatan arus perdagangan tersebut berpotensi mendorong peningkatan kunjungan kapal di berbagai pelabuhan nasional, sehingga memberikan peluang bagi Perusahaan untuk meningkatkan volume layanan pemanduan dan penundaan kapal.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa langkah-langkah strategis yang direncanakan Direksi dalam memperluas jangkauan pasar serta menjalin berbagai kerja sama usaha merupakan upaya yang tepat untuk memanfaatkan peluang tersebut. Penjajakan pengembangan pasar baru, termasuk pada layanan *ship-to-ship* (STS) di wilayah Sabang, serta rencana kerja sama penyewaan kapal tunda untuk mendukung operasional kegiatan LNG di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, menunjukkan komitmen Perusahaan untuk memperluas portofolio layanan dan meningkatkan peran dalam ekosistem maritim nasional. Selain itu, inisiatif kerja sama dengan berbagai pelaku industri dan pengelola terminal di sejumlah wilayah strategis juga dinilai dapat memperkuat posisi Perusahaan dalam menyediakan layanan maritim yang terintegrasi.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris memandang bahwa strategi pengembangan pasar yang difokuskan pada pelabuhan strategis, kawasan industri, serta terminal khusus merupakan langkah yang relevan dengan perkembangan industri logistik dan maritim di Indonesia. Peningkatan aktivitas industri di berbagai wilayah, termasuk kawasan industri pengolahan mineral dan energi, berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap layanan kepelabuhanan dan operasional kapal. Dengan memanfaatkan peluang

while ensuring the Company's business sustainability. The Board of Commissioners also notes that the Board of Directors has demonstrated a strong commitment to strengthening corporate governance, improving service quality, and optimizing the use of available resources.

With consideration of these overall achievements, the Board of Commissioners expresses its appreciation for the Board of Directors' performance throughout 2025. The Board of Commissioners hopes that the Board of Directors will continue to maintain this positive performance and further enhance the Company's competitiveness amid the ever-evolving dynamics of the maritime industry. It is hoped that the strong synergy between the Board of Commissioners and the Board of Directors will continue to be maintained to support the sustainable achievement of the Company's strategic objectives.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS

The Board of Commissioners believes that the Company's future business prospects continue to show positive growth opportunities, despite operating in a dynamic business environment. The ongoing expansion of national trade, as reflected in Indonesia's export performance and trade balance surplus, is one of the factors supporting increased maritime transport and port services. Given that the majority of Indonesia's international trade is conducted via sea routes, this increase in trade flows has the potential to drive higher vessel traffic at various national ports, thereby providing opportunities for the Company to increase the volume of vessel pilotage and towage services.

The Board of Commissioners also believes that the strategic measures planned by the Board of Directors to expand market reach and establish various business partnerships are appropriate steps to capitalize on these opportunities. Exploratory efforts to develop new markets, including ship-to-ship (STS) services in the Sabang region, as well as plans for a tugboat charter partnership to support LNG operations in the Nusa Tenggara Islands, demonstrate the Company's commitment to expanding its service portfolio and enhancing its role within the national maritime ecosystem. Additionally, collaboration initiatives with various industry players and terminal operators in several strategic regions are also expected to strengthen the Company's position in providing integrated maritime services.

Furthermore, the Board of Commissioners believes that a market development strategy focused on strategic ports, industrial zones, and specialized terminals is a step aligned with the growth of the logistics and maritime industries in Indonesia. Increased industrial activity across various regions, including mineral and energy processing industrial zones, has the potential to boost demand for port services and vessel operations. By capitalizing on these opportunities, the Company is expected to expand

tersebut, Perusahaan diharapkan dapat memperluas cakupan layanan sekaligus meningkatkan kontribusi bisnis turunan yang mendukung pertumbuhan kinerja.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha Perusahaan tetap terbuka dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Namun demikian, Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya bagi Direksi untuk terus menjaga kualitas layanan, memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap rencana ekspansi dilakukan secara terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang baik. Dengan demikian, Perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan industri maritim secara optimal sekaligus mempertahankan kinerja yang berkelanjutan di masa mendatang.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis yang dijalankan oleh Direksi secara konsisten dan terintegrasi. Komitmen tersebut tercermin dari upaya penyempurnaan struktur tata kelola, pembaruan kebijakan internal agar selaras dengan Pedoman Umum GCG Indonesia (PUGKI) 2021 dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), serta penguatan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai AKHLAK. Berdasarkan hasil pengamatan Dewan Komisaris, langkah-langkah tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memperkokoh integritas Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Menurut pandangan Dewan Komisaris, implementasi GCG di Perusahaan juga tidak hanya diwujudkan melalui penguatan sistem dan struktur tata kelola, tetapi juga melalui pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan transparansi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan sosialisasi Kode Etik serta penerapan *Whistleblowing System* (WBS) yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pelapor dan mendorong terciptanya keterbukaan dalam penyampaian informasi. Selain itu, penguatan kerangka manajemen risiko yang mencakup evaluasi terhadap risiko teknologi informasi dinilai sebagai langkah yang tepat dalam merespons dinamika dan kompleksitas tantangan bisnis yang terus berkembang.

Sehubungan dengan berbagai upaya tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas capaian Perusahaan dalam meraih skor ACGS sebesar 124,67 poin. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dan menempatkan Perusahaan dalam kategori *"Leadership in Corporate Governance."* Pencapaian ini mencerminkan semakin kuatnya praktik tata kelola yang diterapkan Perusahaan serta menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

its service coverage while enhancing the contribution of supporting businesses that drive performance growth.

In general, the Board of Commissioners believes that the Company's business prospects remain promising and hold good growth potential. However, the Board of Commissioners also emphasizes the importance for the Board of Directors to continue maintaining service quality, strengthening relationships with stakeholders, and ensuring that any expansion plans are carried out in a measured manner while adhering to the principles of prudence and sound risk management. Thus, the Company is expected to optimally capitalize on growth opportunities in the maritime industry while maintaining sustainable performance in the future.

VIEW ON GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles within the Company continues to be strengthened through various strategic measures consistently and comprehensively implemented by the Board of Directors. This commitment is reflected in efforts to improve the governance structure, update internal policies to align with the 2021 Indonesian General Guidelines on GCG (PUGKI) and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), and strengthen a work culture grounded in the AKHLAK values. Based on the observations of the Board of Commissioners, these measures have made a significant contribution to strengthening the Company's integrity in conducting business activities while simultaneously enhancing the level of trust among stakeholders.

From the Board of Commissioners' perspective, the implementation of GCG at the Company is not only realized through the strengthening of governance systems and structures, but also through the fostering of an organizational culture that upholds ethics and transparency. This is evident in the dissemination of the Code of Conduct and the implementation of the Whistleblowing System (WBS), which is designed to protect whistleblowers and encourage openness in the disclosure of information. Furthermore, the strengthening of the risk management framework, which includes an assessment of information technology risks, is considered an appropriate step in responding to the dynamics and complexity of the ever-evolving business challenges.

With regard to these various efforts, the Board of Commissioners commends the Company for achieving an ACGS score of 124,67 points. This result demonstrates a significant improvement and places the Company in the "Leadership in Corporate Governance" category. This achievement reflects the Company's increasingly robust corporate governance practices and serves as a vital foundation for supporting sustainable business growth and the creation of long-term value for all stakeholders.



PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa proses pengelolaan Perusahaan berjalan secara akuntabel, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sebagai upaya menunjang efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Komisaris memperoleh dukungan dari 3 (tiga) komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Kehadiran ketiga komite ini memberikan dukungan penting bagi Dewan Komisaris dalam melakukan penelaahan yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek strategis pengelolaan Perusahaan.

Sesuai dengan perannya masing-masing, komite-komite tersebut melakukan kajian, evaluasi, serta penyampaian rekomendasi yang bersifat konstruktif kepada Direksi untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola. Efektivitas kinerja komite dinilai secara berkala dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain realisasi program kerja yang telah ditetapkan, tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja, keaktifan dalam forum rapat, serta kualitas dan relevansi rekomendasi yang dihasilkan. Berdasarkan mekanisme penilaian tersebut, Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa fungsi pendukung pengawasan berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi kinerja Perusahaan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melakukan penyesuaian terhadap susunan Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 18 Juni 2025. Dalam keputusan tersebut, RUPS mengangkat Ibu R.R. Dewi Ariyani sebagai Komisaris Utama yang baru untuk menggantikan Bapak Zuhri Iryansyah yang sebelumnya menjabat pada posisi tersebut.

Kemudian, RUPS juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Bapak F. Budi Prayitno dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dan sekaligus mengangkat beliau sebagai Komisaris menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Ibu R.R. Dewi Ariyani. Selain itu, RUPS memutuskan untuk mengangkat Bapak Doni Istyanto Hari Mahdi sebagai Komisaris Independen yang baru menggantikan Bapak Bay Mokhamad Hasani, serta mengangkat Bapak Mitchell Julius Tupamahu sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Perubahan komposisi Dewan Komisaris tersebut dilakukan sebagai langkah Perusahaan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi serta memastikan fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal seiring dengan dinamika dan perkembangan usaha. Berikut susunan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2025:

EVALUATION OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners consistently ensures that the Company's management processes are conducted in an accountable and transparent manner, in accordance with the principles of good corporate governance. To support the effective fulfillment of these duties, the Board of Commissioners is supported by three committees under its purview: the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. The presence of these three committees provides crucial support to the Board of Commissioners in conducting a more in-depth review of various strategic aspects of the Company's management.

In accordance with their respective roles, these committees conduct studies, evaluations, and provide constructive recommendations to the Board of Directors to promote improvements in governance quality. The effectiveness of the committees' performance is assessed periodically by considering a number of indicators, including the implementation of established work programs, the degree to which activities align with work plans, active participation in meetings, and the quality and relevance of the recommendations produced. Based on this assessment mechanism, the Board of Commissioners can ensure that the oversight support functions operate optimally and make a tangible contribution to the Company's performance.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, the Company made adjustments to the composition of the Board of Commissioners as determined by the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on June 18, 2025. In that resolution, the GMS appointed Ms. R.R. Dewi Ariyani as the new President Commissioner to replace Mr. Zuhri Iryansyah, who previously held that position.

Furthermore, the GMS also approved the honorable dismissal of Mr. F. Budi Prayitno from his position as Independent Commissioner and simultaneously appointed him as Commissioner to replace the position previously held by Ms. R.R. Dewi Ariyani. The GMS further decided to appoint Mr. Doni Istyanto Hari Mahdi as the new Independent Commissioner to replace Mr. Bay Mokhamad Hasani, and to appoint Mr. Mitchell Julius Tupamahu as an Independent Commissioner of the Company.

These changes to the composition of the Board of Commissioners were made as a measure by the Company to align with organizational needs and ensure that oversight functions can operate optimally in line with business dynamics and developments. The following is the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
R.R Dewi Ariyani	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2025 Resolution of the Annual GMS dated June 18, 2025	18 Juni 2025 (periode pertama) June 18, 2025 (first period)
F. Budi Prayitno	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2025 Resolution of the Annual GMS dated June 18, 2025	18 Juni 2025 (periode pertama) June 18, 2025 (first period)
Doni Istyanto Hari Mahdi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2025 Resolution of the Annual GMS dated June 18, 2025	18 Juni 2025 (periode pertama) June 18, 2025 (first period)
Mitchell Julius Tupamahu	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2025 Resolution of the Annual GMS dated June 18, 2025	18 Juni 2025 (periode pertama) June 18, 2025 (first period)

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada Perusahaan. Kepercayaan tersebut menjadi landasan penting bagi Perusahaan dalam menjalankan berbagai inisiatif strategis serta mendorong pencapaian kinerja yang berkelanjutan. Apresiasi yang sama juga disampaikan kepada Direksi dan seluruh Insan Perusahaan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan komitmen dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sehingga berbagai target dan pencapaian Perusahaan dapat direalisasikan dengan baik.

Selain itu, Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra kerja dan mitra usaha yang selama ini telah menjalin hubungan kerja sama yang konstruktif dengan Perusahaan. Kepercayaan yang diberikan oleh para mitra tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi Perusahaan sebagai mitra bisnis yang andal dan terpercaya.

Sebagai upaya menjaga kinerja Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris senantiasa berkomitmen untuk memberikan arahan, dukungan, serta motivasi kepada Direksi dan seluruh jajaran manajemen agar mampu menghadapi berbagai dinamika dan tantangan usaha secara responsif dan adaptif. Dibekali semangat kolaborasi dan sinergi yang kuat antara seluruh elemen Perusahaan serta para pemangku kepentingan, Dewan Komisaris meyakini bahwa hubungan yang harmonis dan saling mendukung akan terus terjaga, sehingga Perusahaan dapat melangkah secara lebih mantap dalam mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

STAKEHOLDER APPRECIATION

The Board of Commissioners extends its deepest gratitude to the Shareholders for the trust and support they have consistently shown to the Company. This trust serves as a vital foundation for the Company in implementing various strategic initiatives and driving sustainable performance. The same appreciation is extended to the Board of Directors and all Company personnel who have worked with dedication, professionalism, and commitment in carrying out their duties and responsibilities, thereby ensuring that the Company's various targets and achievements are successfully realized.

In addition, the Board of Commissioners also expressed its appreciation to all employees and business partners who have maintained a constructive working relationship with the Company. The trust placed in us by these partners plays a vital role in strengthening the Company's position as a reliable and trustworthy business partner.

To maintain the Company's strong performance, the Board of Commissioners remains committed to providing guidance, support, and motivation to the Board of Directors and the entire management team so that they can respond to and adapt to various business dynamics and challenges. Empowered by a strong spirit of collaboration and synergy among all elements of the Company and its stakeholders, the Board of Commissioners is confident that harmonious and mutually supportive relationships will continue to be maintained, enabling the Company to move forward with greater confidence in achieving sustainable business growth in the future.

Atas Nama Dewan Komisaris
Jakarta, 28 April 2026
On Behalf of Board of Commissioners
Jakarta, April 28, 2026



R. R. DEWI ARIYANI
Komisaris Utama
President Commissioner



Laporan Direksi

Report of the Board of Directors

Berpegang pada tema *Uplifting the Derivative Business*, Perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan 9,65% dan laba tahun berjalan 17,74%, membuktikan ketahanan usaha sekaligus membuka peluang ekspansi di tengah dinamika industri maritim yang terus berkembang.

Based on the theme "Uplifting the Derivative Business", the Company recorded 9.65% growth in revenues and 17.74% growth in profit for the year, which signifies the Company's resilience and drives opportunities for expansion amid the ongoing business dynamics of the maritime industry.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Honorable Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat sampaikan Laporan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Penyampaian laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan kinerja, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan menjalani periode yang diwarnai oleh berbagai dinamika industri dan perubahan lingkungan bisnis yang berlangsung dengan cepat, khususnya di sektor maritim. Kondisi tersebut menghadirkan

We give praise and thanks to God Almighty for His mercy and grace, which have enabled us to present the Report of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk for the fiscal year ended December 31, 2025. The submission of this report serves as the Board of Directors' accountability for the management of the Company throughout 2025, as well as a means to provide a comprehensive overview of performance developments, challenges faced, and strategic steps taken by the Company.

Throughout 2025, the Company navigated a period marked by various industry dynamics and rapidly evolving business conditions, particularly in the maritime sector. These conditions presented both challenges and



tantangan sekaligus peluang yang menuntut Perusahaan untuk terus meningkatkan ketahanan usaha serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan yang terjadi. Dalam menghadapi situasi tersebut, Perusahaan berupaya menjaga stabilitas operasional sekaligus mengoptimalkan berbagai peluang yang muncul melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi, serta penguatan sistem tata kelola perusahaan.

Berpegang teguh pada komitmen yang kuat, Perusahaan mampu mempertahankan kinerja yang positif sepanjang tahun berjalan. Upaya-upaya yang dilakukan sepanjang tahun ditujukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan senantiasa mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.

opportunities, requiring the Company to continuously enhance its business resilience and adaptability to emerging developments. The Company is committed to maintaining operational stability while capitalizing on emerging opportunities through service quality improvements, innovation, and the strengthening of corporate governance systems.

Driven by a strong commitment, the Company has maintained positive performance throughout the current year. The efforts undertaken throughout the year were aimed at ensuring business continuity, while also ensuring that the Company remains capable of delivering sustainable value to shareholders and all stakeholders.



PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Perkembangan ekonomi global pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan perlambatan moderat di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan dan dinamika geopolitik yang masih berlangsung. Berdasarkan laporan *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai sekitar 3,2% pada tahun 2025, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebesar 3,3% pada tahun 2024. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya fragmentasi perdagangan global serta ketidakpastian kebijakan ekonomi yang berdampak pada investasi dan perdagangan internasional. Negara-negara maju diperkirakan hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar 1,6% pada periode 2025–2026, sementara negara-negara berkembang tetap menjadi motor pertumbuhan dengan proyeksi sekitar 4,2% pada tahun 2025. Di sisi lain, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap menjadi sekitar 4,2% pada tahun 2025 seiring dengan meredanya tekanan harga energi dan pangan. Meskipun demikian, volume perdagangan dunia diproyeksikan hanya tumbuh sekitar 2,9% pada periode 2025–2026, mencerminkan perubahan struktur perdagangan global serta diversifikasi rantai pasok internasional yang semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan global tetap tumbuh, meskipun dengan dinamika yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelum pandemi.

Beralih ke tingkat nasional, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Berdasarkan publikasi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga dengan dukungan konsumsi domestik yang solid serta kinerja ekspor yang masih positif meskipun menghadapi perlambatan permintaan global. Stabilitas makroekonomi juga didukung oleh inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar rupiah, serta sistem keuangan yang tetap kuat sehingga mampu menjaga fungsi intermediasi perbankan. Selain itu, transformasi ekonomi yang diarahkan pada penguatan infrastruktur logistik dan percepatan digitalisasi ekonomi turut meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Kondisi tersebut secara tidak langsung memberikan peluang pertumbuhan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa maritim dan layanan kepelabuhanan, termasuk PT Jasa Armada Indonesia Tbk, seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayaran dan pergerakan kapal di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia.

Lebih lanjut, laporan yang diterbitkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* menunjukkan bahwa prospek perdagangan laut global pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih terbatas, dengan volume perdagangan diproyeksikan meningkat sekitar 0,5% dan perdagangan peti kemas diperkirakan tumbuh sekitar 1,4%. Dalam jangka menengah, perdagangan laut global pada periode 2026–2030 diproyeksikan tumbuh rata-rata sekitar 2% per tahun, didorong oleh peningkatan permintaan komoditas energi, mineral strategis, serta pemulihan aktivitas perdagangan internasional secara bertahap.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENTS

Global economic developments in 2025 showed a moderate slowdown amid ongoing uncertainty regarding trade policies and geopolitical dynamics. According to a report by the International Monetary Fund (IMF), global economic growth is projected to reach approximately 3.2% in 2025, slightly lower than the 3.3% growth recorded in 2024. This deceleration is influenced by increasing fragmentation in global trade as well as economic policy uncertainties that impact investment and international trade. Advanced economies are expected to record growth of only around 1.6% during the 2025–2026 period, while developing economies remain the engine of growth with a projection of around 4.2% in 2025. In contrast, global inflation is projected to gradually decline to around 4.2% by 2025 as pressure from energy and food prices eases. Nevertheless, global trade volume is projected to grow by only about 2.9% during the 2025–2026 period, reflecting shifts in the structure of global trade and the increasing diversification of international supply chains. These conditions indicate that global trade activity continues to grow, albeit with more complex dynamics compared to the pre-pandemic period.

At the national level, Indonesia's economy has demonstrated relatively strong resilience amid the global economic slowdown. According to Bank Indonesia's publications, national economic growth has remained steady, supported by strong domestic consumption and positive export performance despite facing a slowdown in global demand. Macroeconomic stability is also underpinned by inflation that remains within Bank Indonesia's target range, the stability of the rupiah exchange rate, and a robust financial system capable of maintaining banking intermediation functions. Additionally, economic transformation focused on strengthening logistics infrastructure and accelerating economic digitalization has further enhanced the competitiveness of the national economy. These conditions indirectly present growth opportunities for companies operating in the maritime services and port services sectors, including PT Jasa Armada Indonesia Tbk, in line with the increasing shipping activity and vessel movements at Indonesia's major ports.

Furthermore, a report published by the United Nations Conference on Trade and Development indicated that the outlook for global maritime trade in 2025 is expected to show more limited growth, with trade volumes projected to increase by approximately 0.5% and container trade expected to grow by about 1.4%. In the medium term, global maritime trade for the 2026–2030 period is projected to grow by an average of about 2% per year, driven by increased demand for energy commodities and strategic minerals, as well as the gradual recovery of international trade activity.

Seluruh dinamika jaringan logistik internasional berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap layanan operasional pelabuhan, termasuk jasa pemanduan dan penundaan kapal. Apabila dilihat dari sudut pandang Perusahaan, kondisi ini membuka peluang peningkatan aktivitas kapal yang keluar-masuk pelabuhan, khususnya pada pelabuhan-pelabuhan utama yang menjadi simpul perdagangan nasional. Oleh karena itu, Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi operasional guna mendukung efisiensi kegiatan kepelabuhanan dan kelancaran arus kapal di perairan pelabuhan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Strategi Perusahaan pada tahun 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2023–2027, yang dirancang untuk memastikan bahwa PT Jasa Armada Indonesia Tbk mampu memperkuat posisi bisnis dalam ekosistem jasa maritim serta mendukung transformasi yang tengah berlangsung di lingkungan Pelindo Group. Pada tahun 2025, Perusahaan mengusung tema *Uplifting the Derivative Business* sebagai fokus utama penguatan dan pengembangan lini usaha turunan. Arah strategi Perusahaan difokuskan pada penguatan dan pengembangan *derivative business* melalui integrasi layanan, ekspansi pasar, serta peningkatan efisiensi operasional.

Salah satu fokus utama strategi Perusahaan pada tahun 2025 adalah peningkatan daya saing perusahaan di tengah dinamika industri jasa kepelabuhanan yang semakin kompetitif. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi kompetensi teknis maupun manajerial, agar mampu mendukung pelayanan jasa maritim yang berstandar internasional. Perusahaan senantiasa mendorong program pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan kepemimpinan bagi pegawai untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tuntutan operasional pelabuhan modern. Selain itu, Perusahaan juga terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, khususnya pada layanan utama seperti pemanduan dan penundaan kapal, dengan memastikan ketersediaan armada yang andal, proses operasional yang efisien, serta standar keselamatan kerja yang tinggi. Upaya peningkatan daya saing ini turut diperkuat melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), penguatan sistem manajemen risiko, serta peningkatan reputasi Perusahaan melalui kinerja operasional yang konsisten dan pelayanan pelanggan yang unggul.

Strategi berikutnya yang menjadi prioritas adalah pengembangan bisnis melalui ekspansi pasar secara organik maupun inorganik. Secara organik, Perusahaan berupaya memperluas jangkauan layanan pada pasar yang telah ada, khususnya di wilayah operasional Pelindo Regional 2 serta pada terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang tersebar di luar wilayah Pelabuhan Regional 2. Ekspansi

The entire dynamics of the international logistics network have the potential to increase the demand for port operational services, including pilotage and towage services. From the Company's perspective, this situation presents an opportunity to increase vessel traffic in and out of ports, particularly at major ports that serve as national trade hubs. Therefore, the Company strives to continuously improve service quality and optimize the use of operational technology to support the efficiency of port operations and the smooth flow of vessels in port waters.

CORPORATE STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

The Company's 2025 Strategy was formulated as part of the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2023–2027, designed to ensure that PT Jasa Armada Indonesia Tbk is able to strengthen its business position within the maritime services ecosystem and support the ongoing transformation within the Pelindo Group. In 2025, the Company is adopting the theme "Uplifting the Derivative Business" as the primary focus for strengthening and developing its derivative business lines. The Company's strategic direction is centered on strengthening and developing the derivative business through service integration, market expansion, and improved operational efficiency.

One of the Company's key strategic priorities for 2025 is to enhance its competitiveness amid the increasingly dynamic and competitive port services industry. This effort is being carried out by strengthening human resource capacity, both in terms of technical and managerial competencies, to ensure the delivery of maritime services that meet international standards. The Company consistently promotes training programs, certifications, and leadership development for employees to ensure a workforce that is competent and adaptable to technological advancements and the operational demands of modern ports. Additionally, the Company continues to improve the quality of its products and services, particularly in core services such as vessel pilotage and towing, by ensuring a reliable fleet, efficient operational processes, and high safety standards. These efforts to enhance competitiveness are further strengthened through the implementation of good corporate governance, the reinforcement of risk management systems, and the enhancement of the Company's reputation through consistent operational performance and superior customer service.

Another priority strategy is business development through both organic and inorganic market expansion. Organically, the Company seeks to expand its service reach in existing markets, particularly within the operational area of Pelindo Regional 2, as well as at special-purpose terminals (Tersus) and self-use terminals (TUKS) located outside the Regional Port 2 area. This expansion is carried out by increasing the intensity of services to existing



ini dilakukan dengan meningkatkan intensitas layanan kepada pelanggan eksisting serta mengembangkan jenis layanan baru yang dapat mendukung aktivitas pelayaran dan logistik di pelabuhan. Di sisi lain, Perusahaan juga aktif menjajaki peluang pasar baru di luar wilayah operasional yang selama ini telah dilayani, termasuk melalui kerja sama dengan berbagai pelaku industri seperti perusahaan energi, pertambangan, dan logistik yang membutuhkan layanan pemanduan maupun penundaan kapal. Selain ekspansi organik, Perusahaan juga membuka peluang ekspansi inorganik melalui kerja sama strategis, akuisisi, maupun kemitraan dengan entitas bisnis lain yang memiliki potensi sinergi dalam ekosistem maritim. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan bisnis turunan serta memperkuat posisi Perusahaan sebagai penyedia layanan *marine* yang terintegrasi.

Sejalan dengan strategi ekspansi tersebut, Perusahaan juga menekankan optimalisasi kinerja operasional dan keuangan sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Perusahaan berupaya memperkuat struktur pendanaan guna memastikan ketersediaan modal kerja dan pembiayaan investasi yang diperlukan untuk ekspansi usaha maupun modernisasi armada. Perusahaan juga mengoptimalkan pemanfaatan berbagai produk dan layanan dari lembaga keuangan guna meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan serta mendukung produktivitas operasional. Secara operasional, Perusahaan secara bertahap menerapkan otomasi dan digitalisasi proses bisnis untuk mempercepat alur kerja, meningkatkan akurasi data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Transformasi digital ini juga diarahkan untuk mendukung integrasi sistem operasional dengan ekosistem Pelindo Group sehingga tercipta layanan maritim yang lebih terintegrasi dan efisien.

Perumusan dan implementasi strategi tersebut dijalankan dengan peran aktif Direksi dalam menetapkan kebijakan strategis serta memastikan keselarasan antara rencana jangka panjang, target tahunan, dan kebutuhan operasional perusahaan. Direksi memiliki peran penting dalam mengarahkan prioritas pengembangan bisnis, mengelola risiko yang mungkin timbul dari ekspansi usaha, serta memastikan bahwa setiap inisiatif strategis dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dengan demikian, strategi yang dijalankan pada tahun 2025 berfungsi sebagai bagian dari *roadmap* transformasi perusahaan menuju model bisnis maritim yang lebih terintegrasi dan berdaya saing tinggi.

Selain penguatan internal dan ekspansi bisnis, strategi Perusahaan pada tahun 2025 juga menempatkan pelanggan sebagai pusat dari seluruh pengembangan layanan. Pendekatan *customer-centric* diwujudkan melalui pelaksanaan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk memperoleh umpan balik atas kualitas layanan yang diberikan. Hasil survei tersebut menjadi dasar bagi Perusahaan untuk melakukan berbagai perbaikan dan

customers and developing new types of services that can support shipping and logistics activities at the port. On the other hand, the Company is also actively exploring new market opportunities outside the operational areas it has served so far, including through cooperation with various industry players such as energy, mining, and logistics companies that require vessel pilotage and mooring services. In addition to organic expansion, the Company is also pursuing inorganic expansion opportunities through strategic partnerships, acquisitions, or collaborations with other business entities that offer potential synergies within the maritime ecosystem. This approach is expected to accelerate the development of downstream businesses and strengthen the Company's position as an integrated marine services provider.

Consistent with this expansion strategy, the Company also emphasizes the optimization of operational and financial performance as the foundation for supporting sustainable business growth. In this regard, the Company is working to strengthen its funding structure to ensure the availability of working capital and investment financing required for business expansion and fleet modernization. The Company is also optimizing the use of various products and services from financial institutions to improve financial management efficiency and support operational productivity. Operationally, the Company is gradually implementing the automation and digitization of business processes to accelerate workflows, improve data accuracy, and support more effective decision-making. This digital transformation is also aimed at supporting the integration of operational systems with the Pelindo Group ecosystem to create more integrated and efficient maritime services.

The formulation and implementation of these strategies are carried out with the active involvement of the Board of Directors in setting strategic policies and ensuring alignment between the company's long-term plans, annual targets, and operational needs. The Board of Directors plays a crucial role in guiding business development priorities, managing risks that may arise from business expansion, and ensuring that every strategic initiative makes a tangible contribution to improving the company's performance. Thus, the strategy to be implemented in 2025 serves as part of the Company's transformation roadmap toward a more integrated and highly competitive maritime business model.

Apart from internal strengthening and business expansion, the Company's strategy for 2025 also places customers at the center of all service development. This customer-centric approach is realized through the regular conduct of customer satisfaction surveys to gather feedback on the quality of services provided. The results of these surveys serve as the basis for the Company to make various improvements and enhancements to its services

peningkatan layanan secara berkelanjutan. Perusahaan juga memberikan apresiasi kepada pelanggan melalui program penghargaan (*customer awards*) di wilayah Badan Usaha Pelabuhan IPCM sebagai bentuk penguatan hubungan jangka panjang dengan para mitra usaha. Dilandasi pendekatan tersebut, Perusahaan berupaya membangun loyalitas pelanggan sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kualitas layanan yang diberikan.

on an ongoing basis. The Company also expresses its appreciation to customers through a customer awards program within the IPCM Port Authority region as a means of strengthening long-term relationships with business partners. Grounded in this approach, the Company strives to build customer loyalty while simultaneously enhancing market confidence in the quality of services provided.

Secara keseluruhan, strategi Perusahaan pada tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat fondasi bisnis sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru melalui pengembangan bisnis turunan. Kombinasi antara peningkatan daya saing internal, ekspansi pasar, optimalisasi operasional, serta penguatan hubungan dengan pelanggan diharapkan mampu mendorong kinerja perusahaan yang lebih solid dan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, Perusahaan menargetkan dapat memperluas peran dalam ekosistem jasa maritim nasional sekaligus mendukung peningkatan efisiensi dan konektivitas sektor logistik Indonesia.

Overall, the Company's strategy for 2025 is aimed at strengthening its business foundation while opening up new growth opportunities through the development of ancillary businesses. The combination of enhanced internal competitiveness, market expansion, operational optimization, and strengthened customer relationships is expected to drive more robust and sustainable Company performance. With this strategy, the Company aims to expand its role within the national maritime services ecosystem while supporting improved efficiency and connectivity in Indonesia's logistics sector.

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Dalam rangka memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efektif, Direksi menaruh perhatian besar terhadap proses implementasi seluruh rencana yang telah ditetapkan. Direksi memandang bahwa keberhasilan strategi ditentukan oleh perumusan kebijakan yang tepat, didukung oleh konsistensi dalam pelaksanaan serta pengawasan terhadap setiap tahapan implementasinya. Oleh karena itu, Direksi terus mendorong seluruh unit kerja untuk menjalankan program dan inisiatif strategis secara selaras dengan arah kebijakan Perusahaan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan strategi melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang dijalankan tetap relevan dengan dinamika lingkungan usaha serta kebutuhan Perusahaan yang terus berkembang. Proses pemantauan tersebut juga memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi berbagai potensi tantangan maupun peluang perbaikan sehingga langkah-langkah penyesuaian dapat dilakukan secara tepat waktu.

Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkala melalui berbagai forum internal, salah satunya melalui rapat Direksi yang diselenggarakan secara rutin. Forum tersebut menjadi sarana bagi Direksi untuk menelaah perkembangan pelaksanaan strategi, menilai capaian kinerja, serta membahas langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan guna memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

PROCESSES UNDERTAKEN BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE STRATEGY IMPLEMENTATION

To ensure that the formulated strategies are effectively executed, the Board of Directors places great emphasis on the implementation process of all established plans. The Board believes that the success of a strategy depends on the formulation of appropriate policies, supported by consistent execution and oversight of each stage of implementation. Therefore, the Board continues to encourage all business units to carry out strategic programs and initiatives in alignment with the Company's policy direction.

As part of these efforts, the Board of Directors actively oversees the execution of strategies through performance monitoring and evaluation mechanisms. This step is taken to ensure that the strategies and policies being implemented remain relevant to the dynamics of the business environment and the Company's evolving needs. This monitoring process also enables the Board of Directors to identify potential challenges and opportunities for improvement so that adjustments can be made promptly.

Performance monitoring and evaluation are conducted periodically through various internal forums, one of which is the Board of Directors' regular meetings. These forums serve as a platform for the Board to review the progress of strategy implementation, assess performance achievements, and discuss necessary follow-up actions to ensure the attainment of established targets.



PERBANDINGAN ANTARA PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI

Dinamika perkembangan perekonomian global dan nasional pada tahun 2025 turut membentuk lanskap usaha Perusahaan, di mana pertumbuhan ekonomi cenderung melambat secara moderat di tengah meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan serta dinamika geopolitik yang memengaruhi arus perdagangan internasional. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan dunia tetap berlangsung dengan tingkat pertumbuhan yang lebih terbatas, yang turut berdampak pada industri pelayaran dan jasa kepelabuhanan. Di sisi lain, perekonomian nasional memperlihatkan ketahanan yang relatif baik, didukung oleh beberapa faktor seperti permintaan domestik yang kuat, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta penguatan sektor logistik dan infrastruktur. Kondisi tersebut mendorong peningkatan aktivitas pelayaran dan pergerakan kapal di pelabuhan, sehingga memberikan peluang bagi Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja layanan maritim yang dijalankan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan target kinerja tahun buku 2025 Perusahaan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika industri serta proyeksi kondisi perekonomian. Asumsi dasar yang digunakan mencakup indikator makroekonomi utama, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20%, inflasi 2,50%, suku bunga 7,00%, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar Rp16.000, harga minyak mentah USD82 per barel, serta harga solar industri sebesar Rp19.000 per barel. Parameter-parameter tersebut menjadi landasan dalam menetapkan arah kebijakan operasional dan keuangan Perusahaan, sekaligus sebagai acuan dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja sepanjang tahun berjalan.

Berdasarkan perbandingan antara target yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2025 dengan realisasi kinerja, Perusahaan menunjukkan capaian yang secara umum termasuk dalam kategori sangat baik. Pendapatan usaha terealisasi sebesar Rp1.474,81 miliar atau mencapai 108,27% dari target sebesar Rp1.362,11 miliar, yang terutama didorong oleh optimalisasi pengembangan bisnis serta kemampuan Perusahaan dalam menangkap peluang pasar secara lebih luas. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, laba usaha tercatat sebesar Rp247,22 miliar atau 107,98% dari target. Laba sebelum pajak penghasilan badan mencapai Rp255,25 miliar atau 111,44% dari target. Adapun laba tahun berjalan terealisasi sebesar Rp196,44 miliar atau 111,32% dari target.

Kemudian pada struktur permodalan, total aset Perusahaan mencapai Rp1.714,52 miliar atau 110,17% dari target, yang antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas usaha serta realisasi investasi yang mendukung ekspansi bisnis. Liabilitas tercatat sebesar Rp354,72 miliar atau mencapai 186,20% dari target. Sementara itu, ekuitas tercatat sebesar Rp1.359,79 miliar atau 99,57% dari target, yang relatif sejalan dengan rencana.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

The dynamics of global and national economic developments in 2025 have shaped the Company's business landscape, with economic growth showing a moderate slowdown amid rising uncertainty in trade policies and geopolitical developments affecting international trade flows. Nevertheless, global trade activities continued, albeit at a more limited growth rate, which also impacted the shipping and port services industries. On the other hand, the national economy demonstrated relatively strong resilience, supported by factors such as robust domestic demand, maintained macroeconomic stability, and strengthening logistics and infrastructure sectors. These conditions encouraged increased shipping activities and vessel movements at ports, thereby creating opportunities for the Company to optimize its maritime service performance.

Based on these conditions, the Company's 2025 performance targets, as outlined in the Work Plan and Budget (RKAP), were formulated by taking into account industry dynamics and economic projections. The underlying assumptions included key macroeconomic indicators such as economic growth of 5.20%, inflation of 2.50%, interest rates of 7.00%, an exchange rate of Rp16,000 per US Dollar, crude oil prices of USD82 per barrel, and industrial diesel prices of Rp19,000 per barrel. These parameters served as the basis for determining the Company's operational and financial policies, as well as benchmarks for measuring performance achievement throughout the year.

Based on a comparison between the 2025 RKAP targets and actual performance, the Company achieved results that are generally categorized as very strong. Operating revenue reached Rp1,474.81 billion, or 108.27% of the target of Rp1,362.11 billion, mainly driven by optimized business development and the Company's ability to capture broader market opportunities. In line with revenue growth, operating profit amounted to Rp247.22 billion, or 107.98% of the target. Profit before corporate income tax reached Rp255.25 billion, or 111.44% of the target, while profit for the year was recorded at Rp196.44 billion, or 111.32% of the target.

In terms of capital structure, the Company's total assets reached Rp1,714.52 billion, or 110.17% of the target, influenced by business activity growth and investment realization supporting business expansion. Liabilities were recorded at Rp354.72 billion, or 186.20% of the target. Meanwhile, equity amounted to Rp1,359.79 billion, or 99.57% of the target, broadly in line with the plan. Overall, total liabilities and equity reached Rp1,714.52 billion, or

Secara keseluruhan, total liabilitas dan ekuitas mencapai Rp1.714,52 miliar atau 110,17% dari target, mencerminkan posisi keuangan Perusahaan yang tetap terjaga dengan struktur permodalan yang adaptif dalam mendukung pertumbuhan usaha.

Secara keseluruhan, Direksi meyakini bahwa pencapaian kinerja Perusahaan pada tahun 2025 merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Capaian yang melampaui target di berbagai indikator utama menjadi dorongan bagi Direksi untuk terus meningkatkan kinerja dengan tetap adaptif terhadap dinamika usaha yang berkembang. Oleh karena itu, Direksi berkomitmen untuk menjaga momentum positif ini serta terus mengoptimalkan peluang yang ada guna menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

KENDALA YANG DIHADAPI

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan menghadapi sejumlah tantangan yang berkembang seiring dengan dinamika industri jasa kepelabuhanan nasional. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kompetisi usaha, tetapi juga dengan perubahan lanskap teknologi dan digitalisasi yang semakin memengaruhi pola operasional serta ekspektasi para pengguna jasa pelabuhan. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Perusahaan terus berupaya untuk menjaga keberlanjutan hubungan bisnis yang telah terjalin sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung di sektor maritim.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya persaingan dalam pengelolaan layanan kepelabuhanan. Dalam ekosistem pelabuhan nasional, kepemilikan dan pengelolaan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tidak lagi terbatas pada satu entitas saja, melainkan melibatkan berbagai pelaku usaha yang turut menyediakan layanan kepelabuhanan. Kondisi ini menciptakan lingkungan kompetisi yang semakin terbuka, di mana operator jasa maritim harus mampu menunjukkan keunggulan layanan, efisiensi operasional, serta nilai tambah bagi pelanggan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Perusahaan yaitu mempertahankan kerja sama dengan mitra yang telah ada, seraya memperluas jaringan pelanggan melalui pendekatan komersial yang lebih proaktif. Menghadapi situasi tersebut, kemampuan Perusahaan untuk menjaga kualitas layanan, memperkuat hubungan dengan pemilik terminal atau pengguna jasa, serta menghadirkan solusi layanan yang kompetitif menjadi faktor penting dalam mempertahankan posisi di pasar.

Selain aspek persaingan usaha, tantangan lain yang turut dihadapi sepanjang tahun 2025 berkaitan dengan percepatan transformasi digital di sektor pelabuhan. Industri kepelabuhanan saat ini tengah mengalami perubahan menuju sistem operasional yang semakin terdigitalisasi, mulai dari penggunaan *platform* transaksi elektronik, sistem pemantauan operasional berbasis data, hingga integrasi sistem logistik yang lebih

110.17% of the target, reflecting a sound financial position with a capital structure that remains adaptive in supporting business growth.

Overall, the Board of Directors believes that the Company's performance achievements in 2025 are the result of the hard work and collaboration of all employees in executing the established strategies. The performance above target across key indicators serves as a strong impetus for the Board of Directors to continue enhancing performance while remaining adaptive to evolving business dynamics. Accordingly, the Board is committed to maintaining this positive momentum and continuously optimizing available opportunities to achieve sustainable growth.

CHALLENGES FACED

Throughout 2025, the Company faced a number of challenges that evolved alongside the dynamics of the national port services industry. These challenges are not only related to business competition but also to the changing technological landscape and digitalization, which are increasingly influencing operational patterns and the expectations of port service users. In response to these challenges, the Company continues to strive to maintain the sustainability of its established business relationships while adapting to the ongoing technological advancements in the maritime sector.

One of the main challenges faced is the increasing competition in the management of port services. Within the national port ecosystem, the ownership and management of Port Business Entities (PBEs) are no longer limited to a single entity but involve various business operators that also provide port services. This situation creates an increasingly open competitive environment, where maritime service operators must demonstrate service excellence, operational efficiency, and added value for customers. Therefore, the Company faces the challenge of maintaining cooperation with existing partners while expanding its customer network through a more proactive commercial approach. In light of this situation, the Company's ability to maintain service quality, strengthen relationships with terminal owners or service users, and deliver competitive service solutions is a critical factor in maintaining its market position.

Beyond business competition, a further challenge for 2025 is related to the acceleration of digital transformation in the port sector. The port industry is currently undergoing a shift toward increasingly digitized operational systems, ranging from the use of electronic transaction platforms and data-driven operational monitoring systems to the integration of more interconnected logistics systems. Digitalization has proven capable of improving port



terhubung. Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan dan mempercepat arus kapal dan barang. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, ketergantungan terhadap konektivitas internet, serta perlunya penyesuaian organisasi dan sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal.

Lebih lanjut, Perusahaan juga menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa transformasi digital yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengembangan sistem, tetapi juga mampu diintegrasikan secara efektif dengan proses bisnis yang telah berjalan. Hal ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi digital sumber daya manusia dan memastikan kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional layanan maritim, termasuk keamanan sistem informasi. Transformasi digital juga menuntut perubahan dalam cara kerja organisasi, di mana proses yang sebelumnya dilakukan secara manual harus beralih ke sistem berbasis data dan otomatisasi agar mampu meningkatkan kecepatan serta akurasi layanan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi di sektor maritim juga mendorong Perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan industri. Berbagai inisiatif inovasi dan digitalisasi yang berkembang di lingkungan ekosistem Pelindo menunjukkan bahwa peningkatan daya saing industri kepelabuhanan sangat bergantung pada kemampuan Perusahaan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan berbasis data.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025 mencerminkan dinamika industri kepelabuhanan yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi. Persaingan antarpenyedia layanan maritim menuntut Perusahaan untuk terus memperkuat hubungan dengan mitra serta memperluas pasar, sementara perkembangan digitalisasi mendorong Perusahaan untuk melakukan transformasi operasional secara berkelanjutan. Dengan demikian, Perusahaan akan terus menjaga kualitas layanan untuk memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses bisnis sebagai upaya mempertahankan daya saing di industri jasa maritim.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Kondisi industri maritim senantiasa dipengaruhi oleh berbagai dinamika, baik yang berasal dari perkembangan perdagangan global, kebijakan ekonomi nasional, maupun perubahan teknologi dan pola logistik. Pergerakan arus barang internasional, pertumbuhan sektor industri, serta perkembangan infrastruktur pelabuhan turut membentuk tingkat aktivitas transportasi laut dan layanan kepelabuhanan. Berdasarkan analisis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan tren yang relatif positif, yang pada akhirnya berpotensi mendorong peningkatan aktivitas transportasi laut dan layanan kepelabuhanan. Pada Januari 2026, nilai

operational efficiency and accelerating the flow of ships and goods. However, its implementation still faces various obstacles, such as the readiness of technological infrastructure, dependence on internet connectivity, and the need for organizational and human resource adjustments to be able to operate digital systems optimally.

Furthermore, the Company also faces the challenge of ensuring that its digital transformation efforts not only focus on system development but are also effectively integrated with existing business processes. This includes the need to enhance the digital competencies of its workforce and ensure the readiness of the technological infrastructure supporting maritime service operations, including information system security. Digital transformation also demands changes in how the organization operates, where processes previously carried out manually must shift to data-driven systems and automation to improve the speed and accuracy of services.

In addition, technological advancements in the maritime sector are driving the Company to continue innovating to remain relevant to the industry's needs. The various innovations and digitalization initiatives emerging within Pelindo's ecosystem demonstrate that enhancing the competitiveness of the port industry hinges heavily on the Company's ability to leverage technology to support operations and data-driven decision-making.

Overall, the challenges faced throughout 2025 reflect the increasingly competitive and technology-driven dynamics of the port industry. Competition among maritime service providers requires the Company to continuously strengthen relationships with partners and expand its market reach, while the advancement of digitalization drives the Company to pursue continuous operational transformation. Consequently, the Company will continue to maintain service quality to strengthen collaboration with stakeholders and integrate digital technology into business processes as part of its efforts to maintain competitiveness in the maritime services industry.

BUSINESS OUTLOOK ANALYSIS

The state of the maritime industry is constantly influenced by various dynamics, including developments in global trade, national economic policies, and changes in technology and logistics patterns. The movement of international goods, industrial sector growth, and port infrastructure development all contribute to the level of maritime transport activity and port services. Based on data analysis from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's trade performance shows a relatively positive trend, which ultimately has the potential to drive an increase in maritime transport activity and port services. In January 2026, Indonesia's export value reached

ekspor Indonesia tercatat mencapai sekitar USD22,16 miliar, meningkat 3,39% yoy, dengan kontribusi ekspor nonmigas sebesar US$21,26 miliar atau naik 4,38% yoy. Peningkatan tersebut didorong oleh ekspansi sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan 8,19%, sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dan distribusi komoditas berbasis industri tetap menjadi penggerak utama perdagangan nasional.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga masih menunjukkan kondisi yang relatif kuat. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar USD41,05 miliar, yang terutama berasal dari surplus perdagangan sektor nonmigas sebesar USD60,75 miliar. Kondisi ini mencerminkan tingginya aktivitas ekspor-impor yang pada sebagian besar proses distribusinya memanfaatkan transportasi laut sebagai moda utama. Dengan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, lebih dari 90% perdagangan internasional umumnya dilakukan melalui jalur laut, sehingga peningkatan aktivitas perdagangan tersebut secara langsung berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap layanan kepelabuhanan, termasuk jasa pemanduan dan penundaan kapal yang menjadi bisnis inti Perusahaan. Dengan demikian, pertumbuhan perdagangan nasional menjadi indikator penting yang memperkuat prospek usaha perusahaan di masa mendatang.

Prospek positif tersebut juga diperkuat oleh meningkatnya aktivitas ekspor ke berbagai negara tujuan utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India yang secara kolektif menyerap porsi signifikan dari ekspor nonmigas Indonesia. Pada Januari 2026, ketiga negara tersebut menyumbang 43,77% dari total ekspor nonmigas Indonesia, yang menunjukkan bahwa arus perdagangan internasional Indonesia masih didominasi oleh pasar global utama. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur pelabuhan serta layanan pendukung operasional kapal, mulai dari jasa pemanduan, penundaan, hingga layanan maritim lainnya. Peningkatan arus perdagangan tersebut membuka peluang bagi Perusahaan untuk memperluas layanan *marine services* di berbagai pelabuhan strategis, terminal industri, maupun terminal khusus yang melayani kegiatan ekspor-impor komoditas.

Sejalan dengan prospek tersebut, Perusahaan melihat peluang pertumbuhan arus dagang berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan kapal dan kebutuhan layanan kepelabuhanan. Kondisi ini menjadi peluang untuk memperluas cakupan layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa pelayanan kapal yang terintegrasi di berbagai wilayah operasional.

Dalam rangka memanfaatkan peluang tersebut, pada tahun 2026 Perusahaan berencana melanjutkan berbagai inisiatif pengembangan pasar dan kerja sama usaha yang telah mulai dijajaki pada tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah penjajakan pengembangan pasar baru di wilayah *Ship-to-Ship* (STS) Sabang, Provinsi Aceh, yang memiliki potensi sebagai titik

approximately USD22.16 billion, up 3.39% year-over-year (yoy), with non-oil and gas exports contributing USD21.26 billion, a 4.38% increase year-over-year. This increase was driven by the expansion of the manufacturing sector, which grew by 8.19%, while also indicating that trade and distribution activities for industry-based commodities remain the primary drivers of national trade.

Indonesian trade balance also remains relatively strong. Throughout 2025, Indonesia recorded a trade surplus of USD41.05 billion, primarily driven by a non-oil and gas trade surplus of USD60.75 billion. This reflects high levels of import and export activity, with maritime transport serving as the primary mode of distribution for the majority of these transactions. Given Indonesia's geographical characteristics as an archipelago, more than 90% of international trade is generally conducted via sea routes; thus, the increase in trade activity has the potential to directly boost demand for port services, including vessel pilotage and towing services, which constitute the Company's core business. Consequently, national trade growth serves as a key indicator reinforcing the Company's business prospects for the future.

The positive outlook is further reinforced by rising export activity to key destination countries such as China, the United States, and India, which collectively account for a significant share of Indonesia's non-oil and gas exports. In January 2026, these three countries accounted for 43.77% of Indonesia's total non-oil and gas exports, indicating that Indonesia's international trade flows remain dominated by major global markets. This situation is driving an increased need for port infrastructure and operational support services for ships, ranging from pilotage and towing services to other maritime services. The increase in trade flows opens opportunities for the Company to expand its marine services at various strategic ports, industrial terminals, and specialized terminals that support commodity import and export activities.

Consistent with these prospects, the Company envisions opportunities for growth in trade volumes that could potentially increase the number of vessel calls and the demand for port services. This presents an opportunity to expand the scope of its services while strengthening its position as an integrated provider of vessel services across various operational regions.

To capitalize on these opportunities, the Company plans to continue various market development initiatives and business partnerships in 2026 that were first explored in 2025. One strategic step to be taken is exploring new market development in the Ship-to-Ship (STS) area of Sabang, Aceh Province, which has the potential to serve as a strategic maritime service hub along international



layanan maritim strategis di jalur pelayaran internasional. Selain itu, Perusahaan juga menjajaki kerja sama penyewaan 8 (delapan) unit kapal tunda berkekuatan 3.200 HP dengan PT Soechi Line untuk mendukung operasional kegiatan LNG di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas portofolio layanan pada sektor energi, khususnya pada kegiatan pengangkutan dan pelayanan kapal yang berkaitan dengan distribusi LNG.

Kemudian, Perusahaan juga memanfaatkan peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas layanan pemanduan dan penundaan kapal di sejumlah wilayah strategis. Beberapa di antaranya adalah penjajakan kerja sama dengan PT Benua Laut Lepas untuk layanan pemanduan dan penundaan kapal di kawasan Tanjung Carat, Palembang, serta rencana kerja sama dengan PT Bukit Prima dalam pengelolaan layanan pemanduan dan penundaan di terminal milik perusahaan tersebut. Selain itu, Perusahaan melakukan penjajakan pelimpahan layanan pemanduan dan penundaan kapal di kawasan Morowali, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas industri di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang saat ini berkembang sebagai salah satu pusat industri pengolahan mineral terbesar di Indonesia.

Pengembangan kerja sama juga diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung jasa kepelabuhanan di berbagai pelabuhan dan terminal industri. Dalam hal ini, Perusahaan menjajaki kerja sama penyediaan kapal tunda di Pelabuhan Tarakan (Kalimantan Utara), Pelabuhan Weda (Maluku Utara), serta Pelabuhan Meulaboh (Aceh). Selain itu, Perusahaan juga merencanakan kerja sama pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di terminal khusus milik PT Cemindo Gemilang, serta kerja sama dengan pemilik terminal khusus di area PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Tidak hanya itu, Perusahaan juga menjajaki kerja sama penyediaan sarana bantu pemanduan berupa kapal tunda dan awak kapal dengan sistem *on call* pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri milik PT Bukit Asam Tbk.

Strategi-strategi tersebut merupakan upaya Perusahaan dalam memperluas jangkauan layanan sekaligus memperkuat posisi di berbagai kawasan industri dan pelabuhan strategis di Indonesia. Strategi pengembangan pasar yang dilakukan pada tahun 2026 diharapkan mampu meningkatkan volume layanan pemanduan dan penundaan kapal, serta membuka peluang bagi pengembangan bisnis turunan jasa kepelabuhanan yang dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap kinerja Perusahaan. Dengan memanfaatkan pertumbuhan perdagangan nasional serta meningkatnya aktivitas logistik maritim, Perusahaan optimistis bahwa prospek usaha di sektor jasa pelayanan kapal akan tetap terbuka dan memberikan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

shipping routes. In addition, the Company is also exploring a partnership with PT Soechi Line to charter 8 (eight) 3,200 HP tugboats to support LNG operations in the Nusa Tenggara Islands. This partnership is expected to expand the service portfolio in the energy sector, particularly in vessel transportation and services related to LNG distribution.

Furthermore, the Company is also capitalizing on opportunities for collaboration with various parties to expand its vessel pilotage and towage services in several strategic regions. These include exploring a partnership with PT Benua Laut Lepas for vessel pilotage and towing services in the Tanjung Carat area of Palembang, as well as plans for a partnership with PT Bukit Prima to manage pilotage and towing services at the company's terminals. The Company is also exploring the delegation of vessel pilotage and towage services in the Morowali area, particularly in relation to industrial activities within the PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) zone, which is currently developing into one of Indonesia's largest mineral processing industrial hubs.

Collaboration development is also focused on providing facilities and infrastructure to support port services at various ports and industrial terminals. In this regard, the Company is exploring partnerships for the provision of tugboats at Tarakan Port (North Kalimantan), Weda Port (North Maluku), and Meulaboh Port (Aceh). In addition, the Company is also planning cooperation for vessel pilotage and towing services at terminals owned by PT Cemindo Gemilang, as well as cooperation with owners of dedicated terminals in the area of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Furthermore, the Company is exploring cooperation for the provision of pilotage support facilities in the form of tugboats and crew on an on-call basis at the Private Terminal owned by PT Bukit Asam Tbk.

These strategies represent the Company's efforts to expand its service reach while strengthening its position in various industrial zones and strategic ports across Indonesia. The market development strategies implemented in 2026 are expected to increase the volume of vessel pilotage and towage services, as well as open opportunities for the development of port-related service businesses that can provide additional contributions to the Company's performance. By leveraging national trade growth and the increasing maritime logistics activity, the Company is optimistic that business prospects in the vessel services sector will remain favorable and provide sustainable growth opportunities for the Company.

PERKEMBANGAN PENERAPAN GCG

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan terus memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sebagai perusahaan terbuka yang juga merupakan bagian dari ekosistem BUMN, Perusahaan memastikan bahwa penerapan tata kelola senantiasa selaras dengan ketentuan regulator, termasuk peraturan dari BP BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Perusahaan juga mengadopsi praktik terbaik tata kelola melalui penerapan prinsip ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola secara berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat implementasi GCG, Perusahaan terus menyempurnakan kebijakan tata kelola perusahaan yang menjadi landasan dalam pengelolaan organisasi. Kebijakan tersebut tersusun dalam struktur tata kelola yang dikenal sebagai *soft structure of corporate governance*, yang memuat berbagai pedoman dan kebijakan internal yang mengatur prinsip *checks and balances* dalam pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut mencakup antara lain Pedoman *Good Corporate Governance* yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor HK.01/7/11/4/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 7 November 2025, Pedoman Kode Etik Bisnis, kebijakan manajemen risiko, kebijakan keterbukaan informasi, kebijakan benturan kepentingan terintegrasi, kebijakan *anti fraud*, serta kebijakan *Environment, Social, and Governance* (ESG). Kebijakan-kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan. Dengan adanya kebijakan tersebut, seluruh unit kerja memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Sebagai upaya memastikan bahwa prinsip GCG dapat dipahami dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh karyawan, Perusahaan secara aktif menyelenggarakan sosialisasi GCG sepanjang tahun 2025. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai forum formal, rapat internal, serta kegiatan kebersamaan yang didukung oleh berbagai sarana komunikasi. Selain penyampaian secara langsung, materi terkait tata kelola perusahaan juga dapat diakses melalui portal internal maupun situs resmi Perusahaan sehingga memudahkan seluruh karyawan dalam memahami prinsip-prinsip GCG. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap kebijakan dalam setiap aktivitas operasional.

GCG PRACTICES DEVELOPMENT

Throughout 2025, the Company continued to strengthen the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as the cornerstone in conducting business activities with transparency, accountability, and integrity. As a publicly listed company that is also part of the SOE ecosystem, the Company ensures that its governance practices are always in line with regulatory requirements, including regulations from the State-Owned Enterprises Agency (BP BUMN) and the Financial Services Authority (OJK). In addition, the Company also adopted best governance practices through the implementation of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) principles and the 2021 Indonesian General Corporate Governance Guidelines (PUGKI) as references for continuously improving the quality of governance.

To strengthen the implementation of GCG, the Company continues to refine its corporate governance policies, which serve as the foundation for organizational management. These policies are organized within a governance framework known as the "soft structure of corporate governance," which includes various internal guidelines and policies governing the principles of checks and balances in decision-making. These policies include, among others, the Good Corporate Governance Guidelines established through Board of Directors Regulation No. HK.01/7/11/4/KGC/DUT/JAI-25 dated November 7, 2025, the Business Code of Ethics Guidelines, risk management policies, information disclosure policies, integrated conflict of interest policies, anti-fraud policies, and Environment, Social, and Governance (ESG) policies. These policies were formulated in accordance with the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and best practices in corporate governance. With these policies in place, all business units have clear guidelines for conducting business activities.

To ensure that the principles of good corporate governance (GCG) are understood and consistently implemented by all employees, the Company actively conducted GCG awareness campaigns throughout 2025. These campaigns were carried out through various formal forums, internal meetings, and team-building activities supported by various communication channels. In addition to direct presentations, materials related to corporate governance are also accessible through the internal portal and the Company's official website, making it easier for all employees to understand GCG principles. These efforts aim to build collective awareness regarding the importance of integrity, transparency, and compliance with policies in all operational activities.



Sebagai bagian dari penguatan budaya integritas, Perusahaan juga secara konsisten melakukan sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi kepada seluruh karyawan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai etika bisnis serta memperkuat komitmen dalam menolak segala bentuk praktik korupsi, suap, maupun gratifikasi. Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi tersebut antara lain dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) melalui kegiatan edukatif yang melibatkan seluruh divisi dan area Perusahaan. Selain itu, kampanye integritas juga dilakukan melalui berbagai media komunikasi internal dan eksternal serta diperkuat melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Insan Perusahaan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas di lingkungan kerja.

To reinforce a culture of integrity, the Company also consistently conducts anti-corruption and gift control awareness programs for all employees. This program aims to enhance understanding of business ethics and strengthen the commitment to rejecting all forms of corruption, bribery, and gifts. In 2025, these awareness activities were conducted, among other things, to commemorate International Anti-Corruption Day (HAKORDIA) through educational initiatives involving all divisions and regions of the Company. Additionally, integrity campaigns are carried out through various internal and external communication channels and reinforced by the signing of an integrity pact by all Company personnel at the beginning of the year as a collective commitment to upholding integrity in the workplace.

Dalam rangka mengukur efektivitas penerapan tata kelola, Perusahaan secara berkala melakukan penilaian penerapan GCG. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sesuai Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015. Implementasi GCG Perusahaan dipetakan melalui 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip utama, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang menjadi standar minimum bagi perusahaan terbuka. Hasil pemetaan implementasi pada tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi seluruh 25 rekomendasi tata kelola yang ditetapkan dalam pedoman tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), Perusahaan memperoleh skor GCG sebesar 124,67 dengan predikat *Leadership in corporate governance*.

The Company periodically conducts assessments of its GCG implementation to measure its effectiveness. These assessments are conducted in accordance with the Guidelines on Corporate Governance for Public Companies as stipulated in OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015. The Company's GCG implementation is mapped across 5 (five) aspects, 8 (eight) core principles, and 25 (twenty-five) governance recommendations that serve as the minimum standard for public companies. The results of the implementation mapping for the 2025 fiscal year indicate that the Company has met all 25 governance recommendations outlined in the guidelines. Additionally, based on the assessment conducted by the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), the Company received a GCG score of 124,67 with a rating of Leadership in corporate governance.

Selain penguatan kebijakan dan evaluasi tata kelola, Perusahaan juga mengimplementasikan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai mekanisme pengendalian internal untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran di lingkungan Perusahaan. Sistem ini memberikan kesempatan bagi seluruh Insan Perusahaan maupun pihak eksternal seperti pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran terhadap prinsip etika dan tata kelola perusahaan. Setiap laporan yang masuk dijamin kerahasiaan identitas pelapornya serta dilindungi dari potensi tindakan balasan, selama laporan disampaikan dengan itikad baik dan disertai bukti yang memadai. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan memanfaatkan infrastruktur sistem pelaporan yang dikelola oleh induk usaha, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero), melalui kanal pelaporan "Pelindo Bersih". Untuk memastikan pengelolaan sistem pelaporan berjalan efektif, Perusahaan juga membentuk Komite WBS berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor HK.01/7/11/7/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 7 November 2025. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan pelanggaran yang masuk melalui sistem WBS, sehingga tidak terdapat pengaduan yang diproses maupun diselesaikan selama periode tersebut.

Apart from strengthening policies and evaluating corporate governance, the Company has also implemented a Whistleblowing System (WBS) as an internal control mechanism to detect and prevent potential violations within the Company. This system provides an opportunity for all Company personnel as well as external parties, such as customers, business partners, and the public, to report indications of violations of ethical principles and corporate governance. The confidentiality of the reporter's identity is guaranteed for every report received, and the reporter is protected from potential retaliation, provided the report is submitted in good faith and accompanied by sufficient evidence. In its implementation, the Company utilizes the reporting system infrastructure managed by its parent company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), through the "Pelindo Bersih" reporting channel. To ensure the reporting system is managed effectively, the Company also established the WBS Committee pursuant to Board of Directors Decision No. HK.01/7/11/7/KGC/DUT/JAI-25 dated November 7, 2025. Throughout 2025, no reports of violations were received through the WBS system; consequently, no complaints were processed or resolved during that period.

Di sisi lain, Perusahaan juga terus memperkuat sistem manajemen risiko sebagai bagian integral dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan pembaruan kebijakan penerapan manajemen risiko melalui Peraturan Direksi Nomor HK.01/24/3/2/TRK/DUT/JAI-25 tanggal 24 Maret 2025. Implementasi manajemen risiko juga diperkuat melalui pembentukan tim manajemen risiko di masing-masing unit kerja, peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pemanfaatan aplikasi Pelindo Risk Management (PRiMa) dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, manajemen risiko diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif terhadap operasional dan kinerja Perusahaan.

Meanwhile, the Company continues to strengthen its risk management system as an integral part of its implementation of Good Corporate Governance. In 2025, the Company updated its risk management policy through Board Regulation No. HK.01/24/3/2/TRK/DUT/JAI-25 dated March 24, 2025. Risk management implementation was also strengthened through the formation of risk management teams in each work unit, the enhancement of personnel competencies through training and certification, and the utilization of the Pelindo Risk Management (PRiMa) application in the integrated process of risk identification, measurement, monitoring, and control. With this approach, risk management is expected to support the achievement of the Company's objectives while minimizing the potential negative impact on the Company's operations and performance.

Sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga integritas bisnis, Perusahaan juga menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diatur melalui Peraturan Direksi Nomor HK.01/10/11/3/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 10 November 2025. Implementasi sistem ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan berbagai bentuk praktik korupsi, suap, maupun gratifikasi dalam kegiatan operasional Perusahaan. Perusahaan membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang sekaligus berperan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) serta unit pengelola benturan kepentingan dan *fraud*. Tim ini bertanggung jawab melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi, menerima dan menindaklanjuti laporan gratifikasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila diperlukan, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan.

The Company has implemented an Anti-Bribery Management System (ABMS) as part of its commitment to maintaining business integrity, as regulated by Board Regulation No. HK.01/10/11/3/KGC/DUT/JAI-25 dated November 10, 2025. The implementation of this system aims to prevent and control various forms of corruption, bribery, and gratuities in the Company's operational activities. The Company has established an Anti-Bribery Compliance Function Team, which also serves as the Gratuity Control Unit (GCU) and manages conflicts of interest and fraud. This team is responsible for conducting awareness campaigns on gratuity control, receiving and following up on gratuity reports, and coordinating with relevant parties, including PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Corruption Eradication Commission (KPK) if necessary, to create a clean and transparent business environment.

Secara keseluruhan, Perusahaan terus menjaga komitmen yang kuat dalam membangun sistem tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan tata kelola, sosialisasi, evaluasi penerapan GCG secara rutin, implementasi *Whistleblowing System*, penguatan sistem manajemen risiko, serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Perusahaan terus berupaya memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dijalankan sesuai dengan prinsip Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan (ETAK). Dilandasi fondasi tata kelola yang kuat tersebut, Perusahaan optimistis dapat menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di masa mendatang.

Overall, the Company remains strongly committed to establishing an effective and sustainable corporate governance system. This is achieved through the refinement of governance policies, outreach, regular evaluation of GCG implementation, the implementation of a Whistleblowing System, the strengthening of the risk management system, and the implementation of an Anti-Bribery Management System. The Company continues to strive to ensure that all operational activities are conducted in accordance with the principles of Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability (ETAK). Built on this strong governance foundation, the Company is confident it can maintain the trust of shareholders and stakeholders while supporting sustainable business growth in the future.



PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Berdasarkan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan tanggal 18 Juni 2025, Perusahaan telah menyetujui pengangkatan Bapak Arief Hermawan sebagai Direktur Armada dan Operasi terhitung sejak ditutupnya rapat. Oleh karena itu, berikut susunan komposisi Direksi Perusahaan per 31 Desember 2025:

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on June 18, 2025, the Company has approved the appointment of Mr. Arief Hermawan as Director of Fleet Management and Operations, effective as of the close of the meeting. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Shanti Puruhita	Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development	▪ Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020; ▪ Akta Notaris No. 33 tanggal 17 Juni 2021; ▪ Akta Notaris No. 16 tanggal 6 Desember 2022; ▪ Akta Notaris Nomor 31 tanggal 12 Juni 2024. ▪ Deed of Notary No. 24 dated July 15, 2020; ▪ Deed of Notary No. 33 dated June 17, 2021; ▪ Deed of Notary No. 16 dated December 6, 2022; ▪ Deed of Notary No. 31 dated June 12, 2024.	12 Juni 2024 (periode kedua) June 12, 2024 (second period)
Arief Hermawan	Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operations	Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Juni 2025 Deed of Notary No. 25 dated June 18, 2025	18 Juni 2025 (periode pertama) June 18, 2025 (first period)
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Resources, and Risk Management	Akta Notaris Nomor 31 tanggal 12 Juni 2024 Deed of Notary No. 31 dated June 12, 2024	12 Juni 2024 (periode pertama) June 12, 2024 (first period)

APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Direksi mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan serta kepercayaan yang senantiasa diberikan kepada Perusahaan. Dukungan tersebut menjadi faktor penting yang turut mendorong Perusahaan dalam menjaga kinerja usaha sekaligus memastikan kelangsungan operasional berjalan dengan baik. Sinergi yang terjalin secara konstruktif dengan para pemangku kepentingan telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung berbagai upaya pengembangan dan pencapaian target Perusahaan sepanjang tahun berjalan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Komisaris atas peran aktifnya dalam memberikan arahan, masukan strategis, serta pengawasan yang berkelanjutan terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan. Pandangan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris menjadi salah satu elemen penting yang memperkuat kualitas pengambilan keputusan serta mendukung keberlangsungan usaha Perusahaan. Selain itu, Direksi juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Perusahaan yang telah menunjukkan komitmen, kerja keras, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kegiatan operasional Perusahaan dapat terlaksana secara optimal.

STAKEHOLDERS APPRECIATION

The Board of Directors extends its sincere gratitude to all stakeholders for their continued support and trust in the Company. This support has been a key factor in driving the Company to maintain its business performance while ensuring the smooth continuity of its operations. The constructive synergy fostered with stakeholders has made a tangible contribution to supporting the Company's various development initiatives and the achievement of its targets throughout the current year.

We would also like to express our gratitude to the Board of Commissioners for their active role in providing guidance, strategic input, and ongoing oversight of the Company's management. The insights and recommendations provided by the Board of Commissioners are a key factor in strengthening the quality of decision-making and supporting the Company's business continuity. The Board of Directors also extends its highest appreciation to all Company employees who have demonstrated commitment, hard work, and high dedication in carrying out their duties and responsibilities, ensuring that the Company's operational activities are executed optimally.

Direksi meyakini bahwa berbagai upaya, kerja keras, serta capaian yang berhasil diraih sepanjang tahun ini akan memberikan dampak positif bagi perjalanan Perusahaan di masa mendatang. Fondasi yang telah dibangun melalui kolaborasi dan semangat kebersamaan diharapkan dapat menjadi pijakan yang kuat bagi Perusahaan dalam melangkah lebih maju, sekaligus menjadi modal penting dalam mewujudkan visi serta sasaran strategis Perusahaan secara berkelanjutan.

The Board of Directors strongly believes that the hard work and achievements made throughout this year will have a positive impact on the Company's future trajectory. The foundation built through collaboration and a spirit of unity is expected to serve as a strong foundation for the Company to move forward, while also serving as a vital asset in the sustainable realization of the Company's vision and strategic objectives.

Atas Nama Direksi
Jakarta, 28 April 2026
On Behalf of Board of Directors
Jakarta, April 28, 2026



SHANTI PURUHITA
Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development



Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Responsibility Statement of Members of the Board of Commissioners on the 2025 Annual Report of Pt Jasa Armada Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk has been presented in its entirety, and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 28 April 2026
Jakarta, April 28, 2026

Dewan Komisaris
Board Of Commissioners

R.R. DEWI ARIYANI
Komisaris Utama
President Commissioner

F. BUDI PRAYITNO
Komisaris
Commissioner

MITCHELL JULIUS TUPAMAHU
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DONI ISTYANTO HARI MAHDI
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Surat Pernyataan Anggota Direktur Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Responsibility Statement of Members of the Board of Directors on the 2025 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2025 Annual Report of PT Jasa Armada Indonesia Tbk has been presented in its entirety, and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 28 April 2026
Jakarta, April 28, 2026

Direksi
Board of Directors

SHANTI PURUHITA
Direktur Utama
merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
President Director
concurrently serving as Director of Commercial and Business Development

ARIEF HERMAWAN
Direktur Armada dan Operasi
Director of Fleet Management and Operations

DESSY EMASTARI PRIHATININGTYAS
Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko
Director of Finance, HR, and Risk Management

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Profil Perusahaan
Company Profile



Dengan jaringan operasional di banyak pelabuhan dan didukung SDM profesional serta sertifikasi internasional, Perusahaan berperan sebagai simpul logistik maritim nasional yang andal dan terpercaya dalam ekosistem Pelindo *Group*.

With an operational network across multiple ports, supported by professional human resources and international certifications, the Company plays a role as a reliable and trusted national maritime logistics node within the Pelindo Group ecosystem.


KT BIMA 34



Identitas dan Informasi Umum Perusahaan

General Information and Company Identity



Nama Perusahaan
Company Name

PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Kode Saham Ticker Code	**IPCM**
Tanggal Pendirian Establishment Date	**10 Juli 2013** July 10, 2013
Informasi Perubahan Nama Information on Name Changes	**Sejak awal berdiri pada tanggal 10 Juli 2013 hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama dari "PT Jasa Armada Indonesia".** Since its establishment on July 10, 2013, up to the issuance of this annual report, the Company has never changed its name from "PT Jasa Armada Indonesia".
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	**Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 10 Juli 2013, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-47228.AH.01.01. Tahun 2013, tanggal 9 September 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0084678. AH.01.09. Tahun 2013, tanggal 9 September 2013.** The Deed of Establishment No. 24 dated July 10, 2013, was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-47228.AH.01.01.Year 2013 dated September 9, 2013, and was registered in the Company Register No. AHU-0084678.AH.01.09.Year 2013 dated September 9, 2013.
Bidang Usaha Business Fields	**Perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, penundaan, pengepilan, pengangkutan laut, penyewaan kapal, dan pengoperasian kapal.** The Company is engaged in the provision of pilotage, towage, mooring, sea transportation, ship chartering, and ship operation services.
Jaringan Usaha Business Network	**11** **Pelabuhan Umum Pelindo Regional 2** Public Ports under Pelindo Regional 2 **7** **Pelabuhan/TUKS/ Tersus/Perairan** Ports/Private Port/ Special Terminals/Waters **7** **Kerja Sama Operasi** Joint Operations *disajikan selengkapnya pada bab Profil Perusahaan dibagian Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi dalam Laporan Tahunan ini. *details are presented in the Company Profile chapter under Business Network and Operational Areas in this Annual Report.
Kepemilikan Saham Share Ownership	▪ **PT Pelindo Jasa Maritim 76,89% atau 4.063.504.600 lembar saham.** ▪ **PT Multi Terminal Indonesia 0,11% atau 5.800.000 lembar saham.** ▪ **Masyarakat 23% atau 1.215.506.500 lembar saham.** ▪ PT Pelindo Jasa Maritim 76.89% or 4,063,504,600 shares ▪ PT Multi Terminal Indonesia 0.11% or 5,800,000 shares ▪ Public 23% or 1,215,506,500 shares
Jumlah Pekerja (Penugasan Pelindo, PKWT, TAD) Number of Employees (Pelindo Assignments, Fixed-Term Contracts, Temporary Workers)	**839 orang (2025)** 839 employees (2025)





Modal Dasar
Authorized Capital

Rp1.500.000.000.000,- (Satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 15.000.000.000 (Lima belas miliar) lembar saham dengan nilai masing-masing saham Rp100,- (Seratus Rupiah).
Rp1,500,000,000,000 (One trillion five hundred billion Rupiah) divided into 15,000,000,000 (Fifteen billion) shares, each with a nominal value of Rp100 (One hundred Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Paid Up Capital

Rp528.481.110.000,- (Lima ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) terdiri atas 5.284.811.100 (Lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100,- (Seratus Rupiah).
Rp528,481,110,000 (Five hundred twenty-eight billion four hundred eighty-one million one hundred ten thousand Rupiah), consisting of 5,284,811,100 (Five billion two hundred eighty-four million eight hundred eleven thousand one hundred) shares.

Total Aset
Total Assets

Rp 1,71
Triliun | Trillion

per 31 Desember 2025
as of December 31, 2025

Tanggal Pencatatan di Bursa
Stock Listing Date

22
Desember 2017
December 22, 2017





Akses Terhadap Perusahaan Termasuk Kantor Cabang Atau Perwakilan

Access to Company, including Branch and Representative Offices

Kantor Pusat
Head Office

Pelindo Tower, Lantai 8 & 9
Jl. Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, Jakarta 14230
E-mail: corsec@ipcmarine.co.id

Situs Website
Website

www.ipcmarine.co.id

Kontak Perusahaan
Official Contact

Corporate Secretary
Pelindo Tower, Lantai 8 & 9
Jl. Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara, Jakarta 14230
Call Centre : 121
E-mail : corsec@ipcmarine.co.id.

Investor Relations
E-mail : corsec@ipcmarine.co.id

Whistleblowing System
Website : https://pelindobersih.pelindo.co.id
Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010
Telp : +62 21 2782 2345
E-mail : pelindobersih@whistleblowing.link

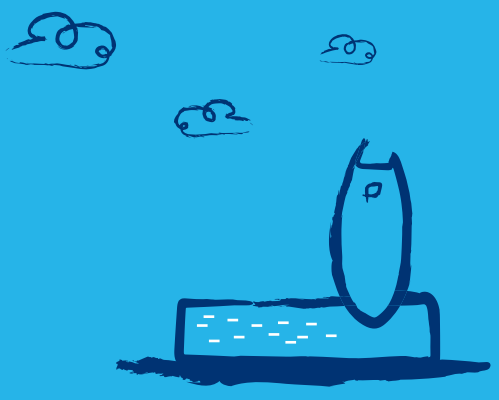
Customer Service
E-mail : corsec@ipcmarine.co.id.
Call Centre : 121

Media Sosial
FP Facebook : IPCMarine
Instagram : @ipcmarine
X : @ipcmarine_
TikTok : @ipcmarine
Youtube : PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk/IPCM

Kantor Cabang
Branch

AREA I
AREA I

Tanjung Priok
Central Work Shop
Jl. Raya Pelabuhan Pos 9. Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
E. jai_tanjungpriok@ipcmarine.co.id



AREA II
AREA II

Banten
Jl. Raya Pelabuhan No.1,
Ciwandan, Banten 42166
P. +62 254 7960010
E. jai_banten@ipcmarine.co.id

Bayah
Jl. Bayah Tugu, RT 2 RW 9
Desa Bayah Barat Kec. Bayah
P. +62 812 8027 8112
E. Jai.bayah@ipcmarine.co.id

Pontianak
Jl. Pak Kasih No. 11,
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78111
E. jai_pontianak@ipcmarine.co.id



AREA III
AREA III

Bengkulu
Lt. 3 Gedung Kepanduan
PT Pelindo Regional 2 Bengkulu
Jl. Yos Sudarso No. 9 Pulau Baai, Bengkulu
P. +62 736 5512735
E. jai_bengkulu@ipcmarine.co.id

Panjang
Jl. Yos Sudarso No. 337,
Panjang, Bandar Lampung
P. +62 721 342431
E. jai_panjang@ipcmarine.co.id

Laiwui
Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada Tbk.
Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara



AREA IV
AREA IV

Teluk Bayur
Jl. Sutan Syahril No.213 A
Mata Air Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat 25216
P. +62 751 63690
E. jai_telukbayur@ipcmarine.co.id

Pangkal Balam
Jl. Yos Sudarso No. 1,
Pangkal Pinang 33144
P. +62 717 432678
E. jai_pangkalpinang@ipcmarine.co.id

Palembang
Jl. Belinyu No. 1,
Boom Baru, Palembang 30115
P. +62 711 717102
E. jai_palembang@ipcmarine.co.id

Tanjung Pandan
Jl. Pelabuhan No. 1,
Tanjung Pandan, Belitung 33411
P. +62 719 25486
E. jai_tanjungpandan@ipcmarine.co.id

Jambi
Jl.Raya Pelabuhan Km 09
Talang Duku, Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi 36382
E. jai.petrochinajabung@ipcmarine.co.id
E. jai_jambi@ipcmarine.co.id

AREA V
AREA V

Cirebon
Jl. Belawan No.1
Kel. Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Cirebon 45112
E. jai_cirebon@ipcmarine.co.id

Patimban
Jl. Raya Pelabuhan Utama,
Perkantoran Pelabuhan Patimban, Kec. Pusakanagara, Kab. Subang, Jawa Barat 41255
P. +62 811 897 2000
E. jai_patimban@ipcmarine.co.id



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perusahaan"), disebut juga "JAI" atau "IPCM", secara resmi dibentuk pada tahun 2013 atas *spin-off* unit usaha Pemanduan dan Penundaan dari perusahaan induknya yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) - sebelumnya bernama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) - beroperasi sebagai unit usaha dari Induk Perusahaan Nasional Pelabuhan ("PN Pelabuhan") sejak tahun 1960.



PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("the Company"), also referred to as "JAI" or "IPCM", was officially established in 2013 as a spin-off of the Pilotage and Towage business unit from its parent company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) - formerly known as PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) - which had been operating as a business unit under the National Port Company ("PN Pelabuhan") since 1960.

Selama tahun 1964–1969, izin operasional pelabuhan di Indonesia hanya diberikan kepada Otoritas Pelabuhan, di mana PN Pelabuhan berfokus pada aspek komersial. Izin operasi diberikan kepada masing-masing pelabuhan pada tahun 1969–1983, akibatnya PN Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan dihapuskan. Kemudian, di tahun 1985, seluruh operator pelabuhan di Indonesia digabung menjadi 4 perusahaan, dengan 4 perusahaan yang beroperasi menurut wilayahnya masing-masing. Salah satunya adalah Perum Pelabuhan II, dan perusahaan tersebut menjadi unit usaha Perum Pelabuhan II.

During 1964-1969, port operational permits in Indonesia were only granted to the Port Authority, during which time PN Pelabuhan focused on commercial aspects. During 1969-1983, operational permits were granted to individual ports, resulting in the dissolution of both PN Pelabuhan and the Port Authority. Afterwards, in 1985, all port operators in Indonesia were merged into 4 companies, each operating based on its designated region. One of these was Perum Pelabuhan II, which became a business unit of Perum Pelabuhan II.

Pada tahun 1992, badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Perum Pelabuhan II berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dan layanan pemanduan serta penundaan masuk ke dalam usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

In 1992, the legal status of Perum was changed to a Limited Liability Company (PT) under Government Regulation No. 57/1991, with its shares held by the Government of the Republic of Indonesia, thus Perum Pelabuhan II was renamed PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), and pilotage and towage services became part of its operations.

Seiring dengan diluncurkannya identitas baru pada tahun 2012 oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai IPC, diikuti dengan transformasi untuk lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan, pada tanggal 10 Juli 2013 telah dibentuk usaha layanan jasa pemanduan dan penundaan yang aka didirikan PT Jasa Armada Indonesia atau dikenal dengan IPC Marine berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 24 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-47228.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

With the launch of a new identity in 2012 by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), branded as IPC, followed by a transformation to serve customers more effectively and efficiently, on July 10, 2013, PT Jasa Armada Indonesia, known as IPC Marine, was established for pilotage and towage services based on the Company Establishment Deed No. 24 dated July 10, 2013, drawn before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under Decree No. AHU-47228.AH.01.01 Year 2013 dated September 9, 2013.

Sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 44 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047245.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022, serta perubahan susunan pengurus perusahaan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 16 tanggal 6 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHUAH.01.09-0088180 tanggal 16 Desember 2022.

Several amendments have been made since, the most recent being Deed No. 44 of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 23, 2022, before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and approved by Decree No. AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022, and the most recent changes to the Company's management structure were documented in Deed No. 16 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 6, 2022, before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and notified to the Ministry of Law and Human Rights via Notification Receipt No. AHU-AH.01.09-0088180 dated December 16, 2022.

Setelah *spin-off*, IPCM melakukan investasi besar untuk meningkatkan kualitas armada dan menambah kapasitas personel sesuai dengan standar internasional. di bawah supervisi Thome Consulting, Singapore. Hasilnya, kualitas armada meningkat dari *Grade* 2,4 (48% dari skor tertinggi 100%) menjadi *Grade* 3,6 (72%). IPCM melakukan optimasi secara revolusioner di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan sistem pengadaan barang. Hal ini dilakukan melalui *strong corporate governance*, dan peningkatan integritas SDM guna memastikan kualitas layanan dengan standar tertinggi serta tingkat profitabilitas secara berkelanjutan. IPCM juga meningkatkan kualitas dan memasarkan Layanan VVIP dengan standar *Zero Waiting Time*. Hasilnya, pasar di luar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berkembang, dan pendapatan Perusahaan meningkat 68% di tahun pertama operasi penuh setelah *spin-off*. Dengan pengalaman operasi selama 60 tahun, total armada 72 unit kapal, kinerja pemanduan & penundaan 52.000 kapal/tahun, serta kapabilitas dalam melayani klien-klien ternama nasional dan asing, IPCM adalah perusahaan yang paling berpengalaman, paling besar, dan paling dapat diandalkan di Indonesia.

After the spin-off, the Company made significant investments to upgrade its fleet and increase personnel capacity according to international standards, under the supervision of Thome Consulting, Singapore. As a result, the fleet quality improved from Grade 2.4 (48% of the maximum score of 100%) to Grade 3.6 (72%). The Company carried out a revolutionary optimization in maintenance, repair, and procurement systems. This was implemented through strong corporate governance and enhanced human resource integrity to ensure the highest service quality and sustainable profitability. IPCM also enhanced and promoted its VVIP Services with a Zero Waiting Time standard. As a result, markets outside of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) grew, and Company revenue increased by 68% in its first full year of operation after the spin-off. With over 60 years of operational experience, a fleet of 72 vessels, pilotage and towage handling of 52,000 vessels/year, and capabilities to serve prominent national and international clients, IPCM is the largest, most experienced, and most reliable company in Indonesia in its field.

Sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang bergerak dalam bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengoperasian kegiatan pelayanan kapal, penumpang, kargo dan yang berhubungan dengan pelabuhan, termasuk penyediaan jasa penundaan dan mengusahakan pelayanan jasa pemanduan, serta penyediaan sarana bantu pemanduan dan prasarana pemanduan, Perusahaan mentransformasikan nilai-nilai perusahaan induk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Aksi Korporasi dalam bentuk *Operational Excellence, Customer Centricity*, dan *Quantum Leap* untuk mengoptimalkan pelanggan, pemasok, komunitas, lingkungan, pekerja, dan kepuasan pemegang saham.

As a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) engaged in the provision and operation of vessel services, passenger, cargo services, and port-related activities, including tug services and pilotage, as well as the provision of pilotage support equipment and infrastructure, the Company has transformed the parent company's corporate values into Corporate Actions through Operational Excellence, Customer Centricity, and Quantum Leap, aimed at optimizing value for customers, suppliers, communities, the environment, employees, and shareholders.



Pada Desember 2017, IPCM resmi melangkah ke pasar modal melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang dilaksanakan pada 15–18 Desember 2017. Dalam penawaran tersebut, IPCM melepas 1.215.506.500 saham baru atau setara dengan 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Saham IPCM kemudian tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017, menandai dimulainya babak baru sebagai perusahaan terbuka. Seiring dengan perubahan status menjadi perusahaan publik, IPCM juga memperkenalkan identitas korporasi baru dengan nama IPC Marine, sebagaimana tertuang dalam Akta No.14 tanggal 11 Oktober 2017.

In December 2017, IPCM officially entered the capital market through an Initial Public Offering (IPO) conducted from December 15 to 18, 2017. In this offering, IPCM issued 1,215,506,500 new shares, equivalent to 23% of the Company's issued and fully paid share capital after the IPO. IPCM's shares were subsequently listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2017, marking the beginning of a new chapter as a publicly listed company. In line with its transformation into a public company, IPCM also introduced a new corporate identity under the name IPC Marine, as stipulated in Deed No. 14 dated October 11, 2017.

Memasuki tahun 2018, IPCM terus memperkuat fondasi operasionalnya melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PT Citra Shipyard Batam untuk pengadaan 4 unit kapal tunda tipe *Azimuth Stern Drive* (ASD) dengan daya minimal 2x2200 HP, serta menerima pelimpahan pelaksanaan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal *ship-to-ship* (STS) di wilayah perairan Muara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, serta Muara Sabak Jambi, dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Entering 2018, IPCM continued to strengthen its operational foundation through the signing of a cooperation agreement with PT Citra Shipyard Batam for the procurement of four Azimuth Stern Drive (ASD) tugboats with a minimum power of 2 × 2,200 HP, and the delegation of ship pilotage and tug assistance services for ship-to-ship (STS) operations in the waters of the Musi River Estuary, Palembang, South Sumatra, and Muara Sabak, Jambi, from the Ministry of Transportation, Directorate General of Sea Transportation.

Di tahun 2020, IPCM menghadiri acara penandatanganan kerja sama pelayanan pemanduan dan penundaan antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Pontianak dan Kepala Unit Pelayanan Pelabuhan ("KUPP") Telok Melano dan KUPP Kendawangan di mana pelayanan penundaan akan dilakukan oleh IPCM selaku anak perusahaan IPC. Masih di tahun ini juga, IPCM melakukan Penandatanganan MoU PT Jawa Satu Power dan Penandatanganan Kerja Sama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas Wilayah Perairan Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

In 2020, IPCM attended the signing of a cooperation agreement on pilotage and tug assistance services between PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Pontianak Port Branch, and the Heads of the Port Service Units ("KUPP") of Telok Melano and Kendawangan, under which tug assistance services would be provided by IPCM as a subsidiary of IPC. In the same year, IPCM also signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Jawa 1 Power and entered into a cooperation agreement for vessel services at the Special Terminal of PT Nusantara Regas in the waters of the Seribu Islands, DKI Jakarta Province.

Memasuki tahun 2021, IPCM dan PT Jawa Satu Power (JSP) melakukan perikatan kerja sama pelayanan jasa kapal di Terminal Khusus FSRU Jawa Satu Regas. Di tahun ini juga, IPCM menandatangani nota kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan anak perusahaan Pelabuhan Indonesia III, yakni PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marines), mengenai penyiapan rencana kerja sama dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan kapal, di Kantor Pusat Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hal ini sekaligus mendukung rencana penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: S-756/MBU/10/2021. Selanjutnya, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo. Kemudian, pada tanggal 29 November 2021, didirikan PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) yang juga merupakan anak perusahaan Pelindo, yang kemudian akan menjadi induk IPCM melalui inbreng saham.

Entering 2021, IPCM and PT Jawa Satu Power (JSP) enter into a service agreement for vessel services at the Jawa Satu Regas FSRU Special Terminal. In the same year, IPCM signed a Memorandum of Understanding (MoU) with a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia III, namely PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marines), regarding the preparation of a cooperation plan for the provision and/ or servicing of vessels, at the Tanjung Perak Port Area Head Office, Surabaya. This initiative also supported the merger of the state-owned port companies, namely PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which took effect on October 1, 2021, in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2021 and the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. S-756/MBU/10/2021. Subsequently, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo). Furthermore, on November 29, 2021, PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) was established as a subsidiary of Pelindo, which would later become IPCM's holding company through a share capital contribution (inbreng saham).

Pada tahun 2022, IPCM mencatat berbagai langkah strategis untuk memperkuat posisi bisnis dan memperluas jangkauan pasar. IPCM menambah 4 Kapal Tunda baru ke dalam armada serta mendorong pembangunan dua kapal tambahan dalam tender. Selain itu, tahun 2022 juga menjadi tonggak penting bagi IPCM dengan sejumlah pencapaian utama, antara lain: Pengalihan (inbreng) 76,89% saham Perusahaan yang semula dimiliki oleh Pelindo beralih kepada SPJM sehingga terdapat perubahan induk IPCM, Perubahan logo IPCM, Peletakan Lunas (*Keel Laying*) Pembangunan Kapal Tunda 2x2200 HP di Surabaya, Peletakan Lunas (*Keel Laying*) Pembangunan 3 Unit Kapal Pandu 2x300 HP di Semarang, IPCM berkolaborasi dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Langlang Laju Layang dalam penyelenggaran pelayanan jasa kapal di wilayah Perairan Meulaboh, Provinsi Aceh serta Perairan Pelabuhan Weda Provinsi Maluku Utara.

In 2022, IPCM recorded a number of strategic initiatives aimed at strengthening its business position and expanding its market reach. IPCM added 4 new vessels to its fleet and advanced the construction of two additional vessels currently under tender. Furthermore, 2022 marked an important milestone for IPCM, with several key achievements, including the transfer (inbreng) of 76.89% of the Company's shares previously owned by Pelindo to SPJM, resulting in a change in IPCM's controlling shareholder; the change of IPCM's corporate logo; the keel laying of 2 × 2,200 HP tugboats in Surabaya; the keel laying of three 2 × 300 HP pilot boats in Semarang; IPCM is collaborating with the port operator PT Langlang Laju Layang to provide shipping services in the waters off Meulaboh, Aceh Province, and in the waters off Weda Port, North Maluku Province.

Di tahun 2023, IPCM berhasil melakukan Peluncuran 3 Unit Kapal Pandu dengan daya 2x300 HP di Semarang serta Kapal Tunda IPCM ABIMANYU V dengan daya 2x2200 HP di Surabaya. Selain itu, IPCM juga melakukan Perpanjangan kerja sama penyediaan sarana bantu dan prasarana pemanduan untuk pelayanan pemanduan dan penundaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Cirebon Electric Power serta Terminal Khusus (Tersus) PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci–Cirebon), serta penandatanganan Kontrak Sewa Kapal untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power antara PT PLN Gas & Geothermal & PT Adhi Guna Putera dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

In 2023, IPCM successfully launched 3 units of 2 × 300 HP pilot boats in Semarang, as well as the Abimanyu V tugboat with a capacity of 2 × 2,200 HP in Surabaya. In addition, IPCM signed cooperation agreements for the provision of pilotage aids and infrastructure to support pilotage and tug assistance services at the Private Terminal (TUKS) of PT Cirebon Electric Power and the Special Terminal (Tersus) of PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci–Cirebon). IPCM also entered into a Vessel Charter Agreement for the Jawa Satu Power operational area between the Joint Operation (KSO) of PT PLN Gas & Geothermal and PT Adhi Guna Putera and PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Sepanjang tahun 2024, IPCM terus memperkuat posisi sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan ekspansi wilayah operasional, termasuk ke wilayah Pelabuhan Laiwui, Maluku Utara, yang merupakan bagian dari wilayah pandu luar biasa, melalui pemberian pelimpahan pelayanan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada 1 April 2024. Perusahaan juga memperluas pasar secara organik dan anorganik, di antaranya dengan pembaruan kerja sama antara IPCM dan PT Langlang Laju Layang untuk pelayanan di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara, pada 23 Desember 2024. Komitmen IPCM terhadap tata kelola perusahaan yang baik tercermin dari pencapaian Juara II dalam *Annual Report Award* 2023 untuk kategori Perusahaan Go Publik Non-Keuangan yang diserahkan pada 7 Oktober 2024, serta keberhasilan memperoleh skor 118,39 dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) pada tahun buku 2024, yang menempatkan IPCM pada Level 5 dengan predikat "*Leadership in Corporate Governance*".

Throughout 2024, IPCM continued to strengthen its position as a Port Business Entity (BUP) by expanding its operational areas, including to Laiwui Port, North Maluku, which is part of the extraordinary pilotage area, through the delegation of services by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia on April 1, 2024. The Company also expanded its market organically and inorganically, among others through the renewal of the cooperation agreement between IPCM and PT Langlang Laju Layang for services at Tarakan Port, North Kalimantan, on December 23, 2024. IPCM's commitment to good corporate governance was reflected in its achievement of Second Place in the Annual Report Award 2023 for the Non-Financial Public Company category, presented on October 7, 2024, as well as its success in obtaining a score of 118.39 in the ASEAN Corporate Governance Scorecard for fiscal year 2024, which placed IPCM at Level 5 with the distinction of "Leadership in Corporate Governance."



Sejak awal berdiri pada 10 Juli 2013 hingga laporan tahunan ini diterbitkan, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama dari "PT Jasa Armada Indonesia". Adapun setelah mencatatkan sahamnya di BEI pada 22 Desember 2017, IPCM resmi menjadi Perusahaan Terbuka.

Since its establishment on July 10, 2013, the Company has never changed its name from "PT Jasa Armada Indonesia." Following the listing of its shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2017, IPCM officially became a publicly listed company.



Jejak Langkah
Milestones

1960

Divisi Pandu & Tunda Badan Pengusahaan Pelabuhan mulai beroperasi.
The Pilotage & Towage Division of the Port Management Authority began operations.

1984

Seluruh Pelabuhan di Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu Perum Pelabuhan I, II, III, dan IV.
All ports in Indonesia were divided into 4 regions: Perum Pelabuhan I, II, III, and IV.

1992

4 Perum Pelabuhan bertransformasi menjadi BUMN. Pandu & Tunda menjadi Divisi dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
The 4 Perum Pelabuhan entities were transformed into SOEs. Pilotage & Towage became a division of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

2021

- **Pengalihan (inbreng) 76,89% saham Perseroan dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang semula dimiliki oleh Pelindo beralih kepada PJM sehingga terdapat perubahan induk IPCM.**
  Transfer (inbreng) of 76.89% of the Company's shares, initially owned by Pelindo, to PJM, resulting in a change of IPCM's parent company.
- **Perubahan logo IPCM.**
  Change of IPCM's logo.
- **Peletakan Lunas (*Keel Laying*) Pembangunan Kapal Tunda 2x2200 HP di Surabaya.**
  Keel Laying for the construction of a 2x2200 HP Tugboat in Surabaya.
- **Peletakan Lunas (*Keel Laying*) Pembangunan 3 Unit Kapal Pandu 2x300 HP di Semarang.**
  Keel Laying for the construction of 3 units of 2x300 HP Pilot Boats in Semarang.
- **Layanan Perdana ekspansi wilayah operasi di Meulaboh Aceh.**
  Initial service launch of operational expansion in Meulaboh, Aceh.
- **Ekspansi wilayah operasi pada Indonesia Timur di Teluk Weda, Halmahera, Maluku Utara berkolaborasi dengan PT Langlang Laju Layang.**
  Operational expansion in Eastern Indonesia, in Teluk Weda, Halmahera, North Maluku, in collaboration with PT Langlang Laju Layang.

2022

- **Selesainya pembangunan 4 unit Kapal Tunda IPCM Abimanyu I, II, III, IV yang menggunakan dana IPO.**
  Completion of the construction of 4 IPCM tugboats: IPCM Abimanyu I, II, III, and IV, funded by IPO proceeds.
- **Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Dan kemudian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berubah nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo.**
  Merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). It then subsequently renamed to PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo.
- **Didirikan PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) yang juga merupakan anak perusahaan Pelindo yang kemudian akan menjadi induk IPCM melalui inbreng saham.**
  Establishment of PT Pelindo Jasa Maritim (PJM), also a subsidiary of Pelindo, which later became the parent company of IPCM through share inbreng.

2023

- **Peluncuran 3 Unit Kapal Pandu IPCM SRIKANDI 01 , IPCM SRIKANDI 02, IPCM SRIKANDI 03 dengan daya 2x300 HP di Semarang.**
  Launch of 3 Pilot Boats IPCM SRIKANDI 01, IPCM SRIKANDI 02, IPCM SRIKANDI 03, each with 2x300 HP engines, in Semarang.
- **Peluncuran Kapal Tunda IPCM Abimanyu V dengan daya 2x2200 HP di Surabaya.**
  Launch of Tugboat Abimanyu V with 2x2200 HP in Surabaya.
- **Penandatanganan kerjasama penyediaan sarana bantu dan prasarana pemanduan untuk pelayanan pemanduan dan penundaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Cirebon Electric Power serta Terminal Khusus (Tersus) PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci – Cirebon).**
  Signing of a cooperation agreement for the provision of pilotage aids and infrastructure for pilotage and towage services at the Private Terminal (Private Port) of PT Cirebon Electric Power and the Special Terminal (Tersus) of PT Cirebon Energi Prasarana (Kanci – Cirebon).
- **Penandatanganan Kontrak Sewa Kapal untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power antara PT PLN Gas & Geothermal & PT Adhi Guna Putera dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.**
  Signing of a Vessel Charter Contract for the operational area of Jawa Satu Power between the KSO of PT PLN Gas & Geothermal and PT Adhi Guna Putera with PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- **IPCM terus berkomitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik. Berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), IPCM memperoleh skor 118,39, masuk kategori Level 5/tertinggi dengan predikat "Leadership in Corporate Governance".**
  IPCM remains committed to transparency and good governance. Based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), IPCM achieved a score of 118.39, placing it in Level 5/the highest category, with the distinction of "Leadership in Corporate Governance."

2024

2008



Berdasarkan UU Pelayaran No.17/2008, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengubah dirinya dari "bagian regulator" menjadi hanya Penyelenggara Pelabuhan Umum.
Based on the Shipping Law No. 17/2008, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) transitioned from being part of the "regulatory body" to solely functioning as a Public Port Operator.

2012



PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengubah nama dagangnya menjadi *Indonesia Port Corporation* ("IPC"), dan mempertahankannya posisinya sebagai divisi kepanduan & penundaan.
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) rebranded its trade name to Indonesia Port Corporation ("IPC") and retained its pilotage and towage division.

2013



PT JAI merupakan *spin-off* dari IPC dan resmi menjadi usaha mandiri sebagai anak perusahaan dari Pelindo II pada tanggal 13 Juli 2013. PT JAI mulai beroperasi pada bulan September 2014.
PT JAI was a spin-off from IPC and officially became an independent business as a subsidiary of Pelindo II on July 13, 2013. PT JAI began operations in September 2014.

2017



Peletakan Lunas (*Keel Laying*) Pembangunan 4 unit Kapal Tunda 2x2200 HP yang menggunakan dana IPO.
Keel Laying for the construction of 4 Tugboats with 2x2200 HP engines, funded through IPO proceeds.

Memiliki keuntungan yang terbesar dan yang paling menguntungkan selama 3 tahun berturut-turut. PT JAI targetkan IPO pada 1 Desember 22 Agustus 2017, di BEI untuk mencapainya pertumbuhan berkelanjutan.
It achieved the highest and most profitable performance for 3 consecutive years.
PT JAI targeted its IPO on December 1, with the listing taking place on August 22, 2017, at the IDX to support sustainable growth.

2018



- **Penandatanganan Kerjasama Kapal Pelayanan di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Perairan Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.**
  Signing of a cooperation agreement for vessel services at the Special Terminal of PT Nusantara Regas in the waters of the Seribu Islands, Jakarta Province.
- **Ekspansi wilayah operasi pada Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.**
  Expansion of operational areas to Patimban Port, Subang, West Java.
- **Penandatangan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) untuk Jawa Satu Power.**
  Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) for Jawa Satu Power.

2020



- **IPCM meraih penghargaan Juara II Annual Report Award 2023 untuk kategori Perusahaan Go Publik Non-Keuangan, yang mencerminkan integritas, profesionalisme, serta komitmen keberlanjutan perusahaan.**
  IPCM was awarded 2nd Place in the 2023 Annual Report Award for the Publicly Listed Non-Financial Company category, reflecting the Company's integrity, professionalism, and commitment to sustainability.
- **IPCM terus mengoptimalkan layanan dan memperluas pasar serta mengembangkan layanan kapal yang lebih luas baik secara organik maupun anorganik, termasuk di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.**
  IPCM continues to optimize its services, expand its market, and develop broader vessel services through both organic and inorganic growth, including in the Tarakan area of North Kalimantan.
- **IPCM sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) melakukan penambahan wilayah operasi termasuk di wilayah Pelabuhan Laiwui, Maluku Utara, yang merupakan bagian dari wilayah pandu luar biasa.**
  As a Port Business Entity (BUP), IPCM has also expanded its operational areas, including in Laiwui Port, North Maluku, which is part of the extraordinary pilotage zone.

2025



Mendapatkan 3 Awards di ARA 2024. IPCM Masuk Ke Papan Utama Saham IDX pada Tanggal 21 November 2025.
Obtained 3 Awards at ARA 2024.
IPCM entered the IDX Main Board on November 21, 2025.



Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Corporate Vision, Mission, and Culture

PENJELASAN VISI

Penyedia Jasa *Marine* Terdepan

1. **Salah satu perusahaan terbesar dalam industri *marine* di Indonesia**
   JAI akan menjadi salah satu jajaran perusahaan terbesar di seluruh Indonesia yang berfokus dalam penyediaan jasa marine dalam ekosistem kepelabuhanan Indonesia. Pengembangan bisnis akan difokuskan pada pelayanan kapal, pengangkutan, dan jasa-jasa *marine* lainnya.
2. **Mampu menyediakan layanan *marine* dengan kualitas yang baik kepada seluruh pelanggan**
   Dengan pengalaman menyediakan layanan marine kepada pelanggan baik yang melewati pelabuhan milik Pelindo maupun luar Pelindo selama lebih dari 10 tahun, JAI telah memberikan kualitas pelayanan dan manajemen pelanggan yang optimal dan terus ditingkatkan kepada seluruh pelanggan.
3. **Mampu menyediakan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi**
   Terintegrasinya layanan kepelabuhanan JAI memberikan implikasi bahwa layanan kepelabuhanan yang diberikan JAI akan terpadu dengan layanan kepelabuhanan lainnya. Bersama dengan *Subholding*/Anak Perusahaan lainnya ataupun pemegang BUP lainnya, keterpaduan layanan ini dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan untuk menggunakan jasa Pelindo Group, khususnya JAI.

Dalam Ekosistem Maritim Indonesia serta Global

- **JAI sebagai penyedia layanan kepelabuhanan yang tidak hanya beroperasi di Indonesia, namun juga global.**
  Adanya rencana aksi korporasi akan memperluas wilayah operasional jasa pelayanan kapal dalam Pelindo menjangkau seluruh Indonesia, baik di Regional 1, 2, 3, dan 4. Ditambah dengan rencana JAI untuk melakukan ekspansi pasar di luar Indonesia, yang menggambarkan tekad JAI untuk mengakselerasi pertumbuhan perusahaan tidak hanya secara nasional, namun juga global.

EXPLANATION OF VISION

Leading Marine Service Provider

1. **One of the largest companies in the marine industry in Indonesia**
   JAI will focus on providing marine services within the Indonesian port ecosystem. Business development will emphasize vessel services, transportation, and other marine services.
2. **Capable of providing marine services in the best quality to all customers**
   With an experience in providing marine services to customers within and outside Pelindo's ports for over 10 years, JAI has consistently delivered optimal service quality that will always be improved to all customers.
3. **Capable of providing an integrated port services**

   The integrated port services of JAI means that it will be seamlessly integrated with other port services. This integration, in collaboration with other Subholdings/ Subsidiaries or other BUP holders, adds value for customers utilizing Pelindo Group services, particularly those offered by JAI.

In the Indonesian and Global Maritime Ecosystem

- **JAI is not only a port service provider operating in Indonesia but also globally**
  The existence of a corporate action plan will expand Pelindo's ship services operational area to cover all of Indonesia, including Regions 1, 2, 3, and 4. Combined with JAI's plans to penetrate markets outside Indonesia, this illustrates JAI's commitment to accelerating company growth not only domestically but also internationally.

Visi
Vision

"Menjadi penyedia jasa *marine* terdepan dalam ekosistem maritim Indonesia serta global."

"The leading provider of marine services in the national maritime ecosystem of Indonesia and global landscape."



PENJELASAN MISI

1. JAI menyediakan layanan *marine* yang tersertifikasi serta sesuai dengan standar kemanan yang berlaku;
2. JAI menyediakan layanan *marine* yang unggul dan terintegrasi sebagai sebuah solusi jasa kepelabuhanan;
3. JAI menyediakan layanan *marine* yang tersebar dengan jangkauan Indonesia dan global, baik di Pelabuhan milik Pelindo, maupun non-Pelindo;
4. JAI berkomitmen untuk melakukan upaya ramah lingkungan pada rantai nilai perusahaan;
5. JAI berkomitmen untuk memaksimalkan penciptaan nilai untuk pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola;
6. JAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan menggunakan teknologi mutakhir serta memaksimalkan aksesibilitas melalui integrasi produk dan di sepanjang rantai nilai logistik untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra;
7. JAI berkomitmen dalam menjadi lingkungan kerja yang suportif dan konstruktif dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan seluruh pekerja;
8. JAI berkomitmen dalam memastikan arus perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia dengan efisiensi biaya logistik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

EXPLANATION OF MISSION

1. JAI provides certified marine services that comply with applicable safety standards
2. JAI offers superior and integrated marine services as a port service solution
3. JAI provides marine services spread across Indonesia and globally, both at Pelindo-owned and non-Pelindo ports
4. JAI is committed to making environmentally friendly efforts in the company's value chain
5. JAI is committed to maximizing value creation for shareholders through improved financial performance and optimized governance management
6. JAI is committed to continuously improving service quality by utilizing the latest technology and maximizing accessibility through product integration along the logistics value chain to meet customer and partner satisfaction
7. JAI is committed to fostering a supportive and constructive work environment to enhance the competence and skills of all employees
8. JAI is committed to ensuring efficient trade flows to support the Indonesian economy, reducing logistics costs to improve people's welfare.

Misi
Mission

"Mewujudkan jasa *marine* yang andal, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan demi memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan."

"To provide reliable, safe, competitive, and sustainable marine services to maximize added value for all stakeholders."





REVIU VISI DAN MISI OLEH MANAJEMEN KUNCI

IPCM secara berkala melakukan evaluasi terhadap Visi dan Misinya dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, serta jajaran manajemen lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa Visi dan Misi senantiasa selaras dengan dinamika dan perkembangan lingkungan bisnis. Berdasarkan peninjauan terkini, Dewan Komisaris dan Direksi menegaskan bahwa Visi dan Misi IPCM tetap relevan dan mendukung arah pertumbuhan strategis Perusahaan, sebagaimana telah dikukuhkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024.

STRATEGI PENCAPAIAN VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Sebagai langkah upaya dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, JAI menerapkan beberapa langkah strategis sesuai dengan program kerja manajemen, antara lain:

1. *Unlocking Business Growth & New Opportunities*
   a. Melakukan integrasi bisnis dengan perusahaan *marine* pada Pelindo Group dan non Pelindo Group;
   b. Menstandardisasi proses operasional jasa *marine* secara *end-to-end* pasca aksi korporasi;
   c. Memperluas jaringan kemitraan dengan pasar eksisting (Terminal Khusus pertambangan batu bara, LnG, dan nikel);
   d. Merintis perluasan jaringan kemitraan dengan pasar baru (Terminal Khusus industri pengolahan hasil pertambangan dan milik Kementerian/ Lembaga);
   e. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pengelolaan kemitraan, baik komersial maupun operasional;
   f. Membangun produk yang terkait jasa *marine* lainnya, seperti: layanan *Marine Advisory & Consultancy* dan *Small LnG Shipping*;
   g. Membangun produk kemaritiman yang terintegrasi sebagai *onestop-solution* dalam klaster SPJM seperti: Layanan *Ship-to-Ship*;
   h. Mengimplementasi *Key Account Management* (KAM) yang terintegrasi.
2. *Accelerating Operational Excellence*
   a. Melakukan investasi pada kapal tunda melalui produksi secara mandiri;
   b. Modernisasi kapal tunda, sarana prasarana, dan teknologi pendukung bisnis *marine* lainnya;
   c. Optimalisasi aset kapal tunda;
   d. Mengimplementasi Inventori Terintegrasi;
   e. Menerapkan aktivitas ramah lingkungan dalam upaya pengurangan emisi karbon;
   f. Mengimplementasi *digitalized marine system*;
   g. Meningkatkan kapabilitas SDM dalam ruang lingkup operasional pelayanan jasa.
3. *Enterprise Support Enchancement*
   a. Melakukan penyesuaian fungsi bisnis *marine* pada struktur organisasi;
   b. Mengimplementasi KPI terintegrasi untuk mengukur kinerja;
   c. Mengimplementasi program L&D terintegrasi untuk standardisasi dan peningkatan kualitas SDM;

REVIEW OF VISION AND MISSION BY KEY MANAGEMENT

IPCM regularly evaulates the statement of its Vision and Mission involving the Board of Directors, the Board of Commissioners, and other levels of management. This is done to ensure both Vision and Mission statement are relevance to the Company's evolving business environment. Based on the latest review, the Board of Commissioners and the Board of Directors have declared that the current Vision and Mission of IPCM remain relevant and supportive of the Company's strategic growth, as approved in the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP).

STRATEGY TO ACHIEVE THE COMPANY'S VISION AND MISSION

As part of its efforts to achieve the vision and mission, JAI implements a number of strategic initiatives in line with management's work programs, including:

1. Unlocking Business Growth & New Opportunities
   a. Integrating business operations with marine companies within the Pelindo Group and non-Pelindo Group entities;
   b. Standardizing end-to-end marine service operational processes following corporate actions;
   c. Expanding partnership networks within existing markets (specialized terminals for coal mining, LNG, and nickel);
   d. Initiating the expansion of partnership networks into new markets (special terminals for mineral processing industries and government/ministerial-owned facilities);
   e. Enhancing partnership management capabilities and capacity, both commercially and operationally;
   f. Developing marine-related service products, such as Marine Advisory & Consultancy services and Small LNG Shipping;
   g. Developing integrated maritime products as a one-stop solution within the SPJM cluster, such as Ship-to-Ship services;
   h. Implementing an integrated Key Account Management (KAM) system.
2. Accelerating Operational Excellence
   a. Investing in tugboat assets through in-house production;
   b. Modernizing tugboats, infrastructure, and supporting technologies for marine business operations;
   c. Optimizing the utilization of tugboat assets;
   d. Implementing an integrated inventory system;
   e. Applying eco-friendly practices to reduce carbon emissions;
   f. Implementing a digitalized marine system;
   g. Enhancing human capital capabilities within the scope of service operations.
3. Enterprise Support Enhancement
   a. Adjusting marine business functions within the organizational structure;
   b. Implementing integrated KPIs to measure performance;
   c. Implementing integrated Learning & Development (L&D) programs to standardize and improve workforce quality;

d. Mengimplementasi sentralisasi *knowledge management* bisnis *marine*;
e. Implementasi dan penguatan budaya JAI;
f. Mengimplementasi Sistem *Single Enterprise Resource Planning* (ERP);
g. Pembaruan *Marine Digitalization Roadmap*.

d. Implementing centralized knowledge management for the marine business;
e. Implementing and strengthening the JAI corporate culture;
f. Implementing a Single Enterprise Resource Planning (ERP) system;
g. Updating the Marine Digitalization Roadmap.

BUDAYA PERUSAHAAN

IPCM mengimplementasikan Budaya dan Nilai "AKHLAK" yang merupakan akronim dari (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai fondasi budaya kerja Perusahaan. Nilai-nilai ini diterapkan sesuai Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/2/1/1/SDMA/UTMA/PLND-23 tanggal 2 Januari 2023, selaras dengan pedoman sumber daya manusia BUMN induk. Nilai AKHLAK mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi aspirasi perusahaan, yang diharapkan mendorong kinerja, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang sama di seluruh manajemen dan pekerja, budaya ini membentuk lingkungan kerja yang kondusif, kolaboratif, dan produktif, sekaligus memperkuat pencapaian tujuan strategis IPCM.

CORPORATE CULTURE

IPCM implements the Corporate Culture and Core Values of "AKHLAK," an acronym that stands for (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) as the foundation of the Company's work culture. These values are implemented in accordance with the Board of Directors Decree No. HK.01/2/1/1/SDMA/UTMA/PLND-23 dated January 2, 2023, aligned with the human capital guideline of the parent SOE. The AKHLAK values reflect the fundamental principles that represent the Company's aspirations and are expected to drive performance, innovation, and sustainable growth. With a shared understanding across management and employees, this culture fosters a conducive, collaborative, and productive work environment, while strengthening the achievement of IPCM's strategic objectives.

Amanah
Trustworthy

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan
We uphold the trust given

- Memenuhi janji dan komitmen
  - Keep promises and commitments
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
  - Responsible for the duties, decisions and actions carried out
- Berpegang teguh pada nilai moral dan etika
  - Stick to moral and ethical values

Kompeten
Competent

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
We continue to learn and develop capabilitiesgiven

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
  - Improve self-competence to respond to ever-changing challenges
- Membantu orang lain belajar
  - Help others learn
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
  - Complete duties with the best quality

Harmonis
Harmonious

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan
We care for each other and value differences

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
  - Respect everyone regardless of their background
- Suka menolong orang lain
  - Likes to help others
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif
  - Build a conducive work environment

Loyal
Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara
We are dedicated and put the interests of the Nation and the State first

- Menjaga nama baik sesama pekerja, pimpinan, BUMN, dan Negara
  - Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
  - Willing to sacrifice to achieve a greater goal
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
  - Obey the leaders as long as it is not against the law and ethics

Adaptif
Adaptive

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
We continue to innovate and are enthusiastic about moving or facing changes

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
  - Quickly adjust to being better
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
  - Continuously making improvements to keep up with technological developments
- Bertindak proaktif
  - Act proactively

Kolaboratif
Collaborative

Kami membangun kerja sama yang sinergis
We build synergistic cooperation

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
  - Provide opportunities for various parties to contribute
- Tebuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
  - Proven in working together to generate added value
- Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
  - Mobilize the use of various resources for common goals



PERNYATAAN MENGENAI BUDAYA PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari peran strategisnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), IPCM menempatkan budaya perusahaan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi IPCM, yaitu "Menjadi penyedia jasa *marine* terdepan dalam ekosistem maritim Indonesia serta global", menjadi panduan dalam setiap proses pengembangan Perusahaan.

Nilai-nilai IPCM mencerminkan komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan visi dan misi dengan standar global serta tata kelola yang baik. Terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, membentuk budaya kerja yang kondusif, inovatif, dan produktif, sekaligus memperkuat pencapaian tujuan strategis IPCM.

SOSIALISASI DAN INTERNALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari upaya menyelaraskan Budaya Perusahaan dengan perilaku seluruh Insan IPCM dalam operasional sehari-hari, IPCM secara aktif melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi Budaya Perusahaan yang di antaranya :

1. MESRA (Makan Enak Sambil Cerita) yang mendukung implementasi nilai Adaptif dan Harmonis;
2. JAMU (Jaga Rekan Kerjamu) yang mendukung implementasi nilai Harmonis;
3. SEPINTU (Sehari Pindah Tugas) yang mendukung implementasi nilai Kolaboratif;
4. SMART (*Strategic Meeting Alignment for Results and Teamwork*) yang mendukung implementasi nilai Amanah, Kompeten dan Kolaboratif;
5. SAMPO (*Safety Awareness Program*) yang mendukung implementasi nilaiAmanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

STATEMENT REGARDING CORPORATE CULTURE

As part of its strategic role as a State-Owned Enterprise (SOE), IPCM places corporate culture as a fundamental pillar in human capital management to support the achievement of the Company's vision, mission, and objectives. IPCM's vision, "The leading provider of marine services in the national maritime ecosystem of Indonesia and global landscape", serves as a guiding principle in every aspect of the Company's development process.

IPCM's values reflect the Company's commitment to implementing its vision and mission in accordance with global standards and good corporate governance. Comprising Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative, and these values serve as guiding principles for all employees in carrying out their daily activities, fostering a conducive, innovative, and productive work culture, while strengthening the achievement of IPCM's strategic objectives.

SOCIALIZATION AND INTERNALIZATION OF CORPORATE CULTURE

As part of its efforts to align Corporate Culture with the behavior of all IPCM Personnel in their daily operations, IPCM actively conducts Corporate Culture socialization and internalization programs, including the following:

1. MESRA (Makan Enak Sambil Cerita), which supports the implementation of the values of Adaptability and Harmony;
2. JAMU (Jaga Rekan Kerjamu), which supports the implementation of the value of Harmony;
3. SEPINTU (Daily Task Rotation), which supports the implementation of the Collaborative value;
4. SMART (Strategic Meeting Alignment for Results and Teamwork), which supports the implementation of the Trustworthy, Competent, and Collaborative values;
5. SAMPO (Safety Awareness Program), which supports the implementation of the Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative values.





Makna Logo Perusahaan

Meaning of Company Logo

1 PELINDO 3
2
JASA MARITIM 4
JASA ARMADA INDONESIA 5

1. Logo menggambarkan bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang merepresentasikan kesiapan PT Jasa Armada Indonesia Tbk dalam memberikan pelayanan terbaik pada bidang Jasa *Pilotage and Towage* guna mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.
The logo portrays the shape of a busy, crowded, and confusing route or path, which represents the readiness of PT Jasa Armada Indonesia Tbk to provide the best service in the field of Pilotage and Towage Services to support the realization of the Indonesian sea toll.

2. Huruf P yang menjadi inisial Pelindo dan membentuk pola ikan menggambarkan PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang merupakan bagian dari Pelindo Grup berkomitmen untuk terus menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.
The letter P, which becomes Pelindo's initial and forms a fish pattern, illustrates that PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as part of the Pelindo Group, is committed to continuing to protect Indonesia's natural wealth by continuously supporting the preservation of marine ecosystems in its operational areas.

3. Warna BIRU menggambarkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme dan pengabdian.
Warna MERAH menggambarkan aksi, antusias, kecepatan, keberanian dan semangat PT JAI Tbk dalam memberikan pelayanan *stakeholders.*
The color BLUE represents stability, trust, integrity, professionalism and devotion.
The RED color represents the action, enthusiasm, speed, courage, and spirit of PT JAI Tbk in providing services to stakeholders.

4. Jasa Armada Indonesia menggambarkan nama dari perusahaan yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang bergerak pada industri kepelabuhanan yaitu bidang Jasa *Pilotage and Towage.*
Jasa Armada Indonesia describes the name of the Company, PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which is engaged in the port industry, namely the field of Pilotage and Towage Services.

5. Jasa Maritim dengan warna tulisan hijau toska mempresentasikan PT Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dibawah *subholding* Pelindo Jasa Maritim.
Jasa Maritim with tosca green writing color represents PT Jasa Armada Indonesia Tbk as a subsidiary under Pelindo Jasa Maritim sub- holding.

Warna Tosca adalah perpaduan warna biru dan hijau yang merupakan warna alam dan laut indonesia yang terkenal luas dan cantik. Warna ini juga melambangkan kreativitas dan kemajuan teknologi dalam menopang kebutuhan mode transportasi di laut Indonesia.

The color Tosca is a blend of blue and green, evoking the natural beauty of Indonesia's vast and stunning seas. This color also symbolizes creativity and technological advancement in supporting Indonesia's maritime transportation needs.

TAGLINE PERUSAHAAN

COMPANY TAGLINE

"NAVIGATING MARINE EXCELLENCE"

Menggambarkan JAI sebagai perusahaan penyedia jasa *marine* yang menavigasi pertumbuhan ekosistem *marine* di Indonesia dan global.

Describes JAI as a marine services company that navigates the growth of the marine ecosystem in Indonesia and globally.

Kegiatan Usaha
Business Activities

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3 yang terakhir mengalami perubahan dan disahkan melalui Akta No. 44 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047245. AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penundaan dan pemanduan kapal yang merupakan kegiatan usaha yang telah digeluti Perseroan sejak awal berdirinya hingga menjadi entitas komersial.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama perusahaan untuk menyediakan
   a. Mengusahakan pelayanan jasa pemanduan kapal;
   b. Mengusahakan pelayanan jasa penundaan kapal;
   c. Mengusahakan pelayanan jasa angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan;
   d. Mengusahakan pelayanan jasa penyewaan kapal;
   e. Mengusahakan pelayanan jasa keagenan kapal;
   f. Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
   g. Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum;
   h. Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan;
   i. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang;
   j. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
   k. Angkutan laut luar negeri untuk barang umum; dan

2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Industri kapal dan perahu;
   b. Pengawakan kapal.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN SAAT INI DAN JASA PERUSAHAAN

IPCM bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, penundaan, pengepilan, penyewaan kapal, dan pengoperasian kapal. Adapun fokus utama Perusahaan saat ini adalah layanan penundaan dan pemanduan kapal yang merupakan kegiatan usaha yang telah digeluti Perusahaan sejak awal berdiri hingga menjadi entitas komersial.

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE LATEST ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, which was most recently amended and legalized through Deed No. 44 dated June 23, 2022, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of Jakarta, and ratified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022, the purpose and objective of the Company is to engage in the business of ship towage and pilotage, and those are the activities that the Company has pursued since its establishment until becoming a commercial entity.

To achieve these purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:

1. Main business activities of the Company include:
   a. Providing vessel pilotage services;
   b. Providing vessel towage services;
   c. Providing sea, river, lake, and ferry transportation services;
   d. Providing vessel charter and leasing services;
   e. Providing vessel agency services;
   f. Port service activities;
   g. Domestic sea transportation of general cargo;
   h. River and lake transportation of general cargo and/or livestock;
   i. Domestic port water sea transportation of cargo;
   j. Domestic sea transportation of special cargo;
   k. International sea transportation of general cargo; and

2. Supporting business activities that complement the main business, including:
   a. Vessel and boat industries;
   b. Vessel crewing services.

CURRENT BUSINESS ACTIVITIES AND SERVICES

IPCM is engaged in the provision of pilotage, towage, mooring, sea transportation, vessel chartering, and vessel operations services. The Company's current main focus is on vessel towage and pilotage services, which have been its core business activities since its establishment and transition into a commercial entity.



PRODUK DAN JASA

Sampai dengan tahun 2025, Produk atau Jasa Utama IPCM terdiri dari:

1. **Jasa Pelayanan Kapal**

   Jasa Pelayanan Kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Sebagai mitra PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, Perusahaan memberikan produk dan jasa utama dalam pelayanan jasa kapal yang meliputi jasa penundaan dan jasa pemanduan. Pada segmen jasa penundaan mencakup kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Pada segmen jasa pemanduan, melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Berdasarkan jenisnya, pelayanan kegiatan pemanduan memiliki 3 jenis layanan kegiatan pemanduan, yaitu: (a) pandu laut; (b) pandu bandar; dan (c) pandu bandar utama. "Pandu laut" bertugas memandu kapal-kapal dari kolam pelabuhan sampai batas perairan wajib pandu atau sebaliknya; sedangkan "pandu bandar" memandu kapal-kapal di kolam pelabuhan. Terakhir, "pandu bandar utama" melayani pelabuhan utama dengan ukuran kapal yang lebih besar.

2. **Jasa Pengangkutan dan Lainnya**

   Jasa pengangkutan dan lainnya merupakan kegiatan usaha Perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material, barang, dan hasil produksi antar wilayah pelabuhan. Segmen ini terutama melayani pengangkutan material dan hasil produksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sejalan dengan karakteristik pangsa pasar angkutan laut nasional yang didominasi oleh entitas BUMN sebagai *cargo* owner utama, antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), dan PT Semen Indonesia (Persero).

   Selain jasa pengangkutan, segmen ini juga mencakup jasa persewaan kapal tunda dan jasa penyediaan sarana bantu pemanduan berupa kapal tunda. Jasa persewaan kapal tunda dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT PLN Energi Gas dan PT Adhi Guna Putera di wilayah Tersus PT Jawa Satu Power, serta dengan PT PGN LNG Indonesia (PLI) di wilayah FSRU Lampung. Adapun jasa penyediaan sarana bantu pemanduan berupa kapal tunda dijalankan melalui kerja sama dengan PT Langlang Laju Layang di wilayah Pelabuhan Weda Provinsi Maluku Utara, dan Meulaboh, Provinsi Aceh, serta Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

PRODUCTS AND SERVICES

As of 2025, the Company's Main Products or Services consist of:

1. **Vessel Services**

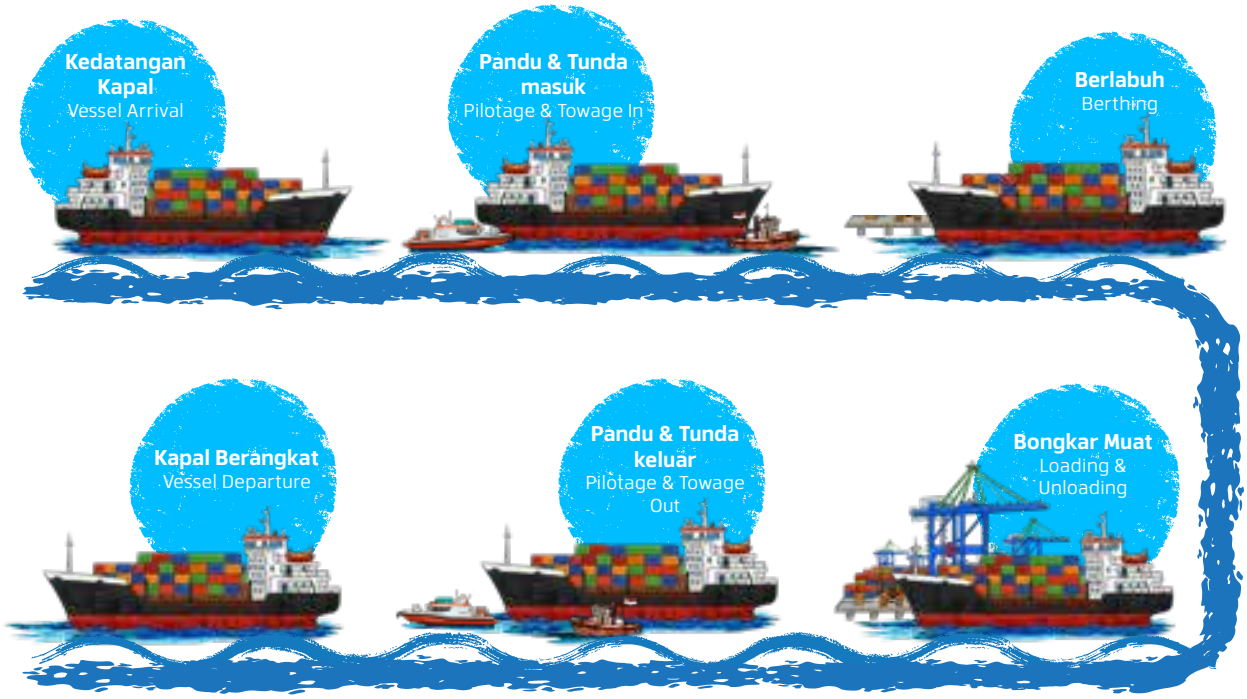
Vessel Services refer to the operational handling of vessels from their entry to exit at the port. As a partner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, the Company provides core products and services in vessel services, including towage and pilotage services. In the towage services segment, activities include pushing, pulling, escorting, assisting, and supporting vessels during maneuvering within navigational channels, anchorage areas and basins used for berthing or unberthing from the quay. In the pilotage services segment, the Company provides services for vessels entering and departing berths through port channels to ensure that navigation is conducted safely, orderly, and efficiently, thereby safeguarding vessel safety and environmental protection. Based on the type of service, pilotage activities are categorized into three types: (a) sea pilotage; (b) harbor pilotage; and (c) main harbor pilotage. "Sea pilotage" involves guiding vessels from the port basin to the boundary of compulsory pilotage waters, or vice versa; "harbor pilotage" involves guiding vessels within the port basin. Lastly, "main harbor pilotage" serves main ports and accommodates vessels of larger sizes.

2. **Freight and Other Services**

   Freight and Other Services are the Company's services in transporting materials, goods, and production outputs between port areas. This business segment primarily serves the transportation of materials and production outputs belonging to State-Owned Enterprises (SOEs), in line with the characteristics of the national sea transportation market share, which is dominated by SOEs as the main cargo owners, including PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), and PT Semen Indonesia (Persero).

   In addition to transportation services, this segment also includes tugboat rental services and the provision of tugboats as navigation aids. Tugboat rental services are carried out in collaboration with PT PLN Energi Gas and PT Adhi Guna Putera in the FSRU Jawa Satu Power area, as well as with PT PGN LNG Indonesia (PLI) in the FSRU Lampung area. The provision of tugboat assistance services is carried out in collaboration with PT Langlang Laju Layang in The ports of Weda in North Maluku Province, Meulaboh in Aceh Province, and Tarakan in North Kalimantan Province.

Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal
Vessel Pilotage and Towage Services





Wilayah Operasional Perusahaan

Operational Areas of the Company




PelabuhanTarakan,
Kalimantan Utara
Pelabuhan Weda,
Halmahera Tengah
Tersus PT Trimegah
Bangun Persada,
Laiwui
Badan Usaha Pelabuhan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Badan Usaha Pelabuhan
PT JAI Tbk
Kerja Sama Operasi (KSO)
Joint Operation



Keanggotaan dalam Asosiasi
Membership in Associations

Sebagai langkah upaya dalam memperkuat bisnisnya, IPCM telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, di antaranya adalah:

In strengthening its business, IPCM has joined as members in a number of organizations as follows:

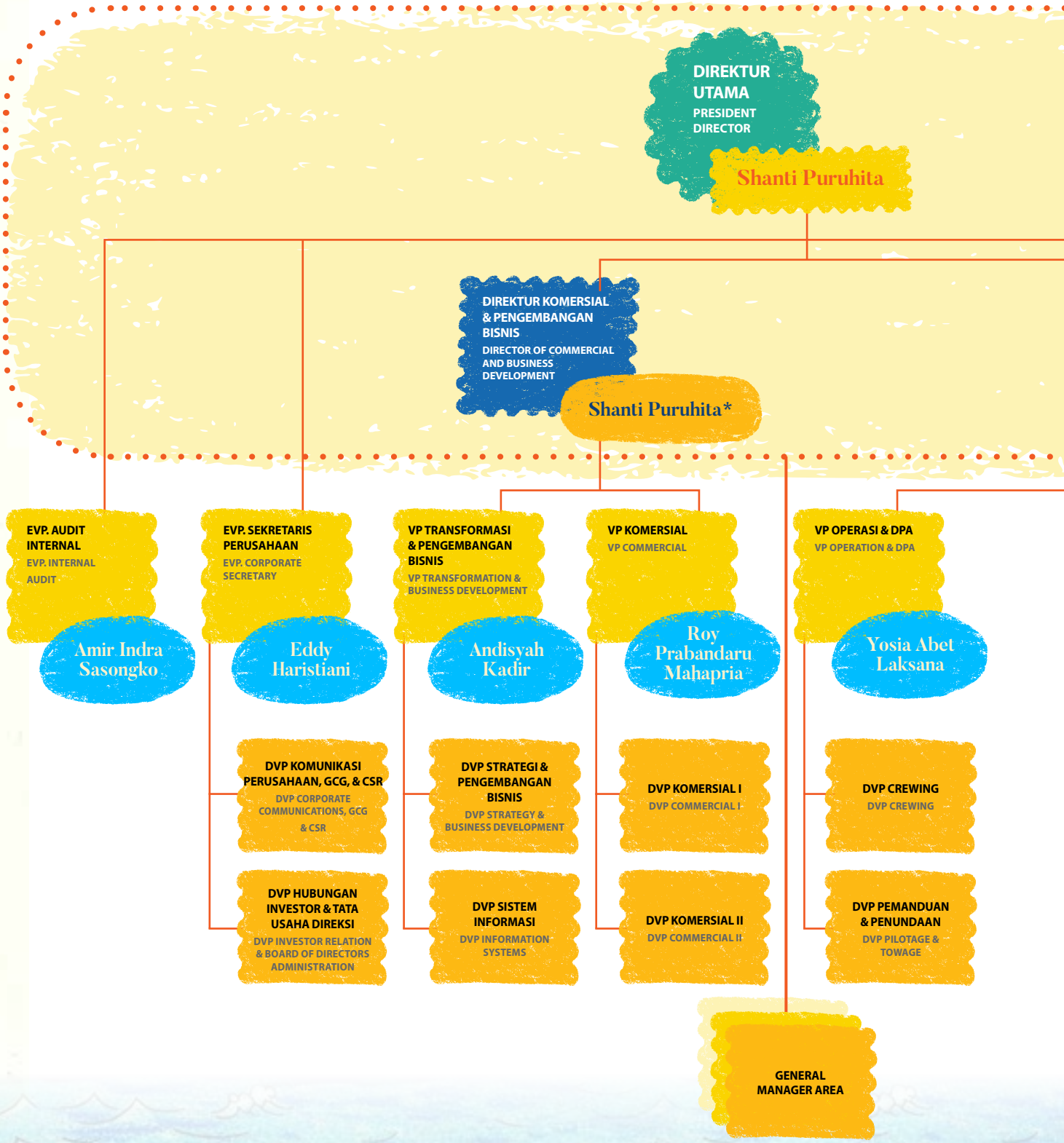
No	Nama Asosiasi Association Name	Posisi Position
1	Indonesian National Shipowners' Association (INSA)	Anggota Member





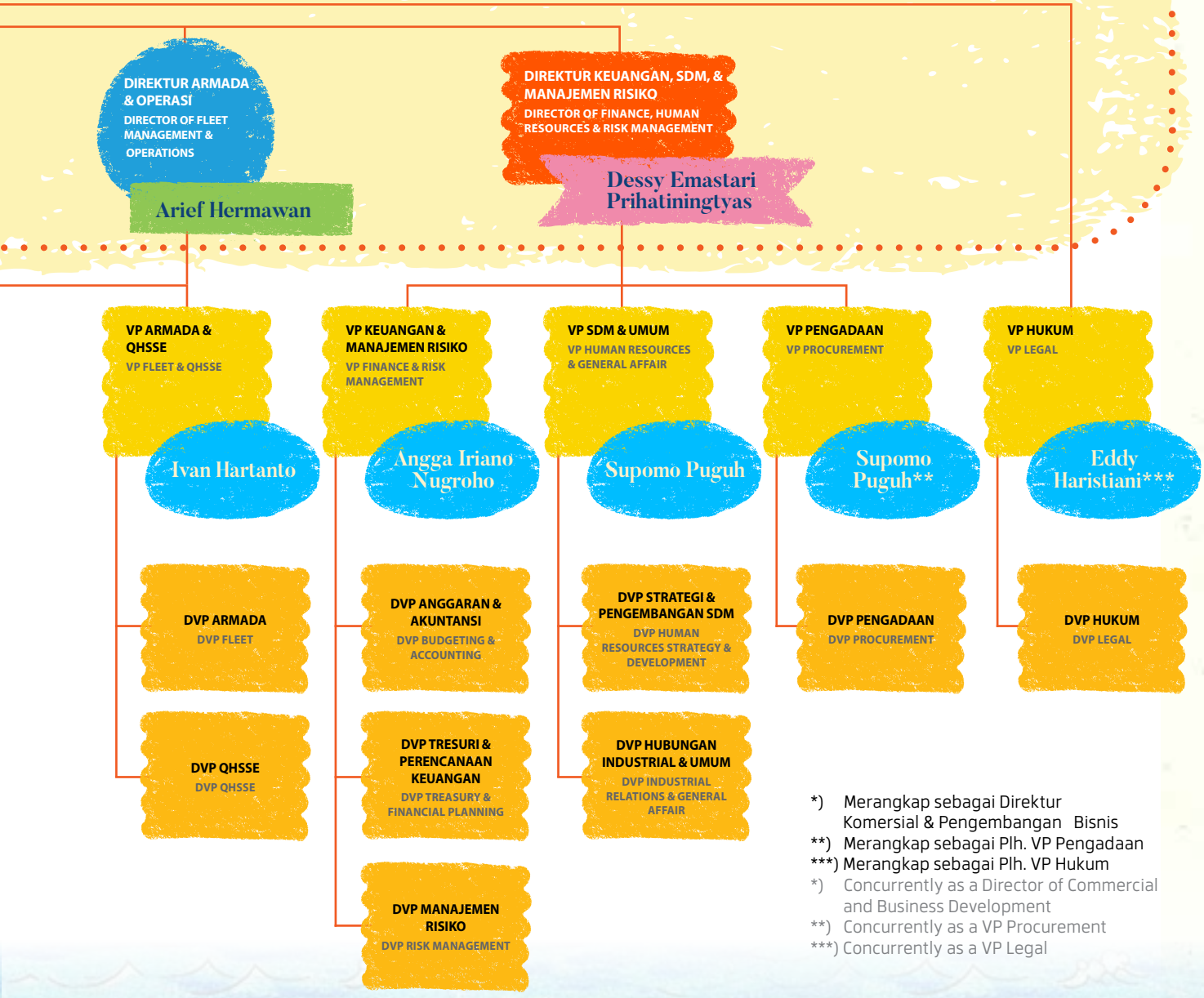
Struktur Organisasi
Organizational Structure

Struktur Organisasi IPCM per 31 Desember 2025, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-568/1/9/1/MS-21 Tanggal 1 September 2021 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk sebagaimana terlampir di bawah ini.



The Organizational Structure of IPCM as of December 31, 2025 was established through the Board of Directors Decree No. HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024, regarding the Amendment to the Board of Directors Decree of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK-568/1/9/1/MS-21 dated September 1, 2021 concerning the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as attached below.

Board of Director



*) Merangkap sebagai Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis
**) Merangkap sebagai Plh. VP Pengadaan
***) Merangkap sebagai Plh. VP Hukum
*) Concurrently as a Director of Commercial and Business Development
**) Concurrently as a VP Procurement
***) Concurrently as a VP Legal



Profil
Dewan Komisaris
Profile of the Board of Commissioners



R.R.. Dewi Ariyani*

Komisaris Utama
President Commissioner

Masa Jabatan | Term of Office

Masa Jabatan: 18 Juni 2025 – RUPST 2030, Periode Pertama
Term of Office: June 18, 2025 – AGMS 2030, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Surabaya, 13 Desember 1969
Indonesian citizen
Aged 56 years old as of Desember 31, 2025
Born in Surabaya, December 13, 1969

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 25, dated June 18, 2025, drawn up by Notary Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn., domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S2 Akuntansi di Universitas Indonesia (2004)
- S1 Akuntansi di Universitas Jendral Sudirman (1993)
- Bachelor of Accounting from the University of Indonesia (2004)
- Bachelor of Accounting from Jendral Sudirman University (1993)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Analis Kinerja BUMN Badan Pengaturan BUMN (2021–Sekarang)
- Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Indonesia Utama (2020–2021)
- Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT Rekayasa Industri (2018–2020)
- Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016–2017)
- Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT PANN Pembiayaan Maritim (2012–2017)
- Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT Indah Karya (Persero) (2007–2012)
- Sekretaris Dekom/Dewan Pengawas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2002–2007)
- Staf Dekom/Dewas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998–2002)
- SOE Performance Analyst, State-Owned Enterprise Regulatory Agency (2021-Present)
- Director of Finance & Human Resources, PT Reasuransi Indonesia Utama (2020–2021)
- Commissioner / Member of the Board of Supervisors, PT Rekayasa Industri (2018–2020)
- Commissioner / Member of the Board of Supervisors, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016–2017)
- Commissioner / Member of the Board of Supervisors, PT PANN Pembiayaan Maritim (2012–2017)
- Commissioner / Member of the Board of Supervisors, PT Indah Karya (Persero) (2007–2012)
- Secretary to the Board of Commissioners / Board of Supervisors, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2002–2007)
- Staff to the Board of Commissioners / Board of Supervisors, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998–2002)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification

Sertifikasi *Qualified Risk Oversight Professional* (QROP) dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
Qualified Risk Oversight Professional (QROP) certification from the Indonesian Audit Committee Association (IKAI)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam atau luar perusahaan.
She does not hold any other positions, either within or outside the company.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
She has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Memiliki 387.600 lembar saham per 31 Desember 2025.
Holds 387,600 shares as of December 31, 2025.

*) Beliau efektif menjabat sebagai Komisaris Utama per 18 Juni 2025
*) She serves as the President Commissioner effective since June 18, 2025





F. Budi Prayitno

Komisaris
Commissioner

Masa Jabatan | Term of Office

Masa Jabatan: 18 Juni 2025 – RUPST 2030, Periode Pertama
Term of office: June 18, 2025 – AGMS 2030, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 57 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Cilacap, 2 April 1968
Indonesian citizen
Aged 57 years old as of December 31, 2025
Born in Cilacap, April 2, 1968

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 25, dated June 18, 2025, drawn up by Notary Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn., domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Master Degree spesialisasi Air Transport Management, Ecole National de l'Aviation Civile (ENAC), Toulouse-France, (2003)
- Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Diponegoro di Semarang, (1991)
- Master Degree with specialization in Air Transport Management, Ecole National de l'Aviation Civile (ENAC), Toulouse-France, (2003)
- Bachelor of Internasional Law from Diponegoro University, Semarang (1991)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Kepala Biro Hukum di Kementerian Perhubungan (2023-sekarang)
- Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan (2021-2022)
- Kepala Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum (2020-2021)
- Plt. Kepala Bandara Juata Tarakan (2019)
- Kepala Bidang Kampen dan Yandar Bandara Juata Tarakan (2019)
- Wakil Tetap RI untuk Kantor Kepentingan Indonesia pada ICAO (2018)
- Atase Perhubungan RI untuk Kanada-KBRI Ottawa (2018)
- Atase Perhubungan RI untuk USA-KBRI Washington DC (2015-2018)
- Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2008-2015)
- Kepala Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Kementerian Perhubungan (2007)
- Head of the Legal Bureau at the Ministry of Transportation (2023-present)
- Director of Aviation Security, Ministry of Transportation (2021-2022)
- Head of the International Cooperation, Public Relations, and General Affairs Division (2020-2021)
- Acting Head of Juata Tarakan Airport (2019)
- Head of the Campaign and Air Navigation Safety Division, Juata Tarakan Airport (2019)
- Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the Indonesian Interests Office at ICAO (2018)
- Transportation Attaché of the Republic of Indonesia to Canada-Indonesian Embassy in Ottawa (2018)
- Transportation Attaché of the Republic of Indonesia to the United States-Indonesian Embassy in Washington, D.C. (2015-2018)
- Head of the Foreign Cooperation Section, Office of the Secretary General, Ministry of Transportation (2008-2015)
- Head of the Air Traffic Services Section, Ministry of Transportation (2007)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification

Qualified Chief Risk Officer (QCRO)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau memiliki jabatan rangkap di luar IPCM sebagai Kepala Biro Hukum di Kementerian Perhubungan dan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko di IPCM.
He holds a concurrent position outside IPCM as Head of the Legal Bureau at the Ministry of Transportation and as Chairman of the Risk Monitoring Committee at IPCM.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

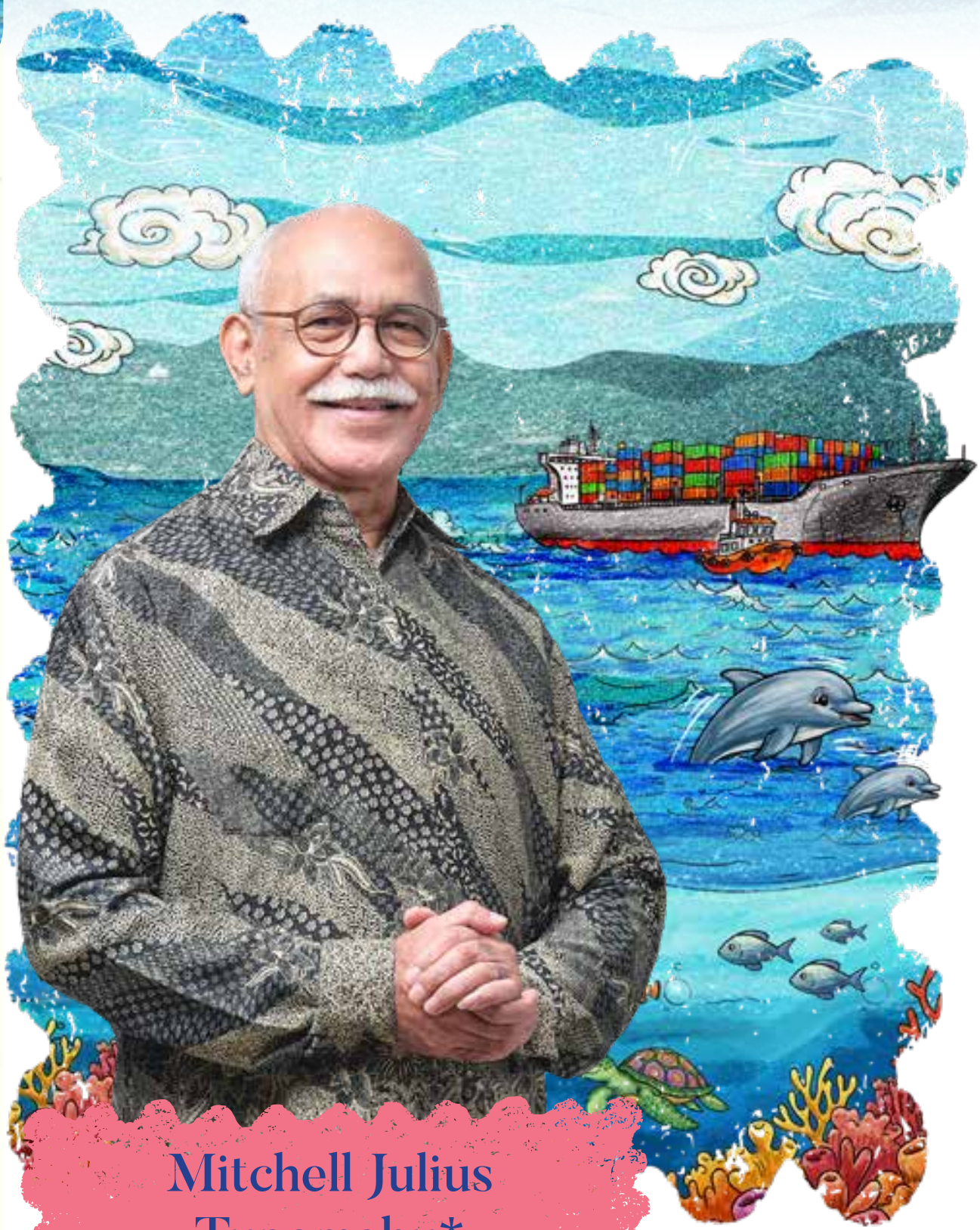
Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
He has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
He does not hold any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

*) Beliau efektif menjabat sebagai Komisaris per 18 Juni 2025
*) He serves as the Commissioner effective since June 18, 2025





Mitchell Julius Tupamahu*

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan | Term of Office
Masa Jabatan: 18 Juni 2025 – RUPST 2030, Periode Pertama
Term of Office: June 18, 2025 – AGMS 2030, First Period

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia
Usia 63 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Jakarta, 31 Juli 1962
Indonesian citizen
Aged 63 years old as of December 31, 2025
Born in Jakarta, July 31, 1962

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment
Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 25, dated June 18, 2025, drawn up by Notary Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn., domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History
S1 Hukum, Universitas Pancasila (1993)
Bachelor of Law, Pancasila University (1993)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM
- Tenaga Ahli DPR (2015 – 2024)
- Humas and Personal Manager di PT Nyonya Meneer (2001 – 2025)
- Legal Plant Property Acquisiton di PT Excelcomindo Pratama (1994 – 1999)
- Expert Staff of House of Representative (DPR) (2015 – 2024)
- Public Relations and Personal Manager at PT Nyonya Meneer (2001 – 2025)
- Legal Plant Property Acquisiton at PT Excelcomindo Pratama (1994 – 1999)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification
-

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information
Beliau tidak memiliki rangkap di luar IPCM, sementara saat ini beliau tercatat menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di IPCM.
He holds no concurrent positions outside IPCM, while as of June 18, 2025, he was recorded as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee at IPCM.

Pernyataan Independensi | Independence Statement of Independent Commissioner
Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen. Adapun Komisaris Independen IPCM, tidak memiliki benturan kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen.
He has not served for more than 2 (two) terms as an Independent Commissioner. The Independent Commissioner of IPCM has no conflicts of interest or personal relationships that could have a negative impact or pose a conflict of interest on the Company and has fulfilled the requirements to be appointed as an Independent Commissioner.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships
Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
He has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM
Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
He does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

*) Beliau efektif menjabat sebagai Komisaris Independen per 18 Juni 2025
*) He serves as the Indepedent Commissioner effective since June 18, 2025





Doni Istyanto Hari Mahdi*

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan | Term of Office

Masa Jabatan: 18 Juni 2025 – RUPST 2030, Periode Pertama
Term of Office: June 18, 2025 – AGMS 2030, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Surabaya , 18 Oktober 1972
Indonesian citizen
Aged 53 years old as of December 31, 2025
Born in Surabaya, October 18, 1972

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 25, dated June 18, 2025, drawn up by Notary Dr. Putra Hutomo S.H., M.Kn., domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

S1 Teknik dan Manajemen Industri, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) (2000)
Bachelor of Engineering and Industrial Management, Adhi Tama Institute of Technology Surabaya (ITATS) (2000)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Direktur Keuangan PT Tirta Kahyangan Nirankara (2024 – Sekarang)
- Senior Partner PT Hutama Mandiri Karya (2020 – 2024)
- Senior Partner ADN Consult Surabaya (2004 – 2019)
- Manajer Risiko PT Buana Proteksi Prima (2000 – 2002)
- Director of Finance at PT Tirta Kahyangan Nirankara (2024 – Present)
- Senior Partner at PT Hutama Mandiri Karya (2020 – 2024)
- Senior Partner at ADN Consult Surabaya (2004 – 2019)
- Risk Manager at PT Buana Proteksi Prima (2000 – 2002)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification

-

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau memiliki jabatan rangkap di luar IPCM sebagai Direktur Keuangan pada PT. Tirta Kahyangan Nirankara dan sebagai Ketua Komite Audit di IPCM.
He holds a concurrent position outside IPCM as Director of Finance at PT Tirta Kahyangan Nirankara and as Chairman of the Audit Committee at IPCM.

Pernyataan Independensi | Independence Statement of Independent Commissioner

Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen. Adapun Komisaris Independen IPCM, tidak memiliki benturan kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen.
He has not served for more than 2 (two) terms as an Independent Commissioner. The Independent Commissioner of IPCM has no conflicts of interest or personal relationships that could have a negative impact or pose a conflict of interest on the Company and has fulfilled the requirements to be appointed as an Independent Commissioner.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
He has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
He does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

*) Beliau efektif menjabat sebagai Komisaris Independen per 18 Juni 2025
*) He serves as the Indepedent Commissioner effective since June 18, 2025





Zuhri Iryansyah*

Komisaris Utama
President Commissioner

Masa Jabatan | Term of Office

Masa Jabatan: 13 Oktober 2020–18 Juni 2025, Periode Pertama
Term of Office: October 13, 2020 – June 18, 2025, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 56 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Medan, 15 Juli 1969
Indonesian citizen
Aged 56 years old as of December 31, 2025
Born in Medan, July 15, 1969

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 13 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 13, dated October 13, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Amendment to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S2 Coastal Engineering and Port Development, UNESCO IHE - DELFT, Belanda (2011)
- S1 Teknik Sipil, Universitas Trisakti, Jakarta (1993)
- Master of Coastal Engineering and Port Development, UNESCO IHE - DELFT, Netherland (2011)
- Bachelor of Civil Engineering, Trisakti University, Jakarta (1993)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Direktur Teknik PT Pelindo Multi Terminal (2023–2024)
- Direktur Komersial dan Operasi di PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2023)
- Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021)
- SVP Manajemen Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019–2020)
- Koordinator Proyek Strategis PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2019)
- Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017)
- Direktur Konstruksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2017)
- Direktur Teknik PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014–2015)
- Director of Engineering of PT Pelindo Multi Terminal (2023–2024)
- Director of Commercial and Operation of PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2023)
- Director of Engineering of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020–2021)
- SVP of Strategic Project Management of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019–2020)
- Coordinator of Strategic Project of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2019)
- Director of Commercial and Business Development of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017)
- Director of Construction of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2017)
- Director of Engineering of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2014–2015)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki rangkap di luar IPCM, sementara sampai periode 18 Juni 2025 beliau tercatat menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di IPCM.
He holds no concurrent positions outside IPCM, while as of June 18, 2025, he was recorded as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee at IPCM.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
He has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
He does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

*) Beliau tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama per 18 Juni 2025
*) He no longer serves as the President Commissioner as of June 18, 2025





Bay Mokhamad Hasani*

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan | Term of Office

Masa Jabatan: 15 Juli 2020–18 Juni 2025, Periode Pertama
Term of Office: July 15, 2020–June 18, 2025, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 68 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Rangkasbitung, 23 Oktober 1957
Indonesian citizen
Aged 68 years old as of December 31, 2025
Born in Rangkasbitung, October 23, 1957

Domisili | Domicile

Tangerang, Banten, Indonesia
Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 24 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 24, dated July 15, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Changes to the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jakarta (2007)
- Strata B Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta (1984)
- Bachelor of Management from School of Economics Science, Jakarta (2007)
- Associate Degree (Strata B) in Maritime Transportation and Port Management, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta (1984)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Komisaris Independen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018–2020)
- Plt Dirjen Perhubungan Laut (2017)
- Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (2016–2017)
- Kepala Kantor Utama Syahbandar Tanjung Perak (2016)
- Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok (2015–2016)
- Independent Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (2018–2020)
- Acting Director General of Sea Transportation (2017)
- Director of Traffic and Sea Transportation of the Ministry of Transportation (2016–2017)
- Head of Tanjung Priok Main Harbormaster Office (2016)
- Head of Tanjung Priok Port Authority (2015–2016)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki rangkap di luar IPCM, sementara sampai periode 18 Juni 2025, beliau tercatat menjabat sebagai Ketua Komite Audit di IPCM.
He holds no concurrent positions outside IPCM, while as of June 18, 2025, he was recorded as Chairman of the Audit Committee at IPCM.

Pernyataan Independensi | Independence Statement of Independent Commissioner

Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen. Adapun Komisaris Independen IPCM, tidak memiliki benturan kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Komisaris Independen.
He has not served for more than 2 (two) terms as an Independent Commissioner. The Independent Commissioner of IPCM has no conflicts of interest or personal relationships that could have a negative impact or pose a conflict of interest on the Company and has fulfilled the requirements to be appointed as an Independent Commissioner.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
He has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
He does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

*) Beliau tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen per 18 Juni 2025
*) He no longer serves as the Independent Commissioner as of June 18, 2025



PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2025, Komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana penjelasan berikut.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS SEBELUM RUPS TAHUNAN 2025

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Tahunan 2025 sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBER AND THE REASONS FOR CHANGES

During 2025, the composition of the Board of Commissioners members experienced changes in accordance with the Company's needs as explained below.

COMPOSITION AND BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PRIOR TO THE 2025 ANNUAL GMS

The composition of the Board of Commissioners prior to the 2025 Annual GMS consisted of 4 (four) members, comprising 1 (one) President Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 2 (two) Independent Commissioners. The composition and the basis for the appointment of the Board of Commissioners are presented in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan 2025
Table of Composition and Appointment Basis of the Board of Commissioners Prior to Annual GMS in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Zuhri Iryansyah	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 13 Oktober 2020 Annual GMS Resolution dated October 13, 2020	13 Oktober 2020 (periode pertama) October 13, 2020 (first period)
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 April 2022 Annual GMS Resolution dated April 14, 2022	14 April 2022 (periode pertama) April 14, 2022 (first period)
Bay Mokhamad Hasani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 15 Juli 2020 Annual GMS Resolution dated July 15, 2020	15 Juli 2020 (periode pertama) July 15, 2020 (first period)
F. Budi Prayitno	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 25 September 2024 Extraordinary GMS Resolution dated September 25, 2024	25 September 2024 (periode pertama) September 25, 2024 (first period)

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS SETELAH RUPS 2025

Selama tahun 2025, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2025. RUPS Tahunan memutuskan untuk mengangkat Ibu R.R.. Dewi Ariyani sebagai Komisaris Utama yang baru menggantikan Bapak Zuhri Iryansyah sebagai Komisaris Utama sebelumnya. RUPS Tahunan juga memberhentikan dengan hormat Bapak F. Budi Prayitno selaku Komisaris Independen dan mengangkatnya sebagai Komisaris menggantikan Ibu R.R. Dewi Ariyani. Selain itu, RUPS Tahunan juga mengangkat Bapak Doni Istyanto Hari Mahdi sebagai Komisaris Independen yang baru menggantikan Bapak Bay Mokhamad Hasani sebagai Komisaris Independen sebelumnya, dan mengangkat Bapak Mitchell Julius Tupamahu sebagai Komisaris Independen Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan.

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG TERJADI SETELAH TAHUN BUKU BERAKHIR

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

COMPOSITION AND APPOINTMENT BASIS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER THE 2025 AGMS

During 2025, changes were made to the composition of the Board of Commissioners based on the Annual GMS held on June 18, 2025. The AGMS resolved to appoint Mrs. R.R.. Dewi Ariyani as the new President Commissioner, replacing Mr. Zuhri Iryansyah as the previous President Commissioner. The AGMS also honorably dismissed Mr. F. Budi Prayitno from his position as Independent Commissioner and appointed him as Commissioner, replacing Mrs. R.R.. Dewi Ariyani. In addition, the AGMS appointed Mr. Doni Istyanto Hari Mahdi as the new Independent Commissioner, replacing Mr. Bay Mokhamad Hasani as the previous Independent Commissioner, and appointed Mr. Mitchell Julius Tupamahu as an Independent Commissioner of the Company. These changes in the composition of the Board of Commissioners were made based on the Company's needs.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER THE END OF THE FINANCIAL YEAR

As of the issuance of this Annual Report, there have not been changes in the composition of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.





Profil
Direksi
Profile of the Board of Directors



Shanti Puruhita*

Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis

President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development

Masa Jabatan | Term of Office

- 6 Desember 2022 – 12 Juni 2024, Periode Pertama
- 12 Juni 2024 – RUPST 2029, Periode Kedua
- December 6, 2022 – June 12, 2024, First Period
- June 12, 2024 – AGMS 2029, Second Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 48 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Surabaya, 12 Mei 1977
Indonesian citizen
Aged 48 years old as of Desember 31, 2024
Born in Surabaya, May 12, 1977

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan Pertama | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 16 tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed No. 16, dated December 6, 2022, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in South Jakarta Administrative City, concerning Resolution Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Penunjukan Selanjutnya | Subsequent Appointment History

Akta Notaris Nomor 32 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed Number 32, dated June 12, 2024, drawn up by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.kn, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S2 – Universitas Jayabaya, Kenotariatan (2025)
- S2 - Kuhne Logistic University, Hamburg Jerman - Jurusan Logistik (2014)
- S1 - Universitas Airlangga - Hukum, (1999)
- Master of Notary from Jayabaya University (2025)
- Master of Logistics from Kuhne Logistic University, Hamburg, German (2014)
- Bachelor of Law from Airlangga University (1999)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Sekarang)
- Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2022)
- EVP Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2017–2020)
- VP Hubungan Lembaga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2016–2017)
- Direktur Komersial PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. (2015–2016)
- Senior Manager Layanan SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2012–2015)
- President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Present)
- Director of Commercial and Business Development of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2022)
- EVP Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2020)
- VP Institutional Relations of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016–2017)
- Director of Commercial of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2015–2016)
- Senior Manager of HR and General Affairs of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2012–2015)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification

- *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO) – oleh PT PMLI, di Bogor (Nomor : 70209121300161700000)
- "Leader as a Coach" – oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di Jakarta (tidak ada nomor sertifikasi)
- "Pelatihan Audit Berbasis Risiko" – oleh PT PMLI, di Surabaya (Nomor: 203517906200210)
- Qualified Chief Risk Officer (QCRO) – by PT PMLI, in Bogor (Nomor : 70209121300161700000)
- "Leader as a Coach" – by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), in Jakarta (no certification number)
- "Risk-Based Audit Training" – by PT PMLI, in Surabaya (Certification Number: 203517906200210)

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di luar Perusahaan, sementara saat ini beliau juga merangkap sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis di IPCM sejak tahun 2022.
She does not hold other position outside the Company, while within IPCM, she is the Act. Director of Commercial and Business Development since 2022.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
She has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

1.072.100 lembar saham per 31 Desember 2025
1,072,100 shares as of December 31, 2025

*) Beliau juga menjabat sebagai Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.
*) She also holds as Act. Director of Commercial and Business Development





Arief Hermawan*

Direktur Armada dan Operasi
Director of Fleet and Operations

Masa Jabatan | Term of Office
Masa Jabatan: 18 Juni 2025 – RUPST 2030, Periode Pertama
Term of Office: June 18, 2025 – AGMS 2030, First Period

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia
Usia 55 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Bogor, 10 November 1970
Indonesian citizen
Aged 55 years old as of Desember 31, 2025
Born in Bogor, November 10, 1970

Domisili | Domicile
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment
Akta Notaris Nomor 26 tanggal 18 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M,Kn,., berkedudukan di Kota Jakarta mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Notarial Deed Number 26, dated June 18, 2025 drawn up by Notary Dr. Putra Hutomo, S.H., M,Kn,., domiciled in Jakarta Administrative City, concerning Resolution Statement of Meeting of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History
- ANT-3 Akademi Ilmu Pelayaran (1994)
- S1 - Hukum, Universitas Al Washliyah (2001)
- ANT-3 Bachelor's Degree - Akademi Ilmu Pelayaran (1994)
- Bachelor's Degree - Law, Al Washliyah University (2001)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM
- Group Head Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2025)
- SVP Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021)
- SVP Pemasaran PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2020)
- Senior Manager Bina Usaha PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2017-2019)
- Koordinator PMO Pengembangan Marine Service PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2015-2016)
- Group Head of Vessel Services at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2025)
- SVP of Business Planning and Development at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021)
- SVP of Marketing at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2020)
- Senior Manager of Business Development at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2017–2019)
- PMO Coordinator for Marine Service Development at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2015–2016)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification
- Business Leader Upskilling Batch 1 - oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di Medan
- Effective Negotiation Skils BOD-1 - di Medan
- Costumer Relationship Management - di Medan
- Costumer Service Excellent BOD-1 - di Medan
- Business Transformasi BOD-1 - di Medan
- Achievement Motivation Training BOD-1 - di Medan
- Business Process Improvement BOD-1 - di Medan
- Business Leader Upskilling Batch 1 - by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), in Medan
- Effective Negotiation Skills BOD-1 - in Medan
- Customer Relationship Management - in Medan
- Customer Service Excellence BOD-1 - in Medan
- Business Transformation BOD-1 - in Medan
- Achievement Motivation Training BOD-1 - in Medan
- Business Process Improvement BOD-1 - in Medan

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam maupun diluar IPCM.
He does not hold any other positions, either within or outside of IPCM.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships
Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
He has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM
Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
He does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

*) Beliau efektif menjabat sebagai Direktur Armada dan Operasi per 18 Juni 2025.
*) He serves as the Director of Fleet and Operations effective since June 18, 2025.





Dessy Emastari Prihatiningtyas

Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko

Director of Finance, Human Resources, and Risk Management

Masa Jabatan | Term of Office

Masa Jabatan: 12 Juni 2024 – RUPST 2029, Periode Pertama
Term of Office: June 12, 2024 – AGMS 2029, First Period

Data Pribadi | Personal Data

Warga negara Indonesia
Usia 54 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Surabaya, 27 Desember 1971
Indonesian citizen
Aged 54 years old as of Desember 31, 2024
Born in Surabaya, December 27, 1971

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Akta Notaris Nomor 32 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Notarial Deed Number 32, dated June 12, 2024, drawn up by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.kn, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Master of Commerce (Advance) in Applied Finance and Professional Accounting dari University of Queensland Australia (2006)
- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga (1997)
- Master of Commerce (Advance) in Applied Finance and Professional Accounting from The University of Queensland, Australia (2006)
- Bachelor of Economic Accounting from Airlangga University (1997)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Group Head Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 1 Oktober 2021 s.d 11 Juni 2024.
- SVP Strategi SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 15 Juni 2021 s.d 30 September 2021
- Direktur Keuangan dan SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020–2021)
- Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019–2019)
- Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2015-2019)
- Group Head of HR Management at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) October 1, 2021—June 11, 2024
- SVP of HR Strategy at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Juni 15, 2021—September 30, 2021
- Finance and HR Director of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020–2021)
- President Director of PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019)
- President Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2015–2019)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification

- Qualified Chief Risk Officer (QCRO)
- Associate Certified Coach (ACC)
- Certified Executive Coach
- Certified Professional Coach
- FCPA Australia
- Chartered Accountant
- Register Negara Akuntan Indonesia.
- Qualified Chief Risk Officer (QCRO)
- Associate Certified Coach (ACC)
- Certified Executive Coach
- Certified Professional Coach
- FCPA Australia
- Chartered Accountant
- State Register of Indonesian Accountancy

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information

Komisaris Utama PT Pendidikan Maritime dan Logistik Indonesia.
President Commissioner of PT Pendidikan Maritime dan Logistik Indonesia

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships

Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
She has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM

Beliau tidak memiliki saham di PT Jasa ArmadaIndonesia Tbk.
She does not own any shares in PT Jasa Armada Indonesia Tbk.





Muhammad Iqbal*

Direktur Armada dan Operasi
Director of Fleet and Operations

Masa Jabatan | Term of Office
- 13 Oktober 2020 - 12 Juni 2024, Periode Pertama
- 12 Juni 2024 – 18 Juni 2025, Periode Kedua
- October 13, 2020 – June 12, 2024, First Period
- June 12, 2024 – June 18, 2025, Second Period

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia
Usia 57 tahun per 31 Desember 2025
Kelahiran Jakarta, 14 Agustus 1968
Indonesian citizen
Aged 57 years old as of Desember 31, 2025
Born in Jakarta, August 14, 1968

Domisili | Domicile
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Penunjukan Pertama | Legal Basis of Appointment
- Akta Notaris Nomor 13 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- Akta Notaris Nomor 33 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Notarial Deed Number 13, dated October 13, 2020, drawn up by Notary Fathiah Helmi, SH, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Amendment of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- Notarial Deed Number 33, dated June 17, 2021, drawn up by Notary Ashoya Ratam, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of Annual General Meeting of Shareholders.

Riwayat Penunjukan Selanjutnya | Subsequent Appointment History
Akta Notaris Nomor 32 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Notarial Deed Number 32, dated June 12, 2024, drawn up by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.kn, domiciled in the South Jakarta Administrative City concerning the Resolution Statement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Riwayat Pendidikan | Educational History
- S1 - Manajemen Universitas Trilogi (2022)
- ANT-1 Nautika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (2006)
- ANT-3 Nautika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (1995)
- Bachelor of Science in Management, Trilogi University (2022)
- ANT-1 in Nautical Science, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (2006)
- ANT-3 in Nautical Science, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (1995)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM
- Direktur Armada dan Operasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-2025)
- VP Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020)
- Plt. Direktur Armada dan Teknik PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019)
- Director of Fleet and Operation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-2025)
- VP of Vessel Services at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020)
- Act. Director of Fleet and Technical at PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2018-2019)

Sertifikasi yang Dimiliki | Professional Certification
- "Qualified Chief Risk Officer (QRCO)" – oleh PT PMLI, di Bogor (Nomor: 214816812161014)
- ESG Keynote Session : "Building ESG Awareness and Driving Action for a Sustaianble Future" - oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk, di Jakarta (Tidak ada nomor sertifikasi)
- ESG Keynote Session: "Building ESG Awareness and Driving Action for a Sustainable Future" – presented by PT Jasa Armada Indonesia Tbk, in Jakarta
- Qualified Chief Risk Officer (QCRO) – by PT PMLI, in Bogor (Nomor : 70209121300161700000)
- APA Leadership Program : Advancing Sustainability in Maritime and Port Operators - oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di Jakarta (Tidak ada nomor sertifikasi)
- APA Leadership Program: Advancing Sustainability in Maritime and Port Operators – presented by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), in Jakarta

Informasi Rangkap Jabatan | Concurrent Position Information
Beliau tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam atau luar IPCM.
He has no concurrent position within or outside IPCM.

Hubungan Afiliasi | Affiliation Relationships
Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali IPCM.
He has no financial relationship, share ownership relationship, and/or family relationship with any member of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or IPCM's controlling shareholders.

Kepemilikan Saham di IPCM | Share Ownership in IPCM
964.100 lembar saham per 31 Desember 2025
964,100 shares as of December 31, 2025

*) Beliau tidak lagi menjabat sebagai Direktur Armada dan Operasi per 18 Juni 2025 .
*) He no longer serves as the Director of Fleet and Operations as of June 18, 2025.



PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2025, Komposisi anggota Direksi Perusahaan mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan sebagaimana penjelasan berikut.

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI SEBELUM RUPS TAHUNAN 2025

Komposisi Direksi sebelum RUPS Tahunan 2025 berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, 1 (satu) orang Direktur Armada dan Operasi, 1 (satu) orang Direktur Keuangan, SDM, Manajemen Risiko. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS MEMBER AND THE REASONS FOR CHANGES

During 2025, the composition of the Board of Directors members experienced changes in accordance with the Company's needs as explained below.

COMPOSITION AND BASIS FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS PRIOR TO THE 2025 ANNUAL GMS

The composition of the Board of Directors prior to the 2025 Annual GMS consisted of 3 (three) members, comprising 1 (one) President Director who also served as Director of Commercial and Business Development, 1 (one) Director of Fleet and Operations, and 1 (one) Director of Finance, Human Resources, and Risk Management. The composition and basis for the appointment of the Board of Directors are presented in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan 2025
Table of Composition and Appointment Basis of the Board of Directors Prior to Annual GMS in 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Tanggal Efektif Effective Date
Shanti Puruhita*	Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director, concurrently as the Director of Commercial and Business Development	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024 Annual GMS Resolution dated June 12, 2024	12 Juni 2024 (periode kedua) June 12, 2024 (second period)
Muhammad Iqbal	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operations	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024 Annual GMS Resolution dated June 12, 2024	12 Juni 2024 (periode kedua) June 12, 2024 (second period)
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direksi Keuangan, SDM, Manajemen Risiko Director of Finance, HR, and Risk Management	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 Juni 2024 Annual GMS Resolution dated June 12, 2024	12 Juni 2024 (periode pertama) June 12, 2024 (first period)

*) Beliau juga menjabat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis.
*) She also holds as Director of Commercial and Business Development





Profil
Pejabat Eksekutif
Profile of Executive Officers



Amir Indra Sasongko

EVP Audit Internal
EVP Internal Audit

Menjabat sejak 1 April 2023
Serving since April 1, 2023

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

55 tahun per 31 Desember 2025
55 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

1 April 2023
April 1, 2023

Riwayat Pendidikan | Educational History

Sarjana Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana (1996)
Bachelor of Social Sciences, Administration Science Faculty, Krisnadwipayana University (1996)

Pengalaman Kerja | Employment History

- 9 Tahun di Bidang Audit Internal
- Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT Pengerukan Indonesia (2016-2023)
- 9 years in Internal Audit Field
- Head of Internal Audit, PT Pengerukan Indonesia (2016-2023)

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

- Pelindo - Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/2/4/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 2 April 2023
- SPJM - Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 22 Juni 2023
- JAI - Surat Keputusan Direksi No. KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 tanggal 2 April 2023
- Pelindo – Decree of the Board of Directors No. KP.10.02/2/4/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated April 2, 2023
- SPJM - Decree of the Board of Directors No. KP.10.02/22/6/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated June 22, 2023
- JAI - Decree of the Board of Directors No. KP.10.02/2/4/1/SRA/OUT/JAI-23 dated April 2, 2023



Eddy Haristiani

EVP Sekretaris Perusahaan merangkap Plh. VP Hukum
EVP Corporate Secretary Concurrently Act. VP Legal

Menjabat sebagai EVP Sekretaris Perusahaan sejak 16 Juli 2019 dan menjabat sebagai Plh. VP Hukum sejak 1 November 2025.
He has been serving as EVP Corporate Secretary since July 16, 2019, and as Acting VP of Legal since November 1, 2025.

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

55 tahun per 31 Desember 2025
55 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

16 Juli 2019
July 16, 2019

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo (2003-2005)
- Sarjana Komunikasi Massa, Universitas Gadjah Mada (1990-1995)
- Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo (2003-2005)
- Sarjana Komunikasi Massa, Universitas Gadjah Mada (1990-1995)

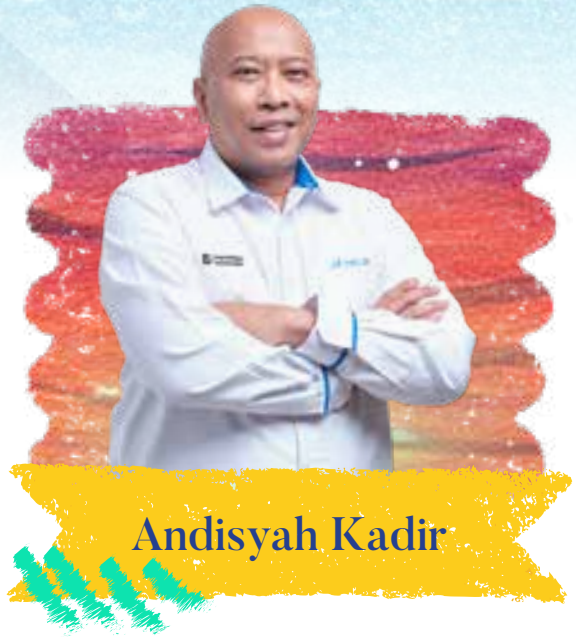
Pengalaman Kerja | Employment History

- SPV / Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (Juni 2018 – Juli 2019)
- Manager of Learning of Port and Maritime – PT PMLI (IPC Corporate University) / One of PT Pelindo II's Subsidiaries (November 2014 - Juni 2018)
- Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) (2021 - Oktober 2014)
- SPV / Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (June 2018 – July 2019)
- Manager of Learning of Port and Maritime – PT PMLI (IPC Corporate University) / One of PT Pelindo II's Subsidiaries (November 2014 - June 2018)
- Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) (2021 - October 2014)

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

- Surat Perintah Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.20.01/3/11/1/SRA/DUT/JAI-25 tanggal 3 November 2025
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.428/1/2/MS-19 tanggal 16 Juli 2019
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: 413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.20.01/3/11/1/Sra/dut/jai-25, dated November 3, 2025;
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.428/1/2/MS-19 dated Juli 16, 2019
- Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: 413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023





Andisyah Kadir

VP Transformasi & Pengembangan Bisnis
VP Transformation & Business Development

Menjabat sejak 28 April 2021
Serving since April 28, 2021

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

53 tahun per 31 Desember 2025
53 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

Sejak 28 April 2021
Since April 28, 2021

Riwayat Pendidikan | Educational History

S1 Manajemen Informatika, Universitas Gunadarma (1996)
Bachelor of Informatics Management, Gunadarma University (1996)

Pengalaman Kerja | Employment History

- VP Transformasi & Pengembangan Bisnis, Divisi Transformasi & Pengembangan Bisnis JAI (2021–2022)
- SDVP Crewing (2018 - 2021)
- Manager Crewing, Crewing, JAI (2014 - 2018)
- Ass. Manager Administrasi Kepanduan & Pengawakan, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Administrasi
- Kepanduan & Pengawakan, Pelabuhan Tanjung Priok (2012–2014)
- Supervisor Administrasi Kepanduan, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok (2009–2012)
- VP Transformation & Business Development, Transformation & Business Development Division, JAI (2021–2022)
- SDVP Crewing (2018–2021)
- Crewing Manager, JAI (2014–2018)
- Assistant Manager Pilotage & Crewing Administration, Tanjung Priok Port Branch, Pilotage & Crewing Administration (2012–2014)
- Supervisor Pilotage Administration, Tanjung Priok Port Branch (2009–2012)

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND- 23 tanggal 13 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomo: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND- 23 dated January 13, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 January 2023.



Roy Prabandaru Mahapria

VP Komersial

VP Commercial

Menjabat sejak 1 Februari 2023
Serving since February 1, 2023

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

51 tahun per 31 Desember 2025
51 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

1 Februari 2023
February 1, 2023

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S2 – Kuhne Logistics University – Hamburg, Germany (2015)
- S1 – STT Pelita Bangsa – Jakarta (2023)
- STIE Yasmi – Cirebon (2014)
- D3 BPLP – Semarang (1996)
- Master' Degree – Kuhne Logistics University – Hamburg, Germany (2015)
- Bachelor's Degree – STT Pelita Bangsa – Jakarta (2023)
- STIE Yasmi – Cirebon (2014)
- Associate Degree BPLP – Semarang (1996)

Pengalaman Kerja | Employment History

- Deputi Komersial Pontianak PT Pelindo 2 (2017 – 2023)
- Asisten Manager Tj. Priok PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 – 2017)
- Kepala Usaha Terminal Cirebon PT Pelindo 2 (2014 -2015)
- Manager Operasi Tanjung Pandan PT Pelindo 2 (2013 – 2014)
- SPV Perencanaan Kapal Pontianak PT Pelindo 2 (2010 – 2013)
- Pandu Bandar Pontianak PT Pelindo 2 (2009 – 2010)
- Pandu Laut Palembang PT Pelindo 2 (2007 – 2009)
- Pandu Laut Pontianak PT Pelindo 2 (2002 – 2007)
- Staf SDM Kantor Pusat PT Pelindo 2 (2001 – 2002)
- Commercial Deputy of Pontianak, PT Pelindo 2 (2017 – 2023)
- Assistant Manager of Tj. Priok, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 – 2017)
- Business Head of Terminal Cirebon, PT Pelindo 2 (2014 -2015)
- Operation Manager of Tanjung Pandan, PT Pelindo 2 (2013 – 2014)
- SPV Vessel Planning of Pontianak, PT Pelindo 2 (2010 – 2013)
- Harbor Pilot, Pontianak, PT Pelindo 2 (2009–2010)
- Harbor Pilot, Palembang, PT Pelindo 2 (2007 – 2009)
- Harbor Pilot, Pontianak, PT Pelindo 2 (2002 – 2007)
- HR Staff of Head Office, PT Pelindo 2 (2001 – 2002)

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021
- Surat Keputusan Direksi Nomor : KP-413/1/2/1/MS-23 tanggal 1 Februari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor KP 10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number KP.10.01/1/10/1/SDMA/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021
- Decree of the Board of Directors of Number : KP-413/1/2/1/MS-23 dated February 1, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number KP 10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023





Yosia Abet Laksana

VP Operasi & Designated Person Ashore (DPA)
VP Operation & Designated Person Ashore (DPA)

Menjabat sejak 1 November 2021
Serving since November 1, 2021

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

51 tahun per 31 Desember 2025
51 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

1 November 2021
November 1, 2021

Riwayat Pendidikan | Educational History

- ANT-1 Nautika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) (2008)
- ANT-2 Nautika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) (2002)
- ANT-3 Nautika, Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (1997)
- ANT-1 Nautica, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) (2008)
- ANT-2 Nautica, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) (2002)
- ANT-3 Nautica, Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (1997)

Pengalaman Kerja | Employment History

- Manager Operasi & Komersial Area V PT. Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2021)
- Asisten DGM Perencanaan Pemanduan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Pelabuhan Palembang (2019-2020)
- Asisten DGM Perencanaan, Pengendalian dan Kepanduan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Pelabuhan Jambi (2017-2019)
- Manager Operasi PT JAI cabang Jambi (2014-2017)
- Staf Kapal & Pemanduan Sr. Kantor Pusat (2013–2014)
- Pandu Bandar Cirebon Cabang Pelabuhan Cirebon (2012 -2012)
- Pandu Laut pada Cabang Pelabuhan Palembang (2009-2013)
- Pandu Lut pada Cabang Pelabuhan Pontianak (2006-2009)
- Pel. Pengembangan SDM Junior (2005–2005)
- Operations & Commercial Manager, Area V, PT. Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2021)
- Assistant Deputy General Manager for Planning and Pilotage, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), Palembang Port Branch (2019–2020)
- Assistant Deputy General Manager of Planning, Control, and Pilotage at PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), Jambi Port Branch (2017–2019)
- Operations Manager at PT JAI, Jambi Branch (2014–2017)
- Senior Vessel & Pilotage Staff at Headquarters (2013–2014)
- Port Pilot, Cirebon Port Branch (2012–2012)
- Marine Pilot at the Palembang Port Branch (2009–2013)
- Marine Pilot at the Pontianak Port Branch (2006–2009)
- Junior Human Resources Development Officer (2005–2005)

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND23 tanggal 21 Desember 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND23 dated December 21, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023



Ivan Hartanto

VP Armada & QHSSE
VP VP Fleet & QHSSE
Menjabat sejak 6 April 2021
Serving since April 6, 2021

Kewarganegaraan | Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age
54 tahun per 31 Desember 2025
54 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile
Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company
6 April 2021
April 6, 2021

Riwayat Pendidikan | Educational History
Universitas Pancasila (1997)
Universitas Pancasila (1997)

Pengalaman Kerja | Employment History
- VP Teknik/DPA PT Jasa Armada Indonesia (April 2021 – Oktober 2021)
- DGM Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Banten (2020 –2021)
- Senior Manager Teknik IPC Terminal Petikemas (2019 –2020)
- DGM Teknik & Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Panjang (2017)
- DVP Alat Apung Kantor Pusat (2016)
- VP Technical/DPA, PT Jasa Armada Indonesia (April 2021 – October 2021)
- DGM Technical & Information Systems, Banten Port Branch (2020–2021)
- Senior Technical Manager, IPC Terminal Petikemas (2019–2020)
- DGM Technical & Information Systems, Panjang Port Branch (2017)
- DVP Floating Equipment, Head Office (2016)

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/31/12/1/RKTK/SDMA/PLND22 tanggal 22 Desember 2022.
- Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/31/12/1/RKTK/SDMA/PLND22 dated December 22, 2022
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023





Angga Iriano Nugroho

VP Keuangan & Manajemen Risiko
VP Finance & Risk Management

Menjabat sejak 14 Agustus 2020
Serving since August 14, 2020

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

41 tahun per 31 Desember 2025
41 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

14 Agustus 2020
August 14, 2020

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Msc of International Transport and Logistics/Transport & Logistics, World Maritime University (2013)
- Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman (2004)
- Msc of International Transport and Logistics/Transport & Logistics, World Maritime University (2013)
- Bachelor of Economic Accounting, universitas Jenderal Soedirman University (2004)

Pengalaman Kerja | Employment History

- SDVP Program Kemitraan dan Bina Lingkungan & CSR PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017- 2020)
- Manager Akuntansi & Anggaran, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - 2017)
- ASM Pendapatan & Piutang PT. Pelabuhan Tanjung Priok (2014-2016)
- Manager Perbendaharaan & KBL, Cabang Pelabuhan Tanjung Priok PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014)
- SDVP Partnership and Community Development & CSR, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017–2020)
- Accounting & Budgeting Manager, Tanjung Priok Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016–2017)
- ASM Revenue & Receivables, PT Pelabuhan Tanjung Priok (2014–2016)
- Treasury & Partnership (KBL) Manager, Tanjung Priok Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2014)

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND23 tanggal 13 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 tanggal 13 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND23 dated January 13, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/21/12/2/RKTK/SDMA/PLND-23 dated January 13, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023



Supomo Puguh

VP SDM & Umum merangkap Plh. Vice President Pengadaan

VP Human Resources and General Affairs, and as Acting VP of Procurement

Menjabat sebagai VP SDM & Umum dan menjabat sebagai Plh. Vice President Pengadaan sejak 1 Februari 2025

Serves as VP of Human Resources & General Affairs and has served as Acting VP of Procurement since February 1, 2025

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia

Indonesian citizen

Usia | Age

45 tahun per 31 Desember 2025

45 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Kebalen - Bekasi, Jawa Barat

Kebalen - Bekasi, West Java

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

1 Februari 2025

February 1, 2025

Riwayat Pendidikan | Educational History

- D3 Manajemen Transportasi Laut UNJ (2021)
- Associate Degree of Sea Transportation Management, UNJ (2023)
- D3 Manajemen Transportasi Laut UNJ (2021)
- Associate Degree of Sea Transportation Management, UNJ (2023)

Pengalaman Kerja | Employment History

- Vice President SDM dan Umum PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2024-Sekarang)
- Manager Pengembangan Organisasi PT Pelabuhan Indonesia (2022-2025)
- Manager Pengembangan Organisasi Regional 2 (2021-2022)
- Senior Officer Budaya Korporasi Kantor Pusat (2020) Staf SDM & Umum Senior PT. Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2014-2020)
- Vice President of Human Resources and General Affairs at PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2024–Present)
- Manager of Organizational Development at PT Pelabuhan Indonesia (2022–2025)
- Manager of Regional 2 Organizational Development (2021–2022)
- Senior Corporate Culture Officer at Headquarters (2020) Senior HR & General Affairs Staff at PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (2014–2020)

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

- SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.02/3/6/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 3 Juni 2024
- Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number KP.10.02/3/6/1/RKTK/SDMA/PLND-24 dated June 3, 2024





Oka Sudarsono

VP Hukum
VP Legal

Menjabat sejak 1 Januari 2023-1 November 2025
Serving since January 1, 2023-November 1, 2025

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

56 tahun per 31 Desember 2025
56 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Jakarta, Indonesia

Bergabung di Perusahaan | Joined the Company

1 September 2022
September 1, 2022

Riwayat Pendidikan | Educational History

- M.M., Universitas Bina Darma Palembang, Tahun 2019
- S.Pel., Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Jakarta, Tahun 2002
- A.Md., Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera Yogyakarta, Tahun 1993
- Master of Management, Bina Darma University Palembang, 2019
- Bachelor of Sailing, Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Jakarta, 2002
- Associate Degree, Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera Yogyakarta, 1993

Pengalaman Kerja | Employment History

- Vice President Hukum PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2022-2025)
- DGM Kepatuhan Bisnis Pelindo (2020-2022)
- DVP Penyusunan SOP Pelindo (2018-2020)
- DGM Operasi dan Teknis Pelindo (2016-2017)
- Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi Pelindo (2014-2016)
- Vice President Legal at PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2022-2025)
- DGM Business Compliance at Pelindo (2020-2022)
- DVP SOP Preparation at Pelindo (2018-2020)
- DGM Operation and Technical at Pelindo (2016-2017)
- Operational Planning and Control at Pelindo (2014-2016)

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/1/9/5/RKTK/SDMA/PLND-22 tanggal 1 September 2022
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 31 Desember 2022
- Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP-413/31/12/1/MS-22 tanggal 1 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 tanggal 2 Januari 2023
- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.21.06/18/10/3/KES1/SDMA/PLND-25 tanggal 18 Oktober 2025
- Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.10.02/1/9/5/RKTK/SDMA/PLND-22 dated September 1, 2022
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated December 31, 2022
- Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP-413/31/12/1/MS-22 dated January 1, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number: KP.10.02/18/1/1/ADSD/SDMP/PLJM-23 dated January 2, 2023
- Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: KP.21.06/18/10/3/KES1/SDMA/PLND-25 dated October 18, 2025





Demografi Pekerja
Employee Demographics

Hingga akhir 2025, jumlah pekerja Perusahaan yang merupakan Pekerja Penugasan Pelindo sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Penempatan Pekerja (*Secondment Agreement*) tercatat sebesar 92 orang mengalami penurunan sebesar 9,8% jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 102 orang.

As of the end of 2025, the number of Company employees assigned by Pelindo under the Secondment Agreement was recorded at 92 people, showing a decrease of 9.8% compared to 102 people in 2024.

Berikut demografi pekerja Penugasan Pelindo untuk tahun 2025 dan 2024, berdasarkan Level Organisasi, Tingkat Pendidikan, Rentang Usia, Wilayah Kerja, dan Jenis Kelamin.

The following is the demographic profile of Pelindo Secondment Employees for 2025 and 2024, based on Organizational Level, Educational Background, Age Range, Work Location, and Gender.

Jumlah Pekerja Penugasan Pelindo Berdasarkan Level Organisasi (Orang)
Number of Pelindo Secondment Employees by Organizational Level (people)

Level Organisasi Organizational Level	2025			2024		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Direksi Board of Directors	1	2	3	-	2	2
Vice President	8	-	8	9	-	9
Deputy Vice President	10	7	17	9	7	16
General Manager	5	-	5	5	-	5
Deputy General Manager	5	-	5	3	1	4
Officer	45	3	48	34	3	37
ABK Crew	6	-	6	29	-	29
Jumlah Total	**80**	**12**	**92**	**89**	**13**	**102**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P = Female

Jumlah Pekerja Penugasan Pelindo Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Number of Pelindo Secondment Employees by Educational Background (people)

Tingkat Pendidikan Educational Background	2025			2024		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Pascasarjana (S2) Post Graduate (S2)	9	4	13	7	5	12
Sarjana (S1) Bachelor (S1)	25	6	31	27	6	33
Diploma (D3) Diploma (D3)	10	2	12	7	2	9
SLTA Senior High School	36	-	36	48	-	48
Jumlah **Total**	**80**	**12**	**92**	**89**	**13**	**102**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P = Female

Jumlah Pekerja Penugasan Pelindo Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Number of Pelindo Secondment Employees by Age Range (people)

Rentang Usia Age Range	2025			2024		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
<35 tahun | years old	5	3	8	9	3	12
35–50 tahun | years old	33	8	41	30	9	39
>50 tahun | years old	42	1	43	50	1	51
Jumlah Total	**80**	**12**	**92**	**89**	**13**	**102**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P = Female

Jumlah Pekerja Penugasan Pelindo Berdasarkan Unit Kerja (orang)
Number of Pelindo Secondment Employees by Work Unit (people)

Wilayah Kerja Work Location	2025			2024		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Kantor Pusat Head Office	37	11	48	30	11	41
Area I						
Tanjung Priok, Meulaboh, Nusantara Regas	17	-	17	31	1	32
Area II						
Banten, Pontianak, Nipa	8	1	9	9	1	10
Area III						
Panjang, Bengkulu, Weda, Halmahera & Sekitar (Lauwi)	4	-	4	5	-	5
Area IV						
Palembang, Teluk Bayur, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan	10	-	10	11	-	11
Area V						
Cirebon, Patimban, Jawa Satu Power, Kanci	4	-	4	3	-	3
Jumlah Total	**80**	**12**	**92**	**89**	**13**	**102**

L = Laki-laki / P = Perempuan
L = Male / P = Female

Jumlah Pekerja Penugasan Pelindo Berdasarkan *Gender* (orang)
Number of Pelindo Secondment Employees by Gender (people)

Gender	2025	2024
Laki-laki Male	80	89
Perempuan Female	12	13
Jumlah Total	**92**	**102**

Uraian lengkap terkait pekerja dan kebijakan Perusahaan dalam pengelolaan dan pengembangan SDM dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

A detailed description of the Company's workforce and policies regarding human resource management and development can be found in the section on Human Resources in the Business Support Functions chapter of this Annual Report.



Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

COMPOSITION OF COMPANY SHARE OWNERSHIP

Kepemilikan Saham IPCM per 1 Januari 2025
IPCM Share Ownership as of January 1, 2025

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Total Issued and Fully Paid Shares (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Pelindo Jasa Maritim	4.063.504.600	406.350.460.000	76,89%
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	580.000.000	0,11%
Publik: Public:			
PT Pelabuhan Indonesia Investama	569.551.400	56.955.140.000	10,78%
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%) Others (each with ownership percentage below 5%)	637.915.300	63.791.530.000	12,07%
Sub Total	**5.276.771.300**	**527.677.130.000**	**99,85%**
Saham Treasuri Treasury Stock	8.039.800	803.980.000	0,15%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid	**5.284.811.100**	**528.481.110.000**	**100,00%**

Kepemilikan Saham IPCM per 31 Desember 2025
IPCM Share Ownership as of December 31, 2025

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Total Issued and Fully Paid Shares (Rp)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Pelindo Jasa Maritim	4.063.504.600	406.350.460.000	76,89%
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	580.000.000	0,11%
Publik: Public:			
PT Pelabuhan Indonesia Investama	569.551.400	56.955.140.000	10,78%
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%) Others (each with ownership percentage below 5%)	645.955.100	64.595.510.000	12,22%
Sub Total	**5.284.811.100**	**528.481.110.000**	**100,00%**
Saham Treasuri Treasury Stock	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid	**5.284.811.100**	**528.481.110.000**	**100,00%**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM IPCM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH AWAL TAHUN DAN AKHIR TAHUN

SHAREHOLDERS COMPOSITION OF IPCM WITH 5% OWNERSHIP OR MORE AT THE BEGINNING AND END OF THE YEAR

Status Pemilik/ Pemegang Saham Owners/ Shareholders Status	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Domestik Domestic						
Pemegang Saham Kepemilikan 5% atau Lebih Shareholders with 5% or More Ownership	2	4.633.056.000	87,67%	2	4.633.056.000	87,67%
Sub Total	2	4.633.056.000	87,67%	2	4.633.056.000	87,67%
Asing Foreign						
Pemegang Saham Kepemilikan 5% atau Lebih Shareholders with 5% or More Ownership	-	-	-	-	-	-
Sub Total	-	-	-	-	-	-
Total	2	4.633.056.000	87,67%	2	4.633.056.000	87,67%

DAFTAR STATUS INVESTOR

LIST OF INVESTOR STATUS

Tabel Pemegang Saham IPCM Berdasarkan Status Investor Awal Tahun dan Akhir Tahun 2025
IPCM Shareholders by Investor Status at the Beginning and End of the Year 2025

Status	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Domestik Domestic						
Individu Individual	5.865	338.146.200	6,40%	7.585	274.436.183	5,19%
Institusi Institution	20	4.931.912.800	93,32%	41	4.919.580.338	93,09%
Subtotal	5.855	5.270.059.000	99,72%	7.626	5.194.016.521	98,28%



Tabel Pemegang Saham IPCM Berdasarkan Status Investor Awal Tahun dan Akhir Tahun 2025
IPCM Shareholders by Investor Status at the Beginning and End of the Year 2025

Status	1 Januari 2025 January 1, 2025			31 Desember 2025 December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Asing Foreign						
Individu Individual	2	10.200	0,00%	10	40.636.279	0,77%
Institusi Institution	15	14.741.900	0,28%	22	50.158.300	0,95%
Subtotal	17	14.752.100	0,28%	32	90.794.579	1,72%
Total	5.902	5.284.811.100	100,00%	7.658	5.284.811.100	100,00%

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut adalah kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung, pada awal tahun dan akhir tahun buku 2025, sebagaimana terlampir di bawah ini.

COMPANY SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The following is the share ownership of the Company by the Board of Commissioners and the Board of Directors, both directly and indirectly, at the beginning and end of the 2025 financial year, as presented below.

Kepemilikan Saham IPCM oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2025
Direct Share Ownership of the Company by the Board of Commissioners and Directors at the Beginning and End of the 2025 Financial Year

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 December 31, 2025	
		Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Direksi Board of Directors					
Shanti Puruhita	Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Act. Director of Commercial and Business Development	1.072.100	0.02%	1.072.100	0.02%
Arief Hermawan**	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation	0	0%	0	0%
Muhammad Iqbal*	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation	964.100	0.02%	964.100	0.02%
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direksi Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Director of Finance, HR & Risk Management	0	0%	0	0%
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Utama President Commissioner	387.600	0.01%	387.600	0.01%
Zuhri Iryansyah *	Komisaris Utama President Commissioner	0	0%	0	0%
F. Budi Prayitno	Komisaris Commissioner	0	0%	0	0%

Kepemilikan Saham IPCM oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2025

Direct Share Ownership of the Company by the Board of Commissioners and Directors at the Beginning and End of the 2025 Financial Year

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 December 31, 2025	
		Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Doni Istyanto Hari Mahdi**	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0%	0	0%
Mitchell Julius Tupamahu**	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0%	0	0%
Bay Mokhamad Hasani *	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0%	0	0%

*) Tidak lagi menjabat sejak 18 Juni 2025
**) Menjabat sejak 18 Juni 2025
*) No longer serving since June 18, 2025
**) Serving since June 18, 2025

Kepemilikan Saham IPCM oleh Dewan Komisaris dan Direksi Secara Tidak Langsung pada Awal Tahun dan Akhir Tahun Buku 2025

Indirect Share Ownership of the Company by the Board of Commissioners and Directors at the Beginning and End of the 2025 Financial Year

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2025 January 1, 2025		31 Desember 2025 December 31, 2025	
		Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Direksi Board of Directors					
Shanti Puruhita	Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Director of Commercial and Business Development	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Arief Hermawan**	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Muhammad Iqbal*	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direksi Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Director of Finance, HR & Risk Management	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Zuhri Iryansyah *	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
F. Budi Prayitno	Komisaris Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Doni Istyanto Hari Mahdi**	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Mitchell Julius Tupamahu**	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Bay Mokhamad Hasani *	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None

*) Tidak lagi menjabat sejak 18 Juni 2025
**) Menjabat sejak 18 Juni 2025
*) No longer serving since June 18, 2025
**) Serving since June 18, 2025



Informasi Pembelian/Penjualan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Purchase/Sales Information of Company Shares by the Board of Commissioners and Board of Directors

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, perusahaan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas transaksi tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Reports on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies, it is stated that every member of the Board of Commissioners and Board of Directors is required to report to the company regarding their share ownership and any changes thereto no later than 3 (three) working days after the transaction occurs. Subsequently, the company must submit a report to the Financial Services Authority (OJK) regarding the transaction no later than 10 (ten) days from the date of the transaction.

Tabel Pembelian/Penjualan Saham IPCM oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2025
Share Purchases/Sales by the Board of Commissioners and Board of Directors during 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Transaksi** Transaction	**Jumlah Saham Sebelum Transaksi (lembar)** Total Shares Before Transaction (shares)	**Jumlah Pembelian/ Penjualan (lembar)** Total Purchase/Sales (shares)
Direksi Board of Directors				
Shanti Puruhita	Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director and Director of Commercial and Business Development	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Arief Hermawan**	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Muhammad Iqbal*	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet and Operation	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direksi Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Director of Finance, HR & Risk Management	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
R.R. Dewi Ariyani	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Zuhri Iryansyah *	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None
F. Budi Prayitno	Komisaris Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Doni Istyanto Hari Mahdi**	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Mitchell Julius Tupamahu**	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Bay Mokhamad Hasani *	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil None	Nihil None	Nihil None

*) Tidak lagi menjabat sejak 18 Juni 2025
**) Menjabat sejak 18 Juni 2025
*) No longer serving since June 18, 2025
**) Serving since June 18, 2025



Harga Saham (Rp) Share Price (Rp)	Jumlah Saham Setelah Transaksi (lembar) Total Shares After Transaction (shares)	Tanggal Transaksi Transaction Date	Tujuan Transaksi Transaction Objective	Pelaporan Reporting
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None
Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None	Nihil None



Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan

Information Regarding Main/Controlling Shareholders

PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang Saham Utama dan Pengendali IPCM adalah PT Pelindo Jasa Maritim dengan kepemilikan sebesar 76,89%. Secara teknis hubungan tata kelola dengan Pemegang Saham (*liaison function*) dilakukan antara Sekretaris Perusahaan IPCM dengan Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Jasa Maritim.

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI/ ENTITAS PEMILIK AKHIR

Hingga akhir tahun 2025, Negara Republik Indonesia merupakan pemilik 100% saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sehingga tidak terdapat pemegang saham pengendali individu baik secara langsung maupun tidak langsung; selanjutnya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki 99% saham PT Pelindo Jasa Maritim, dan PT Pelindo Jasa Maritim memiliki 76,89% saham IPCM, sehingga berdasarkan struktur kepemilikan tersebut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ditetapkan sebagai Pemegang Saham Pengendali tidak langsung IPCM, sedangkan PT Pelindo Jasa Maritim bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali langsung IPCM, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tidak terdapat pemegang saham pengendali individu baik langsung maupun tidak langsung di IPCM.

MAIN SHAREHOLDER

The Main and Controlling Shareholder of IPCM is PT Pelindo Jasa Maritim with 76.89% ownership. Technically, the governance liaison function with the Shareholder is carried out by the Corporate Secretary of IPCM in coordination with the Corporate Secretary of PT Pelindo Jasa Maritim.

CONTROLLING SHAREHOLDER/ ULTIMATE BENEFICIAL ENTITY

As of the end of 2025, the Republic of Indonesia holds 100% of the shares in PT Pelabuhan Indonesia (Persero), meaning there is no single controlling shareholder, either directly or indirectly; furthermore, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) holds 99% of the shares in PT Pelindo Jasa Maritim, and PT Pelindo Jasa Maritim holds 76.89% of the shares in IPCM; therefore, based on this ownership structure, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is designated as the indirect Controlling Shareholder of IPCM, while PT Pelindo Jasa Maritim acts as the direct Controlling Shareholder of IPCM; thus, it can be affirmed that there is no individual controlling shareholder, either directly or indirectly, in IPCM.

Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associate Entities, and Joint Ventures

ENTITAS ANAK

Sampai dengan akhir tahun 2025, IPCM tidak memiliki Anak Perusahaan sehingga tidak ada informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan anak Perusahaan.

ENTITAS ASOSIASI

Sampai dengan akhir tahun 2025, IPCM tidak memiliki perusahaan patungan maupun dalam bentuk *Special Purpose Vehicle* (SPV) sehingga tidak ada informasi terkait nama, persentase kepemilikan, bidang usaha dan status operasi terkait dengan entitas asosiasi Perusahaan.

SUBSIDIARIES

As of the end of 2025, the Company does not have any Subsidiaries and therefore, there is no information regarding the name, ownership percentage, line of business, or operational status related to any Subsidiary.

ASSOCIATE ENTITIES

As of the end of 2025, IPCM does not have any joint ventures or Special Purpose Vehicle (SPV) entities and therefore, there is no information regarding the name, ownership percentage, line of business, or operational status related to the Company's associate entities.

KERJA SAMA DENGAN PIHAK TERAFILIASI DAN PIHAK KETIGA

COOPERATION WITH AFFILIATED PARTIES AND THIRD PARTIES

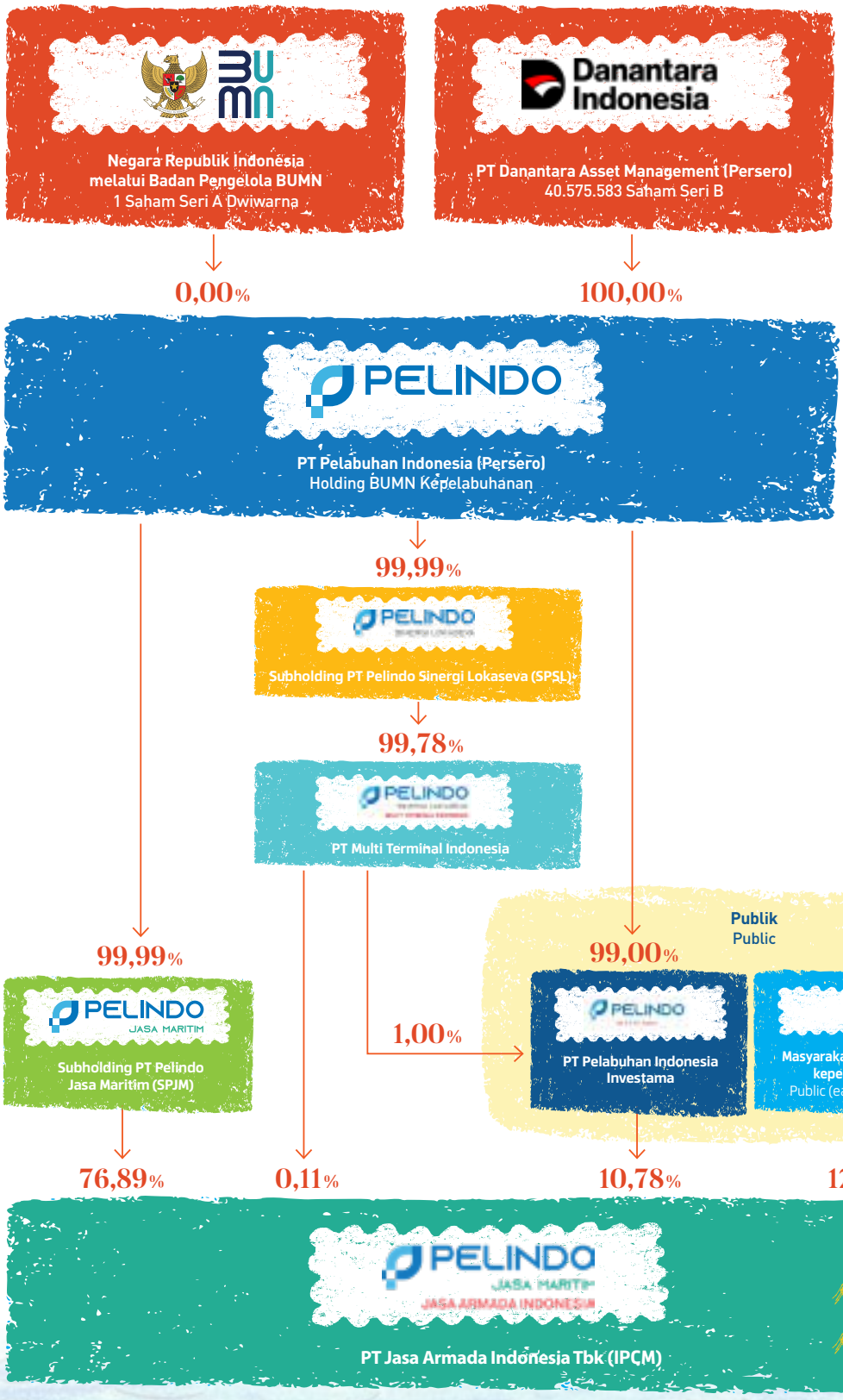
No	Pihak Parties	Nomor PKS PKS Number	Tanggal Berlaku Valid Date	Tanggal Berakhir End Date	Judul PKS PKS Title
1	PT Cemindo Gemilang Tbk.	▪ PJ.01/24/3/2/KOD/DKB/JAI-25 ▪ 006/CG-JAI/III/2025	1 April 2025 April 1, 2025	31 Maret 2026 March 31, 2026	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang Tbk, Bayah, Provinsi Banten Cooperation Agreement for Ship Guidance and Towing Services at Special Terminals for PT Cemindo Gemilang Tbk, Bayah, Banten Province
2	▪ PT PLN Gas ▪ PT Adhi Guna Putera	▪ 2963/126/IX DIREKSI-2023 ▪ PD.02/1/9/1 SPB/DUT JAI-23	1 Juli 2023 July 1, 2023	30 Juni 2028 June 30, 2028	Perjanjian Sewa Kapal Tunda untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power Tugboat Charter Agreement for the Operational Area of Jawa Satu Power
3	PT Jawa Satu Power	▪ P-006/JSP0000/2026 ▪ PJ.01/1/4/2/KOM/DUT/JAI-26	1 April 2026 April 1, 2026	31 Maret 2028 March 31, 2028	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Jawa Satu Power Cooperation Agreement for Ship Services at the PT Jawa Satu Power special terminal
4	PT Langlang Laju Layang	▪ No. HK-566/18/11/1/MS-21 ▪ 005/LLL/PKS-PP/XI/21	18 November 2021 November 18, 2021	17 November 2026 November 17, 2026	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh, Provinsi Aceh Cooperation Agreement for the Provision of Pilotage Assistance in the Form of Tugboats for Ship Towing Services in the Waters of Meulaboh, Aceh Province
		▪ No. HK-566/17/11/1/MS-22 ▪ 020/NK/LLL/XI/22	17 November 2022 November 17, 2022	16 November 2027 November 16, 2027	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Weda (Teluk Weda), Provinsi Maluku Utara Cooperation Agreement for the Provision of Pilotage Assistance in the Form of Tugboats for Ship Towing Services in the Waters of Weda Port (Teluk Weda), North Maluku Province
		▪ No.PU.01.01/23/12/3/TPB/DUT/JAI-24	23 Desember 2024 December 23, 2024	22 Desember 2026 December 22, 2026	Kerja Sama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Cooperation Agreement for the Provision of Pilotage Assistance in the Form of Tugboats for Ship Towing Services at Tarakan Port, North Kalimantan Province
5	PT Pelabuhan Bukit Prima	▪ KS.02/13/11/2/KOD/DUT/JAI-25 ▪ 006/2000/PJJ/PBP-JAI/HK.03/XI/2025	13 November 2025 November 13, 2025	12 November 2027 November 12, 2027	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Kapal Tunda beserta Awak Kapal dengan Sistem *On Call* di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Bukit Asam Tbk Cooperation Agreement for the Provision of Pilotage Assistance in the Form of Tugboats and Crew with an On-Call System at the Terminal for the Own Benefit of PT Bukit Asam Tbk
6	PT Nusantara Regas	KS.02/12/2/KOD/DUT/JAI-25	23 Desember 2025 December 23, 2025	31 Desember 2027 December 31, 2027	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta Cooperation Agreement for Ship Services at the PT Nusantara Regas Special Terminal in the Seribu Islands DKI Jakarta Province
7	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	▪ PD.02/1/12/1/TPB/DUT/JAI-25 ▪ 186/P/LGL/TBP/XII/2025	15 Juni 2024 June 15, 2024	15 Desember 2027 December 15, 2027	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada Tbk Cooperation Agreement for Ship Pilotage and Towing Services at the PT Trimegah Bangun Persada Tbk Special Terminal
8	PT Karya Pacific Shipping	▪ KS.02/2/12/2/KOD/DUT/JAI-24 ▪ ADD I/002/KPS-JAI/XII/2024	1 Desember 2023 December 1, 2023	30 November 2025 November 30, 2025	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Kapal Tunda Beserta Awak Kapal untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal atas Kapal-Kapal Milik dan Kapal- Kapal yang Bekerja untuk Transhipment PT Karya Pacific Shipping dengan Sistem *On Call* di Area *Ship to Ship* (STS) Muara Sungai Musi, Palembang Cooperation Agreement for the Provision of Tugboats and Crew for Vessel Services involving Owned Vessels and Vessels Operating for Transhipment Activities of PT Karya Pacific Shipping, using an On-Call System in the Ship-to-Ship (STS) Area of Muara Musi, Palembang



Struktur Grup
Group Structure

IPCM merupakan anak perusahaan *subholding* PT Pelindo Jasa Maritim yang kepemilikannya juga dipegang oleh PT Multi Terminal Indonesia.

IPCM is a subsidiary of subholding company, PT Pelindo Jasa Maritim, with ownership held by PT Multi Terminal Indonesia.



Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Listing Issuance and/or Listing

IPCM telah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 15–18 Desember 2017 yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perusahaan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perusahaan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2025, secara performa adalah sebagai berikut:

IPCM conducted its Initial Public Offering (IPO) on December 15-18, 2017, and the shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2017. With all shares offered in the IPO fully subscribed, the composition of the Company's share capital and shareholders before and after the IPO as of December 31, 2025, in terms of percentage ownership, is as follows:

Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) Setiap Saham
Registered Common Shares with a Nominal Value of Rp100 (One Hundred Rupiah) per Share

Keterangan Description	Sebelum Penawaran Umum Before Public Offering			Setelah Penawaran Umum s.d Desember 2025 After Public Offering until December 2025		
	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Total Nominal Value (Rp)	(%)	Jumlah Saham Total Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Total Nominal Value (Rp)	(%)
Modal Dasar Authorized Capital	15.000.000.000	1.500.000.000.000		**15.000.000.000**	**1.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid-Up Capital	4.069.304.600	406.930.460.000	100	**5.284.811.100**	**528.481.110.000**	**100**
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	4.063.504.600	406.350.460.000	99,86			
PT Pelindo Jasa Maritim				**4.063.504.600**	**406.350.460.000**	**76,89**
PT Multi Terminal Indonesia	5.800.000	580.000.000	0,14	**5.800.000**	**580.000.000**	**0,11**
Masyarakat Public	-	-	0,00	**1.157.611.800**	**115.761.180.000**	**21,90**
Program ESA ESA Program	-	-	-	**57.894.700**	**5.789.470.000**	**1,10**
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Total Issued and Paid-Up Capital	4.069.304.600	406.930.460.000	100,00	**5.284.811.100**	**528.481.110.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel Number of Shares in Portfolio	10.930.695.400	1.093.069.540.000		**9.715.188.900**	**971.518.890.000**	

IPCM mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2017 dengan menawarkan 1.215.506.500 saham baru dengan nilai nominal Rp100,- atau sebesar 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp380 setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp461.892.470.000.

IPCM listed its initial shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on December 22, 2017, by offering 1,215,506,500 new shares with a nominal value of Rp100 each, or equivalent to 23% of the Company's issued and fully paid-up capital after the Initial Public Offering. All of the shares were offered at an Offering Price of Rp380 per share, to be paid in full upon submission of the FPPS. The total value of the Public Offering amounted to Rp461,892,470,000.



Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

Sampai dengan tahun 2025, IPCM belum mencatatkan efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek lainnya.

As of 2025, IPCM has not listed any other securities on the Stock Exchange and therefore, there is no information available regarding the chronology of listings, type of corporate actions, changes in the number of securities, stock exchange names, or credit ratings of other securities.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Public Accountant and Public Accounting Firm

Nama KAP KAP Name	Purwanto Susanti dan Surja
Alamat Address	Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 7th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Akuntan Publik Public Accountant	Budi Hartono
Periode Penugasan Assignment Period	Sejak ditandatanganinya *Engagement Letter* sampai dengan tanggal 30 April 2026. Since the date of Engagement Letter signed until April 30, 2026.
Jasa Audit yang Diberikan Audit Services	Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Audit on the Company's Financial Statement ending on December 31, 2025.
Biaya Jasa Audit Audit Services Fee	Rp1.015.000.000,00 belum termasuk PPN | excluding PPN
Jasa Non-Audit yang Diberikan Non-Audit Services	Tidak ada None
Biaya Jasa Non-Audit Non-Audit Services Fee	Tidak ada None

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Supporting Institutions and/or Professionals

Daftar Lembaga dan/atau Profesi Penunjang IPCM Tahun 2025

List of Institutions and/or Professionals Supporting IPCM in 2025

NOTARIS

NOTARY

Nama Lembaga Institution Name	Notaris & PPAT Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.
Alamat Address	Jl. Taman Setia Budi Timur No. 50, RT.08/RW.07, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Periode Penugasan Assignment Period	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2025 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for 2025
Jasa yang Diberikan Services	Kenotariatan terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Notary matters regarding the Company's General Meeting of Shareholders (GMS)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

Nama Lembaga Institution Name	PT Electronic Data Interchange Indonesia
Alamat Address	Gedung Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT.09/RW.11 Jakarta Utara 14350 Telp / Phone : +62-21-650-5829, +62-21-2960-6330 Faks / Fax : +62-21-650-5987 Website : www.edi-indonesia.co.id
Periode Penugasan Assignment Period	2025
Jasa yang Diberikan Services	Pengelolaan Administrasi Saham Perusahaan Managing the Share Administration of the Company



Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penghargaan yang Diperoleh di Tahun 2025
Awards Received in 2025

Nasional
National







TSJL & CSR Award 2025

Tanggal | Date
25 Juni 2025
June 25, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
Pilar Lingkungan GOLD 4 STAR
Environmental Pillar GOLD 4 STAR

Diberikan Oleh | Awarded by
BUMN Track

Indonesia Social Responsibility Awards (ISRA) 2025

Tanggal | Date
10 Juli 2025
July 10, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
Silver Category of Sustainability Report

Diberikan Oleh | Awarded by
Indonesia Social Responsibility Awards

Bisnis Indonesia Awards (BISRA) 2025

Tanggal | Date
30 September 2025
September 30, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
Gold Champion

Diberikan Oleh | Awarded by
Bisnis Indonesia







CSA Awards 2025

Tanggal | Date
27 November 2025
November 27, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
Excellence in Port Services and Sustainability

Diberikan Oleh | Awarded by
BUMN Track

ESG Intiative Awards 2025

Tanggal | Date
28 November 2025
November 28, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
Best Employee Wellbeing & Development Strategy 5 STAR

Diberikan Oleh | Awarded by
SusitainLife Today

ESG Intiative Awards 2025

Tanggal | Date
28 November 2025
November 28, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
Best Energy Transition Program 5 STAR

Diberikan Oleh | Awarded by
SusitainLife Today



Nasional
National







Annual Report Award (ARA) 2024

Tanggal | Date
8 Desember 2025
December 8, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
Juara 1 BUMN Klaster 1T-5T
Ranked 1 SOE 1T-5T Cluster

Diberikan Oleh | Awarded by
Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)

Annual Report Award (ARA) 2024

Tanggal | Date
8 Desember 2025
December 8, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
Juara Umum Klaster 1T-5T
Ranked 1 1T-5T Cluster

Diberikan Oleh | Awarded by
Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)

Annual Report Award (ARA) 2025

Tanggal | Date
8 Desember 2025
December 8, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
Juara Umum Perusahaan Gopublic Nonkeuangan
Ranked 1 Gopublic Nonfinance Company

Diberikan Oleh | Awarded by
Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG)

Internasional
International



LACP 2024 Vision Awards

Tanggal | Date
30 Agustus 2025
August 30, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
AR Gold Award

Diberikan Oleh | Awarded by
League of American Communications Professionals LLC (LACP)

LACP 2024 Vision Awards

Tanggal | Date
30 Agustus 2025
August 30, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
AR Top 100 Reports Asia-Pacific Region #76

Diberikan Oleh | Awarded by
League of American Communications Professionals LLC (LACP)

LACP 2024 Vision Awards

Tanggal | Date
30 Agustus 2025
August 30, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
AR Top 20 Indonesian Reports

Diberikan Oleh | Awarded by
League of American Communications Professionals LLC (LACP)

LACP 2024 Vision Awards

Tanggal | Date
30 Agustus 2025
August 30, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
AR Technical Achievement Award

Diberikan Oleh | Awarded by
League of American Communications Professionals LLC (LACP)



Internasional
International



LACP 2024 Vision Awards

Tanggal | Date
30 Agustus 2025
August 30, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
SR Gold Award

Diberikan Oleh | Awarded by
League of American Communications Professionals LLC (LACP)

LACP 2024 Vision Awards

Tanggal | Date
30 Agustus 2025
August 30, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
SR Top 100 Reports Asia-Pacific Region #76

Diberikan Oleh | Awarded by
League of American Communications Professionals LLC (LACP)

LACP 2024 Vision Awards

Tanggal | Date
30 Agustus 2025
August 30, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
SR Top 20 Indonesian Reports

Diberikan Oleh | Awarded by
League of American Communications Professionals LLC (LACP)

LACP 2024 Vision Awards

Tanggal | Date
30 Agustus 2025
August 30, 2025

Jenis Penghargaan | Award Type
SR Technical Achievement Award

Diberikan Oleh | Awarded by
League of American Communications Professionals LLC (LACP)

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2025
Certifications Valid in 2025

Tanggal Perolehan Received Date	Uraian Description	Pemberi Sertifikasi Issuer	Masa Berlaku Validity
Nasional National			
6 Oktober 2025 October 6, 2025	Sistem Manajemen Keselematan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Safety, Welfare, and Health Management System	Menteri Ketenagakerjaan RI Manpower Ministry of the Republic of Indonesia	6 Oktober 2028 October 6, 2028
17 Desember 2025 December 17, 2025	Sertifikat Contractor Safety Management System Contractor Safety Management System Certificate	PLN	17 Desember 2028 December 17, 2028
Internasional International			
11 November 2025 November 11, 2025	Internasional Safety Management Code (ISM Code)	Direktur Jendral Perhubungan Laut (refer to IMO) Director General of Maritime Transportation	10 April 2026 April 10, 2026
26 November 2025 November 26, 2025	ISO 9001:2015	NQA	2 Februari 2027 February 2, 2027
26 November 2025 November 26, 2025	ISO 37001:2016	KAN	5 Februari 2029 February 5, 2029
26 November 2025 November 26, 2025	ISO 14001:2015	NQA	2 Februari 2027 February 2, 2027
26 November 2025 November 26, 2025	ISO 45001:2018	NQA	2 Februari 2027 February 2, 2027



Informasi *Website* Perusahaan

Information on the company website

IPCM memiliki situs web resmi yang menyajikan informasi secara komunikatif dan terkini mengenai Perseroan dengan alamat www.ipcmarine.co.id. Situs web ini merupakan portal resmi IPCM yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, dengan mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang IPCM kepada khalayak luas. Situs web resmi IPCM yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2015, seperti:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

IPCM has an official website that provides communicative and updated information about the Company at www.ipcmarine.co.id. This website serves as IPCM's official portal and can be accessed openly, anytime and anywhere, in an easy and user-friendly manner to deliver comprehensive, accurate, and current information about IPCM to the public. The official IPCM website is available in two languages, Indonesian and English, and complies with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning the Websites of Issuers or Public Companies, issued on June 25, 2015, which includes the following information:

1. General Information on the Issuer or Public Company;
2. Information for Capital Market Participants or Investors;
3. Corporate Governance Information; and
4. Corporate Social Responsibility Information.

www.ipcmarine.co.id



Ketersediaan Informasi pada Situs Web IPCM Berdasarkan POJK No. 8/POJK.4/2015

Availability of Information on IPCM's Website According to POJK No. 8/POJK.4/2015

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Description
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Information on shareholders up to the ultimate individual beneficial owner	✓	https://ipcmarine.co.id/profil-ipcm/struktur-perusahaan/struktur-kepemilikan/
Isi Kode Etik Code of Conduct content	✓	https://ipcmarine.co.id/tata-kelola-perusahaan/kode-etik-bisnis-2/
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), at a minimum covering the agenda materials discussed at the GMS, a summary of the GMS minutes, and key dates, namely the date of GMS announcement, date of GMS notice, date of the GMS, and the date the summary of the GMS minutes is announced	✓	https://ipcmarine.co.id/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham/
Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Statements (last 5 years)	✓	https://ipcmarine.co.id/hubungan-investor/laporan-keuangan/
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	https://ipcmarine.co.id/profil-ipcm/manajemen/dewan-komisaris/ https://ipcmarine.co.id/profil-ipcm/manajemen/dewan-direksi/
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charters of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, and the Internal Audit Unit	✓	https://ipcmarine.co.id/gorvernance-structure/

v = tersedia pada situs web Perusahaan | available on the Company's website
x = belum tersedia pada situs web Perusahaan | not yet available on the Company's website

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Pertumbuhan kinerja yang konsisten mencerminkan efektivitas strategi di seluruh lini layanan, sementara transparansi pengungkapan yang komprehensif menjadi komitmen nyata Perusahaan dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan jangka panjang.

Consistent growth reflects the effectiveness of strategies across all service lines, while transparent disclosure demonstrates the Company's strong commitment to building long-term stakeholder trust.


PELINDO
KT BIMA 34



Tinjauan Perekonomian dan Industri

Economic Industrial Review



TINJAUAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Tahun 2025 merupakan periode yang ditandai oleh ketahanan perekonomian global di tengah guncangan struktural yang bersifat multidimensional. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2026 menetapkan estimasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia sebesar 3,3 persen pada tahun 2025, konsisten dengan angka yang sama pada tahun 2024, dan memproyeksikan pertumbuhan yang bergerak stabil pada kisaran 3,3 persen di tahun 2026 serta 3,2 persen pada 2027. Pencapaian tersebut mencerminkan resiliensi sistem ekonomi global yang mampu beradaptasi terhadap pergeseran kebijakan perdagangan, volatilitas pasar keuangan, dan ketidakpastian geopolitik yang masih membayangi. Di level nasional, Indonesia turut menunjukkan kinerja yang melampaui ekspektasi, sebagaimana tercatat dalam Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pertumbuhan ekonomi secara *cumulative-to-cumulative* (c-to-c) sebesar 5,11 persen sepanjang tahun 2025, meningkat dari 5,03 persen pada tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2025 ditopang oleh keseimbangan antara kekuatan yang saling bertolak belakang. Menurut laporan IMF WEO *Update* Januari 2026, hambatan (*headwinds*) yang berasal dari perubahan

GLOBAL ECONOMIC OVERVIEW

The year 2025 was marked by the resilience of the global economy amid multidimensional structural shocks. The International Monetary Fund (IMF), in its World Economic Outlook Update January 2026 edition, estimated global Gross Domestic Product (GDP) growth at 3.3 percent in 2025, consistent with the same figure recorded in 2024, and projected stable growth at around 3.3 percent in 2026 and 3.2 percent in 2027. This achievement reflects the resilience of the global economic system, which has been able to adapt to shifts in trade policies, financial market volatility, and ongoing geopolitical uncertainty. At the national level, Indonesia also demonstrated performance exceeding expectations, as recorded in the Official Statistics Release by Statistics Indonesia (BPS), with cumulative-to-cumulative (c-to-c) economic growth of 5.11 percent throughout 2025, up from 5.03 percent in 2024.

Global economic growth in 2025 was supported by a balance between opposing forces. According to the IMF's January 2026 WEO Update, headwinds stemming from changes in international trade policies were offset

kebijakan perdagangan internasional diimbangi oleh dorongan (*tailwinds*) investasi teknologi, utamanya terkait kecerdasan buatan (AI), yang menguat signifikan di kawasan Amerika Utara dan Asia. Kelompok ekonomi maju (*advanced economies*) diproyeksikan tumbuh sebesar 1,7 persen pada 2025 dan 1,8 persen pada 2026, sedangkan kelompok negara berkembang (*Emerging Market And Developing Economies*/EMDE) diperkirakan tumbuh di kisaran 4,4 persen pada 2025 dan 4,2 persen pada 2026. Divergensi ini mencerminkan perbedaan struktural yang fundamental antara kedua kelompok ekonomi, yakni ketimpangan dalam akses teknologi, kapasitas fiskal, dan daya tahan institusional. Revisi ke atas sebesar 0,2 poin persentase dari proyeksi Oktober 2025 WEO untuk pertumbuhan 2026 menunjukkan bahwa momentum ekonomi global menguat secara moderat. Sementara itu, volume perdagangan dunia diperkirakan melambat dari 4,1 persen pada 2025 menjadi 2,6 persen pada 2026, mencerminkan dampak kumulatif dari penyesuaian aliran perdagangan terhadap kebijakan tarif baru yang berlaku.

by tailwinds from technology investment, particularly in artificial intelligence (AI), which strengthened significantly in North America and Asia. Advanced economies were projected to grow by 1.7% in 2025 and 1.8% in 2026, while Emerging Market And Developing Economies (EMDEs) were expected to grow by around 4.4% in 2025 and 4.2% in 2026. This divergence reflects fundamental structural differences between the two groups, including disparities in access to technology, fiscal capacity, and institutional resilience. An upward revision of 0.2 percentage points from the October 2025 WEO projection for 2026 growth indicates that global economic momentum is strengthening moderately. Meanwhile, global trade volume is expected to slow from 4.1% in 2025 to 2.6% in 2026, reflecting the cumulative impact of trade flow adjustments in response to newly implemented tariff policies.

Pertumbuhan PDB Negara Utama, 2025
(IMF WEO *Update*, Januari 2026)
GDP Growth in Major Economies, 2025
(IMF WEO Update, January 2026)

Negara/Kawasan Country/Region	2024 (Est.)	2025 (Est.)	2026 (Proy.)
Dunia Global	3,3%	**3,3%**	3,3%
Amerika Serikat United States of America	2,8%	**2,1%**	2,4%
Zona Euro Eurozone	0,9%	**1,4%**	1,3%
Jerman Germany	-0,5%	**0,2%**	1,1%
Jepang Japan	-0,2%	**1,1%**	0,7%
Tiongkok China	5,0%	**5,0%**	4,5%
India	6,5%	**7,3%**	6,4%
Indonesia	5,0%	**5,0%**	5,1%
ASEAN-5	4,6%	**4,2%**	4,2%

Pada kelompok ekonomi maju, Amerika Serikat menjadi episentrum momentum pertumbuhan dengan estimasi ekspansi sebesar 2,1 persen pada 2025 dan proyeksi 2,4 persen pada 2026, merupakan revisi ke atas sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan proyeksi Oktober 2025. Peningkatan ini didorong oleh realisasi PDB triwulan III-2025 yang melampaui ekspektasi, pemulihan aktivitas pasca-*shutdown* pemerintah federal, serta stimulus fiskal dari *One Big Beautiful Bill Act* of 2025 yang memberikan insentif pajak bagi investasi korporasi. Pertumbuhan AS pada triwulan III-2025 bahkan mencapai 4,3 persen

In the advanced economies group, the United States is the epicenter of growth momentum, with an estimated expansion of 2.1 percent in 2025 and a projection of 2.4 percent in 2026, an upward revision of 0.3 percentage points compared to the October 2025 projection. This increase is driven by third-quarter 2025 GDP figures that exceeded expectations, the recovery of activity following the federal government shutdown, and fiscal stimulus from the One Big Beautiful Bill Act of 2025, which provides tax incentives for corporate investment. U.S. growth in the third quarter of 2025 even reached 4.3 percent on an



secara tahunan (*annualized*), dengan investasi teknologi diestimasi berkontribusi sekitar 0,3 poin persentase terhadap rata-rata pertumbuhan PDB tiga kuartal pertama 2025. Di sisi lain, Kawasan Euro membukukan pertumbuhan yang lebih moderat sebesar 1,4 persen pada 2025 dan diproyeksikan stabil di angka 1,3 persen pada 2026, terbebani oleh persistensi hambatan struktural termasuk dampak residual kenaikan harga energi pasca-invasi Rusia ke Ukraina, apresiasi riil mata uang euro, serta keterbatasan manfaat dari lonjakan investasi teknologi yang lebih banyak terkonsentrasi di Amerika Serikat. Jerman, sebagai kekuatan industri Eropa, mencatat pemulihan tipis dari kontraksi -0,5 persen pada 2024 menjadi 0,2 persen pada 2025, sementara Jepang mengalami moderasi pertumbuhan dari 1,1 persen di 2025 menjadi 0,7 persen pada 2026, sebagian diimbangi oleh paket stimulus fiskal pemerintah baru.

Di antara kelompok negara berkembang dan pasar berkembang, India tampil sebagai bintang pertumbuhan dengan revisi ke atas sebesar 0,7 poin persentase menjadi 7,3 persen untuk estimasi 2025, mencerminkan kinerja kuartal III dan IV yang lebih kuat dari perkiraan serta momentum permintaan domestik yang kuat. Tiongkok mempertahankan pertumbuhan sebesar 5,0 persen pada 2025, didukung oleh stimulus fiskal dan peningkatan pinjaman perbankan untuk investasi, meski diproyeksikan melambat ke 4,5 persen pada 2026 akibat hambatan struktural di sektor properti, lemahnya permintaan domestik, dan tekanan dari kebijakan tarif bilateral AS-Tiongkok, meskipun gencatan senjata tarif yang disepakati pada November 2026 memberikan sedikit kelonggaran. Indonesia, sebagaimana dicatat oleh IMF dalam Tabel Annex WEO Januari 2026, diestimasi bertumbuh sebesar 5,0 persen pada 2025 dan diproyeksikan menguat ke 5,1 persen pada 2026, revisi ke atas sebesar 0,2 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Kelompok ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) secara agregat diproyeksikan tumbuh 4,2 persen pada 2025 dan 2026. Posisi Indonesia yang secara konsisten melampaui rata-rata pertumbuhan global (3,3 persen) dan rata-rata kelompok ASEAN-5 tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan pertumbuhan yang kredibel dan terpercaya di tatanan ekonomi global saat ini.

Tantangan inflasi global menunjukkan tren perlambatan yang berkelanjutan, meskipun dengan laju yang tidak merata antar kawasan. IMF memproyeksikan inflasi *headline* global turun dari estimasi 4,1 persen pada 2025 menjadi 3,8 persen pada 2026, dan selanjutnya ke 3,4 persen pada 2027. Pada kelompok ekonomi maju, inflasi diperkirakan sebesar 2,5 persen pada 2025 dan menurun ke 2,2 persen pada 2026, sementara kelompok EMDE menghadapi persistensi inflasi yang lebih tinggi yakni 5,2 persen pada 2025 dan 4,8 persen pada 2026. Divergensi inflasi paling menonjol terjadi antara Amerika Serikat, di mana *pass-through* tarif impor memperlambat proses disinflasi dengan proyeksi inflasi inti baru kembali ke target 2 persen pada 2027, dengan Kawasan Euro yang memproyeksikan inflasi *headline* bergerak di sekitar 2 persen, dan Tiongkok yang bahkan menghadapi risiko deflasi dengan inflasi yang diproyeksikan baru mulai

annualized basis, with technology investment estimated to contribute approximately 0.3 percentage points to the average GDP growth for the first three quarters of 2025. On the other hand, the Eurozone recorded more moderate growth of 1.4 percent in 2025 and is projected to stabilize at 1.3 percent in 2026, weighed down by persistent structural constraints, including the residual impact of rising energy prices following Russia's invasion of Ukraine, the real appreciation of the euro, and the limited benefits from the surge in technology investment, which is more concentrated in the United States. Germany, as Europe's industrial powerhouse, is expected to see a modest recovery from a contraction of -0.5 percent in 2024 to 0.2 percent in 2025, while Japan's growth is projected to moderate from 1.1 percent in 2025 to 0.7 percent in 2026, partly offset by the new government's fiscal stimulus package.

Among the group of developing and emerging market economies, India stands out as a growth star with an upward revision of 0.7 percentage points to 7.3 percent for the 2025 estimate, reflecting stronger-than-expected performance in the third and fourth quarters as well as strong domestic demand momentum. China is projected to maintain 5.0 percent growth in 2025, supported by fiscal stimulus and increased bank lending for investment, though growth is projected to slow to 4.5 percent in 2026 due to structural headwinds in the property sector, weak domestic demand, and pressure from U.S.-China, although the tariff ceasefire agreed upon in November 2026 provides some relief. Indonesia, as noted by the IMF in the January 2026 WEO Annex Table, is estimated to grow by 5.0 percent in 2025 and is projected to strengthen to 5.1 percent in 2026, an upward revision of 0.2 percentage points from the previous projection. The ASEAN-5 group (Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand) is projected to grow by 4.2 percent in both 2025 and 2026. Indonesia's consistent outperformance of both the global average (3.3 percent) and the ASEAN-5 average positions the country as a credible and reliable growth engine in the current global economic landscape.

Global inflation challenges show a sustained deceleration trend, albeit at uneven rates across regions. The IMF projects global headline inflation to decline from an estimated 4.1 percent in 2025 to 3.8 percent in 2026, and further to 3.4 percent in 2027. In the advanced economies group, inflation is projected at 2.5 percent in 2025 and is expected to decline to 2.2 percent in 2026, while the EMDE group faces higher and more persistent inflation, at 5.2 percent in 2025 and 4.8 percent in 2026. The most notable inflation divergence occurs between the United States, where the pass-through of import tariffs is slowing the disinflation process, with core inflation projected to return to the 2 percent target only in 2027, the Eurozone, which projects headline inflation hovering around 2 percent, and China, which even faces deflationary risks as inflation is projected to begin rising only from very low levels. In response to these conditions, the IMF anticipates that

meningkat dari level yang sangat rendah. Merespons kondisi tersebut, IMF mengantisipasi bahwa suku bunga kebijakan di Inggris dan AS akan terus menurun dengan kecepatan yang berbeda, sementara Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan mempertahankan suku bunga, dan Bank of Japan secara bertahap menaikkan suku bunga kebijakannya.

TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang solid dan konsisten, mencerminkan fundamental ekonomi yang kokoh di tengah ketidakpastian eksternal yang masih berlangsung. Berdasarkan data resmi BPS dalam Berita Resmi Statistik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen secara *c-to-c* pada 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian 5,03 persen pada 2024. Secara nominal, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun pada 2025, meningkat signifikan dari Rp22.139,0 triliun pada 2024 dan Rp20.892,3 triliun pada 2023. PDB per kapita juga mengalami kenaikan substantif menjadi Rp83,7 juta atau setara USD5.083,4 pada 2025, dibandingkan USD4.960,3 pada tahun 2024 dan USD4.919,7 pada tahun 2023, mengindikasikan peningkatan kesejahteraan agregat yang berkelanjutan. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 5,39 persen secara *year-on-year* (y-on-y) terhadap Triwulan IV-2024, dan sebesar 0,86 persen secara *quarter-to-quarter* (q-to-q) terhadap Triwulan III-2025. Konsistensi pertumbuhan di atas level 5 persen selama hampir satu dekade, kecuali pada 2020 yang terdampak pandemi COVID-19 dengan kontraksi sebesar -2,07 persen, membuktikan ketangguhan struktur ekonomi domestik Indonesia yang berbasis konsumsi, investasi, dan ekspor.

policy interest rates in the UK and the US will continue to decline at different paces, while the European Central Bank (ECB) is expected to maintain interest rates, and the Bank of Japan will gradually raise its policy interest rates.

NATIONAL ECONOMIC OVERVIEW

Indonesia's economy in 2025 performed solidly and consistently, reflecting strong economic fundamentals amid ongoing external uncertainties. According to official data from the Statistics Indonesia (BPS) in the Official Statistical Bulletin, Indonesia's economy grew by 5.11 percent year-on-year in 2025, higher than the 5.03 percent growth achieved in 2024. In nominal terms, Indonesia's GDP at current prices reached Rp23,821.1 trillion in 2025, a significant increase from Rp22,139.0 trillion in 2024 and Rp20,892.3 trillion in 2023. GDP per capita also saw a substantial increase to Rp83.7 million, or the equivalent of USD5,083.4, in 2025, compared to USD4,960.3 in 2024 and USD4,919.7 in 2023, indicating a sustained improvement in aggregate well-being. Quarterly, Indonesia's economy in Q4 2025 grew by 5.39 percent year-on-year (y-o-y) compared to Q4 2024, and by 0.86 percent quarter-to-quarter (q-to-q) compared to Q3 2025. Consistent growth above the 5 percent level for nearly a decade, except in 2020, which was impacted by the COVID-19 pandemic with a contraction of -2.07 percent, demonstrates the resilience of Indonesia's domestic economic structure, which is driven by consumption, investment, and exports.

Tren Pertumbuhan PDB Indonesia 2015–2025 (BPS, 2026)

Indonesia's GDP Growth Trends, 2015–2025 (BPS, 2026)

Tahun Year	**Pertumbuhan (%)** Growth (%)
2015	4,88
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,70
2022	5,31
2023	5,05
2024	5,03
2025	**5,11**

Dari perspektif lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 ditopang oleh hampir seluruh sektor, dengan pengecualian Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar -0,66 persen, satu-satunya sektor yang mengalami penurunan sepanjang

From an industry perspective, Indonesia's economic growth in 2025 was supported by almost all sectors, except for Mining and Quarrying, which contracted by -0.66 percent, the only sector to experience a decline throughout the year, due to global commodity price



tahun, seiring dengan tekanan harga komoditas global dan moderasi produksi. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya (9,93 persen), diikuti oleh Jasa Perusahaan (9,10 persen), Transportasi dan Pergudangan (8,78 persen), serta Informasi dan Komunikasi (8,35 persen). Dua sektor yang mendominasi struktur PDB Indonesia, Industri Pengolahan dengan kontribusi 19,07 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi 13,17 persen terhadap PDB, masing-masing tumbuh sebesar 5,30 persen dan 5,49 persen, mencerminkan vitalitas sektor-sektor inti perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,35 persen selaras dengan tren global yang didorong oleh akselerasi digitalisasi dan adopsi kecerdasan buatan, sebagaimana juga diidentifikasi oleh IMF sebagai salah satu katalis pertumbuhan utama di kawasan Asia. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang berkontribusi 13,10 persen terhadap PDB, mencatat akselerasi pertumbuhan yang signifikan menjadi 5,33 persen pada 2025, meningkat tajam dari hanya 0,68 persen pada 2024.

pressures and moderating production. The sectors with the highest growth are Other Services (9.93 percent), followed by Business Services (9.10 percent), Transportation and Warehousing (8.78 percent), and Information and Communication (8.35 percent). The two sectors dominating Indonesia's GDP structure, Manufacturing with a 19.07 percent contribution and Wholesale and Retail Trade with a 13.17 percent contribution to GDP, grew by 5.30 percent and 5.49 percent, respectively, reflecting the vitality of the core sectors of the national economy. The 8.35 percent growth in the Information and Communication sector aligns with global trends driven by the acceleration of digitalization and the adoption of artificial intelligence, as also identified by the IMF as one of the main growth catalysts in the Asian region. The Agriculture, Forestry, and Fisheries sector, which contributes 13.10 percent to GDP, recorded a significant acceleration in growth to 5.33 percent in 2025, a sharp increase from just 0.68 percent in 2024.

Pertumbuhan PDB Per Sektor Lapangan Usaha Indonesia 2025 — Tertinggi hingga Terendah (BPS, 2026)

GDP Growth by Economic Sector in Indonesia in 2025 — From Highest to Lowest

Sektor Sector	**Pertumbuhan (%)** Growth (%)	**Kontribusi PDB (%)** GDP Growth (%)
Jasa Lainnya Other Services	9,93	2,14
Jasa Perusahaan Business Services	9,10	1,98
Transportasi & Pergudangan Transportation & Warehousing	8,78	6,16
Informasi & Komunikasi Information & Communication	8,35	4,40
Akomodasi & Makan Minum Accommodation & Food Services	7,41	2,68
Perdagangan Besar & Eceran Wholesale & Retail Trade	5,49	13,17
Pertanian, Kehutanan & Perikanan Agriculture, Forestry & Fishing	5,33	13,10
Industri Pengolahan Manufacturing	5,30	19,07
Konstruksi Construction	3,81	9,83
Pertambangan & Penggalian Mining & Quarrying	-0,66	8,75

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen PDB Indonesia mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025, mencerminkan keseimbangan sumber pertumbuhan yang sehat. Komponen terbesar dalam struktur PDB, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menguasai 53,88 persen dari total PDB, tumbuh sebesar 4,98 persen, mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga di tengah perlambatan tekanan harga. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatat pertumbuhan sebesar 5,09 persen dengan kontribusi 28,77 persen terhadap PDB, menandakan bahwa aktivitas investasi produktif tetap bergairah. Yang paling signifikan secara relatif, Komponen Ekspor Barang dan Jasa membukukan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen dengan kontribusi 22,85 persen terhadap PDB,

Expenditure-wise, all components of Indonesia's GDP recorded positive growth throughout 2025, reflecting a healthy balance of growth drivers. The largest component in the GDP structure, Household Consumption Expenditure (HCE), which accounts for 53.88 percent of total GDP, grew by 4.98 percent, reflecting sustained purchasing power amid easing inflationary pressures. The Gross Fixed Capital Formation (GFCF) component recorded growth of 5.09 percent, contributing 28.77 percent to GDP, indicating that productive investment activity remains robust. Most significantly, the Goods and Services Exports component posted the highest growth of 7.03 percent, contributing 22.85 percent to GDP, reflecting the continued strength of Indonesian products' competitiveness in global markets despite international trade flows facing pressure from

mencerminkan daya saing produk Indonesia di pasar global yang masih kuat meskipun arus perdagangan internasional menghadapi tekanan dari dinamika kebijakan tarif. Pada Triwulan IV-2025 secara *q-to-q*, lonjakan dramatis Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 37,68 persen menjadi akselerator pertumbuhan triwulanan yang dominan, seiring percepatan realisasi anggaran belanja negara pada penghujung tahun fiskal. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PDB pengeluaran tumbuh sebesar 4,77 persen, mengindikasikan bahwa kebutuhan input produksi dan investasi tetap tinggi.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 terdistribusi di seluruh wilayah kepulauan, meskipun dengan kadar dan pola yang bervariasi. Pulau Jawa tetap menjadi episentrum perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 56,93 persen terhadap PDB dan mencatat laju pertumbuhan 5,30 persen secara *c-to-c*, menjadikannya kontributor terbesar pertumbuhan nasional dengan sumber pertumbuhan sebesar 3,11 poin persentase dari total 5,11 persen. Pulau Sulawesi tampil sebagai kawasan dengan pertumbuhan tertinggi secara nasional sebesar 6,23 persen, meskipun kontribusinya terhadap PDB baru mencapai 7,22 persen, sinyal positif bagi pemerataan pembangunan ekonomi ke luar Jawa. Pulau Sumatera, kontributor kedua terbesar dengan 22,22 persen porsi PDB, tumbuh 4,81 persen, sementara Kalimantan (8,12 persen PDB) dan Bali & Nusa Tenggara (2,82 persen PDB) masing-masing tumbuh sebesar 4,79 persen dan 4,87 persen. Wilayah Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan paling rendah sebesar 1,44 persen dengan kontribusi 2,69 persen terhadap PDB nasional, bahkan mengalami kontraksi -2,17 persen secara y-on-y pada Triwulan IV-2025. Disparitas pertumbuhan antar wilayah ini menunjukkan bahwa meskipun konvergensi regional sedang berlangsung secara gradual, masih terdapat kesenjangan kapasitas ekonomi yang memerlukan intervensi kebijakan pembangunan yang lebih intensif dan terdiferensiasi di kawasan timur Indonesia.

Referensi:

- International Monetary Fund (IMF). (2026). World Economic Outlook Update, January 2026: Global Economy – Steady amid Divergent Forces. Washington, D.C.: IMF Publication Services. ISBN: 9798229032339.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2025. Nomor 18/02/Th. XXIX, 5 Februari 2026. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

ANALISIS INDUSTRI DAN POSISI PERUSAHAAN DALAM INDUSTRI

Tahun 2025 menandai babak penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia, di mana sektor perdagangan internasional dan kegiatan dunia usaha menunjukkan resiliensi yang signifikan di tengah dinamika ekonomi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia periode Januari-Desember 2025 mencapai USD282,91 miliar, mengalami peningkatan 6,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pertumbuhan

tariff policy dynamics. In the fourth quarter of 2025, on a quarter-to-quarter basis, the dramatic surge in Government Consumption Expenditures (GCE) by 37.68 percent served as the dominant driver of quarterly growth, in line with the accelerated execution of the state budget toward the end of the fiscal year. Meanwhile, the Goods and Services Imports component, a subtraction factor in the expenditure-based GDP calculation, grew by 4.77 percent, indicating that demand for production inputs and investment remains high.

Geographically, Indonesia's economic growth in 2025 was distributed across the archipelago, albeit with varying degrees and patterns. Java remains the epicenter of the national economy, contributing 56.93 percent to GDP and recording a year-on-year growth rate of 5.30 percent, making it the largest contributor to national growth with a growth contribution of 3.11 percentage points out of the total 5.11 percent. Sulawesi emerged as the region with the highest growth rate nationally at 6.23 percent, although its contribution to GDP reached only 7.22 percent, a positive sign for the equitable distribution of economic development beyond Java. Sumatra, the second-largest contributor with a 22.22 percent share of GDP, grew by 4.81 percent, while Kalimantan (8.12 percent of GDP) and Bali & Nusa Tenggara (2.82 percent of GDP) grew by 4.79 percent and 4.87 percent, respectively. The Maluku and Papua regions recorded the lowest growth at 1.44 percent, contributing 2.69 percent to the national GDP, and even experienced a contraction of -2.17 percent year-on-year in the fourth quarter of 2025. These regional growth disparities indicate that while regional convergence is occurring gradually, economic capacity gaps persist, requiring more intensive and differentiated development policy interventions in eastern Indonesia.

References:

- International Monetary Fund (IMF). (2026). World Economic Outlook Update, January 2026: Global Economy – Steady amid Divergent Forces. Washington, D.C.: IMF Publication Services. ISBN: 9798229032339.
- Statistics Indonesia (BPS). (2026). Official Statistical Bulletin: Indonesia's Economic Growth in the Fourth Quarter of 2025. No. 18/02/Vol. XXIX, February 5, 2026. Jakarta: Statistics Indonesia.

INDUSTRY ANALYSIS AND COMPANY POSITION WITHIN THE INDUSTRY

The year 2025 marked an important milestone in Indonesia's economic journey, in which the international trade sector and business activities demonstrated significant resilience amid global economic dynamics. According to data from Statistics Indonesia (BPS), the value of Indonesia's exports for the January–December 2025 period reached USD282.91 billion, an increase of 6.15 percent compared to the same period in 2024. This growth aligns with the results of Bank



ini sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia triwulan IV 2025 yang mengindikasikan kinerja kegiatan usaha tetap terjaga dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,61 persen. Kondisi makro ekonomi ini memberikan implikasi strategis bagi industri pendukung perdagangan, khususnya sektor transportasi dan logistik yang menjadi tulang punggung distribusi barang ekspor-impor nasional. Sebagai perusahaan penyedia solusi transportasi dan armada, Perusahaan berada pada posisi krusial untuk berkontribusi dalam mendukung rantai pasok nasional yang semakin kompleks dan dinamis.

Perdagangan internasional Indonesia pada tahun 2025 mencatatkan kinerja positif yang konsisten sepanjang tahun. Ekspor non migas mencapai USD269,84 miliar, naik 7,66 persen dari tahun sebelumnya, dengan kontribusi terbesar dari sepuluh komoditas utama yang memberikan sumbangan 64,04 persen terhadap total ekspor non migas (BPS, 2026). Lemak dan minyak hewani/nabati mengalami peningkatan tertinggi sebesar USD7,50 miliar (27,94 persen), diikuti oleh mesin dan perlengkapan elektrik USD4,03 miliar (26,55 persen), serta berbagai produk kimia USD2,97 miliar (45,59 persen). Dari sisi destinasi, Tiongkok tetap menjadi negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai USD64,82 miliar (24,02 persen), disusul Amerika Serikat USD30,96 miliar (11,47 persen) dan India USD18,32 miliar (6,79 persen). Ekspor ke kawasan ASEAN mencapai USD51,58 miliar dengan kontribusi 19,12 persen terhadap total ekspor non migas. Pada sisi impor, nilai impor Januari-Desember 2025 mencapai USD241,86 miliar, naik 2,83 persen dengan impor non migas sebesar USD209,09 miliar (naik 5,11 persen). Kinerja perdagangan ini menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar USD41,05 miliar, yang bersumber dari surplus sektor non migas USD60,75 miliar meskipun sektor migas mengalami defisit USD19,70 miliar. Volume perdagangan yang tinggi ini secara langsung meningkatkan kebutuhan akan layanan transportasi dan distribusi barang, menciptakan peluang signifikan bagi penyedia jasa armada dan logistik.

Indonesia's Business Activity Survey (SKDU) for the fourth quarter of 2025, which indicates that business performance remains stable with a Weighted Net Balance (WNB) of 10.61 percent. These macroeconomic conditions have strategic implications for trade-supporting industries, particularly the transportation and logistics sectors, which serve as the backbone of the distribution of national export and import goods. As a provider of transportation and fleet solutions, the Company is in a crucial position to contribute to supporting the increasingly complex and dynamic national supply chain.

Indonesia's international trade in 2025 recorded a consistent positive performance throughout the year. Non-oil and gas exports reached USD269.84 billion, up 7.66 percent from the previous year, with the largest contribution coming from the top ten commodities, which accounted for 64.04 percent of total non-oil and gas exports (BPS, 2026). Animal and vegetable fats and oils saw the highest increase of USD7.50 billion (27.94 percent), followed by electrical machinery and equipment at USD4.03 billion (26.55 percent), and various chemical products at USD2.97 billion (45.59 percent). In terms of destination, China remained the largest export destination with a value of USD64.82 billion (24.02 percent), followed by the United States at USD30.96 billion (11.47 percent) and India at USD18.32 billion (6.79 percent). Exports to the ASEAN region reached USD51.58 billion, contributing 19.12 percent to total non-oil and gas exports. On the import side, the value of imports from January to December 2025 reached USD241.86 billion, up 2.83 percent, with non-oil and gas imports amounting to USD209.09 billion (up 5.11 percent). This trade performance resulted in a trade balance surplus of USD41.05 billion, stemming from a non-oil and gas sector surplus of USD60.75 billion, despite the oil and gas sector experiencing a deficit of USD19.70 billion. This high volume of trade directly increases the demand for transportation and goods distribution services, creating significant opportunities for fleet and logistics service providers.

Kinerja Ekspor-Impor Indonesia 2024-2025
Indonesia's Export-Import Performance 2024-2025

Indikator Indicator	Januari - Desember 2024 January - December 2024	Januari - Desember 2025 January - December 2025	Perubahan (%) Changes (%)
Total Ekspor (USD miliar) Total Exports (USD billion)	266,53	**282,91**	+6,15
Ekspor Non migas (USD miliar) Non-Oil and Gas Exports (USD billion)	250,65	**269,84**	+7,66
Total Impor (USD miliar) Total Imports (USD billion)	235,20	**241,86**	+2,83
Impor Non migas (USD miliar) Non-Oil and Gas Imports (USD billion)	198,92	**209,09**	+5,11
Neraca Perdagangan (USD miliar) Balance of Trade (USD billion)	+31,33	**+41,05**	+31,03

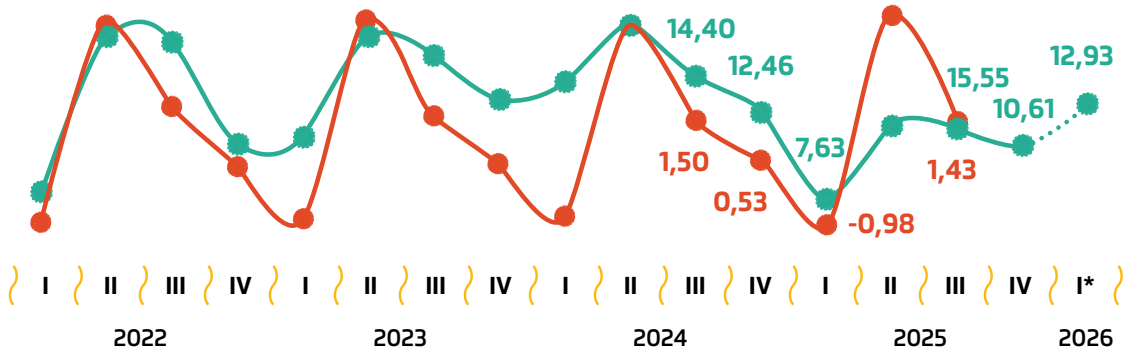
Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th. XXIX, 2 Februari 2026
Source: BPS, Official Statistical Bulletin No. 12/02/Vol. XXIX, February 2, 2026

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia triwulan IV 2025 mengindikasikan bahwa kegiatan usaha tetap terjaga dengan SBT sebesar 10,61 persen, meski mengalami penurunan dari 11,55 persen pada triwulan III 2025. Mayoritas lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif, terutama Lapangan Usaha (LU) Jasa Keuangan

Bank Indonesia's Business Activity Survey (SKDU) for the fourth quarter of 2025 indicated that business activity remained steady with a Weighted Net Balance (WNB) of 10.61 percent, despite a decline from 11.55 percent in the third quarter of 2025. The majority of business sectors showed positive growth, particularly the Financial Services sector

(SBT 1,95 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (SBT 1,21 persen), dan Industri Pengolahan (SBT 1,18 persen). Dari sisi kapasitas produksi, utilisasi terpakai pada triwulan IV 2025 mencapai 73,15 persen, menunjukkan efisiensi operasional yang baik meskipun sedikit lebih rendah dari 73,84 persen pada triwulan sebelumnya. Perkembangan kapasitas produksi ditopang terutama oleh LU Pengadaan Listrik (80,82 persen), LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (74,89 persen), serta LU Industri Pengolahan (73,15 persen). Kondisi keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan, dengan SB Likuiditas sebesar 18,72 persen (meningkat dari 15,96 persen pada triwulan III 2025) dan SB Rentabilitas 16,51 persen (meningkat dari 12,48 persen). Akses kredit perbankan menunjukkan kemudahan dengan SB sebesar 2,93 persen, didukung oleh persentase responden yang menyatakan akses "lebih mudah" sebesar 3,63 persen. Perbaikan kondisi keuangan dan akses pembiayaan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspansi kegiatan usaha, termasuk investasi dalam modernisasi armada transportasi dan infrastruktur logistik.

(WNB 1.95 percent), Wholesale and Retail Trade (WNB 1.21 percent), and Manufacturing (WNB 1.18 percent). From the production capacity perspective, capacity utilization in the fourth quarter of 2025 reached 73.15 percent, indicating good operational efficiency despite being slightly lower than the 73.84 percent recorded in the previous quarter. The development of production capacity was primarily supported by the Electricity Supply sector (80.82 percent), the Water Supply, Waste Management, and Recycling sector (74.89 percent), and the Manufacturing sector (73.15 percent). The companies' financial condition also showed improvement, with a Liquidity Ratio of 18.72 percent (up from 15.96 percent in the third quarter of 2025) and a Profitability Ratio of 16.51 percent (up from 12.48 percent). Access to bank credit is relatively easy, with a score of 2.93 percent, supported by 3.63 percent of respondents stating that access is "easier." These improvements in financial conditions and access to financing create a conducive environment for business expansion, including investments in the modernization of transportation fleets and logistics infrastructure.



***) Angka Prakiraan** | Estimated Figure

Pertumbuhan PDB (sb. kiri)
GDP growth (left axis)

SBT Kegiatan Usaha (sb. kanan)
SBT Business Activities (right)

Sumber: Bank Indonesia, Survei Kegiatan Dunia Usaha Triwulan IV 2025
Source: Bank Indonesia, Business Activity Survey, Fourth Quarter 2025

Responden memproyeksikan peningkatan kegiatan usaha pada triwulan I 2026 dengan SBT sebesar 12,93 persen, lebih tinggi dibandingkan SBT 10,61 persen pada triwulan IV 2025. Optimisme ini terutama didukung oleh proyeksi peningkatan pada LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (SBT 1,95 persen) dengan masuknya musim panen, LU Transportasi dan Pergudangan (SBT 1,17 persen), LU Perdagangan Besar dan Eceran (SBT 1,24 persen), serta LU Industri Pengolahan (SBT 1,55 persen) yang didorong oleh peningkatan permintaan pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H. Penggunaan tenaga kerja diperkirakan meningkat dengan SBT 2,47 persen, lebih tinggi dari SBT 0,72 persen pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan ekspansi kegiatan usaha. Dari sisi harga, tekanan inflasi pada level produsen diperkirakan meningkat dengan SBT 12,37 persen, didorong oleh LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (SBT 2,83 persen), LU Industri Pengolahan (SBT 3,41 persen), dan LU Transportasi dan Pergudangan (SBT 0,61 persen). Investasi diperkirakan tetap tumbuh dengan SBT 6,88 persen, meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya, dengan mayoritas responden (24,69 persen)

Respondents projected an increase in business activity in the first quarter of 2026, with a Weighted Net Balance (WNB) of 12.93 percent, higher than the 10.61 percent WNB recorded in the fourth quarter of 2025. This optimistic outlook is primarily supported by projected growth in the Agriculture, Forestry, and Fisheries sector (WNB 1.95 percent) as the harvest season begins, the Transportation and Warehousing sector (WNB 1.17 percent), the Wholesale and Retail Trade sector (WNB 1.24 percent), as well as the Manufacturing Sector (WNB 1.55 percent), driven by increased demand during the Ramadan period and the National Religious Holiday (HBKN) of Eid al-Fitr 1447 H. Labor utilization is expected to increase by WNB 2.47 percent, higher than the WNB 0.72 percent in the previous quarter, in line with the expansion of business activities. In terms of prices, inflationary pressure at the producer level is projected to rise by WNB 12.37 percent, driven by the Agriculture, Forestry, and Fisheries sector (WNB 2.83 percent), the Manufacturing sector (WNB 3.41 percent), and the Transportation and Warehousing sector (WNB 0.61 percent). Investment is projected to continue growing at a rate of WNB 6.88 percent, though not as high as in the previous quarter, with the majority of respondents



menyatakan telah melakukan investasi pada semester II 2025. Proyeksi positif ini memberikan sinyal kuat bagi industri transportasi dan logistik untuk mempersiapkan kapasitas tambahan guna mengantisipasi lonjakan permintaan, khususnya menjelang periode puncak distribusi barang konsumsi dan bahan baku.

Pertumbuhan nilai perdagangan internasional yang mencapai USD524,77 miliar (total ekspor-impor 2025) dan peningkatan kegiatan dunia usaha memberikan implikasi strategis yang signifikan bagi sektor transportasi dan logistik. Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan kegiatan usaha dengan SBT 1,17 persen pada tahun 2025, dengan proyeksi peningkatan menjadi SBT 1,17 persen pada triwulan I 2026. Kebutuhan distribusi barang ekspor-impor, khususnya komoditas unggulan seperti lemak dan minyak nabati, produk industri pengolahan, serta mesin dan peralatan, memerlukan dukungan armada transportasi yang andal dan efisien. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau yang menjadi kontributor terbesar ekspor nasional (32,26 persen dari total ekspor) membutuhkan konektivitas logistik yang optimal ke pelabuhan-pelabuhan utama. Peningkatan kapasitas utilisasi produksi hingga 73,15 persen juga mengindikasikan intensitas tinggi dalam pergerakan bahan baku dan produk jadi antar fasilitas produksi. Bagi Perusahaan, kondisi ini menawarkan peluang ekspansi layanan, diversifikasi portofolio armada, serta pengembangan solusi transportasi terintegrasi yang mendukung efisiensi rantai pasok nasional. Perbaikan kondisi keuangan perusahaan (likuiditas dan rentabilitas) serta kemudahan akses kredit juga memfasilitasi investasi dalam modernisasi armada dan adopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing operasional.

(24.69 percent) stating they have made investments in the second half of 2025. This positive projection sends a strong signal to the transportation and logistics industry to prepare additional capacity to anticipate a surge in demand, particularly ahead of the peak distribution period for consumer goods and raw materials.

International trade value growth reaching USD524.77 billion (total exports and imports in 2025) and increased business activity have significant strategic implications for the transportation and logistics sector. The Transportation and Warehousing sector recorded business activity growth of WNB 1.17 percent in 2025, with a projected increase to WNB 1.17 percent in the first quarter of 2026. Distribution of imported and exported goods, particularly key commodities such as vegetable fats and oils, processed industrial products, and machinery and equipment, requires a reliable and efficient transportation fleet. The provinces of West Java, East Java, and the Riau Islands, which are the largest contributors to national exports (32.26 percent of total exports), require optimal logistics connectivity to major ports. An increase in production capacity utilization to 73.15 percent also indicates high intensity in the movement of raw materials and finished goods between production facilities. For the Company, these conditions provide opportunities for service expansion, fleet portfolio diversification, and the development of integrated transportation solutions that support the efficiency of the national supply chain. Improvements in the Company's financial condition (liquidity and profitability) as well as easier access to credit also facilitate investment in fleet modernization and the adoption of digital technologies to enhance operational competitiveness.

Kondisi Sektor Transportasi dan Pergudangan 2025
Transportation and Warehousing Sector Outlook 2025

Indikator Indicator	**TW III 2025** Q3 2025 (%)	**TW IV 2025** Q4 2025 (%)	**Proyeksi TW I 2026** Projection for Q1 2026 (%)
SBT Kegiatan Usaha WNB Business Activities	**0,61**	**1,17**	1,17
SBT Tenaga Kerja WNB Employment	**0,41**	**0,97**	0,25
SBT Harga Jual WNB Selling Price	**0,54**	**0,70**	0,61
SBT Investasi WNB Investment	**0,75**	**0,90**	0,90

Sumber: Bank Indonesia, SKDU Triwulan IV 2025
Source: Bank Indonesia, SKDU for the Fourth Quarter of 2025

Meskipun prospek industri menunjukkan tren positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Penurunan ekspor migas sebesar 17,69 persen menjadi USD13,07 miliar mengindikasikan *shifting* dalam komposisi perdagangan nasional yang lebih bergantung pada sektor nonmigas. Volatilitas harga komoditas global, tercermin dari penurunan ekspor bahan bakar mineral sebesar 19,18 persen, dapat mempengaruhi volume dan nilai *cargo* yang ditransportasikan. Tekanan inflasi pada level produsen yang diprakirakan mencapai SBT 12,37

While the industry outlook shows a positive trend, there are several challenges that need to be anticipated. Decline in oil and gas exports by 17.69 percent to USD 13.07 billion indicated a shift in the composition of national trade toward greater reliance on the non-oil and gas sector. Volatility in global commodity prices, reflected in the 19.18 percent decline in mineral fuel exports, could affect the volume and value of cargo transported. Inflationary pressure at the producer level, projected to reach WNB 12.37 percent in Q1 2026, has the potential to increase operational costs,

persen pada triwulan I 2026 berpotensi meningkatkan biaya operasional, termasuk bahan bakar, pemeliharaan armada, dan komponen operasional lainnya. Namun demikian, peluang strategis tetap terbuka lebar. Proyeksi peningkatan kegiatan usaha pada triwulan I 2026 (SBT 12,93 persen), didorong oleh momentum Ramadan dan Idul Fitri, menciptakan lonjakan permintaan distribusi barang konsumsi yang memerlukan kapasitas transportasi tambahan. Investasi yang tetap tumbuh dengan SBT 6,88 persen mengindikasikan ekspansi fasilitas produksi yang membutuhkan dukungan logistik berkelanjutan. Perbaikan kondisi keuangan Perusahaan memberikan ruang fiskal bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dalam layanan transportasi yang lebih berkualitas. Kemudahan akses kredit (SBT 2,93 persen) juga memfasilitasi pembiayaan untuk ekspansi armada dan modernisasi teknologi, mendorong kolaborasi antara penyedia jasa transportasi dengan pelaku usaha di berbagai sektor.

Tinjauan komprehensif terhadap perdagangan nasional dan kegiatan dunia usaha tahun 2025 menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekspor 6,15 persen, surplus neraca perdagangan USD41,05 miliar, serta SBT kegiatan usaha 10,61 persen dengan proyeksi peningkatan menjadi 12,93 persen pada triwulan I 2026. Dinamika ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan sektor transportasi dan logistik sebagai *enabler* utama perdagangan dan distribusi nasional. Peningkatan kapasitas utilisasi produksi, perbaikan kondisi keuangan perusahaan, serta kemudahan akses pembiayaan memberikan fondasi kuat bagi ekspansi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi Perusahaan, momentum ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat posisi sebagai penyedia solusi transportasi terintegrasi yang mendukung efisiensi rantai pasok nasional. Investasi dalam modernisasi armada, adopsi teknologi digital untuk optimalisasi operasional, serta diversifikasi layanan yang responsif terhadap kebutuhan industri menjadi kunci untuk mengkapitalisasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan proyeksi positif, industri transportasi dan logistik diprediksi akan terus memainkan peran vital dalam mendorong daya saing ekonomi Indonesia di kancah global, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Referensi:

- Badan Pusat Statistik. (2026). Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2025. Berita Resmi Statistik No. 12/02/Th. XXIX, 2 Februari 2026.
- Bank Indonesia. (2025). Survei Kegiatan Dunia Usaha Triwulan IV 2025. Departemen Komunikasi, Bank Indonesia.

including fuel, fleet maintenance, and other operational components. Nevertheless, strategic opportunities remain wide open. Projected growth in business activity in the first quarter of 2026 (WNB 12.93 percent), driven by the momentum of Ramadan and Eid al-Fitr, creates a surge in demand for the distribution of consumer goods requiring additional transportation capacity. Investments that continue to grow at WNB 6.88 percent indicate the expansion of production facilities requiring sustainable logistics support. Improvements in Corporate financial conditions provide fiscal space for businesses to invest in higher-quality transportation services. Ease of credit access (WNB 2.93 percent) also facilitates financing for fleet expansion and technological modernization, fostering collaboration between transportation service providers and businesses across various sectors.

A comprehensive review of national trade and business activities in 2025 showed Indonesia's economic resilience, reflected in export growth of 6.15 percent, a trade balance surplus of USD41.05 billion, and a business activity WNB of 10.61 percent, with a projected increase to 12.93 percent in the first quarter of 2026. These dynamics create a conducive ecosystem for the growth of the transportation and logistics sector as the primary enabler of national trade and distribution. Increased production capacity utilization, improved corporate financial conditions, and easier access to financing provide a strong foundation for the expansion of sustainable economic activities. For companies, this momentum represents a strategic opportunity to strengthen their position as providers of integrated transportation solutions that support the efficiency of the national supply chain. Investments in fleet modernization, the adoption of digital technologies for operational optimization, and the diversification of services responsive to industry needs are key to capitalizing on national economic growth. With positive projections, the transportation and logistics industry is expected to continue playing a vital role in driving Indonesia's economic competitiveness on the global stage, while making a significant contribution to sustainable growth for stakeholders.

References:

- Statistics Indonesia. (2026). Development of Indonesia's Exports and Imports, December 2025. Official Statistics Bulletin No. 12/02/Vol. XXIX, February 2, 2026.
- Bank Indonesia. (2025). Business Activity Survey, Fourth Quarter 2025. Communications Department, Bank Indonesia.



Tinjauan Operasional
Operational Review

STRATEGI PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki 5 (lima) tema tahunan sebagai upaya integrasi dan transformasi bisnis untuk menunjang pengembangan bisnis sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2023-2027. Tema tahun 2025 yakni *Uplifting the Derivative Business*. Untuk mencapai target yang terdapat pada tema tahunan tersebut, Perusahaan akan menerapkan strategi seperti berikut ini:

1. Meningkatkan daya saing:
   a. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM.
   b. Meningkatkan kualitas produk dan jasa.
   c. Meningkatkan tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
   d. Meningkatkan citra dan reputasi Perusahaan.
   e. Melakukan kolaborasi dengan Mitra Bisnis.
2. Ekspansi Bisnis secara Organik dan Inorganik:
   a. Memperluas pasar yang sudah ada.
   b. Menambah jumlah pelanggan maupun produk dan jasa yang diberikan.
   c. Menjajaki usaha baru yang berkaitan atau yang mendukung pertumbuhan Perusahaan melalui kerja sama/akuisisi dan/atau merger.
3. Optimalisasi Kinerja Operasional dan Keuangan:
   a. Memperkuat sumber pendanaan untuk kebutuhan modal kerja dan ekspansi.
   b. Optimalisasi penggunaan produk dan jasa instansi keuangan guna membantu peningkatan produktivitas dan efisiensi.
   c. Otomasi/digitalisasi untuk mempercepat proses kerja dan pengembangan produk & jasa.
   d. Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis.
4. Fokus Pelanggan:
   a. Melakukan survei kepuasan pelanggan.
   b. Menindaklanjuti perbaikan survei kepuasan pelanggan.
   c. Pemberian *customer awards* di wilayah BUP JAI.
   d. Menangani keluhan pelanggan.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran yang relevan untuk pengembangan bisnis sektor pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal (*pilotage* & *tug assist*) yang dilakukan Perseroan di tahun 2025 dengan mempertimbangkan karakter bisnis kepelabuhanan, regulasi, dan B2B:

1. Strategi Relationship marketing (B2B *oriented*):
   a. *Key account management* (*shipping line*, BUMN industri dan tambang).

COMPANY STRATEGY

The Company sets five annual themes as part of its business integration and transformation efforts to support business development as outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2023-2027. The theme for 2025 is Uplifting the Derivative Business. To achieve the targets set out in the annual theme, the Company will implement the following strategies:

1. Increase Competitiveness:
   a. Enhance the capability and quality of HR.
   b. Improve the quality of products and services.
   c. Strengthen good corporate governance and risk management.
   d. Enhance the Company's image and reputation.
   e. Foster collaboration with business partners.
2. Organic and Inorganic Business Expansion:
   a. Expand existing markets.
   b. Increase the number of customers and the range of products and services offered.
   c. Explore new business opportunities related to or supporting the Company's growth through partnerships, acquisitions, and/or mergers.
3. Optimization of Operational and Financial Performance:
   a. Strengthen funding sources to support working capital and expansion needs.
   b. Optimize the use of financial institution products and services to improve productivity and efficiency.
   c. Implement automation and digitalization to accelerate work processes and product/service development.
   d. Ensure the active role of the Board of Directors in formulating strategic initiatives and policies.
4. Customer Focus:
   a. Conduct regular customer satisfaction surveys.
   b. Follow up with improvements based on survey results.
   c. Provide customer appreciation awards within the BUP JAI area.
   d. Handling customer complaints.

MARKETING ASPECT

Marketing Strategy

Relevant marketing strategies for the development of the pilotage and tug assist services business conducted by the Company in 2025, taking into account the nature of the port business, regulations, and B2B:

1. Relationship marketing strategy (B2B oriented):
   a. Key account management (shipping lines, state-owned industrial and mining companies).

b. Pendekatan langsung (*Port visit*, forum diskusi operasional pelabuhan).

2. Strategi Kolaborasi dan Kemitraan:
   a. Kerjasama dengan BUP penerima pelimpahan pemanduan dan penundaan, pemilik terminal, KSOP/KUPP (non komersial), INSA.
   b. *Joint service package* (pemanduan, penundaan, *mooring, stand by tug*).
3. Pemanfaatan Data & Digitalisasi:
   a. Penyediaan *dashboard* performa layanan (*response time, waiting time* dan *incident time*).
   b. Sistem pemesanan dan *monitoring* jasa secara digital.
   c. Pelaporan digital ke pelanggan.
4. Kepatuhan regulasi sebagai alat pemasaran:
   a. Kepatuhan PM Perhubungan terkait pemanduan dan penundaan.
   b. SMK, SMAP, K3L.
   c. Standar kelaikan tugboat dan kompetensi SDM pandu.

Pangsa Pasar

Pangsa pasar Perusahaan pada tahun 2025 yang sudah dilakukan *mapping* dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal:
   a. Penjajakan dan pertemuan dengan KSOP Sabang Provinsi Aceh untuk rencana pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal *Ship to Ship* (STS) Sabang Provinsi Aceh.
   b. Penjajakan dan pertemuan dengan PT Benua Laut Lepas dan tim HO Komersial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk rencana kerjasama pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Tanjung Carat, Palembang, Perseroan juga telah melakukan korespondensi pengiriman Surat Penawaran Kerjasama ke PT Benua Laut Lepas selaku pemegang Konsesi di Tanjung Carat Palembang.
   c. Penjajakan untuk rencana pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Morowali (PT IMIP).
2. Kerjasama *Marine*:
   a. Perusahaan telah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan PT Soechi Line membahas mengenai rencana kerjasama penyewaan kapal tunda sebanyak 8 (delapan) unit dengan daya masing-masing 3200HP untuk mendukung kegiatan operasional LNG di Kepulauan Nusa Tenggara. Jangka waktu kerjasama rencananya selama 20 (dua puluh) tahun.
   b. Rencana kerja sama dengan BUP penerima pelimpahan pemanduan dan penundaan kapal PT Bukit Prima untuk kerjasama pengelolaan pemanduan dan penundaan di lokasi Terminal PT Bukit Prima.

b. Direct approach (port visits, port operational discussion forums).

2. Collaboration and Partnership Strategies:
   a. Collaboration with BUP recipients of transfer and postponement, terminal owners, KSOP/KUPP (non-commercial), and INSA.
   b. Joint service package (pilotage, towage, mooring, standby tug).
3. Data Utilization & Digitalization:
   a. Service performance dashboard (response time, waiting time, and incident time).
   b. Digital service ordering and monitoring system.
   c. Digital reporting to customers.
4. Regulatory compliance as a marketing tool:
   a. Compliance with the Minister of Transportation's regulations regarding pilotage and towage.
   b. SMK, SMAP, K3L.
   c. Safety standards for tugboats and pilotage personnel competency.

Market Coverage

The Company's market coverage in 2025 has been mapped and followed up as follows:

1. Transfer of ship pilotage and towage services:
   a. Discussions and meetings with KSOP Sabang, Aceh Province, regarding plans to transfer ship-to-ship (STS) pilotage and towage services in Sabang, Aceh Province.
   b. Discussions and meetings with PT Benua Laut Lepas and the Commercial HO team of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding plans for cooperation in ship pilotage and towage services in Tanjung Carat, Palembang. The Company has also sent a Cooperation Offer Letter to PT Benua Laut Lepas as the concession holder in Tanjung Carat Palembang.
   c. Discussions regarding plans to transfer ship pilotage and towage services in Morowali (PT IMIP).
2. Marine Partnerships:
   a. The Company has communicated and held meetings with PT Soechi Line to discuss plans for cooperation in leasing eight tugboats, each with a capacity of 3200HP, to support LNG operations in the Nusa Tenggara Islands. The planned duration of the partnership is twenty (20) years.
   b. Cooperation plan with the BUP receiving the transfer of ship pilotage and towage services from PT Bukit Prima for joint management of pilotage and towage services at the PT Bukit Prima Terminal.



Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha

Performance Review by Business Segment

Segmen usaha dalam suatu entitas menggambarkan bagian organisasi yang menjalankan aktivitas operasional tertentu, menghasilkan pendapatan, serta menimbulkan beban, termasuk transaksi dengan unit lain di dalam perusahaan yang sama. Setiap aset, liabilitas, ekuitas, maupun pendapatan dan beban yang timbul merupakan unsur yang dapat dialokasikan secara langsung kepada segmen tersebut atau dibagikan melalui metode yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik pengelolaan dan penyelenggaraan layanan usahanya, Perusahaan menerapkan struktur bisnis yang berfokus pada satu segmen operasional, yaitu segmen jasa maritim. Segmen ini mencakup penyediaan layanan kapal, layanan pengangkutan, serta layanan pengelolaan kapal. Penjabaran secara rinci mengenai masing-masing layanan dalam segmen usaha tersebut disampaikan pada uraian berikut ini:

1. Jasa Pelayanan Kapal

Jasa Pelayanan Kapal merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Sebagai mitra PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, Perusahaan memberikan produk dan jasa utama dalam pelayanan jasa kapal yang meliputi jasa penundaan dan jasa pemanduan. Pada segmen jasa penundaan mencakup kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Pada segmen jasa pemanduan, melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga melalui alur pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

Berdasarkan jenisnya, pelayanan kegiatan pemanduan memiliki 3 jenis layanan kegiatan pemanduan, yaitu: (a) pandu laut; (b) pandu bandar; dan (c) pandu bandar utama. "Pandu laut" bertugas memandu kapal-kapal dari kolam pelabuhan sampai batas perairan wajib pandu atau sebaliknya; sedangkan "pandu bandar" memandu kapal-kapal di kolam pelabuhan. Terakhir, "pandu bandar utama" melayani pelabuhan utama dengan ukuran kapal yang lebih besar.

A business segment within an entity represents a part of the organization that engages in a particular line of operations, generates revenues, and incurs expenses, including transactions with other units within the same company. Each asset, liability, equity, or income and expense incurred is an element that can be directly allocated to that segment or shared using a relevant and accountable method.

The Company implements a business structure that focuses on a single operational segment, namely maritime services. This segment includes the provision of vessel services, transportation services, and vessel management services. A detailed description of each service in this business segment is provided below:

1. Vessel Service

Vessel Service is an operational support for vessels from port entry to departure. As a partner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, the Company provides core products and services in this area, including towing and pilotage services. Towing services include pushing, pulling, towing, escorting, and assisting ships moving through shipping lanes, anchorage areas, or pools for mooring or leaving the dock. Pilotage services support ships entering and exiting the dock via port channels to ensure safe, orderly, and efficient navigation for both vessels and the environment.

Based on the type, pilotage services are categorized into 3 types: (a) sea pilot; (b) port pilot (c) main port pilot. Sea pilot, responsible for guiding vessels between the port pool and mandatory pilotage waters or vice versa; port pilot, guiding vessels within the port pool. Lastly, main port pilot, serving larger vessels at major ports.

2. Jasa Pengangkutan dan Lainnya

Jasa pengangkutan dan lainnya merupakan kegiatan usaha Perusahaan dalam bidang pelayanan pengangkutan material, barang, dan hasil produksi antar wilayah pelabuhan. Segmen ini terutama melayani pengangkutan material dan hasil produksi milik badan usaha milik negara (BUMN), sejalan dengan karakteristik pangsa pasar angkutan laut nasional yang didominasi oleh entitas BUMN sebagai *cargo owner* utama, antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), dan PT Semen Indonesia (Persero).

Selain jasa pengangkutan, segmen ini juga mencakup jasa persewaan kapal tunda dan jasa penyediaan sarana bantu pemanduan berupa kapal tunda. Jasa persewaan kapal tunda dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT PLN Energi Gas dan PT Adhi Guna Putera di wilayah Tersus PT Jawa Satu Power, serta dengan PT PGN LNG Indonesia (PLI) di wilayah FSRU Lampung. Adapun jasa penyediaan sarana bantu pemanduan berupa kapal tunda dijalankan melalui kerja sama dengan PT Langlang Laju Layang di wilayah Weda, Kabupaten Halmahera Utara, dan Meulaboh, Provinsi Aceh.

PRODUKTIVITAS SEGMEN

Penundaan dan Pemanduan Kapal

PT Jasa Armada Indonesia Tbk saat ini beroperasi di 11 (sebelas) pelabuhan wilayah Regional 2 Pelindo, yaitu di Tanjung Priok, Banten, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Bengkulu, Pangkal Balam, Cirebon, Pontianak, Jambi, dan Tanjung Pandan.

Selain itu, PT Jasa Armada Indonesia Tbk juga melaksanakan pelayanan pemanduan dan penundaan di 7 (tujuh) lokasi pelimpahan sendiri, yaitu di PT Nusantara Regas, PT Cemindo Gemilang, Pelabuhan Patimban, PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Energi Prasarana, PT Jawa Satu Power, STS Ambang Luar Sungai Musi, PT Trimegah Bangun Persada, serta 6 (enam) lokasi kerja sama operasi yaitu di perairan Meulaboh, Palembang, Lampung, Tarakan, Weda, dan Banten.

2. Freight and Other Services

Freight and Other Services are the Company's services in transporting materials, goods, and production outputs between port areas. This business segment primarily serves the transportation of materials and production outputs belonging to state-owned enterprises (SOEs), in line with the characteristics of the national sea transportation market share, which is dominated by SOEs as the main cargo owners, including PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), and PT Semen Indonesia (Persero).

In addition to transportation services, this segment also includes tugboat rental services and the provision of tugboats as navigation aids. Tugboat rental services are carried out in collaboration with PT PLN Energi Gas and PT Adhi Guna Putera in the FSRU Jawa Satu Power area, as well as with PT PGN LNG Indonesia (PLI) in the FSRU Lampung area. The provision of tugboat assistance services is carried out in collaboration with PT Langlang Laju Layang in the Weda area, North Halmahera Regency, and Meulaboh, Aceh Province.

SEGMENT PRODUCTIVITY

Towage and Pilotage Services

PT Jasa Armada Indonesia Tbk currently operates in 11 (eleven) ports within Pelindo Regional 2, namely: Tanjung Priok, Banten, Panjang, Palembang, Teluk Bayur, Bengkulu, Pangkal Balam, Cirebon, Pontianak, Jambi, and Tanjung Pandan.

In addition, PT Jasa Armada Indonesia Tbk also provides pilotage and towage delegation in 7 (seven) areas, namely PT Nusantara Regas, PT Cemindo Gemilang, Patimban Port, PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Energi Prasarana, PT Jawa Satu Power, STS Ambang Luar Sungai Musi, and PT Trimegah Bangun Persada, as well as in 6 (six) joint operation locations: the waters of Meulaboh, Palembang, Lampung, Tarakan, Weda, and Banten.



Berikut adalah gambaran realisasi produksi jasa kapal pada tahun 2025, yaitu:

Below is an overview of the vessel service production realization in 2025, specifically:

Penundaan

Towage

Pelayanan Services		Satuan Unit	Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025	Realisasi 2025 Realization 2025	Trend	Deviasi Deviation
1		2	3	4	5	6 =5/3	7 = 5/4
Penundaan Towage	Umum Public	Jam Hour	89.881	**88.833**	**92.243**	102,63%	103,84%
		GT Jam GT Hour	891.317.426	**909.646.616**	**890.750.963**	99,94%	97,92%
	TUKS	Jam Hour	66.288	**58.067**	**74.014**	111,66%	127,46%
		GT Jam GT Hour	429.199.954	**392.037.098**	**479.364.792**	111,69%	122,28%
	Tersus	Jam Hour	41.651	**45.310**	**51.001**	122,45%	112,56%
		GT Jam GT Hour	411.762.902	**458.841.060**	**477.719.266**	116,02%	104,11%
	Total	Jam Hour	197.819	**192.21**	**217.258**	109,83%	113,03%
		GT Jam GT Hour	1.732.280.282	**1.760.524.774**	**1.847.835.021**	106,67%	104,96%

Pemanduan

Pilotage

Pelayanan t		Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2025 As of December 2025			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025	Realisasi 2025 Realization 2025		
1		2	3	4	5	6 =5/3	7 = 5/4
Pemanduan Pilotage	Umum Public	Gerak Movement	29.154	**53.008**	**52.974**	181,70%	99,94%
		GT	214.892.976	**439.084.099**	**415.002.550**	193,12%	94,52%
	TUKS	Gerak Movement	11.692	**25.562**	**28.276**	241,83%	110,62%
		GT	72.411.796	**168.304.864**	**167.395.984**	231,17%	99,46%
	Tersus	Gerak Movement	20.407	**19.764**	**20.294**	99,45%	102,68%
		GT	153.070.107	**150.170.606**	**165.596.208**	108,76%	110,27%
	Total	Gerak Movement	61.253	**98.333**	**101.544**	165,78%	103,26%
		GT	440.374.879	**757.559.569**	**747.994.742**	170,17%	98,74%

Berdasarkan penyajian data di atas, dapat dilihat realisasi pencapaian produksi penundaan kapal dilihat dari aspek Jam (Pelabuhan Umum, TUKS, dan Tersus) pada tahun 2025 tercatat sebesar 113,03% sedangkan dari aspek GT Jam (Pelabuhan Umum, TUKS, dan Tersus) sebesar 104,96% atas target tahun 2025. Nilai tersebut meningkat sebesar 9,83% pada aspek Jam dan meningkat 4,96% pada aspek GT Jam dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

Based on the data presented above, it can be seen that the realization of tugboat service production in 2025, measured in terms of Hours (at Public Ports, TUKS, and Special Terminals/Tersus), reached 113.03% and in terms of GT-Hours, the achievement was 104.96% of the 2025 target. These figures represent an increase of 9.83% in Hours and 4.96% in GT-Hours compared to the realization in 2024.

Selanjutnya, realisasi pencapaian produksi pemanduan kapal dilihat dari aspek Umum, TUKS, dan Tersus dalam Gerak mencapai 103,26%, sedangkan dari aspek GT mencapai 98,74% atas target tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat peningkatan 65,78% dari aspek Gerak dan peningkatan sebesar 70,17% dari realisasi aspek GT tahun 2025.

Furthermore, the realization of pilotage service production achievements was seen from the aspects of Public Ports, TUKS, and Tersus, reaching 103.26%, while from the GT aspect, it reached 98.74% of the 2025 target. Compared to the 2024 realization, there was an increase of 65.78% in terms of Movement and an increase of 70.17% in terms of GT realization in 2025.

Total kinerja data produksi pelayanan penundaan dan pemanduan kapal diperhitungkan dengan melihat kinerja baik di Pelabuhan Umum dan TUKS di wilayah operasi Pelindo maupun di Terminal Khusus (Tersus) di luar wilayah operasi Pelindo, dengan penjabaran detail sebagai berikut:

The overall performance of tugboat and pilotage service production is calculated by considering performance at both Public Ports and TUKS within Pelindo's operational areas, as well as at Special Terminals (Tersus) outside Pelindo's operational regions, with detailed elaboration as follows:

Penundaan

1. Penundaan Pelabuhan Umum

Towage

1. Towage of Public Port

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2025 As of December 2025			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025	Realisasi 2025 Realization 2025	6=5/3	7=5/4
	1	2	3	4	5	6	7
Umum Public	Tanjung Priok	Jam Hour	59.511	61.863	59.454	99,91%	96,11%
		GT Jam GT Hour	726.511.631	750.114.939	714.926.211	98,41%	95,31%
	Banten	Jam Hour	3.779	3.749	3.614	95,62%	96,38%
		GT Jam GT Hour	34.384.380	31.602.281	31.871.664	92,69%	100,85%
	Panjang	Jam Hour	3.991	4.181	3.982	99,77%	95,24%
		GT Jam GT Hour	39.630.118	42.024.270	40.023.114	100,99%	95,24%
	Palembang	Jam Hour	3.652	2.234	5.109	139,92%	228,67%
		GT Jam GT Hour	11.882.041	7.239.031	17.577.641	147,93%	242,82%
	Teluk Bayur	Jam Hour	2.653	2.176	2.457	92,63%	112,90%
		GT Jam GT Hour	20.174.173	15.965.276	21.350.525	105,83%	133,73%
	Bengkulu	Jam Hour	3.976	4.678	4.013	100,92%	85,77%
		GT Jam GT Hour	11.067.433	12.729.190	11.108.367	100,37%	87,27%
	Pangkal Balam	Jam Hour	2.511	1.991	3.131	124,70%	157,20%
		GT Jam GT Hour	4.821.711	4.268.027	6.059.237	125,67%	141,97%
	Cirebon	Jam Hour	2.432	3.482	2.547	104,73%	73,14%
		GT Jam GT Hour	6.778.824	14.801.582	6.902.069	101,82%	46,63%
	Pontianak	Jam Hour	7.379	4.479	7.939	107,59%	177,26%
		GT Jam GT Hour	36.067.116	30.902.021	40.932.136	113,49%	132,46%
Total Umum Public Total		**Jam** Hour	**89.881**	**88.833**	**92.243**	**102,63%**	**103,84%**
		GT Jam GT Hour	**891.317.426**	**909.646.616**	**890.750.963**	**99,94%**	**97,92%**



2. Penundaan TUKS

2. Towage of Private Terminal

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2025 As of December 2025			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025	Realisasi 2025 Realization 2025	6=5/3	7=5/4
	1	2	3	4	5	6	7
TUKS	Tanjung Priok	Jam Hour	2.013	-	3.034	150,70%	-
		GT Jam GT Hour	22.259.710	-	40.984.251	184,12%	-
	Banten	Jam Hour	20.803	25.561	23.587	113,39%	92,28%
		GT Jam GT Hour	225.143.061	252.989.518	243.576.536	108,19%	96,28%
	Panjang	Jam Hour	3.902	4.146	3.949	101,20%	95,24%
		GT Jam GT Hour	35.264.412	33.355.445	31.767.090	90,08%	95,24%
	Palembang	Jam Hour	24.906	19.8	27.965	112,28%	141,23%
		GT Jam GT Hour	85.737.458	69.749.666	95.735.001	111,66%	137,26%
	Teluk Bayur	Jam Hour	3.694	2.138	3.892	105,35%	182,01%
		GT Jam GT Hour	31.114.934	16.241.100	34.192.770	109,89%	210,53%
	Bengkulu	Jam Hour	368	-	241	65,35%	-
		GT Jam GT Hour	915.130	-	463.625	50,66%	-
	Pangkal Balam	Jam Hour	1.210	1.391	1.705	140,97%	122,58%
		GT Jam GT Hour	1.956.564	2.556.916	2.788.071	142,50%	109,04%
	Cirebon	Jam Hour	-	9	308	146,43%	3258,34%
		GT Jam GT Hour	-	158.197	5.230.375	148,39%	3306,24%
	Pontianak	Jam Hour	9.183	5.021	9.336	101,67%	185,93%
		GT Jam GT Hour	23.283.864	16.986.257	24.627.075	105,77%	144,98%
Total TUKS Total Private Terminal		Jam Hour	66.288	58.067	74.014	111,66%	127,46%
		GT Jam GT Hour	429.199.954	392.037.098	479.364.792	111,69%	122,28%

3. Penundaan Pelabuhan dan Tersus

3. Towage of Port and Special Terminal

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2025 As of December 2025			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025	Realisasi 2025 Realization 2025	6=5/3	7=5/4
	1	2	3	4	5	6	7
Tersus Penundaan Tersus Towage	Nusantara Regas	Jam Hour	168	**146**	**182**	108,52%	125,00%
		GT Jam GT Hour	17.011.864	**14.806.524**	**18.508.155**	108,80%	125,00%
	Cemindo Gemilang	Jam Hour	1.025	**1.003**	**943**	91,98%	93,98%
		GT Jam GT Hour	10.158.499	**10.794.390**	**10.193.145**	100,34%	94,43%
	STS Ambang Luar Musi	Jam Hour	25.589	**27.924**	**24.282**	94,89%	86,96%
		GT Jam GT Hour	170.646.741	**191.283.720**	**165.123.031**	96,76%	86,32%
	PLTU Kanci I & II	Jam Hour	2.350	**2.088**	**1.687**	71,80%	80,80%
		GT Jam GT Hour	14.526.500	**13.172.480**	**11.527.579**	79,36%	87,51%
	Jawa Satu Power	Jam Hour	209	**235**	**185**	88,64%	78,74%
		GT Jam GT Hour	16.409.374	**20.628.425**	**16.242.854**	98,99%	78,74%
	Patimban	Jam Hour	1.482	**1.944**	**1.257**	84,81%	64,65%
		GT Jam GT Hour	17.866.520	**25.637.494**	**14.955.189**	83,71%	58,33%
	Meulaboh	Jam Hour	5.639	**7.497**	**6.037**	107,04%	80,52%
		GT Jam GT Hour	64.068.099	**87.395.480**	**47.858.001**	74,70%	54,76%
	Weda	Jam Hour	4.533	**3.751**	**14.135**	311,83%	376,80%
		GT Jam GT Hour	90.764.722	**83.297.033**	**148.266.508**	163,35%	178,00%
	Laiwui	Jam Hour	657	**721**	**1.336**	203,50%	185,19%
		GT Jam GT Hour	10.310.584	**11.825.515**	**21.899.103**	212,39%	185,19%
	Tarakan	Jam Hour	-	**-**	**957**	-	-
		GT Jam GT Hour	-	**-**	**23.145.703**	-	-
Total Tunda Pelabuhan dan Tersus Total Port and Special Terminal Towage		**Jam** Hour	**41.651**	**45.31**	**51.001**	**122,45%**	**112,56%**
		GT Jam GT Hour	**411.762.902**	**458.841.060**	**477.719.266**	**116,02%**	**104,11%**



Pemanduan
1. Pemanduan Pelabuhan Umum

Pilotage
1. Pilotage of Public Port

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2025 As of December 2025			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025	Realisasi 2025 Realization 2025	6=5/3	7=5/4
	1	2	3	4	5	6	7
Umum Public	Tanjung Priok	Gerak Movement	12.925	28.367	26.148	202,30%	92,18%
		GT	148.301.516	331.303.771	298.120.034	201,02%	89,98%
	Banten	Gerak Movement	1.226	1.267	1.144	93,33%	90,29%
		GT	5.640.540	9.995.301	9.500.657	168,44%	95,05%
	Panjang	Gerak Movement	1.383	789	2.86	206,76%	362,65%
		GT	18.811.627	9.081.041	24.545.099	130,48%	270,29%
	Palembang	Gerak Movement	269	543	2.326	865,81%	428,12%
		GT	714.091	1.444.154	7.907.727	1107,38%	547,57%
	Teluk Bayur	Gerak Movement	1.592	3.402	1.814	113,97%	53,32%
		GT	9.763.286	20.868.101	13.740.587	140,74%	65,84%
	Bengkulu	Gerak Movement	1.702	3.914	2.421	142,23%	61,86%
		GT	6.343.706	14.585.947	6.711.010	105,79%	46,01%
	Pangkal Balam	Gerak Movement	1.542	3.446	2.173	140,94%	63,07%
		GT	2.553.929	5.707.587	4.272.464	167,29%	74,86%
	Cirebon	Gerak Movement	1.088	3.246	1.644	151,15%	50,64%
		GT	2.542.465	7.588.410	4.417.223	173,74%	58,21%
	Pontianak	Gerak Movement	3.270	431	4.374	133,78%	1014,15%
		GT	10.449.704	20.779.712	22.571.229	216,00%	108,62%
	Jambi	Gerak Movement	3.483	6.269	6.512	186,97%	103,87%
		GT	8.967.693	16.141.847	20.797.163	231,91%	128,84%
	Tanjung Pandan	Gerak Movement	675	1.333	1.558	230,75%	116,87%
		GT	804.420	1.588.229	2.419.358	300,76%	152,33%
Total Umum Public Total		Gerak Movement	29.154	53.008	52.974	181,70%	99,94%
		GT	214.892.976	439.084.099	415.002.550	193,12%	94,52%

2. Pemanduan TUKS

2. Pilotage of Private Terminal

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2025 As of December 2025			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025	Realisasi 2025 Realization 2025	6=5/3	7=5/4
	1	2	3	4	5	6	7
TUKS	Tanjung Priok	Gerak Movement	-	-	1.145	-	-
		GT	-	-	15.758.581	-	-
	Banten	Gerak Movement	3.874	8.504	7.395	190,89%	86,96%
		GT	44.077.608	96.757.087	71.692.059	162,65%	74,09%
	Panjang	Gerak Movement	2.060	4.009	2.119	102,86%	52,86%
		GT	4.198.381	14.694.624	15.166.685	361,25%	103,21%
	Palembang	Gerak Movement	2.624	5.834	11.231	428,09%	192,50%
		GT	8.710.710	25.896.138	38.411.141	440,96%	148,33%
	Teluk Bayur	Gerak Movement	391	945	1.598	408,60%	169,01%
		GT	3.219.131	7.782.430	13.010.646	404,17%	167,18%
	Bengkulu	Gerak Movement	-	-	137	-	-
		GT	-	-	264.465	-	-
	Pangkal Balam	Gerak Movement	439	1.037	1.1	250,78%	106,11%
		GT	591.565	1.398.035	1.790.161	302,61%	128,05%
	Cirebon	Gerak Movement	291	671	123	42,23%	18,32%
		GT	7.172.267	11.657.678	2.115.362	29,49%	18,15%
	Pontianak	Gerak Movement	2.014	4.561	3.428	170,23%	75,15%
		GT	4.442.134	10.118.873	9.186.884	206,81%	90,79%
	Jambi	Gerak Movement	-	-	-	-	-
		GT	-	-	-	-	-
	Tanjung Pandan	Gerak Movement	-	-	-	-	-
		GT	-	-	-	-	-
Total TUKS Total Private Terminal		Gerak Movement	11.692	25.562	28.276	241,83%	110,62%
		GT	72.411.796	168.304.864	167.395.984	231,17%	99,46%



3. Pemanduan Pelabuhan Tersus

3. Pilotage of Tersus Port

Uraian Description	Wilayah Regional	Satuan Unit	Sampai dengan Desember 2025 As of December 2025			Trend	Deviasi Deviation
			Realisasi 2024 Realization 2024	Target 2025	Realisasi 2025 Realization 2025	6=5/3	7=5/4
	1	2	3	4	5	6	7
Tersus Pemanduan Tersus Pilotage	Nusantara Regas	Gerak Movement	74	56	83	112,16%	147,27%
		GT	3.751.790	2.739.703	7.939.584	211,62%	289,80%
	Cemindo Gemilang	Gerak Movement	955	715	1.015	106,28%	141,99%
		GT	8.726.437	7.327.134	9.485.910	108,70%	129,46%
	STS Ambang Luar Musi	Gerak Movement	17.059	16.469	16.469	96,54%	100,00%
		GT	113.764.494	110.463.367	111.402.940	97,92%	100,85%
	PLTU Kanci I & II	Gerak Movement	940	896	880	93,62%	98,25%
		GT	5.810.600	5.649.490	6.026.867	103,72%	106,68%
	Jawa Satu Power	Gerak Movement	48	24	47	97,92%	193,12%
		GT	3.371.983	2.028.272	3.549.154	105,25%	174,98%
	Patimban	Gerak Movement	741	1.076	567	76,52%	52,71%
		GT	8.933.260	14.187.169	7.855.985	87,94%	55,37%
	Laiwui	Gerak Movement	590	528	1.233	208,98%	233,60%
		GT	8.711.543	7.775.471	19.335.768	244,80%	248,68%
Total Pandu Pelabuhan dan Tersus Total Port and Special Terminal Pilotage		**Gerak Movement**	**20.407**	**19.764**	**20.294**	**99,45%**	**102,68%**
		GT	**153.070.107**	**150.170.606**	**165.596.208**	**108,76%**	**110,27%**

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Berdasarkan tinjauan operasional, berikut disajikan data keuangan untuk masing-masing segmen usaha pada tahun 2024 dan tahun 2025, yaitu:

REVENUES AND PROFITABILITY

Based on the operational review, the following presents the financial data for each business segment in 2024 and 2025:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2025
Revenues and Profitability of Business Segment in 2025 Fiscal Year

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Tahun 2025 Year 2025		
	Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services	Jasa Pengangkutan dan Lainnya Freight and Other Services	Total
Pendapatan Operasi Segmen Segment Operating Revenues	1.425.136	49.672	1.474.808
Beban Pokok Pendapatan Segment Cost of Revenues	(1.009.821)	(35.197)	(1.045.017)
Laba Bruto Gross Profit	415.315	14.475	429.791
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	-	-	(181.484)
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	-	-	2.733

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2025
Revenues and Profitability of Business Segment in 2025 Fiscal Year

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Tahun 2025 Year 2025		
	Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services	**Jasa Pengangkutan dan Lainnya** Freight and Other Services	**Total**
Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses	-	-	**(3.819)**
Laba Usaha Income from Operation	-	-	**247.221**
Pendapatan Keuangan Finance Income	-	-	**17.406**
Beban Keuangan Finance Expenses	-	-	**(9.375)**
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	-	-	**255.251**
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	-	-	**(58.814)**
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	-	-	**196.438**
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	-	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive for the Year	-	-	**196.438**

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2024
Revenue and Profitability of Business Segment for the 2024 Fiscal Year

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Tahun 2024 Year 2024		
	Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services	**Jasa Pengangkutan dan Lainnya** Freight and Other Services	**Total**
Pendapatan Operasi Segmen Segment Operating Revenues	1.301.250	43.780	1.345.030
Beban Pokok Pendapatan Segment Cost of Revenues	(897.075)	(29.817)	(926.893)
Laba Bruto Gross Profit	404.174	13.963	418.137
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	-	-	(203.273)
Pendapatan Operasi Lainnya* Other Operating Income	-	-	1.342
Beban Operasi Lainnya Other Operating Expenses	-	-	(7.038)
Laba Usaha* Income from Operation	-	-	209.168
Pendapatan Keuangan* Finance Income	-	-	16.168
Beban Keuangan Finance Expenses	-	-	(11.148)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	-	-	214.188



Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha Tahun Buku 2024
Revenue and Profitability of Business Segment for the 2024 Fiscal Year

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Tahun 2024 Year 2024		
	Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services	Jasa Pengangkutan dan Lainnya Freight and Other Services	Total
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	-	-	(47.345)
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	-	-	166.843
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income			-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive for the Year	-	-	**166.843**

*) Reklasifikasi
*) Reclassification

Berdasarkan tabel diatas, pendapatan operasi segmen tahun 2025 tercatat mencapai Rp1.474,81 miliar atau meningkat 9,65% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.345,03 miliar. Segmen jasa pelayanan kapal masih menempati urutan nomor satu penyumbang pendapatan operasi terbesar bagi Perusahaan. Pada tahun 2025, segmen jasa pelayanan kapal mencatatkan pendapatan sebesar Rp1.425,14 miliar mengalami peningkatan 9,52% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.301,25 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi pada Pelabuhan Umum dan TUKS di wilayah Regional 2, khususnya pada Pelabuhan Utama Tanjung Priok, serta kontribusi dari Pelabuhan lainnya seperti Pontianak dan Teluk Bayur. Selain itu, beberapa Terminal Khusus di Wilayah Pelimpahan PT Jasa Armada Indonesia Tbk serta Kerja Sama Operasi turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan, antara lain Tersus PT Trimegah Bangun Persada Tbk, Tersus PT Nusantara Regas, dan KSO pada Wilayah Perairan Weda. Kemudian segmen jasa pengangkutan dan lainnya mencatatkan pendapatan sebesar Rp49,67 miliar di tahun 2025, mengalami peningkatan 13,46% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp43,78 miliar. Hal tersebut lebih dikarenakan peningkatan pendapatan on call kapal tunda yang dipengaruhi oleh meningkatnya frekuensi permintaan pelayanan pada kegiatan operasional di STS Maringgai serta Tersus PT Jawa Satu Power.

Based on the table above, segment operating revenue in 2025 reached Rp1,474.81 billion, representing a 9.65% increase compared to the previous year of Rp1,345.03 billion. The vessel services segment remained the largest contributor to the Company's operating revenue. In 2025, this segment recorded revenue of Rp1,425.14 billion, up 9.52% from Rp1,301.25 billion in the previous year. This increase was driven by higher throughput at Public Ports and TUKS in Regional 2, particularly at the Main Port of Tanjung Priok, as well as contributions from other ports such as Pontianak and Teluk Bayur. In addition, several Special Terminals within the delegated areas of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, along with Joint Operation Schemes, also contributed to the revenue growth, including the special terminals of PT Trimegah Bangun Persada Tbk, PT Nusantara Regas, and the KSO in the Weda waters. Meanwhile, the transportation and other services segment recorded revenue of Rp49.67 billion in 2025, an increase of 13.46% compared to Rp43.78 billion in the previous year. This growth was mainly driven by higher revenue from on-call tugboat services, influenced by the increased frequency of service requests for STS activities in Maringgai as well as operations at the special terminal of PT Jawa Satu Power.

Pada tahun 2025, sisi profitabilitas segmen Perusahaan tercatat berhasil membukukan total laba bruto sebesar Rp429,79 miliar atau meningkat 2,79% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp418,14 miliar.

In 2025, the Company's segment profitability recorded a total gross profit of Rp429.79 billion, an increase of 2.79% compared to the previous year's figure of Rp418.14 billion.

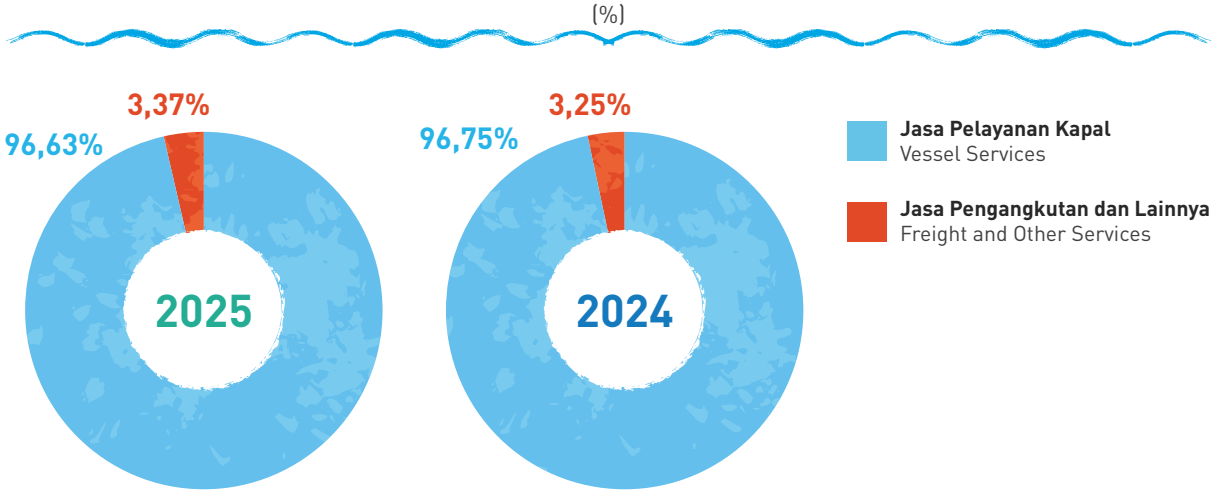
Segmen jasa pelayanan kapal membukukan laba kotor sebesar Rp415,32 miliar mengalami peningkatan 2,76% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp404,17 miliar. Kemudian segmen jasa pengangkutan dan lainnya membukukan laba kotor sebesar Rp14,48 miliar di tahun 2025, mengalami peningkatan 3,67% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp13,96 miliar. Hal tersebut lebih dikarenakan peningkatan pendapatan khususnya pada wilayah Tersus serta adanya upaya efisiensi biaya operasional.

The vessel services segment recorded a gross profit of Rp415.32 billion, representing an increase of 2.76% compared to the previous year's Rp404.17 billion. Meanwhile, the transportation and other services segment posted a gross profit of Rp14.48 billion in 2025, up 3.67% from Rp13.96 billion in the prior year. This growth was mainly driven by increased revenue, particularly from Tersus operations, as well as ongoing efforts to improve operational cost efficiency.

Kontribusi Segmen Usaha terhadap Total Pendapatan Tahun 2025

Contribution of Business Segments to Total Revenue Profit in 2025

Kontribusi Pendapatan per Segmen Usaha terhadap Total Pendapatan (%)
Revenue Contribution by Business Segment to Total Revenue



Tabel berikut menyajikan data Aset dan Liabilitas per Segmen untuk tahun 2025 dan 2024, yaitu:

The following table presents the data on Assets and Liabilities by Segment for the years 2025 and 2024:

(dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	Tahun 2025 Year 2025		
	Jasa Kapal Vessel Services	Jasa Pengangkutan dan Lainnya Freight and Other Services	Total
Aset Segmen Segment Asset	1.000.258	-	1.000.258
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Asset			714.260
Total Aset Total Assets	1.000.258	-	1.714.517
Liabilitas Liabilities	238.194	-	238.194
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Liabilities			116.529
Total Liabilitas Total Liabilities	238.194	-	354.723



Uraian Description	Tahun 2024 Year 2024		
Aset Segmen Segment Asset	835.689	-	835.689
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Asset			814.292
Total Aset Total Assets	835.689	-	1.649.981
Liabilitas Liabilities	312.544	-	312.544
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan Unallocated Liabilities			48.327
Total Liabilitas Total Liabilities	**312.544**		**360.870**

Berdasarkan tabel di atas, sokongan tebesar jumlah aset yang dapat didistribusikan per segmen pada tanggal 31 Desember 2025 berasal dari segmen jasa pelayanan kapal yaitu sebesar Rp1.000,26 miliar atau 100,00% dari total aset segmen yang dapat didistribusikan. Sementara dari sisi kewajiban, kontribusi yang dapat dialokasikan per segmen pada tanggal 31 Desember 2025 terbesar berasal dari segmen segmen jasa pelayanan kapal yaitu sebesar Rp238,19 miliar atau 100,00% dari total kewajiban segmen yang dapat dialokasikan.

Based on the table above, the largest contribution to the total distributable assets by segment as of December 31, 2025, came from the vessel services segment amounting to Rp1,000.26 billion or 100.00% of the total distributable segment assets. On the liabilities side, the highest allocable segment contribution as of December 31, 2025, also came from the vessel services segment amounting to Rp238.19 billion or 100.00% of the total allocable segment liabilities.

Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Review

Informasi data dan penjelasan keuangan pada bagian tinjauan keuangan ini didasarkan pada Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024. Seluruh uraian dalam bagian ini merujuk secara langsung pada laporan tersebut sebagai acuan utama. Laporan Keuangan tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja dalam laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 dan mendapatkan opini "wajar dalam semua hal yang material".

The financial data and analysis in this financial review section are based on the Company's Financial Statements for the fiscal years ending December 31, 2025 and 2024. All descriptions in this section refer directly to these statements as the primary reference. The Financial Statements were audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti dan Surja under report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 dated March 13, 2026 and received an opinion "fair in all material respects".

Kinerja keuangan Perusahaan atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

The Company's financial performance based on the Statement of Financial Position, Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and Statement of Cash Flows is presented in the following table:

POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

Laporan Posisi Keuangan 2024-2025
Statement of Financial Position 2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Total Aset Total Assets	**1.714.517**	1.649.981	64.536	3,91
Total Liabilitas Total Liabilities	**354.723**	360.871	(6.148)	(1,70)
Ekuitas Equity	**1.359.794**	1.289.110	70.684	5,48

Mengacu ke tabel di atas, laporan posisi keuangan Perusahaan di tahun 2025 jika dibandingkan tahun sebelumnya, dari sisi jumlah aset tercatat meningkat 3,91%, sementara jumlah liabilitas mengalami penurunan 1,70% dan jumlah ekuitas tercatat naik 5,48%.

Based on the table above, the Company's statement of financial position in 2025, compared to the previous year, shows an increase of 3.91% in total assets, while total liabilities decreased by 1.70% and total equity increased by 5.48%

Berikut uraian terkait laporan posisi keuangan JAI di tahun 2025 dibanding tahun 2024, beserta penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak atas perubahan tersebut.

The following is a description of JAI's statement of financial position in 2025 compared to 2024, along with an explanation of the causes of these changes and their impacts.

Aset

Total Aset Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.714,52 miliar, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp64,54 miliar atau 3,91% jika dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 yaitu Rp1.649,98 miliar. Peningkatan aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas atas penerimaan dari kegiatan operasional Perusahaan.

Asset

The Company's total assets as of December 31, 2025, amounted to Rp1,714.52 billion, representing an increase of Rp64.54 billion or 3.91% compared to the position as of December 31, 2024, which stood at Rp1,649.98 billion. The increase in assets was primarily driven by a rise in cash and cash equivalents resulting from the Company's operating activities.



Tabel Aset 2024-2025
Asset Table 2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Aset Lancar Current Assets				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	**554.126**	473.084	81.042	17,13
Piutang usaha - Neto Trade Receivables Nett				
Pihak Ketiga* Third Parties	**152.631**	121.042	31.589	26,10
Pihak Berelasi* Related Parties	**207.861**	276.766	(68.905)	(24,90)
Persediaan Inventories	**23.227**	21.596	1.631	7,55
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	**45.372**	40.856	4.516	11,05
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	**32.100**	5.494	26.606	484,27
Total Aset Lancar Total Current Assets	**1.015.318**	938.838	76.480	8,15
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets				
Aset pajak tangguhan - neto Deferred tax assets - nett	**16.963**	18.987	(2.024)	(10,66)
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	**70.015**	79.937	(9.922)	(12,41)
Taksiran tagihan restitusi Estimated claims for tax refund	**-**	49.658	-	-
Aset tetap - neto Fixed assets - net	**581.022**	562.431	18.591	3,31
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	**31.199**	131	31.068	2.3716,03
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**699.200**	**711.143**	**(11.943)**	**(1,68)**
Total Aset **Total Assets**	**1.714.517**	**1.649.981**	**64.536**	**3,91**

*) Reklasifikasi
*) Reclassification

Kas dan Setara Kas

Komponen kas dan setara kas mencakup kas, saldo pada bank, serta deposito berjangka yang tidak dijaminkan dan tidak memiliki pembatasan penggunaan. Nilai kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp554,13 miliar miliar dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp473,08 miliar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tahun ini mengalami peningkatan sebesar 17,13%. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari aktivitas operasional dan peningkatan pendapatan tunai yang diterima selama tahun berjalan.

Cash and Cash Equivalents

The Company's cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks, and time deposits that are neither pledged as collateral nor restricted in use. As of December 31, 2025, cash and cash equivalents amounted to Rp554.13 billion, compared to Rp473.08 billion as of December 31, 2024. This represents an increase of 17.13% year-on-year. The increase was driven by higher cash receipts from operating activities and an increase in cash revenues received during the year.

Piutang Usaha

Piutang Usaha neto pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp360,49 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp37,32 miliar atau 9,38% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp397,81 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas penagihan dan pendapatan tunai selama tahun 2025.

Trade Receivables

Net trade receivables as of December 31, 2025 amounted to Rp360.49 billion, representing a decrease of Rp37.32 billion or 9.38% compared to the position as of December 31, 2024, which stood at Rp397.81 billion. This decline was driven by increased collection activities and higher cash receipts during 2025.

Persediaan

Persediaan yang dimiliki Perusahaan merupakan persediaan bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan.

Per tanggal 31 Desember 2025, nilai aspek persediaan yang tercatat sebesar Rp23,23 miliar, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp21,60 miliar (pada posisi per tanggal 31 Desember 2024). Peningkatan ini disebabkan bertambahnya pengisian bahan bakar untuk mengantisipasi lonjakan produksi di awal tahun berikutnya.

Pajak Dibayar di Muka

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, pajak dibayar di muka tercatat sebesar Rp45,37 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatat sebesar Rp40,86 miliar per 31 Desember 2024. Apabila dibandingkan dengan perolehan di tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 11,06% atau setara dengan Rp4,52 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan serta optimalisasi perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang lebih baik melalui peningkatan Pembayaran kredit pajak.

Aset Lancar Lainnya

Per 31 Desember 2025, nilai aset lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp26,61 miliar atau 484,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan berhasil membukukan nilai aset lancar lainnya sebesar Rp32,10 miliar sedangkan tahun sebelumnya hanya mencatatkan senilai Rp5,50 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh uang muka atas pembelian bahan bakar operasional.

Aset Pajak Tangguhan

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, nilai aset pajak tangguhan mengalami penurunan dibandingkan posisi tahun sebelumnya. Dalam laporan keuangan tahun 2025, Perusahaan mencatatkan nilai aset pajak tangguhan sebesar Rp16,96 miliar yang berarti terdapat penurunan sebesar 10,66% dibandingkan posisi per tanggal 31 Desember 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya estimasi manfaat pajak di masa mendatang yang dapat dipulihkan, seiring dengan penyesuaian atas proyeksi perhitungan fiskal laba kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikompensasi.

Aset Hak Guna - Neto

Per 31 Desember 2025, nilai aset hak guna-neto Perusahaan tercatat sebesar Rp70,02 miliar. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp79,94 miliar. (per 31 Desember 2024). Terdapat penurunan sebesar 12,41% atau setara dengan Rp9,92 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penyusutan aset sewa di tahun berjalan.

Taksiran Tagihan Restitusi

Total taksiran tagihan restitusi yang dicatatkan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar nihil. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp49,66 miliar atau 100,00% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp49,66 miliar.

Inventories

The Company's inventory consists of fuel used for the Company's operational activities.

As of December 31, 2025, inventory was recorded at Rp23.23 billion, representing an increase from the previous year's balance of Rp21.60 billion as of December 31, 2024. This increase was due to additional fuel stocking in anticipation of higher production levels at the beginning of the following year.

Prepaid Taxes

Based on the financial statements as of December 31, 2025, prepaid taxes were recorded at Rp45.37 billion, compared to Rp40.86 billion as of December 31, 2024. This represents an increase of 11.06% or Rp4.52 billion year-on-year. The increase is in line with revenue growth as well as improved tax planning through higher tax credit payments.

Other Current Assets

As of December 31, 2025, other current assets increased by Rp26.61 billion or 484.27% compared to the previous year. The Company recorded other current assets of Rp32.10 billion, while in the prior year it amounted to only Rp5.50 billion. This increase was mainly driven by advances for the purchase of operational fuel.

Deferred Tax Assets

Based on the financial statements as of December 31, 2025, deferred tax assets decreased compared to the previous year. In 2025, the Company recorded deferred tax assets of Rp16.96 billion, reflecting a decline of 10.66% compared to the position as of December 31, 2024. This decrease was due to a reduction in the estimated future tax benefits that can be recovered, in line with adjustments to the projected calculation of taxable income and compensable temporary differences.

Right-of-Use Assets - Net

As of December 31, 2025, the Company's net right-of-use assets were recorded at Rp70.02 billion. This represents a decrease compared to Rp79.94 billion as of December 31, 2024. The decline amounted to 12.41% or Rp9.92 billion, primarily due to depreciation of lease assets during the year.

Estimated Claims for Tax Refund

The total estimated refund bill recorded by the Company on December 31, 2025, was zero. This amount decreased by Rp49.66 billion or 100.00% compared to the position on December 31, 2024, which was Rp49.66 billion.



Aset Tetap

Nilai buku aset tetap bersih pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp581,02 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp18,59 miliar atau 3,31% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp562,43 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh progres pemeliharaan (*docking*) kapal tunda selama tahun 2025.

Fixed Assets

The net book value of fixed assets as of December 31, 2025 was recorded at Rp581.02 billion, representing an increase of Rp18.59 billion or 3.31% compared to Rp562.43 billion as of December 31, 2024. This increase was driven by the progress of tugboat maintenance (docking) activities during 2025.

Tabel Aset Tetap 2024-2025
Fixed Assets Table 2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Harga Perolehan Acquisition Cost				
Pemilikan Langsung Direct Ownership				
▪ Kapal ▪ Ships	**870.010**	808.456	61.554	7,61
▪ Bangunan ▪ Buildings	**12.360**	12.360	0	0,00
▪ Instalasi Fasilitas Pelabuhan ▪ Port Facility Equipment	**5.440**	5.401	39	0,72
▪ Kendaraan ▪ Vehicles	**580**	580	0	0,00
Aset dalam Penyelesaian Construction in Progress	**7.512**	1.025	6.487	632,88
Total Harga Perolehan Total Acquisition Cost	**895.902**	827.822	68.080	8,22
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation				
Pemilikan Langsung Direct Ownership				
▪ Kapal ▪ Ships	**304.072**	260.321	43.751	16,81
▪ Bangunan ▪ Buildings	**5.656**	726	4.930	679,06
▪ Alat Fasilitas Pelabuhan ▪ Port Facility Equipment	**4.977**	4.286	691	16,12
▪ Kendaraan ▪ Vehicles	**174**	58	116	200,00
Total Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	**314.879**	265.391	49.489	18,65
Nilai Buku Book Value	**581.023**	562.431	18.591	3,31

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, Perusahaan mencatatkan nilai beban penyusutan aset tetap masing-masing Rp49,49 miliar sedangkan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp43,31 miliar. Seluruhnya dialokasikan ke beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi Perusahaan.

Based on the financial statements as of December 31, 2025, the Company recorded depreciation expenses on fixed assets amounting to Rp49.49 billion compared to Rp43.31 billion as of December 31, 2024. The entire amount was allocated to Company's cost of revenue and general and administrative expenses.

Seluruh aset tetap dimiliki secara langsung oleh Perusahaan. Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan kondisi yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Selain itu, tidak terdapat aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan.

All fixed assets are owned directly by the Company. The Company believes that there are no events or conditions indicating a potential impairment of fixed assets as of December 31, 2025, and 2024. Additionally, there are no fully depreciated fixed assets that are still in use to support the Company's operations.

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian (2 buah kapal) pada tanggal 31 Desember 2025. Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan. Pada tanggal pelaporan, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan.

Percentage of completion and estimated completion period for assets under construction (2 vessels) as of December 31, 2025. The Company believes that the insurance coverage is sufficient to cover potential losses arising from insured risks. As of the reporting date, there are no fixed assets pledged as collateral.

Liabilitas

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp354,72 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp6,15 miliar atau 1,70% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp360,87 miliar. Beban Akrual merupakan bagian terbesar yaitu 56,84% dari total liabilitas. Penurunan jumlah liabilitas disebabkan oleh pembayaran utang usaha jangka pendek.

Liabilities

Total liabilities as of December 31, 2025 amounted to Rp354.72 billion, reflecting a decrease of Rp6.15 billion or 1.70% compared to Rp360.87 billion as of December 31, 2024. Accrued expenses constituted the largest portion, accounting for 56.84% of total liabilities. The decrease in total liabilities was mainly due to the settlement of short-term trade payables.

Tabel Liabilitas 2024-2025
Liabilities Table 2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities				
Utang Usaha Trade Payables				
▪ Pihak Ketiga ▪ Third Parties	**15.874**	15.263	611	4,00
▪ Pihak Berelasi ▪ Related Parties	**9.870**	14.113	(4.243)	(30,06)
Uang Titipan Deposits	**14.940**	12.476	2.464	19,75
Beban Akrual Accrued Expenses	**201.638**	185.986	15.652	8,42
Utang Pajak Taxes Payable	**16.133**	21.318	(5.185)	(24,32)
Utang Dividen Dividend Payable				
▪ Pihak Ketiga ▪ Third Parties	**5.348**	2.424	2.924	120,63
▪ Pihak Berelasi ▪ Related Parties	**17.905**	17.628	277	1,57
Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Current Maturities of Long-Term Lease Liabilities	**69.094**	84.927	(15.833)	(18,64)
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**350.802**	**354.135**	**(3.333)**	**(0,94)**



Tabel Liabilitas 2024-2025
Liabilities Table 2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities				
Liabilitas Sewa Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Long-Term Lease Liabilities - Net of Current Maturities	3.921	6.736	(2.815)	(41,79)
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	3.921	6.735	(2.814)	(41,78)
Total Liabilitas Total Liabilities	354.723	360.871	(6.148)	(1,70)

Utang Usaha

Per 31 Desember 2025 jumlah utang usaha tercatat sebesar Rp25,74 miliar, jumlah tersebut menurun sebesar Rp3,63 miliar atau 12,36% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp29,38 miliar. Penurunan ini berasal dari pembayaran kewajiban operasional yang telah jatuh tempo.

Trade Payables

As of December 31, 2025, trade payables amounted to Rp25.74 billion, representing a decrease of Rp3.63 billion or 12.36% compared to Rp29.38 billion as of December 31, 2024. This decline was primarily driven by the settlement of due operational obligations.

Uang Titipan

Pada tanggal 31 Desember 2025, nilai uang titipan tercatat sebesar Rp14,94 miliar. Nilai tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp2,46 miliar atau 19,75% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 yang berjumlah Rp12,48 miliar. Perubahan pada uang titipan tersebut disebabkan oleh uang titipan pelanggan dan uang titipan atas potongan penghasilan karyawan.

Deposits

As of December 31, 2025, deposits were recorded at Rp14.94 billion, representing an increase of Rp2.46 billion or 19.75% compared to Rp12.48 billion as of December 31, 2024. This change was mainly driven by customer deposits and deposits related to employee income deductions.

Beban Akrual

Per 31 Desember 2025, beban akrual tercatat sebesar Rp201,64 miliar. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp15,65 miliar atau 8,42% dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2024 yang berjumlah Rp185,99 miliar. Perubahan beban akrual ini disebabkan oleh pencatatan progres pekerjaan pemeliharaan kapal yang belum dilakukan penagihan oleh penyedia jasa.

Accrued Expenses

As of December 31, 2025, accrued expenses amounted to Rp201.64 billion, reflecting an increase of Rp15.65 billion or 8.42% compared to Rp185.99 billion as of December 31, 2024. The increase was primarily due to the recognition of progress on vessel maintenance work that had not yet been billed by service providers.

Utang Pajak

Pada tahun buku 2025, utang pajak tercatat sebesar Rp16,13 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp5,18 miliar atau 24,32% dibandingkan dengan posisi pada tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang berjumlah Rp21,32 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh optimalisasi perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang lebih baik melalui peningkatan kredit pajak.

Taxes Payable

In fiscal year 2025, taxes payable were recorded at Rp16.13 billion, representing a decrease of Rp5.18 billion or 24.32% compared to Rp21.32 billion in fiscal year 2024. This decrease was driven by improved tax planning through increased tax credits.

Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Pada tahun buku 2025, liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun tercatat sebesar Rp69,09 miliar. Nilai tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp15,83 miliar atau 18,64% dibandingkan dengan posisi pada tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang berjumlah Rp84,93 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh reklasifikasi liabilitas sewa jangka panjang menjadi jangka pendek sesuai periode sewa.

Current Maturities of Long-Term Lease Liabilities

In fiscal year 2025, the current portion of long-term lease liabilities amounted to Rp69.09 billion, representing a decrease of Rp15.83 billion or 18.64% compared to Rp84.93 billion in fiscal year 2024. This decrease was due to the reclassification of long-term lease liabilities into current liabilities in accordance with the lease period.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas 2024-2025
Equity Table 2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Modal Dasar - 15.000.000.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp100 (Nilai Penuh) Authorized Capital - 15,000,000,000 Shares at Rp100 (Full Amount)				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 5.284.811.100 Saham dengan Nilai Nominal Rp100 (Nilai Penuh) Issued and Fully Paid Capital – Rp5,284,811,100 Shares at Rp100 (Full Amount)	**528.481**	528.481	0	0,00
Saham Treasuri Treasury Stock	**-**	(1.618)	-	-
Tambahan Modal Disetor – Neto Additional Paid-in Capital – Net	**318.976**	317.981	995	0,31
Saldo Laba Retained Earnings				
▪ Telah Ditentukan Penggunaannya ▪ Appropriated	**163.857**	158.421	5.436	3,43
▪ Belum Ditentukan Penggunaannya ▪ Unappropriated	**348.480**	285.844	62.636	21,91
Total Ekuitas Total Equity	**1.359.794**	**1.289.109**	**70.684**	**5,48**

Pada tahun buku 2025, total ekuitas tercatat sebesar Rp1.359,79 miliar. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 5,48% atau setara dengan Rp70,68 miliar dibandingkan dengan posisi pada tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang berjumlah Rp1.289,11 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan laba perusahaan.

In fiscal year 2025, total equity was recorded at Rp1,359.79 billion, representing an increase of 5.48% or Rp70.68 billion compared to Rp1,289.11 billion in fiscal year 2024. This increase was in line with the Company's higher profit.



LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Memasuki tahun buku 2025, Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp196,44 miliar. Pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp29,60 miliar atau 17,74% bila dibandingkan dengan hasil kinerja pada tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang berjumlah Rp166,84 miliar.

PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

As of the 2025 fiscal year, the Company reported a net income of Rp196.44 billion. This represents an increase of Rp29.60 billion, or 17.74%, compared to the results for the previous fiscal year, 2024, which totaled Rp166.84 billion.

Tabel Laporan Laba (Rugi)
2024-2025
Profit (Loss)
2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan - Neto Revenue - Net	**1.474.808**	1.345.030	129.778	9,65
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	**(1.045.017)**	(926.893)	118.124	12,74
Laba Bruto Gross Profit	**429.791**	418.137	11.654	2,79
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	**(181.484)**	(203.273)	(21.789)	(10,72)
Pendapatan Operasi Lainnya Other Operating Income	**2.733**	1.341	1.392	103,80
Beban Operasi Lainnya* Other Operating Expenses	**(3.819)**	(7.038)	(3.219)	(45,74)
Laba Usaha* Income from Operations	**247.221**	209.168	38.053	18,19
Pendapatan Keuangan* Finance Income	**17.406**	16.168	1.238	7,66
Beban Keuangan Finance Expenses	**(9.375)**	(11.148)	(1.773)	(15,90)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income (Loss) Before Income Tax	**255.252**	214.188	41.063	19,17
Beban Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax	**(58.814)**	(47.345)	11.469	24,22
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	**196.438**	166.843	29.595	17,74
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	**196.438**	166.843	29.595	17,74
Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) Basic Earnings (Full Amount)	**37,22**	31,62	5,60	17,71

*) Reklasifikasi
*) Reclassification

Pendapatan

Selama tahun buku 2025, Perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp1.474,81 miliar. Kinerja tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp129,78 miliar atau 9,65% jika dibandingkan dengan hasil tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang berjumlah Rp1.345,03 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi Jasa Pelayanan Kapal pada Pelabuhan Umum, Tersus dan *On Call*.

Revenues

During the 2025 fiscal year, the Company recorded operating revenue of Rp1,474.81 billion. This performance represents an increase of Rp129.78 billion, or 9.65%, compared to the results of the previous fiscal year, 2024, which totaled Rp1,345.03 billion. This increase was driven by higher production of Vessel Services at Public, Dedicated, and On-Call Ports.

Tabel Pendapatan
2024-2025
Revenues
2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease Nominal	 Persentase Percentage
Jasa Pelayanan Kapal Vessel Services				
▪ Penundaan ▪ Tug service	**1.320.063**	1.209.515	110.548	9,14%
▪ Pemanduan ▪ Pilotage service	**105.073**	91.735	13.338	14,54%
Pendapatan Jasa Pelayanan Kapal Total Revenue from Vessel Services	**1.425.136**	1.301.250	123.886	9,52%
Jasa Pengangkutan dan Lainnya Freight and Other Services	**49.672**	43.780	5.892	13,46%
Total Pendapatan dan Lainnya Total Revenues and Others	**1.474.808**	**1.345.030**	**129.778**	**9,65**

Beban Pokok Pendapatan

Memasuki tahun buku 2025, Perusahaan mencatat beban pokok pendapatan sebesar Rp1.045,02 miliar. Nilai tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp118,12 miliar atau 12,74% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang berjumlah Rp926,89 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan biaya operasi langsung utamanya biaya bahan bakar dan kerjasama usaha guna kelancaran kegiatan usaha.

Cost of Revenue

In fiscal year 2025, the Company recorded cost of revenue of Rp1,045.02 billion, reflecting an increase of Rp118.12 billion or 12.74% compared to Rp926.89 billion in fiscal year 2024. This increase was primarily driven by higher direct operating costs, particularly fuel expenses and business cooperation costs to support operational activities.

Beban Umum dan Administrasi

Untuk tahun buku 2025, Perusahaan mencatat beban umum dan administrasi sebesar Rp181,48 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp21,79 miliar atau 10,72% jika dibandingkan dengan posisi pada tahun buku sebelumnya, yaitu 2024, yang tercatat sebesar Rp203,27 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya biaya operasi tidak langsung utamanya pengurangan jumlah pegawai pada unit kerja pendukung dan efisiensi beban KSMU.

General and Administrative Expenses

For fiscal year 2025, the Company recorded general and administrative expenses of Rp181.48 billion, representing a decrease of Rp21.79 billion or 10.72% compared to Rp203.27 billion in fiscal year 2024. This decrease was due to lower indirect operating costs, particularly from a reduction in the number of employees in supporting units and efficiency in KSMU expenses.

Laba Usaha

Pada tahun buku 2025, Perusahaan membukukan laba usaha sebesar Rp247,22 miliar. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan sebesar Rp38,05 miliar atau 18,19% dibandingkan hasil tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang berjumlah Rp209,17 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan usaha secara keseluruhan.

Income from Operations

In fiscal year 2025, the Company recorded operating profit of Rp247.22 billion, representing an increase of Rp38.05 billion or 18.19% compared to Rp209.17 billion in fiscal year 2024. This growth was in line with the overall increase in operating revenue.

Pendapatan dan Beban Operasi Lainnya

Selama tahun buku 2025, Perusahaan mencatat pendapatan operasi lain sebesar Rp2,73 miliar. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp1,39 miliar atau 103,80% dibandingkan tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang tercatat sebesar Rp1,34 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan klaim dari penyedia jasa atas keterlambatan pemeliharaan kapal.

Other Operating Income and Expenses

During fiscal year 2025, the Company recorded other operating income of Rp2.73 billion, an increase of Rp1.39 billion or 103.80% compared to Rp1.34 billion in 2024. This increase was mainly driven by claim receipts from service providers due to delays in vessel maintenance.



Sementara itu, beban operasi lainnya pada tahun buku 2025 tercatat sebesar Rp3,82 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3,22 miliar atau 45,74% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah Rp8,80 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh tidak terdapat lagi pencadangan beban restitusi pajak.

Pendapatan dan Beban Keuangan

Pada tahun buku 2025, Perusahaan membukukan pendapatan keuangan sebesar Rp17,41 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,24 miliar atau 7,66% dibandingkan dengan posisi tahun buku sebelumnya, yaitu 2024, yang tercatat sebesar Rp16,17 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan deposito.

Adapun beban keuangan pada tahun buku 2025 tercatat sebesar Rp9,38 miliar. Nilai tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp1,77 miliar atau 15,90% dibandingkan tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang berjumlah Rp11,15 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan beban bunga atas sewa aset hak guna.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan

Pada tahun buku 2025, laba sebelum pajak penghasilan badan tercatat sebesar Rp255,25 miliar. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun buku sebelumnya, yaitu 2024, yang berjumlah Rp214,19 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, serta adanya efisiensi biaya operasional yang berhasil dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, kontribusi dari peningkatan volume penjualan dan pengelolaan beban usaha yang lebih optimal turut mendorong pertumbuhan laba sebelum pajak.

Laba Tahun Berjalan

Pada tahun buku 2025, Perusahaan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp196,44 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp29,60 miliar atau 17,74% dari capaian tahun buku sebelumnya, yaitu tahun 2024, yang berjumlah Rp166,84 miliar. Konsekuensi dari perubahan laba tahun berjalan tersebut adalah meningkatnya beban pajak penghasilan badan tahun buku 2025 yang tercatat sebesar Rp58,81 miliar, dengan kenaikan sebesar Rp11,47 miliar atau 24,22% dibandingkan tahun buku sebelumnya, yaitu 2024, yang berjumlah Rp47,35 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha yang signifikan dan adanya upaya efisiensi biaya selama tahun berjalan.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Selama tahun buku 2025, Perusahaan mencatat total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp196,44 miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp29,60 miliar atau 17,74% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, yaitu 2024, yang berjumlah Rp166,84 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan laba tahun berjalan.

Meanwhile, other operating expenses in 2025 were recorded at Rp3.82 billion, representing a decrease of Rp3.22 billion or 45.74% compared to Rp8.80 billion in 2024. The decline was due to the absence of provisions for tax restitution expenses.

Finance Income and Expenses

In fiscal year 2025, the Company recorded finance income of Rp17.41 billion, an increase of Rp1.24 billion or 7.66% compared to Rp16.17 billion in 2024. This increase was driven by higher deposit interest income.

Finance expenses in 2025 amounted to Rp9.38 billion, representing a decrease of Rp1.77 billion or 15.90% compared to Rp11.15 billion in 2024. This decrease was mainly due to lower interest expenses on right-of-use asset leases.

Profit Before Corporate Income Tax

In fiscal year 2025, profit before corporate income tax amounted to Rp255.25 billion, an increase from Rp214.19 billion in 2024. This growth was driven by higher operating revenue from the Company's core business activities, along with successful cost efficiency measures implemented throughout the year. In addition, increased sales volume and more optimal management of operating expenses also contributed to the improvement in pre-tax profit.

Income for the Year

In fiscal year 2025, the Company recorded income for the year of Rp196.44 billion, an increase of Rp29.60 billion or 17.74% compared to Rp166.84 billion in 2024. As a consequence of this increase, corporate income tax expense rose to Rp58.81 billion in 2025, up by Rp11.47 billion or 24.22% from Rp47.35 billion in 2024. This increase was driven by significant revenue growth and cost efficiency efforts during the year.

Total Comprehensive Income for the Current Year

During fiscal year 2025, the Company recorded total comprehensive income of Rp196.44 billion, an increase of Rp29.60 billion or 17.74% compared to Rp166.84 billion in 2024. This increase was in line with the growth in profit for the year.

Laba Per Lembar Saham

Pada tahun buku 2025, Perusahaan mencatat peningkatan nilai laba per lembar saham menjadi Rp37,22. Nilai tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp5,60 atau 17,71% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, yaitu 2024, yang tercatat sebesar Rp31,62. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba bersih usaha.

Earnings Per Share

In the 2025 financial year, the Company recorded an increase in earnings per share to Rp37.22. This represents an increase of Rp5.60, or 17.71%, compared to the previous fiscal year, 2024, which was recorded at Rp31.62. This increase was due to increased net operating profit.

ARUS KAS

Dalam laporan keuangan yang disusun untuk tahun buku 2025, Perusahaan mencatat posisi kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar Rp554,13 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp81,04 miliar atau 17,13% apabila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun buku 2024, yang mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp473,08 miliar. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh perluasan implementasi sistem Auto Collection di area Bayah dan meningkatnya aktivitas Collecting Piutang.

CASH FLOW

In the financial statements for fiscal year 2025, the Company recorded cash and cash equivalents at year-end of Rp554.13 billion, representing an increase of Rp81.04 billion or 17.13% compared to Rp473.08 billion at the end of fiscal year 2024. This change was primarily driven by the expanded implementation of the Auto Collection system in the Bayah area and increased receivables collection activities

Ikhtisar Laporan Arus Kas 2024-2025
Cash Flow Statement Summary 2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi* Cash Flow from Operating Activities	355.728	309.406	26.721	7,97
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi Cash Flow for Investing Activities	(29.710)	(26.148)	3.562	13,62
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan* Cash Flows for Financing Activities*	(244.975)	(218.990)	5.934	2,48
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Increase in Cash and Cash Equivalents	81.042	64.268	16.774	26,10
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	473.084	408.816	64.268	15,72
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	554.126	473.084	81.042	17,13

*) Reklasifikasi
*) Reclassification

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun buku 2025, Perusahaan membukukan arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar Rp355,73 miliar. Kinerja tersebut mencerminkan peningkatan dibandingkan posisi pada tahun buku 2024 yang membukukan nilai Rp329,46 miliar. Secara persentase, terdapat peningkatan sebesar 7,97% atau setara Rp26,27 miliar. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh adanya penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan percepatan penagihan piutang di tahun 2025.

Cash Flows from Operating Activities

In fiscal year 2025, the Company recorded net cash generated from operating activities of Rp355.73 billion. This performance reflects an increase compared to Rp329.46 billion in fiscal year 2024, representing a rise of 7.97% or Rp26.27 billion. This increase was mainly driven by higher cash receipts from customers, supported by accelerated receivables collection in 2025.



Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun buku 2025, Perusahaan mencatat nilai bersih sebesar Rp29,71 miliar. Realisasi ini menunjukkan peningkatan sebesar 13,62% atau Rp3,56 miliar dibandingkan capaian tahun buku 2024 yang mencatat nilai Rp26,15 miliar. Perubahan tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas *docking* kapal yang menambah nilai aset tetap di tahun 2025.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Selama tahun buku 2025, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp244,98 miliar. Kinerja ini mencerminkan peningkatan sebesar 2,48% atau senilai Rp5,93 miliar apabila dibandingkan dengan hasil pada tahun buku 2024 yang membukukan nilai sebesar Rp239,04 miliar. Faktor utama yang memengaruhi perubahan ini adalah peningkatan pembayaran liabilitas sewa di tahun 2025.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang atau kredit pada tahun buku 2025 dapat dianalisis melalui indikator yang menggambarkan kapasitas pelunasan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian tersebut disajikan sebagai berikut.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Dalam mengevaluasi tingkat kecukupan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, acuan utama yang digunakan adalah rasio likuiditas. Ukuran likuiditas ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas menggambarkan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan memanfaatkan Kas dan Setara Kas yang tersedia. Sementara itu, rasio lancar menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek melalui pemanfaatan Aset Lancar.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash used in investing activities in fiscal year 2025 amounted to Rp29.71 billion, representing an increase of 13.62% or Rp3.56 billion compared to Rp26.15 billion in fiscal year 2024. This change was primarily due to increased docking activities, which contributed to the addition of fixed assets in 2025.

Cash Flow from Financing Activities

During fiscal year 2025, net cash used in financing activities amounted to Rp244.98 billion, reflecting an increase of 2.48% or Rp5.93 billion compared to Rp239.04 billion in fiscal year 2024. This change was mainly influenced by higher lease liability payments in 2025.

DEBT SERVICING CAPABILITY AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The Company's ability to meet its debt obligations in fiscal year 2025 can be analyzed through indicators that reflect its capacity to settle both short-term and long-term liabilities, as outlined below.

Short-Term Debt Servicing Capability

In evaluating the Company's ability to meet short-term obligations, the primary references are liquidity ratios, namely the cash ratio and the current ratio. The cash ratio reflects the Company's ability to meet short-term liabilities using available cash and cash equivalents, while the current ratio indicates the Company's ability to fulfill short-term obligations through the utilization of current assets.

Tabel Rasio Likuiditas 2024-2025
Liquidity Ratio 2024-2025

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
Rasio Kas Cash Ratio	**158%**	134%	24%
Rasio Lancar Current Ratio	**289%**	265%	24%
Rasio Cepat Quick Ratio	**283%**	259%	24%

Rasio Kas

Per 31 Desember 2025, rasio kas Perusahaan berada pada level 158%, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada tahun buku 2024 yang tercatat sebesar 134%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek melalui Kas dan Setara Kas mengalami peningkatan pada tahun 2025, yang dipengaruhi oleh penerimaan dari pelanggan atas pelayanan jasa.

Cash Ratio

As of December 31, 2025, the Company's cash ratio stood at 158%, higher than the 134% recorded for the 2024 fiscal year. This indicates that the Company's ability to meet its short-term obligations through cash and cash equivalents improved in 2025, driven by revenue from customers for services rendered.

Rasio Lancar

Pada tahun buku 2025, rasio lancar Perusahaan mencapai 289%, yang mencerminkan tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun buku 2024 yang tercatat sebesar 265%. Hasil tersebut menggambarkan peningkatan kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan memanfaatkan Aset Lancar pada tahun 2025, yang disebabkan oleh kenaikan aset lancar Perusahaan.

Current Ratio

In fiscal year 2025, the Company's current ratio reached 289%, higher than 265% in fiscal year 2024. This indicates an improved ability to settle short-term liabilities using current assets, driven by an increase in the Company's current assets.

Rasio Cepat

Rasio cepat Perusahaan pada tahun buku 2025 tercatat sebesar 283%, menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, yaitu 2024, yang berada pada level 259%. Peningkatan ini dipicu oleh meningkatnya aset likuid Perusahaan.

Quick Ratio

The Company's quick ratio in fiscal year 2025 was recorded at 283%, an increase compared to 259% in fiscal year 2024. This improvement was driven by higher liquid assets.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Dalam menilai kapasitas Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban, khususnya kewajiban jangka panjang, digunakan indikator solvabilitas. Rasio ini berfungsi sebagai ukuran untuk mengevaluasi kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan seluruh liabilitasnya apabila seluruh aset dilikuidasi.

Ability to Pay Long-Term Debt

In assessing the Company's capacity to fulfill all obligations, particularly long-term obligations, solvency indicators are used. This ratio serves as a measure to evaluate the Company's ability to settle all its liabilities if all assets are liquidated.

Tabel Rasio Solvabilitas 2024-2025
Solvency Ratio 2024-2025

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
Liabilitas terhadap Aset Debt to Assets Ratio (DAR)	21%	22%	-1%
Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (DER)	26%	28%	-2%

Liabilitas Terhadap Aset

Pada tahun buku 2025, rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan mencapai 21%, yang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan capaian tahun buku sebelumnya yang berada pada tingkat 22%. Perubahan tersebut mencerminkan terdapat penurunan kewajiban Perusahaan disertai kenaikan aset.

Debt to Asset

In fiscal year 2025, the Company's debt-to-assets ratio stood at 21%, reflecting a decrease from 22% in fiscal year 2024. This change indicates a reduction in liabilities alongside an increase in total assets.

Liabilitas Terhadap Ekuitas

Per 31 Desember 2025, Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan tercatat sebesar 26%, lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun buku 2024 yang sebesar 28%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kenaikan ekuitas yang berasal dari laba Perusahaan disertai penurunan liabilitas.

Debt to Equity

As of December 31, 2025, the Company's debt-to-equity ratio stood at 26%, down from 28% at the end of the 2024 fiscal year. This indicates that the increase in equity resulting from the Company's profits was accompanied by a decrease in liabilities.



Tingkat Kolektibilitas Piutang

Evaluasi terhadap tingkat kolektibilitas piutang mencerminkan efektivitas Perusahaan dalam mengonversi piutang menjadi kas sepanjang tahun berjalan. Efisiensi penagihan dapat dilihat melalui peningkatan perputaran piutang serta perbaikan rata-rata periode penagihan (*average collection period*) dibandingkan tahun buku sebelumnya.

Receivables Collectability

The evaluation of the collectability of accounts receivable reflects the Company's effectiveness in converting accounts receivable into cash throughout the current year. The efficiency of collection can be seen through an increase in accounts receivable turnover and an improvement in the average collection period compared to the previous fiscal year.

Rasio Aktivitas
2024-2025
Activity Ratio
2024-2025

Uraian Description	2025	2024
Receivable Turn Over (kali) Receivable Turn Over (times)	**4 Kali** 4 Times	3 Kali 3 Times
Average Collection Period (hari) Average Collection Period (days)	**94 Hari** 94 Day	129 Hari 129 Day

Pada tahun buku 2025, *receivable turn over* tercatat sebesar 4 kali, meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi tahun buku 2024 yang menunjukkan tingkat perputaran sebesar 3 kali. Selanjutnya, *average collection period* terealisasi sebesar 94 hari pada tahun buku 2025, lebih rendah dibandingkan capaian tahun buku 2024 sebesar 129 hari. Kondisi tersebut disebabkan oleh optimalisasi pengelolaan piutang yang semakin membaik.

In fiscal year 2025, the accounts receivable turnover ratio was recorded at 4 times, an increase compared to the 2024 fiscal year, which showed a turnover ratio of 3 times. Furthermore, the average collection period was 94 days in fiscal year 2025, lower than the 129 days recorded in fiscal year 2024. This improvement is attributed to increasingly effective receivables management.

Untuk piutang usaha Perusahaan pada tahun buku 2025 dibandingkan tahun buku 2024, berdasarkan kelompok umur piutang, rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

For the Company's accounts receivable in fiscal year 2025 compared to fiscal year 2024, based on the age group of receivables, the complete details are as follows:

Tabel Umur Piutang Usaha
2024-2025
Trade Receivables
2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal	Persentase Percentage
Belum jatuh tempo* Not yet due	**196.800**	233.599	(36.799)	(15,75)
Telah jatuh tempo Overdue				
▪ 1 sampai dengan 30 hari ▪ 1-30 days	**112.868**	29.699	83.169	280,04
▪ 31 sampai dengan 60 hari ▪ 31-60 days	**14.270**	67.763	(53.493)	(78,94)
▪ 61 sampai dengan 90 hari ▪ 61-90 days	**1.364**	2.447	(1.083)	(44,26)
▪ Lebih dari 90 hari ▪ Over 90 days	**45.367**	71.074	(25.707)	(36,17)
Total piutang usaha* Total trade receivables	**370.669**	404.582	(33.91)	(8,38)
Penyisihan penurunan nilai Allowance for impairment	**(10.176)**	(6.773)	(3.402)	(50,22)
Total Piutang Usaha Neto* Total Trade Receivables – Net	**360.493**	**397.808**	**(37.316)**	**(9,38)**

*) Reklasifikasi
*) Reclassification

Berdasarkan tabel di atas, total piutang usaha neto Perusahaan pada tahun buku 2025 berjumlah Rp360,49 miliar, menurun sebesar Rp37,32 miliar atau 9,38% dibandingkan realisasi tahun buku 2024 yang sebesar Rp397,81 miliar.

Dari total piutang usaha neto tersebut, piutang yang belum jatuh tempo pada tahun buku 2025 tercatat sebesar Rp196,80 miliar, menurun sebesar Rp36,80 miliar atau 15,75% dibandingkan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp233,60 miliar.

Sementara itu, piutang usaha yang telah jatuh tempo 1 sampai dengan 30 hari berjumlah Rp112,87 miliar pada tahun buku 2025, meningkat sebesar Rp83,17 miliar atau 280,04% dibandingkan capaian tahun buku 2024 sebesar Rp29,70 miliar.

Untuk piutang usaha dengan umur jatuh tempo 31 sampai dengan 60 hari, nilai yang tercatat pada tahun buku 2025 adalah Rp14,27 miliar, menurun Rp53,49 miliar atau 78,94% dibandingkan dengan tahun buku 2024 sebesar Rp67,76 miliar.

Piutang usaha dengan jatuh tempo 61 sampai dengan 90 hari pada tahun buku 2025 menunjukkan angka sebesar Rp1,36 miliar, menurun Rp1,08 miliar atau 44,26% apabila dibandingkan tahun buku sebelumnya yang sebesar Rp2,45 miliar.

Sedangkan piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari tercatat sebesar Rp45,37 miliar di tahun buku 2025, menurun Rp25,71 miliar atau 36,17% dibandingkan realisasi tahun buku 2024 sebesar Rp71,07 miliar.

Adapun penyisihan penurunan nilai pada tahun buku 2025 tercatat sebesar Rp10,18 miliar, mengalami peningkatan Rp3,40 miliar atau 50,22% dibandingkan tahun buku 2024 yang berjumlah minus Rp6,77 miliar.

Pada Laporan *Audited* 2025 terdapat reklasifikasi atas beberapa akun, diantaranya Aset Kontrak yang sebelumnya merupakan kategori Pendapatan yang akan masih diterima menjadi Belum Difakturkan (*Unbilled*) yang saat ini masuk ke dalam kategori Piutang Usaha.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Rincian Struktur Modal

Modal yang bersumber dari saham yang dimiliki pemilik entitas induk merupakan bagian dari modal yang dikelola oleh Perusahaan. Pengelolaan modal ini diarahkan untuk menjaga rasio solvabilitas tetap sehat, sehingga operasional bisnis dapat berjalan optimal dan nilai bagi pemegang saham dapat dimaksimalkan. Perusahaan senantiasa menyesuaikan struktur permodalannya dengan dinamika kondisi ekonomi yang terjadi.

Based on the table above, the Company's total net accounts receivable for the 2025 fiscal year amounted to Rp360.49 billion, a decrease of Rp37.32 billion or 9.38% compared to the 2024 fiscal year realization of Rp397.81 billion.

Of the total net accounts receivable, accounts receivable that are not yet due in the 2025 fiscal year are recorded at Rp196.80 billion, a decrease of Rp36.80 billion or 15.75% compared to the previous fiscal year, which amounted to Rp233.60 billion.

Meanwhile, trade receivables that are 1 to 30 days past due amounted to Rp112.87 billion in the 2025 fiscal year, an increase of Rp83.17 billion or 280.04% compared to the 2024 fiscal year realization of Rp29.70 billion.

For accounts receivable with maturities of 31 to 60 days, the value recorded in the 2025 fiscal year is Rp14.27 billion, a decrease of Rp53.49 billion or 78.94% compared to the 2024 fiscal year amount of Rp67.76 billion.

Accounts receivable with a maturity of 61 to 90 days in the 2025 fiscal year amounted to Rp1.36 billion, a decrease of Rp1.08 billion or 44.26% compared to the previous fiscal year of Rp2.45 billion.

Meanwhile, accounts receivable that are more than 90 days past due were recorded at Rp45.37 billion in the 2025 fiscal year, a decrease of Rp25.71 billion or 36.17% compared to the 2024 fiscal year realization of Rp71.07 billion.

The allowance for impairment in the 2025 fiscal year was recorded at Rp10.18 billion, a decrease of Rp3.40 billion or 50.22% compared to the 2024 fiscal year, which amounted to minus Rp6.77 billion.

In the 2025 Audited Report, several accounts have been reclassified, including Contract Assets, which were previously categorized as Revenue to Be Received and have now been reclassified as Unbilled, which is currently included in the Trade Receivables category.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure Details

Capital sourced from shares owned by the parent entity's owners is part of the capital managed by the Company. The management of this capital is aimed at maintaining a healthy solvency ratio, so that business operations can run optimally and value for shareholders can be maximized. The Company constantly adjusts its capital structure to the dynamics of economic conditions.



Tabel Komposisi Struktur Modal 2024-2025
Capital Structure Composition 2024-2025

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(figures in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025		2024		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	**350.802**	**20,46%**	354.135	21,46%	(3.333)	(0,94)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	**3.921**	**0,23%**	6.736	0,41%	(2.815)	(41,79)
Total Liabilitas Total Liabilities	**354.723**	**20,69%**	360.871	21,87%	(6.148)	(1,70)
Ekuitas Equity	**1.359.794**	**79,31%**	1.289.110	78,13%	70.684	5,48
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	**1.714.517**	**100,00%**	1.649.981	100,00%	64.536	3,91

Komposisi Struktur Modal Tahun 2025 dan 2024

Pada tahun buku 2025, komposisi struktur modal mencerminkan bahwa ekuitas tercatat sebesar 79,31%, sementara 20,69% merupakan liabilitas. Persentase tersebut berubah dibandingkan tahun buku sebelumnya, yaitu 2024, ketika ekuitas tercatat sebesar 78,13% dan utang berada pada level 21,87%. Komposisi tersebut menggambarkan kinerja keuangan terhadap operasional Perusahaan di dominasi oleh modal dibandingkan dengan utang.

Capital Structure Composition for 2025 and 2024

In the 2025 fiscal year, the capital structure composition shows that equity accounted for 79.31%, while liabilities accounted for 20.69%. These percentages differ from the previous fiscal year, 2024, when equity stood at 78.13% and debt was at 21.87%. This composition illustrates that the Company's financial performance is dominated by equity rather than debt.

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Dalam mengelola modal, Perusahaan berfokus pada pemeliharaan rasio modal yang solid agar kegiatan usaha dapat berkelanjutan dan imbal hasil bagi pemegang saham dapat dioptimalkan. Perusahaan juga berupaya menjaga kesinambungan operasional dengan mempertimbangkan keseimbangan ideal antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas. Pendekatan tersebut diarahkan untuk mencapai struktur modal yang optimal sekaligus menekan biaya permodalan sehingga nilai bagi para pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan.

Management Policy on Capital Structure

In managing capital, the Company focuses on maintaining a solid capital ratio so that business activities can be sustainable and returns for shareholders can be optimized. The Company also strives to maintain operational continuity by considering the ideal balance between the level of debt and equity position. This approach is aimed at achieving an optimal capital structure while reducing capital costs so that value for stakeholders can continue to be increased.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, suatu transaksi dianggap material jika nilainya mencapai 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Namun, sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menemukan adanya ikatan material terkait investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak ada rincian informasi mengenai jenis ikatan, nama pihak pelaksana, tujuan ikatan, sumber dana, mata uang yang menjadi denominasi, dan proteksi risiko mata uang asing yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

According to the provisions of Article 3(1) of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities, a transaction is considered material if its value reaches 20% or more of a public company's equity. However, throughout 2025, the Company did not identify any material commitments related to capital asset investments. Therefore, no detailed information regarding the type of agreement, the name of the executing party, the purpose of the agreement, the source of funds, the currency of denomination, or foreign currency risk protection can be presented in this Annual Report.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Sebagai bagian dari pengembangan usaha, kegiatan investasi memegang peranan penting. Perusahaan melakukan investasi pada barang modal melalui pengalokasian dana untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap. Aksi investasi tersebut ditujukan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perusahaan pada periode mendatang.

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Types and Value of Capital Goods Investment

As part of business development, investment activities play an important role. The company invests in capital goods by allocating funds to acquire or improve fixed assets. These investments are intended to generate long-term benefits that are expected to increase the value of the company in the future.

Tabel Investasi 2025
2025 Investment Table

Nama Program Program Name	**Kebutuhan Dana (Rp Miliar)** Funding Requirements (Rp Billion)	**Nilai Kontrak (Rp Miliar)** Contract Value (Rp Billion)	**Progres Pekerjaan s.d. Desember 2025** Project Progress as of December 2025	**Serapan Investasi (Rp Miliar)** Investment Absorption (Rp Billion)	**RKAP 2025 (Rp Miliar)** 2025 Budget Plan (Rp Billion)	**Serapan RKAP 2025 (Rp Miliar)** Budget Execution for 2025 (Rp Billion)	**Serapan RKAP 2025** Budget Execution for 2025
1	2	3	4	5 = (3 X 4)	6	7	8 = (7 : 6)
Investasi 1: (Pengajuan Baru 2024) 1 Unit Kapal Tunda 2 X1600Hp & 1 Unit Kapal Tunda 2 X 1200Hp Investment 1: (New Proposal for 2024) 1 Tugboat (2 x 1,600 hp) & 1 Tugboat (2 x 1,200 hp)	148,80	0,95	0,51%	0,76	1,00	0,32	31,80%
Investasi 2: *Repowering* Mesin Bantu Kiri Kanan Kt Bima 035 Min.175 Kva Investment 2: Repowering of the Left and Right Auxiliary Engines on the Bima 035, 175 kVA	3,40	3,37	69,00%	2,33	3,40	2,33	68,47%
Investasi 3: Modifikasi Sistem Propulsi *Waterjet* Menjadi Fpp 2 Unit Motor Pandu Investment 3: Modification of the Waterjet Propulsion System to a 2-Unit FPP Thruster System	6,00	5,85	75,00%	4,39	5,30	3,80	71,74%
Jumlah Total	**158,20**	**10,17**		**7,47**	**9,70**	**6,45**	**66,48%**

Tujuan Investasi Barang Modal

Dalam rangka mendukung aktivitas operasional dan peningkatan kinerja, Perusahaan melaksanakan investasi pada barang modal. Dalam menjalankan kegiatan investasi tersebut, Perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Purpose of Capital Goods Investment

In order to support operational activities and improve performance, the Company invests in capital goods. In carrying out these investment activities, the Company always prioritizes the principles of prudence and accuracy as part of its commitment to maintaining business sustainability.



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sepanjang periode pelaporan, tidak terdapat informasi atau fakta material yang terjadi dan perlu diungkapkan. Perusahaan memastikan bahwa tidak ada peristiwa atau transaksi signifikan yang berdampak pada laporan keuangan atau kondisi usaha setelah tanggal tersebut. Dengan demikian, tidak ada penyesuaian atau pengungkapan tambahan yang perlu disampaikan terkait hal ini.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI 2025

Sebagai dasar pengelolaan usaha, Perusahaan menetapkan target yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 dengan mempertimbangkan perkembangan industri serta kondisi perekonomian. Penetapan target tersebut disusun berdasarkan sejumlah asumsi utama sebagai berikut.

Asumsi Dasar yang Digunakan untuk Menyusun Target

Asumsi Makro

Penyusunan RKAP Tahun 2025 mengacu pada proyeksi indikator ekonomi makro nasional yang dijadikan dasar dalam menetapkan asumsi-asumsi utama, dengan parameter sebagai berikut:

Asumsi Internal

Pada tahun 2025, Perusahaan telah menetapkan target finansial yang diharapkan dapat tercapai di tahun yang akan datang seperti yang tertuang dalam RKAP 2025. Penetapan target tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi internal sebagai berikut:

1. Perusahaan menargetkan penciptaan nilai ekonomis yang diukur melalui parameter tingkat kembalian investasi sesuai RKAP 2025. Target ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan modal secara efisien dan menghasilkan imbal hasil yang kompetitif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS OCCURRING AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

During the reporting period, no material information or events occurred that required disclosure. The Company confirms that no significant events or transactions have occurred since that date that would affect the financial statements or the Company's financial condition. Accordingly, no adjustments or additional disclosures are required in this regard.

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIZATION FOR 2025

As a basis for business management, the Company sets targets as outlined in the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), taking into account industry developments and economic conditions. These targets are set based on the following key assumptions.

Basic Assumptions Used to Set Targets

Macro Assumptions

The preparation of the 2025 RKAP refers to projections of national macroeconomic indicators, which are used as the basis for determining key assumptions, with the following parameters:

Indikator Indicator	**RKAP 2025** 2025 RKAP
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth (%)	**5,20**
Inflasi (%) Inflation (%)	**2,50**
Suku Bunga (%) Interest Rate (%)	**7,00**
Nilai Tukar Kurs (Rp/USD) Exchange Rate (Rp/USD)	**Rp16.000**
Harga Minyak Mentah (USD/barel) Crude Oil Price (USD/barrel)	**USD82 per barel**
Harga Solar Industri (Rp/barel) Industrial Diesel Price (IDR/barrel)	**Rp19.000**

Internal Assumptions

In 2025, the Company has set financial targets that are expected to be achieved in the coming year as outlined in the 2025 RKAP. These targets are based on the following internal assumptions:

1. The Company aims to create economic value, measured by the return on investment in accordance with the 2025 Annual Business Plan. This target reflects the Company's commitment to optimizing the efficient use of capital and generating competitive returns for all stakeholders in support of long-term business growth.

2. Ekspansi usaha yang berkesinambungan diukur melalui pertumbuhan EBITDA dari arus kas operasi (CFO), pencapaian *Net Profit* yang optimal, serta distribusi Dividen kepada pemegang saham. Perusahaan menargetkan pertumbuhan yang konsisten guna memperkuat posisi bisnis dan memberikan nilai tambah bagi investor sesuai RKAP 2025.
3. Perusahaan menjaga struktur permodalan yang sehat dengan *financing debt to invested capital* pada kisaran 15%–45% dan *financing debt to* EBITDA pada 1–3 kali, disertai target peningkatan kinerja EBITDA, EBITDA Margin, *Operating Ratio*, *Cash Ratio*, ROE, ROI, ROA, dan *Collection Period* sesuai RKAP 2025.
4. Perusahaan mengantisipasi risiko keuangan berupa potensi kenaikan biaya BBM sebesar 16% akibat regulasi pencampuran FAME menjadi B40. Sebagai mitigasi, Perusahaan menerapkan strategi *Cost Effectiveness* BBM melalui analisis penggunaan BBM, optimalisasi program HG dan SC, serta monitoring implementasi standar konsumsi BBM secara berkelanjutan sesuai RKAP 2025.

2. Sustained business expansion is measured by EBITDA growth from cash flow from operations (CFO), the achievement of optimal net profit, and the distribution of dividends to shareholders. The company aims for consistent growth to strengthen its business position and deliver value to investors in accordance with the 2025 Business Plan.
3. The company maintains a sound capital structure with a debt-to-invested-capital ratio in the range of 15%–45% and a debt-to-EBITDA ratio of 1–3 times, along with targets to improve EBITDA, EBITDA margin, operating ratio, cash ratio, ROE, ROI, ROA, and collection period in accordance with the 2025 Business Plan.
4. The Company anticipates financial risks in the form of a potential 16% increase in fuel costs due to the regulation mandating the blending of FAME into B40. As a mitigation measure, the Company is implementing a fuel cost-effectiveness strategy through fuel usage analysis, optimization of the HG and SC programs, and ongoing monitoring of fuel consumption standards in accordance with the 2025 Annual Business Plan.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Adapun perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan berdasarkan RKAP Tahun 2025 dengan realisasi tahun buku 2025, adalah sebagai berikut:

Comparison Between Target and Realization for 2025

The comparison of the achievement of several targets set based on the 2025 RKAP with the realization in the 2025 fiscal year is as follows:

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2025
Comparison Between Target and Realization for 2025

Uraian Description	Realisasi 2025 (Rp-Juta) 2025 Realization (Rp-Million)	Target 2025 (Rp-Juta) 2025 Target (Rp-Million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2025 (%) Realization Achievement Against 2025 Target (%)
Pendapatan Usaha Revenues	1.474.808	1.372.099	107,49%
Laba Usaha Operating Profit	247.221	238.929	103,47%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	255.251	239.035	106,78%
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	196.438	186.448	105,36%
Struktur Modal Capital Structure			
Aset Assets	1.714.517	1.549.193	110,67%
Liabilitas Liabilities	354.723	192.132	184,62%
Ekuitas Equity	1.359.794	1.357.060	100,20%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	1.714.517	1.549.193	110,67%

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Perusahaan pada tahun buku 2025 menunjukkan hasil yang solid. Hal tersebut tercermin dari pendapatan usaha yang terealisasi sebesar Rp1.474,81 miliar atau mencapai 107,49% dari target sebesar Rp1.372,10 miliar. Capaian pendapatan usaha yang lebih tinggi dibandingkan target terutama dipengaruhi oleh pengembangan bisnis dan raihan peluang yang lebih besar oleh Perusahaan. Perusahaan

Overall, the Company's financial performance in fiscal year 2025 demonstrated solid results. This is reflected in operating revenue, which reached Rp1,474.81 billion, or 107.49% of the target of Rp1,372.10 billion. The target achievement that is higher than target was mainly driven by business development initiatives and the Company's ability to capture greater opportunities. The Company also recorded operating profit of Rp247.22 billion, equivalent



juga membukukan laba usaha sebesar Rp247,22 miliar, setara dengan 103,47% dari target laba usaha sebesar Rp238,93 miliar. Hal ini disebabkan oleh capaian pendapatan Perusahaan yang diperoleh dari aktivitas perusahaan atas kontribusi dari peningkatan produksi dan pengelolaan beban usaha yang lebih optimal. Selain itu, laba sebelum pajak penghasilan badan terealisasi sebesar Rp255,25 miliar atau mencapai 106,78% dari target sebesar Rp239,04 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan capaian laba usaha. Adapun laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp196,44 miliar, atau setara dengan 105,36% dari target laba tahun berjalan sebesar Rp186,45 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh capaian pendapatan usaha yang signifikan dan efisiensi biaya operasional.

to 103.47% of the target of Rp238.93 billion. This was attributable to The Company's revenue generated from its business activities, driven by increased production and more efficient management of operating expenses. In addition, profit before corporate income tax amounted to Rp255.25 billion, or 106.78% of the target of Rp239.04 billion, driven by an increase in operating profit. Meanwhile, profit for the year was recorded at Rp196.44 billion, or 105.36% of the target of Rp186.45 billion, influenced by significant revenue growth and operational cost efficiency.

Dari aspek struktur modal, total aset Perusahaan pada tahun buku 2025 mencapai Rp1.714,52 miliar atau terealisasi sebesar 110,67% dari target sebesar Rp1.549,19 miliar. Kondisi tersebut terjadi antara lain karena kondisi pertumbuhan dan upaya perluasan pasar utama berasal dari aktivitas pendapatan dan investasi Perusahaan. Selanjutnya, total liabilitas Perusahaan pada tahun buku 2025 adalah sebesar Rp354,72 miliar atau mencapai 184,62% dari target sebesar Rp192,13 miliar. Di sisi lain, ekuitas pada tahun yang sama tercatat sebesar Rp1.359,79 miliar atau mencapai 100,20% dari target sebesar Rp1.357,06 miliar. Hal ini disebabkan oleh penambahan ekuitas atas laba bersih tahun berjalan dan adanya tambahan modal dari penjualan saham treasuri pada tahun 2025. Terakhir, total liabilitas dan ekuitas pada tahun buku 2025 mencapai nilai sebesar Rp1.714,52 miliar atau mencapai 110,67% dari target sebesar Rp1.549,19 miliar.

From the capital structure, the Company's total assets in the 2025 financial year reached Rp1,714.52 billion, or 110.67% of the target of Rp1,549.19 billion. This condition occurred, among others, due to market expansion initiatives and growth in the Company's revenue and investment. Furthermore, the Company's total liabilities in the 2025 financial year were Rp354.72 billion, or reached 184.62% of the target of Rp192.13 billion. On the other hand, equity in the same year was recorded at Rp1,359.79 billion, or reached 100.20% of the target of Rp1,357.06 billion. This was due to an increase in equity resulting from net income for the current year and additional capital from the sale of treasury shares in 2025. Finally, total liabilities and equity in the 2025 financial year recorded a value of Rp1,714.52 billion, or reached 110.67% of the target of Rp1,549.19 billion.

PROYEKSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN

Untuk 1 (tahun) ke depan, Perusahaan telah menetapkan sejumlah proyeksi yang hendak dicapai, dan telah disesuaikan dengan perkembangan Perusahaan, serta kondisi industri dan ekonomi. Penetapan proyeksi ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi dasar seperti berikut ini.

PROJECTIONS FOR 1 (ONE) YEAR AHEAD

For 1 (one) year ahead, the Company has set a number of projections to be achieved, which have been adjusted to the Company's development and industry and economic conditions. These projections are based on the following basic assumptions.

Asumsi Dasar yang Digunakan untuk Menyusun Proyeksi

Asumsi Makro

Penyusunan proyeksi 2026 mengikuti asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan RKAP 2026, sebagai berikut:

Basic Assumptions Used to Develop Projections

Macro Assumptions

The preparation of the 2026 projections follows the macroeconomic assumptions used in the preparation of the 2026 RKAP, as follows:

Indikator *Indicator*	RKAP 2026 2026 RKAP
Pertumbuhan Ekonomi (%) Economic Growth (%)	**5,8%**
Inflasi (%) Inflation (%)	**3,5%**
Suku Bunga 10 Tahun (%) 10-Year Interest Rate (%)	**7,2%**
Nilai Tukar Kurs (Rp/USD) Exchange Rate (Rp/USD)	**Rp16.900**
Harga Minyak Mentah (USD) Crude Oil Price (USD)	**USD80 per barel**

Perbandingan antara Proyeksi Tahun 2026 dan Realisasi Tahun 2025

Comparison between 2026 Projections and 2025 Realizations

Tabel Perbandingan antara Proyeksi Tahun 2026 dan Realisasi Tahun 2025
Comparison Table between 2026 Projections and 2025 Realizations

Uraian Description	Proyeksi 2026 (Rp-Juta) 2026 Projection (Rp-Million)	Realisasi 2025 (Rp-Juta) 2025 Realization (Rp-Million)	Proyeksi 2026 terhadap Realisasi 2025 (%) 2026 Projection against 2025 Realization (%)
Pendapatan Usaha Revenues	1.653.100	**1.474.808**	112,09%
Laba Usaha Operating Profit	264.169	**247.221**	106,86%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Profit Before Corporate Income Tax	264.351	**255.251**	103,57%
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	203.550	**196.438**	103,62%
Struktur Modal Capital Structure			
Aset Assets	1.727.732	**1.714.517**	100,77%
Liabilitas Liabilities	295.768	**354.723**	83,38%
Ekuitas Equity	1.431.964	**1.359.794**	105,31%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity	1.727.732	**1.714.517**	100,77%

Sebagai bagian dari rencana pencapaian kinerja tahun mendatang, Perusahaan menetapkan proyeksi peningkatan performa keuangan pada tahun 2026. Total pendapatan usaha diperkirakan mencapai Rp1.653,10 miliar, atau setara 112,09% dibandingkan realisasi tahun buku 2025 sebesar Rp1.474,81 miliar. Perusahaan juga memproyeksikan laba usaha sebesar Rp264,17 miliar, atau mencapai 106,86% terhadap realisasi laba usaha tahun buku 2025 yang sebesar Rp247,22 miliar. Selain itu, laba sebelum pajak penghasilan badan diperkirakan dapat dicapai sebesar Rp264,35 miliar atau mencapai 103,57% terhadap realisasi tahun buku 2025 yang sebesar Rp255,25 miliar. Lebih lanjut, laba tahun berjalan diproyeksikan sebesar Rp203,55 miliar atau mencapai 103,62% dibandingkan realisasi laba tahun berjalan tahun buku 2025 sebesar Rp196,44 miliar.

As part of its performance plan for the coming year, the Company has set projections for growth in financial performance in 2026. Total operating revenue is expected to reach Rp1,653.10 billion, or 112.09% compared to the fiscal year 2025 realization of Rp1,474.81 billion. The Company also projects operating profit of Rp264.17 billion, representing 106.86% of the 2025 operating profit realization of Rp247.22 billion. In addition, profit before corporate income tax is projected to reach Rp264.35 billion, or 103.57% of the 2025 realization of Rp255.25 billion. Furthermore, profit for the year is projected at Rp203.55 billion, or 103.62% compared to the 2025 realization of Rp196.44 billion.

Dari aspek struktur modal, total aset Perusahaan pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp1.727,73 miliar atau mencapai 100,77% dibandingkan realisasi tahun buku 2025 sebesar Rp1.714,52 miliar. Jumlah liabilitas diproyeksikan sebesar Rp295,77 miliar atau mencapai 83,38% terhadap realisasi liabilitas tahun buku 2025 yang sebesar Rp354,72 miliar. Sementara itu, nilai ekuitas diperkirakan sebesar Rp1.431,96 miliar pada tahun 2026, atau mencapai 105,31% dibandingkan realisasi tahun buku 2025 yang sebesar Rp1.359,79 miliar. Di sisi lain, total liabilitas dan ekuitas diproyeksikan mencapai Rp1.727,73 miliar atau mencapai 100,77% terhadap realisasi tahun buku 2025 yang sebesar Rp1.714,52 miliar.

From a capital structure perspective, the Company's total assets in 2026 are estimated at Rp1,727.73 billion, or 100.77% compared to the 2025 realization of Rp1,714.52 billion. Total liabilities are projected at Rp295.77 billion, or 83.38% of the 2025 liabilities realization of Rp354.72 billion. Meanwhile, equity is expected to reach Rp1,431.96 billion in 2026, or 105.31% compared to the 2025 realization of Rp1,359.79 billion. On the other hand, total liabilities and equity are projected to reach Rp1,727.73 billion, or 100.77% of the 2025 realization of Rp1,714.52 billion.

Proyeksi Pembagian Dividen

Hingga saat ini, Perusahan tidak memiliki informasi mengenai proyeksi pembagian dividen pada tahun 2026 atas kinerja tahun buku 2025.

Dividend Distribution Projection

As of now, the Company has no information regarding the projected dividend payout for 2026 based on the performance of the 2025 fiscal year.



KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan Pembagian Dividen

Pembagian dan penyetoran dividen sepenuhnya menjadi hak Pemegang Saham. Penentuan besarnya dividen yang disetorkan kepada Pemegang Saham berdasarkan keputusan RUPS. Kebijakan mengenai besarnya dividen yang akan dibagikan ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

Pembagian Dividen dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025, Pemegang Saham memutuskan dan menyetujui antara lain mengenai penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2024 untuk dividen final sebesar Rp125,16 miliar. Adapun informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2025 atas kinerja tahun buku 2024, informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2024 atas kinerja tahun buku 2023, informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2023 atas kinerja tahun buku 2022, informasi pembagian dan pembayaran dividen di tahun 2022 atas kinerja tahun buku 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Dividend Policy

The distribution and payment of dividends are entirely the right of the Shareholders. The amount of dividends distributed to Shareholders is determined based on resolutions of the GMS. The policy regarding the amount of dividends to be distributed is determined by the Shareholders through the GMS.

Dividend Distribution Over the Last 5 (Five) Years

Based on the Annual GMS Resolution held on June 18, 2025, the Shareholders decided and approved, among other things, the use of the Company's net profit for the 2024 fiscal year for a final dividend of Rp125.16 billion. The information on the distribution and payment of dividends in 2025 for the 2024 fiscal year performance, information on the distribution and payment of dividends in 2024 for the 2023 fiscal year performance, information on the distribution and payment of dividends in 2023 for the 2022 fiscal year performance, and information on the distribution and payment of dividends in 2022 for the 2021 fiscal year performance, can be seen in the table below.

Tabel Pembagian Dividen per Tahun Buku 2021-2025
Dividend Distribution by Fiscal Year 2021-2025

Kebijakan Dividen Dividend Policy	Tahun Buku Fiscal Year				
	2025 (Dividen Interim) (Interim Dividend)	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Laba Tahun Berjalan (Rp) Net Income for the Year (Rp)	**140.672.157.636 (Laba Bersih per September 2025)** (Net Profit as of September 2025)	166.842.882.496	157.661.987.548	150.654.848.841	136.582.719.666
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) Cash Dividend (Rp)	**23.253.168.840**	125.165.015.236	118.252.444.833	113.028.441.246	109.281.933.623
Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	**4,40**	23,72	22,41	21,42	20,71
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Payout Ratio (%)	**16,53**	75,02	75,00	75,02	80,01
Keputusan RUPS GMS Resolution	**Berdasarkan Keputusan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 18 Desember 2025** Based on the Board of Directors' resolution approved by the Company's Board of Commissioners on December 18, 2025	Akta No. 25 dari Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 18 Juni 2025 Deed No. 25 by Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notary, dated June 18, 2025	Akta No. 31 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 12 Juni 2024 Deed No. 31 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary, dated June 12, 2024	Akta No. 26 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 21 Juni 2023 Deed No. 26 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary, dated June 21, 2023	Akta No. 43 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris, tanggal 23 Juni 2022 Deed No. 43 of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary, dated June 23, 2022
Tanggal Pengumuman Announcement Date	**19 Desember 2025** December 19, 2025	11 Desember 2024 (kas interim) & 19 Juni 2025 (kas final) December 11, 2024 (interim cash) & June 19, 2025 (final cash)	27 Desember 2023 (kas interim) & 13 Juni 2024 (kas final) December 27, 2023 (interim cash) & June 13, 2024 (final cash)	28 November 2022 (kas interim) & 23 Juni 2023 (kas final) November 28, 2022 (interim cash) & June 23, 2023 (final cash)	24 November 2021 (kas interim) & 27 Juni 2022 (kas final) November 24, 2021 (interim cash) & June 27, 2022 (final cash)
Tanggal Pembayaran Payment Date	**15 Januari 2026** January 15, 2026	10 Januari 2025 (kas interim) & 18 Juli 2025 (kas final) January 10, 2025 (interim cash) & July 18, 2025 (final cash)	26 Januari 2024 (kas interim) & 12 Juli 2024 (kas final) January 26, 2024 (interim cash) & July 12, 2024 (final cash)	23 Desember 2022 (kas interim) & 21 Juli 2023 (kas final) December 23, 2022 (interim cash) & July 21, 2023 (final cash)	24 Desember 2021 (kas interim) & 27 Juli 2022 (kas final) December 24, 2021 (interim cash) & July 27, 2022 (final cash)

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2025, Perusahaan tidak melaksanakan maupun tidak melaporkan adanya aksi penawaran umum. Penawaran umum perdana sendiri telah dilakukan pada tahun 2017, dengan penggunaan dana hasil penawaran yang direalisasikan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Berikut informasi terkait penawaran umum dan penerbitan saham tersebut:

1. Total Perolehan Dana Penawaran Umum

No	Uraian Description	Nominal (Rp)
1	Hasil Penawaran Umum Proceeds from Public Offering	461.892.470.000
2	Biaya Penawaran Umum Public Offering Expenses	22.360.645.000
3	Hasil Bersih Net Proceeds	439.531.825.000

2. Rencana Penggunaan Dana
Rencana Penggunaan dana hasil penawaran umum berdasarkan keputusan RUPS antara lain untuk:

No	Uraian Description	Nominal (Rp)
1	Investasi (Capex) Investment (Capex)	395.578.642.500
2	Modal Kerja (Opex) Working Capital (Opex)	43.953.182.500

3. Rincian Penggunaan Dana
Sampai dengan 31 Desember 2025, penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebesar Rp365.389.299.467,- dengan rincian penggunaan dana sebagai berikut:

No	Uraian Description	Nominal (Rp)
1	Investasi (Capex) Investment (Capex)	321.436.116.967 *)
2	Modal Kerja (Opex) Working Capital (Opex)	43.953.182.500

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

In 2025, the Company did not conduct or report any public offerings. The initial public offering was conducted in 2017, with the proceeds from the offering being used as planned.

The following is information related to the public offering and issuance of shares:

1. Total Proceeds from Public Offering

2. Planned Use of Proceeds
The planned use of proceeds from the public offering, based on the resolution of the GMS, includes:

3. Details of Fund Utilization
As of December 31, 2025, the total funds utilized from the Public Offering amounted to Rp365,389,299,467 with the following breakdown of fund utilization:

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEKERJA DAN/ ATAU MANAJEMEN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA (*Employee Stock Allocation*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan akan mengalokasikan saham kepada pekerja sebanyak-banyaknya 57.894.700 (lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang merupakan

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM

Based on the Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 14 dated October 11, 2017, made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company will allocate up to 10% (ten percent) of the Offered Shares during the Initial Public Offering (IPO) for the ESA (Employee Stock Allocation) Program. In this regard, the Company will allocate shares to employees totaling up to 57,894,700 (fifty-seven million eight hundred ninety-four thousand seven hundred) common shares, representing 4.76% (four point seventy-six percent) of the Offered Shares during



4,76% (empat koma tujuh enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham, dengan harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama program ESA adalah untuk memberikan kesempatan kepada pekerja untuk ikut memiliki Perusahaan melalui kepemilikan saham, sehingga meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta peningkatan produktivitas kerja yang akan berdampak positif pada kinerja korporasi secara keseluruhan dan peningkatan nilai Perusahaan yang dapat dinikmati oleh seluruh *stakeholders*. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program ESA akan ditentukan kemudian. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7, yaitu penjatahan pasti dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Alokasi dengan jatah pasti yang diberikan Perusahaan untuk membeli saham Penawaran Umum oleh Peserta Program ESA sebanyak-banyaknya 57.894.700 (lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus) saham. Peserta ESA dapat membeli saham sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima dengan skema pembayaran cicilan selama 12 bulan kepada Perusahaan. Harga pelaksanaan ESA sama dengan Harga Penawaran. Saham untuk Program ESA memiliki *lock-up period* selama 12 bulan, dimulai sejak tanggal Pencatatan Saham Perusahaan di Bursa Efek. Apabila terdapat sisa alokasi saham untuk Program ESA yang tidak dibeli oleh Peserta maka saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini.

Jumlah peserta Program ESA adalah sekitar 780 orang, kecuali bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Atas Usulan Direksi untuk Pelaksanaan *Employee Stock Allocation* (ESA) dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan Nomor DK/21/11/33/2017 tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Tidak berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris

2. Pekerja Aktif sampai keluarnya efektif OJK
3. Pekerja Aktif minimal sejak 1 November 2016

4. Tidak sedang terkena sanksi dari Perusahaan
5. Tidak dalam status Cuti di luar Tanggungan Perusahaan (CDTP)

Apabila peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/ persyaratan di atas sehingga menyebabkan gugurnya hak peserta program ESA pada waktu periode penawaran ESA, maka saham milik peserta ESA akan dilepas untuk dijual ke publik bersamaan dengan proses IPO.

Dan jika peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/ persyaratan di atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengunduran diri baik secara sukarela maupun pemecatan yang menyebabkan gugurnya hak peserta program ESA setelah periode penawaran ESA sampai dengan berakhirnya *lock-up period*, maka saham akan dikembalikan ke Perusahaan dan pembayaran cicilan Peserta yang telah dilakukan akan dikembalikan oleh Perusahaan.

the IPO, with the exercise price of the ESA being the same as the Offering Price.

The main objective of the ESA program is to provide employees with an opportunity to become shareholders in the Company, thereby increasing their sense of ownership and improving work productivity, which will positively impact the overall corporate performance and the increase in Company value that can be enjoyed by all stakeholders. The source of funding for the implementation of the ESA Program will be determined later. The implementation of the ESA Program will comply with the provisions set out in Regulation No. IX.A.7, which involves a fixed allocation with a maximum of 10% (ten percent) of the total Offered Shares in the IPO.

The fixed allocation provided by the Company for employees to purchase shares from the IPO under the ESA Program is up to 57,894,700 (fifty-seven million eight hundred ninety-four thousand seven hundred) shares. ESA participants can purchase shares according to the allocated amount, with a payment installment scheme over 12 months to the Company. The exercise price of the ESA is the same as the Offering Price. Shares under the ESA Program have a lock-up period of 12 months, starting from the Company's listing date on the Stock Exchange. If there are any remaining allocated shares in the ESA Program that are not purchased by participants, these shares will be offered to the public during the IPO.

The number of ESA participants is around 780 people, excluding the Board of Directors and Commissioners of the Company, who meet the requirements in accordance with the Board of Commissioners' Approval Letter for the Implementation of the Employee Stock Allocation (ESA) Program in connection with the Company's Initial Public Offering, Number DK/21/11/33/2017 dated November 20, 2017, as follows:

1. Not applicable to the Board of Directors and Commissioners
2. Active employees until the OJK's effective date
3. Active employees who have been employed since at least November 1, 2016
4. Employees not under any sanction from the Company
5. Employees not on leave outside the Company's responsibility (CDTP)

If an ESA participant does not meet the above criteria/ requirements, resulting in the forfeiture of the ESA program rights during the ESA offering period, their shares will be sold to the public along with the IPO process.

If an ESA participant does not meet the above criteria/ requirements, including but not limited to resignation, whether voluntary or due to dismissal, leading to the forfeiture of ESA program rights after the ESA offering period until the end of the lock-up period, the shares will be returned to the Company, and the installment payments made by the participant will be refunded by the Company.

Pelaksanaan atas program tersebut mencakup informasi antara lain:

1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya
2. Jumlah saham ESOP/MSOP yang ditawarkan adalah sebanyak 57.849.700 lembar dan realisasi sebanyak 7.473.700 lembar
3. Jangka waktu 12 bulan
4. Persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak
   a. Tidak berlaku bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
   b. Pekerja aktif sampai dengan keluarnya efektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
   c. Pekerja Aktif minimal terhitung sejak tanggal 1 November 2016;
   d. Pekerja tidak sedang terkena sanksi dari Perusahaan;
   e. Pekerja tidak dalam status cuti diluar tanggungan Perusahaan;
   f. Harga *exercise* Rp380/lembar.

The implementation of this program includes the following information:

1. The number of ESOP/MSOP shares and their realization
2. The number of ESOP/MSOP shares offered is 57,849,700 shares, and the realization is 7,473,700 shares
3. A 12-month period
4. The criteria for eligible employees and/or management
   a. Not applicable to the Board of Directors and Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk;
   b. Active employees until the effective date of the Financial Services Authority (OJK);
   c. Active employees who have been employed since at least November 1, 2016;
   d. Employees not under any sanction from the Company;
   e. Employees not on leave outside the Company's responsibility;
   f. Exercise price: Rp380 per share.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/ PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Informasi Material Mengenai Investasi

Selama tahun buku 2025, Perusahaan tidak memiliki informasi material yang berkaitan dengan kegiatan investasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi investasi yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Pada tahun 2025, Perseroan mulai menjalankan kegiatan operasional kapal di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. Ekspansi ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan, memperkuat portofolio pendapatan, serta mengoptimalkan kompetensi utama Perusahaan di bidang layanan kapal dan kepelabuhanan.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENTS, EXPANSIONS, DIVESTITURES, MERGERS/AMALGAMATIONS, ACQUISITIONS, AND DEBT/ CAPITAL RESTRUCTURING

Material Information Regarding Investments

In the 2025 fiscal year, the Company had no material information related to investment activities. Thus, there is no investment information that can be disclosed in this Annual Report.

Material Information Regarding Expansions

In 2025, the Company commenced vessel operations in Tarakan, North Kalimantan. This expansion was carried out to broaden the Company's service coverage, strengthen its revenue portfolio, and optimize its core capabilities in vessel and port-related services.

Uraian Description	Penjelasan Explanation
Tanggal transaksi/perjanjian Date of transaction/agreement	23 Desember 2024 December 23, 2024
Dasar transaksi Basis of transaction	Perjanjian No. PU.01.01/23/12/3/TPB/DUT/JAI-24 Agreement No. PU.01.01/23/12/3/TPB/DUT/JAI-24
Pihak yang melakukan transaksi Parties to the transaction	PT Jasa Armada Indonesia Tbk dan PT Langlang Laju Layang PT Jasa Armada Indonesia Tbk and PT Langlang Laju Layang
Objek transaksi Object of transaction	Penyediaan sarana bantu pemanduan berupa kapal tunda untuk pelayanan jasa penundaan kapal di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara Provision of pilotage support facilities in the form of tugboats for tug services at Tarakan Port, North Kalimantan
Nilai transaksi tahun 2025 Transaction value in 2025	Rp13,20 miliar Rp13.20 billion
Skema kerja sama Cooperation scheme	Perusahaan memperoleh 85% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal, sedangkan PT Langlang Laju Layang memperoleh 15% The Company receives 85% of gross revenue from tug services, while PT Langlang Laju Layang receives 15%
Jangka waktu Term	2 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian 2 years from the signing date of the agreement
Sifat hubungan Nature of relationship	Non-berelasi, tidak memiliki hubungan afiliasi, dan tidak mengandung benturan kepentingan Non-related, with no affiliated relationship and no conflict of interest
Rujukan laporan keuangan Reference to financial statements	Catatan 29 atas Laporan Keuangan Tahunan Auditan 2025 Note 29 to the 2025 Audited Financial Statements



Perusahaan menilai transaksi tersebut wajar karena dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengembangan layanan di wilayah Tarakan, menggunakan skema kerja sama komersial yang disepakati oleh para pihak, serta memberikan porsi pendapatan yang proporsional bagi Perusahaan, yaitu sebesar 85% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal. Transaksi ini juga selaras dengan kegiatan usaha utama Perusahaan dan mendukung peningkatan pendapatan usaha melalui perluasan layanan pada wilayah operasional baru.

Selain itu, transaksi dilakukan dengan pihak non-berelasi, tidak memiliki hubungan afiliasi, dan tidak mengandung benturan kepentingan. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam ketentuan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Pada tahun buku 2025, Perusahaan tidak memiliki informasi material yang berkaitan dengan divestasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi divestasi yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Informasi Material Mengenai Penggabungan/ Peleburan Usaha

Pada tahun buku 2025, Perusahaan tidak mencatat adanya informasi material terkait penggabungan atau peleburan usaha. Oleh karenanya, tidak terdapat informasi mengenai penggabungan atau peleburan usaha yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Sepanjang tahun buku 2025, Perusahaan tidak memiliki informasi material yang berkaitan dengan akuisisi. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat informasi akuisisi yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Informasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Pada tahun buku 2025, Perusahaan tidak mencatat adanya informasi material terkait restrukturisasi utang maupun modal. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai restrukturisasi utang atau modal yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 224 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan jika mereka:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk dari Perusahaan.

The Company considers the transaction to be reasonable as it was carried out based on the need to develop services in the Tarakan area, under a commercial cooperation scheme mutually agreed by the parties, and provides a proportionate revenue share for the Company, namely 85% of the gross revenue from tug services. The transaction is also aligned with the Company's main business activities and supports revenue growth through service expansion in a new operational area.

Furthermore, the transaction was conducted with a non-related party, with no affiliated relationship and no conflict of interest. Accordingly, the transaction did not require approval from independent shareholders as stipulated under the provisions on affiliated transactions and conflict of interest transactions.

Material Information Regarding Divestitures

In the 2025 fiscal year, the Company has no material information related to divestment. Thus, there is no divestment information that can be disclosed in this Annual Report.

Material Information Regarding Mergers/ Amalgamations

In the 2025 fiscal year, the Company did not record any material information related to business combinations or mergers. Therefore, there is no information regarding business combinations or mergers that can be presented in this Annual Report.

Material Information Regarding Acquisitions

Throughout the 2025 fiscal year, the Company had no material information related to acquisitions. Accordingly, there is no acquisition information to be presented in this Annual Report.

Material Information Regarding Debt/Capital Restructuring

In the 2025 fiscal year, the Company did not record any material information related to debt or capital restructuring. Thus, there is no information regarding debt or capital restructuring that can be presented in this Annual Report.

MATERIAL INFORMATION REGARDING TRANSACTIONS INVOLVING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES/RELATED PARTIES

Throughout 2025, the Company has conducted transactions with related parties as defined in PSAK No.224 on "Disclosure of Related Parties." A related party is a person or entity that is related to the reporting entity:

1. A person or close family member has a relationship with the Company if they:
   a. Have control or joint control over the Company;
   b. Have significant influence over the Company; or
   c. Are key management personnel of the Company or its parent entity.

2. Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:
   a. Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, Perusahaan; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;
   b. Suatu pihak adalah entitas asosiasi Perusahaan;
   c. Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan sebagai *venturer*;
   d. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan atau induknya;
   e. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d)
   f. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e);
   g. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.

2. A party is considered related to the Company if:
   a. Directly, or indirectly through one or more intermediaries, a party (i) controls, is controlled by, or is under joint control with the Company; (ii) has an interest in the Company that gives significant influence over the Company; or (iii) has joint control over the Company;
   b. A party is an associate of the Company;
   c. A party is a joint venture where the Company is a venturer;
   d. A party is a member of key management personnel of the Company or its parent;
   e. A party is a close family member of an individual described in item (a) or (d);
   f. A party is an entity controlled, jointly controlled, or significantly influenced by, or where significant voting rights are held by, directly or indirectly, individuals as described in item (d) or (e);
   g. A party is a post-employment benefit plan for the Company's employees or an entity related to the Company.

Tanggal, Nilai, dan Objek Transaksi

Transaksi dengan pihak afiliasi atau pihak berelasi dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun buku 2025, sebagai bagian dari aktivitas operasional dan pengelolaan keuangan Perusahaan. Nilai transaksi bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan dan pihak terkait, mencakup antara lain, piutang usaha, utang usaha, dan pendapatan dari pihak berelasi.

Rincian saldo dan nilai transaksi dengan pihak berelasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel-tabel yang telah disusun. Seluruh rincian tersebut telah diungkapkan secara lengkap dalam Catatan 25.

Date, Values, and Transaction Objects

Transactions with affiliated or related parties were conducted continuously throughout the 2025 financial year as part of the Company's operational activities and financial management. The transaction values varied depending on the type of activity and the related parties involved, including, among others, trade receivables, trade payables, and revenue from related parties.

Details of balances and transaction values with related parties recognized in the 2025 consolidated financial statements are presented in the tables that have been prepared. All such details have been fully disclosed in Note 25.

Pihak-pihak Berelasi dan Sifat Transaksi

Transaksi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

Berikut tabel yang menginformasikan nama pihak berelasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perusahaan untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Related Parties and Nature of Transactions

Transactions are carried out based on terms agreed upon by both parties, which may not be the same as transactions conducted with non-related parties. Material transactions and balances with related parties. Except when specifically disclosed as related parties, other parties mentioned in the notes to the financial statements are non-related parties.

The table below provides information on the names of related parties and the types of transactions with related parties conducted by the Company in 2025:

Sifat Relasi Nature of relationship	Nama Pihak Berelasi Name of related party	Jenis Transaksi Nature of transaction
Pemegang Saham Shareholders	PT Pelindo Jasa Maritim	Penjualan jasa dan dividen Sales of services and dividend
	PT Multi Terminal Indonesia	Dividen Dividend
	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Dividen Dividend
Entitas Induk SPJM Parent entity of SPJM	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Penjualan dan pembelian jasa dan imbalan kerja Sales and purchase of services, and employee benefits



Sifat Relasi Nature of relationship	Nama Pihak Berelasi Name of related party	Jenis Transaksi Nature of transaction
Entitas sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Entities under common control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Penjualan jasa Sales of services
	PT Pelindo Solusi Maritim	Penjualan dan pembelian jasa Sales and purchase of services
	PT Pendidikan Mairitim dan Logistik Indonesia	Pembelian jasa Purchase of services
	PT Electronic Data Interchange Indonesia	Pembelian jasa Purchase of services
	PT Pelindo Daya Sejahtera	Pembelian jasa Purchase of services
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Pembelian jasa Purchase of services
	PT Lamong Energi Indonesia	Pembelian barang Purchase of good
Entitas Berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan Banking services
	PT PLN Energi Gas	Penjualan jasa Sales of services
	PT Adhi Guna Putera	Penjualan jasa Sales of services
	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi Purchase of insurance services
	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi Purchase of insurance services
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa Sales of services
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa Sales of services
	PT Jawa Satu Power	Pembelian jasa Purchase of services

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Kebijakan Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Sebagai bagian dari tata kelola, mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak afiliasi atau pihak berelasi dilakukan melalui proses audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Untuk memastikan kewajaran transaksi serta kepatuhannya terhadap standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan atas transaksi afiliasi Perusahaan telah melalui proses audit oleh Auditor. Setiap transaksi material yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan/atau melibatkan pihak afiliasi atau pihak berelasi selalu dijalankan dengan prinsip kehati-hatian sesuai praktik bisnis umum, serta memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, dan PSAK No. 224 mengenai Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Explanation Regarding Fairness of Transactions

In the normal course of business, the Company engages in transactions with related parties due to ownership and/or management relationships. All related party transactions have been carried out based on mutually agreed policies and terms.

Policies on Review Mechanism and Fulfillment of Related Regulations and Provisions

As part of its governance practices, the review mechanism for transactions with affiliated or related parties is carried out through audit processes conducted by both internal and external auditors. To ensure the fairness of such transactions and their compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, reports on the Company's affiliated transactions have always been audited by the Auditor. Every material transaction that may potentially give rise to conflicts of interest and/or involve affiliated or related parties is always conducted with prudence in accordance with general business practices, while also complying with the provisions of OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, as well as PSAK No. 224 regarding Related Party Disclosures.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris terkait Transaksi telah Memenuhi *Arms-Length Principle*

Direksi menyatakan bahwa seluruh transaksi afiliasi telah dilaksanakan sesuai prosedur internal yang ketat, termasuk tahapan evaluasi manfaat ekonomi, perbandingan harga pasar (*benchmarking*), dan uji kelaziman usaha. Direksi memastikan bahwa proses pelaksanaan transaksi telah memenuhi prinsip independensi dan kehati-hatian, serta dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's-length principle*) yang berlaku umum di industri logistik dan pelabuhan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris baik secara langsung maupun melalui Komite Audit telah menerapkan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa setiap transaksi afiliasi dilakukan sesuai praktik bisnis yang lazim, termasuk penerapan prinsip kewajaran transaksi (*arm's length principle*).

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan untuk tahun 2024 dan 2025 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Transaksi dalam Laporan Posisi Keuangan
   a. Aset Pihak Berelasi

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian Description	2025	2024
Kas di Bank Cash in Bank	**554.126**	473.084
Piutang Usaha – Neto* Trade Receivables – Net*	**207.861**	276.766
Total Aset kepada Pihak Berelasi Total Assets to Related Parties	**761.987**	749.850
Persentase dari Total Aset Percentage of Total Assets	**44,44%**	45,45%

*) Disajikan kembali
*) Restated

b. Liabilitas Pihak Berelasi

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian Description	2025	2024
Utang Usaha Trade Payables	**9.870**	14.113
Total Liabilitas kepada Pihak Berelasi Total Liabilities to Related Parties	**9.870**	14.113
Persentase dari Total Liabilitas Percentage of Total Liabilities	**2,78%**	3,91%

c. Transaksi dalam Laporan Laba Rugi

(angka dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian Description	2025	2024
Pendapatan Pihak Berelasi Revenue from Related Parties	**965.832**	919.274
Persentase dari Total Pendapatan Percentage of Total Revenues	**65,49%**	68,35%

Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors on the Arms-Length Principle Fulfillment of Such Transactions

The Board of Directors states that all affiliated transactions were carried out in accordance with strict internal procedures, including evaluation of economic benefit, benchmarking on market price, and assessments of business feasibility. The Board of Directors ensures that the transaction processes have complied with the principles of independence and prudence, and have been conducted based on the arm's-length principle generally applicable in the logistics and port industries.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners, either directly or through the Audit Committee, has followed the procedures to ensure that every affiliated transaction is conducted in accordance with prevailing business practices, including the application of the arm's-length principle.

Realization of Related Party Transacrtions

The balances and transactions with related parties in relation to the Company's financial performance for 2024 and 2025 can be presented as follows.

1. Transactions in the Statement of Financial Position
   a. Related Party Assets

(figures in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

b. Liabilities to Related Parties

(figures in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

c. Transaction in Income Statement

(figures in millions of Rupiah, unless otherwise stated)



Komitmen Perusahaan atau Manajemen atas Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Terkait

Dalam melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, Direksi menyatakan bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*).

Adapun, Transaksi afiliasi adalah kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dalam laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 tanggal 13 Maret 2025.

Alasan Dilakukanya Transaksi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan alasan yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pengembangan operasional dan bisnis.

PROSPEK USAHA

Selain mempertahankan dan meningkatkan pelayanan pada wilayah operasional yang telah berjalan, pada tahun 2025 PT Jasa Armada Indonesia Tbk juga melakukan pengembangan pasar dan kerjasama usaha sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan usaha. Dimana pengembangan pasar dan kerjasama usaha yang dilakukan oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama penyediaan sarana bantu pemanduan berupa kapal tunda di Pelabuhan Tarakan. Kerjasama tersebut antara PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan PT Langlang Laju Layang selaku BUP penerima pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara;
2. Addendum Kerjasama dengan PT Trimegah Bangun Persada Tbk tentang Kerjasama Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Di Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Selain itu, bulan Februari 2025 (berlaku sampai dengan 15 Desember 2025);
3. Melakukan addendum kerjasama penyewaan kapal tunda dengan PT PGN LNG Indonesia (PLI) berupa kerjasama sewa on call harbour tug sebagai armada pendukung operasional di FSRU Lampung yang akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2026;
4. Addendum Kedua Kerjasama dengan PT Trimegah Bangun Persada Tbk tentang Kerjasama Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Di Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada Tbk. Selain itu, bulan Desember 2025 (berlaku sampai dengan 15 Desember 2027).

Commitment from the Company or Management on Material Transactions with Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties

In conducting material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with affiliated/related parties, the Board of Directors states that such transactions have undergone procedures deemed adequate and carried out in accordance with generally accepted business practices, including compliance with the arm's-length principle.

Affiliated transactions refer to business activities conducted in the course of generating operating revenue and carried out routinely, repeatedly, and/or continuously, based on the annual financial statements audited by Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro & Surja, as stated in Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 dated March 13, 2026.

Reasons for Transactions

The Company conducts transactions with related parties for the same reasons as transactions with third parties, and that is to fulfill its operational and business needs.

BUSINESS PROSPECT

In addition to maintaining and improving services in existing operational areas, in 2025 PT Jasa Armada Indonesia Tbk will also develop markets and business partnerships in an effort to increase business revenue. The market development and business partnerships undertaken by PT Jasa Armada Indonesia Tbk include the following:

1. Establishing cooperation in the provision of pilotage assistance in the form of tugboats at the Port of Tarakan. The cooperation is between PT Jasa Armada Indonesia Tbk and PT Langlang Laju Layang as the BUP recipient of the transfer of pilotage and ship delay services at the Port of Tarakan, North Kalimantan;
2. Addendum to the Cooperation Agreement with PT Trimegah Bangun Persada Tbk regarding Cooperation in Guidance and Delay Services at the Special Terminal of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. In addition, February 2025 (valid until December 15, 2025);
3. Conducting an addendum to the tugboat rental agreement with PT PGN LNG Indonesia (PLI) in the form of an on-call harbor tug rental agreement as an operational support fleet at the Lampung FSRU, which will expire on January 31, 2026;
4. Second Addendum to the Cooperation Agreement with PT Trimegah Bangun Persada Tbk regarding Cooperation in Guidance and Delay Services at the Special Terminal of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. In addition, December 2025 (valid until December 15, 2027).

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PT Jasa Armada Indonesia Tbk tahun 2025 dan berlanjut di tahun 2026 dalam rangka pengembangan pasar baru dan kerjasama usaha, di antaranya sebagai berikut:

1. Menjajaki kemungkinan pengembangan pasar baru di STS Sabang, Provinsi Aceh;
2. Menjajaki kerjasama penyewaan kapal tunda sebanyak 8 (delapan) unit dengan masing-masing 3200 HP dengan PT Soechi Line untuk mendukung kegiatan operasional di Kepulauan Nusa Tenggara (kegiatan kapal LNG);
3. Menjajaki dan melakukan pertemuan dengan PT Benua Laut Lepas untuk membahas rencana kerja sama pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Tanjung Carat, Palembang;
4. Rencana kerjasama dengan BUP penerima pelimpahan pemanduan dan penundaan kapal PT Bukit Prima untuk kerjasama pengelolaan pemanduan dan penundaan di lokasi Terminal PT Bukit Prima;
5. Penjajakan untuk rencana pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Morowali (PT IMIP);
6. Kerja sama dengan BUP penerima pelimpahan pemanduan dan penundaan kapal dan kerjasama penyediaan sarana dan prasarana pemanduan dan bisnis turunan Jasa Kepelabuhanan seperti:
   a. Kerjasama pelayanan penundaan berupa penyediaan kapal tunda di Pelabuhan Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
   b. Kerjasama pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di terminal khusus PT Cemindo Gemilang;
   c. Kerjasama pelayanan penundaan berupa penyediaan kapal tunda di Pelabuhan Weda, Provinsi Maluku Utara;
   d. Kerjasama pelayanan penundaan berupa penyediaan kapal tunda di Pelabuhan Meulaboh, Provinsi Aceh;
   e. Kerja sama dengan pemilik terminal khusus di area Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada Tbk;
   f. Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda dan Awak Kapal dengan Sistem *On Call* di Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT Bukit Asam Tbk.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sebagai entitas yang menjunjung kepatuhan, Perusahaan senantiasa memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan secara berkelanjutan memonitor setiap perubahan regulasi yang relevan untuk kemudian diimplementasikan dalam operasional. Adapun perubahan peraturan perundang-undangan yang memberikan dampak terhadap Perusahaan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The activities carried out by PT Jasa Armada Indonesia Tbk in 2025 and continuing in 2026 in the context of new market development and business cooperation include the following:

1. Exploring the possibility of developing new markets in STS Sabang, Aceh Province;
2. Exploring cooperation in the leasing of eight (8) tugboats, each with 3200 HP, with PT Soechi Line to support operational activities in the Nusa Tenggara Islands (LNG ship activities);
3. Exploring and conducting meetings with PT Benua Laut Lepas to discuss plans for cooperation in ship pilotage and delay services in Tanjung Carat, Palembang;
4. Plan for cooperation with BUP, the recipient of the transfer of pilotage and ship delay services from PT Bukit Prima, for cooperation in managing pilotage and delay services at the PT Bukit Prima Terminal location;
5. Exploration of plans to transfer ship pilotage and delay services in Morowali (PT IMIP);
6. Cooperation with BUP in receiving the transfer of ship pilotage and delay, and cooperation in providing pilotage facilities and infrastructure and derivative businesses Port services such as:
   a. Cooperation in tugboat services in the form of providing tugboats at the Port of Tarakan, North Kalimantan Province;
   b. Cooperation in pilotage and tugboat services at the special terminal of PT Cemindo Gemilang;
   c. Cooperation in tugboat services in the form of providing tugboats at the Port of Weda, North Maluku Province;
   d. Cooperation in tugboat services in the form of providing tugboats at the Port of Meulaboh, Aceh Province;
   e. Cooperation with the owner of the special terminal in the PT Trimegah Bangun Persada Tbk Special Terminal area;
   f. Cooperation in the provision of pilotage assistance in the form of tugboats and crew with an on-call system at the terminal for the private interests of PT Bukit Asam Tbk.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS AFFECTING THE COMPANY IN THE MOST RECENT FISCAL YEAR

As an entity that upholds compliance, the Company always ensures that all business activities are carried out in accordance with the provisions of laws and regulations. In its implementation, the Company continuously monitors any relevant regulatory changes for subsequent implementation in its operations. The changes in laws and regulations that will have an impact on the Company in 2025 are as follows:



Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Changes in Laws and Regulations

No	Peraturan Perundang-undangan Regulations	Pokok Perubahan Changes	Dampak Bagi Perusahaan Impact on the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.	▪ Penataan ulang secara signifikan tentang pembentukan Badan Pengelola Investasi (Danantara) untuk mengelola aset dan investasi BUMN. ▪ Restrukturisasi pengelolaan pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional untuk memisahkan fungsi investasi dan operasional BUMN. ▪ Memperjelas pemisahan pemisahan keuangan BUMN dari keuangan negara untuk menegaskan bahwa kerugian BUMN tidak otomatis menjadi kerugian negara . ▪ Significant reorganization of the establishment of the Investment Management Agency (Danantara) to manage state-owned enterprises' assets and investments. ▪ Restructuring of the management of the establishment of Investment Holding and Operational Holding to separate the investment and operational functions of state-owned enterprises. ▪ Clarifying the separation of state-owned enterprises' finances from state finances to emphasize that losses incurred by state-owned enterprises do not automatically become losses incurred by the state.	▪ Adanya perubahan struktur kepemilikan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku *holding Group* yang mana sebelumnya di bawah BP BUMN kemudian beralih di bawah *Holding* Investasi BPI Danantara. ▪ Perusahaan harus menyesuaikan arah kebijakan sesuai dengan arahan *Holding* Investasi BPI Danantara. ▪ There has been a change in the ownership structure of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as a holding group, which was previously under BP BUMN and has now been transferred to BPI Danantara Investment Holding. ▪ The Company must adjust its policy direction in accordance with the directives of BPI Danantara Investment Holding.	▪ Perusahaan harus menyesuaikan dan menyelaraskan arah kebijakan serta rencana bisnis termasuk strategi investasi dan operasional sesuai dengan arahan *Holding* Investasi BPI Danantara. ▪ The company must adjust and align its policy direction and business plans, including investment and operational strategies, in accordance with the directives of BPI Danantara Investment Holding.
2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 9 of 2025 concerning the Dematerialization of Equity Securities and the Management of Unclaimed Assets in the Capital Market	▪ Kewajiban penerbitan efek dalam bentuk tanpa warkat. ▪ Kewajiban Perusahaan dan pemegang Efek Bersifat Ekuitas (EBE) dengan warkat wajib melakukan Dematerialisasi EBE. ▪ Mekanisme pelaksanaan dematerialisasi EBE. ▪ Tenggat waktu pelaksanaan dematerialisasi EBEa adalah 5 tahun sejak tanggal berlakunya POJK ini yaitu 6 Mei 2030. ▪ ▪ Obligation to issue securities in book-entry form. ▪ Obligation of Companies and holders of Equity Securities (EBE) with certificates to carry out EBE dematerialization. ▪ Mechanism for implementing EBE dematerialization. ▪ The deadline for implementing EBE dematerialization is 5 years from the effective date of this POJK, namely May 6, 2030.	Perusahaan dan pemegang EBE dengan warkat wajib melakukan Dematerialisasi EBE maksimal hingga 6 Mei 2030. Jika tidak memenuhi/ melanggar ketentuan, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: ▪ peringatan tertulis; ▪ denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; ▪ pembatasan kegiatan usaha; ▪ pembekuan kegiatan usaha; dan/atau ▪ pencabutan izin usaha. ▪ Companies and holders of EBE with mandatory securities must carry out EBE dematerialization by May 6, 2030, at the latest. If the requirements are not met or violated, OJK may impose administrative sanctions in the form of: ▪ written warning; ▪ fine, which is the obligation to pay a certain amount of money; ▪ restriction of business activities; ▪ freezing of business activities; and/or ▪ revocation of business license.	Perusahaan telah menyampaikan kepada para pemegang EBE dengan warkat untuk melakukan dematerialisasi EBE. The company has informed EBE holders by letter to dematerialize their EBEs.
3	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises	Penegasan pemisahan fungsi regulasi (BP BUMN) dan investasi/operasional (BPI Danantara/*Holding*) Affirmation of the separation of regulatory functions (BP BUMN) and investment/ operational functions (BPI Danantara/ Holding)	Perubahan pola koordinasi antara Perusahaan dengan BP BUMN dan BPI Danantara. Changes in the coordination pattern between the Company and BP BUMN and BPI Danantara.	Perusahaan perlu menyelaraskan pola koordinasi antara Perusahaan dengan BP BUMN dan BPI Danantara. The company needs to align its coordination patterns between the Company and BP BUMN and BPI Danantara.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Changes in Laws and Regulations

No	Peraturan Perundang-undangan Regulations	Pokok Perubahan Changes	Dampak Bagi Perusahaan Impact on the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
4	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code	▪ Adanya ketentuan terkait tanggung jawab pidana korporasi, sanksi pidana, pihak yang bertanggung jawab ("PIC") dan prosedur penetapan pidana korporasi. ▪ Ketentuan Perjanjian penundaan penuntutan (*Deferred Prosecution Agreements* "DPA") sebagai pengakuan tanggung jawab pidana korporasi yang diberitahukan oleh JPU dan Pengadilan. ▪ Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*), apabila telah memenuhi syarat tertentu. ▪ Provisions related to corporate criminal liability, criminal sanctions, responsible parties ("PIC") and procedures for determining corporate criminal liability. ▪ Provisions of Deferred Prosecution Agreements (DPAs) as an acknowledgment of corporate criminal liability notified by the Public Prosecutor and the Court. ▪ Plea Bargaining, if certain conditions are met.	Adanya potensi risiko hukum pada Perusahaan akibat adanya pengakuan tanggung jawab pidana korporasi, termasuk potensi pengenaan pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan terhadap PIC Perusahaan baik itu Pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. There is a potential legal risk to the Company due to the recognition of corporate criminal liability, including the potential imposition of basic penalties in the form of fines and additional penalties on the Company's PIC, whether it be an executive who holds a functional position in the corporate organizational structure, a person who gives orders, a person who exercises control, or a beneficial owner.	Memperkuat tata kelola dan kepatuhan internal, kejelasan dalam penunjukan PIC, penguatan dan/atau pembaruan kebijakan dan SOP Perusahaan, serta kesiapan strategi penanganan perkara termasuk pemanfaatan mekanisme DPA dan keadilan restoratif untuk menekan risiko hukum yang akan dihadapi Perusahaan. Strengthening internal governance and compliance, clarity in the appointment of PICs, strengthening and/or updating Company policies and SOPs, and readiness of case handling strategies, including the use of DPA mechanisms and restorative justice to mitigate the legal risks faced by the Company.
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing	Penyempurnaan dan penguatan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui integrasi penuh ke Sistem OSS, penambahan cakupan izin sektor sebagai transparansi dan kemudahan berusaha. Improvement and strengthening of the Risk-Based Business Licensing system through full integration into the OSS System, addition of sectoral licensing coverage for transparency and ease of doing business.	Perusahaan perlu menyesuaikan dan memastikan data KBLI dan perizinan selalu terintegrasi dan mutakhir. Perusahaan akan fokus pada kepatuhan manajemen risiko agar tetap dapat beroperasi secara legal. The Company needs to adjust and ensure that KBLI data and licensing are always integrated and up to date. The Company will focus on risk management compliance in order to continue operating legally.	▪ Mengikuti sosialisasi selama masa transisi guna menerapkan kepatuhan perizinan. ▪ Melakukan penyesuaian terhadap aturan PP 28/2025 agar Perusahaan memenuhi ketentuan baru. ▪ Menggunakan jasa konsultan agar pemenuhan atas PP 28/2025 dapat tercapai. ▪ Participate in outreach activities during the transition period to implement licensing compliance. ▪ Make adjustments to PP 28/2025 regulations so that the Company complies with the new provisions. ▪ Use consulting services to ensure compliance with PP 28/2025.
6	POJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (menggantikan POJK 30/POJK.04/2015)	▪ Perluasan ruang lingkup dari sekadar pelaporan menjadi pengaturan komprehensif penggunaan dana. ▪ Pembatasan penggunaan dana maksimal 4 level entitas. ▪ Kewajiban pengungkapan target waktu realisasi dana dalam Prospektus dan LRPD. ▪ Pengaturan detail perubahan penggunaan dana (*threshold* 10% dan 20%). ▪ Kewajiban rekening khusus terpisah dan pembatasan penempatan dana. ▪ Larangan penggunaan dana sebagai jaminan utang atau *buyback*. ▪ Kewajiban publikasi bilingual di *website* Emiten dan Bursa. ▪ Perluasan jenis sanksi administratif termasuk pencabutan efektif pernyataan pendaftaran dan izin perseorangan.	Berdampak signifikan bagi perusahaan dikarenakan: ▪ Peningkatan beban *governance* dan *compliance*. ▪ Pembatasan fleksibilitas penggunaan dana IPO/*rights issue*/obligasi. ▪ Peningkatan risiko hukum dan reputasi bagi Direksi. ▪ Penguatan transparansi terhadap struktur grup dan layering entitas. ▪ Pengawasan *treasury* menjadi lebih ketat karena kewajiban rekening khusus dan pelaporan mutasi.	▪ Penyusunan matriks internal perubahan penggunaan dana berbasis *threshold* regulasi. ▪ Pembentukan *monitoring timeline* realisasi dana secara periodik. ▪ Penyusunan template *disclosure* bilingual standar. ▪ Peningkatan *awareness* Direksi melalui legal *briefing* berkala.



Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Changes in Laws and Regulations

No	Peraturan Perundang-undangan Regulations	Pokok Perubahan Changes	Dampak Bagi Perusahaan Impact on the Company	Upaya Mitigasi Mitigation Efforts
	POJK Number 40 of 2025 concerning the Use of Public Offering Proceeds (replacing POJK 30/ POJK.04/2015)	▪ Expansion of scope from mere reporting to comprehensive regulation of fund use. ▪ Restriction of fund usage to a maximum of 4 entity levels. ▪ Obligation to disclose the target time for fund realization in the Prospectus and LRPD. ▪ Detailed regulation of changes in fund usage (10% and 20% thresholds). ▪ Obligation to have separate special accounts and restrictions on fund placement. ▪ Prohibition on the use of funds as collateral for debt or buybacks. ▪ Obligation to publish bilingual information on the Issuer's and Exchange's websites. ▪ Expansion of types of administrative sanctions, including effective revocation of registration statements and individual licenses.	This will have a significant impact on companies due to: ▪ Increased governance and compliance burdens. ▪ Restrictions on flexibility in the use of IPO/rights issue/ bond funds. ▪ Increased legal and reputational risks for the Board of Directors. ▪ Strengthened transparency regarding group structure and entity layering. ▪ Tighter treasury supervision due to special account and transfer reporting requirements.	▪ Preparation of an internal matrix of changes in fund usage based on regulatory thresholds. ▪ Establishment of a periodic monitoring timeline for fund realization. ▪ Preparation of a standard bilingual disclosure template. ▪ Increased awareness among the Board of Directors through regular legal briefings.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Per 31 Desember 2025, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai penjelasan atau alasan dari perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya terhadap Perusahaan.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICY APPLIED BY THE COMPANY IN THE LAST FINANCIAL YEAR

As of December 31, 2025, the Company has not implemented any changes to its accounting policies. Therefore, there is no information regarding the rationale for such changes or their impact on the Company.

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

Sebagai acuan strategis dalam mencapai sasaran dan tujuan, Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode lima tahun. Penyusunan RJPP tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan yang meliputi aspek lingkungan, sosial, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Visi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2024-2027

Menjadi penyedia jasa marine terdepan dalam ekosistem maritim Indonesia serta global.

Misi Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2024-2027

Mewujudkan jasa *marine* yang andal, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan demi memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Deskripsi

1. JAI menyediakan layanan marine yang tersertifikasi serta sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
2. JAI menyediakan layanan marine yang unggul dan terintegrasi sebagai sebuah solusi jasa kepelabuhanan.
3. JAI menyediakan layanan marine yang tersebar dengan jangkauan Indonesia dan global, baik di pelabuhan milik Pelindo maupun non-Pelindo.

COMPANY LONG-TERM PLAN

As a strategic reference in achieving its goals and objectives, the Company has formulated a Long-Term Corporate Plan (RJPP) for a five-year period. The RJPP was formulated with consideration given to the principles of sustainability, which include environmental and social aspects, as well as the implementation of Good Corporate Governance.

Vision of the Company Long-Term Plan 2024–2027

To become a leading marine service provider in the Indonesian and global maritime ecosystem.

Mission of the Company Long-Term Plan 2024–2027

To provide reliable, safe, competitive, and sustainable marine services in order to maximize added value for all stakeholders.

Description

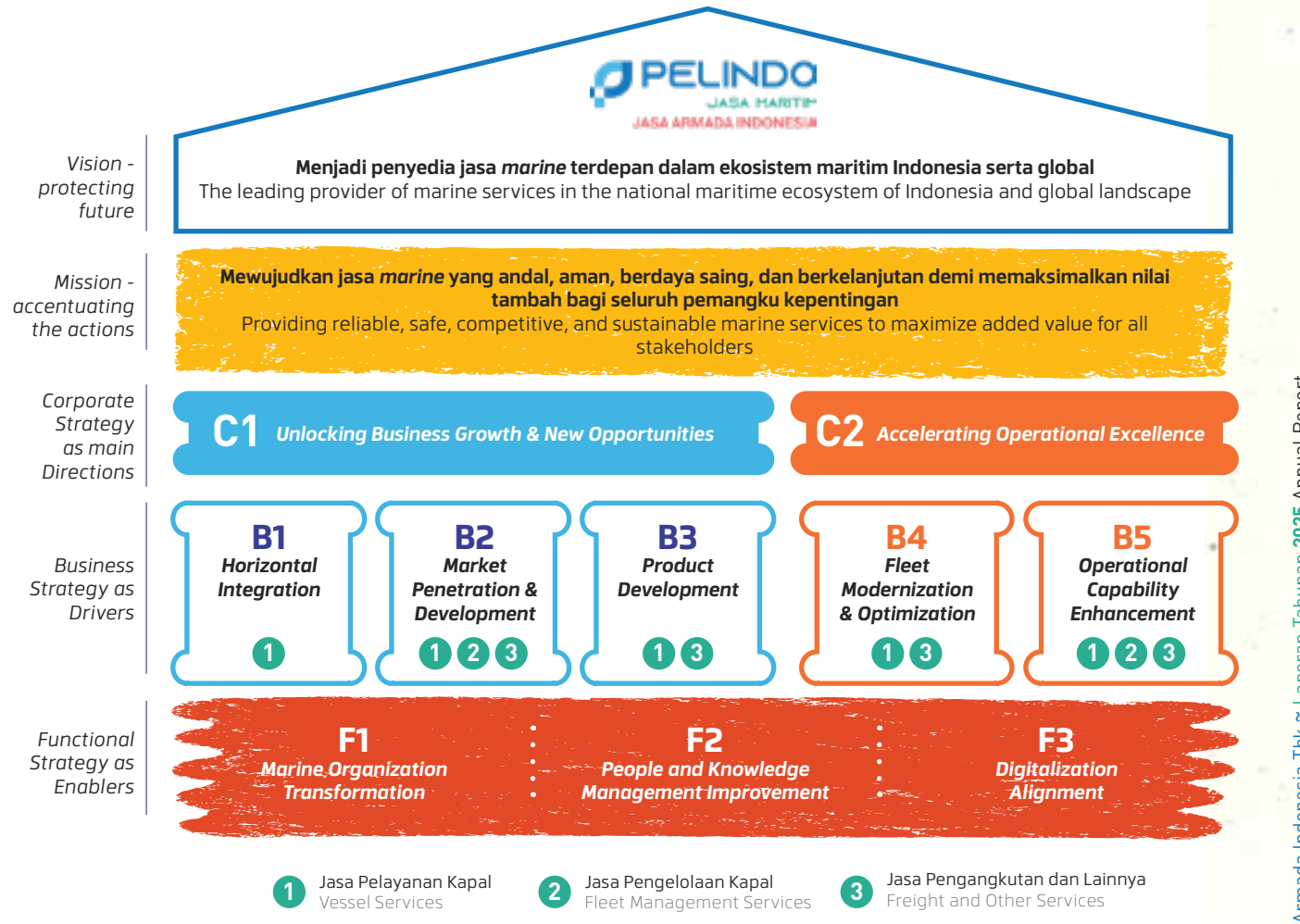
1. JAI provides certified marine services that comply with applicable safety standards.
2. JAI delivers excellent and integrated marine services as a port service solution.
3. JAI offers widespread marine services with coverage across Indonesia and globally, both at Pelindo-owned and non-Pelindo ports.

4. JAI berkomitmen untuk melakukan upaya ramah lingkungan pada rantai nilai perusahaan.
5. JAI berkomitmen untuk memaksimalkan penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan kinerja keuangan dan optimalisasi manajemen tata kelola.
6. JAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan menggunakan teknologi mutakhir serta memaksimalkan aksesibilitas melalui integrasi produk di sepanjang rantai nilai logistik guna memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.
7. JAI berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan konstruktif dalam meningkatkan kompetensi serta keterampilan seluruh pegawai.
8. JAI berkomitmen untuk memastikan kelancaran arus perdagangan dalam mendukung perekonomian Indonesia melalui efisiensi biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. JAI is committed to implementing environmentally friendly practices across its value chain.
5. JAI is dedicated to maximizing value creation for shareholders through improved financial performance and governance management optimization.
6. JAI is committed to continuously improving service quality by utilizing advanced technology and maximizing accessibility through product integration along the logistics value chain to meet the satisfaction of customers and partners.
7. JAI is committed to creating a supportive and constructive work environment to enhance the competence and skills of all employees.
8. JAI is committed to ensuring the smooth flow of trade in support of Indonesia's economy by improving logistics cost efficiency to enhance community welfare.

Sebagai bagian dari arah kebijakan strategis, Perusahaan menetapkan dua fokus utama korporat yang mencakup penguatan bisnis marine secara terintegrasi serta percepatan pencapaian *operational excellence*. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian visi perusahaan sebagai penyedia jasa marine yang andal dengan jangkauan di Indonesia dan global.

As part of its strategic policy direction, the Company has established two main corporate focuses, which include strengthening its integrated marine business and accelerating the achievement of operational excellence. This step is being taken to support the achievement of the Company's vision as a reliable marine service provider with a reach across Indonesia and globally.



PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Fungsi
Penunjang Bisnis
Business Support Function

Pengembangan SDM, penguatan sistem manajemen berstandar internasional, dan adopsi teknologi operasional berjalan selaras sebagai fondasi daya saing Perusahaan yang kokoh, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Human capital development, strengthening of internationally standardized management systems, and the adoption of operational technology have progressed in alignment, forming a solid, accountable, and sustainable foundation for the Company's competitiveness.







Sumber Daya Manusia
Human Resources



Sumber Daya Manusia memegang peranan sentral dalam menjaga kualitas layanan dan keandalan operasional PT Jasa Armada Indonesia Tbk sebagai perusahaan jasa maritim nasional. Dalam lingkungan industri yang terus berkembang dan menuntut standar keselamatan tinggi, Perusahaan menempatkan penguatan kompetensi, profesionalisme, serta budaya kerja yang adaptif sebagai prioritas utama. Perusahaan juga berupaya memastikan bahwa setiap insan JAI memiliki kemampuan dan ketangguhan untuk menjalankan tugasnya secara optimal, melalui berbagai program pengembangan, sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan. Komitmen ini menjadi fondasi dalam membangun organisasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi dinamika industri maritim, sekaligus mendukung keberlanjutan pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang.

Human Resources play a central role in maintaining the service quality and operational reliability of PT Jasa Armada Indonesia Tbk as a national maritime services company. Amid an industry environment that continues to evolve and demands high safety standards, the Company places the strengthening of competencies, professionalism, and an adaptive work culture as its top priorities. The Company also strives to ensure that every JAI personnel possesses the capability and resilience to perform their duties optimally, through various development programs, certifications, and welfare enhancement initiatives. This commitment serves as the foundation for building an excellent and competitive organization that is well prepared to navigate the dynamics of the maritime industry, while supporting the sustainable growth of the Company in the future.

KOMPOSISI PEKERJA

Komposisi tenaga kerja Perusahaan mencakup beberapa kategori, yaitu Pekerja Penugasan Pelindo berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penempatan Pekerja (*Secondment Agreement*), Pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta Tenaga Alih Daya melalui penyedia jasa alih daya.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perusahaan membukukan jumlah Direksi dan pekerja sebanyak 839 orang, terdiri atas 3 orang Direksi yang merupakan

EMPLOYEE COMPOSITION

The composition of the Company's workforce comprises several categories, namely Pelindo Seconded Employees based on a Worker Placement Cooperation Agreement (Secondment Agreement), employees under Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), and personnel recruited through outsourced service providers.

As of December 31, 2025, the Company recorded a total of 839 members of the BOD and employees, consisting of 3 BOD members seconded from Pelindo, 89 Pelindo

penugasan dari Pelindo, 89 orang Pekerja Penugasan Pelindo, 23 orang pekerja PKWT, serta 724 orang Tenaga Alih Daya. Rincian mengenai struktur Direksi dan seluruh kategori pekerja Perusahaan disajikan pada uraian berikut.

Secondment Employees, 23 PKWT employees, and 724 outsourced personnel. Details of the structure of the BOD and all categories of the Company's workforce are presented in the following section.

Status Pekerja Employee Status	**RKAP Tahun 2025 (orang)** RKAP 2025 (people)	**Realisasi Tahun 2025 (orang)** Realization 2025 (people)	**Realisasi Tahun 2024 (orang)** Realization 2024 (people)	**Capaian** Achievement	
				Tren Trend	**Deviasi** Deviation
	1	2	3	4 = (3-1) : 1	5 = 3 : 2
Direksi Penugasan Pelindo BOD Pelindo	2	3	2	0	0,67
Direksi Non Penugasan Pelindo BOD Non Pelindo	1	0	0	0	0
Pekerja Penugasan Pelindo Pelindo Secondment Employees	110	89	100	-0,09	1,12
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) (Fixed-Term Employment Agreements)	24	23	23	-0,04	1
Tenaga Alih Daya Outsourced Workers	716	724	692	-0,03	0,96
JUMLAH TOTAL	853	839	818	-0,16	3,75

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pekerja Perusahaan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,57%. Perubahan ini merupakan dampak dari penyesuaian pencatatan atas tenaga kerja pemborongan seperti *cleaning service* dan resepsionis, yang pada tahun 2025 diperhitungkan sebagai Tenaga Alih Daya. Dengan mempertimbangkan jumlah anggota Direksi dan seluruh pekerja yang pada tahun 2025 mencapai 839 orang, Perusahaan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja hingga 98% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya 1 pekerja yang meninggal dunia, 9 pekerja yang memasuki masa pensiun, 5 pekerja mutasi masuk, serta 5 pekerja yang menjalani mutasi ke luar Perusahaan.

The table shows that the Company's workforce increased by 2.57% in 2025. This change was influenced by the fact that in 2024, contract-based workers such as cleaning service staff and receptionists were not recorded. Taking into account the number of BOD members and all employees, which reached 839 people in 2025, the Company was able to fulfill 98% of its workforce requirements as stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). This achievement was influenced by several factors, including the passing of 1 employee, the retirement of 9 employees, and the transfer of 5 employees out of the Company.

Berdasarkan Jenis Pekerja (Operasional Langsung)

Formasi Anak Buah Kapal (ABK) dan Pandu merupakan elemen penting yang memastikan kelangsungan operasional dan mendukung aktivitas utama bisnis Perusahaan. Perubahan jumlah pekerja pada posisi ABK dan Pandu, baik yang berstatus sebagai Pekerja Penugasan Pelindo, pekerja PKWT, maupun Tenaga Alih Daya yang ditempatkan melalui kerja sama dengan mitra penyedia jasa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Based on Type of Worker (Direct Operational)

Ship Crew Members (ABK) and Pilots are essential elements in ensuring operational continuity and supporting the Company's core business activities. Changes in the number of personnel in ABK and Pilot positions, whether seconded from Pelindo, employed under PKWT agreement, or outsourced through cooperation with partners, can be explained as follows:



Jenis Pekerja Worker Types	Tahun Year 2025 (orang) (people)	2024 (orang) (people)
ABK Crew		
Pekerja Penugasan Pelindo Pelindo Secondment Worker	6	29
Tenaga Alih Daya Outsourced Workers	584	577
PANDU PILOT		
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) PKWT (Fixed-Term Employment Agreements)	8	8
Tenaga Alih Daya Outsourced Workers	7	8
JUMLAH OPERASIONAL LANGSUNG TOTAL DIRECT OPERATIONAL	605	622

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan mencerminkan kapasitas operasional sekaligus kesiapan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Keragaman struktur pekerja menunjukkan adanya berbagai keahlian dan peran yang saling melengkapi untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Perusahaan terus menjaga prinsip keadilan dalam pengelolaan SDM, yang ditunjukkan melalui distribusi pekerja berdasarkan rentang usia, tingkat pendidikan, hingga status kepegawaian. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya sudut pandang dan gagasan baru, tetapi juga meningkatkan kemampuan adaptasi Perusahaan terhadap dinamika industri. Latar belakang yang beragam tersebut menjadi kekuatan penting dalam mendorong sinergi antartim, sehingga Perusahaan dapat membangun fondasi bisnis yang kuat untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

The size of the Company's workforce reflects its operational capacity as well as its readiness to carry out business activities optimally. The diversity of the workforce structure demonstrates the presence of various complementary skills and roles that support the achievement of the Company's strategic objectives. The Company continues to uphold the principle of fairness in human resource management, as reflected in the distribution of employees by age range, educational background, and employment status. This diversity not only enriches perspectives and fosters new ideas, but also enhances the Company's ability to adapt to industry dynamics. Such diverse backgrounds shows an important strength in promoting cross-team synergy, enabling the Company to build a solid business foundation to support long-term growth.

Setiap tahun, Perusahaan membawa komitmen baru untuk meningkatkan kualitas layanan. Karena itu, Pengelola Human Capital PT Jasa Armada Indonesia Tbk berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan menjunjung integritas, dengan dukungan SDM yang memiliki kompetensi strategis dalam penyediaan, pengembangan, dan pengoperasian layanan pemanduan dan penundaan secara terintegrasi dan berkualitas. Inisiatif tersebut kemudian akan memperlancar proses pergerakan kapal dan mendukung arus distribusi barang secara berkesinambungan.

Each year, the Company renews its commitment to improving service quality. Accordingly, the Human Capital Management of PT Jasa Armada Indonesia Tbk strives to create a professional work environment that upholds integrity, supported by human resources with strategic competencies in the provision, development, and operation of integrated and high-quality port and logistics services. These initiatives are expected to facilitate vessel movements and support the seamless flow of goods distribution.

Pengelolaan SDM dengan Pihak Ketiga

Sebagai upaya memperkuat pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian visi serta misi Perusahaan, sebagian tugas tertentu dapat dialihkan kepada penyedia jasa eksternal. Berkat keterlibatan pihak ketiga tersebut, fungsi penunjang di lingkungan Perusahaan dapat dijalankan dengan lebih efektif oleh tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. Uraian mengenai Tenaga Alih Daya yang bekerja di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Human Resource Management with Third Parties

As part of efforts to strengthen human resource management in support of the achievement of the Company's vision and mission, certain tasks may be outsourced to external service providers. Through the involvement of these third parties, supporting functions within the Company can be carried out more effectively by personnel with expertise in their respective fields. Details of the outsourced personnel working within the Company are presented as follows:

Status Pekerja Worker Status	RKAP Tahun 2025 (orang) RKAP 2025 (people)	Realisasi Tahun 2025 (orang) Realization 2025 (people)	Realisasi Tahun 2024 (orang) Realization 2024 (people)	Capaian Achievement Tren Trend	 Deviasi Deviation
	1	2	3	4 = (3-1) : 1	5 = 3 : 2
ABK Crew	598	583	577	-0,04	0,99
Pandu Pilot	8	8	8	0	0
Tenaga Penunjang Lainnya Other Supporting Workers	110	133	107	-0,03	0,80
JUMLAH TOTAL	716	724	692	-0,03	0,96

Realisasi jumlah pekerja di luar kategori Pekerja Penugasan Pelindo dan PKWT pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 33 orang. Perubahan tersebut sejalan dengan evaluasi kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan Perusahaan untuk memastikan ketersediaan ABK dan Pandu, serta penyesuaian pencatatan terhadap tenaga penunjang lainnya, sehingga tetap mendukung arah strategi dan pertumbuhan kegiatan usaha.

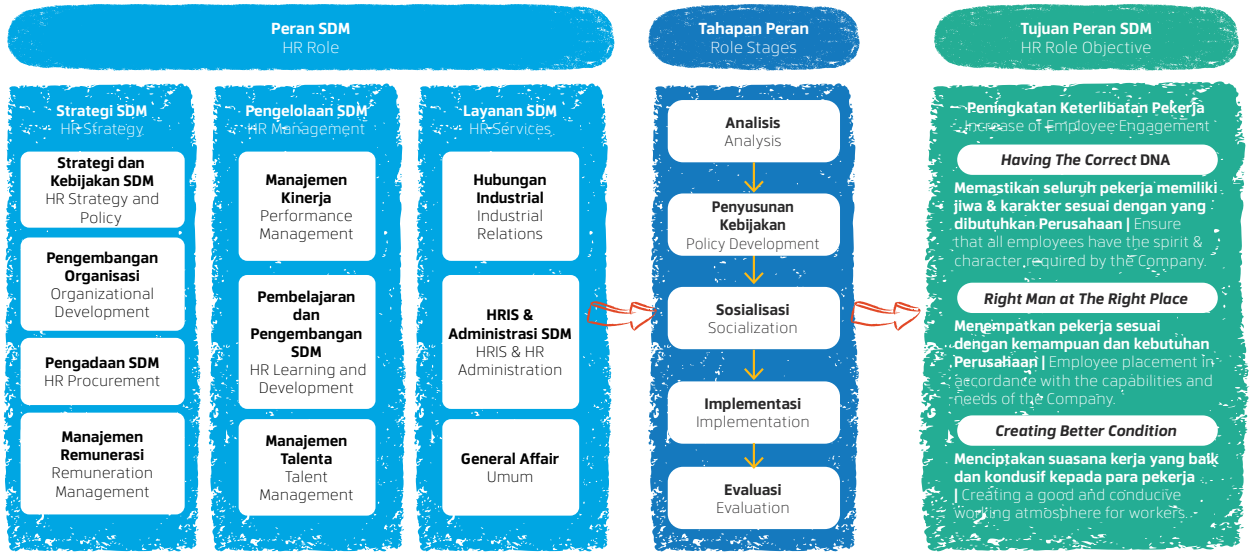
The total number of employees in addition to Pelindo Seconded Employees and PKWT employees increased by 33 people in 2025. This change was in line with the Company's evaluation of workforce requirements to ensure the availability of ABK, pilots, and other supporting workers to support the Company's strategic direction and business growth.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Perusahaan terbagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu Strategi SDM, Pengelolaan SDM, dan Layanan SDM. Pembagian ini disusun sesuai ketentuan dalam Kepmenaker 149 Tahun 2020 yang mengatur matriks peran Manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The human resource management within the Company is divided into 3 (three) functions, namely Human Resource Strategy, Human Resource Management, and Human Resource Services. This segregation is structured in accordance with Minister of Manpower Decree No. 149 of 2020, which regulates the matrix of human resource management roles based on the Indonesian National Work Competency Standards.



Program Strategis 2025

Langkah strategis Perusahaan dalam pengelolaan SDM dirumuskan oleh unit yang menjalankan Fungsi Strategi SDM. Unit ini bertanggung jawab dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi SDM, mengembangkan struktur organisasi, melaksanakan proses pengadaan SDM, serta mengelola sistem remunerasi.

Strategic Program in 2025

The Company's strategic initiatives in human resource management are formulated by the unit responsible for the HR Strategy Function. This unit is tasked with setting the direction of HR policies and strategies, developing the organizational structure, carrying out HR procurement processes, and managing the remuneration system.



Pengelolaan SDM

Perusahaan memberikan wewenang atas segala kebijakan terkait Manajemen Kinerja, Manajemen Pembelajaran dan Pengembangan SDM, serta Manajemen Talenta kepada Fungsi Pengelolaan SDM. Berikut kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025:

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi Portaverse sebagai *dashboard* yang digunakan di lingkungan Pelindo Group dalam menjalankan fungsi pengelolaan SDM, di antaranya:
   a. LMS (*Learning Management System*)
      i) Fitur ini digunakan untuk mengakses pelatihan baik secara berbayar maupun gratis.
      ii) Setiap Pekerja Penugasan Pelindo mendapatkan saldo senilai Rp3.500.000,00 tiap tahunnya untuk mengakses pelatihan dalam Portaverse.
      iii) Setiap Pekerja Penugasan Pelindo memiliki KPI untuk mencapai 50 jam belajar (*learning hour*) dalam tahun 2025.
      iv) Pekerja yang mengikuti pelatihan di luar *dashboard* Portaverse dapat melakukan klaim *learning hour* sehingga pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri atau dilaksanakan atas kebutuhan Perusahaan tetap tercatat dalam LMS.
   b. KMS (*Knowledge Management System*)
      i) Fitur ini digunakan untuk bersosialisasi dengan seluruh Pekerja Penugasan Pelindo.
      ii) Fitur ini terdiri dari: so*cial media, knowledge map, community of practice, community of interest*, dan *ask the expert*.
      iii) Setiap aktivitas yang dilakukan dalam fitur ini akan mendapatkan poin.
   c. TMS (*Talent Management System*)
      i) Fitur ini digunakan untuk mengelola kinerja individu pekerja yang terdiri dari KPI Individu dan Penilaian Perilaku.
      ii) Periode *monitoring* KPI dilakukan secara triwulanan, dimana skor akan diakumulasikan secara tahunan.

2. Perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja SDM secara objektif dan transparan. Hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan oleh Perusahaan sebagai tinjauan untuk menentukan arah pengembangan individu (*Individual Development Plant*). Penentuan KPI Individu dilakukan melalui proses *cascading* dari KPI Perusahaan, yang diturunkan menjadi KPI Divisi dan KPI Divisi diturunkan menjadi KPI Individu Kepala Departemen (DVP) hingga level staf.
3. Terkait Pembelajaran dan Pengembangan SDM, Perusahaan membagi sistem learning menjadi 2 (dua), yaitu: *Self Learning* dan *Corporate Learning*. Tujuan dari masing-masing program adalah untuk memberikan pengembangan kemampuan, pengetahuan, dan *skill* bagi SDM.
   a. *Self learning* yaitu pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dan dapat dilakukan klaim *learning hour* pada Portaverse secara mandiri sehingga tercatat historinya.

HR Management

The Company delegates authority over all policies related to Performance Management, Learning and Human Resource Development, and Talent Management to the Human Resource Management Function. The following activities were carried out throughout 2025:

1. Introduction of the Portaverse application as Pelindo's dashboard used to carry out HR management functions, including:
   a. LMS (Learning Management System)
      i) This feature is used to access both paid and free training programs;
      ii) Each Pelindo Secondment Employee receives an annual balance of Rp3,500,000 to access training through Portaverse;
      iii) Each Pelindo Secondment Employee has a KPI target of completing 50 learning hours in 2025;
      iv) Employees who participate in training outside the Portaverse dashboard may claim learning hours to record training conducted independently or as required by the Company.
   b. KMS (Knowledge Management System)
      i) This feature is used to socialize with all Pelindo Secondment Employees;
      ii) The feature includes: social media, knowledge map, community of practice, community of interest, and ask the expert;
      iii) Every activity conducted within this feature will earn points.
   c. TMS (Talent Management System)
      i) This feature is used to manage individual employee performance, consisting of Individual KPIs and Behavioral Assessment;
      ii) KPI monitoring is conducted on a quarterly.

2. The Company conducts evaluations of human resource performance objectively and transparently. The results of these assessments are used as a reference by the Company to determine development initiatives and organizational structuring needs. The performance appraisal process begins with the establishment of Company KPIs, which are then defined into KPIs for the Board of Directors. These KPIs are communicated to all VPs and subsequently cascaded down to DVPs and staff levels.
3. Regarding Learning and Development, the Company divides the learning system into 2 (two) categories: Self Learning and Corporate Learning. The objective of each program is to enhance the capabilities, knowledge, and skills of human resources.
   a. Self-learning refers to learning conducted independently, where employees can independently claim their learning hours on Portaverse so that the history is recorded.

b. *Corporate learning* terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:
   i) *Experiential Learning*
   Perusahaan telah menerapkan *job assignment* kepada beberapa pekerja sebagai pelaksana tugas baik pada posisi struktural maupun general.
   ii) *Social Learning*
   - Perusahaan telah menerapkan *coaching* dan *mentoring* pada sesi penilaian KPI Individu dari atasan ke bawahan secara *one-on-one*.
   - Perusahaan telah melaksanakan beragam sesi *knowledge sharing* seperti JANGKAR (JAI Ngajak Bicara), dan *Corporate Outlook* di akhir tahun.
   - Pekerja dapat melakukan *posting knowledge* pada fitur KMS Portaverse.

   iii) *Structured Learning*
   - Perusahaan mengimplementasikan pelatihan dan sertifikasi secara terstruktur untuk mendukung keberlangsungan operasional serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi.

4. Bentuk penghargaan atas kinerja sepanjang tahun 2025 diberikan melalui IPCM Award 2025 dengan memberikan *award* atas kategori *Best Employee, Best Division, Best Area, Best Fleet, Best Crew, Best Digital Content Creator, Best Innovation*.
5. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pekerja dan unit kerja di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk sepanjang tahun 2025, serta untuk meningkatkan engagement pekerja dalam mendukung pencapaian kinerja berkelanjutan pada tingkat individu, unit kerja, dan perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan IPCM *Award* Tahun 2025, dengan kategori *Best Employee Operational, Best Employee Non Operational, Best Pilot, Best Perwira Deck, Best Perwira Machine, Best Rating Deck, Best Rating Machine, Best Crew Pilot Boat, Best Tugboat, Best Pilot/Mooringboat, Best Division, Best Area, Best Leader.*

Layanan SDM

Perusahaan terus memastikan pemenuhan kebutuhan pekerja melalui Fungsi Layanan SDM, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Hubungan Industrial, pengelolaan HRIS dan administrasi ketenagakerjaan, serta layanan umum. Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan telah dijalankan oleh Fungsi Layanan SDM, antara lain:

1. Dalam kaitannya dengan hubungan Industrial, hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan SDM memainkan peran kunci dalam perjalanan Perusahaan meraih kesuksesan. Keterlibatan antara manajemen dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif, diwujudkan melalui keberadaan serikat pekerja di lingkungan Perusahaan. Adanya dialog terbuka serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, inisiatif untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dalam bentuk *Leadership Improvement Workshop* telah menjadi prioritas, dalam mendukung pertumbuhan

b. Corporate learning consists of 3 (three) aspects:
   i) Experiential Learning
   The Company has implemented job assignments for several employees to act as interim task executors in both structural and general positions.
   ii) Social Learning
   - The Company has implemented coaching and mentoring during individual KPI assessments in one-on-one sessions between supervisors and subordinates;
   - The Company has conducted various knowledge-sharing sessions such as JANGKAR (JAI Ngajak Bicara), CWS Learning, and Year-End Evaluations;
   - Employees can post knowledge through the KMS feature on Portaverse.

   iii) Structured Learning
   - The company implements structured training and certification programs to support operational continuity and ensure compliance with regulatory requirements.

4. As a form of appreciation for good performance within the Company, the IPCM Award 2025 was held, presenting awards in the categories of Best Employee, Best Division, Best Area, Best Fleet, Best Crew, Best Digital Content Creator, and Best Innovation.
5. As a token of appreciation for the performance of employees and work units within PT Jasa Armada Indonesia Tbk throughout 2025, and to enhance employee engagement in supporting the achievement of sustainable performance at the individual, work unit, and company levels, the Company is presenting the 2025 IPCM Awards, with the following categories: Best Operational Employee, Best Non-Operational Employee, Best Pilot, Best Deck Officer, Best Engine Officer, Best Deck Rating, Best Engine Rating, Best Pilot Boat Crew, Best Tugboat, Best Pilot/Mooring Boat, Best Division, Best Area, and Best Leader.

HR Services

The Company continues to ensure the fulfillment of workforce requirements through the HR Services Function, which is responsible for the implementation of Industrial Relations, the management of the HRIS and employment administration, as well as general services. Throughout 2025, various activities were carried out by the HR Services Function, including:

1. In terms of Industrial Relations, the harmonious relationship between the Company and its human resources plays a key role in the Company's journey toward success. Engagement between management and employees in creating a stable and productive work environment is manifested through the existence of a labor union within the Company. Open dialogue and effective conflict resolution mechanisms contribute significantly to increased productivity and employee well-being. Additionally, initiatives to strengthen employee skills and capacity in the form of Leadership Improvement Workshop have become a priority in supporting the Company's sustainable growth. The continuity of healthy industrial relations forms a solid



berkelanjutan Perusahaan. Kesinambungan hubungan industrial yang sehat menjadi landasan bagi pencapaian tujuan Perusahaan dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang.

2. Implementasi *Human Resource Information System* di Perusahaan dilakukan dengan implementasi beberapa sistem yang berjalan di Pelindo di antaranya: PEO sebagai *dashboard* korespondensi Perusahaan, Portaverse, SAP dan aplikasi *surrounding*.
3. Layanan kesehatan pekerja turut menjadi fokus Perusahaan demi memastikan Pekerja dalam kondisi sehat sehingga dapat bekerja dengan optimal. Beberapa program dilaksanakan di antaranya: *fit to work* kepada pekerja operasional, *medical check-up*, dan evaluasi layanan kesehatan yang lebih baik lagi. Sampai saat ini pelaksanaan *monitoring* kesehatan pekerja bekerja sama dengan PT Rumah Sakit Pelabuhan.
4. Program pendukung *wellbeing* pekerja lainnya yaitu pelaksanaan olahraga yang rutin dilaksanakan seperti bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, futsal, golf, bowling, dan padel; pelaksanaan *employee gathering* dan *talkshow* seputar *wellness* sehingga dapat meningkatkan rasa keterikatan pekerja pada Perusahaan.

Proses Rekrutmen

Sejalan dengan perkembangan Perusahaan, pemilihan individu yang tepat untuk menempati berbagai posisi menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Dalam rangka memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi, Perusahaan menerapkan proses seleksi yang disusun untuk menjaring kandidat yang paling sesuai, tidak hanya dari sisi kompetensi dan rekam jejak, tetapi juga dari keselarasan dengan nilai, budaya, dan arah Perusahaan. Seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan SOP PT Jasa Armada Indonesia Tbk tentang Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Pekerja Nomor: SOP-SDBP-01.

Penilaian Kinerja

Perusahaan menerapkan penilaian kinerja SDM secara terstruktur untuk memantau tingkat produktivitas dan kontribusi setiap pekerja. Proses evaluasi yang dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk melihat sejauh mana target kerja tercapai, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan karier, kebutuhan pelatihan, serta pemberian penghargaan bagi pekerja yang menunjukkan kinerja unggul. Penilaian tersebut dilaksanakan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI), yang pengisiannya dikelola melalui sistem Portaverse.

Kebijakan Pemberian Penghargaan

Apresiasi terhadap kinerja dan loyalitas pekerja menjadi unsur penting dalam membangun lingkungan kerja yang mendorong produktivitas. Oleh karena itu, Perusahaan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi yang telah diberikan. Salah satu wujud penghargaan tersebut adalah pemberian insentif kepada pekerja, yang disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

foundation for achieving corporate goals and long-term growth.

2. The implementation of the Human Resource Information System in the Company is carried out by utilizing several systems in use at Pelindo, including: PEO as the Company's correspondence dashboard, Portaverse, SAP, and surrounding applications.
3. Employee health services are also a focus of the Company to ensure that employees are in optimal health to perform their duties effectively. Several programs were implemented, including fit-to-work assessments for operational employees, medical check-ups, and evaluations to further improve health services. Health monitoring continues to be carried out in collaboration with PT Rumah Sakit Pelabuhan (Harbor Hospital).
4. Other employee wellbeing support programs include the regular organization of sports activities such as badminton, tennis, table tennis, futsal, golf, bowling, and padel, as well as employee gatherings and wellness-related talk show to strengthen employees' sense of engagement with the Company.

Recruitment Process

In line with the Company's development, the selection of the right individuals to fill various positions is a key element in maintaining business continuity and growth. To ensure these needs are met, the Company implements a structured selection process designed to attract the most suitable candidates, not only in terms of competence and track record, but also in alignment with the Company's values, culture, and strategic direction. All recruitment stages are conducted in accordance with PT Jasa Armada Indonesia Tbk's SOP on Employee Recruitment and Selection No. SOP-SDBP-01.

Performance Assessment

The Company implements a structured human resource performance assessment to monitor the level of productivity and contribution of each employee. The evaluation process is not only intended to measure the achievement of work targets, but also serves as a basis for determining career development directions, training needs, and the provision of rewards for employees who demonstrate outstanding performance. The performance assessment is conducted using Key Performance Indicators (KPIs), with data entry and management administered through the Portaverse system.

Reward Policy

Appreciation for employees' performance and loyalty is an important element in fostering a work environment that encourages productivity. Accordingly, the Company implements a reward policy as a form of recognition for the contributions made by its employees. One form of such recognition is the provision of incentives to employees, which are distributed in accordance with the applicable regulations within the Company.

Kebijakan yang Mengatur Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan berkomitmen menerapkan Kebijakan Sistem Manajemen Terpadu secara konsisten melalui upaya pengelolaan penerapan Sistem Manajemen Terpadu guna mencapai sasaran peningkatan berkesinambungan terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja. Komitmen tersebut telah tertuang pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/25/10/2/ARD/DUT/JAI-24 tentang Pedoman Sistem Manajemen Terpadu di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja meliputi:

1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, penyakit akibat hubungan kerja, dengan pengendalian potensi bahaya dan penerapan budaya K3;
2. Melarang keras membeli, menjual, memiliki, dan menggunakan obat terlarang/narkoba atau alkohol di lingkungan kerja Perusahaan dan mencegah penyebaran penyakit HIV-Aids di lingkungan Perusahaan;
3. Menumbuhkan kesadaran kerja yang mengutamakan mutu pelayanan, K3, keamanan, efektivitas penggunaan energi, pelestarian lingkungan dan keberlanjutan bisnis.

Peraturan tersebut ditetapkan untuk memaksimalkan nilai Perusahaan melalui layanan yang berkualitas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab, agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, keberadaan peraturan tersebut memberikan sebuah keyakinan dan jaminan kepada klien atau pun mitra, bahwa Perusahaan telah mempunyai dan memiliki kontrol terhadap Sistem Manajemen yang baik sesuai standar nasional dan internasional.

Berkat komitmen tersebut, pada tahun 2025 Perusahaan memperoleh Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan capaian skor sebesar 85,94% untuk kategori tingkat awal. Capaian ini mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan yang telah dijalankan sekaligus menjadi landasan yang kuat bagi Perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja K3 secara berkelanjutan di masa mendatang.

Policies Governing Occupational Health and Safety

The Company is committed to always implementing the Integrated Management System Policy to enhance its Occupational Health and Safety (OHS) in a continuous manner. This commitment is outlined in the Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.01/25/10/2/ARD/DUT/JAI-24 concerning the Integrated Management System Guidelines within PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The Company's policies related to Occupational Health and Safety include:

1. Preventing workplace accidents, occupational diseases, and work-related illnesses through hazard control and the implementation of an OHS culture;
2. Strictly prohibiting the purchase, sale, possession, and use of illegal drugs/narcotics or alcohol within the Company's work environment, as well as preventing the spread of HIV/AIDS in the workplace;
3. Promoting a work culture that prioritizes service quality, OHS, security, energy efficiency, environmental preservation, and business sustainability.

These regulations are prepared to maximize the Company's value through high-quality, reliable, and responsible services, enabling the Company to maintain strong competitiveness both nationally and internationally. In addition, these regulations provide assurance and confidence to clients and partners that the Company has prepared and maintained effective control over its Management System in accordance with national and international standards.

As a result of this commitment, in 2025 the Company received an Occupational Health and Safety Management System Award Certificate from the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia, achieving a score of 85.94% in the initial level category. This achievement reflects the effectiveness of the policies and serves as a strong foundation for the Company to enhance its OHS performance in the future.





Hubungan Industrial

Kesuksesan Perusahaan tidak terlepas dari terjalinnya hubungan yang harmonis antara manajemen dan seluruh pekerja. Keterhubungan tersebut diperkuat melalui peran serikat pekerja yang hadir sebagai wadah penyampaian aspirasi dan kepentingan pekerja. Perusahaan secara konsisten menjaga komitmen untuk merespons setiap isu yang muncul melalui komunikasi yang terbuka dan mekanisme penyelesaian permasalahan yang konstruktif, sehingga mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bersama. Selain itu, Perusahaan memberikan ruang bagi pekerja untuk mengembangkan kemampuannya, khususnya dalam bidang hubungan industrial melalui penyelenggaraan *workshop* dan program sertifikasi. Upaya tersebut memungkinkan Perusahaan menjaga stabilitas operasional, meningkatkan keterlibatan pekerja, serta membangun budaya kerja yang saling menghormati dan mendorong kolaborasi.

Industrial Relations

The Company's success is inseparable from the establishment of harmonious relationships between management and all employees. This connection is further strengthened through the role of the labor union, which serves as a channel for conveying employees' aspirations and interests. The Company consistently maintains its commitment to addressing any issues that arise through open communication and constructive dispute resolution mechanisms, thereby supporting improvements in productivity and shared welfare. In addition, the Company provides opportunities for employees to develop their capabilities, particularly in the area of industrial relations, through the organization of workshops and certification programs. These efforts enable the Company to maintain operational stability, enhance employee engagement, and foster a work culture based on mutual respect and collaboration.

Program Pensiun

Sebagai wujud penghargaan atas kontribusi yang diberikan sepanjang masa kerja, Perusahaan menyediakan program pensiun untuk mendukung kesejahteraan pekerja pada masa purnabakti. Program pensiun dirancang agar para pekerja dapat memasuki masa pensiun dengan rasa aman dan nyaman. Fasilitas yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan mengenai program pensiun yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pension Program

As a form of appreciation for the contributions made throughout their period of service, the Company provides a retirement program to support employees' welfare during their post-employment period. The retirement program is designed to ensure that employees can enter retirement with a sense of security and comfort. The benefits provided are in accordance with the applicable retirement program provisions within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERUSAHAAN

Sejalan dengan dinamika bisnis dan meningkatnya kebutuhan industri, Perusahaan secara berkelanjutan memperkuat kompetensi Sumber Daya Manusia melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025. Upaya pengembangan ini bertujuan memperluas kemampuan teknis dan nonteknis pekerja, sekaligus memperdalam keterampilan yang telah dimiliki. Guna mendukung keberlanjutan pengembangan SDM, Perusahaan menetapkan strategi jangka pendek hingga jangka panjang yang difokuskan pada pembentukan calon pemimpin masa depan, memastikan ketersediaan penerus yang kompeten, serta merancang jalur karier yang mampu memaksimalkan potensi setiap pekerja.

HR DEVELOPMENT PROGRAM

In line with business dynamics and increasing industry demands, the Company continuously strengthened its human resource competencies through various training programs conducted throughout 2025. These development efforts were aimed at expanding employees' technical and non-technical capabilities, while also deepening existing skills. To support the sustainability of human resource development, the Company established both short-term and long-term strategies focused on developing future leadership candidates, ensuring the availability of competent successors, and designing career pathways that maximize the potential of each employee.

Kebijakan Mengenai Program Pelatihan bagi Pekerja

Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pelatihan dan pengembangan, yaitu *Self Learning* dan *Corporate Learning*. Kedua program tersebut memberikan kesempatan bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan mereka. *Self Learning* dilaksanakan secara mandiri melalui platform Portaverse, sementara *Corporate Learning* diselenggarakan dalam format *hybrid*, baik melalui kelas reguler maupun *workshop*, sesuai kebutuhan pengembangan SDM.

Employee Training Policies

The Company organizes 2 (two) types of training and development programs, namely Self Learning and Corporate Learning. Both programs provide employees with opportunities to enhance their competencies, knowledge, and skills. Self Learning is conducted independently through the Portaverse platform, while Corporate Learning is delivered in a hybrid format, through both regular classes and workshops, in accordance with the Company's human resource development needs.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan dan pengembangan kompetensi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar mampu beradaptasi dengan dinamika dunia kerja yang terus berubah. Berkat program pelatihan yang dirancang secara sistematis, pekerja memperoleh kesempatan untuk memperdalam keterampilan teknis serta *soft skills* yang diperlukan guna mendorong peningkatan produktivitas dan kinerja. Penguatan kompetensi ini juga berperan dalam menumbuhkan inovasi, memperkuat kemampuan beradaptasi, serta mempersiapkan pekerja menghadapi berbagai tuntutan industri. Dengan demikian, Perusahaan tidak hanya membentuk tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Peserta Pelatihan

Terhitung per 31 Desember 2025, Perusahaan telah melaksanakan sejumlah 35 pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh 321 orang pekerja.

Biaya Pelatihan

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah melakukan investasi dalam pengembangan SDM dengan total biaya sebesar Rp1.339.637.103. Adapun jenis pelatihan yang diadakan Perusahaan mencakup bidang Sekretaris Perusahaan, Hukum, Pengawas Internal, Transformasi & Pengembangan Bisnis, Komersial, Armada, QHSSE, Operasi & DPA, Sumber Daya Manusia & Umum, Keuangan, Manajemen Risiko, Pengadaan/*Procurement*, *Fundamental/General*.

Training Objectives

Training and competency development are carried out to enhance the quality of human resources so that employees are able to adapt to the continuously evolving dynamics of the workplace. Through systematically designed training programs, employees are provided with opportunities to deepen both technical skills and soft skills required to drive improvements in productivity and performance. This strengthening of competencies also plays a role in fostering innovation, enhancing adaptability, and preparing employees to meet various industry demands. Accordingly, the Company not only develops a highly competitive workforce, but also creates a more competitive and sustainable working environment.

Training Participants

As of December 31, 2025, the Company had implemented a total of 35 training programs. All of these training activities were attended by 321 participants.

Training Expenses

Throughout 2025, the Company invested in human capital development with a total expenditure of Rp1,339,637,103. The training programs covered various fields, including Corporate Secretary, Legal, Internal Audit, Transformation & Business Development, Commercial, Fleet, QHSSE, Operations & DPA, Human Resources & General Affairs, Finance, Risk Management, Procurement, and Fundamental/General competencies.

Tabel Biaya Pelatihan Pekerja (Penugasan Pelindo, PKWT, TAD) Tahun 2025 (dalam Rupiah)
Table of Training Costs for Employees (Pelindo Secondment Employees, PKWT, Outsourced Personnel) in 2025 (in Rupiah)

No	Jenis Diklat Training Type	2025
Teknik Substansial Substantial Technique		
1	Bidang Sekretaris Perusahaan Corporate Secretariate	127.952.601
2	Bidang Hukum Legal	11.817.906
3	Bidang Pengawas Internal Internal Audit	103.748.517
4	Bidang Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation & Development	85.585.503
5	Bidang Komersial Commercial	99.306.083
6	Bidang Armada dan QHSSE Fleet and QHSSE	91.845.373
7	Bidang Operasi & DPA Operation & DPA	523.614.655
8	Bidang SDM & Umum HR & General Affair	136.642.355
9	Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management	105.325.420
10	Bidang Pengadaan Procurement	53.798.689
JUMLAH TOTAL		1.339.637.103



Tabel Biaya Pelatihan Pekerja (Penugasan Pelindo, PKWT, TAD) Tahun 2024 (dalam Rupiah)
Table of Training Costs for Employees (Pelindo Secondment Employees, PKWT, Outsourced Personnel) in 2024 (in Rupiah)

No	Jenis Diklat Training Type	2024
Teknik Substansial Substantial Technique		
1	Bidang Sekretaris Perusahaan Corporate Secretariate	48.385.270
2	Bidang Hukum Legal	43.263.468
3	Bidang Pengawas Internal Internal Audit	62.513.468
4	Bidang Transformasi & Pengembangan Bisnis Business Transformation & Development	46.343.603
5	Bidang Komersial Commercial	63.843.603
6	Bidang Armada dan QHSSE Fleet and QHSSE	71.765.675
7	Bidang Operasi & DPA Operation & DPA	524.699.546
8	Bidang SDM & Umum HR & General Affair	56.113.071
9	Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Finance and Risk Management	51.817.341
10	Bidang Pengadaan Procurement	14.826.937
JUMLAH TOTAL		983.571.982

SURVEI KETERIKATAN/ KEPUASAN PEGAWAI

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melaksanakan survei kepuasan dan keterikatan pegawai untuk mengukur persepsi terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Hasilnya, Indeks Kepuasan Karyawan tercatat sebesar 4,20, yang didukung oleh berbagai faktor utama seperti *Job Characteristics, Work Environment, Co-worker Support, Leadership*, serta *Employee Well Being* yang seluruhnya berada pada tingkat baik.

Sementara itu, Indeks Keterikatan Karyawan pada tahun 2025 mencapai 4,40 dengan kategori sangat terikat. Capaian ini didorong oleh kontribusi seluruh kategori pegawai dan unit kerja yang menunjukkan tingkat keterikatan tinggi, serta diperkuat oleh aspek *Emotional Engagement*, *Physical Engagement*, dan *Cognitive Engagement*. Hasil survei ini menjadi dasar bagi Perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM KE DEPAN

Perusahaan terus melakukan berbagai upaya peningkatan dalam pengelolaan dan pengembangan SDM sebagai aset penting yang perlu dijaga dan dimaksimalkan. Langkah ini diwujudkan melalui perencanaan pengelolaan dan pengembangan SDM yang lebih terarah untuk masa mendatang, terutama dalam penyusunan Kamus Kompetensi sebagai landasan pengembangan kemampuan pekerja, serta penguatan pengelolaan talenta di lingkungan Perusahaan.

EMPLOYEE ENGAGEMENT/ SATISFACTION SURVEY

Throughout 2025, the Company conducted an employee satisfaction and engagement survey to measure perceptions regarding work and the work environment. The results showed an Employee Satisfaction Index of 4.20, supported by key factors such as Job Characteristics, Work Environment, Co-worker Support, Leadership, and Employee Well-being, all of which were rated as good.

Meanwhile, the Employee Engagement Index in 2025 reached 4.40, falling into the "highly engaged" category. This achievement was driven by contributions from all employee categories and work units, which demonstrated high levels of engagement, and was further reinforced by aspects of Emotional Engagement, Physical Engagement, and Cognitive Engagement. These survey results serve as the foundation for the Company to maintain and continuously improve the quality of its human resource management.

FUTURE HR MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

The Company continues to perform various improvement initiatives in the management and development of human resources as a vital asset that must be nurtured and optimized. These efforts are manifested through more structured human capital management and development planning for the future, particularly in the formulation of a Competency Dictionary as a foundation for employee capability development, as well as in strengthening talent management within the Company.

Teknologi Informasi
Information Technology

Teknologi Informasi (TI) memegang peranan penting dalam menunjang operasional Perusahaan, khususnya dalam penyediaan layanan pemanduan dan penundaan kapal di perairan Indonesia. Pemanfaatan sistem TI yang efektif mampu meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam pengaturan pergerakan kapal, pemantauan armada, serta koordinasi dengan pelabuhan dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, TI turut mendukung berbagai proses bisnis, seperti pemantauan secara *real-time*, pengelolaan sumber daya, dan analisis performa operasional, yang berkontribusi pada pengurangan risiko serta peningkatan profitabilitas. Karena itu, Perusahaan terus berupaya memperkuat tata kelola TI guna memastikan keandalan operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga ketepatan dalam setiap kegiatan bisnis.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TI

Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi di Perusahaan dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan infrastruktur TI beroperasi secara efisien dan aman. Kebijakan tersebut mencakup pemeliharaan rutin serta penerapan prosedur pengelolaan sistem yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Selain itu, Perusahaan juga memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai keamanan informasi dan pengelolaan data yang bertanggung jawab, sebagai langkah untuk menjaga aspek keamanan (*security*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) informasi Perusahaan.

Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan TI, mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan bisnis. Dengan demikian, strategi pengelolaan TI tidak hanya berfungsi sebagai penunjang aktivitas operasional, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menjaga kredibilitas, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan Perusahaan di tengah dinamika industri.

ROADMAP PENGEMBANGAN TI

Perusahaan telah menyusun *roadmap* pengembangan TI sebagai arah strategis dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan efektivitas operasional, dan mendorong terciptanya inovasi bisnis. Sejalan dengan panduan tersebut, sepanjang tahun 2025 Perusahaan telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis, antara lain:

Information Technology (IT) plays a vital role in supporting the Company's operations, particularly in the pilotage and towage services in Indonesian waters. The effective utilization of IT systems enhances accuracy and efficiency in managing vessel movements, fleet monitoring, as well as coordination with ports and other stakeholders. In addition, IT supports various business processes, including real-time monitoring, resource management, and operational performance analysis, which contribute to risk mitigation and improved profitability. Accordingly, the Company continues to strengthen its IT governance to ensure operational reliability, enhance service quality, and maintain precision in every business activity.

IT MANAGEMENT AND DEVELOPMENT POLICIES

The management of the Company's Information Technology systems is carried out based on systematically designed policies to ensure that IT infrastructure operates efficiently and securely. These policies include routine maintenance and the implementation of system management procedures aligned with operational requirements. In addition, the Company provides training to employees on information security and responsible data management as part of its efforts to safeguard the security and confidentiality of the Company's information.

Regular evaluations are conducted to assess the effectiveness of IT implementation, taking into account technological advancements and evolving business needs. Accordingly, the IT management strategy serves not only as support for operational activities, but also as a key element in maintaining credibility, improving efficiency, and ensuring the Company's sustainability amid dynamic industry conditions.

IT DEVELOPMENT ROADMAP

The Company has developed an IT development roadmap as a strategic direction to strengthen infrastructure, enhance operational effectiveness, and encourage business innovation. In line with this roadmap, throughout 2025 the Company implemented various strategic initiatives, including:



1. *Mapping Data Profit dan Cost per kapal;*
2. *Enhancement* Infrastruktur : VPN *Network and Internet* Satelit (Starlink);
3. Implementasi Maroon;
4. Migrasi Sistem Operasional SIMOP JAI ke Aplikasi Phinnisi;
5. Implementasi Aplikasi Sigap Tahap 1;
6. *Cybersecurity: End User Protection - Trend Micro; dan*
7. *Operation Surveillance :* Instalasi AIS Antena, CCTV Kapal dan CCTV Dermaga (Patimban, Cirebon dan STS Musi Palembang).

ORGANISASI PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Organisasi Pengelola Teknologi Informasi dibentuk untuk memastikan terselenggaranya tata kelola TI yang efektif melalui struktur kerja yang proporsional dan sesuai kebutuhan operasional Perusahaan. Berdasarkan susunan organisasi, fungsi pengelolaan TI dijalankan oleh 3 (tiga) posisi yang meliputi VP Transformasi & Pengembangan Bisnis, DVP Sistem Informasi, serta Pelaksana Junior Sistem Informasi. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia pengelola TI Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mapping profit and cost data per vessel;
2. Infrastructure enhancement : VPN network and satellite internet (Starlink);
3. Implementation of Maroon;
4. Migration of the SIMOP JAI operational system to the Phinnisi application;
5. Implementation of the SIGAP application – Phase 1;
6. Cybersecurity: end-user protection using Trend Micro; and
7. Operational surveillance systems: installation of AIS antennas, vessel CCTV, and jetty CCTV at Patimban, Cirebon, and STS Musi Palembang.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT TEAM

The Information Technology Management Team was established to ensure the implementation of effective IT governance through a proportional organizational structure aligned with the Company's operational needs. Based on the organizational structure, the IT management function is carried out by 3 (three) positions, namely VP Transformation & Business Development, DVP Information Systems, and a Junior Information Systems Officer. The composition of the Company's IT management human resources is as follows:

No	Unit Kerja Work Unit	Jumlah Total		Kapasitas Capacity	
		Organik Organic	Non-Organik Non-Organic	Support Apps	Support
1	VP Transformasi & Pengembangan Bisnis VP Transformation & Business Development	1	-	-	-
2	DVP Sistem Informasi DVP Information Systems	1	-	-	-
3	Pelaksana Junior Sistem Informasi Junior Information Systems Officer	-	2	1	1
JUMLAH TOTAL		**2**	**2**	**1**	**1**

KINERJA TI TAHUN 2025

Perusahaan telah merumuskan *roadmap* pengembangan TI sebagai acuan strategis untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong inovasi dalam proses bisnis. Berdasarkan pedoman tersebut, sepanjang tahun 2025 Perusahaan telah melaksanakan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Implementasi ERP SAP & Surrounding
   Single ERP menjadi salah satu *tools* untuk Standardisasi Proses dan Kebijakan, melalui standar integrasi *surrounding* dan *Single* ERP, untuk Aplikasi *Surrounding* (seperti SIMOP JAI, CSS, Peo, PProc, Sigap, Phinnisi), entitas di bawah Pelindo group dapat menggunakan sistem yang *competitive* mengikuti standar yang digunakan Pelindo.

IT PERFORMANCE IN 2025

The Company has formulated an IT development roadmap as a strategic reference to strengthen infrastructure, enhance operational efficiency, and drive innovation in business processes. Based on this roadmap, throughout 2025 the Company implemented a number of strategic initiatives, including:

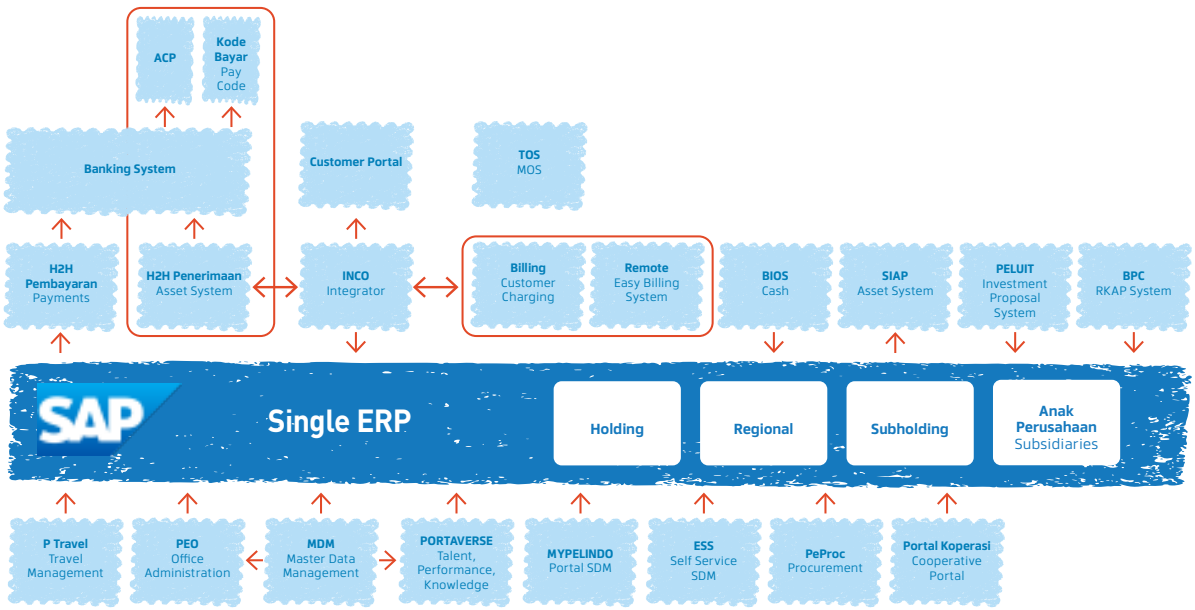
1. 1. Implementation of SAP ERP & Surrounding
   A single ERP serves as one of the key tools for Process and Policy Standardization. Through standardized integration of surrounding applications with a single ERP platform covering applications such as SIMOP JAI, CSS, Peo, PProc, Sigap, and Phinnisi, entities within the Pelindo Group are able to utilize competitive systems that align with the standards adopted by Pelindo.

Aplikasi ERP SAP PT Jasa Armada Indonesia Tbk
ERP SAP Application at PT Jasa Armada Indonesia Tbk

SAP *IMPLEMENTATION SCOPE & DATA OWNERSHIP*

FI (*Financial Accounting*)	CO (*Controlling*)	MM (*Materials Management*)	*Human Capital Management*	SAP Process Orchestrations – Middleware Surrounding
▪ *General Ledger (Parallel Currency, Parallel Ledger/Accounting)* ▪ *Accounts Payable* ▪ *Accounts Receivable* ▪ *Fixed Asset Accounting* ▪ *Bank & Tax Accounting*	▪ *Overhead Cost Controlling Cost Element, Cost Center, Internal Order* ▪ *Profitability Analysis* ▪ *Profit Center Accounting* ▪ *CO Reporting and Embedded Analytics*	▪ *Consumption based Planning (Materials Planning)* ▪ *Purchasing* ▪ *Inventory Management* ▪ *External Services Management* ▪ *Logistics Invoice Verification*	▪ *Personnel Administration* ▪ *Organization, Time & Travel Management* ▪ *Personnel Cost Planning* ▪ *Payroll (Indonesia specific Localization)* ▪ ESS *(Employee Self-Service)*	Integrasi Vessel System (SIMOP Nota Rekap & TUKS JAI), AKBI dan Front-End Apps lainnya pada Pelindo ERP SAP Integration of Vessel System (SIMOP Nota Rekap & TUKS JAI), AKBI and other Front-End Apps on Pelindo ERP SAP
Group Akuntansi, Layanan Keuangan & Perpajakan dan Pengelolaan Keuangan Accounting, Financial Services & Taxation and Financial Management Group	Group Akuntansi dan Anggaran & Pelaporan Accounting and Budget & Reporting Group	Group Pengadaan dan Perencanaan Investasi Procurement and Investment Planning Group	Group Strategi SDM, Layanan SDM dan Pengelolaan SDM HR Strategy, HR Services and HR Management Group	
Project System	***Funds Management***	***Business Planning & Consolidation***	**SAP Fiori (UI/UX)**	**OpenText for Digital Document Management**
▪ *PS Logistics (WBS, Network, Activity)* ▪ *PS Accounting (Budget, Cost, Settlement)* ▪ *PS Reporting and Embedded Analytics*	▪ FM *Master Data (Fund Centers and Commitment Items)* ▪ *Budget Control System (Entry, Revision, Supplement, Transfer, Availability Check)*	▪ *Planning* & *Budgeting* ▪ *Financial Consolidation*	Mobile user interface untuk Transaksi, Mobile Approval, dan Analytics Mobile user interface for Transactions, Mobile Approval, and Analytics	Penyimpanan data digital pada Layanan IT Digital data storage in IT Services
Group Manajemen Proyek dan Anggaran & Pelaporan, Fasilitas & Peralatan Pelabuhan, dan TIK Project Management and Budget & Reporting, Port Facilities & Equipment, and ICT Groups	Group Akuntansi dan Anggaran & Pelaporan Accounting and Budget & Reporting Group	Group Anggaran & Pelaporan dan Akuntansi Budget & Reporting and Accounting Group	Seluruh Group untuk layanan *mobile approval* dan *analytics* Group-wide mobile approval and analytics service	

Aplikasi *Surrounding* PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Surrounding Application at PT Jasa Armada Indonesia Tbk



2. *Journey to Cloud*
PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah menjalankan inisiatif *Journey to Cloud* sebagai bagian dari transformasi digital perusahaan, di mana seluruh aplikasi utama kini telah beralih ke arsitektur berbasis

2. Journey to Cloud
PT Jasa Armada Indonesia Tbk has implemented the Journey to Cloud initiative as part of the Company's digital transformation, under which all core applications have transitioned to a cloud-based architecture. The



cloud. Aplikasi legacy AMOS telah digantikan oleh SIGAP dan Phinnisi, yang keduanya dikembangkan dan dioperasikan menggunakan teknologi *cloud*. Proses migrasi server dilakukan dengan memindahkan data, aplikasi, dan layanan dari infrastruktur *on-premise* ke lingkungan *Cloud* AWS dan *Exabyte*, sehingga meningkatkan skalabilitas, fleksibilitas, keandalan sistem, serta efisiensi operasional. Adapun aplikasi yang telah berjalan di *cloud*:

a. Portal *Customer Self Service* (CSS)
b. Aplikasi SIGAP
c. Aplikasi Phinnisi

3. *Operation Surveillance* (CCTV, *Vessel Tracking*) Cabang Banten, Patimban, Cirebon dan STS Musi
   Pemasangan CCTV di kapal - kapal tunda yang beroperasi di cabang Banten. Pemasangan CCTV ini bertujuan untuk mengawasi kegiatan bunker serta aset-aset dan operasional pergerakkan kapal tunda sehingga mempunyai *Track Record* untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan *safety & operation*.
4. *Data Management & Security*
   Melakukan *cleansing* data produksi periode 2016-2025 guna menjamin akurasi data operasional. Dari sisi keamanan, Perusahaan mengimplementasikan *End User Protection* dan memperkuat infrastruktur keamanan digital lainnya.
5. *End User Protection*
   Memperkuat keamanan di sisi pengguna akhir sebagai bagian dari strategi perlindungan aset digital Perusahaan dari potensi ancaman keamanan siber.
6. Implementasi Aplikasi Phinnisi
   PHINNISI merupakan platform sistem operasi layanan kapal *End-to-End* yang dikembangkan secara internal oleh Pelindo Group, dirancang untuk mendukung seluruh proses bisnis layanan kapal secara terpadu, mulai dari *Order Management*, *Front-End*, hingga *Back-End* dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini secara komprehensif mendukung siklus bisnis *Order-to-Cash* dan *Record-to-Report*, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelaporan.

Sejalan dengan transformasi digital di lingkungan Pelindo Group, PHINNISI telah berhasil diimplementasikan di PT Jasa Armada Indonesia Tbk dan secara resmi menggantikan sistem/aplikasi SIMOP yang sebelumnya digunakan dalam operasional layanan kapal. Keberhasilan implementasi PHINNISI di PT Jasa Armada Indonesia Tbk ditopang oleh keunggulan utama sebagai berikut:

a. *Multi Site & Centralized*
   Sistem terpusat yang mampu mendukung operasional layanan kapal di seluruh pelabuhan, sehingga memastikan konsistensi proses dan data secara nasional.
b. *Effective & Adaptive*
   Sistem operasi yang selaras dengan proses bisnis layanan kapal, bersifat fleksibel, serta mendukung pengembangan berkelanjutan sesuai kebutuhan operasional dan regulasi.
c. *Cloud Architecture*
   Arsitektur berbasis teknologi *cloud* yang memberikan tingkat ketersediaan (availability) tinggi, skalabilitas optimal, serta proses *deployment* yang cepat dan andal.

legacy AMOS application has been replaced by SIGAP and Phinnisi, both of which are developed and operated using cloud technology. The server migration process was carried out by transferring data, applications, and services from on-premise infrastructure to the AWS and Exabyte cloud environments, thereby enhancing scalability, flexibility, system reliability, and operational efficiency. The applications currently operating in the cloud include:

a. Customer Self Service (CSS) Portal
b. SIGAP Application
c. Phinnisi Application

3. Operation Surveillance (CCTV, Vessel Tracking) at Banten, Patimban, Cirebon Branches and STS Musi
   The Company installed CCTV systems on tugboats operating in the Banten branch. This installation aims to monitor bunkering activities, assets, and tugboat movements, thereby providing a track record that can be utilized to support safety and operational requirements.
4. Data Management & Security
   The Company conducted data cleansing of production data for the 2016-2025 period to ensure the accuracy of operational data. From a security perspective, the Company implemented End User Protection and strengthened other digital security infrastructure.
5. End User Protection
   The Company enhanced end-user security as part of its strategy to protect digital assets from potential cybersecurity threats.
6. Implementation of the Phinnisi Application
   PHINNISI is an end-to-end vessel service operating system platform developed internally by the Pelindo Group. It is designed to support all vessel service business processes in an integrated manner, ranging from Order Management and Front-End to Back-End within a single platform. The system comprehensively supports the Order-to-Cash and Record-to-Report business cycles, thereby improving operational efficiency and reporting quality.

In line with the digital transformation within the Pelindo Group, PHINNISI has been successfully implemented at PT Jasa Armada Indonesia Tbk and has officially replaced the SIMOP system/application previously used in vessel service operations. The successful implementation of PHINNISI at PT Jasa Armada Indonesia Tbk is supported by the following key advantages:

a. Multi-Site & Centralized
   A centralized system capable of supporting vessel service operations across all ports, ensuring nationwide consistency of processes and data.

b. Effective & Adaptive
   An operating system that is aligned with vessel service business processes, flexible in nature, and supportive of continuous development in accordance with operational and regulatory requirements.
c. Cloud Architecture
   A cloud-based architecture that provides high availability, optimal scalability, and fast and reliable deployment.

d. *Cost Efficient*
Dirancang dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih rendah, sekaligus memberikan nilai tambah melalui efisiensi proses dan pengurangan kompleksitas sistem.

7. Aplikasi SIGAP
Sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan standarisasi pemeliharaan alat di lingkungan Pelindo Group, dikembangkan SIGAP sebagai platform sistem operasi maintenance alat yang dibangun secara internal. SIGAP merupakan platform manajemen aset yang komprehensif yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelacakan aktivitas pemeliharaan, serta dilengkapi dengan analitik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas *maintenance*. Inisiatif ini bertujuan untuk menghadirkan sistem pemeliharaan alat yang terstandar dari sisi proses bisnis dan pelaporan, sekaligus mendukung implementasi SAP sebagai aplikasi pendukung serta memfasilitasi *monitoring* ketersediaan, utilisasi, dan penggunaan bahan bakar kapal. Pada tahap 1 tahun 2025, SIGAP telah berhasil diimplementasikan di PT Jasa Armada Indonesia Tbk, dengan modul yang terimplementasi yaitu *Inventory Management*, mencakup pelacakan stok dan pengelolaan inventaris *spare part* dan material, serta pengoptimalan tingkat inventaris guna menekan biaya penyimpanan.

8. *License*
Melakukan pemenuhan lisensi tahunan untuk memastikan legalitas dan dukungan keberlanjutan perangkat lunak, termasuk *Cloud Hosting*, VPS, MS Office 365, dan Zoom.

PENGENDALIAN KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER

Ketahanan dan keamanan siber merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam upaya melindungi aset digital Perusahaan serta menjamin keberlangsungan dan kelancaran operasional bisnis. Penerapan pengendalian pada aspek ini bertujuan untuk memastikan terjaganya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) atas sistem teknologi informasi yang menjadi penopang utama kegiatan operasional Perusahaan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan frekuensi ancaman siber, Perusahaan secara berkelanjutan memperkuat sistem pengamanan dan meningkatkan ketahanan infrastruktur TI. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memitigasi risiko serangan siber yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional, kebocoran data, maupun dampak terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan Perusahaan.

Adapun upaya pengendalian ketahanan dan keamanan siber yang telah dan sedang dilakukan oleh Perusahaan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Informasi Keamanan Siber (SIKAS)
Perusahaan tengah melakukan pengkajian dan penyusunan tata kelola ketahanan dan keamanan siber melalui pengembangan SIKAS. Sistem ini dirancang untuk menjadi kerangka kerja pengelolaan keamanan siber yang terintegrasi, mencakup kebijakan, prosedur,

d. Cost Efficient
Designed to achieve lower operational and maintenance costs, while delivering added value through process efficiency and reduced system complexity.

7. SIGAP Application
As part of efforts to enhance effectiveness and standardization of equipment maintenance within the Pelindo Group, SIGAP was developed as an internally built maintenance operating system platform. SIGAP is a comprehensive asset management platform that supports the planning, execution, and tracking of maintenance activities, and is equipped with analytics to improve maintenance efficiency and effectiveness. This initiative aims to establish a standardized equipment maintenance system in terms of business processes and reporting, while also supporting the implementation of SAP as a supporting application and facilitating the monitoring of vessel availability, utilization, and fuel consumption. In Phase 1 of 2025, SIGAP was successfully implemented at PT Jasa Armada Indonesia Tbk, with the Inventory Management module deployed, covering stock tracking and inventory management of spare parts and materials, as well as inventory level optimization to reduce storage costs.

8. Annual Licenses
The Company fulfilled annual licensing requirements to ensure software legality and sustainable support, including Cloud Hosting, VPS, Microsoft Office 365, and Zoom.

CYBER RESILIENCE AND SECURITY CONTROLS

Cyber resilience and cybersecurity are two complementary aspects in protecting the Company's digital assets and ensuring the continuity and smooth operation of its business activities. The implementation of controls in this area is aimed at safeguarding the principles of confidentiality, integrity, and availability of information technology systems that serve as the primary backbone of the Company's operations.

In line with the increasing complexity and frequency of cyber threats, the Company continuously strengthens its security systems and enhances the resilience of its IT infrastructure. These efforts are undertaken to mitigate the risk of cyberattacks that may potentially result in operational disruptions, data breaches, or adverse impacts on the Company's sustainability and growth.

The cyber resilience and security control measures that have been implemented and are currently being undertaken by the Company include the following:

1. Development of the Cybersecurity Information System (SIKAS)
The Company is currently conducting assessments and establishing cybersecurity resilience and security governance through the development of SIKAS. This system is designed to serve as an integrated cybersecurity management framework, encompassing



pengelolaan risiko, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi keamanan informasi secara berkelanjutan.

2. Implementasi *End User Protection*
   Perusahaan telah melakukan instalasi dan penerapan solusi perlindungan *end user* menggunakan *Trend Micro*. Solusi ini berfungsi untuk melindungi perangkat pengguna dari berbagai ancaman siber, seperti *malware*, *ransomware*, *phishing*, dan serangan berbasis *endpoint* lainnya, guna meminimalkan risiko insiden keamanan yang berasal dari sisi pengguna.

   Dengan adanya ancaman atau *cyber threat* yang terus berkembang, Jasa Armada Indonesia untuk menunjang pertumbuhan bisnisnya telah mengimplementasikan *Enrolment Security* menggunakan *Platform Trend Micro* di komputer masing-masing *user* guna meningkatkan keamanan *endpoint* untuk melakukan proteksi terkait *attack-attack* yang mungkin terjadi dan dapat membantu *team* Jasa Armada Indonesia untuk meminimalisir *impact* terkait *threat*, melakukan *action* atau *blocking* secara otomatis terkait *threat* yang menyerang dan juga untuk memberikan *report* terkait *attack* yang menyerang atau mengarah ke *environment* Jasa Armada Indonesia.

policies, procedures, risk management, as well as continuous monitoring and evaluation mechanisms for information security.

2. IImplementation of End User Protection
   The Company has installed and implemented end-user protection solutions using Trend Micro. This solution is intended to protect user devices from various cyber threats, including malware, ransomware, phishing, and other endpoint-based attacks, thereby minimizing the risk of security incidents originating from end users.

In response to the continuously evolving cyber threat landscape, PT Jasa Armada Indonesia Tbk has implemented endpoint security using the Trend Micro platform on individual user computers to support business growth. This initiative aims to enhance endpoint security by providing protection against potential cyberattacks. The implementation enables the Company's IT team to minimize the impact of cyber threats through automated response actions, including blocking malicious activities, as well as to generate reports on attacks targeting or impacting PT Jasa Armada Indonesia Tbk.



AUDIT TI

Perusahaan secara konsisten meninjau efektivitas pengelolaan Teknologi Informasi melalui rangkaian evaluasi yang dilakukan secara terstruktur. Audit yang dilakukan mencakup penelaahan atas keandalan sistem, kesiapan infrastruktur, serta kesesuaian prosedur operasional yang berkaitan dengan pemanfaatan TI. Audit TI bertujuan untuk menemukan potensi kerentanan, menilai tingkat kinerja dan efisiensi teknologi yang digunakan, serta memastikan bahwa setiap solusi TI sejalan dengan sasaran strategis Perusahaan. Berikut hal-hal yang dipastikan Perusahaan dalam melaksanakan audit TI:

1. Mencegah adanya risiko kebocoran data;
2. Menekan kerugian akibat kesalahan proses perhitungan;
3. Menekan kerugian akibat kehilangan data;
4. Meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan;
5. Tingginya investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer; dan
6. Mencegah adanya penyalahgunaan komputer.

TI AUDIT

The Company consistently reviews the effectiveness of Information Technology management through a series of structured evaluations. The audits conducted include assessments of system reliability, infrastructure readiness, and compliance of operational procedures related to the use of IT. The purpose of IT audits is to identify potential vulnerabilities, evaluate the performance level and efficiency of the technology in use, and ensure that all IT solutions are aligned with the Company's strategic objectives. Through the implementation of IT audits, the Company seeks to ensure the following:

1. Prevention of data leakage risks;
2. Reduction of losses resulting from errors in calculation processes;
3. Reduction of losses resulting from data loss;
4. Minimization of errors in decision-making;
5. Mitigation of risks associated with high investments in computer hardware and software; and
6. Prevention of misuse of computer systems.

PENGEMBANGAN SDM BIDANG TI

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak menyelenggarakan program pelatihan Teknologi Informasi yang bersifat teknis mendalam secara mandiri, sejalan dengan kebijakan optimalisasi penggunaan layanan managed service dalam pengelolaan infrastruktur dan operasional TI, sehingga Perusahaan dapat memfokuskan sumber daya pada pengembangan kegiatan inti bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta percepatan agenda transformasi digital tanpa mengesampingkan kualitas layanan TI yang andal dan adaptif terhadap kebutuhan bisnis. Dalam rangka tetap mendukung peningkatan kompetensi dan literasi digital pengguna internal, Perusahaan melaksanakan pelatihan fungsional, antara lain:

1. Pelatihan *Trend Micro* terkait penggunaan sistem perlindungan *endpoint* serta kemampuan dasar dalam mendeteksi potensi ancaman siber.
2. Pelatihan Microsoft Office 365 untuk meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan efektivitas kerja berbasis digital.

INVESTASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Selama tahun 2025, Perusahaan tidak merealisasikan investasi baru yang secara khusus ditujukan bagi pengembangan teknologi informasi. Meskipun demikian, Perusahaan tetap menempatkan teknologi informasi sebagai elemen penting dalam mendukung peningkatan produktivitas serta efisiensi kinerja secara berkelanjutan. Dalam rangka memastikan operasional berjalan secara stabil, aman, dan andal, Perusahaan memenuhi sejumlah *submission* terhadap layanan serta sistem teknologi informasi, yang meliputi:

1. Microsoft Office 365: Perusahaan mengadopsi Microsoft Office 365 untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas kerja berbasis *cloud*.
2. Trend Micro: Investasi dilakukan pada Trend Micro untuk memperkuat sistem keamanan siber perusahaan.
3. VPS Cloud Hexabyte: Penggunaan VPS Cloud Hexabyte mendukung fleksibilitas dan skalabilitas infrastruktur digital.
4. Zoom Meetings: Digunakan untuk mendukung komunikasi daring yang efisien dan efektif.
5. VPN IP: VPN IP diimplementasikan untuk memastikan koneksi jaringan yang aman antar lokasi kerja.
6. VPN Client (SASE *Connectivity*): VPN *Client* dengan SASE meningkatkan keamanan dan akses jaringan berbasis *cloud*.
7. *Managed Service* Interkoneksi: Layanan interkoneksi terkelola digunakan untuk memastikan konektivitas antar sistem yang andal.
8. *Remote Desktop Service*: *Remote Desktop Service* memungkinkan akses jarak jauh ke sistem kerja secara aman dan terkontrol.

RENCANA PENGEMBANGAN TI KE DEPAN

Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola teknologi informasi yang andal, Perusahaan telah menyusun rencana pengembangan untuk beberapa waktu ke depan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

HR DEVELOPMENT IN IT

Throughout 2025, the Company did not independently conduct in-depth technical Information Technology training programs. This approach is in line with the policy to optimize the use of managed services in managing IT infrastructure and operations, allowing the Company to focus its resources on developing core business activities, improving operational efficiency, and accelerating the digital transformation agenda without compromising the quality of reliable and business-responsive IT services. To continue supporting the enhancement of competencies and digital literacy among internal users, the Company conducted functional training programs, including:

1. Trend Micro training related to the use of endpoint protection systems and basic capabilities in identifying potential cyber threats.
2. Microsoft Office 365 training aimed at improving productivity, collaboration, and the effectiveness of digital-based work.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT INVESTMENT

Throughout 2025, the Company did not realize any new investments specifically allocated for information technology development. Nevertheless, the Company continues to position information technology as a critical element in supporting sustained improvements in productivity and operational efficiency. To ensure stable, secure, and reliable operations, the Company fulfilled a number of subscriptions to information technology services and systems, including:

1. Microsoft Office 365: Adopted to enhance cloud-based collaboration and work productivity.
2. Trend Micro: Investment in Trend Micro was made to strengthen the Company's cybersecurity system.
3. VPS Cloud Hexabyte: Utilized to support the flexibility and scalability of the digital infrastructure.
4. Zoom Meetings: Used to facilitate efficient and effective online communication.
5. VPN IP: Implemented to ensure secure network connections between work locations.
6. VPN Client (SASE Connectivity): A VPN client with SASE capabilities was implemented to enhance cloud-based network security and access.
7. Managed Interconnection Services: Managed interconnection services were utilized to ensure reliable connectivity between systems.
8. Remote Desktop Service: Enables secure and controlled remote access to work systems.

FUTURE IT DEVELOPMENT

As a form of commitment to reliable information technology governance, the Company has prepared a development plan for the future as explained below:
Specifically in 2026, the work plan will be as follows:





No	Pekerjaan Work	Anggaran (Rp) Budget	Keterangan Description
1	*Manage service* infrastruktur Interkoneksi Termin 3 Manage service interconnection of infrastructure term 3	326.868.750	*done*
2	*Manage service* infrastruktur Interkoneksi Termin 4 Manage service interconnection of infrastructure term 4	326.868.750	*done*
3	*Manage service* infrastruktur Interkoneksi Termin 5 Manage service interconnection of infrastructure term 5	326.868.750	*done*
4	*Manage service* infrastruktur Interkoneksi Termin 6 Manage service interconnection of infrastructure term 6	326.868.750	*done*
5	*Manage service* infrastruktur Interkoneksi Termin 7 Manage service interconnection of infrastructure term 7	326.868.750	*done*
6	*Manage service* infrastruktur Interkoneksi Termin 8 Manage service interconnection of infrastructure term 8	326.868.750	*done*
7	*Manage service* infrastruktur Interkoneksi Termin 9 Manage service interconnection of infrastructure term 9	326.868.750	*done*
8	*Manage service* infrastruktur Interkoneksi Termin 10 Manage service interconnection of infrastructure term 10	326.868.750	*done*
9	CCTV Kapal Tunda Wilayah II Banten CCTV for Tugboat in Regional II Banten	142,600,000	*done*
10	Microsoft office 365	415,000,000	*done*
11	Internet Starlink Laiwui periode Januari s/d Juni 2025 Starlink Laiwui Internet for the period January to June 2025	6,850,000	*done*
12	Pengadaan *Notebook*, PC AIO dan Printer di Padi UMKM Procurement of Notebook, PC AIO and Printer at Padi MSME	429,000,000	*done*
13	Pengadaan PC AIO HP wilayah Palembang Padi UMKM Procurement of PC AIO HP in Palembang for Padi MSME	20,800,000	*done*
14	Perangkat internet Starlink dan layanan Starlink Equipment and Services	29,000,000	*done*
15	Perpanjangan Layanan *Dedicated Server* ipcmarine.co.id Extension of Dedicated Server Services on ipcmarine.co.id	26,448,240	*done*
16	Windows SSD VPS-16 (27-07-2025 sd 26-07-2026)	63,603,000	*done*
17	Layanan Inet Palembang periode Nov 2025 sd April 2026, BAFO BF-810 & Mikrotik RB951Ui-2HND Inet for Palembang from November 2025 to April 2026, BAFO BF-810 & Mikrotik RB951Ui-2HND	17,260,500	*done*
18	Internet Starlink Laiwui periode Juli sd Agustus 2025 Starlink Laiwui Internet for the period July to August 2025	6,850,000	*done*
19	Pembelian *Printer* untuk Bestwinn88 Purchasing of Printer for Bestwinn88	2,164,500	*done*

No	Pekerjaan Work	Anggaran (Rp) Budget	Keterangan Description
20	Pemasangan CCTV Dermaga JAI Ciwandan dan Banten Installment of CCTV at Piers of JAI in Ciwandan and Banten	217,587,750	*done*
21	Pemasangan Instalasi Perangkat AIS di Area IV dan Area V Installation of AIS Equipment at Area IV and Area V	4,162,500	*done*
22	Pembayaran Internet Orbit Kapal JAI Periode Sept- Okt 2025 Payment of Orbit Internet at JAI Vessels during September-October 2025	7,874,722	*done*
23	*Domain Renewal* - ipcmarine.co.id - 2 Year/s (10/11/2025-09/11/2025)	708,180	*done*
	TOTAL	1,389,909,392	

Secara khusus di tahun 2026, rencana program kerja yang akan dijalani adalah sebagai berikut:

Specifically in 2026, the work plan will be as follows:

Rencana Kerja Departemen Sistem Informasi 2026
Work Plan of Information System Department for 2026

No	*Action*	Operasional Pelayanan Pemanduan & Penundaan Pilotage & Towage Service Operations Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des	Keterangan Description
	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kapal **Vessel Service Application Development**		
1	*Enhancement* sistem pelayanan kapal Enhancement of vessel services system		
	Monitoring Data Performance & Pendapatan Pelayanan Kapal Monitoring of Performance Data & Vessel Services Revenues		
2	**Penyusunan tata kelola IT** **Development of IT governance**		
3	**Pembangunan Sistem Akuntansi Biaya** **Development of Cost Accounting System**		
4	**End User Protection (Trend Micro)**		
	Enhancement Infrastruktur **Infrastructure Enhancement**		
5	CCTV Kapal Palembang, Teluk Bayur, Pontianak CCTV for Vessels in Palembang, Teluk Bayur, Pontianak		
	Pengembangan Internet Starlink di Kapal-kapal Tunda (TERSUS) Development of Starlink Internet for Tugboats (TERSUS)		
	Manage Service		
	Cyber Security (Infrastructure & End User)		
	Firewall Infrastruktur (Palo Alto) Infrastructure Firewall (Palo Alto)		
	Manage Service Aplikasi SAP Manage Service of SAP Application		
6	Interkoneksi dan Infrastruktur (Sase, VPN) Interconnection and Infrastructure (Sase, VPN)		
	Monthly Recurring Cost Phinnisi		
	ITSM (Information Technology Service Management)		
	Manage Service SIMOP JAI		
7	***Support Development* SIGAP**		
	Licence		
	Cloud Hosting & VPS		
8	Internet Kapal Tunda (Orbit) Tugboat Internet (Orbit)		
	MS Office 365 (pelindo.co.id)		
	MS Office 365 & Zoom (ipcmarine.co.id)		

Selesai | Done Rencana | Plan Pending Hold



Sistem Manajemen Mutu
Quality Management System

Perusahaan terus melakukan pengawasan dan penilaian berkala terhadap aspek lingkungan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh wilayah operasional, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di masing-masing lokasi. Komitmen tersebut dipenuhi melalui berbagai perangkat *monitoring* dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan standar internal, untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan secara konsisten dan efektif. Upaya ini dilakukan untuk melindungi tenaga kerja, mengurangi potensi dampak terhadap lingkungan, serta menjamin kelangsungan kegiatan operasional yang aman dan berkesinambungan.

The Company continuously conducts supervision and periodic assessments of environmental aspects as well as Occupational Health and Safety (OHS) across all operational areas, in compliance with the applicable regulations at each location. This commitment is fulfilled through various monitoring tools and measurement methods aligned with internal standards, to ensure that all procedures are implemented consistently and effectively. These efforts are undertaken to protect the workforce, minimize potential environmental impacts, and ensure the continuity of safe and sustainable operations.

PENGENDALIAN PERALATAN, PEMANTAUAN, DAN PENGUKURAN

Perusahaan menjalankan pemantauan untuk mengendalikan berbagai risiko yang berkaitan dengan aktivitas operasional, sehingga setiap proses dapat berlangsung secara selaras dan mencapai hasil yang optimal. Pengukuran kinerja juga dilakukan secara rutin melalui prosedur yang tertata, mencakup pencatatan dan analisis data untuk menilai perkembangan kinerja, efektivitas pengendalian operasional, serta pemenuhan terhadap sasaran dan ketentuan QHSSE. Selain itu, Perusahaan mengedepankan penerapan sistem manajemen QHSSE yang terpadu dengan pendekatan proaktif dan responsif terhadap dinamika operasional. Keseluruhan langkah tersebut dimaksudkan untuk membangun lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif, sekaligus memperkuat keberlanjutan serta daya saing operasional.

EQUIPMENT CONTROL, MONITORING, AND MEASUREMENT

The Company continuously monitor various risks associated with operational activities, ensuring that each process is carried out in a coordinated manner and achieves optimal results. Performance is also measured on a regular basis through structured procedures, including data recording and analysis to assess performance trends, the effectiveness of operational controls, and compliance with QHSSE objectives and requirements. In addition, the Company emphasizes the integrated QHSSE management system with a proactive and responsive approach to operational dynamics. These efforts are aimed at establishing a safe, efficient, and productive working environment, while strengthening operational sustainability and competitiveness.

Dalam penerapannya, Perusahaan menetapkan metode terbaik, termasuk penggunaan analisis statistik, untuk memastikan seluruh proses berjalan menyeluruh dan konsisten. Upaya peningkatan keselamatan kerja juga dilakukan melalui integrasi aspek K3 dalam sistem evaluasi komprehensif berdasarkan *Integrated Management System* yang merujuk pada ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016 and ISO 45001:2018. Selain itu, Perusahaan menerapkan Standar Internasional Pengoperasian Kapal sesuai ISM *Code* sebagai pedoman untuk menjaga operasional yang aman dan sesuai standar global. Nilai-nilai tersebut kemudian disampaikan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi yang mencakup:

1. Mencanangkan transformasi budaya, yang salah satu sasarannya adalah transformasi budaya K3 (*safety first*).
2. Melakukan induksi/pelatihan K3 bagi semua pekerja baru.

In its implementation, the Company establishes best practices, including the use of statistical analysis, to ensure that all processes are carried out comprehensively and consistently. Efforts to enhance occupational safety are also undertaken through the integration of OHS aspects into a comprehensive evaluation system based on an Integrated Management System referring to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016 and ISO 45001:2018. Furthermore, the Company applies the International Safety Management (ISM) Code as the standard for ship operations to ensure safe operations in accordance with global standards. These values are continuously communicated through socialization activities, including:

1. Launching cultural transformation initiatives, one of which is the transformation of OHS culture with a "safety first" focus.
2. Conducting OHS induction and training for all new employees.

3. Memasukkan unsur K3 pada setiap *project* yang dilakukan di cabang/anak perusahaan, minimal implementasi *housekeeping* dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada area wajib APD.

4. Melakukan *safety patrol* di lingkungan kerja yang mempunyai risiko tinggi.
5. Melakukan inspeksi dan internal audit untuk memastikan Sistem Manajemen Terpadu Keselamatan dapat berjalan dengan baik.
6. *Fit to Work* di Atas Kapal.
7. *Safety Awareness* untuk kapal dan *Office*.

METODE PROSES PDCA DALAM SISTEM MANAJEMEN K3

Perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 dengan memanfaatkan metode PDCA sebagai dasar dalam menghadapi berbagai isu keselamatan dan kesehatan kerja. Metode PDCA berperan sebagai mekanisme yang terstruktur untuk memastikan peningkatan berkelanjutan atas penerapan K3 di seluruh area operasional. Siklus PDCA mencakup 4 (empat) tahapan, yaitu Perencanaan (*Plan*), Pelaksanaan (*Do*), Pemeriksaan (*Check*), dan Perbaikan (*Act*). Di lingkungan Perusahaan, penerapan metode tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

1. *Plan*/Perencanaan
   Perusahaan melakukan kajian terhadap tujuan implementasi K3 serta proses yang dibutuhkan untuk merespon masalah yang terjadi. Tahapan ini dilakukan untuk menerapkan sistem manajemen yang terukur dan tepat sasaran. Selain itu, Perusahaan juga ingin meraih hasil yang diharapkan melalui perencanaan ini.

2. *Do*/Pelaksanaan
   Setelah mengkaji problematika yang ada, Perusahaan melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Selama proses eksekusi, Perusahaan senantiasa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sebagai acuan kinerja sistem manajemen. Hal tersebut akan memberikan gambaran untuk tahapan selanjutnya kepada Perusahaan terhadap proses implementasi yang dilakukan.
3. *Check*/Evaluasi
   Pada tahap ini, Perusahaan melakukan evaluasi atas kinerja implementasi sistem manajemen yang sudah diterapkan. Evaluasi dilakukan guna menilai apakah hasil eksekusi sudah sesuai sasaran dan juga permasalahan yang terjadi ketika proses implementasi.

3. Incorporating OHS elements into every project carried out at branches and subsidiaries, at a minimum through the implementation of good housekeeping practices and the use of Personal Protective Equipment (PPE) in mandatory PPE areas.
4. Conducting safety patrols in high-risk work environments.
5. Conducting inspections and internal audits to ensure that the Integrated Safety Management System operates effectively.
6. Fitness for Work on Board.
7. Safety Awareness for Onboard and Office Settings.

THE PROCESS OF PDCA METHOD IN OHS MANAGEMENT

The Company implements an OHS management system by applying the PDCA method as a fundamental approach in addressing various OHS issues. The PDCA method serves as a structured mechanism to ensure continuous improvement in the implementation of OHS across all operational areas. The PDCA cycle consists of four stages: Planning (Plan), Implementation (Do), Evaluation (Check), and Corrective Action (Act). Within the Company, the application of this method is carried out through the following steps:

1. Plan/Planning
   The Company conducts assessments of OHS implementation objectives and the processes required to respond to identified issues. This stage is undertaken to establish a measurable and well-targeted management system. Through this planning process, the Company aims to achieve the expected outcomes effectively.
2. Do/Implementation
   After reviewing the existing issues, the Company implements the established procedures. During the execution process, the Company continuously collects relevant data as a reference for evaluating the performance of the management system. This provides a clear basis for subsequent stages in assessing the effectiveness of the implementation.

3. Check/Evaluation
   At this stage, the Company evaluates the performance of the implemented management system. The evaluation is conducted to determine whether the execution results align with the established objectives and to identify any issues that arise



Selanjutnya, Perusahaan akan mengkaji solusi untuk diterapkan pada tahap selanjutnya.

4. *Act*/Tindak Lanjut
   Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Perusahaan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada. Tahap ini dilakukan untuk menjaga konsistensi implementasi metode terhadap sistem manajemen K3. Setelah melakukan tindak lanjut, Perusahaan dapat meningkatkan kinerja yang berhasil serta memperbaiki permasalahan untuk proses selanjutnya.

during implementation. The Company then reviews appropriate solutions to be applied in the next stage.

4. Act/Follow-Up Actions
   Based on the evaluation results, the Company undertakes follow-up actions to address identified issues. This stage is carried out to maintain consistency in the application of the OHS management system. Through these actions, the Company enhances successful practices and improves identified shortcomings to support subsequent improvement cycles.

SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Tanggal Perolehan Received Date	Uraian Description	Pemberi Sertifikasi Issuer	Masa Berlaku Validity
Nasional National			
6 Oktober 2025 October 6, 2025	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Safety, Welfare, and Health Management System	Menteri Ketenagakerjaan RI Manpower Ministry of the Republic of Indonesia	6 Oktober 2028 October 6, 2028
17 Desember 2025 December 17, 2025	Sertifikat *Contractor Safety Management System* Contractor Safety Management System Certificate	PLN	17 Desember 2028 December 17, 2028
Internasional International			
11 November 2025 November 11, 2025	*International Safety Management Code* (ISM *Code*)	Direktur Jenderal Perhubungan Laut (refer to IMO) Director General of Maritime Transportation	10 April 2026 April 10, 2026
26 November 2025 November 26, 2025	ISO 9001:2015	NQA	2 Februari 2027 February 1, 2027
26 November 2025 November 26, 2025	ISO 37001:2016	KAN	5 Februari 2029 February 5, 2029
26 November 2025 November 26, 2025	ISO 14001:2015	NQA	2 Februari 2027 February 2, 2027
26 November 2025 November 26, 2025	ISO 45001:2018	NQA	2 Februari 2027 February 2, 2027


TRI WIBOWO
SAFETY
PLAN

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Skor ACGS 124,67 berpredikat *Leadership* in *Corporate Governance* menegaskan bahwa integritas dan transparansi adalah fondasi kepercayaan yang melandasi setiap aspek pengelolaan usaha Perusahaan.

An ACGS score of 124.67, with a "Leadership in Corporate Governance" rating, emphasizes that integrity and transparency are the foundation of trust underpinning every aspect of the Company's business management.


PELINDO
KT JAYANEGARA 310



Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy



KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN GCG

IPCM menempatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan strategis. GCG tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi sebagai sistem yang memastikan keberlangsungan usaha, pengelolaan risiko yang prudent, serta perlindungan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun pelaporan, IPCM secara berkelanjutan memperkuat kerangka tata kelola melalui peningkatan kapasitas dan disiplin organisasi, termasuk penguatan pemahaman insan Perusahaan terhadap akuntabilitas, pengendalian internal, dan kepatuhan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses bisnis dijalankan secara konsisten, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

IPCM juga mendorong keterlibatan aktif lintas fungsi dalam menginternalisasi prinsip GCG, sehingga tercipta keselarasan antara kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kehati-hatian dalam setiap aktivitas usaha.

COMPANY COMMITMENT ON GCG IMPLEMENTATION

IPCM prioritizes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a fundamental principle in business management and strategic decision-making. GCG is not only viewed as a compliance obligation but as a system that ensures business continuity, prudent risk management, and protection of the interests of all stakeholders.

Throughout the reporting year, IPCM continuously strengthened its governance framework by improving organizational capacity and discipline, including strengthening the Company's understanding of accountability, internal control, and compliance. This step was taken to ensure that all business processes are carried out in a consistent, structured, and accountable manner.

IPCM also encourages active cross-functional involvement in the internalization of GCG principles, thereby creating harmony between policy, implementation, and supervision. This approach is part of efforts to build a work culture that upholds integrity, professionalism, and prudence in all business activities.

Dengan penguatan tata kelola yang berkesinambungan, IPCM berupaya menjaga keandalan proses bisnis, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Komitmen terhadap GCG ini menjadi landasan utama bagi IPCM dalam mendukung kinerja yang berkelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

Through continuous governance strengthening, IPCM strives to maintain the reliability of business processes, improve the quality of decision-making, and strengthen stakeholder trust. This commitment to GCG is the main foundation for IPCM's support of sustainable performance and long-term growth.

PRINSIP UMUM GCG

IPCM menjadikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan pengelolaan dan pengambilan keputusan serta senantiasa berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, Perseroan mengadopsi empat prinsip utama GCG yang dirangkum dalam konsep ETAK, yaitu Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan. Penerapan prinsip ETAK ini menjadi pedoman bagi seluruh Insan Perseroan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas operasional, guna memastikan terciptanya nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan prinsip ETAK di Perseroan telah mengacu pada Pedoman Umum GCG Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) Tahun 2021 yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sebagai kerangka acuan penerapan tata kelola yang konsisten dan relevan. Melalui penerapan tata kelola yang selaras dengan pedoman tersebut, Perseroan berupaya memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat ketahanan bisnis, kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan di sektor jasa maritim.

GENERAL PRINCIPLES OF GCG

IPCM establishes good corporate governance as the foundation for management and decision-making, and is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) as the main foundation for sustainably conducting business activities. In its implementation, the Company adopts four main principles of GCG, which are summarized in the ETAK concept, namely Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability. The application of the ETAK principles serves as a guideline for all Company personnel in decision-making and the implementation of operational activities, in order to ensure the creation of long-term added value for shareholders and all stakeholders.

The implementation of the ETAK principles at the Company has been based on the General Guidelines for GCG of the National Committee on Governance Policy (KNKG), the Integrated Governance Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), and the 2021 Indonesian Corporate Governance General Guidelines (PUGKI) compiled by the National Governance Policy Committee (KNKG) as a reference framework for consistent and relevant governance implementation. Through the implementation of governance in line with these guidelines, the Company strives to ensure that it is managed professionally, transparently, and responsibly, while strengthening business resilience, stakeholder trust, and supporting sustainable business growth in the maritime services sector.

Perilaku Beretika
Ethical Conduct

Definisi:
Dalam melaksanakan kegiatannya, Korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Definition:
In its operations, the Corporation consistently prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, and upholds moral values and trust consistently. The Corporation also emphasizes shareholder and stakeholder interests, adhering to principles of fairness and equality, independently managed to ensure that no corporate organ dominates over others and remains free from external intervention.



Perilaku Beretika
Ethical Conduct

Penerapan di lingkup JAI:
- JAI memiliki Kode Etik sebagai panduan dalam mengarahkan perilaku dan tindakan di dalam Perusahaan, termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.
- JAI menerapkan nilai-nilai utama "AKHLAK" sebagai bagian integral dari budaya perusahaan.
- JAI memiliki kebijakan anti korupsi dan gratifikasi untuk mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap, dan/atau gratifikasi.

Application at JAI:
- JAI has a Code of Conduct serving as a Guideline for behavior and actions within the Company, including interactions with stakeholders.
- JAI integrates the main values of "AKHLAK" into its company culture.
- JAI has an anti-corruption and gratification policy aimed at addressing corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery, and/or gratification.

Akuntabilitas
Accountability

Definisi:
Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Penerapan di lingkup JAI:
- Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki pembagian tugas yang telah disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, serta memiliki Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
- JAI secara berkala melaporkan kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham.
- Pelaksanaan audit atas laporan keuangan Perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal.
- JAI secara konsisten melakukan evaluasi atas penerapan GCG, manajemen risiko, tata kelola IT.
- JAI senantiasa melakukan pelaksanaan RUPS serta penyampaian laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan.

Definition:
Corporation must be transparent and fair in being accountable for their performance. Therefore, they need to be managed correctly, measurably, and in alignment with corporate interests, while also considering the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary requirement for achieving sustainable performance.

Application at JAI:
- In performing their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Directors have allocated segregation of duties in accordance with the Articles of Association and relevant regulations, and adhering to a Work Guideline for the Board of Commissioners.
- JAI routinely presents the Company's performance to Shareholders.
- The audit of the Company's financial statements is conducted by an external auditor.
- JAI consistently evaluates the implementation of GCG, risk management, and IT governance.
- JAI consistently holds GMS and submits annual report as a form of accountability for company management.

Transparansi
Transparency

Definisi:
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan di lingkup JAI:
- Perusahaan secara rutin mengirimkan laporan keuangan dan informasi terkait kepada OJK dan BEI untuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi.
- Informasi mengenai JAI tersedia di *website* perusahaan yang dapat diakses oleh pihak eksternal.
- JAI menggunakan media sosial untuk informasi dan transparansi kegiatan perusahaan.
- Perusahaan menyediakan media pelaporan pelanggaran yang dapat diakses melalui *email* maupun *platform* yang telah disediakan.

Definition:
To maintain objectivity in business operations, corporation ensure the provision of material and relevant information in a manner that is easily accessible and comprehensible to stakeholders. Corporation take the initiative to disclose not only the issues required by statutory regulations but also matters crucial for decisionmaking by shareholders, creditors, and other stakeholders.

Application at JAI:
- The company regularly submits financial reports and related information to the OJK and the IDX to fulfill its disclosure obligations.
- Information about JAI is available on the company's website, which is accessible to external parties.
- JAI uses social media to provide information and ensure transparency regarding the company's activities.
- The company provides a channel for reporting violations, which can be accessed via email or through the designated platform.

Keberlanjutan
Sustainability

Definisi:
Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Penerapan di lingkup JAI:
- JAI melaksanakan program CSR untuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya.
- JAI menjalankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola atau *Environmental, Social and Governance* (ESG).
- JAI menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Definition:
Corporation complies with statutory regulations and is committed to fulfilling its responsibilities towards society and the environment to contribute to sustainable development by collaborating with all relevant stakeholders to enhance their well-being in a manner aligned with both business interests and the sustainable development agenda.

Application at JAI:
- JAI implements a CSR program to fulfill its social responsibility towards the surrounding community.
- JAI adheres to environmental, social, and governance (ESG) principles.
- JAI implements Sustainable Development Goals (SDG's).

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

IPCM menerapkan GCG dengan mengacu pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 61);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 21 April 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 58);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-1/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 261);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-3/MBU/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman tata Kelola Perusahaan terbuka;
11. Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor PER.0045/HK.101/PLJM-2025 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Pedoman *Good Corporate Governance*;

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF GCG

IPCM implements GCG with reference to the following provisions:

1. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number: 64 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3608);
2. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number: 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756)
3. Law No. 14 of 2008 dated April 30, 2008 concerning Public Information Disclosure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number: 61)
4. Law No. 19 of 2016 dated November 25, 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 dated April 21, 2008 concerning Electronic Information and Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 251 and State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number: 58);
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-1/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 261)
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 263);
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 263)
8. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
9. Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
10. Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Guidelines for the Governance of Public Companies;
11. Regulation of the Board of Directors of PT Pelindo Jasa Maritim Number PER.0045/HK.101/PLJM-2025 dated December 22, 2023 concerning Guidelines for Good Corporate Governance;



12. PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 24 tanggal 10 Juli 2013, yang dibuat oleh dan di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-47228.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 9 September 2013, sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 44 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0047245.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 32 tanggal 12 Juni 2024;
13. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 Diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Komite Nasional Kebijakan Governansi.

GOVERNANCE FRAMEWORK

IPCM menerapkan kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagai pedoman terintegrasi untuk memperkuat fondasi tata kelola dan memastikan pencapaian tujuan strategis Perusahaan, dengan cakupan sebagai berikut:

1. Prinsip Tata Kelola (*Governance Principle*) IPCM yakni prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola IPCM yaitu ETAK.
2. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) IPCM yakni desain mengenai fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta fungsi pengawasan terhadap Perusahaan.
3. Proses Tata Kelola (*Governance Process*) IPCM yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh Direksi dan pekerja untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola IPCM telah dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan.
4. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) IPCM yakni perwujudan dari penerapan dan penegakan Tata Kelola IPCM dalam bentuk pencapaian kredibilitas Perusahaan.

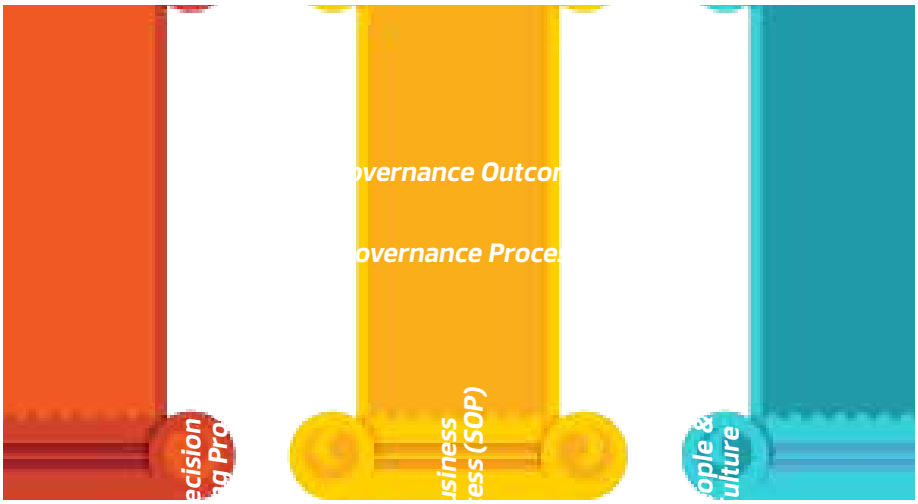
12. PT Jasa Armada Indonesia Tbk was established under the laws of the Republic of Indonesia and based on Company Deed of Establishment Number 24 dated July 10, 2013, drawn up by and before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta and ratified by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-47228. AH.01.01 of 2013 dated September 9, 2013, as amended several times and most recently amended by the Deed of Statement of the Annual General Meeting of Shareholders Number: 44 dated June 23, 2022, drawn up before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta and approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0047245.AH.01.02. Year 2022 dated July 8, 2022, in conjunction with Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders Number: 32 dated June 12, 2024;
13. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) 2021 Published by the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia and the National Committee on Governance Policy.

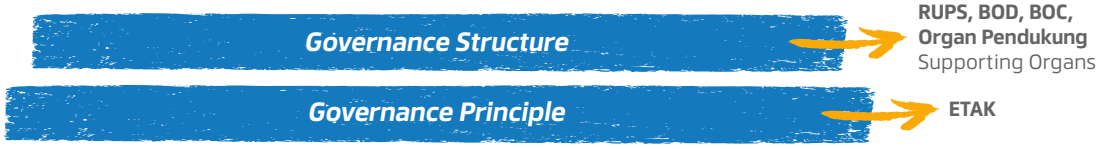
GOVERNANCE FRAMEWORK

IPCM implements a Good Corporate Governance (GCG) framework as an integrated guideline to strengthen the foundation of governance and ensure the achievement of the Company's strategic objectives, with the following scope:

1. IPCM Governance Principles as the underlying principles Guideline the implementation and enforcement of IPCM governance, encapsulated in ETAK.
2. IPCM Governance Structure, encompasses the design of the functions, duties, authority, and supervisory roles within the Company.
3. IPCM Governance Process that includes a set of standards and procedures utilized by the Board of Directors and employees to ensure that the implementation and enforcement of IPCM Governance are performed in a planned, consistent, and sustainable manner.
4. IPCM Governance Outcomes that represent the tangible results of implementing and enforcing IPCM Governance, culminating in the achievement of Company credibility.

Governance House
Governance House





RUPS, BOD, BOC,
Organ Pendukung
Supporting Organs

ETAK



Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan

Development of the Implementation of Good Corporate Governance Within the Company

PENETAPAN STANDAR KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUSAHAAN

Penetapan standar kualitas tata kelola perusahaan yang baik dilakukan sebagai acuan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sebagai BUMN dan perusahaan terbuka, IPCM menerapkan GCG secara konsisten sesuai Peraturan Menteri BUMN dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta memperkuat penerapannya melalui adopsi prinsip ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 guna mendukung keberlanjutan usaha.

SOFT STRUCTURE TATA KELOLA PERUSAHAAN

IPCM menetapkan pedoman tertulis sebagai dasar penerapan GCG yang disusun mengacu pada Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, dan *best practices*. Pedoman ini menjadi acuan bagi manajemen dan unit kerja dalam menerapkan prinsip *checks and balances*. Adapun *soft structure* GCG IPCM meliputi:

DETERMINATION OF QUALITY STANDARDS FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE WITHIN THE COMPANY

The establishment of good corporate governance quality standards serves as a reference for transparent, accountable, and ethical corporate management. As a state-owned enterprise (SOE) and a publicly listed company, IPCM consistently implements GCG in accordance with the Minister of SOE Regulation and Financial Services Authority regulations, and strengthens its implementation through the adoption of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) principles and the 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI) to support business sustainability.

SOFT STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

IPCM has established written guidelines as the basis for implementing GCG, which are compiled with reference to the Articles of Association, laws and regulations, and best practices. These guidelines serve as a reference for management and work units in implementing the principle of checks and balances. The soft structure of IPCM's GCG includes:

***Soft Structure*/Kebijakan IPCM** Soft Structure/IPCM Policy	**Pemberlakuan** Implementation
Anggaran Dasar Perusahaan Company's Articles of Association	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 44 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047245. AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022. Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders Number 44 dated June 23, 2022, made before Ashoya Ratam S.H., M.Kn, Notary in Jakarta and ratified by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022.
Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*) Corporate Governance Policy (GCG Code)	Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/7/11/4/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 7 November 2025 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.01/7/11/4/KGC/DUT/JAI-25 dated November 7, 2025 regarding Good Corporate Governance (GCG) Guidelines within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Work Procedures for the Board of Commissioners and Directors	Surat Keputusan Bersama Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The Collective Decree Number: HK.56/4/10/3/MS-21 ratified on October 4, 2021 concerning the Board of Commissioners and Directors Work Procedure Guidelines (Board Manual) of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

***Soft Structure*/Kebijakan IPCM** Soft Structure/IPCM Policy	**Pemberlakuan** Implementation
Pedoman Perilaku Perusahaan (Kode Etik Perusahaan) Company Code of Conduct (Company Code of Ethics)	Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/7/11/5/KGC/DUT/JAI-25 Tanggal 7 November 2025 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.01/7/11/5/KGC/DUT/JAI-25 dated November 7, 2025 concerning the Business Code of Ethics Guidelines of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Surat Keputusan Nomor: SK.DK/28/03/01/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Piagam Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decision Letter No. SK.DK/28/03/01/JAI-2024 dated March 28, 2024, regarding the Charter of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Piagam Audit Audit Charter	Piagam Audit Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025. Audit Charter 2025 dated December 1, 2025.
Kebijakan Sistem Manajemen Terpadu Integrated Management System Policy	Peraturan Direksi No. HK.01/25/10/2/ARD/DUT/JAI-24 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Terpadu di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation No. HK.01/25/10/2/ARD/DUT/JAI-24 dated October 25, 2024 regarding Guidelines for Integrated Management Systems within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan Pengendalian Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Hiburan Policy for Receiving and Providing Gifts/Entertainment	Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/10/11/10/KGC/DUT/JAI-25 Tanggal 10 November 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.01/10/11/10/KGC/DUT/JAI-25 dated November 10, 2025 regarding PT Jasa Armada Indonesia Tbk Gratuity Control Guidelines.
Kebijakan Penerapan *Whistleblowing System* Whistleblowing System Implementation	Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/7/11/6/KGC/DUT/JAI-25 Tanggal 7 November 2025 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.01/7/11/6/KGC/DUT/JAI-25 dated November 7, 2025 regarding the Whistleblowing System Guidelines of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy	Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/24/3/2/TRK/DUT/JAI-25 Tanggal 24 Maret 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.01/24/3/2/TRK/DUT/JAI-25 dated March 24, 2025 regarding the Implementation of Risk Management within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan Penetapan Tata Kelola *Business Continuity Management System* (BCMS) Determination Policy for the Governance of Business Continuity Management System (BCMS)	Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: PW.05.01/19/12/2/MRK/DUT/JAI-25 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penetapan Tata Kelola *Business Continuity Management System* (BCMS) di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: PW.05.01/19/12/2/MRK/DUT/JAI-25 dated December 19, 2025 concerning the Determination of Business Continuity Management System (BCMS) Governance within PT Jasa Armada Indonesia Tbk
Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Human Resources (HR) Policy	Surat Keputusan No. HK.01/15/3/3/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 3 Maret 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor OT-690/1/10/1/MS-21 Tanggal 1 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree No. HK.01/15/3/3/SRA/DUT/JAI-24 dated March 3, 2024 concerning the Second Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number OT-690/1/10/1/MS-21 dated October 1, 2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Management of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan Standar Pelayanan Informasi/Data dan Dokumentasi kepada Pengguna Informasi Standard Policy for Information/Data and Documentation Services to Information Users	Surat Keputusan No. HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree No. HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 dated August 20, 2024 concerning Guidelines for the Implementation of Public Information Disclosure within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Anti-Bribery Management System (SMAP)	Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/10/11/3/KGC/DUT/JAI-25 Tanggal 10 November 2025 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.01/10/11/3/KGC/DUT/JAI-25 dated November 10, 2025 regarding the Implementation of the Anti-Bribery Management System of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan Benturan Kepentingan Terintegrasi Integrated Conflict of Interest Policy	Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/10/11/9/KGC/DUT/JAI-25 Tanggal 10 November 2025 tentang Pedoman Benturan Kepentingan Terintegrasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.01/10/11/9/KGC/DUT/JAI-25 dated November 10, 2025 regarding Integrated Conflict of Interest Guidelines of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.



***Soft Structure*/Kebijakan IPCM** Soft Structure/IPCM Policy	**Pemberlakuan** Implementation
Kebijakan Anti *Fraud* Anti-Fraud Policy	Peraturan Direksi Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/10/11/4/KGC/DUT/JAI-25 Tanggal 10 November 2025 Tentang Pedoman Anti Fraud PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.01/10/11/4/KGC/DUT/JAI-25 dated November 10, 2025 regarding Anti-Fraud Guidelines of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kebijakan *Environment, Social and Governance* Environment, Social and Governance Policy	Peraturan Direksi Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/6/11/3/KGC/DUT/JAI-25 Tanggal 6 November 2025 Tentang Pedoman Penerapan *Environmental, Social* dan *Governance* (ESG) di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.01/6/11/3/KGC/DUT/JAI-25 dated November 6, 2025 regarding Guidelines for the Implementation of Environment, Social and Governance (ESG) within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

SOSIALISASI GCG

Sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan pemahaman terhadap praktik GCG, IPCM secara konsisten menyelenggarakan sosialisasi di lingkungan Perusahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai forum formal, rapat internal, serta aktivitas kebersamaan, dengan dukungan berbagai sarana komunikasi. Selain penyampaian secara langsung, materi GCG juga diakses melalui portal internal dan laman resmi Perusahaan, sehingga seluruh insan Perusahaan dapat memahami dan mendukung penerapan GCG secara menyeluruh.

GCG SOCIALIZATION

To build awareness and understanding of GCG practices, IPCM consistently holds outreach events within the Company. These activities are carried out through various formal forums, internal meetings, and community activities, with the support of various communication tools. In addition to direct delivery, GCG materials are also accessible through the Company's internal portal and official website, so that all Company personnel can understand and support the comprehensive implementation of GCG.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2025

IPCM menegaskan komitmennya dalam menerapkan GCG secara konsisten, sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Implementasi GCG dipetakan melalui 5 (lima) aspek utama, 8 (delapan) prinsip dasar, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang tercantum dalam pedoman resmi. Rekomendasi ini menjadi standar minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan terbuka untuk memastikan praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung kepercayaan pemangku kepentingan dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

Hasil pemetaan atas implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka pada Tahun Buku 2025 menunjukkan bahwa PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah memenuhi seluruh 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Perseroan dalam menjalankan praktik tata kelola yang sesuai regulasi sekaligus sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

IPCM akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan GCG untuk memperkuat fondasi berkelanjutan dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

Assessment of GCG Implementation for Financial Year 2025

IPCM affirms its commitment to consistently implementing GCG, as stipulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Corporate Governance of Public Companies.

The implementation of GCG is mapped out through 5 (five) main aspects, 8 (eight) basic principles, and 25 (twenty-five) governance recommendations listed in the official guidelines. These recommendations are the minimum standards that must be met by public companies to ensure transparent, accountable, and responsible governance practices, thereby supporting stakeholder trust and business sustainability.

Mapping results regarding the implementation of the Public Company Governance Guidelines for the 2025 Fiscal Year show that PT Jasa Armada Indonesia Tbk has met all 25 (twenty-five) recommendations set forth. This achievement reflects the Company's strong commitment to implementing governance practices that comply with regulations and are in line with the interests of shareholders and stakeholders.

IPCM will continue to evaluate and refine GCG to strengthen its sustainable foundation and support long-term value creation.

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks, IPCM menempatkan integritas dan reputasi sebagai landasan utama pengelolaan perusahaan yang unggul. Perusahaan terus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan kinerja operasional serta keuangan mencapai standar tertinggi, selaras dengan prinsip perusahaan yang dikelola secara profesional dan transparan.

Sebagai upaya memastikan kepatuhan terhadap praktik tata kelola terbaik, IPCM menggunakan ASEAN CG Scorecard sebagai alat kuantitatif untuk menilai implementasi tata kelola perusahaan publik di kawasan ASEAN, berdasarkan standar internasional dan prinsip-prinsip OECD. Untuk memastikan objektivitas, IPCM menunjuk PT Pratama Indomitra Konsultan sebagai pihak independen untuk melakukan analisis dan pengukuran.

Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan merujuk pada informasi publik, termasuk Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, kebijakan internal, serta dokumentasi RUPS tahun 2025 dalam Bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya Bahasa Inggris. Evaluasi juga mencakup transparansi informasi di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa IPCM memperoleh skor keseluruhan 124,67 poin, dikategorikan sebagai "*Leadership in Corporate Governance*". Rincian skor tertimbang untuk masing-masing komponen *Scorecard* adalah sebagai berikut:

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Confronted with complex business challenges, IPCM places integrity and reputation as the cornerstone of excellent corporate governance. The company continues to strengthen stakeholder trust and ensure that its operational and financial performance meets the highest standards, in line with the principles of professional and transparent corporate management.

To ensure compliance with best governance practices, IPCM uses the ASEAN CG Scorecard as a quantitative tool to assess the implementation of corporate governance of public companies in the ASEAN region, based on international standards and OECD principles. To ensure objectivity, IPCM appointed PT Pratama Indomitra Konsultan as an independent party to conduct analysis and measurement.

The assessment was conducted comprehensively by referring to public information, including Annual Reports, Sustainability Reports, internal policies, and documentation of the 2025 GMS in Indonesian and at least English. The evaluation also covered the transparency of information on the websites of the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Financial Services Authority (OJK).

The evaluation results show that IPCM obtained an overall score of 124.67 points, categorized as "Leadership in Corporate Governance." The details of the weighted scores for each component of the Scorecard are as follows:

No.	Komponen Nilai Tahun 2025 Component Value in 2025 Komponen Penilaian Assessment Components	Skor 2025 Score 2025	Skor 2024 Score 2024	Perbandingan Comparison
A	Hak dan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	20,00	20,00	-
B	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	15,00	15,00	-
C	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	25,00	23,53	1,47
D	Tanggung Jawab Dewan Komisaris Responsibilities of the Board of Commissioners	38,67	35,86	2,81
Total Level 1		**98,67**	**94,39**	**4,28**
1	Bonus	26	26	-
2	Penalti Penalty	0	-2	2
Total Level 2		**26**	**24**	**2**
Level 1 + Level 2		**124,67**	**118,39**	**6,28**



Skor *Assessment* GCG

Berikut adalah ringkasan pencapaian JAI terkait penerapan GCG dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

GCG Assessment Score

The following is a summary of JAI's achievements related to the implementation of GCG over the past five years.

Tahun Buku Financial Year	Skor *Assessment* GCG GCG Assessment Score	Parameter Pengukuran Measurement Parameters	Predikat Predicate	Lembaga Penilai Assessor
2025	124,67	ACGS	*Leadership in Corporate Governance*	PT Pratama Indomitra Konsultan
2024	118,39	ACGS	*Leadership in Corporate Governance*	PT Pratama Indomitra Konsultan
2023	98,18	ACGS	*Very Good*	PT Pratama Indomitra Konsultan
2022	98,58	SK 16 Kementerian BUMN SK 16 of SOE Ministry	Sangat Baik Very Good	PT Pratama Indomitra Konsultan
2021	98,24	SK 16 Kementerian BUMN SK 16 of SOE Ministry	Sangat Baik Very Good	PT Kharisma Integrasi Manajemen

PETA JALAN PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Hingga saat ini, IPCM belum memiliki *roadmap* GCG yang formal. Namun, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik terus dikaji dan dievaluasi secara berkala, sesuai ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, untuk memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh aspek operasional perusahaan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT ROADMAP

Currently, IPCM does not have a formal GCG roadmap. However, the implementation of good corporate governance principles continues to be reviewed and evaluated periodically, in accordance with applicable laws and regulations, to ensure compliance, transparency, and accountability in all aspects of the Company's operations.


WIBOWO
PELINDO



Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Structure

STRUKTUR ORGAN GCG DAN MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN

IPCM menegaskan penerapan tata kelola perusahaan yang kuat, profesional, dan berlandaskan regulasi yang berlaku. Struktur tata kelola perusahaan mencakup tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui komite pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang memastikan kebijakan dan pengambilan keputusan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.

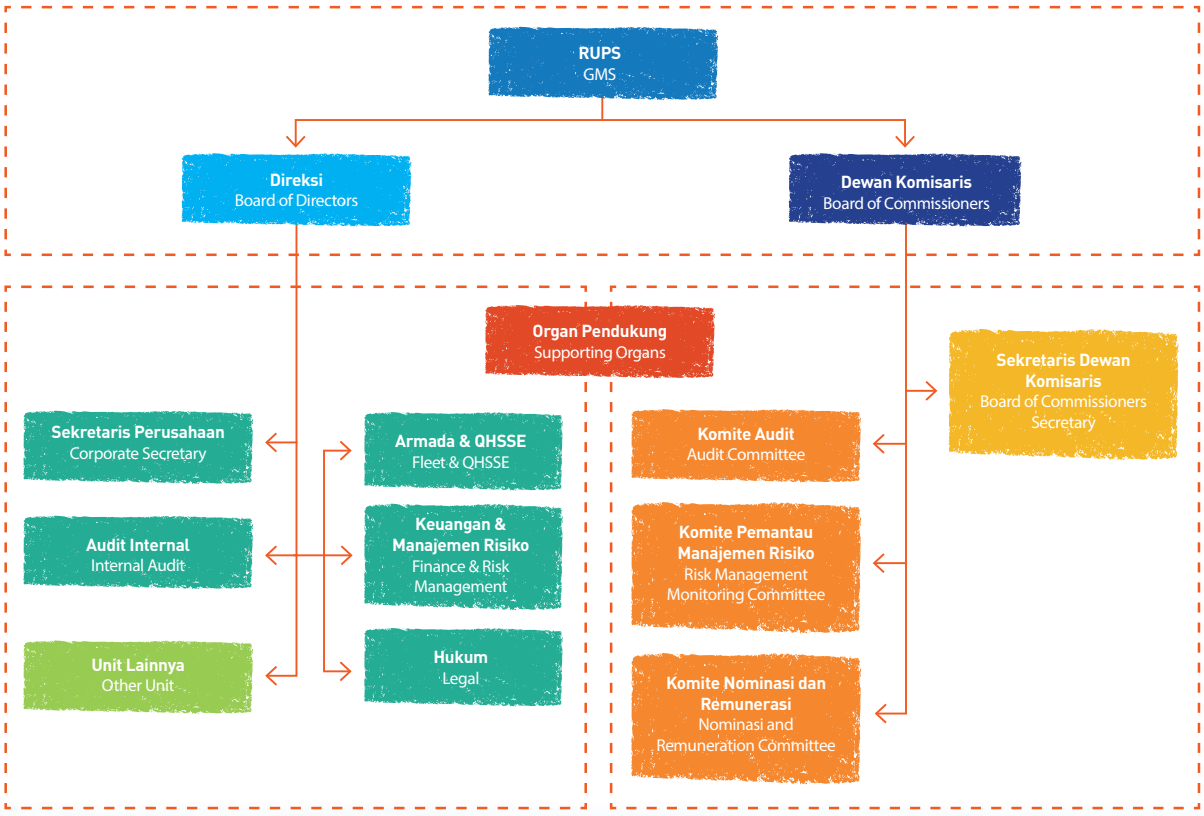
Di sisi operasional, Direksi memimpin pengelolaan perusahaan dengan dukungan Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal, menjaga kepatuhan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.

GCG ORGAN STRUCTURE AND RELATIONSHIP MECHANISMS BETWEEN ORGANS

IPCM emphasizes the implementation of strong, professional corporate governance based on applicable regulations. The corporate governance structure comprises three main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors in accordance with the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The Board of Commissioners optimizes its supervisory function through supporting committees, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee, which ensure that policies and decision-making are in line with good governance principles.

From an operational perspective, the Board of Directors leads the management of the Company with the support of the Corporate Secretary and Internal Audit, maintaining compliance, the effectiveness of the internal control system, and ensuring that all business processes are transparent, accountable, and have integrity.



Perusahaan menegakkan tata kelola yang kuat untuk menjamin setiap keputusan dan aktivitas operasional sesuai prinsip GCG. RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung lainnya berperan aktif dalam memastikan fungsi dan tanggung jawab dijalankan secara transparan, adil, dan bebas benturan kepentingan. Pendekatan ini memperkuat keberlanjutan usaha jangka panjang sekaligus meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham dan Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali hingga Entitas Pemilik Akhir

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Pemegang Saham tidak berwenang untuk mengintervensi fungsi, tugas, atau wewenang Dewan Komisaris maupun Direksi. Struktur kepemilikan saham IPCM terbagi menjadi Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lain yang merupakan pendiri Perusahaan. Komposisi saham di Perusahaan terdiri dari PT Pelindo Jasa Maritim sebesar 76,89%, Publik sebesar 23,00%, dan PT Multi Terminal Indonesia sebesar 0,11%. Rincian lebih lengkap mengenai struktur serta daftar Pemegang Saham Utama dan Pengendali dapat dilihat pada bagian *"Komposisi Pemegang Saham"* di Bab Profil Perusahaan.

Hak Pemegang Saham

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melindungi hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*). Hak-hak Pemegang Saham meliputi:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan, secara tepat waktu dan teratur;
6. Hak untuk menerima sebagian dan keuntungan Perusahaan yang diperuntungkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.

The Company enforces strong governance to ensure that every decision and operational activity complies with GCG principles. The GMS, Board of Commissioners, Board of Directors, and other supporting organs play an active role in ensuring that functions and responsibilities are carried out transparently, fairly, and free from conflicts of interest. This approach strengthens long-term business sustainability while increasing value for shareholders and stakeholders.

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Shareholders and Information about Major/Controlling Shareholders, up to the Final Owner Entity

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares in the Company. Shareholders are not authorized to interfere with the functions, duties, or authority of the Board of Commissioners or the Board of Directors. IPCM's share ownership structure is divided into Major/Controlling Shareholders and other Shareholders who are the founders of the Company. The share composition of the Company consists of PT Pelindo Jasa Maritim at 76.89%, the Public at 23.00%, and PT Multi Terminal Indonesia at 0.11%. More detailed information regarding the structure and list of Major and Controlling Shareholders can be found in the "Shareholder Composition" section in the Company Profile chapter.

Shareholders Rights

The Company is dedicated to protecting the rights of its shareholders as outlined in the Articles of Association and Corporate Governance Policy (GCG Code). These rights includes:

1. The right to request the convening of a General Meeting of Shareholders (GMS);
2. The right to seek information regarding the agenda of the GMS;
3. The right to propose items for discussion at the GMS agenda;
4. The right to attend and cast votes at the GMS;
5. The right to receive timely and regular updates regarding the Company;
6. The right to receive a portion of the Company's profits through dividends and other profit-sharing mechanisms.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi dalam tata kelola perusahaan yang wewenangnya tidak dapat digantikan pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS menjadi forum bagi Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam arah dan perkembangan perusahaan melalui pengambilan keputusan strategis.

RUPS terbagi menjadi dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan minimal sekali dalam setahun, paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Sementara itu, RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja sesuai kebutuhan atau urgensi perusahaan, untuk membahas dan memutuskan agenda tertentu. Namun, agenda utama seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dan penggunaan laba hanya dibahas dalam RUPS Tahunan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS memiliki peran strategis bagi kelangsungan perusahaan. Beberapa keputusan penting meliputi perubahan Anggaran Dasar, persetujuan laporan keuangan, pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, semuanya mengacu pada Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in corporate governance, whose authority cannot be replaced by any other party, in accordance with applicable laws and regulations. The GMS serves as a forum for shareholders to participate in the direction and development of the Company through strategic decision-making.

The GMS is divided into two types, namely Annual GMS and Extraordinary GMS. The Annual GMS must be held at least once a year, no later than six months after the end of the fiscal year. Meanwhile, an Extraordinary GMS can be held at any time according to the Company's needs or urgency, to discuss and decide on a specific agenda. However, main agendas such as annual reports, financial reports, and profit utilization are only discussed in the Annual GMS.

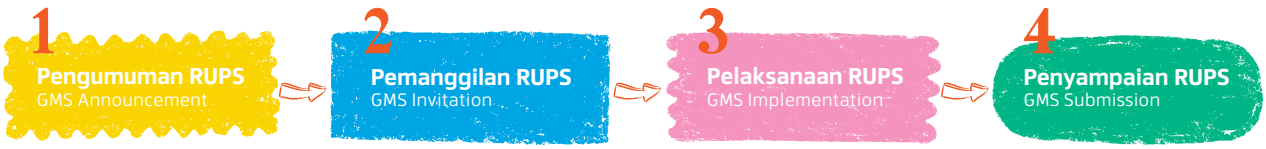
Decisions made in the GMS have a strategic role in the Company's continuity. Several important decisions include amendments to the Articles of Association, approval of financial statements, appointment or dismissal of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, evaluation of the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, and determination of the remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, all of which refer to the Articles of Association and the Limited Liability Company Law.

Tahapan Pelaksanaan RUPS

Penyelenggaraan RUPS di Perusahaan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku. Setiap tahapan melibatkan persiapan waktu serta penyediaan bahan-bahan yang diperlukan guna memastikan kelancaran jalannya RUPS. Berikut adalah langkah-langkah standar yang diterapkan dalam proses pelaksanaan RUPS di Perusahaan, yaitu:

Holding Stages of GMS

The implementation of the GMS in the Company is carried out through a series of stages that have been determined based on applicable regulations. Each stage involves time preparation and provision of necessary materials to ensure the smooth running of the GMS. The standard steps applied in the GMS implementation process in the Company are as follows:



Prosedur Teknis Pengumpulan Suara

Dalam RUPS, keputusan diambil dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai, maka keputusan akan ditentukan melalui mekanisme pemungutan suara. Proses pemungutan suara dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah saham yang menyatakan setuju, tidak setuju, atau abstain, sesuai dengan prinsip *one share one vote*.

Voting Procedure

Decision-making at the General Meeting of Shareholders (GMS) is initially prioritized through deliberation to reach a consensus, as mandated by Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. If consensus cannot be reached through deliberation, voting is conducted based on the number of shares that disagree, abstain, or agree, following the principle of one share, one vote.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2025

Di tahun 2025, 1 (satu) kali RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang diadakan pada tanggal 18 Juni 2025, dengan uraian sebagai berikut:

GMS Holding in 2025

In 2025, Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Fiscal Year was held on June 18, 2025, with the following details:

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Annual GMS for Financial Year 2024

Penyelenggaraan RUPST
Holding of AGMS

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 18 Juni 2025 Wednesday, June 18, 2025
Waktu Time	:	Pukul 16.28 WIB s.d. 17.46 WIB From 16.28 to 17.46 WIB
Tempat Location	:	Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Present Members of the Board of Commissioners and Directors	:	**Dewan Komisaris |** Board of Commissioners ▪ Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama | President Commissioner) ▪ R. R. Dewi Ariyani (Komisaris | Commissioner) ▪ Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen | Independent Commissioner) ▪ Fransiscus Budi Prayitno (Komisaris Independen | Independent Commissioner) **Direksi |** Board of Directors ▪ Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis | President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director) ▪ Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi | Director of Fleet Management and Operation) ▪ Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko | Director of Finance, Human Resources, and Risk Management)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS	:	-

Tahapan Pelaksanaan RUPS
AGMS Holding Stages

9 Mei 2025 May 9, 2025	27 Mei 2025 May 27, 2025	18 Juni 2025 June 18, 2025	19 Juni 2025 June 19, 2025	17 Juli 2025 July 17, 2025
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/9/5/2/KGC/SPR/JAI-25 GMS Announcement to Shareholders via Letter No. SK.03/9/5/2/KGC/SPR/JAI-25	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/27/5/4/KGC/SPR/JAI-25 GMS Summons to Shareholders via Letter No. SK.03/27/5/4/KGC/SPR/JAI-25	Pelaksanaan RUPS di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 GMS holding at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan No. SK.03/19/6/2/KGC/SPR/JAI-25 Announcement: Summary of the Minutes of the Annual General Meeting No. SK.03/19/6/2/KGC/SPR/JAI-25	Penyampaian Berita Acara RUPS Tahunan dimuat dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 25 tanggal 18 Juni 2025 melalui Surat No. SK.03/17/7/2/KGC/SPR/JAI-25. The minutes of the Annual General Meeting were published in the Minutes of the Annual General Meeting No. 25 dated June 18, 2025, via Letter No. SK.03/17/7/2/KGC/SPR/JAI-25.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2024 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.717.763.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 89,41% dari 5.276.771.300 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Perusahaan telah menunjuk pihak independen, yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) selaku Biro Administrasi Efek (BAE) Perusahaan untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi suara, serta Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., yang bertugas memverifikasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Resolution of the Annual GMS

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2024 was attended by all of the members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the Company's Shareholders, representing 4,717,763,600 shares with valid votes, equivalent to 89.41% of the total 5,276,771,300 shares issued by the Company.

The Company has appointed an independent party, PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) as the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company to count and/or validate the votes, and Notary Putra Hutomo, S.H., M.Kn., to verify and announce the results of the vote count.



Berikut disampaikan keputusan RUPS serta langkah tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Manajemen Perusahaan sampai dengan akhir tahun 2025.

The following are the decisions of the GMS and follow-up actions that have been implemented by the Company's Management until the end of 2025.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 18 Juni 2025

Annual GMS for the Financial Year 2024 dated June 18, 2025

Mata Acara Rapat ke-1:
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.

Hasil keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di Tahun 2025.

First Meeting Agenda:
Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2024, and Ratification of the Financial Statements for the Financial Year 2024.

Resolutions:

- Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report conducted for the Financial Year 2024, and ratified the Company's Financial Statement for the same period. The Financial Statement has been audited by the PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA Public Accounting Firm, as indicated in their report Number: 00328/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 dated March 24, 2025, with the opinion stating "the attached financial report present fairly, in all material respects, its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".
- Granted full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners for management and supervisory actions during the financial year 2024. This release of responsibility applies as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Annual Report and the Company's Financial Statement for the Financial Year 2024.

Follow-up on Resolution:
Has been followed-up in 2025.

Mata Acara Rapat ke-2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Hasil keputusan:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2024 yang seluruhnya berjumlah Rp166.842.882.496,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dipergunakan sebagai berikut:
   a. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebesar Rp5.435.499.497,- (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau kurang lebih sebesar 3,26%.
   b. Dividen final sebesar Rp125.165.015.236,- (seratus dua puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta lima belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) atau kurang lebih sebesar 75,02% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari:
      - Dividen interim sebesar Rp20.051.730.940,- (dua puluh miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau Rp3,80 (tiga rupiah delapan puluh sen) per lembar saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 10 Januari 2025.
      - Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp105.113.284.296,- (seratus lima miliar seratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) atau Rp19,92 (sembilan belas rupiah sembilan puluh dua sen) per lembar saham, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
   c. Sisanya sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebesar Rp36.242.367.763,- (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) atau kurang lebih sebesar 21,72%.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas terutama pelaksanaan pembayaran atas pembagian dividen tunai dan hal-hal yang berkaitan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di Tahun 2025.

Second Meeting Agenda:
Determination of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year.

Resolutions:

1. Approving the determination of the use of the Company's profit for the 2024 Fiscal Year, which totals Rp166,842,882,496 (one hundred sixty-six billion eight hundred forty-two million eight hundred eighty-two thousand four hundred ninety-six rupiah), to be used as follows:
   a. Reserves as referred to in Article 70 of the UUPT amount to Rp5,435,499,497 (five billion four hundred thirty-five million four hundred ninety-nine thousand four hundred ninety-seven rupiah) or approximately 3.26%.
   b. Final dividend of Rp125,165,015,236 (one hundred twenty-five billion one hundred sixty-five million fifteen thousand two hundred thirty-six rupiah), or approximately 75.02%, to be distributed to shareholders as follows:
      - Interim dividend of Rp20,051,730,940 (twenty billion fifty-one million seven hundred thirty thousand nine hundred forty rupiah) or Rp3.80 (three rupiah eighty cents) per share, distributed to shareholders on January 10, 2025.
      - The remaining amount to be distributed as cash dividends is Rp105,113,284,296 (one hundred five billion one hundred thirteen million two hundred eighty-four thousand two hundred ninety-six rupiah) or Rp19.92 (nineteen rupiah ninety-two cents) per share, subject to applicable tax regulations.
   c. Retained earnings that will be used as the Company's working capital amounted to Rp36,242,367,763 (thirty-six billion two hundred forty-two million three hundred sixty-seven thousand seven hundred sixty-three rupiah), or approximately 21.72%.
2. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take all actions necessary to implement the above decision, particularly the payment of cash dividends and related matters, in accordance with applicable laws and regulations.

Follow-up on Resolution:
Has been followed-up in 2025.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 18 Juni 2025
Annual GMS for the Financial Year 2024 dated June 18, 2025

Mata Acara Rapat ke-3:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Hasil keputusan:
- Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
- Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di Tahun 2025.

Third Meeting Agenda:
Appointment of the Company's Public Accounting Firm for the 2025 Financial Year.

Resolutions:
- Approved the reappointment of the Public Accounting Firm "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's financial statements for the 2025 financial year and granted the authority to the Board of Commissioners to determine the public accountant's honorarium and any other requirements for their designation.
- Approved the authorization of the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm for KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" in the event they are unable to complete the audit of the Company's financial statements for the 2025 financial year due to any reason, including to determine the honorarium for the replacement public accountant, along with fulfilling other requirements for appointment, the Board must consider recommendations from the Company's Audit Committee and adhere to the criteria as stipulated in POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Follow-up on Resolution:
Has been followed-up in 2025.

Mata Acara Rapat ke-4:
Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil keputusan:
Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Utama untuk:
- Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025;
- Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di Tahun 2025.

Fourth Meeting Agenda:
Determining the salary, honorarium, and other allowances for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company, as well as bonuses for these members.

Resolutions:
Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners, after consulting with major shareholders, to:
- Determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for 2025;
- Determine tantiems for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year.

Follow-up on Resolution:
Has been followed-up in 2025.

Mata Acara Rapat ke-5:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil keputusan:
- Menyetujui pengangkatan Ibu R. R. Dewi Ariyani sebagai Komisaris Utama Perseroan menggantikan Bapak Zuhri Iryansyah yang masa jabatannya berakhir pada penutupan Rapat yang diselenggarakan hari ini disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan dedikasinya pada Perseroan selama menjabat.
- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Fransiscus Budi Prayitno sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan Bapak Fransiscus Budi Prayitno sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Ibu R. R. Dewi Ariyani yang masa jabatannya berakhir pada penutupan Rapat yang diselenggarakan hari ini disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan dedikasinya pada Perseroan selama menjabat.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Doni Istyanto Hari Mahdi sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Bay Mokhamad Hasani yang masa jabatannya berakhir pada penutupan Rapat yang diselenggarakan hari ini disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan dedikasinya pada Perseroan selama menjabat.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Mitchell Julius Tupamahu sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan dan pengangkatan Bapak Arief Hermawan sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan menggantikan Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan dedikasinya pada Perseroan selama menjabat.

Fifth Meeting Agenda:
Changes in the Company's Management Structure.

Resolutions:
- Approved the appointment of Mrs. R. R. Dewi Ariyani as President Commissioner of the Company, replacing Mr. Zuhri Iryansyah, whose term of office ended at the closing of the Meeting held today, accompanied by gratitude for his contributions and dedication to the Company during his tenure.
- Approved the honorable resignation of Mr. Fransiscus Budi Prayitno as Independent Commissioner of the Company and the appointment of Mr. Fransiscus Budi Prayitno as Commissioner of the Company to replace Mrs. R. R. Dewi Ariyani, whose term of office ended at the close of the Meeting held today, accompanied by an expression of gratitude for her contributions and dedication to the Company during her tenure.
- Approve the appointment of Mr. Doni Istyanto Hari Mahdi as Independent Commissioner of the Company, replacing Mr. Bay Mokhamad Hasani, whose term of office ended at the close of today's Meeting, accompanied by gratitude for his contributions and dedication to the Company during his tenure.
- Approve the appointment of Mr. Mitchell Julius Tupamahu as an Independent Commissioner of the Company.
- Approved the honorable resignation of Mr. Muhammad Iqbal as Director of Fleet Management and Operations of the Company and the appointment of Mr. Arief Hermawan as Director of Fleet Management and Operations of the Company to replace Mr. Muhammad Iqbal as Director of Fleet Management and Operations of the Company, effective as of the closing of this Meeting, accompanied by gratitude for his contributions and dedication to the Company during his tenure.



RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 18 Juni 2025
Annual GMS for the Financial Year 2024 dated June 18, 2025

- Menetapkan masa jabatan Ibu R. R. Dewi Ariyani sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Fransiscus Budi Prayitno sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Doni Istyanto Hari Mahdi sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan Bapak Mitchell Julius Tupamahu sebagai Komisaris Independen Perseroan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Menetapkan masa jabatan Bapak Arief Hermawan sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya.
- Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ibu R. R. Dewi Ariyani
Komisaris	:	Bapak Fransiscus Budi Prayitno
Komisaris Independen	:	Bapak Doni Istyanto Hari Mahdi
Komisaris Independen	:	Bapak Mitchell Julius Tupamahu

Direksi

Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	:	Ibu Shanti Puruhita
Direktur Armada dan Operasi	:	Bapak Arief Hermawan
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko	:	Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di Tahun 2025.

- 6. Established the tenure of Mrs. R. R. Dewi Ariyani as President Commissioner of the Company, Mr. Fransiscus Budi Prayitno as Commissioner of the Company, Mr. Doni Istyanto Hari Mahdi as Independent Commissioner of the Company, and Mr. Mitchell Julius Tupamahu as Independent Commissioner of the Company, effective from the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2030, with due regard to the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
- The term of office of Mr. Arief Hermawan as Director of Fleet Management and Operations of the Company shall be for the remainder of the term of office of the member of the Board of Directors whom he replaces.
- The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, effective as of the closing of this Meeting, is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Mrs. R. R. Dewi Ariyani
Commissioner	:	Mr. Fransiscus Budi Prayitno
Independent Commissioner	:	Mr. Doni Istyanto Hari Mahdi
Independent Commissioner	:	Mr. Mitchell Julius Tupamahu

Board of Directors

President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director	:	Mrs. Shanti Puruhita
Director of Fleet Management and Operation	:	Mr. Arief Hermawan
Director of Finance, Human Resources, and Risk Management	:	Mrs. Dessy Emastari Prihatiningtyas

- Approved to grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution to record/declare decisions regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, including taking all necessary actions in connection with such decisions in accordance with applicable laws and regulations.

Follow-up on Resolution:
Has been followed-up in 2025.

Mata Acara Rapat ke-6:
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Hasil keputusan:
Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sebagai berikut:

"Total dana hasil penawaran umum bersih Rp439.531.825.000 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebesar 10% digunakan untuk modal kerja Perseroan dan telah digunakan seluruhnya. Kemudian sebesar 90% dialokasikan untuk belanja modal yakni 4 unit kapal tunda tipe *Azimuth Stern Drive* (ASD) dengan daya 2x2200 HP yang telah direalisasikan sebesar Rp228.723.815.000 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Sedangkan Rp91.376.536.467 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) telah terealisasi untuk pembangunan 1 unit kapal tunda tipe *Azimuth Stern Drive* (ASD) dengan daya 2x2200 HP dan 3 unit motor pandu dengan daya 2X300 HP. Sisa dana IPO sebesar Rp75.478.291.033 (tujuh puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) akan digunakan untuk kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2025.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di Tahun 2025.

Sixth Meeting Agenda:
Report on the Realization of Public Offering Proceeds Usage.

Resolutions:
As the Sixth Meeting Agenda only serves as a report, there were no decision-making processes involved. The Company's Board of Directors has submitted a report regarding the Realization Report on the Public Offering Proceeds Usage, outlined as follows:

The total net proceeds from the public offering amounted to Rp439,531,825,000 (four hundred thirty-nine billion five hundred thirty-one million eight hundred twenty-five thousand rupiah), 10% of which was used for the Company's working capital and has been fully utilized. Then, 90% was allocated for capital expenditure, namely 4 Azimuth Stern Drive (ASD) tugboats with a power of 2x2200 HP, which has been realized in the amount of Rp228,723,815,000 (two hundred twenty-eight billion seven hundred twenty-three million eight hundred fifteen thousand rupiah). Meanwhile, Rp91,376,536,467 (ninety-one billion three hundred seventy-six million five hundred thirty-six thousand four hundred sixty-seven rupiah) has been realized for the construction of 1 Azimuth Stern Drive (ASD) tugboat with a power of 2x2200 HP and 3 pilot boats with a power of 2X300 HP. The remaining IPO funds of Rp75,478,291,033 (seventy-five billion four hundred seventy-eight million two hundred ninety-one thousand thirty-three rupiah) will be used for other investment needs in 2025.

Follow-up on Resolution:
Has been followed-up in 2025.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas di mana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp105.113.284.296,- atau Rp19,92 per lembar saham dengan seluruh saham yang mempunyai hak atas dividen adalah sejumlah 5.276.771.300 saham setelah dikurangi setelah dikurangi *treasury stock* sejumlah 8.039.800 saham.

Furthermore, in accordance with the decision of the Second Meeting Agenda as mentioned above, the Meeting has decided to pay cash dividends to the Company's shareholders in the amount of Rp105,113,284,296 or Rp19.92 per share, with all shares entitled to dividends amounting to 5,276,771,300 shares after deducting treasury stock amounting to 8,039,800 shares.

Yang berhak mendapatkan dividen adalah para pemegang saham menurut Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

Those entitled to receive dividends are shareholders according to the Schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividends for the 2024 Fiscal Year, as follows:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai
Schedule of Cash Dividend Distribution

No.	Keterangan Description	Tanggal
1	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)** End Stock Trading Date with Dividend Rights (Cum Dividend)	
	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai ▪ Regular and Negotiated Markets ▪ Cash Market	26 Juni 2025 1 Juli 2025 June 26, 2025 July 1, 2025
2	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)** End Stock Trading Date without Dividend Rights (Ex Dividend)	
	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi ▪ Pasar Tunai ▪ Regular and Negotiated Markets ▪ Cash Market	30 Juni 2025 2 Juli 2025 June 30, 2025 July 2, 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) Shareholders List Date entitled to Dividends (Recording Date)	1 Juli 2025 July 1, 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 Cash Dividend Payment Date for 2024 Financial Year	18 Juli 2025 July 18, 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 1 Juli 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 1 Juli 2025.
2. Pembayaran Dividen:
   a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia ("EDI"), beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 3, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, *email*: bae@ediindonesia.co.id atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, beralamat di Pelindo Tower Lt. 8 Jl. Yos Sudarso No.9, Koja, Jakarta 14230, *email*: corsec@ipcmarine.co.id paling lambat tanggal 1 Juli 2025 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp10.000, -.

Procedures for Cash Dividends Distribution:

1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on July 1, 2025, and/or owners of Company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on July 1, 2025.

2. Dividend Payment:
   a. For entitled Shareholders whose shares are still in script (physical), Dividend payments will be made by transferring the book to the account of the Eligible Shareholder who has provided the name of the bank and account number in the name of the Eligible Shareholder to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia ("EDI"), having its address at the Securities Administration Services Office, Wisma SMR Floor 3 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id or Corporate Secretary of the Company, located at Pelindo Tower, Lt. 8 Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta 14230, email: corsec@ipcmarine.co.id no later than July 1, 2025, at 16.00 WIB accompanied by a photocopy of KTP or passport according to the address in the Register of Shareholders via a stamped letter of Rp10,000,-.



b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan pada tanggal 18 Juli 2025.

3. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau EDIF paling lambat tanggal 1 Juli 2025 pukul 16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
      - Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
      - Wajib Pajak Badan dalam negeri.
   b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
      - Dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
      - Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDIF (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 1 Juli 2025 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

b. For eligible Shareholders whose shares are recorded in KSEI collective custody, payment will be made through KSEI and eligible Shareholders will receive payment from the relevant KSEI Account Holder on July 18, 2025.

3. Dividends to be distributed are subject to tax in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, Eligible Shareholders are requested to pay attention to the following matters:
   a. For Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers who have not included their Taxpayer Identification Number ("NPWP"), they are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or EDIF no later than July 1, 2025, at 16.00 WIB. In accordance with Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax, and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, Cash Dividends are not deducted from Income Tax (PPh) for:
      - Domestic Individual Taxpayers with the condition that the Dividends must be invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia within a certain period. If the Individual Taxpayer does not meet these requirements, then the Income Tax (PPh) payable on Dividends must be paid by the domestic Individual Taxpayer himself as regulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021.
      - Domestic Corporate Taxpayers.
   b. For Eligible Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares:
      - Placed in KSEI collective custody, or
      - Not included in KSEI's collective custody (holding shares in scrip form), and whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), must comply with the requirements of Article 26 of Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax as well as submitting a Certificate of Domicile ("SKD") to KSEI (for those whose shares are in collective custody) or EDIF (for those whose shares are not included in KSEI's collective custody or shareholders in scrip form), no later than July 1, 2025, at 16:00 WIB, using the format and procedures as stipulated in Directorate General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements. Without an SKD in the format referred to, Cash Dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024, Hasil Keputusan dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen

Di tahun 2024, Perusahaan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yakni RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada 12 Juni 2024 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 September 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

Implementation of the 2024 GMS, Resolutions, and Follow-up by Management

In 2024, the Company held two (2) GMS, namely the Annual GMS for the 2023 Fiscal Year held on June 12, 2024 and the Extraordinary GMS on September 25, 2024, which are described as follows:

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Annual GMS for Financial Year 2023

Penyelenggaraan RUPST
Holding of AGMS

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 12 Juni 2024 Wednesday, June 12, 2024
Waktu Time	:	Pukul 10.31 WIB s.d. 11.37 WIB From 10.31 to 11.37 WIB
Tempat Location	:	Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Present Members of the Board of Commissioners and Directors	:	**Dewan Komisaris |** Board of Commissioners ▪ Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama | President Commissioner) ▪ R. R. Dewi Ariyani (Komisaris | Commissioner) ▪ Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen | Independent Commissioner) **Direksi |** Board of Directors ▪ Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis | President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director) ▪ Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi | Director of Fleet Management and Operation) ▪ Reini Delfianti (Direktur Keuangan dan SDM | Director of Finance and HR)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS	:	Tidak terdapat ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris maupun Direksi dalam pelaksanaan RUPS. There were no absences among members of the Board of Commissioners or the Board of Directors during the General Meeting of Shareholders (GMS).

Tahapan Pelaksanaan RUPS
AGMS Holding Stages

6 Mei 2024 May 6, 2024	21 Mei 2024 May 21, 2024	12 Juni 2024 June 12, 2024	12 Juni 2024 June 12, 2024
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/6/5/2/KGC/SPR/JAI-24 Announcement to Shareholders via Letter No. SK.03/6/5/2/KGC/SPR/JAI-24	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/21/5/2/KGC/SPR/JAI-24 GMS Summons to Shareholders via Letter No. SK.03/21/5/2/KGC/SPR/JAI-24	Pelaksanaan RUPS di Museum Maritim Indonesia Lantai 2, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 GMS holding at the Indonesian Maritime Museum, 2nd Floor, Jalan Raya Harbor Number 9, Tanjung Priok, North Jakarta, 14310	Berita Acara RUPS Tahunan dimuat dalam Risalah RUPS Tahunan No. 31 tanggal 12 Juni 2024 The minutes of the AGM are contained in the Deed of Minutes of AGM No. 31 dated June 12, 2024

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2023 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.650.339.500 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,13% dari 5.276.771.300 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Perusahaan telah menunjuk pihak independen, yaitu PT EDI (EDII) untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi suara, serta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang bertugas memverifikasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Resolution of the Annual GMS

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2023 was attended by all of the members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the Company's Shareholders, representing 4.650.339.500 shares with valid votes, equivalent to 88,13% of the total 5.276.771.300 shares issued by the Company.

The Company has appointed an independent party, PT EDI (EDII), to count and/or validate the votes, and Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., to verify and announce the results of the vote count.



Berikut ini adalah hasil keputusan RUPS beserta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024.

The following are the results of the GMS Decision and the follow-up by the Company's Management until the end of 2024.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 12 Juni 2024

Annual GMS for the Financial Year 2023 dated June 12, 2024

Mata Acara Rapat ke-1:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

Hasil keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023."

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.

First Meeting Agenda:
Approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2023, and Ratification of the Financial Statements for the Financial Year 2023.

Resolutions:

- Approved the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report conducted for the Financial Year 2023, and ratified the Company's Financial Statement for the same period. The Financial Statement has been audited by the PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA Public Accounting Firm, as indicated in their report Number: 00332/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 dated March 26, 2024, with the opinion stating "the attached financial report present fairly, in all material respects, its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".
- Granted full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners for management and supervisory actions during the financial year 2023. This release of responsibility applies as long as these actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Annual Report and the Company's Financial Statement for the financial year 2023.

Follow-up on Resolution:
Action taken in 2024.

Mata Acara Rapat ke-2:
Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Hasil keputusan:
Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023 yang seluruhnya berjumlah Rp157.661.987.548,- (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

- Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebesar Rp31.532.397.509,60 (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah enam puluh sen) atau sebesar 20%.
- Dividen final sebesar Rp118.252.444.833,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau kurang lebih sebesar 75% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari:
  a. Dividen interim sebesar Rp20.051.730.940,00 (dua puluh miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau Rp3,80 (tiga rupiah delapan puluh sen) per lembar saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 26 Januari 2024.
  b. Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp98.200.713.893,00 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau Rp18,61 (delapan belas rupiah enam puluh satu sen) per lembar saham.
- Sisanya sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan sebesar Rp7.877.145.205,40 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus lima rupiah empat puluh sen) atau kurang lebih sebesar 5%.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2023 serta mengumumkannya dalam situs web Perseroan, situs web Bursa, dan situs web KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.

Second Meeting Agenda:
Determination of the Company's Net Profit for the 2023 Financial Year.

Resolutions:
Approved the determination of the use of the Company's profits for the 2023 financial year, totaling Rp157.661.987.548,- (one hundred fifty-seven billion six hundred sixty-one million nine hundred eighty-seven thousand five hundred forty-eight rupiahs), to be allocated as follows:

- Reserves as referred to in Article 70 of the Company Law amounting to Rp31.532.397.509,60 (thirty-one billion five hundred thirty-two million three hundred ninety-seven thousand five hundred nine rupiah sixty cents), or 20%.
- Final dividend of Rp118.252.444.833,00 (one hundred eighteen billion two hundred fifty-two million four hundred forty-four thousand eight hundred thirty-three rupiahs), or approximately 75%, to be distributed to shareholders as follows:
  a. Interim dividend of Rp20.051.730.940,00 (twenty billion fifty-one million seven hundred thirty thousand nine hundred forty rupiahs), or Rp3.80 per share, distributed to shareholders on January 26, 2024.
  b. The rest as cash dividends amounting to Rp98.200.713.893,00 (ninety-eight billion two hundred million seven hundred thirteen thousand eight hundred ninety-three rupiahs), or Rp18.61 (eighteen rupiah sixty-one cents) per share.
- Retained earnings of Rp7.877.145.205,40 (seven billion eight hundred seventy-seven million one hundred forty-five thousand two hundred five rupiah forty cents), or approximately 5%, to be used as the Company's working capital.

Furthermore, granted authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to determine the schedule and procedures for distributing dividends for the 2023 financial year and to announce it on the Company's website, the Stock Exchange website, and the KSEI website in accordance with applicable regulations.

Follow-up on Resolution:
Action taken in 2024.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 12 Juni 2024
Annual GMS for the Financial Year 2023 dated June 12, 2024

Mata Acara Rapat ke-3:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Hasil keputusan:
- Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (firma anggota *Ernst & Young Global Limited)* untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
- Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.

Third Meeting Agenda:
Appointment of the Company's Public Accounting Firm for the 2024 Financial Year.

Resolutions:
- Approved the reappointment of the Public Accounting Firm "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) to audit the Company's financial statements for the 2024 financial year and granted the authority to the Board of Commissioners to determine the public accountant's honorarium and any other requirements for their designation.
- Approved the authorization of the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm for KAP "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" in the event they are unable to complete the audit of the Company's financial statements for the 2024 financial year due to any reason, including to determine the honorarium for the replacement public accountant, along with fulfilling other requirements for appointment, the Board must consider recommendations from the Company's Audit Committee and adhere to the criteria as stipulated in POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Follow-up on Resolution:
Action taken in 2024.

Mata Acara Rapat ke-4:
Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil keputusan:
Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Utama untuk:
- Menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta Honorarium dan Tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024;
- Menetapkan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.

Fourth Meeting Agenda:
Determining the salary, honorarium, and other allowances for members of the Board of Directors and Commissioners of the Company, as well as bonuses for these members.

Resolutions:
Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners, after consulting with major shareholders, to:
- Determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for 2024;
- Determine tantiems for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 financial year.

Follow-up on Resolution:
Action taken in 2024.

Mata Acara Rapat ke-5:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi.

Hasil keputusan:
- Menyetujui perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan meninggalnya Komisaris Independen Perseroan yaitu Bapak Hary Kriswanto pada tanggal 24 Juni 2023.
- Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan yaitu yang semula Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan menjadi Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko Perseroan.
- Menyetujui:
  1. Mengangkat kembali:
     a. Ibu Shanti Puruhita sebagai Direktur Utama Perseroan; dan
     b. Bapak Muhammad Iqbal sebagai Direktur Armada dan Operasi Perseroan.
  2. Mengangkat Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko Perseroan.
- Pengangkatan kembali dan pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Menunjuk Ibu Shanti Puruhita untuk menjalankan pekerjaan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis yang lowong sampai dengan diangkatnya seorang Direktur untuk mengisi jabat dimaksud.

Fifth Meeting Agenda:
Changes in the Company's Management Structure and Changes in the Nomenclature of Directors' Positions.

Resolutions:
- Approved the changes of the Company's Board of Commissioners members due to the Company's Independent Commissioner, Mr. Hary Kriswanto passed away on June 24, 2023.
- Approved the changes in the nomenclature of the Company's Board of Directors, which was originally the Director of Finance and Human Resources of the Company to become the Director of Finance, Human Resources, and Risk Management of the Company.
- Approved:
  1. Reappoint:
     a. Mrs. Shanti Puruhita as President Director of the Company; and
     b. Mr. Muhammad Iqbal as Director of Fleet Management and Operation of the Company.
  2. Appoint Mrs. Dessy Emastari Prihatiningtyas as the Company's Director of Finance, Human Resources, and Risk Management.
- The reappointment and appointment is effective as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 with regard to the laws and regulations in the Capital Market and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
- Appoint Mrs. Shanti Puruhita to carry out the vacant position of Commercial and Business Development Director until the appointment of a Director to fill the position.



RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 12 Juni 2024
Annual GMS for the Financial Year 2023 dated June 12, 2024

- Dengan adanya perubahan sebagaimana disebut pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bapak Zuhri Iryansyah
Komisaris	:	Ibu R. R. Dewi Ariyani
Komisaris Independen	:	Bapak Bay Mokhamad Hasani

Direksi

Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	:	Ibu Shanti Puruhita
Direktur Armada dan Operasi	:	Bapak Muhammad Iqbal
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko	:	Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan Direksi Perseroan dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.

Mata Acara Rapat ke-6:
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Hasil keputusan:
Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sebagai berikut:

Total dana hasil penawaran umum bersih Rp439.531.825.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebesar 10% digunakan untuk modal kerja Perseroan dan telah digunakan seluruhnya dan sebesar 90% dialokasikan untuk belanja modal yakni 4 unit kapal tunda tipe *Azimuth Stern Drive* (ASD) dengan gaya 2x2200 HP yang telah direalisasikan sebesar Rp228.723.815.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah. Sedangkan Rp90.530.000.000 (sembilan puluh miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah terealisasi secara bertahap pembayarannya untuk pembangunan 1 unit kapal tunda tipe *Azimuth Stern Drive* (ASD) dengan daya 2x2200 HP dan 3 unit motor pandu dengan daya 2x300 HP. Sisa dana IPO sebesar Rp76.324.827.500 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akan digunakan untuk kebutuhan investasi lainnya pada tahun 2024.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan pada Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana disebutkan di atas, Rapat telah menetapkan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp98.200.713.893,00. Jumlah ini setara dengan Rp18,61 per lembar saham. Dividen tersebut akan diberikan kepada seluruh saham yang berhak, yaitu sebanyak 5.276.771.300 saham, setelah dikurangi *treasury stock* sebanyak 8.039.800 saham.

- With the changes as referred to in numbers 1, 2, 3, 4, and 5, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Mr. Zuhri Iryansyah
Commissioner	:	Mrs. R. R. Dewi Ariyani
Independent Commissioner	:	Mr. Bay Mokhamad Hasani

Board of Directors

President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director	:	Mrs. Shanti Puruhita
Director of Fleet Management and Operation	:	Mr. Muhammad Iqbal
Director of Finance, Human Resources, and Risk Management	:	Mrs. Dessy Emastari Prihatiningtyas

- Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state in a separate Notarial deed and take all necessary actions related to changes in the nomenclature of the Company's Board of Directors and changes in the composition of the Company's Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations.

Follow-up on Resolution:
Action taken in 2024.

Sixth Meeting Agenda:
Report on the Realization of Public Offering Proceeds Usage.

Resolutions:
As the Sixth Meeting Agenda only serves as a report, there were no decision-making processes involved. The Company's Board of Directors has submitted a report regarding the Realization Report on the Public Offering Proceeds Usage, outlined as follows:

A total of Rp439,531,825,000.00 (four hundred thirty nine billion five hundred thirty one million eight hundred twenty five thousand rupiah) net public offering proceeds of 10% were used for the Company's working capital and have been fully utilized and 90% were allocated for capital expenditures, namely 4 units of Azimuth Stern Drive (ASD) type tugboats with 2x2200 HP which have been realized amounting to Rp228,723,815,000.00 (two hundred twenty eight billion seven hundred twenty three million eight hundred fifteen thousand rupiah). While Rp90,530,000,000 (ninety billion five hundred thirty million rupiah) has been realized in stages of payment for the construction of 1 unit of Azimuth Stern Drive (ASD) type tugboat with 2x2200 HP power and 3 units of motor guide with 2x300 HP power. The remaining IPO funds of Rp76,324,827,500 (seventy-six billion three hundred twenty-four million eight hundred twenty-seven thousand five hundred rupiah) will be used for other investment needs in 2024.

Follow-up on Resolution:
Action taken in 2024.

In accordance with the resolution on the Second Meeting Agenda as mentioned above, the Meeting has determined the payment of cash dividends to the Company's shareholders amounting to Rp98,200,713,893.00. This amount is equivalent to Rp18.61 per share. The dividend will be paid to all eligible shares, totaling 5,276,771,300 shares, net of treasury stock of 8,039,800 shares.

Yang berhak mendapatkan dividen adalah para pemegang saham menurut Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Those entitled to receive dividends are shareholders according to the Schedule and Procedures for Distribution of Cash Dividends for the 2023 Financial Year as follows:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai
Schedule of Cash Dividend Distribution

No.	Keterangan Description	Tanggal Date
1	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*)** End Stock Trading Date with Dividend Rights (Cum Dividend)	
	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Juni 2024
	▪ Pasar Tunai	26 Juni 2024
	▪ Regular and Negotiated Markets	June 24, 2024
	▪ Cash Market	June 26. 2024
2	**Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*)** End Stock Trading Date without Dividend Rights (Ex Dividend)	
	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2024
	▪ Pasar Tunai	27 Juni 2024
	▪ Regular and Negotiated Markets	June 25, 2024
	▪ Cash Market	June 27. 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*) Shareholders List Date entitled to Dividends (Recording Date)	26 Juni 2024 June 26. 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 Cash Dividend Payment Date for 2023 Financial Year	12 Juli 2024 July 12, 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 26 Juni 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 26 Juni 2024.
2. Pembayaran Dividen:
   a. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia ("EDII"), beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 3 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, *email*: bae@ediindonesia.co.id atau *Corporate Secretary* Perseroan, beralamat di Pelindo Tower, Lt. 8 Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta 14230, *email*: corsec@ipcmarine.co.id paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp.10,000.
   b. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif KSEI, pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan pada tanggal 12 Juli 2024.

Procedures for Cash Dividends Distribution:

1. Cash Dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on June 26, 2024, and/or owners of Company shares in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on June 26, 2024.
2. Dividend Payment:
   a. For entitled Shareholders whose shares are still in script (physical), Dividend payments will be made by transferring the book to the account of the Eligible Shareholder who has provided the name of the bank and account number in the name of the Eligible Shareholder to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT EDI Indonesia ("EDII"), having its address at the Securities Administration Services Office, Wisma SMR Floor 3 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@ediindonesia.co.id or Corporate Secretary of the Company, located at Pelindo Tower, Lt. 8 Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta 14230, email: corsec@ipcmarine.co.id no later than June 26, 2024, at 16.00 WIB accompanied by a photocopy of KTP or passport according to the address in the Register of Shareholders via a stamped letter of Rp.10,000.
   b. For eligible Shareholders whose shares are recorded in KSEI collective custody, payment will be made through KSEI and eligible Shareholders will receive payment from the relevant KSEI Account Holder on July 12, 2024.



3. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau EDI paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
      - Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
      - Wajib Pajak Badan dalam negeri.
   b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
      - Dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
      - Tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

3. Dividends to be distributed are subject to tax in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, Eligible Shareholders are requested to pay attention to the following matters:
   a. For Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers who have not included their Taxpayer Identification Number ("NPWP"), they are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or EDI no later than June 26, 2024, at 16.00 WIB. In accordance with Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business and Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021 concerning the Implementation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax, and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures, Cash Dividends are not deducted from Income Tax (PPh) for:
      - Domestic Individual Taxpayers with the condition that the Dividends must be invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia within a certain period. If the Individual Taxpayer does not meet these requirements, then the Income Tax (PPh) payable on Dividends must be paid by the domestic Individual Taxpayer himself as regulated in Article 40 of the Minister of Finance Regulation Number 18/PMK.03/2021.
      - Domestic Corporate Taxpayers.
   b. For Eligible Shareholders who are Overseas Taxpayers whose shares:
      - Placed in KSEI collective custody, or
      - Not included in KSEI's collective custody (holding shares in scrip form), and whose tax deductions will use rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B), must comply with the requirements of Article 26 of Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax as well as submitting a Certificate of Domicile ("SKD") to KSEI (for those whose shares are in collective custody) or EDI (for those whose shares are not included in KSEI's collective custody or shareholders in scrip form), no later than June 26, 2024, at 16:00 WIB, using the format and procedures as stipulated in Directorate General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements. Without an SKD in the format referred to, Cash Dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

RUPS Luar Biasa Tahun 2024

Extraordinary GMS in 2024

Penyelenggaraan RUPSLB
Holding of EGMS

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 25 September 2024 Wednesday, September 25, 2024
Waktu Time	:	Pukul 10.32 WIB s.d. 10.49 WIB From 10.32 to 10.49 WIB
Tempat Location	:	Pelindo Tower Lt. 8, Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta Utara, 14230
Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Present Members of the Board of Commissioners and Directors	:	**Dewan Komisaris |** Board of Commissioners ▪ Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama | President Commissioner) ▪ R. R. Dewi Ariyani (Komisaris | Commissioner) ▪ Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen | Independent Commissioner) **Direksi |** Board of Directors ▪ Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis | President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director) ▪ Muhammad Iqbal (Direktur Armada dan Operasi | Director of Fleet Management and Operation) ▪ Reini Delfianti (Direktur Keuangan dan SDM | Director of Finance and HR)
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPSLB Information on the absence of the Board of Commissioners and Directors at the GMS	:	-

Tahapan Pelaksanaan RUPS
EGMS Holding Stages

19 Agustus 2024 August 19, 2024	3 September 2024 September 3, 2024	25 September 2024 September 25, 2024	25 September 2024 September 2024
Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/19/8/2/KGC/SPR/JAI-24 GMS Announcement to Shareholders via Letter No. SK.03/19/8/2/KGC/SPR/JAI-24	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui Surat No. SK.03/3/9/2/KGC/SPR/JAI-24 GMS Summons to Shareholders via Letter No. SK.03/3/9/2/KGC/SPR/JAI-24	Pelaksanaan RUPSLB di Pelindo Tower Lt. 8, Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta Utara, 14230 GMS holding at the Pelindo Tower Lt. 8, Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja, Jakarta Utara, 14230	Berita Acara RUPSLB dimuat dalam Risalah RUPSLB No. 03 tanggal 25 September 2024 Minutes of the EGMS are contained in the Minutes of the EGMS No. 03 dated September 25, 2024

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa Tahun 2024 dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perusahaan yang hadir sebanyak 4.646.745.510 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,06% dari 5.276.771.300 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu PT EDI Indonesia dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara dan Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Resolution of the Extraordinary GMS

The Extraordinary GMS 2024 was attended by the entire Board of Commissioners and Directors, as well as the Company's Shareholders who attended as many as 4,646,745,510 shares with valid votes or equivalent to 88.06% of 5,276,771,300 shares which constitute the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

The Company has appointed an independent party, PT EDI Indonesia, to count and/or validate the votes and Notary Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn. to further validate and announce the results of the vote count.



Berikut ini adalah hasil keputusan RUPSLB beserta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2024.

The following are the results of the EGMS Decision and the follow-up by the Company's Management until the end of 2024.

RUPS Luar Biasa tanggal 25 September 2024
Extraordinary General Meeting of Shareholders on September 25, 2024

Mata Acara Rapat ke-1:
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Hasil keputusan:
- Menyetujui mengangkat Bapak Fransiscus Budi Prayitno sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- Pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bapak Zuhri Iryansyah
Komisaris	:	Ibu R. R. Dewi Ariyani
Komisaris Independen	:	Bapak Bay Mokhamad Hasani
Komisaris Independen	:	Bapak Fransiscus Budi Prayitno

Direksi

Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	:	Ibu Shanti Puruhita
Direktur Armada dan Operasi	:	Bapak Muhammad Iqbal
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko	:	Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Telah ditindaklanjuti di tahun 2024.

First Meeting Agenda:
Changes in the composition of the Company's Management.

Resolutions:
- Approved the appointment of Mr. Fransiscus Budi Prayitno as Independent Commissioner of the Company.
- The appointment is effective as of the closing of the Meeting until the closing of the 5th Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2029 with due observance of the laws and regulations in the Capital Market and without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
- With these appointments, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors will be as follows:

Dewan Komisaris

President Commissioner	:	Mr. Zuhri Iryansyah
Commissioner	:	Mrs. R. R. Dewi Ariyani
Independent Commissioner	:	Mr. Bay Mokhamad Hasani
Independent Commissioner	:	Mr. Fransiscus Budi Prayitno

Board of Directors

President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director	:	Mrs. Shanti Puruhita
Director of Fleet Management and Operation	:	Mr. Muhammad Iqbal
Director of Finance, Human Resources, and Risk Management	:	Mrs. Dessy Emastari Prihatiningtyas

- Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state in a separate Notarial deed and take all necessary actions related to changes in the nomenclature of the Company's Board of Commissioners in accordance with applicable laws and regulations.

Follow-up on Resolution:
Action taken in 2024.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dalam sistem tata kelola Perusahaan, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pengelolaan berjalan efektif dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Secara kolegial, Dewan Komisaris memberikan arahan dan masukan strategis kepada Direksi serta mengawasi kebijakan dan operasional Perusahaan agar selaras dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris juga memastikan Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan menjalankan pengelolaan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Within the Company's governance system, the Board of Commissioners performs a supervisory function to ensure that the management runs effectively and in accordance with the principles of good governance. Collegially, the Board of Commissioners provides strategic direction and input to the Board of Directors and oversees the Company's policies and operations to ensure they are in line with the established business plan. The Board of Commissioners also ensures that the Board of Directors has adequate competence and manages the Company in accordance with the provisions of laws and regulations.

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui tahapan penetapan sumber bakal calon, proses penjaringan, penilaian, hingga pengusulan pengangkatan. Dalam pengangkatan Dewan Komisaris, Pemegang Saham telah mempertimbangkan kriteria dan persyaratan sebagai Calon Anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Evaluasi serta gambaran singkat track record yang bersangkutan, hal ini mengacu kepada pada Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023. Seluruh anggota Komisaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT

The Board of Commissioners is appointed through a process that includes identifying potential candidates, screening, assessment, and nomination. The shareholders have considered the criteria and requirements for Board of Commissioners candidates based on the assessment results by the Evaluation Team and a brief overview of the relevant track record, in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation PER-2/MBU/03/2023. All members of the Company's Board of Commissioners have met the general requirements, including expertise, integrity, leadership, honesty, good behavior, and high dedication to advancing and developing the Company and applicable regulations.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Perusahaan memiliki Pedoman Dewan Komisaris sebagai landasan pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pedoman ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Nomor HK.56/4/10/3/MS-21 tanggal 4 Oktober 2021 tentang *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Seiring dengan dinamika regulasi dan praktik terbaik, pedoman tersebut secara berkala dilakukan peninjauan dan pemutakhiran.

BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINE

The company has a Board of Commissioners Manual as guidance regarding the implementation of the Board of Commissioners' functions, duties, and responsibilities. This guideline was established through Joint Decree Number HK.56/4/10/3/MS-21 dated October 4, 2021, on the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. As regulations and best practices evolve, this guideline is periodically reviewed and updated.

MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris terhitung efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS TERM OF OFFICE

The term of office for the Board of Commissioners begins from the date set by the GMS and extends until the conclusion of the 5th Annual GMS following the appointment and may be reappointed for an additional 1 (one) more period without diminishing the authority of GMS to dismiss any members at any time.



MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian tersebut dikarenakan berdasarkan kenyataan, Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara.
4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Mengundurkan diri.

BOARD OF COMMISSIONERS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time through GMS resolution, provided reasons are stated. Dismissal may occur if the Commissioner:

1. Fails to fulfill their duties adequately.
2. Violates statutory regulations or provisions of the Articles of Association.
3. Engages in actions detrimental to the Company or the country.
4. Found guilty by a court decision with permanent legal force.
5. Resigns.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris, dengan komposisi Dewan Komisaris yang berlaku per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS COMPOSITION, AMOUNT, AND APPOINTMENT BASIS THROUGHOUT 2025

In 2025, there were changes to the composition of the Company's Board of Commissioners. The Company's Board of Commissioners composition and structure as of December 31, 2025 is as follows:

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025
Composition and Structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
R. R. Dewi Ariyani	Komisaris Utama President Commissioner	18 Juni 2025 – RUPST 2030 June 18, 2025 – AGMS 2030	Akta Notaris No. 25 tanggal 18 Juni 2025 Notary Deed No. 25 dated June 18, 2025
F. Budi Prayitno	Komisaris Commissioner	18 Juni 2025 – RUPST 2030 June 18, 2025 – AGMS 2030	Akta Notaris No. 25 tanggal 18 Juni 2025 Notary Deed No. 25 dated June 18, 2025
Doni Istyanto Hari Mahdi	Komisaris Independen Independent Commissioner	18 Juni 2025 – RUPST 2030 June 18, 2025 – AGMS 2030	Akta Notaris No. 25 tanggal 18 Juni 2025 Notary Deed No. 25 dated June 18, 2025
Mitchell Julius Tupamahu	Komisaris Independen Independent Commissioner	18 Juni 2025 – RUPST 2030 June 18, 2025 – AGMS 2030	Akta Notaris No. 25 tanggal 18 Juni 2025 Notary Deed No. 25 dated June 18, 2025

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak/golongan tertentu.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners is entrusted with supervising management policies and the overall course of management concerning both the Company and its business conducted by the Board of Directors, providing guidance to the Board of Directors, including overseeing the implementation of the Company's long-term plans, work plans, budgets, and adherence to the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations, all in the best interests of the Company and in alignment with its objectives.

The responsibilities of the Board of Commissioners include:

1. Providing advice to the Board of Directors for the Company's management, prioritizing the Company's interests over specific parties or groups.

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
4. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris.
5. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
6. Membentuk Komite Audit.
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
9. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan yang bersangkutan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lampau kepada RUPS.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris memiliki hak, sebagai berikut:

1. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan Pemegang Saham disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
3. Dewan Komisaris diberi honorarium dan tunjangan serta fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperoleh informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Selain itu, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta memeriksa kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.

2. Reviewing and evaluating the Company's Long-Term Plan and Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of Association.
3. Examining and approving periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors, and signing off on the annual report.
4. Segregating responsibilities among members of the Board of Commissioners.
5. Developing the annual work program for the Board of Commissioners and incorporating it into the Company's work plan and budget.
6. Establishing an Audit Committee.
7. Recommending a Public Accountant to the GMS.
8. Documenting minutes of Board of Commissioners meetings and maintaining copies.
9. Disclosing their and/or their family's share ownership in the Company and other companies, including any changes.
10. Reporting on supervisory tasks conducted during the previous financial year to the GMS.
11. Fulfilling other obligations related to supervisory duties and providing advice, ensuring they do not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.

BOARD OF COMMISSIONERS RIGHTS AND AUTHORITIES

In fulfilling its supervisory duties, the Board of Commissioners possesses the following rights:

1. Request the attendance of the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings.
2. Temporarily suspend one or more members of the Board of Directors, with a majority vote, if they act contrary to the Articles of Association, cause losses to the Company, neglect their obligations, or for urgent reasons concerning the Company. The temporary suspension must be communicated in writing to the individual(s) involved and to the Shareholders, along with the reasons for such action.
3. Receive honorariums, allowances, and benefits, including post-service compensation, the nature and amount of which are determined by the GMS, considering applicable laws and regulations.
4. Access information about the Company in a timely, accurate, and comprehensive manner.

Additionally, the Board of Commissioners holds the authority to:

1. Review books, correspondence, and other documents, examine cash for verification purposes, inspect securities, and assess the Company's assets.
2. Access the premises, buildings, and offices utilized by the Company.



3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris dan mengangkat Satuan Pengawas Internal (SPI), jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Membentuk komite-komite selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas usulan/perbuatan Direksi, yaitu:
    a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
    b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan *asset*, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangunan Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama lainnya;
    c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
    d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
    e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
    f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
    g. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
    h. Menetapkan dan merubah Logo Perusahaan;
    i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

3. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters related to the Company's management.
4. Be informed of all policies and actions undertaken or to be undertaken by the Board of Directors.
5. Summon the Board of Directors and/or other officials, with the Board of Directors' knowledge, to attend Board of Commissioners meetings.
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners and appoint an Internal Audit Unit (SPI), if deemed necessary.
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors as per the Articles of Association.
8. Establish committees, aside from the audit committee, if deemed necessary considering the Company's capabilities.
9. Engage experts for specific matters and within a designated time frame, with expenses covered by the Company, if necessary.
10. Take actions to manage the Company under specific circumstances and for a defined period, in accordance with the Articles of Association and without violating applicable laws and regulations.
11. Attend Board of Directors meetings and provide insights on the matters discussed.
12. Exercise other supervisory powers, provided they do not contravene statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.
13. Provide written approval for the Board of Directors' proposals/actions, namely:
    a. Placing fixed assets as collateral for short-term credit withdrawals;
    b. Organizing cooperation with business entities or other parties for a period of more than 5 (five) years up to 10 (ten) years in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Building Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO), and other collaborations;
    c. Receive or provide medium/long term loans, except for loans (debts or receivables) arising from business transactions, and loans provided to the Company's subsidiaries with the provisions that the loans to the Company's subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
    d. Write off bad debts and dead goods inventory from the books;
    e. Releasing and writing off movable fixed assets with an economic life, which is generally applicable in the industry, for up to 5 (five) years;
    f. Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
    g. Determining the Company's Long Term Plan;
    h. Determine and change the Company Logo;
    i. Establishing subsidiaries and/or joint ventures;

j. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
k. Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
l. Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;
m. Melakukan tindakan-tindakan lain yang nilainya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yaitu:
   - Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
   - Melakukan penyertaan modal pada Perusahaan lain;
   - Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
   - Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP;
   - Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
   - Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
   - Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris wajib memberikan keputusan.

PEMBAGIAN TUGAS ANTAR DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memastikan efektivitas penerapan GCG melalui penetapan pembagian tugas antaranggota yang telah diatur secara jelas dalam Akta, sehingga tanggung jawab setiap anggota dapat dijalankan secara optimal.

Rincian Tugas Komisaris Utama

R. R. Dewi Ariyani bertanggung jawab atas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi di bidang:

1. Koordinator Pembinaan dan pengawasan Manajemen, Komersial, Keuangan, dan Operasional.
2. Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang SDM, Hukum, Humas, dan GCG.
3. Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang Teknik dan Armada.
4. Koordinator Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko.

j. Establish foundations, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to the Company;
k. Charging fixed and routine Company costs for foundations, organizations, and/or associations either directly or indirectly related to the Company;
l. Proposing representatives of the Company to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint venture companies and/or subsidiaries that provide significant contributions to the Company and/or have strategic value as determined by the GMS;
m. Carrying out other actions with a value of up to 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, whether related to each other or not, namely:
   - Pledging fixed assets for medium/long-term credit withdrawals;
   - Making capital investments in other companies;
   - Releasing capital participation in subsidiaries and/or joint ventures;
   - Carrying out other actions that have not been specified in the RKAP;
   - Carrying out mergers, consolidations, takeovers, separations, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
   - Binding the Company as a guarantor (borg or avalist);
   - Within 30 (thirty) days from receipt of the request or complete explanation and documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners is obliged to provide a decision.

DUTIES SEGREGATION AMONG THE BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

The Board of Commissioners ensures the effectiveness of GCG implementation by establishing a clear allocation of duties among members as stipulated in the Deed, thereby enabling each member to perform their responsibilities optimally.

President Commissioner's Duties

R. R. Dewi Ariyani is tasked with supervising and advising the Board of Directors in the following areas:

1. Coordinator in charge of management, commercial, financial, and operational development and supervision.
2. Coordinator in charge of human resources, legal, public relations, and corporate governance development and supervision.
3. Coordinator in charge of engineering and fleet development and supervision.
4. Coordinator in charge of finance and risk management.



Tabel Bidang Tugas Anggota Dewan Komisaris
Table of Duties of the Board of Commissioners Members

Nama Name	Jabatan Position	Uraian Tugas Job Description
R. R. Dewi Ariyani	Komisaris Utama President Commissioner	▪ Koordinator Pembinaan dan pengawasan Manajemen, Komersial, Keuangan, dan Operasional. ▪ Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang SDM, Hukum, Humas, dan GCG. ▪ Koordinator pembinaan dan pengawasan bidang Teknik dan Armada. ▪ Koordinator Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko. ▪ Coordinator in charge of management, commercial, financial, and operational development and supervision. ▪ Coordinator in charge of human resources, legal, public relations, and corporate governance development and supervision. ▪ Coordinator in charge of engineering and fleet development and supervision. ▪ Coordinator in charge of finance and risk management.
F. Budi Prayitno	Komisaris Commissioner	Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang Keuangan, Pengembangan Usaha, Manajemen Risiko, dan Hukum. Conducting guidance and supervision in the areas of Finance, Business Development, Risk Management, and Law.
Doni Istyanto Hari Mahdi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang Keuangan, Teknik, dan Armada. Conducting guidance and supervision in the Finance, Engineering, and Fleet sector.
Mitchell Julius Tupamahu	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang Sumber Daya Manusia, GCG, Humas, dan hal strategis. Providing guidance and supervision in the fields of human resources, corporate governance, public relations, and strategic matters.

PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG BARU

IPCM menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh mengenai perusahaan. Program ini mencakup pengenalan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi, kegiatan usaha, serta kebijakan dan praktik tata kelola yang berlaku. Ketentuan pelaksanaan program orientasi tersebut mengacu pada *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan pada 4 Oktober 2021. Sehubungan dengan perubahan keanggotaan Dewan Komisaris di tahun 2025, IPCM menggelar program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2025.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

IPCM organizes an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners to ensure a comprehensive understanding of the Company. The program introduces the Company's vision, mission, values, organizational structure, business activities, and applicable governance policies and practices. The provisions for implementing the orientation program refer to the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Number HK.56/4/10/3/MS-21, which was ratified on October 4, 2021. Following the 2025 change in the membership of the Board of Commissioners, IPCM held an orientation program for the new members on June 25, 2025.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Perusahaan menempatkan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris sebagai aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan menyelenggarakan berbagai program pelatihan guna memperkuat pemahaman terhadap bisnis inti serta regulasi yang berlaku. Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Nomor HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan pada 4 Oktober 2021.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company regards improving the competence of the Board of Commissioners as an important aspect in supporting the optimal performance of its duties and responsibilities. In this regard, the Company organizes various training programs to strengthen the understanding of its core business and applicable regulations. Provisions regarding training and competency development for the Board of Commissioners are stipulated in the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Number HK.56/4/10/3/MS-21, which was ratified on October 4, 2021.

Throughout 2025, the Board of Commissioners has participated in various competency development programs as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
R. R. Dewi Ariyani (Komisaris Utama) (President Commissioner)	*Workshop*	*Environmental, Social and Governance*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI)
	Sertifikasi Certification	*Qualified Risk Oversight Professional* (QROP)	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, May 15-16, 2025	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
F. Budi Prayitno (Komisaris) (Commissioner)	*Workshop*	*Environmental, Social and Governance*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT PMLI)
	Workshop	Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, May 15-16, 2025	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
	Forum Group Discussion	*Risk & Governance Summit* 2025	Jakarta, 19 Agustus 2025 Jakarta, August 19, 2025	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Doni Istyanto Hari Mahdi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	*Workshop*	*Strategic Oversight & Risk Governance*	Yogyakarta, 13-14 Agustus 2025 Yogyakarta, August 13-14, 2025	PPA Universitas Indonesia
	Workshop	*Executive Program for Commissioners*	Yogyakarta, 30-31 Oktober 2025 Yogyakarta, October 30-31, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Mitchell Julius Tupamahu (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	*Workshop*	*Strategic Oversight & Risk Governance*	Yogyakarta, 13-14 Agustus 2025 Yogyakarta, August 13-14, 2025	PPA Universitas Indonesia
	Workshop	*Executive Program for Commissioners*	Yogyakarta, 30-31 Oktober 2025 Yogyakarta, October 30-31, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perusahaan untuk:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja sama Operasi (KSO), Bangunan Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerja sama lainnya;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak Perusahaan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan struktur organisasi Perusahaan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan.

TYPES OF DECISIONS THAT REQUIRE APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

The following actions can only be carried out by the Board of Directors after obtaining written approval from the Board of Commissioners, while adhering to applicable laws, regulations, and the Company's articles of association:

1. Pledging fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Entering into cooperation with business entities or other parties for a period of more than 5 (five) years up to 10 (ten) years, in forms such as licenses, management contracts, leasing assets, Joint Operation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BowT), Build Transfer Operate (BTO), and other collaborations;
3. Receiving or providing medium/long-term loans, excluding loans arising from business transactions, with the provision that loans to the Company's subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. Writing off bad debts and obsolete inventory from the books;
5. Disposing of the Company's movable fixed assets with an economic life generally applicable in the industry, up to 5 (five) years;
6. Determining the Company's organizational structure one level below the Board of Directors;
7. Carrying out other actions not stipulated in the Company's Work Plan and Articles of Association.



PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS

Perusahaan terus meningkatkan kinerja melalui arahan dan pengawasan yang efektif, dengan peran Dewan Komisaris dalam memastikan strategi sejalan dengan tujuan jangka panjang, mendukung manajemen, serta mendorong penciptaan nilai berkelanjutan. Program kerja Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris beserta Organ Pendukung;
2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. *Management Walkthrough*; dan
4. Program Pelatihan dan Pengembangan.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara aktif sesuai rencana yang telah ditetapkan, antara lain melalui kegiatan berikut:

1. Pemberian rekomendasi kebijakan manajemen risiko, pengendalian internal;
2. Melakukan monitoring atas kinerja perusahaan melalui rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Pemberian persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
4. Meninjau hasil audit internal maupun eksternal serta tindak lanjutnya;
5. Mengawasi pelaksanaan kegiatan strategis perusahaan dalam kegiatan rapat pembahasan Dewan Komisaris bersama Direksi serta pemberian masukan atas kegiatan strategis tersebut;
6. Melakukan *Management Walkthrough* Dewan Komisaris, Organ Pendukung bersama Direksi;
7. Mengikuti Program Pelatihan dan Pengembangan; dan
8. Menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Komisaris secara efektif melalui dukungan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketiga komite tersebut berperan dalam melakukan peninjauan dan evaluasi serta memberikan masukan strategis kepada Direksi. Efektivitas kinerja komite dievaluasi berdasarkan pencapaian program kerja, kepatuhan terhadap rencana yang ditetapkan, partisipasi dalam rapat, serta kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

BOARD OF COMMISSIONERS WORK PROGRAM

The Company continues to improve its performance through effective guidance and supervision, with the Board of Commissioners playing a role in ensuring that strategies are aligned with long-term objectives, supporting management, and encouraging the creation of sustainable value. The Board of Commissioners' work program for 2025 is as follows:

1. Internal Meetings of the Board of Commissioners and Supporting Bodies;
2. Coordination Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Management Walkthrough; and
4. Training and Development Programs.

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES IN 2025

Throughout 2025, the Board of Commissioners actively carried out its duties and responsibilities in accordance with the established plan, including through the following activities:

1. Providing recommendations on risk management policies and internal controls;
2. Monitoring the Company's performance through coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Approving the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
4. Reviewing the results of internal and external audits and their follow-up;
5. Overseeing the implementation of the company's strategic activities in Board of Commissioners and Board of Directors meetings and providing input on these strategic activities;
6. Conducting field visits by the Board of Commissioners and supporting organs together with the Board of Directors;
7. Participating in training and development programs; and
8. Submitting the Board of Commissioners' Supervisory Report to shareholders through the General Meeting of Shareholders.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Supervision of the Company's management is carried out effectively by the Board of Commissioners with the support of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. These three committees play a role in conducting reviews and evaluations and providing strategic input to the Board of Directors. The effectiveness of the committees' performance is evaluated based on the achievement of work programs, compliance with established plans, participation in meetings, and the quality of recommendations produced.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang memiliki kedudukan independen dan bebas dari hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham pengendali, serta Perusahaan. Independensi tersebut memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan secara objektif, profesional, dan tanpa konflik kepentingan, sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN

Komposisi Komisaris Independen Perseroan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Hingga 31 Desember 2025, Perseroan memiliki dua Komisaris Independen, yaitu Doni Istyanto Hari Mahdi dan Mitchell Julius Tupamahu yang menjabat sejak 18 Juni 2025 berdasarkan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 18 Juni 2025.

Jumlah Komisaris Independen tersebut mewakili lebih dari 50% dari total empat anggota Dewan Komisaris, sehingga telah memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Komposisi ini juga selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengatur proporsi Komisaris Independen paling sedikit 30% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

Melalui pemenuhan ketentuan tersebut, Perseroan terus mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mendorong keberagaman, serta menjaga independensi dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis.

KRITERIA PENENTUAN DAN PEMENUHAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar dapat diangkat sebagai Komisaris Independen Perusahaan, terdapat kriteria independensi yang tercantum di bawah ini:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi.
2. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are independent and free from financial, management, share ownership, or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, controlling shareholders, or the Company. This independence ensures the implementation of supervisory functions in an objective, professional manner and without conflicts of interest, which is in line with GCG principles.

INDEPENDENT COMMISSIONER COMPOSITION AND MEMBERSHIP WITHIN THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS STRUCTURE

The composition of the Company's Independent Commissioners is determined in accordance with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organizational Structure and Human Resources of State-Owned Enterprises. As of December 31, 2025, the Company has two Independent Commissioners, namely Doni Istyanto Hari Mahdi and Mitchell Julius Tupamahu, who have served since June 18, 2025, based on Notarial Deed No. 26 dated June 18, 2025.

The number of Independent Commissioners represents more than 50% of the total four members of the Board of Commissioners, thus fulfilling the minimum requirements set by the Ministry of State-Owned Enterprises. This composition is also in line with Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which stipulates that Independent Commissioners must constitute at least 30% of the total members of the Board of Commissioners.

The Company continues to prioritize the implementation of good corporate governance, promote diversity, and maintain independence in every strategic decision-making process through compliance with these requirements.

DETERMINATION AND FULFILLMENT CRITERIA OF THE INDEPENDENT COMMISSIONERS INDEPENDENCY

The Company's Independent Commissioner ensures the effective functioning of the monitoring mechanism in accordance with statutory regulations. To be appointed as an Independent Commissioner of the Company, candidates must meet the following independence criteria:

1. They should not hold a Director position in an affiliated Company.
2. They should not have been employed by the Company or its affiliates within the last 1 (one) year.



3. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.
4. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.
5. Rangkap jabatan komisaris maksimal 2 (dua) perusahaan.

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi Komisaris Independen pada tahun 2025 dijabat oleh Doni Istyanto Hari Mahdi dan Mitchell Julius Tupamahu. Selama menjalankan fungsi pengawasan, tidak ditemukan adanya situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

3. They must not have any financial connections, either directly or indirectly, with the Company or other companies that provide services and products to the Company and its affiliates.
4. They must be free from conflicts of interest and business activities or other relationships that could impede or interfere with their ability to act or think independently within the scope of the Company.
5. They can concurrently hold the position of commissioner in a maximum of 2 (two) other companies.

INDEPENDENCE STATEMENT OF EACH INDEPENDENT COMMISSIONER

In 2025, the Independent Commissioners consisted of Mr. Doni Istyanto Hari Mahdi and Mr. Mitchell Julius Tupamahu. During the performance of their supervisory duties, no conflict of interest was found in the decision-making process.

Status Independensi Komisaris Independen Tahun 2025
Board of Commissioners Independency Status in 2025

Kriteria Criteria	Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independency	
	Doni Istyanto Hari Mahdi*	Mitchell Julius Tupamahu*
Bukan anggota manajemen Perusahaan. Not a Member of the Company's Management.	✓	✓
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Independent from business and other relationships that may influence decision-making.	✓	✓
Bukan pemegang saham mayoritas Perusahaan atau pekerja yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perusahaan. Not a majority shareholder of the Company or an employee directly related to the majority shareholder of the Company.	✓	✓
Bukan pekerja atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not an Employee or executive at the company or any of its affiliation within 3 (three) years prior to joining the Board of Commissioners.	✓	✓
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pekerja yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not a primary professional advisor or consultant for the Company or its affiliates, or in direct contact with such service providers within 3 (three) years prior to joining the Board of Commissioners.	✓	✓
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pekerja dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. Not a supplier or primary customer of the Company or its affiliates, or an employee with direct or indirect contact with such suppliers or customers.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi. Not engaged in any contractual relationship with the company or its affiliates as a Director.	✓	✓
Seluruh Komisaris Perusahaan sebagaimana Disebutkan di atas Telah Memenuhi Kriteria Independensi. All Company Commissioners as Mentioned above Have Fulfilled the Independence Criteria.	✓	✓

*) Menjabat sejak 18 Juni 2025
*) In office since June 18, 2025

Sehubungan dengan masih berlangsungnya periode pertama masa jabatan Komisaris Independen, penyampaian Surat Pernyataan Independensi secara terpisah pada saat ini tidak diwajibkan.

Since the first term of the Independent Commissioner is still ongoing, it is not mandatory to submit a separate Statement of Independence Letter at this time.

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang secara kolektif memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola Perusahaan serta memastikan penerapan GCG di seluruh tingkatan organisasi. Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan Perusahaan guna mencapai kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The Board of Directors constitutes the Company's governing body, collectively possessing the authority and responsibility to manage the Company and ensure the implementation of GCG at all levels of the organization. The Board of Directors is fully responsible for managing the Company to ensure that its interests and objectives are achieved in accordance with the provisions of the Articles of Association.

PROSEDUR PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan Direksi di lingkungan IPCM dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM, yang dimulai dengan penentuan sumber bakal calon, penjaringan, penilaian serta usulan pengangkatan. Sebagai pertimbangan untuk mengangkat Anggota Direksi Perusahaan memiliki kriteria dan persyaratan serta diwajibkan lulus dalam proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh fungsi *Talent Pool* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham. Calon Anggota Direksi Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan umum, diantaranya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku baik dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT PROCEDURE

The Board of Directors appointment within the IPCM follows the Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources, which started from sourcing candidates, selecting, assessing, and submitting an appointment proposal. To be considered for a Board of Directors position, candidates must meet specific criteria and requirements and undergo a Fit and Proper Test conducted by the Talent Pool function organized by Shareholders. General requirements include expertise, integrity, leadership, honesty, good behavior, and a high dedication to advancing and developing the Company in accordance with applicable regulations.

Untuk Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengundurkan diri.

The position of a member of the Board of Directors terminates under the following circumstances:

1. Passed away.
2. End of term.
3. Dismissal based on resolution.
4. No longer meeting the requirements as a Board of Directors member as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
5. Resigned.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Direksi melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.56/4/10/3/MS-21 yang berlaku sejak 4 Oktober 2021, sebagai pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam penyusunan RJPP, RKAP, dan Laporan Berkala.

BOARD OF DIRECTORS WORK GUIDELINE

The Board of Directors carries out its duties and authorities based on the Work Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners (Board Manual) of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.56/4/10/3/MS-21, which has been in effect since October 4, 2021, as a guideline for the implementation of good corporate governance, including in the preparation of the RJPP, RKAP, and Periodic Reports.



MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Masa jabatan Direksi terhitung efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi yang bersangkutan sewaktu-waktu.

MEKANISME PENGUNDURAN DIREKSI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Prosedur terkait pemberhentian direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga Anggaran Dasar Perusahaan.

Untuk Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan.
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengundurkan diri.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DI SEPANJANG TAHUN 2025

Penetapan struktur dan susunan Direksi Perusahaan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas, dan rencana strategis Perusahaan.
2. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Komposisi dan pembagian tugas serta wewenang Direksi berdasarkan struktur organisasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS. Apabila pembagian tugas Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS maka pembagian tugas dan wewenang di antara Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Di tahun 2025, terdapat perubahan susunan keanggotaan Direksi, dengan komposisi Direksi yang per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS MEMBER OFFICE TERM

The office term for the Board of Directors begins from the date determined by the GMS and lasts until the closing of the 5th Annual GMS after the appointment date. They can be reappointed for 1 (one) subsequent period, without diminishing the right of the GMS to dismiss any members of the Board of Directors at any time.

BOARD OF DIRECTORS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

Procedures regarding the Board of Directors dismissal of PT Jasa Armada Indonesia Tbk are governed by Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014, and the Company's Articles of Association.

The position of a member of the Board of Directors terminates under the following circumstances:

1. Passed away.
2. End of term.
3. Dismissal based on resolution.
4. No longer meeting the requirements as a Board of Directors member as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
5. Resigned.

BOARD OF DIRECTORS MEMBER COMPOSITION, NUMBER, STRUCTURE, AND APPOINTMENT BASIS THROUGHOUT 2025

The determination of the structure and composition of the Company's Board of Directors refers to the following provisions:

1. The number of Directors is at least 1 (one) person and is adjusted to the needs, level of complexity, and strategic plans of the Company.
2. If the Board of Directors consists of more than 1 (one) member, a member is appointed as President Director.
3. The composition, segregation of duties, and authority of the Board of Directors based on the Company's organizational structure are determined by the GMS. If the segregation of duties is not determined by the GMS, it will be decided by the Board of Directors decree.

In 2025, there was a change in the composition of the Board of Directors, with the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025 as follows:

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2025
Composition and Membership of the Board of Directors as of December 31, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Periods	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Shanti Puruhita	Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director	12 Juni 2024 – RUPST 2029 June 12, 2024 - AGMS 2029	Ke-2 2nd	▪ Akta Notaris No. 24 tanggal 15 Juli 2020; ▪ Akta Notaris No. 33 tanggal 17 Juni 2021; ▪ Akta Notaris No. 16 tanggal 6 Desember 2022. ▪ Akta Notaris Nomor 31 tanggal 12 Juni 2024. ▪ Notary Deed No. 24 dated July 15, 2020; ▪ Notary Deed Number 33 dated June 17, 2021; ▪ Notary Deed Number 16 dated December 6, 2022; ▪ Notary Deed No. 31 dated June 12, 2024.
Arief Hermawan	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operations	18 Juni 2025 – RUPST 2029 June 18, 2025 - AGMS 2029	Ke-1 1st	Akta Notaris Nomor 25 tanggal 18 Juni 2025. Notary Deed No. 25 dated June 18, 2025.
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Resources, and Risk Management	12 Juni 2024 – RUPST 2029 June 12, 2024 - AGMS 2029	Ke-1 1st	Akta Notaris Nomor 31 tanggal 12 Juni 2024. Notary Deed No. 31 dated June 12, 2024.

INDEPENDENSI DIREKSI

Independensi Direksi sangat dijaga agar dapat memberikan keputusan dan dapat melakukan pengelolaan perusahaan tanpa adanya benturan kepentingan. Direksi Perusahaan tidak diperbolehkan memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau kepemilikan saham dan/atau hubungan kepengurusan dengan Perusahaan maupun Perusahaan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen serta melaksanakan fungsi dan tugasnya secara individual maupun kolegial.

BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCY

The independence of the Board of Directors is rigorously upheld to ensure the ability to make decisions and manage the company without any conflicts of interest. The Company's Board of Directors are prohibited from having financial or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or controlling shareholders. Additionally, Directors are not allowed to hold shares or management positions that could compromise their independence or affect their ability to fulfill their functions and duties independently or collectively.

TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan demi kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan batasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan wewenang direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan Keputusan RUPS.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Directors are tasked with managing the Company in its best interests and in alignment with the Company's aims and objectives. They are also responsible for representing the Company internally and externally, subject to the limitations stipulated by applicable laws, regulations, the Articles of Association, and General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.

As per the Company's Articles of Association, Directors have the following duties and authorities:

1. The Board of Directors is responsible for managing the Company's affairs in the best interests of the Company and in accordance with its aims and objectives, representing the Company both internally and externally at court regarding any matters and events, subject to the limitations outlined in statutory regulations, the Articles of Association, and GMS Resolutions.



2. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan yang meliputi;
      - Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau di luar negeri;
      - Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
      - Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      - Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan Perusahaan;
      - Mengangkat dan memberhentikan Satuan Pengawas Internal Perusahaan;
      - Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
   b. Direksi berkewajiban untuk:
      - Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
      - Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
      - Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
      - Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;
      - Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
      - Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

2. In fulfilling their duties, Directors holds the following authorities and obligations:
   a. Board of Directors hold the authority and obligations as follows:
      - Regulating the delegation of Directors' representation powers, both within and outside the court, to one or several specifically appointed Directors or employees, individually or jointly, as well as to other individuals, and the delegation of representation powers to Branch Heads or Representatives domestically or internationally;
      - Establishing provisions related to Company personnel, such as determining salaries, pensions, or other benefits for employees, in compliance with applicable laws, regulations, and GMS resolutions;
      - Appointing and dismissing Company employees in accordance with Company personnel regulations, as well as applicable laws and regulations;
      - Appointing and dismissing the Company's Corporate Secretary;
      - Appointing and dismissing the Company's Internal Audit Unit;
      - Performing all actions related to the management and ownership of the Company's assets, entering into agreements binding the Company with other parties, and representing the company in legal matters, subject to restrictions as stipulated by statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS Resolutions.
   b. The Board of Directors has the following obligation:
      - Ensure and guarantee the implementation of the Company's business and activities in accordance with its objectives and purposes;
      - Timely prepare the Company's Long Term Plan, Work Plan, Budget, and any amendments thereof, submitting them to the Board of Commissioners for approval;
      - Provide explanations to the Board of Commissioners regarding the Company's Long Term Plan, Work Plan, and Budget;
      - Generate a Shareholder List, Special List, and Minutes of Directors' Meetings;
      - Produce an Annual Report to demonstrate accountability for the Company's management, along with financial documents as mandated by the Law on Company Documents;
      - Prepare Financial Statements according to Financial Accounting Standards, forwarding them to the Public Accountant for audit;

- Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perusahaan lainnya;
- Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (11) ayat ini;
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
- Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris;
- Menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perusahaan;
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Pembagian tugas dan kewenangan antaranggota Direksi dirancang untuk memastikan pelaksanaan fungsi Direksi berjalan efektif dan terarah. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.01/15/3/3/SRA/DUT/JAI-24 dengan rincian sebagai berikut:

- Submit Annual Reports, including Financial Statements, to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval and ratification;
- Offer explanations to the GMS concerning the Annual Report;
- Present the Balance Sheet and Profit and Loss Report, approved by the GMS, to the Minister responsible for Law and Human Rights as per statutory regulations;
- Maintain the Shareholders Register, Special Register, GMS Minutes, Commissioners Meeting Minutes, Directors Meeting Minutes, Annual Report, and Company financial documents, along with other Company documents;
- Store essential documents, including Shareholder Register, Special Register, GMS Minutes, Minutes of Commissioners Meetings, Minutes of Directors Meetings, Annual Report, Company financial documents, and other Company documents, at the Company's premises;
- Develop an accounting system complying with Financial Accounting Standards and internal control principles, particularly the segregation of management, recording, storage, and supervision functions;
- Provide periodic reports as per applicable regulations and other reports as requested by the Board of Commissioners;
- Prepare the Company's organizational structure with detailed responsibilities;
- Offer explanations regarding all matters queried or requested by members of the Board of Commissioners;
- Develop and determine the Company's organizational structure;
- Fulfill other obligations as stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on statutory regulations.

SEGREGATION OF DUTIES AMONG DIRECTORS

Segregation of duties and authorities among members of the Board of Directors is designed to ensure the effective and focused execution of the Board's functions. These arrangements are outlined in PT Jasa Armada Indonesia Tbk Board of Directors Regulation No. HK.01/15/3/3/SRA/DUT/JAI-24 with the following details:



Tabel Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
Segregation of Duties and Authorities among Directors

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision	
Direktur Utama President Director	**Fungsi:** ▪ Bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan yang efektif dan efisien berdasarkan aturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. ▪ Pembuat Kebijakan strategis dalam penentuan arah pengembangan bisnis perusahaan. ▪ Berperan sebagai koordinator Dewan Direksi perusahaan. **Tugas:** Bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan dalam kepengurusan Perusahaan, yang berkaitan dengan pembinaan program kegiatan: 1. Audit Internal; 2. Sekretaris Perusahaan; 3. Hukum; 4. Komersial dan Pengembangan Bisnis; 5. Armada dan Operasi; 6. Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko. **Wewenang:** Menetapkan kebijakan-kebijakan pembinaan pada semua kegiatan di Perusahaan.	**Functions:** ▪ Responsible for the effective and efficient management and continuity of the Company's business based on applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance. ▪ Strategic policy maker in determining the direction of the Company's business development. ▪ Acts as coordinator for the Company's Board of Directors. **Duties:** Responsible for policies within the Company's management, relating to the development of the following activities for: 1. Internal Audit; 2. Corporate Secretary; 3. Legal; 4. Commercial and Business Development; 5. Fleet and Operations; 6. Finance, HR, and Risk Management. **Authorities:** Establish development policies for all Company activities.
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Director Commercial and Business Development	**Fungsi:** Mengelola program kerja bidang komersial dan pengembangan bisnis. **Tugas:** 1. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Kerja Anggaran: a. Bertanggung jawab atas penyusunan *strategic business plan*, annual *business plan* (anggaran) dan *quarterly forecast* sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemegang saham; b. Melakukan proses pengendalian anggaran seoptimal mungkin dengan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan oleh pemegang saham; c. Membuat kebijakan strategis dalam bidang komersial dan pengembangan bisnis. 2. Komersial dan Pengembangan Bisnis: a. Menetapkan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan komersial dan pengembangan bisnis; b. Menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pentarifan, kerja sama usaha, dan Pengelolaan pelanggan serta *shipping*; c. Membuat kebijakan strategis dalam pengelolaan kegiatan komersil dan pengembangan bisnis; d. Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan jangka panjang dan jangka pendek kegiatan pengembangan bisnis serta melakukan pengendalian sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; e. Merencanakan dan mengarahkan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan, serta sistem dan prosedur kerja bidang komersial dan pengembangan bisnis; f. Mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan Komersial dan Pengembangan Bisnis, termasuk melakukan Koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak lain yang terkait; g. Menyusun studi kelayakan bisnis dari berbagai aspek (komersial, finansial, legal dan manajemen risiko), memonitor realisasi KPI perusahaan, melakukan pengendalian kinerja, melaksanakan rapat tinjauan manajemen, serta evaluasi dan perencanaan optimalisasi dan penggunaan aset atau alat;	**Function:** Manage the commercial and business development work program. **Duties:** 1. Prepare and coordinate the Work Budget Plan: a. Responsible for preparing the strategic business plan, annual business plan (budget), and quarterly forecast in accordance with the schedule of the shareholders; b. Optimize the budget control process by referring to the budget set by the shareholders; c. Develop strategic policies in the commercial and business development sector. 2. Commercial and Business Development: a. Determine, implement, and control commercial and business development activities; b. Determine, implement, and control tariffs, business partnerships, and Customer and shipping management; c. Develop strategic policies for managing commercial and business development activities; d. Coordinate and prepare long-term and short-term plans for business development activities and exercise control in accordance with the work plan; e. Plan, direct, develop, and implement a safety management system, as well as work systems and procedures for the commercial and business development sector; f. Organize, direct, and control Commercial and Business Development activities, including coordinating with government and private agencies and other relevant parties; g. Prepare business feasibility studies from various aspects (commercial, financial, legal, and risk management), monitor the realization of the company's KPIs, conduct performance control, conduct management review meetings, and evaluate and plan the optimization and utilization of assets or equipment;

Tabel Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
Segregation of Duties and Authorities among Directors

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision	
	h. Merencanakan, mengembangkan dan mengontrol *masterplan* dan tata kelola ICT beserta implementasinya, menerapkan *fully digital marine services*, pengelolaan *hardware* dan *software* beserta perawatannya serta pengembangan dalam implementasikan sistem informasi.	h. Plan, develop, and control the ICT master plan and governance and its implementation, implement fully digital marine services, manage hardware and software and their maintenance, and develop information systems.
	Wewenang: 1. Menetapkan program kerja bidang Komersial dan Pengembangan Bisnis; 2. Menetapkan metode kerja secara efektif dan efisien sesuai pada bidang kerjanya; 3. Menetapkan rencana kerja dan anggaran bidang komersial dan pengembangan bisnis.	**Authorities:** 1. Determine the Commercial and Business Development work program; 2. Determine effective and efficient work methods according to the scope of work; 3. Determine the Commercial and Business Development work plan and budget.
Direktur Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operations	**Fungsi:** Mengelola program kerja bidang Armada dan Operasi.	**Function:** Manage the Fleet and Operations work program.
	Tugas: 1. Armada a. Merencanakan, melaksanakan, dan memonitor kegiatan perawatan dan perbaikan kapal serta *drydocking*; b. Memonitor status kelas dan sertifikasi serta mengoordinasikan kegiatan survei dan inspeksi; c. Memonitor kegiatan perawatan kapal *onboard*; d. Melakukan inspeksi regular dan memantau kondisi kesiapan dan kelaikan kapal serta mengoordinasikan tindak lanjut yang dibutuhkan; e. Mengoordinasikan rencana *dry-docking* dengan melibatkan kru kapal dan menyusun spesifikasi dan *repair list* sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan kelancaran operasi; f. Menyusun anggaran/*budget docking* di bawah tanggung jawabnya dan mengajukannya dalam RKA tahunan; g. Melaksanakan *budgeting control* terhadap penyerapan realisasi penggunaan *budget docking*; h. Mengoordinasikan perencanaan docking dan menyusun *dock specs* atas kebutuhan *docking* tersebut; i. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dalam *docking*. 2. Operasi pemanduan dan penundaan a. Bertindak selaku Direktur Pembina fungsi DPA pada VP Operasi dan DPA; b. Menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan pelayanan kapal dan pemanduan; c. Menetapkan, melaksanakan, dan mengendalikan, *charter* kapal dalam memenuhi kebutuhan operasi; d. Membuat kebijakan strategis dalam pengelolaan kegiatan operasi pelayanan kapal dan pemanduan; e. Mengoordinasikan dan menyusun perencanaan jangka panjang dan jangka pendek kegiatan operasi serta melakukan pengendalian sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; f. Merencanakan dan mengarahkan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan, serta sistem dan prosedur kerja bidang operasi;	**Duties:** 1. Fleet a. Plan, implement, and monitor ship maintenance and repair activities, as well as drydocking; b. Monitor class and certification status, and coordinate survey and inspection activities; c. Monitor onboard ship maintenance activities; d. Conduct regular inspections and monitor the ship's readiness and seaworthiness, and coordinate any necessary follow-up actions; e. Coordinate drydocking plans by involving the ship's crew and prepare specifications and repair lists as needed, taking into account operational efficiency and smoothness; f. Prepare the docking budget under his/her responsibility and submit it to the annual RKA; g. Implement budgeting control over the utilization of the docking budget; h. Coordinate docking planning and prepare dock specifications for the docking requirements; i. Responsible for all docking activities. 2. Pilotage and Towing Operations a. Act as the Director of Supervision of the DPA function under the VP of Operations and the DPA; b. Determine, implement, and control the management of ship services and pilotage; c. Determine, implement, and control ship charters to meet operational needs; d. Develop strategic policies for the management of ship services and pilotage operations; e. Coordinate and develop long-term and short-term plans for operational activities and exercise control in accordance with work plans; f. Plan, direct, develop, and implement a safety management system, as well as operational systems and procedures;



Tabel Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
Segregation of Duties and Authorities among Directors

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision	
	g. Mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan operasi, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak lain yang terkait; h. Mengendalikan biaya pemakaian bahan bakar dan air kapal; i. Mendorong dan menjalankan penerapan kebijakan QHSSE, SMK3 dan ISM *Code* dalam kegiatan operasi sesuai dengan aspek dan bidang tugasnya; j. Memastikan program penghematan energi & Sumber Daya Manusia serta perlindungan lingkungan kerja dapat berjalan dengan baik. **3. *Crewing*** a. Menyusun anggaran ABK untuk masing-masing kapal sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku; b. Melakukan rekrutmen pelaut dan ABK baik secara mandiri maupun agensi serta mengoordinasikan penempatan dan familiarisasi untuk kru baru; c. Memonitor perubahan jadwal kerja pelaut dan ABK dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait; d. Mengoordinasikan perpindahan pelaut dan ABK antar wilayah kerja untuk kelancaran kegiatan operasional; e. Berkoordinasi dengan bagian SDM mengenai kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pelaut dan ABK. 4. **QHSSE (*Quality, Health, Safety, Security, and Environment*)** a. Melakukan identifikasi, perolehan dan penerapan sertifikasi internasional/regional/nasional yang diperlukan perusahaan untuk memperoleh pengakuan standar secara internasional/regional/nasional. b. Memastikan Perusahaan secara efektif melaksanakan program K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan) sesuai standar yang berlaku. **Wewenang:** 1. Menetapkan program kerja bidang Armada dan Operasi; 2. Menetapkan metode kerja secara efektif dan efisien sesuai pada bidang kerjanya; 3. Menetapkan rencana kerja dan anggaran bidang Armada dan Operasi.	g. Organize, direct, and control operational activities, including coordination with government and private agencies and other relevant parties; h. Control ship fuel and water costs; i. Promote and implement the implementation of QHSSE, SMK3, and ISM Code policies in operational activities in accordance with the relevant aspects and areas of responsibility; j. Ensure that energy and human resource conservation programs and work environment protection are implemented effectively. 3. **Crewing** a. Prepare a crew budget for each vessel in accordance with the number and qualifications required by applicable regulations; b. Recruit seafarers and crew members, both independently and through agencies, and coordinate the placement and familiarization of new crew members; c. Monitor changes in seafarers and crew work schedules and coordinate with relevant parties; d. Coordinate the movement of seafarers and crew members between work areas to ensure smooth operational activities; e. Coordinate with the Human Resources department regarding policies and procedures related to seafarers and crew members. 4. QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) a. Identify, obtain, and implement international/regional/national certifications required by the company to achieve international/regional/national recognition of standards. b. Ensure the company effectively implements its K3L (Health, Safety, Security, and Environment) program in accordance with applicable standards. **Authorities:** 1. Determine work programs for the Fleet and Operations sector; 2. Establish effective and efficient work methods appropriate to its area of work; 3. Determine the work plan and budget for the Fleet and Operations sector.
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Resources, and Risk Management	**Fungsi:** ▪ Menetapkan Program kerja bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko. ▪ Menetapkan metode kerja secara efektif dan efisien sesuai pada bidang kerjanya. **Tugas:** 1. Keuangan a. Anggaran & Akuntansi Berfungsi untuk mengkoordinir penyusunan, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran, menyimpan segala dokumen anggaran Perusahaan secara aman dan terkendali, mengelola dan merawat data dan sistem informasi keuangan Perusahaan, menyelenggarakan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.	**Functions:** ▪ Establish work programs for Finance, Human Resources, and Risk Management. ▪ Establish effective and efficient work methods according to their respective areas of expertise. **Duties:** 1. Finance a. Budget & Accounting Coordinates the preparation, control, and reporting of budget realization, stores all Company budget documents securely, manages and maintains the Company's financial data and information systems, and organizes the recording and preparation of financial reports in accordance with applicable accounting standards.

Tabel Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi
Segregation of Duties and Authorities among Directors

Jabatan Position	Lingkup Tugas Pengawasan Scope of Supervision
	b. Tresuri dan Perencanaan Keuangan Tresuri dan Perencanaan Keuangan Berfungsi untuk menjalankan *corporate finance*, pengelolaan kas dan ketatausahaan Perusahaan, pengelolaan pendapatan, peningkatan value Perusahaan (harga & likuiditas saham) bekerja sama dengan IR, membina hubungan dengan pelaku industri keuangan dan yang terkait lainnya dan mengembangkan *digital asset management* beserta valuasinya serta mengelola kewajiban perpajakan Perusahaan yang meliputi perencanaan, pembayaran, dan pelaporan pajak. c. Manajemen Risiko ▪ Melakukan pengukuran risiko dengan memperhitungkan dampaknya dan kemungkinan terjadinya peluang risiko serta mitigasi atas risiko; ▪ Melakukan sosialisasi dan internalisasi atas penerapan budaya manajemen risiko. 2. SDM & Umum a. Strategi dan Pengembangan SDM Berfungsi untuk desain struktur organisasi sesuai kebutuhan Perusahaan, melaksanakan *workload analysis*, merencanakan dan menganggarkan kebutuhan SDM jangka pendek, menengah dan panjang secara kuantitas dan kualitas, melaksanakan seleksi dan rekrutmen, mengelola manajemen kinerja, mengelola *succession plan*, mengelola administrasi dan dokumentasi SDM, direktori kompetensi beserta profil kompetensi jabatan, mengelola talent management, melaksanakan development (*training, mentoring, coaching, counseling*) *need analysis*, menyusun program pengembangan, melaksanakan pengembangan SDM, melaksanakan survei kepuasan dan loyalitas pekerja sesuai dengan target yang ditetapkan, membangun dan mengimplementasikan budaya Perusahaan. b. Hubungan Industrial dan Umum Berfungsi untuk menyusun dalam mengelola hubungan industrial, remunerasi Perusahaan (kompensasi dan *benefit*), mengelola inventarisasi dan database inventaris Perusahaan secara digital, mengelola kesiapan transportasi, pengelolaan kebersihan, keindahan, ketertiban, pengelolaan kebutuhan rumah tangga, kendaraan dinas dan umum Perusahaan, mengelola kesiapan alat transportasi, pengelolaan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan bangunan Perusahaan, pengelolaan SPPD dan kebutuhan perjalanan dinas (akomodasi, transportasi, konsumsi), pengelolaan penyelenggaraan rapat (undangan, kesiapan ruangan beserta kelengkapannya), pengelolaan arsip secara digital. 3. Pengadaan Berfungsi untuk melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pendokumentasian pengadaan barang dan jasa dengan metode *e-procurement*. **Wewenang:** 1. Menetapkan Program kerja bidang Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko; 2. Menetapkan metode kerja secara efektif dan efisien sesuai pada bidang kerjanya.
	b. Treasury and Financial Planning Treasury and Financial Planning is responsible for managing corporate finance, cash management, and corporate administration, revenue management, increasing the Company's value (stock price and liquidity) in collaboration with the IR, fostering relationships with financial industry players and other related parties, developing digital asset management and valuation, and managing the Company's tax obligations, including tax planning, payment, and reporting. c. Risk Management ▪ Measures risks by calculating their impact and the likelihood of risk occurrence, as well as mitigating risks; ▪ Conducting socialization and internalization of the implementation of a risk management culture. 2. HR & General a. HR Strategy and Development Functions to design an organizational structure according to the Company's needs, conducting workload analysis, planning and budgeting of HR needs in the short, medium, and long-term needs in terms of quantity and quality, conducting selection and recruitment, managing performance management, managing succession planning, managing HR administration and documentation, developing competency directories and job competency profiles, managing talent management, conducting development (training, mentoring, coaching, counseling) needs analysis, developing development programs, implementing HR development, conducting employee satisfaction and loyalty surveys in accordance with established targets, and building and implementing the Company's culture. b. Industrial and General Relations Functions include the management of industrial relations, Company remuneration (compensation and benefits), digital management of inventory and the Company's inventory database, transportation readiness, cleanliness, aesthetics, and orderliness, household needs, official and public vehicles, transportation equipment readiness, cleanliness, aesthetics, orderliness, security, and Company buildings, SPPD management and official travel needs (accommodation, transportation, meals), meeting management (invitations, room readiness and equipment), and digital archive management. 3. Procurement Functions include the planning, implementation, and documentation of goods and services procurement using the e-procurement method. **Authorities:** 1. Establish work programs for Finance, HR, and Risk Management; 2. Establish effective and efficient work methods in accordance with the respective areas of responsibility.



PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DIREKSI YANG BARU

IPCM menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru menjabat untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh mengenai perusahaan. Program ini mencakup pengenalan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi, kegiatan usaha, serta kebijakan dan praktik tata kelola yang berlaku. Ketentuan pelaksanaan program orientasi tersebut mengacu pada *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan pada 4 Oktober 2021.

Sehubungan dengan perubahan keanggotaan Direksi di tahun 2025, IPCM menggelar program orientasi bagi anggota Direksi yang baru yang diadakan pada 23 Juni 2025 di Kantor Pusat PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Pelindo Tower Lantai 9, Jakarta.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

IPCM conducted an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors to ensure a comprehensive understanding of the Company. This program introduces the Company's vision, mission, values, organizational structure, business activities, and applicable governance policies and practices. The provisions for implementing the orientation program refer to the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.56/4/10/3/MS-21, which was ratified on October 4, 2021.

Regarding the change in Board membership in 2025, IPCM held an orientation program for new Board members on June 23, 2025 at the head Office of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Pelindo Tower 9th Floor, Jakarta.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Perusahaan menempatkan peningkatan kompetensi Direksi sebagai aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan menyelenggarakan berbagai program pelatihan guna memperkuat pemahaman terhadap bisnis inti serta regulasi yang berlaku. Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi Direksi diatur dalam *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.56/4/10/3/MS-21 yang disahkan pada 4 Oktober 2021.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Company prioritizes the competency development of its Board of Directors as an important aspect in supporting the optimal performance of its duties and responsibilities. In line with this, the Company organizes various training programs to strengthen their understanding of the core business and applicable regulations. Provisions regarding training and competency development for the Board of Directors are stipulated in the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK.56/4/10/3/MS-21, which was ratified on October 4, 2021.

Throughout 2025, the Board of Directors has participated in various competency development programs as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Jenis Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Training and Education Materials	**Tempat dan Tanggal** Date and Location	**Penyelenggara** Organizer
Shanti Puruhita (Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director concurrently serving as Director of Commercial and Business Development)	Pelatihan Training	ESG *Capacity Building*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	Universitas Airlangga & JAI
	Pelatihan Training	*Corporate Law for Executive*: Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive: Legal Aspect in Corporate Management of SOEs	Jakarta, 15 Mei - 16 Mei 2025 Jakarta, May 15 - 16, 2025	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
	Pelatihan Training	GRC *Summit - Resilience to Sustainability: Leading through* GRC *in the Post-Digital Era*	Yogyakarta, 21 - 22 Agustus 2025 Yogyakarta August 21 - 22, 2025	CRMS Indonesia
	Pelatihan Training	*Risk* & *Governance Summit* (RGS) 2025	*Online*, 19 Agustus 2025 Online, August 19, 2025	CRMS Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat dan Tanggal Date and Location	Penyelenggara Organizer
Arief Hermawan (Direksi Armada dan Operasi) (Director of Fleet and Operations)	Pelatihan Training	ESG *Capacity Building*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	Universitas Airlangga & JAI
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direksi Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Human Resources, and Risk Management)	Pelatihan Training	ESG *Capacity Building*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	Universitas Airlangga & JAI
	Workshop	*Workshop* Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (ICOFR) Workshop of Internal Control on Financial Reporting (ICOFR)	Jakarta, 14 - 16 Mei 2025 Jakarta, May 14 -16, 2025	JAI
	Pelatihan Training	*Sustainability - Building Resilience through Leadership* (CPA Australia)	*Online*, 1 *Day Course*	CPA Australia
	Pelatihan Training	*AI Ethics for Modern Professionals* (CPA Australia)	*Online*, 1 *Day Course*	CPA Australia
	Pelatihan Training	*Mentoring Program to Become* ACC (*Associate Certified Coach*) dari ICF	*Online*, periode 1 - 30 September 2025 Online, period of September 1 - 30, 2025	Internal Coaching Federation (ICF)
	Pelatihan Training	*Virtual* CPA *Congress* (Online)	*Online*, 17 Oktober 2025 Online, October 17, 2025	CPA Australia
	Pelatihan Training	*Re-Certified Organisational Development Practitioner* (CODP)	*Online*, 5 November 2025 Online, November 5, 2025	PPM Manajemen
	Pelatihan Training	*Indonesian Accountants: Resilient, Sustainable, and Future-Ready Beyond Numbers, Building the Golden Future" and* IFAC *Connect*	Jakarta, 3 - 4 Desember 2025 Jakarta, December 3 - 4, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
	Pelatihan Training	PEP *Effective Public Speaking* & *Presentation Skill*	*Online*, 4 Desember 2025 Online, December 4, 2025	Markplus Institute
	Pelatihan Training	*Risk* & *Governance Summit* (RGS) 2025	*Online*, 19 Agustus 2025 Online, August 19, 2025	CRMS Indonesia



PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan Rencana Kerja. Secara umum, pelaksanaannya meliputi:

1. Menyusun Laporan Tahunan 2024;
2. Menggelar rapat Direksi dan rapat kerja pada tahun 2025;
3. Menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025;
4. Menyusun RKAP termasuk strategi Perseroan dan RKM Perseroan Tahun 2025;
5. Menyusun Laporan Manajemen triwulanan dan tahunan termasuk pelaksanaan strategi Perusahaan tahun 2025;
6. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham selama tahun 2025;
7. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis, operasional dan support;
8. Memastikan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha;
9. Melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), selama tahun 2025 telah tersalur dana CSR Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan;
10. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perusahaan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perusahaan belum membentuk komite di bawah Direksi. Oleh karena itu, belum tersedia informasi mengenai penilaian kinerja komite tersebut.

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES REPORT IN 2025

Throughout 2025, the Board of Directors carried out its duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association and Work Plan. In general, the implementation included:

1. Prepared the 2024 Annual Report;
2. Conducted Board of Directors meetings and work meetings in 2025;
3. Attended joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025;
4. Prepared the 2025 RKAP, including the Company's strategy and RKM;
5. Prepared quarterly and annual Management Reports, including the implementation of the Company's strategies in 2025;
6. Organized the General Meeting of Shareholders during 2025;
7. Established cooperation with third parties in various fields, including business, operations, and support functions;
8. Ensured the implementation of Good Corporate Governance in all business activities;
9. Implemented CSR activities, with the Company's CSR funds being distributed in 2025 for social and environmental initiatives;
10. Carried out other duties related to the management of the Company.

ASSESSMENT OF COMMITTEE'S PERFORMANCE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Until the end of 2025, the Company has not established a committee under the Board of Directors. Hence, no information is available on the performance assessment of such a committee.

Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency Regarding Board of Commissioners and Directors

KEBIJAKAN SUKSESI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Board Manual PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 disahkan tanggal 4 Oktober 2021, Kebijakan suksesi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui proses nominasi dan seleksi yang terstruktur dan objektif, mencakup analisis kebutuhan organisasi, identifikasi kandidat terbaik, serta penerapan kriteria rekrutmen dan promosi yang ketat, guna memastikan kesinambungan kepemimpinan yang kompeten dan berkualitas di Perusahaan.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan saat ini belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan dan diselaraskan dengan kebijakan internal Perusahaan.

Meski demikian, dalam setiap proses pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan telah menerapkan berbagai pertimbangan yang komprehensif, antara lain usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman terhadap manajemen Perusahaan, serta keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan Perusahaan. Aspek ketersediaan waktu untuk menjalankan tugas juga menjadi perhatian, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pendekatan tersebut, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi IPCM secara keseluruhan telah mencerminkan keberagaman yang saling melengkapi, baik dari sisi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, integritas, dedikasi, pemahaman atas isu manajerial, maupun keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS SUCCESSION POLICY

Based on the Board Manual of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.56/4/10/3/MS-21, approved on October 4, 2021, the succession policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors is implemented through a structured and objective nomination and selection process, encompassing an analysis of organizational needs, the identification of the best candidates, and the application of strict recruitment and promotion criteria, to ensure the continuity of competent and high-quality leadership within the Company.

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Company has not yet established a specific policy regulating diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. This policy is still being drafted and aligned with the Company's internal policies.

However, the Company has applied comprehensive considerations in every process of appointing the Board of Commissioners and Board of Directors, including age, gender, educational background, experience, integrity, dedication, understanding of the Company's management, as well as expertise and knowledge relevant to the Company's needs. The aspect of availability to carry out duties is also taken into consideration, while still referring to the provisions of the applicable laws and regulations.

Through this process, the composition of IPCM's Board of Commissioners and Board of Directors as a whole reflects diversity that complements each other, whether in terms of age, gender, education level, work experience, integrity, dedication, understanding of managerial issues, or expertise relevant to the Company's needs.



Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia (per 31 Desember 2025) Age (as of December 31, 2025)	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
R. R. Dewi Ariyani (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Indonesia	▪ S2 Bidang Akuntansi di Universitas Indonesia (2004) ▪ S1 Akuntansi di Universitas Jenderal Sudirman (1993) ▪ Masters in Accounting at University of Indonesia (2004) ▪ Bachelor of Accounting at Jendral Sudirman University (1993)	▪ Analis Kinerja BUMN Badan Pengaturan BUMN (2021-Sekarang) ▪ Direktur Keuangan & SDM PT Reasuransi Indonesia Utama (2020–2021) ▪ Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT Rekayasa Industri (2018–2020) ▪ Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016–2017) ▪ Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT PANN Pembiayaan Maritim (2012–2017) ▪ Komisaris/Anggota Dewan Pengawas PT Indah Karya (Persero) (2007–2012) ▪ Sekretaris Dekom/Dewan Pengawas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (2002–2007) ▪ Staf Dekom/Dewas PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998–2002) ▪ SOE Performance Analyst, SOE Regulatory Agency (2021–Present) ▪ Director of Finance & HR PT Reinsurance Indonesia Main (2020-2021) ▪ Commissioner / Member Supervisory Board of PT Rekayasa Industri (2018-2020) ▪ Commissioner / Member Supervisory Board of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2016-2017) ▪ Commissioner / Member Supervisory Board of PT PANN Pembiayaan Maritime (2012-2017) ▪ Commissioner / Member Supervisory Board of PT Indah Karya (Persero) (2007-2012) ▪ Secretary of Dekom/Board Supervisor of PT Kawasan Bonded Nusantara (Persero) (2002-2007) ▪ Dekom/Dewas Staff PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) (1998-2002)	▪ Ilmu Akuntansi ▪ Manajemen SDM ▪ Accounting Science ▪ HR Management	56 tahun 56 years old	Perempuan Female

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia (per 31 Desember 2025) Age (as of December 31, 2025)	Jenis Kelamin Gender
F. Budi Prayitno (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia	▪ Master Degree spesialisasi Air Transport Management, Ecole National de l'Aviation Civile (ENAC), Toulouse-France (2003) ▪ Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Diponegoro di Semarang (1991) ▪ Master Degree specializing in Air Transport Management, Ecole National de l'Aviation Civile (ENAC), Toulouse-France (2003) ▪ Bachelor of International Law from Diponegoro University in Semarang (1991)	▪ Kepala Biro Hukum di Kementerian Perhubungan (2023-sekarang) ▪ Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan (2021-2022) ▪ Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum (2020-2021) ▪ Plt. Kepala Bandara Juwata Tarakan (2019) ▪ Kepala Bidang Kampen dan Yandar Bandara Juwata Tarakan (2019) ▪ Wakil Tetap RI untuk Kantor Kepentingan Indonesia pada ICAO (2018) ▪ Atase Perhubungan RI untuk Kanada-KBRI Ottawa (2018) ▪ Atase Perhubungan RI untuk USA-KBRI Washington DC (2015-2018) ▪ Kepala Bagian Kerja sama Luar Negeri Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2008-2015) ▪ Kepala Seksi Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Kementerian Perhubungan(2007) ▪ Head of the Legal Bureau at the Ministry of Transportation (2023-present) ▪ Director of Aviation Security at the Ministry of Transportation (2021-2022) ▪ Head of International Cooperation, Public Relations and General Affairs (2020-2021) ▪ Acting Head of Juwata Tarakan Airport (2019) ▪ Head of Operations and Maintenance at Juata Tarakan Airport (2019) ▪ Permanent Representative of Indonesia to the Indonesian Interests Office at ICAO (2018) ▪ Indonesian Transportation Attaché to Canada-Indonesian Embassy in Ottawa (2018) ▪ Indonesian Transportation Attaché to the USA-Indonesian Embassy in Washington DC (2015-2018) ▪ Head of Foreign Cooperation, Secretary General of the Ministry of Transportation (2008-2015 ▪ Head of Air Traffic Services, Ministry of Transportation (2007)	▪ Ilmu Hukum ▪ Manajemen Transportasi Udara ▪ Law Science ▪ Air Transportation Management	57 tahun 57 years old	Laki-laki Male



Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia (per 31 Desember 2025) Age (as of December 31, 2025)	Jenis Kelamin Gender
Doni Istyanto Hari Mahdi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indonesia	S1 Teknik dan Manajemen Industri, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) (2000) Bachelor of Science in Industrial Engineering and Management, Adhi Tama Institute of Technology Surabaya (ITATS) (2000)	▪ Direktur Keuangan PT Tirta Kahyangan Nirankara (2024 – Sekarang) ▪ Senior Partner PT Hutama Mandiri Karya (2020 – 2024) ▪ Senior Partner ADN Consult Surabaya (2004 – 2019) ▪ Manajer Risiko PT Buana Proteksi Prima (2000 – 2002) ▪ Chief Financial Officer, PT Tirta Kahyangan Nirankara (2024 – Present) ▪ Senior Partner, PT Hutama Mandiri Karya (2020 – 2024) ▪ Senior Partner, ADN Consult Surabaya (2004 – 2019) ▪ Risk Manager, PT Buana Proteksi Prima (2000 – 2002)	▪ Ilmu Manajemen Industri ▪ Ilmu Akuntansi ▪ Manajemen SDM/Human Capital ▪ Bisnis/Niaga/ Pemasaran ▪ Industrial Management ▪ Accounting ▪ Human Capital Management ▪ Business/ Trade/ Marketing	53 tahun 53 years old	Laki-laki Male
Mitchell Julius Tupamahu (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Indonesia	S1 Hukum, Universitas Pancasila (1993) Bachelor of Law, Pancasila University (1993)	▪ Tenaga Ahli DPR (2015 – 2024) ▪ Humas and Personal Manager di PT Nyonya Meneer (2001 – 2025) ▪ Legal Plant Property Acquisition di PT Excelcomindo Pratama (1994 – 1999) ▪ Experts at the House of Representatives (2015 – 2024) ▪ Public Relations and Personal Manager at PT Nyonya Meneer (2001 – 2025) ▪ Legal Plant Property Acquisition at PT Excelcomindo Pratama (1994 – 1999)	▪ Legal & Compliance ▪ Manajemen SDM/ Human Capital ▪ Bisnis/Niaga/ Pemasaran ▪ Legal & Compliance ▪ Human Capital Management ▪ Business/ Trade/ Marketing	63 tahun 63 years old	Laki-laki Male

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia (per 31 Desember 2025) Age (as of December 31, 2025)	Jenis Kelamin Gender
Direksi Board of Directors						
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director)	Indonesia	▪ S2 - Universitas Jayabaya - Jurusan Kenotariatan (2025) ▪ S2 - Kuhne Logistic University - Jurusan Logistic (2024) ▪ Master - Jayabaya University - Notary (2025) ▪ Masters - Kuhne Logistic University, Hamburg Germany - Major in Logistics (2014) ▪ S1 - Airlangga University - Law, (1999)	▪ Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022–Sekarang) ▪ Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020–2022) ▪ EVP Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2017–2020) ▪ VP Hubungan Lembaga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2016–2017) ▪ Direktur Komersial PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. (2015–2016) ▪ Senior Manager Layanan SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2012–2015) ▪ President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2022-Present) ▪ Director of Commercial and Business Development of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (2020-2022) ▪ EVP Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2017-2020) ▪ VP of Institutional Relations PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2016-2017) ▪ Commercial Director of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. (2015-2016) ▪ Senior Manager of Services HR and General Services PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). (2012-2015)	▪ Ilmu Hukum ▪ Ilmu Bidang Logistik ▪ Bisnis/Niaga/ Pemasaran ▪ Legal ▪ Logistic ▪ Business/ Trade/ Marketing	48 tahun 48 years old	Perempuan Female
Arief Hermawan (Direksi Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operations)	Indonesia	▪ S1 – Akademi Ilmu Pelayaran, (1994) ▪ S1 - Hukum, Universitas Al Washliyah (2001) ▪ Bachelor's Degree – Akademi Ilmu Pelayaran, (1994) ▪ S1 - Hukum, Universitas Al Washliyah (2001).	▪ Group Head Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2025) ▪ SVP Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021) ▪ SVP Pemasaran PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2020) ▪ Group Head of Ship Services, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2025) ▪ SVP of Business Planning and Development, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021) ▪ SVP of Marketing, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2019-2020)	▪ Ahli Nautika ▪ Manajemen Transportasi Laut ▪ Nautica ▪ Sea Transportation Management	55 tahun 55 years old	Laki-laki Male



Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Professional Experience	Keahlian Expertise	Usia (per 31 Desember 2025) Age (as of December 31, 2025)	Jenis Kelamin Gender
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direksi Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Human Resources, and Risk Management)	Indonesia	▪ Master of Commerce dari University of Queensland, Australia (2006) ▪ Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga (1997) ▪ Master of Commerce from University of Queensland, Australia (2006) ▪ Bachelor of Economics in Accounting from Universitas Airlangga (1997)	▪ Group Head Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 1 Oktober 2021 s.d 11 Juni 2024. ▪ SVP Strategi SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 15 Juni 2021 s.d 30 September 2021 ▪ Direktur Keuangan dan SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020–2021) ▪ Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019–2019) ▪ Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan (2015-2019) ▪ Senior Manager Pengelolaan SDM PT Pelabuhan Indonesia II (2015-2015) ▪ Senior Manager Pemetaan SDM & Manajemen Karir PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ▪ Group Head of Human Resources Management at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) October 1, 2021 to June 11, 2024. ▪ SVP of Human Resources Strategy at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) June 15, 2021 to September 30, 2021 ▪ Director of Finance and HR PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2020-2021) ▪ President Director of PT Energi Pelabuhan Indonesia (2019-2019) ▪ President Director of PT Rumah Sakit Pelabuhan (2015-2019) ▪ Senior Manager of HR Management PT Pelabuhan Indonesia II (2015-2015) ▪ Senior Manager of HR Mapping & Career Management PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	▪ Manajemen Akuntansi ▪ Keuangan	54 tahun 54 years old	Perempuan Female

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian tersebut mencakup hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Tugas Pengawasan, tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan. Evaluasi dilakukan melalui penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dengan mekanisme self-assessment atau metode lain yang ditetapkan melalui rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris diukur dari ketercapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah disusun pada awal tahun yang mencakup aspek Perencanaan, Pengawasan dan Nasihat, Pelaporan, dan Dinamika Usaha.

Hasil Penilaian KPI Dewan Komisaris

KPI Dewan Komisaris Tahun 2025 (Kolegial dan Individual)

Di tahun 2025, evaluasi kinerja Dewan Komisaris mencatat capaian skor sebesar 104,3 yang diperoleh berdasarkan penilaian terhadap beberapa aspek berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ASSESSMENT

Board of Commissioners Assessment

The performance of the Board of Commissioners is evaluated annually as part of the assessment of their duties and responsibilities. This assessment covers the results of supervision as outlined in the Supervision Report, attendance at Board of Commissioners meetings, and compliance with laws and regulations and Company policies. Assessment is carried out through the preparation of Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Commissioners using a self-assessment mechanism or other methods determined by the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Performance Evaluation Criteria

The performance assessment of the Board of Commissioners is measured by the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) that have been prepared at the beginning of the year which cover aspects of Planning, Supervision and Advice, Reporting, and Business Dynamics.

KPI Assessment Results of the Board of Commissioners

KPIs for the Board of Commissioners in 2025 (Collegial and Individual)

In 2025, the Board of Commissioners' performance evaluation recorded a score of 104.3 which was obtained based on an assessment of the following aspects:

No.	Aspek dan Parameter Aspect and Parameter	Periode Period	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Weight	Rencana *Output* Output Plan	Realisasi *Output* Output Realization	Nilai Value	Pencapaian Achievement
I	**Aspek Perencanaan** Planning Aspect							
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris tahun 2026 Preparing the 2026 Work Plan, Budget, and KPIs for the Board of Commissioners	Tahunan Yearly	Dokumen Document	10	1	1	10	100%
Sub Total I				**10**			**10**	
II	**Aspek Pengawasan dan Nasihat** Supervising and Advising Aspects							
2	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap : Provide feedback/ recommendations to Shareholders regarding:							
a	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Company Workplan and Budget	Tahunan Yearly	Surat/Risalah Letter/Minutes	5	1	1	5	100%
b	Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan Yearly	Surat/Risalah Letter/Minutes	5	1	1	5	100%
c	Analisis Kinerja Triwulan Quarterly Performance Analysis	Triwulan Quarterly	Surat/Risalah Letter/Minutes	5	3	3	5,0	100%
d	Rencana Bisnis Perusahaan Company Business Plan	Setahun A Year	Surat/Risalah Letter/Minutes	5	12	12	5	100%



No.	Aspek dan Parameter Aspect and Parameter	Periode Period	Satuan *Output* Output Unit	Bobot Weight	Rencana *Output* Output Plan	Realisasi *Output* Output Realization	Nilai Value	Pencapaian Achievement
3	Memberikan persetujuan dan nasihat kepada Direksi Approval and advice to the Board of Directors	Setahun A Year	Surat/Risalah Letter/Minutes	10	5	11	11	110%
4	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting							
a	Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Kali Times	8	12	13	8,7	108%
b	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors	Bulanan Monthly	Kali Times	8	12	13	9	108%
c	Penyelesaian Risalah Rapat Meeting Minutes	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	6	24	26	7	108%
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Work Visit of the Board of Commissioners	Setahun Yearly	Kunjungan Visit	8	4	4	8	100%
Sub Total II				**60**			**62,8**	
6	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners	Tahunan Yearly	Laporan Report	10	1	1	10	100%
Sub Total III				**10**			**10**	
IV	**Aspek Dinamis** Dynamic Aspects							
7	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham External Proposed External Auditor to Shareholders	Tahunan Yearly	Surat Letter	5	1	1	5	100%
8	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, *workshop* dan lain-lain External Competence Enhancement through seminars, workshops, and other activities	Tahunan Yearly	Kali Times	10	2	9	11	110%
9	Hasil *Assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS)* ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment Results (ACGS)*	Tahunan Yearly	Kategori Category	5	90	118,39	6	110%
Sub Total IV				**20**			**22**	
Grand Total				**100**			**104,3**	

*) Realisasi *Output* masih menggunakan hasil *Assessment* tahun 2024
*) Output realization still using the 2024 Assessment

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara kolegial melalui *self assessment* dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan, dimana hasil kinerja Dewan Komisaris dipaparkan melalui laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. RUPS selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan atas pengurusan dan Pengawasan selama Tahun Buku tersebut.

Party Conducting the Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out collegially through self-assessment and reported at the Annual GMS, where the results of the Board of Commissioners' performance are presented through the Board of Commissioners' task implementation report to the Shareholders. The GMS further grants full release and discharge of responsibility to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the management and supervision during the Financial Year.

PENILAIAN DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Kinerja Direksi dievaluasi secara berkala guna memastikan keselarasan pelaksanaan tugas dengan visi dan tujuan Perusahaan. Penilaian tersebut didasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI) yang tercantum dalam Kontrak Manajemen dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Prosedur Penilaian Direksi.

Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian target RKAP dan Kontrak Manajemen, tetapi juga memperhatikan tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perusahaan.

Selain penilaian kinerja kolektif, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja individu anggota Direksi. Penilaian ini diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (jika ada) atau Dewan Komisaris, untuk selanjutnya ditetapkan melalui RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
2. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.
3. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan.
4. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
6. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
7. Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan KPI Perspektif keuangan dan pasar:

1. Fokus pelanggan
2. Efektivitas produk dan proses
3. Fokus tenaga kerja
4. Kepemimpinan, tata kelola dan CSR

Untuk kriteria penilaian dengan Skala sebagai berikut:
1. 0% - 50% = Kurang
2. 51% - 70% = Cukup
3. 71% - 90% = Baik
4. ≥91% = Sangat Baik

Hasil Penilaian KPI Direksi

Berikut disampaikan capaian KPI tahun 2025 yang ditetapkan dan dievaluasi secara kolegial, dengan rincian sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS ASSESSMENT

Assessment Procedure

The performance of the Board of Directors is evaluated periodically to ensure that the implementation of tasks is consistent with the Company's vision and objectives. The assessment is based on Key Performance Indicators (KPIs) listed in the Management Contract and approved by the Board of Commissioners in accordance with the Board of Directors Assessment Procedure.

The evaluation not only focuses on the achievement of RKAP and Management Contract targets, but also takes into account the level of attendance at Board of Directors meetings and compliance with laws and regulations, and internal Company policies.

In addition to collective performance assessments, evaluations are also conducted on the individual performance of Board of Directors members. These assessments are proposed by the Nomination and Remuneration Committee (if any) or the Board of Commissioners, to be determined by the GMS with the following provisions:

1. Setting KPIs at the beginning of the year and evaluating their achievement.
2. Attendance levels at internal meetings and meetings with the Board of Commissioners.
3. Contribution to the Company's business activities.
4. Participation in specific assignments.
5. Commitment to advancing the interests of the Company.
6. Compliance with applicable laws, regulations, and Company policies.
7. Achievement of the Company's targets outlined in the RKAP and Management Contract.

Directors' Performance Evaluation Criteria

The criteria for evaluating the performance of the Board of Directors based on Key Performance Indicators (KPIs) from a financial and market perspective are as follows:

1. Customer Focus
2. Product and process effectiveness
3. Workforce focus
4. Leadership, governance, and CSR

The assessment criteria utilize the following scale:
1. 0% - 50% = Lacking
2. 51% - 70% = Enough
3. 71% - 90% = Good
4. ≥91% = Excellent

KPI Assessment for Directors

The following are the 2025 KPI targets that have been set and evaluated collegially, with the following details:



Tabel KPI Direksi Tahun 2025
Board of Directors KPI for 2025

No.	Nama KPI Name	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Periode Pengukuran Measurement Period
1.	EBITDA	Rupiah	*Maximize*	Triwulanan Quarterly
2	Pendapatan Usaha Operating Revenues	Rupiah	*Maximize*	Triwulanan Quarterly
3	BOPO	%	*Minimize*	Triwulanan Quarterly
4	Produksi Pemanduan Pilotage Production	Gerakan Movement	*Maximize*	Triwulanan Quarterly
5	*Waiting for Pilot*	Jam Hour	*Minimize*	Triwulanan Quarterly
6	*Availability* Alat Apung Availability of Floating Device	%	*Maximize*	Triwulanan Quarterly
7	Pemenuhan Sarpras Fulfillment of Facilities	%	*Maximize*	Triwulanan Quarterly
8	Implementasi Program K3 OHS Program	%	*Maximize*	Triwulanan Quarterly
9	Implementasi Kegiatan TJSL CSR Activities	%	*Maximize*	Tahunan Yearly
10	Tingkat *Compliance* Perusahaan Compliance Level of the Company	%	*Maximize*	Semester Every Semester
11	Penyelesaian Pemurnian Bisnis Business Refinement Settlement	%	*Maximize*	Semester Every Semester
12	Pencapaian *Value Creation* dari Inisiatif Strategis *Additional Marine Services* Value Creation Achievement from Additional Marine Services Strategic Initiatives	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	*Maximize*	Triwulanan Quarterly
13	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan *Marine* Standardization and Digitalization of Marine Services	%	*Maximize*	Triwulanan Quarterly
14	Penyerapan Investasi Investment Absorption	%	*Maximize*	Semester Every Semester
15	Pengelolaan Talent Pelindo Pelindo Talent Management	%	*Maximize*	Semester Every Semester
Total Bobot KPI Tahunan Total Annual KPI Weight				
Total Bobot KPI Periodik Total Periodic KPI Weight				
Total Skor Periodik Total Periodic Score				
Skor KPI Tertimbang Weighted KPI Score				

Bobot Weight	Target Target	Realisasi TW 4 Q4 Realization	Capaian KPI (%) KPI Achievement (%)	Capaian Akhir (%) Final Achievement (%)	Skor Periodik (%) Periodic Score (%)
7,00	324.466	426.587	111,15	111,15	7,79
6,00	1.372.099	1.474.808	107,26	107,26	6,44
7,00	85,84	83,16	99,11	99,11	6,95
9,00	1140	2029	116,32	110,00	9,90
11,00	0,5	0,02	250,00	110,00	12,10
9,00	90	94,17	104,63	104,63	9,42
5,00	75	99,77	113,96	110,00	5,50
6,00	100	100,00	100,00	100,00	6,00
7,00	100	100,00	100,00	100,00	7,00
5,00	100	100,00	100,00	100,00	5,00
5,00	100	100,00	100,00	100,00	5,00
5,00	14,35	109,62	109,62	109,62	5,48
4,00	100	123,53	1,00	1,00	5,50
8,00	80	86,63	108,29	108,29	8,66
6,00	100	107,50	107,50	107,50	5,38
100,00					
100,00					
					106,53
					106,53



Di tahun 2025, pencapaian KPI Perusahaan tercatat sebesar 106,53 dan berada pada kategori Sangat Baik.

Penilaian tersebut menjadi dasar pengukuran KPI individual Direksi, yang diturunkan dari KPI Korporat dengan pembobotan proporsional sesuai fokus dan tanggung jawab masing-masing direktorat.

In 2025, the Company's KPI achievement was recorded at 106.53 and was in the Very good category.

This assessment became the basis for measuring the individual KPIs of the Board of Directors, which were derived from the Corporate KPIs with proportional weighting according to the focus and responsibilities of each directorate.

Tabel *Key Performance Indicator* Individual Direksi Tahun 2025
Board of Directors Individual Key Performance Indicator for 2025

KPI Direktur Utama
President Director KPI

No.	Nama KPI Name	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Periode Pengukuran Measurement Period	Bobot Weight	Target Target	Realisasi TW 4 Q4 Realization	Capaian KPI (%) KPI Achievement (%)	Capaian Akhir (%) Final Achievement (%)	Skor Periodik (%) Periodic Score (%)
1	EBITDA	Rupiah (Juta) Rupiah (Million)	Triwulan Quarterly	*Maximize*	8	324.466	426.587	131,78	110,00	8,80
2	Pendapatan Usaha Operating Revenues	Rupiah (Juta) Rupiah (Million)	Triwulan Quarterly	*Maximize*	9	1.372.099	1.474.808	107,49	107,49	9,67
3	BOPO	%	Triwulan Quarterly	*Minimize*	9	85,84	83,16	103,22	103,22	9,29
4	Penyelesaian Pemurnian Bisnis Settlement of Business Refinement	%	Semester Every Semester	*Maximize*	6	100	100	100,00	100,00	6,00
5	Pengelolaan *Talent* Pelindo Pelindo Talent Management	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	8	100	107,6	107,60	107,60	8,61
6	Tingkat *Compliance* Perusahaan The Company's Compliance Level	%	Semester Every Semester	*Maximize*	11	80	140,5	175,63	110,00	12,10
7	Penyerapan Investasi Investment Absorption	%	Semester Every Semester	*Maximize*	10	80	86,63	108,29	108,29	10,83
8	Implementasi Program K3 OHS Program	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	100	100	100,00	100,00	10,00
9	Implementasi Kegiatan TJSL CSR Activities	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	9	100	100	100,00	100,00	9,00
10	Pencapaian *Value Creation* dari Inisiatif Strategis *Additional Marine Service* Value Creation Achievement from Additional Marine Services Strategic Initiatives	Miliar Billion	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	13	14,25	109,62	109,62	10,96
11	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan *Marine* Standardization and Digitalization of Marine Services	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	100	1,235,294,118	123,53	110,00	11,00
Total					**100**					**106,26**

KPI Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
KPI of Director of Commercial and Business Development

No.	Nama KPI Name	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Periode Pengukuran Measurement Period	Bobot Weight	Target Target	Realisasi TW 4 Q4 Realization	Capaian KPI (%) KPI Achievement (%)	Capaian Akhir (%) Final Achievement (%)	Skor Periodik (%) Periodic Score (%)
1	EBITDA	Rupiah (Juta) Rupiah (Million)	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	324.466	426.587	131,78	110,00	11,00
2	Pendapatan Usaha Operating Revenues	Rupiah (Juta) Rupiah (Million)	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	1.372.099	1.474.808	107,49	107,49	10,75
3	BOPO	%	Triwulan Quarterly	*Minimize*	9	86	83	103,22	103,22	9,29
4	Penyelesaian Pemurnian Bisnis Settlement of Business Refinement	%	Semester Every Semester	*Maximize*	6	100	100	100,00	100,00	6,00
5	Pengelolaan *Talent* Pelindo Pelindo Talent Management	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	5	100	108	107,60	107,60	5,38
6	Tingkat *Compliance* Perusahaan The Company's Compliance Level	%	Semester Every Semester	*Maximize*	11	80	140,5	175,63	110,00	12,10
7	Produksi Pemanduan Pilotage Production	Gerakan Movement	Triwulan Quarterly	*Maximize*	11	16.616	20294	122,14	110,00	12,10
8	*Availability* Alat Apung Floating Equipment Availability	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	7	90	94,17	104,63	104,63	7,32
9	Implementasi Program K3 OHS Program	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	9	100	100	100,00	100,00	9,00
10	Pencapaian *Value Creation* dari Inisiatif Strategis *Additional Marine Service* Value Creation from Additional Marine Service Strategic Initiatives	Miliar Billion	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	13	14,25	109,62	109,62	10,96
11	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan *Marine* Standardization and Digitalization of Marine Services	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	12	100	1.235.294.118	123,53	110,00	13,20
Total					**100**					**107,10**



KPI Direktur Armada dan Operasi
KPI of Director of Fleet and Operation

No.	Nama KPI Name	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Periode Pengukuran Measurement Period	Bobot Weight	Target Target	Realisasi TW 4 Q4 Realization	Capaian KPI (%) KPI Achievement (%)	Capaian Akhir (%) Final Achievement (%)	Skor Periodik (%) Periodic Score (%)
1	EBITDA	Rupiah (Juta) Rupiah (Million)	Triwulan Quarterly	*Maximize*	6	324.466	426.587	119,15	110	6,60
2	Pendapatan Usaha Operating Revenues	Rupiah (Juta) Rupiah (Million)	Triwulan Quarterly	*Maximize*	7	1.372.099	1.471.743	107,26	107,26	7,51
3	BOPO	%	Triwulan Quarterly	*Minimize*	10	86	85	101,35	101,35	10,13
4	Penyelesaian Pemurnian Bisnis Settlement of Business Refinement	%	Semester Every Semester	*Maximize*	7	100	100	100,00	100,00	7,00
5	Pengelolaan *Talent* Pelindo Pelindo Talent Management	%	Triwulan Every Semester	*Maximize*	5	100	108	107,6	107,60	5,38
6	Penyerapan Investasi Investment Absorption	%	Semester Every Semester	*Maximize*	10	80	87	108,29	108,29	10,83
7	Produksi Pemanduan Pilotage Production	Gerakan Movement	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	16.616	20.294	122,14	110,00	11,00
8	*Waiting Time For Pilot*	Jam Hour	Triwulan Quarterly	*Minimize*	10	1	0	2.500,00	110,00	11,00
9	*Availability* Alat Apung Floating Equipment Availability	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	90	94	104,63	104,63	10,46
10	Pemenuhan Sarpras Fulfillment of Facilities	%	Tahunan Yearly	*Maximize*	10	70	100	142,46	110,00	11,00
11	Implementasi Program K3 OHS Program	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	100	100	100,00	100,00	10,00
12	Pencapaian *Value Creation* dari Inisiatif Strategis *Additional Marine Services* Value Creation Achievement from Additional Marine Services Strategic Initiatives	Miliar Billion	Triwulan Quarterly	*Maximize*	5	13	14	109,62	109,62	5,48
Total					**100**					**106,40**

KPI Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko
KPI of Director of Finance, HR, and Risk Management

No.	Nama KPI Name	Satuan Unit	Polaritas Polarity	Periode Pengukuran Measurement Period	Bobot Weight	Target Target	Realisasi TW 4 Q4 Realization	Capaian KPI (%) KPI Achievement (%)	Capaian Akhir (%) Final Achievement (%)	Skor Periodik (%) Periodic Score (%)
1	EBITDA	Rupiah (Juta) Rupiah (Million)	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	324.466	324.466	119,15	110,00	11,00
2	Pendapatan Usaha Operating Revenues	Rupiah (Juta) Rupiah (Million)	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	1.372.099	1.471.743	107,26	107,26	10,73
3	BOPO	%	Triwulan Quarterly	*Minimize*	10	86	85	101,35	101,35	10,13
4	Penyelesaian Pemurnian Bisnis Settlement of Business Refinement	%	Semester Every Semester	*Maximize*	6	100	100	100,00	100,00	6,00
5	Pengelolaan *Talent* Pelindo Pelindo Talent Management	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	100	108	107,6	107,6	10,76
6	Tingkat *Compliance* Perusahaan The Company's Compliance Level	%	Semester Every Semester	*Maximize*	10	80	141	175,63	110,00	11,00
7	Penyerapan Investasi Investment Absorption	%	Semester Every Semester	*Maximize*	10	80	87	108,29	108,29	10,83
8	Pemenuhan Sarpras Fulfillment of Facilities	%	Tahunan Yearly	*Maximize*	6	70	100	142,46	110,00	6,60
9	Implementasi Program K3 OHS Program	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	10	100	100	100,00	100,00	10,00
10	*Availability* Alat Apung Floating Equipment Availability	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	6	90	94	104,63	104,63	6,28
11	Pencapaian *Value Creation* dari Inisiatif Strategis *Additional Marine Service* Value Creation Achievements from Additional Marine Service Strategic Initiatives	Miliar Billion	Triwulan Quarterly	*Maximize*	6	13	14	109,62	109,62	6,58
12	Standarisasi dan Digitalisasi Layanan *Marine* Standardization and Digitalization of Marine Services	%	Triwulan Quarterly	*Maximize*	6	100	124	123,53	110,00	6,60
Total					**100**					**106,50**



Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian atas kinerja Direksi di tahun 2025 dilakukan oleh Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas memastikan penerapan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berjalan secara efektif. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 113.
2. Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/4/10/2/HTU/DUT/JAI-24 tentang Penghasilan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tahun 2024.
3. Anggaran Dasar Perusahaan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Direksi Perusahaan dilakukan melalui mekanisme RUPS. Dalam RUPS Tahunan, pemegang saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran serta pembagian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Utama.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator penetapan remunerasi Direksi yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham, ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau kontrak Manajemen Direksi sebagai salah satu ukuran untuk menilai kinerja Direksi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dengan mengacu pada ketentuan regulator serta kebijakan internal Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham, remunerasi Dewan Komisaris disusun dalam beberapa komponen, meliputi:

Assessor

In 2025, the Board of Directors was assessed by the Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS REMUNERATION POLICY

The Company has established a Nomination and Remuneration Committee tasked with ensuring the effective implementation of remuneration policies for the Board of Commissioners and Board of Directors. Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined with reference to:

1. Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 113.
2. Board of Directors' Resolution of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.01/4/10/2/HTU/DUT/JAI-24 regarding the Compensation and Benefits of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk for the Year 2024.
3. Company Articles of Association.

Remuneration Procedure for the Board of Commissioners and Directors

The remuneration for the Company's Directors is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS). During the Annual GMS, shareholders conferred authority upon the Board of Commissioners to establish the amount and distribution of bonuses for members of the Board of Directors and Commissioners for the 2024 financial year, following consultation with the Major Shareholders.

Remuneration Indicator for the Board of Directors

The indicators for determining Directors' remuneration, as determined by shareholders, take into account the achievements of Key Performance Indicators (KPIs) or the Directors' Management Contract as one of the measures for assessing the performance of Directors.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

In accordance with regulatory requirements and the Company's internal policies that have been approved by the Shareholders, the remuneration of the Board of Commissioners is composed of several components, including:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025
Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Directors in 2025

No.	Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration	Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration
1	Honorarium	Gaji Salary
2	Tunjangan terdiri dari Tunjangan Transportasi, Tunjangan Hari Raya, Purna Jabatan Allowance consist of Transportation Allowance, Holiday Allowance, Retirement Allowance	Tunjangan terdiri dari Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Jabatan, Tunjangan Perumahan Allowance consist of Holiday Allowance, Retirement Allowance, Housing Allowance
3	Fasilitas terdiri dari Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Bantuan Hukum Facilities consist of Healthcare Facilities, Legal Aid Facilities	Fasilitas terdiri dari Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Kendaraan, Fasilitas Bantuan Hukum Facilities consist of Healthcare Facilities, Vehicle Facilities, Legal Aid Facilities

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025
Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Directors in 2025

No.	Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration	Remunerasi Direksi Board of Directors Remuneration
4	Tantiem Tantiem (Bonus)	Tantiem Tantiem (Bonus)

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut disampaikan rincian besaran remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2025:

Total Amount of the Board of Commissioners and Directors

The following are details of the remuneration received by the Board of Commissioners and Directors in 2025:

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024-2025
Board of Commissioners Remuneration Table for 2024-2025

Remunerasi Remuneration	2025		2024	
	Jumlah Orang Number of Person	Nominal (Rp)	Jumlah Orang Number of Person	Nominal (Rp)
Honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem Honorarium, allowances, facilities, and tantiem (bonus)	**4 Orang** 4 Persons	**2.098.666.767***	4 Orang 4 Persons	2.797.260.203

Tabel Remunerasi Direksi Tahun 2024-2025
Total Remuneration of the Board of Directors 2024-2025

Remunerasi Remuneration	2025		2024	
	Jumlah Orang Number of Person	Nominal (Rp)	Jumlah Orang Number of Person	Nominal (Rp)
Gaji, tunjangan, fasilitas, dan tantiem Salary, allowances, facilities, and tantiem (bonus)	3 Orang 3 Persons	**3.422.080.239***	3 Orang 3 Persons	5.387.289.047

*) Belum termasuk tantiem tahun buku 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025.
*) Excluding the 2024 fiscal year bonus to be paid in 2025.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Board Manual PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 disahkan tanggal 4 Oktober 2021, Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Seluruh keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak.

Di tahun 2025, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal sebanyak 13 (tiga belas) kali dan Rapat Gabungan sebanyak 13 (tiga belas) kali. Berikut disampaikan rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan agenda dalam rapat-rapat tersebut.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS MEETING

Board of Commissioners Meeting

According to the PT Jasa Armada Indonesia Tbk Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021, the Board of Commissioners convenes in a meeting at least once every 2 (two) months. During these meetings, the Board of Commissioners may invite the Board of Directors. Decisions in these meetings are made through deliberation to achieve consensus. However, if consensus cannot be reached through deliberation, decisions are made by majority vote.

In 2025, the Board of Commissioners held 13 (thirteen) Internal Meetings and 13 (thirteen) Joint Meetings. The following is a summary of the attendance rate of the Board of Commissioners and the agenda of these meetings.



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak hadiran Reason for Absence
1.	24 Januari 2025 January 24, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Hal-hal Strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman ▪ Dadang Budiawan Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Doni Permana	-
2.	27 Februari 2025 February 27, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Hal-hal Strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman ▪ Dadang Budiawan Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Doni Permana	-
3.	19 Maret 2025 March 19, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Hal-hal Strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman ▪ Dadang Budiawan Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Doni Permana	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak hadiran Reason for Absence
4.	24 April 2025 April 24, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Hal-hal Strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-
5.	28 Mei 2025 May 28, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Hal-hal Strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-
6.	25 Juni 2025 June 25, 2025	▪ Perkenalan Dewan Komisaris; ▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Pembahasan Laporan Kinerja s.d. Bulan Mei 2025; ▪ Hal-hal strategis lainnya. ▪ The Board of Commissioners introduction; ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Performance Report Review as of May 2025; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-
7.	15 Juli 2025 July 15, 2025	Pembahasan Perubahan Susunan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris Discussion regarding Changes to the Composition of the Chair and Members of the Board of Commissioners Committee.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak hadiran Reason for Absence
8.	29 Juli 2025 July 29, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Pembahasan Laporan Kinerja s.d. Bulan Juni 2025; ▪ Hal-hal strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Performance Report Review as of June 2025; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-
9.	28 Agustus 2025 August 28, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Pembahasan Laporan Kinerja s.d. Bulan Juli 2025; ▪ Pembahasan RKAP Tahun 2026; ▪ Hal-hal strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Performance Report Review as of July 2025; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-
10.	24 September 2025 September 24, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Pembahasan Laporan Kinerja s.d. Bulan Agustus 2025; ▪ Hal-hal strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Performance Report Review as of August 2025; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-
11.	27 Oktober 2025 October 27, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Pembahasan Laporan Kinerja s.d. Bulan September 2025; ▪ Hal-hal strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Performance Report Review as of September 2025; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Hartian S. Widhanto ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak hadiran Reason for Absence
12.	26 November 2025 November 26, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Pembahasan Laporan Kinerja s.d. Bulan Oktober 2025; ▪ Hal-hal strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Performance Report Review as of October 2025; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-
13.	22 Desember 2025 December 22, 2025	▪ Tindak lanjut RAKOM sebelumnya; ▪ Pembahasan Laporan Kinerja s.d. Bulan November 2025; ▪ Hal-hal strategis lainnya. ▪ Follow-up to previous RAKOM; ▪ Performance Report Review as of November 2025; ▪ Other strategic matters.	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Komite Dewan Komisaris | Board of Commissioners Committee: ▪ Ryan Hegar S. ▪ Dyah Ayu A. S. ▪ Jaja Suparman Sekretariat Dewan Komisaris | Secretariat of the Board of Commissioners: ▪ Siti Hadijah ▪ Ivan Cahyadi K.	-

Tabel Rapat Gabungan Bersama Direksi
Joint Meeting with the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1.	24 Januari 2025 January 24, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d Desember 2024 ▪ *Update Internal Audit Charter* 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of December 2024 ▪ Internal Audit Charter Update 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Muhammad Iqbal
2.	27 Februari 2025 February 27, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja Januari 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of January 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Muhammad Iqbal
3.	19 Maret 2025 March 19, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d Februari 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of February 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Muhammad Iqbal



Tabel Rapat Gabungan Bersama Direksi
Joint Meeting with the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
4.	24 April 2025 April 24, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d Maret 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ *Update* rencana RUPST 18 Juni 2025 dan usulan besaran dividen final tahun buku 2024 ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of March 2025 ▪ Other strategic matters ▪ AGMS update plan on June 18, 2025, and the proposed final dividend amount for the 2024 fiscal year ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Muhammad Iqbal
5.	28 Mei 2025 May 28, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d April 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ *Update* rencana RUPST 18 Juni 2025 ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of April 2025 ▪ Other strategic matters ▪ AGMS update plan on June 18, 2025 ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ Zuhri Iryansyah ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ Bay M. Hasani ▪ F. Budi Prayitno Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Muhammad Iqbal
6.	25 Juni 2025 June 25, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d Mei 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of May 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Muhammad Iqbal
7.	29 Juli 2025 July 29, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d Juni 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of June 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Arief Hermawan
8.	28 Agustus 2025 August 28, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d Juli 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of July 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Arief Hermawan
9.	24 September 2025 September 24, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d Agustus 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of August 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Arief Hermawan

Tabel Rapat Gabungan Bersama Direksi
Joint Meeting with the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
10.	27 Oktober 2025 October 27, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d September 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of September 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Arief Hermawan
11.	26 November 2025 November 26, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d Oktober 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Pemindahan pencatatan saham IPCM ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of October 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization ▪ Transfer of IPCM share registration	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Arief Hermawan
12.	10 Desember 2025 December 10, 2025	Pembahasan Dividen Interim PT Jasa Armada Indonesia Tbk Interim Dividend Discussion of PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Arief Hermawan
13.	22 Desember 2025 December 22, 2025	▪ Tindak lanjut rakomdir sebelumnya ▪ Laporan Kinerja s.d November 2025 ▪ Agenda strategis lainnya ▪ Laporan kinerja saham dan penggunaan dana IPO ▪ Follow-up to previous rakomdir ▪ Performance Report as of November 2025 ▪ Other strategic matters ▪ Stock performance report and IPO fund utilization	Dewan Komisaris | Board of Commissioners: ▪ R. R. Dewi Ariyani ▪ F. Budi Prayitno ▪ Mitchell Julius T. ▪ Doni Istyanto Hari M. Direksi | Board of Directors: ▪ Shanti Puruhita ▪ Dessy Emastari P. ▪ Arief Hermawan

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners

Nama Name	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners Meeting			Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Meeting between the Board of Commissioners and Directors		
	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%
Zuhri Iryansyah (Komisaris Utama)* (President Commissioner)*	5	5	100%	5	5	100%
R. R. Dewi Ariyani (Komisaris Utama)* (President Commissioner)*	13	13	100%	13	13	100%
Bay Mokhamad Hasani (Komisaris Independen)*** (Independent Commissioner)***	5	5	100%	5	5	100%
F. Budi Prayitno (Komisaris)** (Commissioner)**	13	13	100%	13	13	100%
Doni Istyanto Hari Mahdi (Komisaris Independen)*** (Independent Commissioner)***	8	8	100%	8	8	100%



Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners

Nama Name	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners Meeting			Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Meeting between the Board of Commissioners and Directors		
	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%
Mitchell Julius Tupamahu (Komisaris Independen)**** (Independent Commissioner)****	8	8	100%	8	8	100%

*) Ibu R. R. Dewi Ariyani diangkat sebagai Komisaris Utama menggantikan Bapak Zuhri Iryansyah sejak tanggal 18 Juni 2025
**) Bapak F. Budi Prayitno diangkat sebagai Komisaris menggantikan Ibu R. R. Dewi Ariyani sejak tanggal 18 Juni 2025
***) Bapak Doni Istyanto Hari Mahdi diangkat sebagai Komisaris Independen menggantikan Bapak Bay Mokhamad Hasani sejak tanggal 18 Juni 2025
****) Bapak Mitchell Julius Tupamahu diangkat sebagai Komisaris Independen menggantikan Bapak F. Budi Prayitno sejak tanggal 18 Juni 2025
*) Mrs. R. R. Dewi Ariyani was appointed as President Commissioner, replacing Mr. Zuhri Iryansyah, effective June 18, 2025.
**) Mr. F. Budi Prayitno was appointed as Commissioner, replacing Mrs. R. R. Dewi Ariyani, effective June 18, 2025.
***) Mr. Doni Istyanto Hari Mahdi was appointed as Independent Commissioner, replacing Mr. Bay Mokhamad Hasani, effective June 18, 2025.
****) Mr. Mitchell Julius Tupamahu was appointed as Independent Commissioner, replacing Mr. F. Budi Prayitno, effective June 18, 2025.

RAPAT DIREKSI

Berdasarkan *Board Manual* PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.56/4/10/3/MS-21 disahkan tanggal 4 Oktober 2021, Direksi mengadakan secara berkala minimum satu kali dalam 1 (satu) bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

Di tahun 2025, Direksi mengadakan Rapat Internal sebanyak 12 (dua belas) kali dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali sebagaimana tercantum dalam pembahasan Rapat Dewan Komisaris. Berikut disampaikan rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dan agenda dalam rapat-rapat tersebut.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

According to the PT Jasa Armada Indonesia Board Manual Number: HK.56/4/10/3/MS-21, ratified on October 4, 2021, the Board of Directors convenes meetings periodically, at least once every month. Additionally, the Board of Directors is obligated to hold a meeting with the Board of Commissioners at least once every 4 (four) months. Decisions made at Board of Directors meetings must be based on deliberation to reach consensus. However, if consensus cannot be reached through deliberation, decisions are made by majority vote. In the event of a tie in the votes, the chairman of the Board of Directors meeting will make the final decision.

In 2025, the Board of Directors held 12 (twelve) internal meetings and 12 (twelve) joint meetings with the Board of Commissioners, as stated in the minutes of the Board of Commissioners' meetings. The following is a summary of the attendance rate of the Board of Directors and the agenda of these meetings.

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	20 Januari 2025 January 20, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d Desember 2024 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Agenda Strategis Lainnya: a. Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO; b. Laporan KPI, RKM dan Manajemen RIsiko. ▪ Performance Report up to December 2024, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Other Strategic Agendas: a. Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report; b. KPI, RKM, and Risk Management Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Muhammad Iqbal ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani
2	21 Februari 2025 February 21, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d Januari 2025 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Agenda Strategis Lainnya: a. Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO. ▪ Performance Report up to January 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Other Strategic Agendas: a. Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Muhammad Iqbal ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
3	13 Maret 2025 March 13, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d Februari 2025 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi, dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Agenda Strategis Lainnya: a. Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO. ▪ Performance Report up to February 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Other Strategic Agendas: a. Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Muhammad Iqbal ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani
4	17 April 2025 April 17, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d Maret 2025 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi, dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Agenda Strategis Lainnya: a. Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO; b. Laporan KPI, RKM dan Manajemen RIsiko. ▪ Performance Report up to March 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Other Strategic Agendas: a. Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report; b. KPI, RKM, and Risk Management Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Muhammad Iqbal ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani
5	19 Mei 2025 May 19, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d April 2024 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO. ▪ Performance Report up to April 2024, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Muhammad Iqbal ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani
6	23 Juni 2025 June 23, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d Mei 2024 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Agenda Strategis Lainnya : a. Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO. ▪ Performance Report up to May 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Other Strategic Agendas: a. Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Arief Hermawan ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani
7	14 Juli 2025 July 14, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d Juni 2025 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Agenda Strategis Lainnya : a. Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO; b. Laporan KPI, RKM dan Manajemen RIsiko. ▪ Performance Report up to June 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Other Strategic Agendas: a. Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report; b. KPI, RKM, and Risk Management Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Arief Hermawan ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani
8	25 Agustus 2025 August 25, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d Juli 2025 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO. ▪ Performance Report up to July 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Arief Hermawan ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani
9	18 September 2025 September 18, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d Agustus 2025 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO. ▪ Performance Report up to August 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Arief Hermawan ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani
10	21 Oktober 2025 October 21, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d September 2025 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Agenda Strategis Lainnya : a. Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO; b. Laporan KPI, RKM dan Manajemen RIsiko. ▪ Performance Report up to September 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Other Strategic Agendas: a. Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report; b. KPI, RKM, and Risk Management Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Arief Hermawan ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani
11	17 November 2025 November 17, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d Agustus 2025 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO. ▪ Performance Report up to August 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Arief Hermawan ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
12	15 Desember 2025 December 15, 2025	▪ Laporan Kinerja s.d November 2025 Bidang Komersial & Pengembangan Bisnis, Bidang Armada dan Operasi dan Bidang Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko; ▪ Laporan Kinerja Saham dan Laporan Penggunaan Dana IPO. ▪ Performance Report up to November 2025, Commercial & Business Development Division, Fleet and Operations Division, and Finance, Human Resources, and Risk Management Division; ▪ Share Performance Report and IPO Proceeds Utilization Report.	▪ Shanti Puruhita ▪ Arief Hermawan ▪ Dessy Emastari P ▪ Eddy Haristiani

Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi
Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Directors

Nama Name	Rapat Internal Direksi Directors Internal Meeting			Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris Joint Meeting with Commissioners		
	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%	Jumlah Total	Kehadiran Presence	%
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director)	12	12	100%	12	12	100%
Muhammad Iqbal (Direksi Armada dan Operasi)* (Director of Fleet Management and Operation)*	6	6	100%	6	6	100%
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direksi Keuangan, SDM, Manajemen Risiko) (Director of Finance, Human Resources, and Risk Management)	12	12	100%	6	6	100%
Arief Hermawan (Direksi Armada dan Operasi)* (Director of Fleet Management and Operation)*	6	6	100%	12	12	100%

*) Bapak Arief Hermawan diangkat sebagai Direktur Armada dan Operasi mengganti Bapak Muhammad Iqbal sejak tanggal 18 Juni 2025
*) Mr. Arief Hermawan was appointed as Director of Fleet Management and Operation, replacing Mr. Muhammad Iqbal, effective June 18, 2025.

Seluruh jalannya rapat Direksi beserta keputusan yang dihasilkan telah dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat. Risalah tersebut ditandatangani oleh pimpinan rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam rapat.

All proceedings of the Board of Directors meeting and the decisions made were recorded in writing in the minutes of the meeting. The minutes were signed by the chair of the meeting and distributed to all members of the Board of Directors, whether they were present at the meeting or not.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Informasi mengenai hubungan keluarga dan hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik dengan sesama anggota maupun dengan Pemegang Saham, serta kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

DISCLOSURE OF AFFILIATE RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

The following table presents information on family and financial relationships between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, both with fellow members and with Shareholders, as well as share ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025.

Manajemen Kunci Perusahaan Key Management	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/ Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/ Controlling Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
R. R. Dewi Ariyani (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

Manajemen Kunci Perusahaan Key Management	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relation with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/ Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Major/ Controlling Shareholders
F. Budi Prayitno (Komisaris) (Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Doni Istyanto Hari Mahdi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Mitchell Julius Tupamahu (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Direksi Board of Directors						
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director) Pengembangan Bisnis)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Arief Hermawan (Direksi Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operation)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direksi Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Human Resources, and Risk Management)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2025.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

The following is a disclosure of the concurrent positions held by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2025.

Manajemen Kunci Perusahaan Key Management of the Company	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
	Posisi Position	Nama Perusahaan/Instansi Company/Institution Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
R. R. Dewi Ariyani (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions	
F. Budi Prayitno (Komisaris) (Commissioner)	Kepala Biro Hukum Head of Legal Affairs Bureau	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
Doni Istyanto Hari Mahdi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Direktur Keuangan Director of Finance	PT Tirta Kahyangan Nirankara
Mitchell Julius Tupamahu (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions	



Manajemen Kunci Perusahaan Key Management of the Company	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
	Posisi Position	Nama Perusahaan/Instansi Company/Institution Name
Direksi Board of Directors		
Shanti Puruhita (Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis) (President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
Arief Hermawan (Direksi Armada dan Operasi) (Director of Fleet Management and Operation)	Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain. No concurrent position at other companies/institutions.	
Dessy Emastari Prihatiningtyas (Direksi Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko) (Director of Finance, Human Resources, and Risk Management)	Komisaris Utama President Commissioner	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Informasi kepemilikan saham masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Information on share ownership for each member of the Board of Commissioners and Directors in 2025 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		JAI	Di Perusahaan Lain In Other Companies
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
R. R. Dewi Ariyani	Komisaris Utama President Commissioner	387.600 lembar 387,600 shares	Nihil Zero
F. Budi Prayitno	Komisaris Commissioner	Nihil Zero	Nihil Zero
Doni Istyanto Hari Mahdi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Zero	Nihil Zero
Mitchell Julius Tupamahu	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Zero	Nihil Zero
Direksi Board of Directors			
Shanti Puruhita	Direksi Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis President Director concurrently serving as Commercial and Business Development Director	1.072.100 lembar 1,072,100 shares	Nihil Zero
Arief Hermawan	Direksi Armada dan Operasi Director of Fleet Management and Operation	Nihil Zero	Nihil Zero
Dessy Emastari Prihatiningtyas	Direksi Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Human Resources, and Risk Management	Nihil Zero	Nihil Zero

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organ

Dalam mendukung penguatan tata kelola dan pengawasan, Dewan Komisaris memiliki komite-komite pendukung sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 dan Anggaran Dasar Perusahaan. Komite-komite ini berfungsi memberikan analisis dan rekomendasi atas aspek strategis sesuai tugas masing-masing. Hingga akhir tahun 2025, IPCM didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

To strengthen governance and supervision, the Board of Commissioners has supporting committees in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 and the Company's Articles of Association. These committees provide analysis and recommendations on strategic aspects in accordance with their respective duties. As of the end of 2025, IPCM is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris membentuk Sekretaris Dewan Komisaris sebagai bagian dari penguatan organ pendukung guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Keberadaan fungsi ini memastikan pelaksanaan pengawasan selaras dengan standar tata kelola perusahaan yang berlaku. Sekretaris Dewan Komisaris berperan penting dalam mendukung tugas pengawasan dan konsultasi Dewan Komisaris, sekaligus menjaga kelancaran komunikasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses pengawasan berjalan optimal.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24 tanggal 22 Maret 2024, yang mengatur kategori dan klasifikasi risiko di lingkungan Pelindo Group, termasuk anak dan cucu perusahaan. Surat tersebut juga menetapkan Direktur yang memiliki tanggung jawab fungsional serta pembinaan.

Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu- waktu.

Pengangkatan dan Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Nomor: SK.DK/30/04/01JAI-2024, Dewan Komisaris menunjuk Siti Hadijah sebagai Sekretaris Dewan Komisaris.

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners established the Secretary of the Board of Commissioners to strengthen its supporting organs and improve the effectiveness of its supervisory functions. This function ensures that supervision is carried out in accordance with applicable corporate governance standards. The Secretary of the Board of Commissioners plays an important role in supporting the supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners, while also maintaining effective communication and coordination with relevant parties to ensure optimal supervision.

Secretary of the Board of Commissioners Work Guideline

In carrying out its duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners refers to the Letter of the Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Jasa Maritim Number: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24 dated March 22, 2024, which regulates the categories and classifications of risks within the Pelindo Group, including its subsidiaries and sub-subsidiaries. The letter also appoints the Director, who has functional and supervisory responsibilities.

Secretary of the Board of Commissioners Office Term

The term of office of the Secretary and Secretariat Staff as stated in the Second Dictum shall be a maximum of 3 (three) years and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

Secretary of the Board of Commissioners Appointment and Profile

In accordance with the Board of Commissioners' Decision Letter of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Number: SK.DK/30/04/01JAI-2024, the Board of Commissioners has appointed Siti Hadijah as Secretary of the Board of Commissioners.





Siti Hadijah

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

43 tahun per 31 Desember 2025
43 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat
Bekasi, West Java

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S2 Coastal Engineering & Port Development IHE Delft Institute (2013)
- S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia (2006)
- S2 Coastal Engineering & Port Development IHE Delft Institute (2013)
- Bachelor of Civil Engineering, University of Indonesia (2006)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

Department Head Monitoring dan Evaluasi Investasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Department Head of Investment Monitoring and Evaluation at the Head Office of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Nomor: SK.DK/30/04/01/JAI-2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Number: SK.DK/30/04/01/JAI-2024 regarding the Appointment of Secretary and Staff Secretary of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya.
Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi pokok untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar tugas-tugas Dewan Komisaris dan sebagai penghubung antara Dewan Komisaris dengan manajemen serta bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting tentang Rapat Dewan Komisaris kepada Perusahaan. Tugas Pokok Sekretaris Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan Administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite di lingkungan Dewan komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari upaya penguatan peran dan fungsi, Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui berbagai program pelatihan, *workshop*, dan seminar. Sepanjang tahun 2025, program yang diikuti antara lain:

Secretary of the Board of Commissioners Duties and Responsibilities

The Secretary of the Board of Commissioners primarily functions to provide support to Commissioners, facilitating their duties and acting as a liaison between the Board of Commissioners and management. They are responsible for providing and conveying crucial information about Board of Commissioners Meetings to the Company. The main duties of the Secretary of the Board of Commissioners include the following:

1. Organizing secretarial administration activities within the Board of Commissioners.
2. Coordinating meetings of the Board of Commissioners and meetings/sessions between the Board of Commissioners and Shareholders, Directors, and other relevant parties.
3. Providing necessary data/information required by the Board of Commissioners and Committees within the Board of Commissioners.

Secretary of the Board of Commissioners Competency Development

To strengthen its role and function, the Secretary of the Board of Commissioners conducts ongoing competency development through various training programs, workshops, and seminars. Throughout 2025, the programs attended include:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Siti Hadijah (Sekretaris Dewan Komisaris) (Secretary of the Board of Commissioners)	Pelatihan Training	*Environmental, Social and Governance*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	PT PMLI

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris berperan efektif dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan melalui berbagai tugas yang dijalankan, meliputi:

1. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Untuk memastikan pengawasan yang terstruktur, IPCM memiliki Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015, dengan ruang lingkup utama meliputi penguatan pengendalian internal, peningkatan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan, serta evaluasi independensi akuntan publik.

Penetapan Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025, yang mengatur pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam menjaga kepatuhan regulasi dan efektivitas fungsi pengawasan.

Kriteria Komite Audit

Kriteria keanggotaan Komite Audit ditetapkan dalam Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24, tertanggal 22 Maret 2024. Surat ini membahas Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko di Lingkungan Pelindo Group (termasuk anak dan cucu perusahaan) serta menetapkan Direktur yang bertanggung jawab atas tugas fungsional dan pembinaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2025

Throughout 2025, the Secretary of the Board of Commissioners effectively supported the implementation of supervisory functions through various tasks, including:

1. Preparing meetings, including materials for Board of Commissioners meetings;
2. Preparing minutes of the Board of Commissioners meetings in accordance with the provisions of the Articles of Association;
3. Administering documents of the Board of Commissioners, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Draft the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Draft reports of the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE

To ensure structured supervision, IPCM has an Audit Committee that is accountable to the Board of Commissioners. The implementation of the Audit Committee's functions and authorities refers to Financial Services Authority Regulation Number: 55/POJK.04/2015, with the main scope covering the strengthening of internal controls, improving transparency and the quality of financial reporting, and evaluating the independence of public accountants.

The Audit Committee was established through the Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 dated July 16, 2025, which regulates the appointment of the Chair and Members of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as part of the Company's efforts to maintain regulatory compliance and the effectiveness of its supervisory functions.

Audit Committee Criteria

The criteria for the Audit Committee membership are set forth in Letter of the Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Jasa Maritim Number: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/ PLJM-24 dated March 22, 2024 Regarding the Determination of Risk Categories and Classifications within the Pelindo Group (Up to the Company's Grandchildren) and establishing Directors who carry out functional duties and Directors who carry out coaching duties.



Pedoman Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/28/03/01/JAI-2024. Piagam tersebut menjadi acuan dalam mengatur ketentuan serta kebutuhan Komite Audit dalam pelaksanaan perannya. Peninjauan dan pembaruan pedoman dilakukan secara berkala guna menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha, struktur organisasi, dan tingkat risiko Perusahaan, sekaligus memastikan kesesuaian dengan kebutuhan Komite Audit serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit Committee Guideline

The Audit Committee carries out its duties and functions based on the Audit Committee Charter authorized by the Board of Commissioners through SK.DK/28/03/01/JAI-2024. This charter serves as a reference for regulating the provisions and requirements of the Audit Committee in performing its role. This guideline is reviewed and updated periodically to align with developments in the Company's business activities, organizational structure, and risk appetite, while ensuring compliance with the Audit Committee's requirements and applicable laws and regulations.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit di Sepanjang Tahun 2025

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap POJK Nomor: 55/POJK.05/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, IPCM menyesuaikan komposisi dan jumlah anggota Komite Audit. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 dilakukan perubahan susunan keanggotaan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Adapun perubahan komposisi Komite Audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Audit Committee Composition, Numbers, Structure and Appointment Basis in 2024

To ensure compliance with POJK Number: 55/POJK.05/2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee, IPCM adjusted the composition and number of members of the Audit Committee. In line with this, in 2025, changes were made to the composition of the Audit Committee based on the Board of Commissioners' Decree Number: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 dated July 16, 2025, concerning the Appointment of the Chair and Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The changes in the composition of the Audit Committee throughout 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penetapan Appointment Basis	Masa Jabatan Office Term
Bay Mokhamad Hasani*	Ketua & Anggota Komite Audit Chairman & Member of the Audit Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/25/04/01/JAI-2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/25/04/01/JAI-2024 dated April 25, 2024 concerning the Appointment of the Chair and Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 Mei 2024 - 18 Juni 2025 May 1, 2024 - June 18, 2025
Doni Istyanto Hari Mahdi	Ketua & Anggota Komite Audit Chairman & Member of the Audit Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 dated July 16, 2025 concerning the appointment of the Chair and Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	18 Juni 2025 - RUPST 2030 18 Juni 2025 - RUPST 2030
Dyah Ayu Anggraheni Sugiri	Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 dated July 16, 2025 concerning the appointment of the Chair and Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	18 Juni 2025 - 1 Mei 2027 18 Juni 2025 - 1 Mei 2027
Jaja Suparman	Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 dated July 16, 2025 concerning the appointment of the Chair and Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	18 Juni 2025 - 1 Mei 2027 June 18, 2025 - May 1, 2027

*) tidak lagi menjabat per 18 Juni 2025
*) no longer in office as of June 18, 2025

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile



Doni Istyanto Hari Mahdi

Ketua Komite Audit
Audit Committee Chairman

Profil Ketua Komite Audit, Doni Istyanto Hari Mahdi telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile of the Chairman of the Audit Committee, Doni Istyanto Hari Mahdi has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners profile section of this Annual Report.



Dyah Ayu Anggraheni Sugiri

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)
Audit Committee Member (Independent)

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

47 Tahun per 31 Desember 2025
47 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Educational History

Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Indonesia (2019)
Master of Accounting Science, University of Indonesia (2019)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain.
No concurrent position at other companies/institutions.

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2024- sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Enegi Pelabuhan Indonesia (2020-2023)
- Anggota Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018-2024)
- Manajer Keuangan & Akuntansi PT Makara Mas-Universitas Indonesia (2010)
- SPV Accounting PT Yummy Food Utama (2008-2010)
- Spv. Finance & Accounting News Department PT Media Televisi Indonesia (MetroTV) (2004-2008)
- Member of the Audit Committee at PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2024–present)
- Member of the Audit Committee at PT Energi Pelabuhan Indonesia (2020–2023)
- Member of the Audit Committee at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (2018–2024)
- Finance & Accounting Manager at PT Makara Mas-University of Indonesia (2010)
- Accounting Supervisor at PT Yummy Food Utama (2008–2010)
- Finance & Accounting Supervisor, News Department, PT Media Televisi Indonesia (MetroTV) (2004–2008)

Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/16/07/01/JAI-2025 dated July 16, 2025 regarding the Appointment of the Chairman and Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya
Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.

Sertifikasi | Certification

- Manajemen Risiko QCRO yang masih berlaku hingga tahun 2027
- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) Nomor 10792/CACP/XII/2023
- QCRO Risk Management valid until 2027
- Certification in Audit Committee Practices (CACP) Number 10792/CACP/XII/2023





Jaja Suparman

Anggota Komite Audit (Pihak Independen)
Audit Committee Member (Independent)

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

59 Tahun per 31 Desember 2025
59 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (2018)
- Magister Bio Medik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2002)
- Sarjana Nautika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (1993)
- Doctorate in Educational Management, State University of Surabaya, graduated in 2018
- Master's in Biomedical Sciences, National Development University "Veteran" Jakarta, graduated in 2002
- Bachelor's in Nautical Science, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, graduated in 1993

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tenaga Fungsional/Dosen, STIP Jakarta (2025-sekarang)
Faculty Member, STIP Jakarta (2025–present)

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Kepala Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan kapal, Kementerian Perhubungan (2023-2025)
- Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan, Kementerian Perhubungan (2018-2019)
- Kepala Subdirektorat Kepelautan, Kementerian Perhubungan (2019-2022)
- Pembantu Ketua II, STIP Jakarta (2022-2023)
- Head of the Sub-Directorate of Vessel Pilotage and Towing, Ministry of Transportation (2023–2025)
- Head of the Sub-Directorate for Pollution Prevention, Vessel Safety Management, and Environmental Protection, Ministry of Transportation (2018–2019)
- Head of the Sub-Directorate for Maritime Affairs, Ministry of Transportation (2019–2022)
- Vice Chairperson II, STIP Jakarta (2022–2023)

Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/16/07/01/JAI-2025 dated July 16, 2025 regarding the Appointment of the Chairman and Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya
Has no affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners.

Sertifikasi | Certification

Asesor Kompetensi, berlaku hingga tahun 2028
Competency Assessor, valid until 2028

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Untuk diangkat sebagai anggota Komite Audit. Kriteria independensi anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:

Audit Committee Independence

All members of the Audit Committee who are independent parties have no financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or relationships with the Company that could affect their ability to act independently. The independence criteria for Audit Committee members are as follows:

Tabel Kriteria Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence Criteria

Kriteria Independensi Independence Criteria	Doni Istyanto Hari Mahdi	Dyah Ayu Anggraheni Sugiri	Jaja Suparman
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir. Not an individual employed by a public accounting firm, legal consultant firm, or any other entity that provided audit, non-audit services, or other consulting services to the Company within the last 6 months.	✓	✓	✓

Tabel Kriteria Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence Criteria

Kriteria Independensi Independence Criteria	Doni Istyanto Hari Mahdi	Dyah Ayu Anggraheni Sugiri	Jaja Suparman
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Does not possess shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who held authority or responsibility in planning, leading, and/or controlling the Company within the last six months.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham utama Perusahaan. Has no family relationship, by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with Commissioners, Directors, or major Shareholders of the Company.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Not currently affiliated with an institution whose business activities involve providing services to the Company.	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur di dalam Piagam Komite Audit. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas berbagai kegiatan Perusahaan, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The duties and responsibilities of the Audit Committee are outlined in the Audit Committee Charter. The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function over various Company activities, which include:

1. Reviewing the financial information intended for release to the public and/or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;
2. Reviewing compliance with laws and regulations regarding the Company's activities;
3. Providing independent opinions in case of disagreements between management and accountants regarding the services provided;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners concerning the appointment of accountants based on independence, scope of assignment, and compensation for services;
5. Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the follow-up actions by the Board of Directors regarding the internal auditor's findings;
6. Reviewing complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
7. Reviewing and offering advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest within the Company;
8. Maintaining the confidentiality of Company documents, data, and information.



Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan jasa audit laporan keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam laporan tertanggal 10 Juni 2025. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Audit kemudian menyampaikan rekomendasi terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada 10 Juni 2025.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit

Pembagian tugas antaranggota Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, yang diuraikan sebagai berikut:

Audit Committee Responsibilities in Providing Recommendations for the Appointment and Dismissal of External Auditors

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee evaluated the performance of historical annual financial statement audit services by Public Accountants and/or Public Accounting Firms as stated in the report dated June 10, 2025. Based on the results of this evaluation, the Audit Committee then submitted recommendations regarding the appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms on June 10, 2025.

Distribution of Duties and Responsibilities in Audit Committee Membership

The distribution of duties among Audit Committee members is stipulated in the Board of Commissioners' Decree Number: SK.DK/16/07/01/JAI-2025 dated July 16, 2025, regarding the Appointment of the Chair and Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Doni Istyanto Hari Mahdi Ketua & Komite Audit Audit Committee Chairman	▪ Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; ▪ Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik; Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; ▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; ▪ Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; ▪ Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; ▪ Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan ▪ Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik. ▪ Reviews financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company; ▪ Reviews compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company; ▪ Provides an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant on the services provided; ▪ Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment and service fees; ▪ Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors; ▪ Reviewing complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Issuer or Public Company; ▪ Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Issuer or Public Company; ▪ Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Dyah Ayu Anggraheni Sugiri Anggota Komite Audit (Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	▪ Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; ▪ Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik; Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; ▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; ▪ Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; ▪ Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; ▪ Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan ▪ Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik. ▪ Reviews financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company; ▪ Reviews compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company; ▪ Provides an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant on the services provided; ▪ Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment and service fees; ▪ Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors; ▪ Reviewing complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Issuer or Public Company; ▪ Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Issuer or Public Company; ▪ Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.
Jaja Suparman (Anggota Komite Audit; Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	▪ Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; ▪ Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik; Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; ▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; ▪ Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; ▪ Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; ▪ Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan ▪ Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik. ▪ Reviews financial information that will be issued by the Issuer or Public Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections and other reports related to the financial information of the Issuer or Public Company; ▪ Reviews compliance with laws and regulations related to the activities of the Issuer or Public Company; ▪ Provides an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the Accountant on the services provided; ▪ Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment and service fees; ▪ Reviewing the implementation of audits by internal auditors and overseeing the implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors; ▪ Reviewing complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Issuer or Public Company; ▪ Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Issuer or Public Company; ▪ Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Issuer or Public Company.

Rapat Komite Audit

Kebijakan

Kebijakan rapat Komite Audit tertuang dalam pedoman Komite Audit. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Selama tahun 2025, Komite Audit menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

Policy

The Audit Committee meeting policy is outlined in the Audit Committee guidelines. The Audit Committee holds meetings at least once every three months. Audit Committee meeting decisions are made based on deliberation to reach consensus.

In 2025, the Audit Committee held five meetings, with the following attendance and agendas:



Tabel Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	5 Maret 2025 March 5, 2025	Rapat Evaluasi Biaya Pemeliharaan Kapal Ship Maintenance Cost Evaluation Meeting	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
2	19 Mei 2025 May 19, 2025	▪ Pembahasan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 PT Jasa Armada Indonesia Tbk (Dividen, Modal Kerja, dan Cadangan Umum) ▪ Evaluasi Biaya Pemeliharaan Kapal ▪ 2024 Financial Year Net Profit Utilization Discussion of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (Dividends, Working Capital, and General Reserves) ▪ Ship Maintenance Cost Evaluation	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
4	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Rapat Koordinasi Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk Audit Committee Coordination Meeting of PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
5	20 Agustus 2025 August 20, 2025	Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Tahun 2026 PT Jasa Armada Indonesia Tbk Review of the Proposed Work Plan and Budget (RKAP) for 2026 of PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-
6	16 Desember 2025 December 16, 2025	Pembahasan Tindak Lanjut Kondisi Armada dan Pemeliharaan Armada Review of Fleet Condition and Fleet Maintenance	Ketua dan Anggota Komite Audit Chairman and Members of the Audit Committee	-

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit
Frequency and Attendance of Audit Committee Meetings

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Bay Mokhamad Hasani (Ketua & Anggota Komite Audit)* Chairman & Member of the Audit Committee*	2	2	100%
Doni Istyanto Hari Mahdi (Ketua & Anggota Komite Audit)** Chairman & Member of the Audit Committee**	3	3	100%
Dyah Ayu Anggraheni Sugiri (Anggota Komite Audit; Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	5	5	100%
Jaja Suparman (Anggota Komite Audit; Pihak Independen) Audit Committee Member (Independent)	5	5	100%

*) Tidak lagi menjabat sejak 18 Juni 2025
**) Menjabat sejak 18 Juni 2025
*) No longer in office since June 18, 2025
**) In office since June 18, 2025

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya, Komite Audit secara konsisten meningkatkan kompetensi dan pengetahuan melalui berbagai pelatihan, *workshop*, dan seminar. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Audit Committee Competency Development

The Audit Committee continuously strives to improve its competence and knowledge through various training programs, workshops, and seminars to maintain the effectiveness of its functions and responsibilities. Throughout 2025, the Audit Committee participated in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Bay Mokhamad Hasani* (Ketua & Anggota Komite Audit) Chairman & Member of the Audit Committee*	*Workshop*	Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Legal Aspects in the Management of SOEs	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, October 15-16, 2025	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
Doni Istyanto Hari Mahdi** (Ketua & Anggota Komite Audit) Chairman & Member of the Audit Committee**	*Workshop*	*Strategic Oversight & Risk Governance*	Yogyakarta, 13-14 Agustus 2025 Yogyakarta, August 13-14, 2025	PPA Universitas Indonesia
	Workshop	*Executive Program for Commissioners*	Yogyakarta, 30-31 Oktober 2025 Yogyakarta, October 30-31, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Dyah Ayu Anggraheni Sugiri (Anggota Komite Audit; Pihak Independen) (Anggota Komite Audit; Pihak Independen)	Pelatihan Training	*Environmental, Social and Governance*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	PT PMLI
Jaja Suparman (Anggota Komite Audit; Pihak Independen) Chairman & Member of the Audit Committee*	-	-	-	-

*) Tidak lagi menjabat sejak 18 Juni 2025
**) Menjabat sejak 18 Juni 2025
*) No longer in office since June 18, 2025
**) In office since June 18, 2025

Pelaksanaan Tugas Komite Audit tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang pelaksanaannya tercermin dalam kegiatan-kegiatan berikut:

1. Rapat Koordinasi Komite dengan SPI dan Pejabat terkait;
2. Rapat Internal Dewan Komisaris;
3. Rapat dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi; dan
4. Kunjungan kerja di Wilayah PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Audit Committee Duties Report in 2025

Throughout 2025, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities, which are reflected in the following activities:

1. Committee Coordination Meeting with SPI and related Officials;
2. Internal Meeting of the Board of Commissioners;
3. Meetings with the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
4. Working visit in the Region of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengelolaan aspek nominasi dan remunerasi secara terstruktur. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi penelaahan dan pemberian rekomendasi atas kebijakan terkait guna memastikan kesesuaian dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan IPCM.

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Seluruh anggota komite yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan lain dengan Perusahaan yang dapat memengaruhi independensinya.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee was established to support the implementation of good corporate governance through structured management of nomination and remuneration. The Nomination and Remuneration Committee reviews and provides recommendations on related policies to ensure compliance with the principles of objectivity, transparency, and accountability in the management of IPCM.

Nomination and Remuneration Committee Criteria

In carrying out its duties of supervision and providing advice on the management of the Company by the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by committees, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. All committee members from independent parties have no financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, Controlling Shareholders, or other relationships with the Company that could affect their independence.



Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Piagam yang disahkan oleh Dewan Komisaris melalui SK.DK/28/03/03/JAI-2024. Piagam tersebut ditinjau secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan perkembangan kebutuhan Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomination and Remuneration Committee Work Guideline

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are based on the Charter approved by the Board of Commissioners through SK.DK/28/03/03/JAI-2024. The Charter is reviewed periodically to ensure alignment with the Company's evolving needs and applicable laws and regulations.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Nomination and Remuneration Committee Office Term

The term of office of the Nomination and Remuneration Committee is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises which states that the term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs is a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without reducing the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs to dismiss them at any time.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi di Sepanjang Tahun 2025

Di tahun 2025, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: SK.DK/16/07/02/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Adapun perubahan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Structure, Numbers, Composition and Appointment Basis in 2025

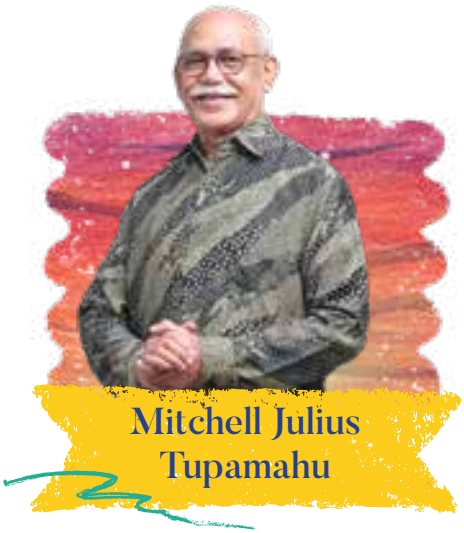
In 2025, the composition of the Nomination and Remuneration Committee changed as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: SK.DK/16/07/02/JAI-2025 dated July 16, 2025, regarding the Appointment of the Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The changes in the composition of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penetapan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Zuhri Iryansyah*	Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman & Member of Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/28/03/03/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/03/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Appointment of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 April 2024 - 18 Juni 2025 April 1, 2024 - June 18, 2025
Mitchell Julius Tupamahu	Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman & Member of Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/02/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/16/07/02/JAI-2025 dated July 16, 2025 regarding the Appointment of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	18 Juni 2025 - RUPST 2030 June 18, 2025 - AGMS 2030
Ryan Hegar Suryadinatha	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/02/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/16/07/02/JAI-2025 dated July 16, 2025 regarding the Appointment of the Chairman and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	18 Juni 2025 - 1 April 2026 June 18, 2025 - April 1, 2026

*) Tidak lagi menjabat sejak 18 Juni 2025
*) No longer in office since June 18, 2025

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Profile



Mitchell Julius Tupamahu

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Mitchell Julius Tupamahu telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Mitchell Julius Tupamahu, is presented in the Company Profile chapter under the Board of Commissioners profile in this Annual Report.



Ryan Hegar Suryadinatha

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (Pihak Independen)

Member of the Nomination and Remuneration Committee (Independent Party)

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

33 Tahun per 31 Desember 2025
33 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Educational History

Sarjana Ekonomi, Universitas Brawijaya (2015)
Bachelor of Economics, Brawijaya University (2015)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain
Does not hold concurrent positions in other companies/agencies

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2021-2021)
- Anggota Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2016-2021)
- Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk (Oktober 2016 – Maret 2021)
- Junior Konsultan GCG (Good Corporate Governance) untuk *Individual Expert* (2016-2020)
- Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (December 2021–Present)
- Member of the Audit Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (April 2021-December 2021)
- Secretary to the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (October 2016 – March 2021)
- Junior Consultant on Good Corporate Governance (GCG) for Individual Experts (July 2016–June 2020)

Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: SK.DK/16/07/02/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: SK.DK/16/07/02/JAI-2025 dated July 16, 2025 concerning the Appointment of the Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya.

No affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners.

Sertifikasi | Certification

Enterprise Risk Management Certified Professional, berlaku sampai 2026
Enterprise Risk Management Certified Professional, valid until 2026



Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan adalah anggota yang independen dan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tanggung jawab yang mencakup:

1. Tugas Pokok Berkaitan Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

   b. Melakukan kegiatan terkait nominasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
   c. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan nominasi independen untuk melakukan penelaahan Kembali atas nominasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan *monitoring* pekerjaan konsultan melalui *Human Capital*.
2. Tugas Pokok Berkaitan Remunerasi
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas remunerasi.
   b. Melakukan kegiatan terkait remunerasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
   c. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan remunerasi independen untuk melakukan penelaahan Kembali atas remunerasi yang telah ditentukan, maka tugas komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan *monitoring* pekerjaan konsultan melalui *Human Capital*.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/02/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, pembagian tugas masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Independency

Members of the Company's Nomination and Remuneration Committee are independent members who have no personal interests/connections that could have a negative impact and conflict of interest with the Company and have met the requirements to be appointed as members of the Nomination and Remuneration Committee.

Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee has responsibilities that include:

1. Main Duties Related to Nominations:
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      - The composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
      - Policies and criteria required in the nomination process.
      - Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
   b. Conducting activities related to nominations and reporting them to Shareholders in accordance with applicable procedures or legal provisions.

   c. In the event that the Committee deems it necessary to engage an independent nomination consultant to review the nominations that have been determined, the Committee's task is to provide input on the criteria and competencies of the consultant and to monitor the consultant's work through Human Capital.
2. Key Tasks Related to Remuneration
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policy, and amount of remuneration.
   b. Conducting activities related to remuneration and reporting them to Shareholders in accordance with applicable procedures or legal provisions.

   c. In the event that the Committee deems it necessary to engage an independent remuneration consultant to review the remuneration that has been determined, the committee's task is to provide input on the criteria and competencies of the consultant and to monitor the consultant's work through Human Capital.

Distribution of Duties and Responsibilities in Nomination and Remuneration Committee Membership

Based on the Board of Commissioners' Decree Number: SK.DK/16/07/02/JAI-2025 dated July 16, 2025, concerning the Appointment of the Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, the division of duties for each member of the Nomination and Remuneration Committee is determined as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Mitchell Julius Tupamahu (Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee)	▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; ▪ Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; ▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; ▪ Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; ▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi; dan ▪ Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. ▪ Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, the policies and criteria required in the nomination process, and the performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; ▪ Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners based on benchmarks that have been compiled as evaluation material; ▪ Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding competency development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; ▪ Submitting proposals for qualified candidates for membership of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to be presented to the GMS; ▪ Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration structure, remuneration policy, and remuneration amounts; and ▪ Assisting the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
Ryan Hegar Suryadinatha (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Member of the Nomination and Remuneration Committee)	▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; ▪ Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; ▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; ▪ Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; ▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi; dan ▪ Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. ▪ Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, the policies and criteria required in the nomination process, and the performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; ▪ Assisting the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners based on benchmarks that have been compiled as evaluation material; ▪ Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding competency development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; ▪ Submitting proposals for qualified candidates for membership of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to be presented to the GMS; ▪ Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration structure, remuneration policy, and remuneration amount; and ▪ Assisting the Board of Commissioners in assessing performance in relation to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners. ▪ Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, the policies and criteria required in the nomination process, and the performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan

Kebijakan pelaksanaan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi IPCM tertuang dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/28/03/03/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024.

Selama tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 1 (satu) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Policy

The policy for conducting IPCM Nomination and Remuneration Committee meetings is outlined in the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which was ratified through Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/28/03/03/JAI-2024 dated March 28, 2024.

During 2025, the Nomination and Remuneration Committee held one (1) meeting, with the following attendance and agenda recapitulation:



Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Agenda Table for the Nomination and Remuneration Committee Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	7 Agustus 2025 August 7, 2025	Rapat Koordinasi Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Coordination Meeting of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee	-

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Frequency and Attendance Rate of Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Zuhri Iryansyah (Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)* (Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee)*	0	0	0
Mitchell Julius Tupamahu (Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)** (Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee)**	1	1	100%
Ryan Hegar Suryadinatha (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Member of the Nomination and Remuneration Committee)	1	1	100%

*) Tidak lagi menjabat sejak 18 Juni 2025
**) Menjabat sejak 18 Juni 2025
*) No longer in office since June 18, 2025
**) In office since June 18, 2025

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi secara konsisten meningkatkan kompetensi dan pengetahuan melalui berbagai pelatihan, *workshop*, dan seminar. Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Competency Development of the Nomination and Remuneration Committee

In order to maintain the effectiveness of its functions and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee consistently improves its competence and knowledge through various training sessions, workshops, and seminars. Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee participated in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Type	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Zuhri Iryansyah (Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Chairman & Member of Nomination and Remuneration Committee)	Pelatihan Training	*Environmental, Social and Governance*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	PT PMLI
	Sertifikasi Certification	*Qualified Risk Oversight Professional* (QROP)	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, May 15-16, 2025	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
Mitchell Julius Tupamahu (Ketua & Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Chairman & Member of Nomination and Remuneration Committee)	*Workshop*	*Strategic Oversight & Risk Governance*	Yogyakarta, 13-14 Agustus 2025 Yogyakarta, August 13-14, 2025	PPA Universitas Indonesia
	Workshop	*Executive Program for Commissioners*	Yogyakarta, 30-31 Oktober 2025 Yogyakarta, October 30-31, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Ryan Hegar Suryadinatha (Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi) (Member of Nomination and Remuneration Committee)	Pelatihan Training	*Environmental, Social and Governance*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	PT PMLI

Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara menyeluruh dalam aspek nominasi dan remunerasi, yang meliputi:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris;
2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025;
4. Pengawasan, Rekomendasi dan Nasihat Dewan Komisaris; dan
5. *Management Walkthrough*.

Implementation of Nomination and Remuneration Committee Duties in 2025

Throughout 2025, the Nomination and Remuneration Committee performed its functions, duties, and responsibilities comprehensively in the areas of nomination and remuneration, which included:

1. Internal Meeting of the Board of Commissioners;
2. Coordination Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors;
3. Implementation of the 2025 General Meeting of Shareholders (GMS);
4. Supervision, Recommendations, and Advice of the Board of Commissioners; and
5. Management Walkthrough.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perusahaan menempatkan pengawasan manajemen risiko sebagai elemen fundamental dalam menjaga kesinambungan dan ketahanan usaha. Untuk itu, Komite Pemantau Risiko dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna memastikan efektivitas pengawasan serta evaluasi atas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh.

Kriteria Komite Pemantau Risiko

Kriteria keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan dalam Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24, tertanggal 22 Maret 2024. Surat ini membahas Penetapan Kategori dan Klasifikasi Risiko di Lingkungan Pelindo Group (termasuk anak dan cucu perusahaan) serta menetapkan Direktur yang bertanggung jawab atas tugas fungsional dan pembinaan.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas Komite berlandaskan Piagam Komite Pemantau Risiko yang disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/26/04/01/JAI-2021. Piagam tersebut mengatur tata kelola serta ruang lingkup tugas Komite dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Untuk menjaga relevansi dan kepatuhan, Piagam Komite Pemantau Risiko ditinjau secara berkala agar tetap selaras dengan kebutuhan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

RISK MONITORING COMMITTEE

The Company places risk management oversight as a fundamental element in maintaining business continuity and resilience. To that end, a Risk Monitoring Committee has been formed and is accountable to the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of oversight and evaluation of the comprehensive implementation of risk management.

Risk Monitoring Committee Criteria

The criteria for the Risk Monitoring Committee membership is stipulated in the Letter of the Director of Finance and Risk Management of PT Pelindo Jasa Maritim Number: PW.05.02/22/3/1/RSNO/KRIS/PLJM-24, dated March 22, 2024. This letter discusses the Determination of Risk Categories and Classifications within the Pelindo Group (including subsidiaries and grandchildren) as well as establishing the Director responsible for functional duties and guidance.

Risk Monitoring Committee Work Guideline

The Committee's duties are based on the Risk Monitoring Committee Charter, which was ratified through Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/26/04/01/JAI-2021. The charter regulates the governance and scope of the Committee's duties in carrying out its independent supervisory functions. To maintain relevance and compliance, the Risk Monitoring Committee Charter is reviewed periodically to ensure it remains in line with the Company's needs and applicable laws and regulations.

Risk Monitoring Committee Office Term

The term of office of the Risk Monitoring Committee is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER 3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises which states that the term of office of Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs is a maximum of 3 (three) years and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs to dismiss them at any time.



Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Risiko di Sepanjang Tahun 2025

Di tahun 2025, terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: SK.DK/16/07/03/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Adapun perubahan komposisi Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Structure, Number, Composition and Appointment Basis in 2025

In 2025, there was a change in the composition of the Risk Monitoring Committee as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: SK.DK/16/07/03/JAI-2025 dated July 16, 2025 concerning the Appointment of the Chair and Members of the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The changes in the composition of the Risk Monitoring Committee throughout 2025 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penetapan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
R. R. Dewi Ariyani	Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman & Member of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/25/04/01/JAI-2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/25/04/01/JAI-2024 dated April 25, 2024 concerning the Appointment of the Chair and Members of the Board of Commissioners' Risk Monitoring Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	1 April 2024 - 18 Juni 2025 April 1, 2024 - June 18, 2025
F. Budi Prayitno	Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman & Member of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/03/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/16/07/03/JAI-2025 dated July 16, 2025 concerning the Appointment of the Chair and Members of the Board of Commissioners' Risk Monitoring Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	18 Juni 2025 - RUPST 2030 June 18, 2025 - 2030 AGM
Hartian Surya Widhanto	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/03/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. *diberhentikan per tanggal 31 Oktober 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/31/10/01/JAI-2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Pemberhentian Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/16/07/03/JAI-2025 dated July 16, 2025 concerning the Appointment of the Chair and Members of the Board of Commissioners' Risk Monitoring Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. *terminated as of October 31, 2025 in accordance with Board of Commissioners Decree Number: SK.DK/31/10/01/JAI-2025 dated October 31, 2025 concerning the Dismissal of Members of the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	18 Juni 2025 - 30 Oktober 2025 June 18, 2025 – October 30, 2025
Dadang Budiawan	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk	1 April 2024 - 1 April 2025

Profil Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Profile



F. Budi Prayitno

Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko
Chairman & Member of the Risk Monitoring Committee

Profil Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko, F. Budi Prayitno telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Chairman & Member of the Risk Monitoring Committee, F. Budi Prayitno has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners profile section of this Annual Report.



Hartian Surya Widhanto*

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan | Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age

55 Tahun per 31 Desember 2025
55 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile

Depok, Jawa Barat, Indonesia
Depok, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Master of Science in Engineering pada bidang Engineering Management dari the University of Birmingham, UK (1996)
- Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1994)
- Master of Science in Engineering majoring in Engineering Management from the University of Birmingham, UK (1996)
- Bachelor of Electrical Engineering from Bandung Institute of Technology (1994)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain
Does not hold concurrent positions in other companies/agencies

Pengalaman Kerja di IPCM dan luar IPCM | Work Experience at IPCM and Outside IPCM

- Praktisi pada bidang *corporate oversight*
- Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen
- Practitioner in corporate oversight
- Member of Risk Monitoring Committee (Independent Party)

Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Ketua serta Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Decree of the Board of Commissioners No. SK.DK/28/03/02/JAI-2024 dated March 28, 2024 regarding the Establishment and Appointment of the Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya.
No affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners.

Sertifikasi | Certification

Manajemen Risiko QCRO yang masih berlaku hingga tahun 2027
QCRO Risk Management valid until 2027

*) Tidak lagi menjabat sejak 31 Oktober 2025
*) No longer serving as of October 31, 2025

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.

Risk Monitoring Committee Independency

All members of the Risk Monitoring Committee who are independent parties have no financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Shareholders or relationships with the Company that could influence their ability to act independently. Requirements for appointment as a member of the Risk Monitoring Committee.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kecukupan kebijakan dan pedoman manajemen risiko Perusahaan dibandingkan dengan praktik terbaik dan/atau praktik umum yang berlaku.
2. Memastikan efektivitas pelaksanaan praktik manajemen risiko termasuk kepatuhan pelaksanaannya terhadap kebijakan dan pedoman manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Perseroaan.
3. Mengevaluasi kecukupan *risk appetite* Perusahaan.
4. Mengevaluasi kecukupan dan kewajaran laporan profil risiko Perusahaan dan/atau hasil asesmen risiko oleh manajemen, termasuk risiko-risiko yang berkenaan dengan inisiatif strategi Perusahaan.
5. Melakukan pengawasan atas realisasi dari rencana mitigasi atau respon atas risiko-risiko signifikan Perusahaan.
6. Memberikan masukan dan rekomendasi atas rencana kerja unit manajemen risiko Perusahaan, serta memantau realisasinya.
7. Memberikan masukan dan rekomendasi atas strategi dan rencana peningkatan maturitas manajemen risiko Perusahaan, serta memantau realisasinya.
8. Memberikan masukan dan rekomendasi atas rencana pengembangan sistem pendukung dan kompetensi sumber daya manusia yang berperan penting dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan, serta memantau realisasinya.
9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.DK/16/07/03/JAI-2025 tanggal 16 Juli 2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk, pembagian tugas masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

The Risk Management Monitoring Committee has the following duties and responsibilities:

1. Evaluate the adequacy of the Company's risk management policies and Guidelines compared to applicable best practices and/or general practices.
2. Ensure the effectiveness of the implementation of risk management practices, including compliance with the risk management policies and Guidelines applicable within the Company.
3. Evaluate the adequacy of the Company's risk appetite.
4. Evaluate the adequacy and fairness of the Company's risk profile report and/or the results of risk assessments by management, including risks related to the Company's strategic initiatives.
5. Supervise the realization of mitigation plans or responses to the Company's significant risks.
6. Provide input and recommendations on the work plan of the Company's risk management unit, and monitor its realization.
7. Provide input and recommendations on strategies and plans to increase the Company's risk management maturity, and monitor their realization.
8. Provide input and recommendations on plans to develop support systems and human resource competencies that play an important role in implementing the Company's risk management, as well as monitor their realization.
9. Carry out other duties and responsibilities assigned by the Board of Commissioners from time to time.

Distribution of Duties and Responsibilities in the Risk Monitoring Committee Membership

Based on the Board of Commissioners' Decree Number: SK.DK/16/07/03/JAI-2025 dated July 16, 2025, concerning the Appointment of the Chair and Members of the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, the division of duties for each member of the Risk Monitoring Committee is determined as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
F. Budi Prayitno (Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko) (Chairman & Member of the Risk Monitoring Committee)	▪ Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Perusahaan; ▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan dengan *best practices* atau kerangka praktik yang menjadi rujukan; ▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan dengan *best practices* atau kerangka praktik yang menjadi rujukan; ▪ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS; dan ▪ Menjalankan tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya. ▪ Monitoring and reviewing risk management reports and other reports related to the implementation of the Company's risk management; ▪ Monitoring and evaluating the compliance of the Company's risk management policies and strategies with best practices or reference frameworks; ▪ Providing recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effective implementation of risk management and the alignment of the Company's risk management policies with best practices or reference frameworks; ▪ Conduct monitoring and evaluation of the implementation of other risk management functions in accordance with laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions; and ▪ Performing other duties and responsibilities related to the position.

Hartian Surya Widhanto (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Member of the Risk Monitoring Committee)	▪ Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Perusahaan; ▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan dengan *best practices* atau kerangka praktik yang menjadi rujukan; ▪ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan dengan *best practices* atau kerangka praktik yang menjadi rujukan; ▪ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS; dan ▪ Menjalankan tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya. ▪ Monitoring and reviewing risk management reports and other reports related to the implementation of the Company's risk management; ▪ Monitoring and evaluating the compliance of the Company's risk management policies and strategies with best practices or reference frameworks; ▪ Providing recommendations to the Board of Commissioners on matters that support the effective implementation of risk management and the alignment of the Company's risk management policies with best practices or reference frameworks; ▪ Conduct monitoring and evaluation of the implementation of other risk management functions in accordance with laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions; and ▪ Performing other duties and responsibilities related to the function.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan

Pelaksanaan rapat Komite berlandaskan Piagam Komite Pemantau Risiko yang disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK.DK/28/03/02/JAI-2024.

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meeting

Policy

The implementation of Committee meetings is based on the Risk Monitoring Committee Charter, which was ratified through Board of Commissioners Decree Number SK.DK/28/03/02/JAI-2024.

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee held two meetings, with the following attendance and agenda summaries:

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Agenda Table

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
1	22 April 2025 April 22, 2025	▪ Pembahasan Profil Risiko s.d. Triwulan 1 ▪ Perhitungan Peringkat Komposit Risiko s.d. Triwulan 1 ▪ *Loss Event Report* s.d. Triwulan 1 ▪ Risk Profile Discussion for the 1st Quarter ▪ Composite Risk Rating Calculation for the 1st Quarter ▪ Loss Event Report up to 1st Quarter	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Chairman and Member of the Risk Monitoring Committee	-
2	6 Agustus 2025 August 6, 2025	▪ Pembahasan Profil Risiko s.d.Triwulan II Tahun 2025 ▪ Pembahasan Peringkat Komposit Risiko s.d. Triwulan II Tahun 2025 ▪ Discussion of the Risk Profile through the Second Quarter of 2025 ▪ Discussion of the Composite Risk Rating through the Second Quarter of 2025	Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko Head and Members of the Risk Monitoring Committee	-

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Frequency and Attendance Rate of Risk Monitoring Committee Meetings

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
R. R. Dewi Ariyani (Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko)* (Chairman & Member of Risk Monitoring Committee)*	1	1	100%
F. Budi Prayitno (Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko)** (Chairman & Member of Risk Monitoring Committee)**	1	1	100%



Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Presence	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Hartian Surya Widhanto (Anggota Komite Pemantau Risiko)*** (Member of Risk Monitoring Committee)***	2	2	100%
Dadang Budiawan (Anggota Komite Pemantau Risiko)**** (Member of Risk Monitoring Committee)****	0	0	N/A

*) Tidak lagi menjabat sejak 18 Juni 2025
**) Menjabat sejak 18 Juni 2025
***) Tidak lagi menjabat sejak 31 Oktober 2025
****) Tidak lagi menjabat sejak 2 April 2025
*) No longer in office since June 18, 2025
**) In office since June 18, 2025
***) No longer in office since October 31, 2025
****) No longer in office since April 2, 2025

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko secara konsisten meningkatkan kompetensi dan pengetahuan melalui berbagai pelatihan, *workshop*, dan seminar. Sepanjang tahun 2025, Komite Pemantau Risiko mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Competency Development of Risk Monitoring Committee

In order to maintain the effectiveness of its functions and responsibilities, the Risk Monitoring Committee consistently improves its competence and knowledge through various training sessions, workshops, and seminars. Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee participated in the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
R. R. Dewi Ariyani (Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko) (Chairman & Member of Risk Monitoring Committee)	Sertifikasi Certification	*Qualified Risk Oversight Professional* (QROP)	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, May 15-16, 2025	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
F. Budi Prayitno (Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko) (Chairman & Member of Risk Monitoring Committee)	*Workshop*	Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN	Jakarta, 15-16 Mei 2025 Jakarta, May 15-16, 2025	The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)
	Forum Group Discussion	*Risk & Governance Summit* 2025	Jakarta, 19 Agustus 2025 Jakarta, August 19, 2025	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Hartian Surya Widhanto (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Member of Risk Monitoring Committee)	Pelatihan Training	*Environmental, Social and Governance*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	PT PMLI
Dadang Budiawan (Anggota Komite Pemantau Risiko) (Member of Risk Monitoring Committee)	Pelatihan Training	*Environmental, Social and Governance*	Bogor, 27 Februari 2025 Bogor, February 27, 2025	PT PMLI

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Di tahun 2025, Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan fungsi Manajemen Risiko, yang mencakup antara lain:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris;
2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025;
4. Pengawasan, Rekomendasi dan Nasihat Dewan Komisaris; dan
5. *Management Walkthrough*.

Duties Implementation of Risk Monitoring Committee in 2025

Throughout 2025, the Risk Monitoring Committee carried out duties and responsibilities related to Risk Management function, which included, among others:

1. Internal Meeting of the Board of Commissioners;
2. Coordination Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors;
3. Implementation of the 2025 General Meeting of Shareholders (GMS);
4. Supervision, Recommendations, and Advice of the Board of Commissioners; and
5. Management Walkthrough.





Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of the Board of Directors

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perusahaan belum membentuk komite di bawah Direksi. Meski demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tetap didukung oleh organ struktural yang memperkuat penerapan tata kelola Perusahaan. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal berperan sebagai dua fungsi utama yang mendukung keberlanjutan operasional serta menjaga kesehatan manajerial Perusahaan.

As of the end of 2025, the Company has not formed any committees under the Board of Directors. However, the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is supported by structural organs that strengthen the implementation of the Company's governance. In this case, the Corporate Secretary and Internal Audit serve as two main functions that support operational sustainability and maintain the Company's managerial health.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi strategis sebagai penghubung antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan dengan memastikan keterbukaan informasi serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Peran ini diwujudkan melalui pengelolaan komunikasi yang terstruktur dan efektif dengan regulator, investor, dan masyarakat guna menciptakan hubungan yang selaras. Melalui Divisi Corporate Secretary, IPCM mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai regulasi dan praktik terbaik. Di samping itu, Sekretaris Perusahaan mengelola informasi bisnis secara profesional untuk memperkuat reputasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Perusahaan.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary performs a strategic function as a liaison between the Company and its stakeholders by ensuring transparency of information and compliance with applicable regulations. This role is realized through structured and effective communication management with regulators, investors, and the public to create harmonious relationships. Through the Corporate Secretary Division, IPCM implements good corporate governance principles in accordance with regulations and best practices. In addition, the Corporate Secretary manages business information professionally to strengthen the Company's reputation and increase public trust.

Profil Sekretaris Perusahaan

Penunjukan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan berada di bawah kewenangan Direktur Utama, dengan garis pertanggungjawaban langsung kepada Direktur Utama. Berdasarkan SK Direksi PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19 tanggal 16 Juli 2019, Perseroan menetapkan Eddy Haristiani sebagai Sekretaris Perusahaan.

Corporate Secretary Profile

The appointment and dismissal of the Corporate Secretary is under the authority of the President Director, with direct accountability to the President Director. Based on the Board of Directors' Decree of PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19 dated July 16, 2019, the Company appointed Eddy Haristiani as Corporate Secretary.



Eddy Haristiani

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kewarganegaraan | Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age
55 tahun Per 31 Desember 2025
55 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo. (2003–2005)
- Sarjana Komunikasi Massa, Universitas Gadjah Mada (1990–1995)
- Master of Public Administrations, International Christian University, Tokyo. (2003-2005)
- Bachelor of Mass Communication, Gadjah Mada University (1990- 1995)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position
Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain
Does not hold concurrent positions in other companies/agencies

Pengalaman Kerja | Employment History

- SVP/Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (Juni 2018–Juli 2019)
- Manager of Learning of Port and Maritime - PT PMLI (IPC Corporate University)/One of PT Pelindo II's Subsidiaries (November 2014 – June 2018)
- Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) - (2012 – Oktober 2014)

- SVP/Group Head of Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII"): (June 2018–July 2019)
- Manager of Learning of Port and Maritime - PT PMLI (IPC Corporate University)/One of PT Pelindo II's Subsidiaries (November 2014 – June 2018)
- Assistant Vice President of Corporate Social Responsibility of PT Pelindo II (Persero) - (2012 – October 2014)

Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis of Appointment

SK Direksi PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19 tanggal 16 Juli 2019.
Decree of the Board of Directors of PT JAI Tbk No. KP.428/1/2/MS-19, dated July 16, 2019.

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya.
No affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners.

Sertifikasi | Certification

- Certified Chief Governance Officer (CCGO)
- Certified Security Analyst (CSA)
- Community Development Officer (CDO)

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK-468/1/9/1/MS-21 Tanggal 1 September 2021 Tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk, yang mencakup:

1. Komunikasi Perusahaan dan CSR
   Komunikasi perusahaan, *corporate branding*, membangun profesional intimasi dengan media & *stakeholders*, mengelola *database* media dan *stakeholders*, pengelolaan *website* (dual Bahasa) dan media sosial, mengelola dan menyusun serta melakukan *press release*, sebagai *bridging* komunikasi antara *ultimate shareholder*, BOC beserta perangkatnya (Sekdekom, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko) dan BOD, penyaluran CSR.
2. Hubungan Investor dan Tata Usaha Direksi
   Membangun dan memperkuat kepercayaan pasar kepada Perusahaan melalui formulasi dan implementasi strategi komunikasi. Mengikuti perkembangan bursa saham domestik, regional dan global. Membangun hubungan baik yang profesional dengan para pelaku pasar. Menyajikan informasi yang relevan dan akurat bagi investor mengenai perkembangan perusahaan, seperti yang terkait dengan kinerja operasional dan keuangan. Bersama sub divisi komunikasi perusahaan dan CSR menyusun dan mendistribusikan *press release* kepada pelaku pasar dan media. Membantu dalam menyiapkan dan menyusun Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Corporate Secretary Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are established based on Decree Number: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024 regarding Amendments to the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number HK468/1/9/1/MS-21 Dated September 1, 2021 Regarding the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which includes:

1. Corporate Communication and CSR
   Corporate communications, corporate branding, building professional intimacy with media & stakeholders, managing media and stakeholder databases, managing websites (dual language) and social media, managing and compiling and conducting press releases, as a bridging communication between ultimate shareholders, BOC and its apparatus (Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee) and BOD, CSR distribution .
2. Investor Relations and Board of Directors Administration
   Building and strengthening market trust in the Company through the formulation and implementation of communication strategies. Follow developments in domestic, regional and global stock exchanges. Building good, professional relationships with market players. Provide relevant and accurate information for investors regarding company developments, such as those related to operational and financial performance. Together with the corporate communications and CSR sub-divisions, prepare and distribute press releases to market players and the media. Assist in preparing and compiling Annual Reports and Sustainability Reports.



Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Struktur organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 yang diterbitkan pada 15 Maret 2024.

Organizational Structure of Corporate Secretary

The organizational structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk is established through the Decree of the Board of Directors Number: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 issued on March 15, 2024.



Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi strategisnya, Sekretaris Perusahaan secara berkelanjutan meningkatkan kualitas kompetensi melalui program pelatihan dan pengembangan yang relevan. Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, antara lain:

Corporate Secretary Competency Development

In order to strengthen the effectiveness of its strategic functions, the Corporate Secretary continuously improves the quality of its competencies through relevant training and development programs. Throughout 2025, the Corporate Secretary has participated in various competency development activities, including:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Type	Materi Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Eddy Haristiani (Sekretaris Perusahaan) (Corporate Secretary	Webinar/Seminar/ OSL	ESG Keynote Session	Ciawi, 28 Februari 2025 Ciawi, February 28, 2025	PT PMLI
	Pelatihan Training	In House Training & workshop internal control over financial reporting (ICOFR)	Jakarta, 14 Mei 2025 Jakarta, May 14, 2025	Parker Russel
	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Certified Securities Analyst	Jakarta, 5 Juli 2025 Jakarta, July 5, 2025	PT Citra Sukses Analis
	Webinar/Seminar/ OSL	*Workshop Merger & Acquisition* pada Perusahaan Terbuka : Strategi, Regulasi dan Peran Corporate Secretary Workshop Merger & Acquisition on Public Company: Strategy, Regulation and Corporate Secretary Role	Jakarta, 10 September 2025 Jakarta, September 10, 2025	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
	Pelatihan & Sertifikasi Training & Certification	Pelatihan dan Sertifikasi *Community Development Officer* (CDO) Community Development Officer (CDO) Training and Certification	Jakarta, 11 Desember 2025 Jakarta, December 11, 2025	Social Impact
	Webinar/Seminar/ OSL	Pelatihan dan Sertifikasi *Community Development Officer* (CDO) Community Development Officer (CDO) Training and Certification Workshop Unlock Your Best Performance	Jakarta, 3 Desember 2025 Jakarta, December 3, 2025	PT PMLI

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Sekretaris Perusahaan menjalankan peran dan kewenangannya secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menjadi penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, regulator, investor, dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Melaksanakan tindak lanjut *improvement area* hasil pengukuran tata kelola perusahaan tahun 2024;
3. Mendukung penerapan dan penguatan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
4. Menyelesaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan dengan batas waktu yang ditentukan dan ikut serta dalam ajang kompetisi terkait;
5. Menyalurkan dana CSR yang tepat sasaran dan tepat guna sesuai visi dan misi perusahaan;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta mendukung kelancaran tugas Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Menyusun dan mendokumentasikan risalah rapat serta arsip korporasi sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan investor/*analyst visit* dan *meeting*;
9. Melaksanakan penyebaran informasi melalui *press release* dan melaksanakan *media gathering*;
10. Mengelola konten informasi perusahaan pada platform media sosial dan *website* serta partisipasi dalam kompetisi bidang kesekretariatan Perusahaan;
11. Melaksanakan penyusunan program K3, pelaksanaan program K3, penyediaan sarana dan prasarana K3 (APAR,Obat P3K, LSP/FFA Kapal), evaluasi program K3;
12. Menjaga reputasi dan kredibilitas Perusahaan sebagai perusahaan terbuka.

AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal bertindak sebagai pengawasan internal yang strategis dengan memberikan keyakinan dan layanan konsultasi yang independen serta objektif kepada manajemen. Peran ini ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperkuat kinerja operasional melalui evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan.

Audit Internal memastikan proses dan kinerja keuangan maupun nonkeuangan, termasuk manajemen mutu dan operasional, berjalan selaras dengan arahan Direktur Utama. Seluruh aktivitas dilaksanakan untuk menjamin kebijakan, keputusan, prosedur, dan pengendalian manajemen diterapkan secara efektif, efisien, berstandar, patuh terhadap ketentuan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika perusahaan.

Corporate Secretary 2025 Duties Report

Throughout 2025, the Corporate Secretary consistently performed his/her roles and authorities in accordance with applicable regulations, with the following duties and responsibilities:

1. Acted as a liaison between the Company and shareholders, regulators, investors, and other stakeholders;
2. Implemented follow-up improvements based on the GCG scoring results from 2024;
3. Supported the implementation and strengthening of Good Corporate Governance principles;
4. Accelerated the completion of the Annual Report and Sustainability Report, surpassing the previous year's deadline, and participated in related competitions;
5. Allocated CSR funds with precision and suitability for designated purposes in line with the Company's vision and mission;
6. Coordinated the implementation of General Shareholders' Meetings (GSM) and supporting the smooth running of the Board of Commissioners and Board of Directors;
7. Prepared and documented meeting minutes and corporate archives in accordance with applicable regulations.;
8. Conducted investor/analyst meetings;
9. Conducted information distribution through press releases and organized media gatherings;
10. Managed corporate information content across social media platforms and websites, also participating in company secretarial competitions;
11. Oversaw the preparation, execution, and evaluation of the Occupational Health and Safety (OHS) program, including the provision of K3 facilities and infrastructure (such as APAR, First Aid Medicine, Ship LSP/FFA);
12. Maintained the Company's reputation and credibility as a public company.

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit function acts as strategic internal oversight by providing independent and objective assurance and consulting services to management. This role is aimed at enhancing the company's value and strengthening operational performance through the evaluation of the effectiveness of risk management, internal controls, and corporate governance.

Internal Audit ensures that financial and non-financial processes and performance, including quality and operational management, are in line with the CEO's directives. All activities are carried out to ensure that management policies, decisions, procedures, and controls are implemented effectively, efficiently, in accordance with standards, in compliance with applicable regulations, and in upholding corporate ethics.



Pengangkatan dan Profil Kepala Audit Internal

Amir Indra Sasongko menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka SPI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/2/4/1/SRA/DUT/JAI-23 tanggal 2 April 2023, yang telah ditandatangani Direksi dan disetujui Dewan Komisaris.

Internal Audit Head Profile and Appointment

Amir Indra Sasongko serves as Head of Internal Audit (Ka SPI) based on PT Jasa Armada Indonesia Tbk Board of Directors Decree Number: KP.10.02/2/4/1/SRA/DUT/JAI-23 date April 2, 2023, which has been signed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.



Amir Indra Sasongko

Kepala Audit Internal
Internal Audit Head

Kewarganegaraan | Citizenship
Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen

Usia | Age
55 tahun Per 31 Desember 2025
55 years old as of December 31, 2025

Domisili | Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Sarjana Sosial (S. Sos), Universitas Krisnadwipayana (1996)
- *Qualified Internal Audit* (QIA), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019)
- Pendidikan Sertifikasi Praktisi Komite Audit *Batch* 37, Indonesia Institute of Audit Committee (2023)
- Bachelor of Social (S. Sos), Krisnadwipayana University (1996)
- Qualified Internal Audit (QIA), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) (2019)
- Batch 37 Audit Committee Practitioner Certification Education, Indonesia Institute of Audit Committee (2023)

Rangkap Jabatan | Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan/instansi lain
Does not hold concurrent positions in other companies/agencies

Pengalaman Kerja | Employment History

Kepala Satuan Pengawasan Intern, PT Pengerukan Indonesia, periode (2016-2023)
Head of Internal Audit Unit, PT Pengerukan Indonesia (2016-2023)

Dasar Hukum Penunjukan | Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: KP.10.02/2/4/1/SRA/DUT/JAI-23 tanggal 2 April 2023
Board of Directors Decree of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: KP.10.02/2/4/1/SRA/DUT/JAI-23 dated April 2, 2023

Hubungan Afiliasi | Affiliated Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya.
No affiliation with major shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners.

Sertifikasi | Certification

- Qualified Internal Audit (QIA)
- Certification in Audit Committee Practices (CACP)
- Qualified Chief Risk Officer (QCRO)

Pedoman Audit Internal

Pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Audit Charter. Piagam Audit Internal Perusahaan telah disusun sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, serta disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada 1 Desember 2025. Audit Charter ini menjadi landasan dalam menetapkan tujuan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan ruang lingkup kerja Internal Audit secara menyeluruh. Adapun cakupan pengaturan dalam Internal Audit Charter meliputi:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Strategi
- Bab III Ruang Lingkup
- Bab IV Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Akuntabilitas

Audit Internal Guideline

The implementation of Internal Audit duties and functions refers to the principles set forth in the Audit Charter. The Company's Internal Audit Charter has been prepared in accordance with POJK No. 56/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Charters, and was approved by the President Director and President Commissioner on December 1, 2025. This Audit Charter serves as the basis for determining the objectives, position, authority, responsibilities, and scope of work of Internal Audit as a whole. The scope of regulations in the Internal Audit Charter includes:

- Chapter I Introduction
- Chapter II Vision, Mission, Objectives, Values, and Strategy
- Chapter III Scope
- Chapter IV Duties, Responsibilities, Authorities, and Accountability

- Bab V Kode Etik
- Bab VI Pengorganisasian
- Bab VII Program Asurans dan Peningkatan Kualitas Audit Internal
- Bab VIII Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- Bab IX Pelaporan dan Monitoring Tindak Lanjut
- Bab X Komunikasi Audit Internal dengan Pihak Lain
- Bab XI Hubungan Kerja dengan Pihak Lain
- Bab XII Evaluasi Piagam Audit Internal
- Bab XIII Penutup

Independensi Audit Internal

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Auditor Internal wajib menjunjung tinggi prinsip independensi dan objektivitas. Untuk menjaga konsistensi penerapan kedua prinsip tersebut, Auditor Internal perlu:

1. Menghindarkan diri dari kondisi benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan objek pengawasan;
2. Bekerja dengan bebas tanpa pengaruh dan campur tangan dari pihak lain;
3. Memetakan, mencatat dan melaporkan suatu hal sesuai dengan kondisi sebenarnya;
4. Menghindarkan diri untuk melaksanakan tugas pada objek pengawasan di mana yang bersangkutan terlibat aktif pada objek pengawasan tersebut dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terakhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang penting dari tata kelola perusahaan, aktivitas Pengawasan Internal memberikan jaminan terhadap sistem pengendalian internal, efektivitas dan efisiensi operasional, ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta ketepatan dan keandalan pelaporan. Adapun Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Audit Internal akan berperan aktif dalam:
   a. Mengembangkan dan menjaga budaya akuntabilitas dan integritas;
   b. Memfasilitasi integrasi sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko ke dalam kegiatan pengelolaan perusahaan sehari-hari;
   c. Mempromosikan budaya efisiensi dan efektivitas kerja, penilaian mandiri serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku baik internal maupun eksternal untuk terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.
2. Ruang lingkup pengawasan internal meliputi namun tidak terbatas pada:
   a. Efektivitas tata kelola, manajemen risiko serta pengendalian internal;
   b. Evaluasi kinerja satuan unit perusahaan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kegiatan Audit Internal meliputi area sebagai berikut:
   a. Kegiatan pengawasan dengan orientasi pada:
      - Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

- Chapter V Code of Ethics
- Chapter VI Organization
- Chapter VII Assurance Programs and Internal Audit Quality Improvement
- Chapter VIII Annual Oversight Program (PKPT)
- Chapter IX Reporting and Follow-up Monitoring
- Chapter X Internal Audit Communication with Other Parties
- Chapter XI Working Relationships with Other Parties
- Chapter XII Evaluation of the Internal Audit Charter
- Chapter XIII Closing

Internal Audit Independency

In performing their supervisory functions, Internal Auditors must uphold the principles of independence and objectivity. To maintain consistency in the application of these two principles, Internal Auditors need to:

1. Avoid conditions of conflict of interest between personal interests and the interests of the object of supervision;
2. Work freely without influence and interference from other parties;
3. Mapping, recording and reporting a matter in accordance with the actual conditions;
4. Avoiding to carry out duties on the object of supervision where the person concerned is actively involved in the object of supervision in a period of less than one year.

Internal Audit Duties and Responsibilities

As one of the important supporting organs of the Board of Directors in corporate governance, Internal Audit activities provide guarantees for the internal control system, operational effectiveness and efficiency, compliance with applicable rules and regulations, as well as accuracy and reliability of reporting. The Internal Audit has the following duties:

1. In carrying out its duties and functions, Internal Audit will play an active role in:
   a. Developing and maintaining a culture of accountability and integrity;
   b. Facilitating the integration of Internal Control and Risk Management systems into daily company management activities;
   c. Promoting a culture of work efficiency and effectiveness, independent assessment, and compliance with applicable laws and regulations, both internal and external, to realize good corporate governance.
2. The scope of internal supervision includes but is not limited to:
   a. Assessing the effectiveness of governance, risk management, and internal control;
   b. Evaluating the performance of company units in achieving predetermined goals and objectives.
3. Internal Audit activities cover the following areas:
   a. Supervision activities with orientation to:
      - Ensure that the management control system is adequate, works efficiently and economically, and functions effectively in achieving the set goals and objectives;



- Pencatatan, pengendalian dan pengelolaan aset dan sumber daya Perusahaan;
- Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur Perusahaan;
- Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional;
- Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan Pengawasan Internal, seperti penyelidikan dan pengungkapan penyimpangan, kecurangan dan pemborosan.

b. Kegiatan Konsultansi dan Asistensi
Audit Internal dapat memberikan konsultansi dan asistensi kepada manajemen perusahaan terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan.

c. Tanggung Jawab Audit Internal.
Audit Internal bertanggung jawab untuk memonitor dan memberikan asistensi tindak lanjut hasil audit kepada *auditee* hingga tuntas.

- Record, control, and manage Company assets and resources;
- Evaluate compliance with applicable laws and regulations, as well as Company policies and procedures;
- Assess the reliability and integrity of financial and operational information;
- Perform special assignments relevant to the scope of Internal Audit work, such as investigating and disclosing irregularities, fraud, and waste.

b. Consultancy and Assistance Activities
Internal Audit can provide consultancy and assistance to company management regarding the implementation of good corporate governance and achieving the Company's goals and objectives.

c. Internal Audit Responsibilities.
Internal Audit is responsible for monitoring and providing follow-up assistance to audit results to auditees until completion.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Fungsi Audit Internal berada di bawah kepemimpinan Kepala Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The Responsible Party to Appoint and Dismiss Internal Audit Head

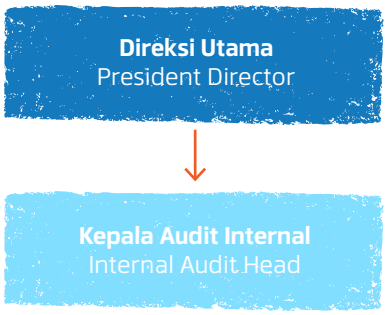
The Internal Audit function is under the leadership of the Head of Internal Audit who is responsible to the President Director. The appointment and dismissal of the Head of Internal Audit is carried out by the President Director through an internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners

Struktur Organisasi Audit Internal

Struktur Audit Internal IPCM disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-468/1/9/1/MS-21 Tanggal 1 September 2021 Tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Susunan Struktur Organisasi Audit Internal adalah sebagai berikut:

Internal Audit Organization Structure

The Company's Internal Audit structure is currently based on the Decree of the Board of Directors Number: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024 regarding Amendments to the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK468/1/9/1/MS-21 Dated September 1, 2021 Regarding the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The Company's Internal Audit Organization Structure is as follows:



Sertifikasi sebagai Profesi SDM Audit Internal

Per 31 Desember 2025, jumlah personel Audit Internal tercatat sebanyak 2 (dua) personel. Adapun sertifikasi profesi yang dimiliki oleh pekerja Audit Internal sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Professional Certification as an Internal Audit

As of December 31, 2025, the Internal Audit department had a total of 2 (two) staff members. The professional certifications held by Internal Audit staff as of the end of 2025 are as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Amir Indra Sasongko	Kepala Audit Internal Head of Internal Audit	▪ QIA (Qualified Internal Audit) ▪ CACP (Certification in Audit Committee Practices) ▪ QCRO (Qualified Chief Risk Officer)
2	Nurwan Bayu Setyawan	Auditor Internal Internal Auditor	QIA (Qualified Internal Audit)

Pengembangan Kompetensi SDM Audit Internal

Dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi strategisnya, Audit Internal secara berkelanjutan meningkatkan kualitas kompetensi melalui program pelatihan dan pengembangan yang relevan. Sepanjang tahun 2025, Audit Internal telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, antara lain:

Internal Audit Competency Development

In order to strengthen the effectiveness of its strategic functions, Internal Audit continuously improves the quality of its competencies through relevant training and development programs. Throughout 2025, Internal Audit has participated in various competency development activities, including:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Training and Education Types	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Location/Date	Penyelenggara Organizer
Amir Indra Sasongko (Kepala Audit Internal) (Internal Audit Head)	Pelatihan Training	Fundamental of IT Auditing	Jakarta, 12-13 Februari 2025 Jakarta, Februari, 12-13 2025	The Institute of Internal Auditors
Nurwan Bayu Setyawan (Auditor Internal) (Internal Auditor)	Pelatihan Training	Internal Audit Training : Integrated Management System	Jakarta, 4 November 2025 Jakarta, November, 4 2025	PT Internasional Sinergi Quanta

Pelaksanaan Tugas Audit Internal Tahun 2025

Selama tahun 2025, fungsi Audit Internal menjalankan peran dan tanggung jawabnya melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dengan melakukan audit secara rutin.
2. Melakukan kegiatan konsultansi dan asistensi kepada manajemen perusahaan terkait penerapan tata kelola perusahaan.
3. Melakukan *monitoring* dan asistensi kepada *auditee* terkait tindak lanjut hasil audit hingga tuntas.

Internal Audit 2025 Duties Report

Throughout 2025, the Internal Audit function carried out its roles and responsibilities through the implementation of the following activities:

1. Conducting supervision by performing audits on a regular basis.
2. Conducting consultancy activities and assistance to company management related to the implementation of corporate governance.
3. Monitoring and providing assistance to auditees regarding the follow-up of audit results until completion.

Rapat Audit Internal

Selama tahun 2025, Komite Audit Internal menyelenggarakan 10 (Sepuluh) kali rapat, dengan rekapitulasi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Internal Audit Meeting

Throughout 2025, the Internal Audit Committee held 10 (ten) meetings, with the following attendance and agenda recap:

Tabel Agenda Rapat Audit Internal
Internal Audit Meeting Agenda Table

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
1	13 Februari 2025 February 13, 2025	*Entry Meeting* Audit Rutin Semester I Tahun 2025 Entry Meeting for the Routine Audit, First Semester of 2025	Para Vice President dan General Manager Area Vice President and General Manager Area
2	16 April 2025 April 16, 2025	Penilaian Profil Risiko dan Peringkat Komposit Risiko Triwulan 1 2025 Risk Profile Assessment and Composite Risk Rating for Q1 2025	VP Keuangan & Manajemen risiko dan DVP Manajemen Risiko VP of Finance & Risk Management and DVP of Risk Management
3	22 Mei 2025 May 22, 2025	Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Maroon Area III Panjang dan Bengkulu Evaluation of the Implementation of Maroon Area III in Panjang and Bengkulu	VP Keuangan & Manajemen risiko dan DVP Manajemen Risiko VP of Finance & Risk Management and DVP of Risk Management



Tabel Agenda Rapat Audit Internal
Internal Audit Meeting Agenda Table

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participants
4	11 Juli 2025 July 11, 2025	Penilaian Profil Risiko dan Peringkat Komposit Risiko Triwulan 2 2025 Risk Profile Assessment and Composite Risk Rating for Q2 2025	VP Keuangan & Manajemen risiko dan DVP Manajemen Risiko VP of Finance & Risk Management and DVP of Risk Management
5	01 Agustus 2025 August 1, 2025	*Entry Meeting* Audit Rutin Semester II Tahun 2025 Entry Meeting for the Routine Audit, Second Semester of 2025	Para Vice President dan General Manager Area Vice President and General Manager Area
6	08 Agustus 2025 August 8, 2025	Rapat Koordinasi Komite Audit Audit Committee Coordination Meeting	Komite Audit Audit Committee
7	06 Oktober 2025 October 6, 2025	Rapat Pembahasan Konfirmasi Draft Hasil Audit Meeting to Discuss and Confirm the Draft of Audit Results	PIC Auditee
8	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Evaluasi/Penilaian Profil Risiko dan Peringkat Komposit Risiko Triwulan 3 Risk Profile Assessment and Composite Risk Rating for Q3 2025	VP Keuangan & Manajemen risiko dan DVP Manajemen Risiko VP of Finance & Risk Management and DVP of Risk Management
9	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Diskusi dan Konfirmasi Draft Hasil Audit Discussion and Confirmation of the Draft of Audit Results	PIC Auditee
10	23 Desember 2025 December 23, 2025	Rapat Tinjauan Efektifitas Manajemen Risiko Tahun 2025 Review Meeting on the Effectiveness of Risk Management in 2025	VP Keuangan & Manajemen Risiko dan DVP Manajemen Risiko VP of Finance & Risk Management and DVP of Risk Management

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Audit Internal
Frequency and Attendance Rate of Internal Audit Meetings

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Amir Indra Sasongko (Kepala Audit Internal) (Head of Internal Audit)	10	10	100%
Nurwan Bayu Setyawan (Auditor Internal) (Internal Auditor)	10	10	100%

Auditor Eksternal
External Auditor

Auditor eksternal merupakan pihak independen yang bertugas memberikan penilaian objektif atas kewajaran dan kepatuhan laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Peran ini dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, profesionalisme, serta akuntabilitas guna menjaga keandalan dan kredibilitas informasi keuangan. Untuk mendukung efektivitas proses pemeriksaan, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak terkait agar pelaksanaan audit berjalan sesuai standar profesional, tepat waktu, serta mampu mengidentifikasi dan merespons setiap potensi permasalahan secara memadai.

External auditors are independent parties tasked with providing objective assessments of the fairness and compliance of financial statements with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. This role is carried out by upholding the principles of independence, professionalism, and accountability in order to maintain the reliability and credibility of financial information. To support the effectiveness of the audit process, good coordination and communication with relevant parties is necessary so that the audit is carried out in accordance with professional standards, in a timely manner, and is able to identify and respond to any potential problems adequately.

KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan. Untuk memastikan independensi dan kualitas pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT POLICY

The appointment of a Public Accounting Firm is determined through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS), considering the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process follows the Company's procurement mechanism for goods and services. To ensure the independence and quality of audit results, the appointed External Auditor must not have any conflicts of interest with the Company.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2025

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja sebagai auditor atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2025 telah memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 18 Juni 2025.

PUBLIC ACCOUNTANT IN 2025

The appointment of Purwanto Susanti and Surja Public Accounting Firm as auditors for the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year has been approved by the shareholders through the Annual General Meeting of Shareholders held on June 18, 2025.

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	Purwanto Susanti dan Surja
Akuntan Accountant	:	Budi Hartono
Tahun Audit Audit Year	:	2025
Periode Penugasan Assignment Period	:	2025-2026
Jasa Service	:	Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 General Audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2025
Biaya Audit Audit Fee	:	Rp1.015.000.000,00 belum termasuk PPN Rp1,015,000,000.00 excluding VAT
Opini Opinion	:	Wajar dalam Semua Hal yang Material Fair in All Material Matters



AKUNTAN PUBLIK DAN BIAYA PERIODE ENAM TAHUN TERAKHIR

PUBLIC ACCOUNTANT AND FEE IN THE LAST SIX YEARS

Daftar Kantor Akuntan Publik Tahun 2020-2025
Public Accounting Firm 2020-2025

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Ruang Lingkup Audit Audit Coverage	Opini Opinion	Biaya Fee
2025	Purwantono Sungkoro Surja	Budi Hartono	Melaksanakan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Conducted an audit and issued an audit report on the financial statements for the year ended December 31, 2025.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp1.015.000.000 (belum termasuk PPN) (excluding VAT)
2024	Purwantono, Sungkoro & Surja	Moch Dadang Syachruna	▪ Melaksanakan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. ▪ Sebagai bagian dari audit, umum melaksanakan prosedur terhadap kepatuhan Perusahaan atas peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2024. ▪ Conduct an audit and issue an audit report on the financial statements for the year ending December 31, 2024. ▪ As part of the audit, perform general procedures on the Company's compliance with laws and regulations and internal controls for the 2024 financial year	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp1.067.000.000 (belum termasuk PPN) (excluding VAT)
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (member firm of Ernst & Young Global Limited)	Moch Dadang Syachruna	Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Financial Statements of 2023 Financial Year	Tidak ada None	Rp984.966.800 (belum termasuk ppn) (excluding VAT)

Daftar Kantor Akuntan Publik Tahun 2020-2025
Public Accounting Firm 2020-2025

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Ruang Lingkup Audit Audit Coverage	Opini Opinion	Biaya Fee
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (member firm of Ernst & Young Global Limited)	Moch. Dadang Syachruna	▪ Melaksanakan audit umum dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. ▪ Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2022. ▪ Sebagai bagian dari audit umum melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2022. ▪ Conduct a general audit and express an opinion on the fairness of the Company's financial statements for the year ending December 31, 2022 ▪ Perform agreed procedures for reports on evaluation results and KPI achievements for the 2022 financial year ▪ As part of the general audit, conducted procedures related to compliance with laws and regulations and internal control for the 2022 financial year	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp918.720.000
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (member firm of Ernst & Young Global Limited)	Moch. Dadang Syachruna	▪ Melaksanakan audit umum dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. ▪ Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi kinerja dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2021. ▪ Sebagai bagian dari audit umum, melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2021. ▪ Menerbitkan *management letter*. ▪ Perform a comprehensive audit and provide an opinion on the accuracy of the Company's financial statements for the year ending December 31, 2021. ▪ Execute agreed procedures for reports on performance evaluation results and Key Performance Indicator (KPI) achievements for the 2021 financial year ▪ Conduct procedures related to compliance with laws and regulations, as well as internal controls, as part of the general audit for the 2021 financial year ▪ Issue a management letter.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp792.000.000 belum termasuk PPN 10% excluding 10% VAT



Daftar Kantor Akuntan Publik Tahun 2020-2025
Public Accounting Firm 2020-2025

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Ruang Lingkup Audit Audit Coverage	Opini Opinion	Biaya Fee
2020	Purwantono Sungkoro & Surja	Moch. Dadang Syachruna	▪ Melaksanakan audit umum dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. ▪ Melaksanakan prosedur yang disepakati atas laporan hasil evaluasi kinerja dan pencapaian KPI untuk tahun buku 2020. ▪ Sebagai bagian dari audit umum, melaksanakan prosedur terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tahun buku 2020. ▪ Menerbitkan *management letter*. ▪ Menyampaikan laporan dalam bentuk tertulis sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan dalam bentuk *soft copy* untuk setiap lingkup pekerjaan. ▪ Perform a comprehensive audit and provide an opinion on the accuracy of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2020. ▪ Execute agreed procedures for reports on performance evaluation results and Key Performance Indicator (KPI) achievements for the 2020 financial year ▪ Conduct procedures related to compliance with laws and regulations, as well as internal controls, as part of the general audit for the 2020 financial year ▪ Issue a management letter. ▪ Submit written reports consisting of 10 (ten) hard copies and soft copies for each scope of work.	Laporan Keuangan Disajikan Secara Wajar Dalam Semua Hal yang Material Financial Reports Are Presented Fairly in All Material Matters	Rp750.000.000

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perusahaan menempatkan Sistem Pengendalian Internal sebagai pilar utama dalam menjaga kualitas tata kelola dan keberlangsungan usaha. Sistem ini dirancang secara komprehensif dan terintegrasi untuk mengendalikan risiko, mencegah penyimpangan, serta memastikan seluruh aktivitas operasional dilaksanakan secara efektif, transparan, dan selaras dengan kebijakan serta standar yang berlaku.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal memastikan keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsistensi pelaksanaan di seluruh lini organisasi memperkuat disiplin operasional, integritas, dan akuntabilitas, sekaligus membangun budaya pengendalian yang kokoh dan berkelanjutan.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN DENGAN COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

IPCM menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang mengacu pada kerangka kerja Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yang mencakup 5 (lima) komponen utama sebagai elemen pembentuk sistem pengendalian yang efektif, sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur.
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*).
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan.
4. Proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi.

The company places Internal Control Systems as a key pillar in maintaining the quality of governance and business continuity. This system is designed to be comprehensive and integrated to control risks, prevent irregularities, and ensure that all operational activities are carried out effectively, transparently, and in line with applicable policies and standards.

The implementation of the Internal Control System ensures the reliability of financial reporting, asset protection, and compliance with laws and regulations. Consistent implementation across all lines of the organization strengthens operational discipline, integrity, and accountability, while building a strong and sustainable culture of control.

COMPLIANCE OF THE COMPANY'S INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

IPCM implements an Internal Control System that refers to the framework of the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), which includes five main components as elements that form an effective control system, as follows:

1. The internal control environment within the Company is implemented in a disciplined and structured manner.
2. Assessment of business risk management (risk assessment).
3. Control activities, namely actions carried out to control company activities at each level and unit in the Company's organizational structure.
4. The process of presenting reports regarding operational and financial activities, as well as compliance and adherence to statutory provisions.
5. The process of assessing the quality of the internal control system, including the internal audit function at each level and unit in the organizational structure.



EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara optimal, Perusahaan melaksanakan mekanisme penilaian dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh. Evaluasi ini menilai efektivitas dan efisiensi penerapan sistem pengendalian, sekaligus memastikan pemantauan berkelanjutan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit guna memperkuat pengendalian internal seiring pertumbuhan Perusahaan.

Divisi Audit Internal pada PT Jasa Armada Indonesia Tbk bertugas membantu Direksi dan Manajemen dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Perusahaan, maka Audit Internal harus dapat memberikan keyakinan, bahwa aktivitas manajemen telah sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditentukan dalam prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas, kepatuhan dan tata kelola serta semua risiko yang telah teridentifikasi dan dikelola secara memadai. Audit Internal juga senantiasa memberikan konsultansi yang independen dan obyektif kepada manajemen.

Sasaran pengawasan internal dalam tahun 2025 ditekankan pada penilaian efektivitas manajemen risiko Perusahaaan, kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, efisiensi dan efektifitas suatu proses bisnis, sebagai upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya yang ada dan kecukupan waktu pelaksanaan audit, serta pengawasan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal.

Berikut rincian pelaksanaan aktivitas pada tahun 2025:

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEMS

To ensure that the internal control system functions optimally, the Company implements a periodic and comprehensive assessment and evaluation mechanism. This evaluation assesses the effectiveness and efficiency of the implementation of the control system, while ensuring continuous monitoring and follow-up on audit recommendations to strengthen internal control in line with the Company's growth.

The Internal Audit Division at PT Jasa Armada Indonesia Tbk is tasked with assisting the Board of Directors and Management in carrying out their mission to achieve the Company's vision. Therefore, Internal Audit must be able to provide assurance that management activities are in line with the Company's objectives as stipulated in the principles of Good Corporate Governance (GCG), taking into account factors such as efficiency and effectiveness, compliance and governance, as well as all risks that have been identified and managed adequately. Internal Audit also consistently provides independent and objective consultation to management.

The objectives of internal oversight in 2025 emphasize the assessment of the effectiveness of the Company's risk management, the Company's compliance with applicable laws and regulations, the efficiency and effectiveness of business processes, as an effort to achieve the targets that have been set by considering the available resources and the adequacy of the time for conducting audits, as well as monitoring the implementation of follow-up recommendations from internal audit results.

The following are details of activities to be carried out in 2025:

Jumlah Penugasan Pada Tahun 2025
Number of Assignments in 2025

PENUGASAN AUDIT AUDIT ASSIGNMENT	WILAYAH AREA	DIREKTORAT DIRECTORATE
Audit Rutin Semester I tahun 2025 Dasar Penugasan Surat Perintah Nomor: PW.02.01/10/2/1/SRA//-25 Regular Audit for Semester I of 2025 Basis for Assignment of Letter of Order Number: PW.02.01/10/2/1/SRA//-25	5	10
Audit Rutin Semester II tahun 2025 Dasar Penugasan Surat Perintah Nomor: PW20.01/1/8/1/SRA/DKS/JAI-25 Regular Audit for Semester II of 2025 Basis for Assignment of Letter of Order Number: PW20.01/1/8/1/SRA/DKS/JAI-25	5	10

Dapat disampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap realisasi tindak lanjut rekomendasi laporan hasil audit internal yang ada dilakukan oleh Divisi Audit Internal dilakukan secara aktif berkesinambungan dengan menghubungi para *Auditee*, untuk memaksimalkan realisasi tindak lanjut rekomendasi yang diperlukan di internal dan eksternal sebagai laporan periodik kepada manajemen.

It can be stated that the supervision implementation on the follow-up realization of the recommendations of the existing internal audit report is carried out by the Internal Audit Division actively on an ongoing basis by contacting the Auditees, to maximize the realization of the follow-up recommendations required internally and externally as periodic reports to management.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perusahaan menempatkan sistem pengendalian internal sebagai fondasi utama dalam menjamin keandalan operasional. Manajemen memikul tanggung jawab penuh terhadap efektivitas sistem ini sekaligus mendorong budaya kesadaran risiko di seluruh lapisan organisasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, implementasi sistem pengendalian internal telah memenuhi standar yang berlaku. Dengan mempertimbangkan hasil tersebut, Direksi bersama Dewan Komisaris menegaskan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi secara optimal, tanpa adanya indikasi penyimpangan atau kelemahan signifikan.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company places internal control systems as the main foundation in ensuring operational reliability. Management bears full responsibility for the effectiveness of this system while promoting a culture of risk awareness throughout all levels of the organization. Based on the evaluation conducted, the implementation of the internal control system has met applicable standards. Considering these results, the Board of Directors and Board of Commissioners affirm that the Company's internal control system is functioning optimally, with no indications of significant deviations or weaknesses.





Manajemen Risiko
Risk Management

Perusahaan menyadari bahwa dinamika bisnis selalu diiringi oleh berbagai risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan pencapaian target. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengenali dan mengelola risiko menjadi hal yang esensial dalam operasional sehari-hari.

Manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk mengurangi dampak ketidakpastian, tetapi juga sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan yang lebih cermat dan terarah. Dengan pendekatan yang sistematis, perusahaan dapat mengantisipasi tantangan serta mengoptimalkan peluang demi menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang baik, perusahaan menerapkan sistem manajemen risiko sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yang mengacu pada tiga elemen utama dalam implementasinya.

1. Kebijakan atau komitmen yang dipegang oleh BOD Perusahaan. Kebijakan tersebut mutlak harus disosialisasikan sehingga dipahami oleh seluruh level personal perusahaan.
2. Perencanaan sistem manajemen risiko yang merambah pada bidang anggaran, struktur organisasi, kinerja hingga sumber daya manusia. Agar sistem manajemen risiko perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi dan aktual perusahaan.
3. Penerapan sistem manajemen risiko yang mengadaptasi siklus *plan*, *do*, *check*, *action*. "Agar sistem dapat diterapkan dan mendapatkan manfaat. Penerapan sistem manajemen risiko juga terintegrasi kepada setiap lini bisnis dan diawasi oleh BOD dan BOC sehingga penerapannya lebih efektif.

GAMBARAN UMUM MENGENAI SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko semakin menjadi perhatian utama bagi Perusahaan. Dalam menyusun Rencana Kerja Manajemen untuk tahun 2025, Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko. Pengelolaan risiko tersebut berlandaskan pada:

1. Isu – Isu baik internal maupun eksternal serta harapan pihak – pihak yang berkepentingan.
2. Ketepatan Investasi dengan melakukan pengelolaan risiko Investasi, maka akan dapat terserap seluruh alokasi anggaran, dan tidak muncul tambahan biaya dalam Investasi yang telah direncanakan.
3. Ketepatan Biaya setelah diketahui program kerja dan rencana Investasi pada tahun yang akan datang, maka perusahaan dapat menetapkan anggaran biaya sehingga penggunaan biaya yang efisien dalam mencapai visi perusahaan.

The company recognizes that business dynamics are always accompanied by various risks that can affect performance and the achievement of targets. Therefore, the ability to identify and manage risks is essential in day-to-day operations.

Risk management not only serves to mitigate the impact of uncertainty, but also serves as the foundation for more careful and targeted decision-making. With a systematic approach, companies can anticipate challenges and optimize opportunities to ensure business sustainability and growth.

As part of its commitment to good governance, the company has implemented a risk management system in accordance with applicable laws and regulations, which is based on three key elements.

1. Policies Policies or commitments established by the Company's Board of Directors (BOD). These policies must be thoroughly communicated to ensure understanding across all levels of company personnel.
2. Planning of a risk management system that encompasses budgeting, organizational structure, performance, and human resources. This ensures the Company's risk management system operates effectively in alignment with actual company conditions.
3. Implementation silmplementation of a risk management system that adheres to the plan-do-check-action (PDCA) cycle. To ensure that the system can be implemented and get benefits, the implementation of the risk management system is also integrated into each line of business and supervised by the BOD and BOC so that its implementation is more effective.

OVERVIEW OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Understanding the importance of risk management has increasingly become a top priority for the Company. In developing its Management Work Plan for 2025, the Company has incorporated risk management principles. This risk management approach is based on:

1. Internal and external issues, and stakeholders expectations.
2. Investment accuracy through the management of investment risks to ensure that the entire budget allocation is absorbed and that no additional costs arise beyond the planned investment.
3. Cost accuracy once the work programs and investment plans for the coming year are determined to allow the Company to determine cost budgets to enable efficient cost utilization in achieving the Company's vision.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Perusahaan menerapkan pendekatan yang terstruktur dalam mengelola risiko, yang terdiri dari model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-2/MBU/03/2023, tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 51 sebagaimana dalam aturan internal Perusahaan diimplementasikan dalam Peraturan Direksi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/24/3/2/TRK/OUT/JAI-25 tanggal 24 Maret 2025.

Perusahaan menerapkan model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) di mana Pemilik risiko bertanggung jawab langsung atas pengelolaan risiko, fungsi manajemen risiko menyediakan kerangka kerja, dan Audit Internal memastikan kepatuhan dan efektivitas. Dengan kerja sama antara ketiga lini ini, Perusahaan meningkatkan pengelolaan risiko secara efektif.

THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

Perusahaan menerapkan pendekatan yang terstruktur dalam mengelola risiko, yang terdiri dari model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-2/MBU/03/2023, tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 51 sebagaimana dalam aturan internal Perusahaan diimplementasikan dalam Peraturan Direksi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/24/3/2/TRK/OUT/JAI-25 tanggal 24 Maret 2025.

Perusahaan menerapkan model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*) di mana Pemilik risiko bertanggung jawab langsung atas pengelolaan risiko, fungsi manajemen risiko menyediakan kerangka kerja, dan Audit Internal memastikan kepatuhan dan efektivitas. Dengan kerja sama antara ketiga lini ini, Perusahaan meningkatkan pengelolaan risiko secara efektif.





Dengan model ini, Perusahaan berupaya memperkuat pengendalian internal terhadap berbagai risiko yang berpotensi muncul. Melalui pendekatan yang terkoordinasi, Perusahaan dapat lebih optimal dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons risiko, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap operasional dan keberlangsungan bisnis.

Model ini juga mendukung komunikasi yang efektif di antara berbagai pemangku kepentingan dalam manajemen risiko, memastikan penyampaian dan pemrosesan informasi yang relevan secara cepat. Dengan begitu, Perusahaan dapat merespons perubahan lingkungan yang dinamis dengan lebih tepat waktu dan efisien.

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

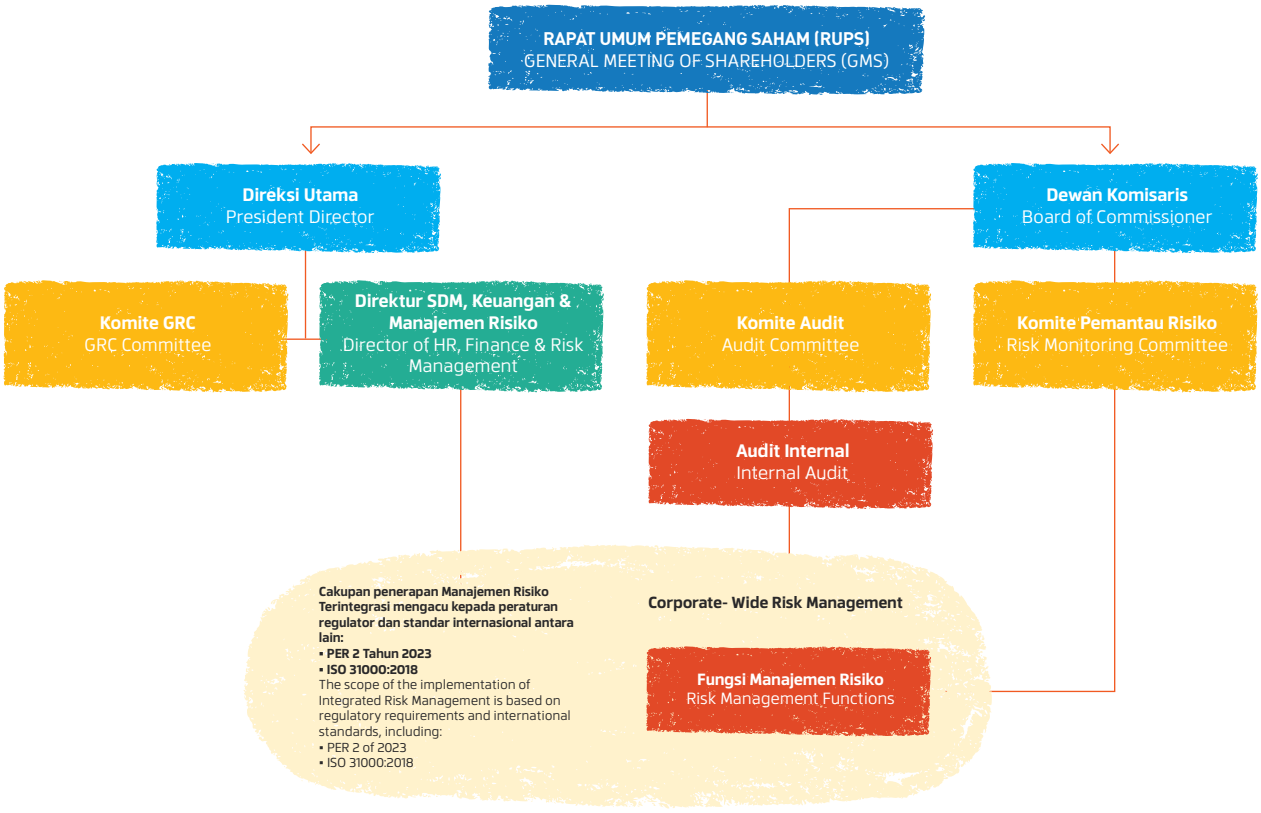
Pengelolaan manajemen risiko di IPCM dibawah Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor:HK-568/1/9/1MS-21 Tanggal 1 September 2021 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

With this model, the Company aims to strengthen internal controls against various potential risks. Through a coordinated approach, the Company can more effectively identify, assess, and respond to risks, thereby minimizing negative impacts on operations and business continuity.

This model also supports effective communication among various stakeholders in risk management, ensuring the timely delivery and processing of relevant information. As a result, the Company can respond to a dynamic changing environment in a more timely and efficient manner.

RISK MANAGEMENT STRUCTURE

Risk management at IPCM falls under the Directorate of Finance, Human Resources, and Risk Management. This is implemented in accordance with the Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024, which is an amendment to the Board of Directors Decree Number: HK-568/1/9/1MS-21 dated September 1, 2021 concerning the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.



1. Struktur organisasi Manajemen Risiko didasarkan pada filosofi bahwa proses Manajemen Risiko yang efektif tercapai apabila perusahaan berhasil membangun komitmen yang kuat dari Direksi dan Dewan Komisaris, serta berhasil mengintegrasikan proses Manajemen Risiko ke dalam seluruh proses bisnis perusahaan.
2. Perusahaan memiliki organ komite di bawah Komisaris yang fungsinya memantau aktivitas pengelolaan manajemen risiko perusahaan.

1. The Risk Management organizational structure is based on the philosophy that an effective Risk Management process is achieved if the Company succeeds in building a strong commitment from the Board of Directors and the Board of Commissioners, and successfully integrates the Risk Management process into all business processes of the company.
2. The Company has a committee under the Board of Commissioners whose function is to monitor the Company's risk management activities.

3. Perusahaan menetapkan struktur kuasi di mana setiap unit memiliki Agen Risiko masing-masing (*Risk Agent*) yang ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.01/5/5/2KEU/DUT/JAI-25 tanggal 5 Mei 2025.
4. Untuk memastikan implementasi dan menjaga proses Manajemen Risiko dapat berjalan secara baik dan pengendalian yang efektif dan efisien, Direksi menetapkan kepala unit yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan. Mereka bertugas menjabarkan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*/"ERM") menjadi pedoman, prosedur, dan instruksi kerja serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penerapannya.

Kegiatan-Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko di tahun 2026:

1. *Updating* Pedoman penerapan manajemen risiko;
2. Penetapan SKD Pembentukkan *Risk Champion*, *Risk Agent* dan *Risk Officer*;
3. *Updating* SOP pengelolaan risiko operasional dan investasi;
4. Penetapan SOP pengelolaan risiko non program kerja;
5. Penetapan komitmen dan penuansaan budaya manajemen risiko (BOC, BOD, BOD-1 dan *General Manager*);
6. Penetapan strategi risiko pada buku RKAP 2025;
7. Penyusunan dan evaluasi Profil risiko signifikan 2025 serta Pelaporan *monitoring* s.d Desember 2025 kepada BOC dan *Subholding*;
8. Sosialisasi Komitmen, Perdir, SOP melalui Nota Dinas ke seluruh Direksi, VP dan GM;
9. Penyusunan dan submit dokumen *Internal Control Financial Reporting;*
10. Telah dilaksanakan penyusunan RKAP 2026 berbasis risiko;
11. Implementasi Program Budaya (JARING dan Keikutsertaan GRC Award 2025 kategori (VIRAL, RIVAL dan RACE));
12. Telah dilaksanakan sertifikasi untuk DVP Manajemen Risiko CRMP tanggal 15 – 22 September 2025;
13. *Updating* Tata Kelola BCM, pelaksanaan *threat assessment*, *workshop* BCM, dan Uji *Drill* tanggal 18 Desember 2025;
14. Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) 2025 Tahun Buku 2024 *Cross Assessment* SPJM;
15. Pelaksanaan Survei Manajemen Risiko;
16. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen bidang Manajemen Risiko.

RISIKO PERUSAHAAN DAN UPAYA MITIGASI RISIKO

Perusahaan mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk memahami sumber serta dampaknya. Profil risiko kemudian disusun dengan penjelasan mengenai langkah mitigasi yang telah dijalankan, yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.

3. The Company has established a quasi-structure in which each unit has its own Risk Agent, as designated in Board of Directors' Decision No. HK.01/5/5/2KEU/DUT/JAI-25 dated May 5, 2025.
4. To ensure the implementation and maintain the Risk Management process can run well and with effective and efficient control, the Board of Directors establishes the head of the unit responsible for managing corporate risk. They are tasked with translating the Enterprise Risk Management ("ERM") policy into guidelines, procedures, and work instructions as well as providing guidance and coordination in its implementation.

Risk Management Implementation Activities in 2026:

1. Updating the Guidelines for the Risk Management Implementation;
2. Issuance of SKD for the establishment of Risk Champions, Risk Agents, and Risk Officers;
3. Updating the SOP for operational and investment risk management;
4. Establishment of an SOP for managing non-work program risks;
5. Establishment of commitment and reinforcement of a risk management culture (Board of Commissioners, Board of Directors, BOD-1, and General Managers);
6. Determination of risk strategies in the 2025 RKAP;
7. Preparation and evaluation of the 2025 significant risk profile, as well as submission of monitoring reports up to December 2025 to the BOC and Subholding;
8. Socialization of commitments, Director Regulations, and SOPs through Official Memos to all Directors, Vice Presidents, and General Managers;
9. Preparation and submission of Internal Control over Financial Reporting (ICFR) documents;
10. Completion of the preparation of the 2026 RKAP based on risk;
11. Implementation of Cultural Programs (JARING and participation in the 2025 GRC Awards in the categories of VIRAL, RIVAL, and RACE);
12. Completion of CRMP certification for the Deputy Vice President of Risk Management on September 15-22, 2025;
13. Updating BCM Governance, threat assessments implementation, BCM workshops, and Drill Testing on December 18, 2025;
14. Assessment of the 2025 Risk Maturity Index (RMI) for Financial Year 2024 through SPJM Cross Assessment;
15. Conduct of a Risk Management Survey;
16. Conduct of a Management Review Meeting in the area of Risk Management.

COMPANY RISK AND MITIGATION EFFORTS

Perusahaan mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk memahami sumber serta dampaknya. Profil risiko kemudian disusun dengan penjelasan mengenai langkah mitigasi yang telah dijalankan, yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.



No.	Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi Mitigation
1	**M&A dan Aksi Korporasi** Keterlambatan dalam aksi korporasi Pemurnian Bisnis **M&A and Corporate Actions** Delays in corporate actions related to Business Streamlining	▪ Inisiasi kajian singkat pemurnian bisnis PT JAI - PT PMS ▪ Rapat koordinasi RFI/Q konsultan bisnis dan *financial advisor* Perusahaan ▪ Koordinasi pemurnian bisnis bersama pemegang saham & PT PMS ▪ *Benchmarking* & Pelatihan terkait M&A ▪ *Public Expose* Perusahaan ▪ Initiation of a brief study on business streamlining between PT JAI and PT PMS ▪ Coordination meetings for the Request for RFI/Q with the Company's business consultants and financial advisors ▪ Coordination on business streamlining with shareholders and PT PMS ▪ Benchmarking and training related to M&A ▪ Public Expose
2	**Reputasi Perusahaan** Turunnya reputasi perusahaan **Corporate Reputation** Decline in the Company's reputation	▪ Program Komunikasi Eksternal: a. Pembinaan Hubungan dengan Media, b. Kegiatan Pameran dan *Sponsorship*, c. Implementasi *Brand Guidelines* ▪ Optimalisasi *Corporate Branding and Marketing Communication* MEPS; a. Pengelolaan *Social Media* dan *Website*, b. *Marketing Communication* ▪ Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan a. Pengukuran Program TJSL dengan metode SROI, b. Peningkatan Program Kolaborasi TJSL, c. Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan ▪ External Communication Programs: a. Media relations development, b. Exhibitions and sponsorship activities, c. Brand Guidelines implementation ▪ Optimization of MEPS Corporate Branding and Marketing Communication, a. Social media and website management, b. Marketing communications ▪ Social and Environmental Responsibility Programs: a. Measurement of TJSL programs using the SROI method, b. Enhancement of collaborative TJSL programs, c. Implementation of community social activities
3	**Kepatuhan** Rendahnya budaya risiko di Perusahaan **Compliance** Low level of risk culture within the Company	▪ *Risk Alignment* : Penyelarasan Fundamental Manajemen Risiko sesuai ketentuan Regulasi Internal dan Eksternal (PER 2 Tahun 2023) ▪ *Updating* Tata Kelola Manajemen Risiko (Komitmen, Perdir, SOP, Strategi Risiko) ▪ Penetapan Strategi & Profil risiko Perusahaan operasional dan Investasi ▪ Standardisasi kompetensi SDM organ pengelola risiko *monitoring* realisasi mitigasi risiko 2025 Bulanan dan Triwulanan ▪ Pelaksanaan program Pelatihan dan sertifikasi organ pengelola risiko ▪ Penyusunan Risiko 2026 yang terintegrasi dengan sasaran, RKM dan RKAP ▪ Penyusunan tata kelola BCM dan *drill* ▪ Evaluasi Triwulanan dengan Dekom dan *Subholding* ▪ Survei Manajemen Risiko ▪ *Assessment* RMI Tahun Buku 2024 ▪ Risk Alignment: Alignment of Fundamental Risk Management in accordance with Internal and External Regulatory Requirements (PER No. 2 of 2023) ▪ Updating Risk Management Governance (commitment, Board of Directors regulations, SOPs, and risk strategy) ▪ Establishment of the Company's operational and investment risk strategy and risk profile ▪ Standardization of human resource competencies for risk management organs ▪ Monthly and quarterly monitoring of the realization of risk mitigation in 2025 ▪ Implementation of training and certification programs for risk management organs ▪ Preparation of the 2026 risk profile integrated with corporate objectives, RKM, and RKAP ▪ Development of BCM governance and drills ▪ Quarterly evaluations with the Board of Commissioners and Subholding ▪ Risk Management Survey ▪ Risk Maturity Index (RMI) Assessment for FY 2024
4	**Sales & Marketing** Kehilangan pangsa pasar **Sales & Marketing** Loss of market share	Kerja sama layanan MEPS dengan terminal dan BUP di luar wilayah pelindo melalui: ▪ Pengembangan pasar baru ▪ Menjalin kerja sama dengan BUP pemilik pelimpahan ▪ Membuat *feasibility study* tentang pasar baru ▪ Kerja sama penyediaan sarana bantu pemanduan dan bisnis turunan jasa kepelabuhanan MEPS service cooperation with terminals and BUPs outside the Pelindo area through: ▪ Development of new markets ▪ Establishing cooperation with BUP owners of cargo transfer ▪ Preparation of feasibility studies for new markets ▪ Cooperation in the provision of pilotage support facilities and downstream port service businesses

No.	Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi Mitigation
5	**Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)** Kecelakaan kerja di Area Kerja Pelabuhan **Occupational Health and Safety (OHS)** Workplace accidents in port operational areas	▪ Pelaksanaan *Safety Patrol* untuk Operasional ▪ Pelaksanaan *Safety Briefing* untuk Operasional ▪ Penyusunan Laporan Performansi Kapal secara berkala ▪ Pelaksanaan *fit to work* ▪ Pelaksanaan *Management Walkthrough Crew* ▪ Pelatihan terkait K3 ▪ Simulasi Tanggap Darurat (kantor pusat, Area 1 & *Central Workshop*) ▪ Implementation of Safety Patrols for operations ▪ Conducting Safety Briefings for Operations ▪ Preparation of periodic Vessel Performance Reports ▪ Implementation of fit-to-work programs ▪ Conducting management walkthroughs for crews ▪ OHS training ▪ Emergency Response Simulations (Head Office, Area 1 & Central Workshop)
6	**Pelaksanaan Investasi** Keterlambatan Penyerapan Investasi **Investment Implementation** Delays in investment absorption	▪ Melakukan pengadaan kapal ▪ Optimalisasi Armada Eksisting dan Penyewaan Kapal (*Charter*) sebagai Alternatif Sementara untuk tetap menjaga pelayanan operasional ▪ Procurement of vessels ▪ Optimization of the Existing Fleet and Vessel Chartering as a temporary alternative to maintain operational services
7	**Peningkatan Biaya** Peningkatan biaya BBM kapal **Cost Increases** Increase in vessel fuel (BBM) costs	▪ Analisis Penggunaan BBM ▪ Optimalisasi program penggunaan HG dan SC ▪ *Monitoring* implementasi standar konsumsi BBM ▪ Analysis of fuel oil (BBM) usage ▪ Optimization of the use of HG and SC programs ▪ Monitoring the implementation of fuel consumption standards
8	***Environmental Social Governance* (ESG)** Ketidakefektifan implementasi ESG **Environmental, Social, and Governance (ESG)** Ineffective implementation of ESG	▪ Penyusunan dan penetapan *Framework* dan *Roadmap* ESG (pedoman ESG) ▪ Pelaporan SR kepada OJK ▪ Preparation and establishment of the ESG Framework and Roadmap (ESG guidelines) ▪ SR submission to the OJK
9	**Keamanan Jaringan (TK2)** *Cyber attack* **Network Security (TK2)** Cyberattacks	▪ *Training user* ▪ *Infrastructure firewall* yang bekerja sama dengan ILCS ▪ Migrasi data to *cloud*'- Bekerja sama dengan PT ILCS untuk melaksanakan pengadaan antivirus (*train micro*) ▪ User training ▪ Firewall infrastructure in cooperation with ILCS ▪ Data migration to the cloud ▪ Cooperation with PT ILCS for the procurement of antivirus software (train micro)

KOMPOSISI KEANGGOTAAN & SERTIFIKASI DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Per 15 Maret 2024, Fungsi Manajemen Risiko bergabung kepada Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko dalam rangka pemenuhan aturan *Three lines* model berjumlah 3 (Tiga) orang yang meliputi 1 (satu) VP Keuangan & Manajemen Risiko, 1 (satu) DVP Manajemen Risiko dan 1 (satu) Staff.

Personil yang ditugaskan pada Manajemen Risiko aktif mengikuti sejumlah program sertifikasi dan pelatihan yang relevan dengan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualifikasi mereka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka sehingga diharapkan pengelolaan risiko Perusahaan juga dapat berjalan efektif karena dikelola oleh orang-orang yang berkompetensi tinggi.

Berikut ini adalah beberapa jenis sertifikasi/Pelatihan yang sudah dimiliki oleh sejumlah Personil Pengelola Manajemen Risiko Perusahaan, antara lain:

MEMBERSHIP COMPOSITION & RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

In 2024, the Risk Management Function was transferred to the Directorate of Finance, Human Resources, and Risk Management, in accordance with the implementation of the 3rd line model. This function consists of 3 (three) people, namely 1 (one) VP of Finance & Risk Management, 1 (one) DVP of Risk Management, and 1 (one) Staff.

Risk Management personnel actively participate in various relevant certification programs to enhance their knowledge and competence. These efforts aim to support the smooth execution of duties and responsibilities, while ensuring that the Company's risk management is carried out effectively by competent personnel.

The following are some of the certifications and training programs that have been completed by the Company's Risk Management personnel:



Sertifikasi/Pelatihan Mitigation	Jumlah Karyawan Number of Employee
Certified Risk Management Professional (CRMP)	1
Qualified Risk Management Professional (QRM0)	1
Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	2
Pelatihan *Business Continuity Management System* (BCMS)	30

Selain itu, secara konsisten Perusahaan juga aktif melakukan pendekatan kepada *Risk Owner* dan *Risk Agent* melalui suatu program JAI Risk *Intensive Meeting* (JARING) yang telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2025 dengan mengangkat tema-tema menarik dan evaluasi atas implementasi Manajemen Risiko Triwulanan dan diikuti oleh perwakilan *Risk Agent* dan *Risk Owner* setiap unit kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan pengetahuan setiap *Risk Owner* dan *Risk Agent* pada risiko yang mereka miliki.

In addition, the Company has consistently engaged with Risk Owners and Risk Agents through the JAI Risk Intensive Meeting (JARING) program, which was held four times throughout 2025. These meetings featured compelling topics and evaluations of the implementation of quarterly risk management, and were attended by representatives of Risk Agents and Risk Owners from each work unit. This aims to enhance the awareness and knowledge of each Risk Owner and Risk Agent regarding the risks they manage.

PENILAIAN RISIKO TERKAIT IT

IPCM berkomitmen untuk terus menjaga data dan dokumen perusahaan dari Risiko *Cyber* dengan penerapan teknologi dan IT meliputi:

1. Penggunaan *system firewall* pada jaringan;
2. Adanya *system backup* baik data maupun aplikasi;
3. Menyiapkan prosedur operasi manual jika terjadi *down system*;
4. Melakukan pemulihan (*recovery*) sistem aplikasi.

IT RISK ASSESSMENT

IPCM is committed to continuously protecting the company's data and documents from cyber risks through the implementation of technology and IT solutions, including:

1. Use of a firewall system on the network;
2. Existence of a backup system for both data and applications;
3. Preparation of manual operating procedures in the event of a system crash;
4. Performing application system recovery.

Pada tahun 2025, Risiko terkait keamanan data ini telah direalisasikan *Training user*, pengadaan *Infrastructure firewall* yang bekerja sama dengan ILCS untuk keamanan jaringan dan Migrasi data *to cloud*'- Bekerja sama dengan PT ILCS untuk melaksanakan pengadaan antivirus (*train micro*). Secara data Tidak adanya serangan – serangan IT (aman) yang berdampak signifikan pada sistem aplikasi maupun data Perusahaan sehingga risiko dapat diturunkan yang semula pada level *Moderate To High* menjadi *Low To Moderate*.

By 2025, these data security risks have been addressed through user training, the procurement of firewall infrastructure in collaboration with ILCS for network security, and data migration to the cloud—in collaboration with PT ILCS to implement antivirus software (Train Micro). In terms of data, there were no IT attacks (secure) that had a significant impact on the Company's application systems or data, thereby reducing the risk from the original Moderate to High level to Low to Moderate.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO DI TAHUN 2025

Untuk memastikan efektivitas atas penerapan manajemen risiko di Perusahaan pada tahun 2025, telah dilakukan evaluasi atas risiko oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko kepada unit terkait yang bertanggung jawab dalam proses tersebut. Evaluasi dan peninjauan manajemen risiko dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat risiko yang dihadapi, mendeteksi potensi risiko baru, serta menentukan langkah mitigasi yang diperlukan guna mengatasi berbagai risiko tersebut. Efektivitas evaluasi manajemen risiko diukur

RISK MANAGEMENT SYSTEM EVALUATION EFFECTIVENESS

To ensure the effectiveness of risk management implementation at the Company by 2025, the Board of Directors and the Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, have conducted a risk assessment of the relevant units responsible for the process. Risk management evaluations and reviews are conducted to identify the level of risk faced, detect potential new risks, and determine the necessary mitigation measures to address these risks. The effectiveness of risk management evaluation is measured based on the ability of mitigation

berdasarkan kemampuan mitigasi dalam menurunkan tingkat risiko yang berpotensi terjadi dan diintegrasikan ke *capital allocation* perusahaan. Sebagai perusahaan jasa kepelabuhanan yang padat aset dan berorientasi keselamatan, integrasi manajemen risiko ke dalam *capital allocation* harus dilakukan secara sistematis dan berbasis risiko.

Setiap keputusan alokasi belanja modal (CAPEX) dan investasi—baik untuk pengadaan armada, peremajaan kapal, maupun pengembangan layanan perlu dievaluasi tidak hanya dari sisi kelayakan finansial (NPV, IRR), tetapi juga dari kajian risiko yang komprehensif, namun tidak terbatas pada risiko operasional, keselamatan, kepatuhan, lingkungan, dan risiko pasar, yang dapat diterima sesuai *risk appetite* perusahaan. Proyek dengan eksposur risiko tinggi harus disertai dengan mitigasi yang jelas dan disertakan cadangan modal (*capital buffer*) yang memadai. Dengan pendekatan ini, *capital allocation* tidak hanya menjadi alat pertumbuhan, tetapi juga instrumen pengendalian risiko strategis, sehingga ketahanan keuangan (*financial resilience*) dan keberlanjutan operasional JAI dapat terjaga dalam jangka panjang.

Pada tahun 2025 pengelolaan Manajemen Risiko dinilai cukup efektif yang ditunjukkan bahwa penilaian atas tingkat *Inherent Risk* dari semula total 10 (Delapan) Risiko Utama terdapat 8 (Delapan) risiko dengan tingkat risiko *Moderate to High* (4) dari skala 1-5 (*Low – High*) dan Dewan Komisaris menilai keberhasilan Direksi dalam menjaga seluruh risiko residual berada dalam batas selera risiko, termasuk penurunan eksposur risiko signifikan secara material sepanjang tahun 2025. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa capaian Level 1 tidak berarti dalam kondisi risiko yang selesai, melainkan sebagai *baseline* untuk peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko, khususnya pada fase transformasi dan pemurnian bisnis.

Telah dilakukan pengukuran *Risk Maturity Index* (RMI) secara *Cross Assessment* yang dilakukan oleh Tim SPJM Grup dengan skor RMI JAI sebesar 2,9 kategori Fase Praktik yang baik dengan menggunakan pendekatan 5 (lima) dimensi yaitu Budaya dan Kapabilitas Risiko, Organisasi dan Tata Kelola Risiko, Kerangka Risiko dan Kepatuhan, Proses dan Kontrol Risiko, Model Data dan Teknologi Risiko serta penilaian atas Kesehatan Perusahaan dan Peringkat Komposit Risiko. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran kembali pada tahun 2026 melalui lembaga eksternal.

Pencapaian diatas selaras dengan perhitungan Pencapaian Kinerja Perusahaan KPI sebesar 105,85% dari target 100 dan Pendapatan 1,47 T dari target 1,37 T (*Unaudited*). Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa implementasi manajemen risiko di perusahaan cukup berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran/target perusahaan, serta menambah *value* bagi *stakeholder* perusahaan.

measures to reduce the level of potential risks and is integrated into the Company's capital allocation. As an asset-intensive and safety-oriented port services company, the integration of risk management into capital allocation must be carried out systematically and on a risk-based basis.

Every capital expenditure (CAPEX) and investment decision—whether for fleet acquisition, vessel renewal, or service development—must be evaluated not only in terms of financial viability (NPV, IRR), but also through a comprehensive risk assessment, including but not limited to operational, safety, compliance, environmental, and market risks, which must be acceptable within the company's risk appetite. Projects with high risk exposure must be accompanied by clear mitigation measures and include an adequate capital buffer. With this approach, capital allocation becomes not only a tool for growth but also a strategic risk management instrument, thereby ensuring JAI's financial resilience and operational sustainability in the long term.

In 2025, risk management was deemed sufficiently effective, as evidenced by the assessment of inherent risk levels: of the original total of 10 (eight) key risks, 8 (eight) were classified as Moderate to High (4) on a scale of 1–5 (Low–High), and the Board of Commissioners assessed the Board of Directors' success in keeping all residual risks within the risk appetite limits, including a material reduction in significant risk exposure throughout 2025. However, it should be noted that achieving Level 1 does not signify that the risk situation is resolved, but rather serves as a baseline for improving the quality of risk-based decision-making, particularly during the business transformation and streamlining phases.

A cross-assessment of the Risk Maturity Index (RMI) was conducted by the SPJM Group Team, resulting in an RMI score of 2.9 for JAI, classified as the "Good Practice Phase," using a five-dimensional approach: Risk Culture and Capabilities, Risk Organization and Governance, Risk Framework and Compliance, Risk Processes and Controls, Risk Data and Technology Models, as well as an assessment of Corporate Health and the Composite Risk Rating. A re-assessment will be conducted in 2026 through an external agency.

The above achievements align with the Company's Key Performance Indicator (KPI) calculation, which reached 105.85% of the 100% target, and revenue of 1.47 trillion from a target of 1.37 trillion (unaudited). From this, it can be concluded that the implementation of risk management within the company has been effective in supporting the achievement of the company's objectives and targets, as well as adding value for the company's stakeholders.



PERNYATAAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Manajemen telah menunjukkan komitmennya dalam implementasi sistem manajemen risiko dalam bentuk:

1. Penyusunan Risiko yang sesuai dengan Sasaran Perusahaan (RJPP) dan terintegrasi pada RKAP Perusahaan sehingga diharapkan mitigasi risiko tepat sasaran sehingga tercapainya sasaran Perusahaan.

2. Penetapan perencanaan Risiko (*Risk Appetite Statement* (RAS), strategi dan program–program manajemen risiko) yang dimuat RKAP Perusahaan.
3. Penetapan struktural organisasi yang menangani manajemen risiko yaitu Direktorat Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, Divisi Keuangan Manajemen Risiko yang tercantum pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 tanggal 15 Maret 2024 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor:HK-568/1/9/1MS-21 Tanggal 1 September 2021 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

4. Kecukupan tata kelola Manajemen Risiko yang ditandai dengan telah dilakukan pembaharuan Peraturan Direksi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/24/3/2/TRK/OUT/JAI-25 tanggal 24 Maret 2025 sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-2/MBU/03/2023, tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara pasal 51. Pembaharuan SOP terkait Manajemen Risiko serta pembentukkan Tim Manajemen Risiko di masing – masing unit kerja untuk mendukung implementasi manajemen risiko dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.01/5/5/2KEU/DUT/JAI-25 tanggal 5 Mei 2025.
5. Pelatihan dan sertifikasi di bidang manajemen risiko untuk personil yang menjabat sebagai dari mulai Direktur Pengelola Risiko, Vice President, Deputy Vice President, Staff Manajemen Risiko, serta Risk Agent.
6. Penggunaan aplikasi Pelindo Risk Management (PRiMa) secara konsisten dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dan pemantauan atas mitigasi risiko yang tercermin dalam Laporan Profil Risiko dan Peringkat Komposit Risiko Tahun 2025 (*Unaudited*), khususnya dalam pencapaian Peringkat Komposit Risiko Level 1. Hal ini menunjukkan komitmen Direksi dalam membangun sistem pengendalian risiko yang terstruktur, terintegrasi, dan selaras dengan sasaran strategis perusahaan.
7. Pelaporan Implementasi Manajemen Risiko dalam bentuk pelaporan Profil Risiko disertai data – data kuantitatif secara konsisten setiap Triwulanan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sebagai instrumen strategis yang memperkuat ketahanan usaha, menjaga kesinambungan operasional, serta menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis PT Jasa Armada Indonesia Tbk dalam jangka panjang.

MANAGEMENT STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Management has demonstrated its commitment to the risk management system through the following actions:

1. Preparation of risks aligned with the Company's objectives (RJPP) and integrated into the Company's RKAP, so that risk mitigation is expected to be well targeted and support the achievement of the Company's objectives.
2. Establishment of risk planning (Risk Appetite Statement/RAS, risk strategies, and risk management programs) as stipulated in the Company's RKAP.
3. Establishment of an organizational structure responsible for risk management, namely the Directorate of Finance, Human Resources, and Risk Management, and the Finance and Risk Management Division, as stipulated in the Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.01/15/3/2/SRA/DUT/JAI-24 dated March 15, 2024 regarding the Amendment to the Board of Directors Decree of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK-568/1/9/1MS-21 dated September 1, 2021 concerning the Organizational Structure of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
4. Adequacy of risk management governance, as indicated through the update of the Board of Directors Regulation on the Implementation of Risk Management within PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.01/24/3/2/TRK/OUT/JAI-25 dated March 24, 2025, in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-2/MBU/03/2023 on the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises, Article 51. Updates to SOPs related to Risk Management and the establishment of Risk Management Teams in each work unit to support the implementation of risk management, as stipulated in the Board of Directors Decree No. HK.01/5/5/2KEU/DUT/JAI-25 dated May 5, 2025.
5. Risk management training and certification for personnel ranging from the Director in charge of Risk Management, Vice Presidents, Deputy Vice Presidents, Risk Management Staff, to Risk Agents.
6. Consistent use of the Pelindo Risk Management (PRiMa) application in the processes of risk identification, measurement, monitoring, and control, as well as monitoring of risk mitigation, as reflected in the 2025 Risk Profile and Composite Risk Rating Report (Unaudited), particularly in achieving a Composite Risk Rating Level 1. This demonstrates the Board of Directors' commitment to building a structured, integrated risk control system aligned with the Company's strategic objectives.
7. Consistent quarterly reporting on the implementation of risk management in the form of Risk Profile reports accompanied by quantitative data to the Board of Commissioners and Shareholders, serving as a strategic instrument to strengthen business resilience, ensure operational continuity, and form an important foundation for the long-term business sustainability of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

8. Pelaksanaan evaluasi secara berkala setiap Triwulanan oleh Tim Audit Internal (Lini ke – 3) terhadap laporan Profil Risiko Perusahaan.
9. Penyusunan tata kelola *Business Continuity Management* (BCM) yang diharapkan dapat menjadi salah satu mitigasi Perusahaan agar bisnis tetap berjalan dalam kondisi darurat.

Bahwa bukti dokumentasi diatas telah mencukupi, dan selanjutkan agar secara konsisten disosialisasikan diimplementasikan, dipantau dan ditinjau serta dievaluasi secara berkesinambungan. Selain itu perlu ditekankan agar setiap mitigasi risiko dirancang secara terukur, memiliki penanggung jawab yang jelas, serta dilengkapi indikator kinerja dan indikator risiko utama (*Key Risk Indicator*) yang dapat dimonitor secara berkala. Mitigasi yang efektif harus mampu memperkecil probabilitas terjadinya risiko maupun dampaknya terhadap kinerja keuangan, operasional, keselamatan, dan reputasi Perusahaan, termasuk melalui penguatan pengendalian internal, kesiapan sumber daya, serta rencana kontinjensi yang realistis dan dapat dieksekusi. Dengan demikian, apabila risiko benar-benar terjadi, Perusahaan telah memiliki mekanisme yang memadai untuk merespons secara cepat dan terkoordinasi sehingga potensi kerugian dapat ditekan seminimal mungkin dan keberlangsungan usaha tetap terjaga.

RENCANA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2026

Dalam menghadapi tantangan bisnis di tahun 2026, sebagaimana sasaran Manajemen Risiko pada tahun 2026 Perusahaan berfokus pada penguatan sistem manajemen risiko dengan memaksimalkan keterlibatan seluruh organ Perusahaan dan terintegrasi. Berbagai inisiatif telah disiapkan untuk memastikan pengelolaan Manajemen Risiko yang lebih efektif dan responsif baik dari sisi kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, dan infrastruktur penunjang pelaporan dan evaluasi. Berikut adalah program yang akan dijalankan untuk meningkatkan pengelolaan manajemen risiko di IPCM yang tergabung dalam 2 (dua) program kerja diantaranya *Risk Enhancement* - Peningkatan Budaya Risiko Perusahaan dan selaras dengan program Pemegang Saham/HO dan Efektivitas pelaporan Manajemen Risiko dengan detail sebagai berikut:

1. Evaluasi dan atau *updating* dokumen tata kelola manajemen risiko.
2. Optimalisasi program budaya risiko sesuai pedoman budaya risiko perusahaan.
3. Keikutsertaan dalam program budaya risiko pemegang saham/HO.
4. Pelatihan Manajemen Risiko bagi organ dekom, BOD, *Risk Officer*, dan *Risk Agent*.
5. Penilaian *Risk Maturity Index* (Eksternal).
6. Pelaksanaan Tinjauan Efektivitas Manajemen Risiko.
7. Survei Implementasi Manajemen Risiko.
8. Efektivitas pelaporan Manajemen Risiko (Penyusunan Profil Risiko dan Evaluasi secara berkala).

8. Periodic quarterly evaluations conducted by the Internal Audit Team (Third Line of Defense) on the Company's Risk Profile reports.
9. Preparation of Business Continuity Management (BCM) governance, which is expected to serve as one of the Company's mitigation measures to ensure business continuity under emergency conditions.

The above documentation is sufficient, and should be consistently disseminated, implemented, monitored, reviewed, and evaluated on an ongoing basis. Furthermore, it must be emphasized that every risk mitigation measure should be designed in a measurable manner, have a clearly defined person in charge, and be equipped with performance indicators and key risk indicators (KRIs) that can be monitored periodically. Effective risk mitigation must be able to reduce both the probability of a risk occurring and its impact on the Company's financial, operational, safety, and reputational performance, including through the strengthening of internal controls, resource readiness, and realistic and executable contingency plans. Thus, should a risk actually materialize, the Company will have adequate mechanisms in place to respond quickly and in a coordinated manner so that potential losses can be minimized and business continuity maintained.

RISK MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT PROGRAM PLAN FOR 2026

In facing business challenges in 2026, in line with the Company's Risk Management objectives for 2026, the Company will focus on strengthening its risk management system by maximizing the involvement of all corporate organs in an integrated manner. Various initiatives have been prepared to ensure more effective and responsive risk management, covering human resource readiness, governance, and supporting infrastructure for reporting and evaluation. The following programs will be implemented to enhance risk management at IPCM, which are grouped into 2 (two) work programs, namely Risk Enhancement - Strengthening the Company's Risk Culture in alignment with Shareholder/HO programs, and Effectiveness of Risk Management Reporting, with details as follows:

1. Evaluation and/or update of risk management governance documents.
2. Optimization of risk culture programs in accordance with the Company's risk culture guidelines.
3. Participation in risk culture programs organized by shareholders/HO.
4. Risk Management training for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Officers, and Risk Agents.
5. External Risk Maturity Index (RMI) assessment.
6. Implementation of a Risk Management Effectiveness Review.
7. Survey on Risk Management implementation.
8. Enhancement of Risk Management reporting effectiveness (preparation of Risk Profiles and periodic evaluations).



Perkara Hukum
Legal Issues

IPCM menjalankan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab sebagai fondasi setiap kegiatan operasional. Berbagai kebijakan dan mekanisme proaktif diterapkan untuk mencegah potensi pelanggaran, khususnya yang terkait aspek hukum, sehingga operasional berjalan sesuai aturan dan etika.

IPCM implements responsible governance principles as the foundation of all operational activities. Various proactive policies and mechanisms are applied to prevent potential violations, particularly those related to legal aspects, so that operations run in accordance with rules and ethics.

Sepanjang tahun 2025, daftar perkara hukum yang melibatkan Perusahaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Throughout 2025, the list of legal cases involving the Company can be seen in the following table.

No.	Data Perkara Case Data	Proses Hukum Legal Process	Tindak Lanjut Follow-up	Dampak Proses Hukum Impact of Legal Proceedings
1	Pada tanggal 24 Januari 2025, 6 orang eks awak kapal atas nama Satiaji, M. Yahya, Salim Susanto, Samuel Simanjuntak, Arif Rachman Saleh dan M. Anfak ("Penggugat") mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial PN Jakarta Pusat karena pada tahun 2018 para Penggugat tidak bersedia untuk dialihkan ke perusahaan pengelola tenaga alih daya. Para Penggugat pada saat menolak untuk dialihkan meminta diangkat menjadi pegawai tetap. Dalam tuntutan, Para Penggugat mengajukan tuntutan material sebesar Rp5.081.349.604,- yang merupakan perhitungan dari upah yang tidak dibayarkan terhitung sejak mereka menolak untuk dialihkan hingga gugatan diajukan pada tahun 2025. On January 24, 2025, six former crew members, namely Satiaji, M. Yahya, Salim Susanto, Samuel Simanjuntak, Arif Rachman Saleh, and M. Anfak (the "Plaintiffs"), filed a lawsuit with the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court. The lawsuit was filed because, in 2018, the Plaintiffs refused to be transferred to an outsourced manpower management company. At the time of refusing the transfer, the Plaintiffs requested to be appointed as permanent employees. In their claim, the Plaintiffs sought material damages amounting to Rp5,081,349,604, representing the calculation of unpaid wages accrued from the time they refused the transfer until the filing of the lawsuit in 2025.	Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Industrial Relations Court Decision.	Putusan *in kracht* The decision has obtained in kracht	Penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum lanjutan dan gugatan tidak diterima Majelis Hakim. The Plaintiffs may not pursue further legal remedies, and the claim was declared inadmissible by the Panel of Judges.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2025, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang sedang menjabat, memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES CURRENTLY BEING FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN OFFICE

Throughout 2025, no members of the Board of Commissioners or Directors of the Company currently in office have any legal issues, whether civil or criminal.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak memiliki anak Perusahaan, dengan demikian tidak terdapat informasi terkait permasalahan hukum terhadap entitas anak.

DISCLOSURE OF LEGAL ISSUES BEING FACED BY SUBSIDIARIES

Until the end of 2025, the Company does not have any subsidiaries, thus there is no information regarding legal issues faced by subsidiaries.

Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions



Selama tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perusahaan sebagai organisasi, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.

Throughout 2024, there were no material administrative sanctions issued by the relevant authorities that affected the continuity of the Company's business and no administrative sanctions imposed on the Company as an organization, on subsidiaries, members of the Board of Directors or Commissioners.

INFORMASI TENTANG SANKSI PERKARA PAJAK

Selama 5 (lima) tahun terakhir, IPCM tidak pernah dijatuhi sanksi atau dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan pajak tertinggi terkait sengketa atau permasalahan pajak.

INFORMATION ABOUT TAX CASE SANCTIONS

Over the past five years, IPCM has never been sanctioned or found guilty in a supreme tax court ruling related to tax disputes or issues.



Akses Informasi dan Data Perusahaan

Information Access and Company Data

IPCM menempatkan keterbukaan informasi sebagai fondasi utama dalam membina hubungan dengan pemangku kepentingan. Untuk menjamin transparansi, IPCM memastikan informasi tersedia dengan mudah, relevan, dan sesuai kebutuhan pemegang saham serta pihak terkait lainnya. Informasi disampaikan tepat waktu melalui berbagai saluran, termasuk media massa, situs web resmi, paparan publik, platform pelaporan elektronik, dan sosial media Perusahaan.

Di sisi lain, IPCM menghadirkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai regulasi. Penyajian informasi keuangan dilakukan dengan prinsip jelas, objektif, dan tepat waktu, sehingga tercipta kepercayaan dan akuntabilitas bagi seluruh pemangku kepentingan.

IPCM places information disclosure as the main foundation in fostering relationships with stakeholders. To ensure transparency, IPCM ensures that information is easily available, relevant, and tailored to the needs of shareholders and other related parties. Information is communicated in a timely manner through various channels, including mass media, official websites, public presentations, electronic reporting platforms, and the Company's social media.

On the other hand, IPCM presents accurate and regulatory-compliant financial reports. Financial information is presented in a clear, objective, and timely manner, thereby creating trust and accountability for all stakeholders.

Media Elektronik Electronic Media	**Laporan Tahunan** Annual Report	**Media Sosial** Social Media
E-mail: corsec@ipcmarine.co.id *Website*: www.ipcmarine.co.id	▪ *Annual Report* tahun 2019 ▪ *Annual Report* tahun 2020 ▪ *Annual Report* tahun 2021 ▪ *Annual Report* tahun 2022 ▪ *Annual Report* tahun 2023 ▪ *Annual Report* tahun 2024	FP Facebook: IPCMarine Instagram: @ipcmarine X: @ipcmarine_ Tiktok: @ipcmarine Youtube: PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk/IPCM

Di tahun 2025, IPCM menyampaikan informasi kepada publik melalui 54 (Lima Puluh Empat) siaran pers yang diterbitkan di media cetak maupun elektronik, dengan rincian sebagai berikut:

In 2025, IPCM conveyed information to the public through 54 (fifty-four) press releases published in print and electronic media, with the following details:

No	**Daftar *Press Release* Tahun 2025** Press Releases in 2025
1	Cascading Arahan Pelindo Group di Wilayah IPCM & Bisnis Profile Pelindo Group's Cascading Directives in the IPCM Region & Business Profile
2	IPCM Kembali Gelar Acara JANGKAR atau JAI Ngajak Bicara IPCM Holds Another JANGKAR or JAI Ngajak Bicara Event
3	PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) Jalin Kerja sama dengan PT Langlang Laju Layang PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) Establishes Cooperation with PT Langlang Laju Layang
4	PT Jasa Armada Indonesia Tbk Gelar Webinar Safety Awareness dengan tema 'Bersama Kita Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dan Nyaman' PT Jasa Armada Indonesia Tbk Holds Safety Awareness Webinar with the theme "Together We Create a Safe and Comfortable Work Environment"
5	TUTUP PERINGATAN BULAN K3 NASIONAL 2025, IPCM CIPTAKAN BUDAYA LINGKUNGAN KERJA AMAN DAN NYAMAN CLOSING CEREMONY OF THE 2025 NATIONAL OSH MONTH, IPCM CREATES A SAFE AND COMFORTABLE WORK ENVIRONMENT CULTURE
6	Selenggarakan Rapat Kerja 2025, IPCM Persiapkan Strategi Bisnis Keberlanjutan IPCM Holds 2025 Working Meeting, Prepares Sustainability Business Strategy
7	Berbagi TJSL & Mudik PT JAI Tbk dan Kolaborasinya "PT JAI Tbk Berbagi Ramadan 1446H/2025 melalui Pemberian Santunan Kepada Yayasan dan Panti Asuhan" Sharing TJSL & Homecoming PT JAI Tbk and Its Collaboration "PT JAI Tbk Shares Ramadan 1446H/2025 by Providing Compensation to Foundations and Orphanages"
8	Laporan Keuangan *Audited* 2024 Audited Financial Statements 2024
9	Mudik Bersama Pelindo 2025, IPCM Turut Menyediakan 3 unit bus untuk 150 pemudik tujuan Yogyakarta dan Solo Homecoming with Pelindo 2025, IPCM Provides 3 Buses for 150 Travelers to Yogyakarta and Solo

No	Daftar *Press Release* Tahun 2025 Press Releases in 2025
10	Halal bi Halal Pelindo Group (rekap TJSL Ramadan) Halal bi Halal Pelindo Group (Ramadan TJSL Recap)
11	IPCM dan BNN Jakarta Utara Perkuat Sinergi Cegah Narkoba di Pelabuhan dan Gaungkan Kepedulian Lingkungan di Hari Bumi IPCM and BNN North Jakarta Strengthen Synergy to Prevent Drugs at Ports and Promote Environmental Awareness on Earth Day
12	PT Jasa Armada Indonesia Tbk Tandatangani Nota Kesepahaman Pelayanan Jasa Kapal Dengan PT Sekawan Terminal Samudera di Palembang PT Jasa Armada Indonesia Tbk Signs Memorandum of Understanding on Ship Services with PT Sekawan Terminal Samudera in Palembang
13	IPCM Selenggarakan Survei Kepuasan Pelanggan & Customer Awards Di Wilayah *Ship To Ship* (STS) Ambang Luar Sungai Musi Palembang IPCM Conducts Customer Satisfaction Survey & Customer Awards in the Ship to Ship (STS) Area of Ambang Luar Sungai Musi Palembang
14	Laporan Keuangan Q1 2025: Pendapatan Ipcm Tumbuh 21,15% Yoy dan Laba 14,85% Yoy Q1 2025 Financial Report: IPCM Revenue Grows 21.15% YoY and Profit 14.85% YoY
15	Perkuat Tata Kelola, IPCM Selenggarakan Pelatihan dan *Workshop* ICOFR Strengthening Governance, IPCM Holds ICOFR Training and Workshop
16	Perkuat Layanan Bisnis, IPCM Tandatangani Kerja sama Usaha Dengan PT Bukit Prima Bahari Strengthening Business Services, IPCM Signs Business Cooperation with PT Bukit Prima Bahari
17	Perempuan Tangguh di Pusaran Maritim : Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk Hadir Dalam *Women's* Forum Di Indonesia Maritime Week Strong Women in the Maritime Sector: President Director of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Attends Women's Forum at Indonesia Maritime Week
18	Tebar Kebaikan Kurban, IPCM Salurkan Hewan Kurban Ke Berbagai Wilayah Operasional Perusahaan Spreading the Goodness of Qurban, IPCM Distributes Qurban Animals to Various Areas of Company Operations
19	Gandeng Stockbit Sekuritas, IPCM Ajak Investor Kenali Proses Bisnis Perseroan Partnering with Stockbit Sekuritas, IPCM Invites Investors to Learn About the Company's Business Processes
20	Dukung Pelabuhan Ramah Lingkungan, IPCM Terapkan Sistem Hybrid Pada Auxiliary Engine Kapal Pandu Supporting Environmentally Friendly Ports, IPCM Implements Hybrid System on Pilot Boat Auxiliary Engine
21	Hasil Positif Kinerja : Pemegang Saham Nikmati Dividen 125,16 Miliar Dari Laba Bersih 2024 Positive Performance Results: Shareholders Enjoy Dividends of 125.16 Billion from 2024 Net Profit
22	Sambangi Yayasan Panti Yatim Piatu Bernilai Sejarah, IPCM Berbagi Paket Sembako Sambut *Pelindo Day* Ke 4 Dan Komitmen Ipcm Terhadap Lingkungan Raih Penghargaan Gold TJSL dan CSR Award 2025 Visiting a Historic Orphanage Foundation, IPCM Distributes Food Packages to Celebrate Pelindo Day 4 and IPCM's Commitment to the Environment Wins Gold TJSL and CSR Award 2025
23	Sinergi IPCM Bersama BNN Kota Jakarta Utara Salurkan Bantuan Sosial Dan Sosialisasikan Cegah Penyalahgunaan Narkoba IPCM Synergy with North Jakarta BNN Distributes Social Assistance and Socializes Drug Abuse Prevention
24	PT Jasa Armada Indonesia Tbk Raih Silver Award Untuk *Sustainability Report* Di Isra 2025 PT Jasa Armada Indonesia Tbk Wins Silver Award for Sustainability Report at Isra 2025
25	Memaknai Hari Jadi Ke-12, IPCM Selenggarakan Kegiatan Tjsl Donor Darah Commemorating its 12th Anniversary, IPCM Holds TJSL Blood Donation Event
26	IPCM Realisasikan Dividen Tahun Buku 2024 Rp125,16 miliar Untuk Pemegang Saham IPCM Realizes Dividends for Fiscal Year 2024 of Rp125.16 Billion for Shareholders
27	IPCM Kejar Pertumbuhan Minimal 5%, Begini Strateginya Pada Semester II-2025 IPCM Pursues Minimum Growth of 5%, Here's the Strategy for the Second Half of 2025
28	Jasa Armada (IPCM) Siapkan Capex Rp 148,8 miliar, Akan Menambah Dua Kapal Tunda Jasa Armada (IPCM) Prepares Rp148.8 Billion in Capex, Will Add Two Tugboats
29	PT Jasa Armada Indonesia Tbk Ikuti Manajemen *Walktrough* Di Wilayah Tanjung Priok PT Jasa Armada Indonesia Tbk Participates in Walkthrough Management in the Tanjung Priok Area
30	Perkuat Kolaborasi di Sumatera Selatan, IPCM Partisipasi Pada Coffee Morning Bersama Pelindo Regional 2 Palembang Strengthening Collaboration in South Sumatra, IPCM Participates in Coffee Morning with Pelindo Regional 2 Palembang
31	Dorong Budaya Inovasi, IPCM Gelar Jainovasi 2025 Kembali Untuk Insan Perusahaan Promoting a Culture of Innovation, IPCM Holds Jainovasi 2025 Again for Company Employees
32	IPCM Perkuat Kolaborasi Strategis di Customer Hearing 2025 Bersama Spjm Group IPCM Strengthens Strategic Collaboration at Customer Hearing 2025 with Spjm Group



No	Daftar *Press Release* Tahun 2025 Press Releases in 2025
33	PT Jasa Armada Indonesia Tbk Hadir dalam Medan Investor *Meeting and Connectivity* 2025 PT Jasa Armada Indonesia Tbk Attends Medan Investor Meeting and Connectivity 2025
34	*Release* - LK Semester 1/Q2
35	Perkuat Tata Kelola Dan Kepatuhan Hukum, IPCM Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Strengthening Governance and Legal Compliance, IPCM Establishes Cooperation with the North Jakarta District Attorney's Office
36	IPCM Selenggarakan Survei Kepuasan Pelanggan di Pelabuhan Patimban, Tersus Jawa Satu Power Dan Kanci I & Ii IPCM Conducts Customer Satisfaction Survey at Patimban Port, Tersus Jawa Satu Power, and Kanci I & II
37	Perkuat Kolaborasi Pelayaran Berkelanjutan, IPCM Tanam Mangrove Bersama Insa Strengthening Sustainable Shipping Collaboration, IPCM Plants Mangroves with Insa
38	Kinerja IPCM Q2 2025: Pendapatan Tumbuh 19,25 % Dan Laba 15,02 % IPCM Q2 2025 Performance: Revenue Grows 19.25% and Profit 15.02%
39	CNBC Indonesia: Peran IPCM Dalam Memperkuat Rantai Logistik Nasional, Perempuan Tangguh di Industri Maritim CNBC Indonesia: IPCM's Role in Strengthening the National Logistics Chain, Strong Women in the Maritime Industry
40	Dukung Transisi Energi Desa Wisata Rammang-Rammang, IPCM Raih Penghargaan Bisra Awards 2025 Supporting the Energy Transition of Rammang-Rammang Tourism Village, IPCM Wins the 2025 Bisra Awards
41	Menginspirasi Generasi Pemimpin Maritim Nasional Masa Depan, IPCM Hadir Lewat Pelindo Mengajar 2025 Inspiring the Future Generation of National Maritime Leaders, IPCM Presents Pelindo Mengajar 2025
42	Kinerja Impresif, IPCM Catatkan Pendapatan Rp 1,09t Impressive Performance, IPCM Records Revenue of Rp 1.09 Trillion
43	Dukung Kelancaran Logistik Nasional, IPCM Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Logistik Awards 2025 Supporting the Smooth Operation of National Logistics, IPCM Wins the 2025 Business Indonesia Logistics Awards
44	Perkuat Sinergi, Jasa Armada Indonesia Lanjutkan Kerja Sama Strategis Dengan Pelabuhan Bukit Prima Strengthening Synergy, Jasa Armada Indonesia Continues Strategic Cooperation with Bukit Prima Port
45	IPCM Dukung Umkm Batik Srikandi Girirejo Go Digital,Wujudkan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan IPCM Supports Srikandi Girirejo Batik MSMEs to Go Digital, Realizing a Sustainable Creative Economy
46	BEI Evaluasi Papan Pencatatan, 11 Emiten Pindah Ke Papan Utama (IPCM) IDX Evaluates Listing Board, 11 Issuers Move to Main Board (IPCM)
47	Pcm Raih Penghargaan dan Masuk Ke Papan Utama : Kepercayaan Investor Meningkat Pcm Wins Award and Enters Main Board: Investor Confidence Increases
48	Komitmen Keberlanjutan IPCM, Borong 3 Penghargaan di Ajang ESG Initiative Awards 2025 IPCM's Commitment to Sustainability Wins 3 Awards at the ESG Initiative Awards 2025
50	Direktur Utama IPCM Raih Penghargaan Woman Empower Woman Award 2025 IPCM President Director Wins Woman Empower Woman Award 2025
51	IPCM Borong Penghargaan Bergengsi Pada Ajang Annual Report Award (Ara) IPCM Wins Prestigious Awards at the Annual Report Award (ARA)
52	Wujudkan Ekosistem Pelabuhan Berkelanjutan, IPCM Dan PT Epi Tanam 2.000 Pohon Mangrove Realizing a Sustainable Port Ecosystem, IPCM and PT Epi Plant 2,000 Mangrove Tree
53	Konsisten Beri Nilai Tambah: IPCM Bagikan Dividen Interim Rp23,25 Miliar Consistently Providing Added Value: IPCM Distributes Interim Dividends of Rp23.25 Billion
54	Perjanjian Lanjutan IPCM & Nusantara Regas IPCM & Nusantara Regas Sign Follow-up Agreement

Kode Etik
Code of Conduct

Setiap individu di Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika yang berlaku. Kode Etik berfungsi sebagai panduan untuk memastikan seluruh keputusan dan tindakan senantiasa selaras dengan nilai moral dan profesionalisme. Dengan menjunjung tinggi integritas, seluruh Insan IPCM diharapkan mampu membangun hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan serta mempertahankan reputasi Perusahaan. Sebagai wujud penerapan tata kelola yang baik, PT Jasa Armada Indonesia Tbk menetapkan Kode Etik melalui Surat Keputusan Nomor: HK.56/4/10/4/MS21 tanggal 4 Oktober 2021. Kode Etik ini menjadi landasan dalam membentuk budaya kerja yang menekankan transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap standar moral yang tinggi.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok Kode Etik Perusahaan mencakup hal-hal berikut:

1. Pendahuluan
   a. Latar Belakang
   b. Maksud dan Tujuan
   c. Manfaat
   d. Landasan Penyusunan
   e. Visi dan Misi
   f. Nilai Perusahaan
   g. Pelaporan dan Kepatuhan
   h. Daftar Istilah
2. Etika Profesional
   a. Hubungan dengan Pekerja
   b. Hubungan dengan Pemegang Saham
   c. Hubungan dengan Serikat Pekerja
   d. Hubungan dengan Pelanggan
   e. Hubungan dengan Vendor
   f. Hubungan dengan Kreditur
   g. Hubungan dengan Debitur
   h. Hubungan dengan Investor dan Lembaga Keuangan
   i. Hubungan dengan Pesaing
   j. Hubungan dengan Masyarakat, Komunitas, dan Lingkungan
   k. Hubungan dengan Regulator dan Aparatur Pemerintah
   l. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Lain
3. Etika Kerja
   a. Kepatuhan Terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan Ketentuan Lainnya
   b. Benturan Kepentingan
   c. Korupsi dan Suap
   d. Anti Kecurangan (*Anti Fraud*)
   e. Pencurian dan Penyelewengan Sejenisnya
   f. Pencucian Uang
   g. Gratifikasi (Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan, Jamuan, Hiburan, dan Donasi

Every individual in the Company has a responsibility to act in accordance with applicable ethical principles. The Code of Ethics serves as a guide to ensure that all decisions and actions are always in line with moral values and professionalism. By upholding integrity, all IPCM employees are expected to be able to build harmonious relationships with stakeholders and maintain the Company's reputation. As a form of good governance, PT Jasa Armada Indonesia Tbk established a Code of Ethics through Decree Number: HK.56/4/10/4/MS21 dated October 4, 2021. This Code of Ethics serves as the foundation for shaping a work culture that emphasizes transparency, responsibility, and adherence to high moral standards.

CODE OF CONDUCT PRINCIPLES

The main points of the Company's Code of Conduct cover the following matters:

1. Introduction
   a. Background
   b. Purpose and Objectives
   c. Benefits
   d. Basis for Formulation
   e. Vision and Mission
   f. Corporate Values
   g. Reporting and Compliance
   h. Glossary
2. Professional Ethics
   a. Relations with Employees
   b. Relations with Shareholders
   c. Relations with Labor Unions
   d. Relations with Customers
   e. Relations with Vendors
   f. Relations with Creditors
   g. Relations with Debtors
   h. Relations with Investors and Financial Institutions
   i. Relations with Competitors
   j. Relations with the Community, Society, and the Environment
   k. Relations with Regulators and Government Authorities
   l. Relations with Other Stakeholders
3. Work Ethics
   a. Compliance with Laws, Regulations, and Other Provisions
   b. Conflict of Interest
   c. Corruption and Bribery
   d. Anti-Fraud
   e. Theft and Similar Misappropriation
   f. Money Laundering
   g. Gratuities (Giving and Receiving Gifts or Benefits, Hospitality, Entertainment, and Donations)



h. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
i. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan
j. Integritas Laporan Keuangan
k. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi
l. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi
m. Pengelolaan Arsip
n. Perlindungan Harta Perusahaan
o. Pengendalian Internal
p. Perjalanan Dinas
q. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
r. Aktivitas Politik dan Sosial
s. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pekerja
t. Pelanggaran Insider Trading

4. Penegakan Pedoman Kode Etik Bisnis
   a. Komitmen Penegakan Pedoman Kode Etik Bisnis
   b. Sosialisasi dan Internalisasi
   c. Pelanggaran
   d. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
   e. Sanksi atas Pelanggaran
5. Penutup

KORELASI KODE ETIK DENGAN NILAI-NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, IPCM menempatkan nilai-nilai budaya sebagai prinsip utama. Penerapan Kode Etik Perusahaan selaras dengan Budaya/Tata Nilai "AKHLAK" (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, & Kolaboratif) serta *Employee Value Proposition* (EVP) yang mengusung prinsip *Learn, Grow, and Contribute to Indonesia* (Belajar, Bertumbuh, dan Berkontribusi Untuk Indonesia).

IPCM menegaskan komitmen untuk menerapkan dan menyelaraskan Nilai-nilai Utama serta EVP sebagai fondasi dalam mendukung peran BUMN, baik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial, pencipta lapangan kerja, maupun penyedia talenta unggul. Dengan menginternalisasi nilai-nilai inti dan EVP, IPCM aktif memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran lebih rinci mengenai *Core Values* AKHLAK dimuat dalam bab Profil Perusahaan.

TUJUAN PENERAPAN KODE ETIK

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;
2. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan IPCM yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis;
3. Sebagai landasan etis untuk bertindak dan berpikir serta mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan;
4. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan IPCM dan *stakeholders* lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika, agar menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi;

h. Equal Opportunity for Employment and Promotion
i. Company Documentation and Recordkeeping
j. Integrity of Financial Reporting
k. Confidentiality of Data and/or Information
l. Media, Communication, and Information Disclosure
m. Records Management
n. Protection of Company Assets
o. Internal Control
p. Official Travel
q. Intellectual Property Rights (IPR)
r. Political and Social Activities
s. Ethical Conduct Toward Fellow Employees
t. Insider Trading Violations

4. Enforcement of the Business Code of Conduct
   a. Commitment to the Enforcement of the Business Code of Conduct
   b. Socialization and Internalization
   c. Violations
   d. Whistleblowing Mechanism
   e. Sanctions for Violations
5. Closing

CODE OF CONDUCT CORRELATION WITH CORPORATE CULTURAL VALUES

In conducting its business activities, IPCM places cultural values as its main principles. The implementation of the Company Code of Ethics is in line with the "AKHLAK" Culture/Values (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, & Collaborative) and the Employee Value Proposition (EVP) which carries the principles of Learn, Grow, and Contribute to Indonesia.

IPCM affirms its commitment to implementing and aligning Core Values and EVP as the foundation in supporting the role of state-owned enterprises, both as drivers of economic growth, accelerators of social welfare, creators of employment, and providers of superior talent. By internalizing core values and EVP, IPCM actively strengthens its contribution to economic development and improving the welfare of society. A more detailed description of the AKHLAK Core Values is included in the Company Profile chapter.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION PURPOSES

1. As a shared commitment to realize the Company's vision and to carry out its mission in a professional and ethical manner in conducting business;
2. As a code of conduct for all IPCM personnel that must be adhered to in carrying out all business activities;
3. As an ethical foundation for acting, thinking, and making decisions related to the Company;
4. To develop harmonious, synergistic, and mutually beneficial relationships between IPCM personnel and other stakeholders, based on the principles of sound and ethical corporate practices, in order to become a highly competitive company;

5. Setiap Insan IPCM memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya untuk berperilaku sesuai pedoman tentang perilaku dan etika (*code of conduct*).

MANFAAT PENERAPAN KODE ETIK

Penerapan *Code of Conduct* memberikan manfaat bagi:

1. Pekerja
   a. Menjadi pedoman tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh Perusahaan;
   b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya Perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja.
2. Perusahaan
   Meningkatkan nilai Perusahaan dalam membangun hubungan dengan para *stakeholders* melalui kepastian dan perlindungan hak-haknya guna menciptakan reputasi positif bagi keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
   a. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pekerja, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan.
3. Pemegang Saham (*Shareholders*)
   Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
4. *Stakeholders*
   Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholders* sehingga mendorong reputasi Perusahaan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*).

PEMBERLAKUAN PENGATURAN PEDOMAN KODE ETIK

Pedoman Kode Etik Perusahaan berlaku bagi semua individu yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, termasuk anak perusahaan serta afiliasi yang berada di bawah pengendaliannya. Selain itu, pedoman ini juga mengikat Pemegang Saham, serta seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja yang terlibat dalam transaksi bisnis dengan Perusahaan.

MEKANISME PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN KODE ETIK

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka seluruh Insan IPCM memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan;

5. To ensure that every IPCM personnel understands and is committed to carrying out their responsibilities in accordance with the guidelines on conduct and ethics (code of conduct).

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION BENEFITS

The implementation of the Code of Conduct provides benefits for:

1. Employees
   a. Serve as a Guideline regarding desirable and undesirable behavior by the Company;
   b. Create a work environment that upholds the Company's values and culture, thereby improving performance.
2. Company
   Increase the Company's value in building relationships with stakeholders by providing certainty and protection of their rights, leading to a positive reputation for long-term business success.
   a. Encourage more efficient and effective operational activities, considering that ethical standards must be observed in relationships with workers, partners, customers, society, government, and other stakeholders.
3. Shareholders
   Increase Shareholders' confidence that the Company is managed prudently, efficiently, transparently, accountably, and fairly to achieve the expected level of profitability while sStill considering the interests of the Company.
4. Stakeholders
   Create harmonious and mutually beneficial relationships with stakeholders, thereby enhancing the Company's reputation as a responsible corporate citizen.

CODE OF CONDUCT ENFORCEMENT

The Company's Code of Conduct applies to all individuals acting for and on behalf of the Company, including subsidiaries and affiliates under its control. In addition, these guidelines are also binding on Shareholders, as well as all stakeholders and business partners involved in business transactions with the Company.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT MECHANISM

In order to realize the Company's commitment to its stakeholders, all IPCM personnel are committed to:

1. Always thinking and acting in a corporate manner by prioritizing the interests of the Company over personal and/or group interests, in order to deliver the best outcomes for the Company;



2. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan;
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;
4. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/mitra bisnis dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta bersedia berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
6. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perusahaan;
7. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang;
8. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan IPCM dengan baik serta memahami dan mematuhi etika dan perilaku;
9. Bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

PENANDATANGANAN KOMITMEN PEDOMAN KODE ETIK

Untuk menegaskan komitmen Perusahaan dalam penerapan Kode Etik, setiap tahunnya dilaksanakan penandatanganan komitmen terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis Perusahaan, sebagaimana ketentuan berikut:

1. Seluruh Insan IPCM wajib menandatangani Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis yang merupakan komitmen Insan IPCM untuk melaksanakan Pedoman Kode Etik Bisnis yang diperbaharui setiap tahun;
2. Pedoman Kode Etik Bisnis harus disosialisasikan dan dipahami oleh Insan IPCM;
3. Pakta Integritas, Janji Pedoman Kode Etik Bisnis dan Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris, Direksi, Organ Komite di bawah Dewan Komisaris dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap di atas materai dan disimpan oleh fungsi Sekretaris Perusahaan, hal ini merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
4. Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis Pekerja Perusahaan dibuat dan ditandatangani secara digital dalam sistem yang telah disediakan oleh manajemen;
5. Direksi wajib menandatangani pakta integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS/Menteri.

2. Continuously caring for and protecting the Company's positive image and reputation;
3. Carrying out duties professionally and responsibly, while upholding integrity, honesty, and a spirit of togetherness;
4. Being attentive and responsive to complaints from customers/business partners and promptly following them up in accordance with applicable regulations;
5. Having strong motivation for self-development and expanding knowledge, as well as being willing to share knowledge and skills and assist colleagues without fear of competition;
6. Always behaving commendably as individuals and members of society, and refraining from any disgraceful acts that could damage the Company's image;
7. Refraining from any actions that may violate regulations and/or constitute an abuse of authority;
8. Properly observing the religious practices of each IPCM personnel while understanding and complying with ethical standards and conduct;
9. Working in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

SIGNING COMMITMENT TO CODE OF CONDUCT GUIDELINES

To emphasize the Company's commitment to the implementation of the Code of Conduct, an annual signing of commitment to the Company's Business Code of Conduct Guidelines is carried out, in accordance with the following provisions:

1. All IPCM personnel are required to sign an Integrity Pact and a Pledge to Comply with the Business Code of Conduct Guidelines, as a commitment to implement the Business Code of Conduct Guidelines, which are updated annually;
2. The Business Code of Conduct Guidelines must be disseminated to and understood by all IPCM personnel;
3. The Integrity Pact, the Pledge to Comply with the Business Code of Conduct Guidelines, and the Conflict of Interest Statement of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Committees under the Board of Commissioners are prepared and signed in one original copy on stamped duty and kept by the Corporate Secretary function. These documents become proof of statements and commitments to comply with all applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance;
4. The Integrity Pact and the Pledge to Comply with the Business Code of Conduct Guidelines for Company employees are prepared and signed digitally through the system provided by management;
5. The Board of Directors is required to sign an integrity pact for transactional actions that require the approval of the Board of Commissioners and/or the GMS/Minister.

PENYEMPURNAAN PEDOMAN KODE ETIK

Kode Etik Perusahaan adalah dokumen yang bersifat dinamis, yang dapat diperbarui dan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis serta perubahan peraturan perundang-undangan. IPCM melakukan pembaruan Kode Etik ini pada tahun 2021.

SOSIALISASI PEDOMAN KODE ETIK

Sosialisasi Pedoman Kode Etik Perusahaan memegang peran penting untuk memastikan setiap pihak memahami secara mendalam dan menerapkannya secara konsisten di seluruh lingkungan Perusahaan.

Sosialiasai Pedoman Kode Etik PT Jasa Armada Indonesia Tbk Rutin dilakukan selama tahun 2025 dengan menggunakan lini komunikasi perusahaan dan juga menggunakan aplikasi PGood yang dilakukan setiap tahun untuk memastikan setiap Insan IPCM mengetahui apa isi dari kebijakan tersebut.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Berikut pertimbangan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan terkait tindakan terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran:

1. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Insan Perusahaan yang dapat menjadi teladan dalam implementasi Pedoman Etika Perusahaan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi;
2. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan Perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan dari Perusahaan;
3. Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atas Pedoman Etika Perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan-tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Disiplin Pekerja yang berlaku;
4. Mitra Kerja Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan keputusan Perusahaan;
5. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran pidana dan perdata oleh Mitra Kerja Perusahaan, permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Hingga akhir tahun 2025, tidak terdapat kasus pelanggaran yang melibatkan pegawai JAI.

CODE OF CONDUCT GUIDELINE PERFECTION

The Company Code of Ethics is a dynamic document that can be updated and reviewed periodically to ensure its suitability with business developments and changes in laws and regulations. IPCM updated this Code of Ethics in 2021.

SOCIALIZATION OF CODE OF CONDUCT GUIDELINE

The dissemination of the Company's Code of Conduct Guidelines plays an important role in ensuring that all parties understand them thoroughly and apply them consistently throughout the Company.

Outreach regarding PT Jasa Armada Indonesia Tbk's Code of Ethics Guidelines was conducted regularly throughout 2025 using the company's communication channels as well as the PGood app, which is utilized annually to ensure that every IPCM employee is aware of the policy's contents.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

The following considerations form the basis for decisions regarding actions against workers who commit violations:

1. The Company may grant awards to Company Personnel who serve as role models in implementing the Company's Code of Conduct, as determined by the Board of Directors;
2. Individuals who contribute to saving the Company by uncovering materially or non-materially detrimental cases are eligible to receive awards from the Company;
3. Company personnel found to have violated the Company's Code of Conduct may face disciplinary actions in accordance with the applicable Worker Disciplinary Regulations;
4. Company Partners found to have committed violations will be subject to sanctions as per Company regulations and decisions;
5. In cases involving criminal or civil violations by Company Partners, the matter may be escalated to the authorities.

TOTAL CODE OF CONDUCT VIOLATION

Until the end of 2025, there were cases of violations involving JAI employees.



Kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi

Anti-Corruption and Anti-Gratification Policies

IPCM secara tegas menegakkan kebijakan Anti Korupsi dan Gratifikasi sebagai prinsip utama dalam seluruh operasionalnya, untuk menghadapi tantangan global terkait praktik korupsi dan gratifikasi. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih, transparan, dan berintegritas.

IPCM firmly enforces its Anti-Corruption and Gratification policy as a key principle in all of its operations, in order to address global challenges related to corruption and gratification practices. This policy is designed to create a clean, transparent, and ethical business environment.

Sebagai upaya pencegahan, Perusahaan telah mengimplementasikan program serta prosedur khusus untuk menghindari praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), penipuan, suap, dan gratifikasi. Hal tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/10/11/3/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 10 November 2025 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Perusahaan telah mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berlaku hingga 5 Februari 2029. Selain itu, Perusahaan juga menerbitkan publikasi mengenai Komitmen dan Implementasi Pengendalian Gratifikasi serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai bentuk transparansi dan bukti nyata penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

As a preventive measure, the Company has prepared programs and procedures to prevent corruption, kickbacks, fraud, bribery, and gratuities. These are carried out in accordance with the Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.01/10/11/3/KGC/DUT/JAI-25 dated November 10, 2025, concerning the Anti-Bribery Management System of PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The Company has obtained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification issued by the National Accreditation Committee (KAN), valid until February 5, 2029. In addition, the Company has disclosed its Commitment to Gratification Control and Anti-Bribery Management System as a form of transparency and concrete evidence of Company's gratification control.

PRINSIP DASAR PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUP PERUSAHAAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B, setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terkait jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya digolongkan sebagai suap. Dalam konteks pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan, ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh bentuk pemberian atau imbalan kepada karyawan maupun pihak terkait dalam kegiatan bisnis harus dilakukan secara transparan dan berlandaskan integritas.

Sejalan dengan hal tersebut, Perusahaan menerapkan pengendalian gratifikasi dengan mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/10/11/3/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 10 November 2025 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta diperkuat melalui Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor HK.01/10/11/10/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 10 November 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Kepatuhan terhadap standar etika dan ketentuan hukum tersebut menjadi landasan penting dalam mencegah praktik korupsi sekaligus memastikan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.

BASIC PRINCIPLES OF GRATIFICATION CONTROL AT THE COMPANY

In accordance with Law No. 20 of 2001 Article 12B, any gratification given to civil servants or state officials related to their position and contrary to their duties is classified as bribery. In terms of gratification control within the Company, this emphasizes that all forms of giving or compensation to employees or related parties in business activities must be conducted transparently and with integrity.

In line with this, the Company applies gratification control by referring to the Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk No. HK.01/10/11/3/KGC/DUT/JAI-25 dated November 10, 2025, on the Implementation of the Anti-Bribery Management System, further strengthened by the Board of Directors Regulation No. HK.01/10/11/10/KGC/DUT/JAI-25 dated November 10, 2025, on the Gratification Control Guidelines. Compliance with these ethical standards and legal provisions serves as a key foundation for preventing corruption and ensuring the implementation of good corporate governance.

KLASIFIKASI GRATIFIKASI

Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar, dan Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS), Perusahaan mengklasifikasikan gratifikasi sebagai berikut:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan;
2. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan;
3. Gratifikasi yang terkait kedinasan.

GRATIFICATION CLASSIFICATION

In accordance with the Guidelines for Gratuity Management, Illegal Levy Reporting, and Whistleblowing System (WBS) Implementation, the Company classifies gratuities as follows:

1. Gratuities that must be reported;
2. Gratuities that do not need to be reported;
3. Gratuities related to official duties.

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN GRATIFIKASI

IPCM membentuk Tim/Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Tim ini menjalankan sistem pencegahan dan penanganan gratifikasi di lingkungan Perusahaan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/10/11/11/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 10 November 2025 Tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang Sekaligus Sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud* Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

GRATIFICATION USAGE AND MANAGEMENT

IPCM has formed a Gratification Control Team/Unit (UPG) that reports directly to the Board of Directors. This team implements a system for preventing and handling gratification within the Company, in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/10/11/11/KGC/DUT/JAI -25 dated November 10, 2025, concerning the Establishment of an Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) which also serves as a Gratuity Control Unit (UPG), Conflict of Interest Management Unit, and Fraud Unit in the Context of Implementing an Anti-Bribery Management System within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

No.	Unit Kerja Work Unit	Jabatan dalam Tim Position in the Team
1	EVP Sekretaris Perusahaan EVP Corporate Secretary	Ketua (Merangkap Anggota) Chairman (also Member)
2	Kepala Audit Internal Head of Internal Audit	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairperson (also Member)
3	DVP Komunikasi Perusahaan, GCG dan CSR DVP Corporate Communications, GCG and CSR	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (also Member)
4	VP Keuangan dan Manajemen Risiko VP Finance and Risk Management	Anggota Member
5	VP SDM dan Umum VP Human Resources and General Affairs	Anggota Member
6	VP Hukum VP Legal	Anggota Member
7	VP Armada VP Fleet	Anggota Member
8	General Manager Area Area General Manager	TIM UPG – Area

Tim/Unit Pengendali Gratifikasi memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Tim UPG Kantor Pusat:
   a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan;
   b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;

The Gratuity Control Team/Unit has the following duties and responsibilities:

1. UPG Headquarters Team:
   a. Conducting socialization of gratification control within the Company;
   b. Coordinating with relevant units or departments on the implementation and effectiveness of gratification control;



c. Mereviu dan memperbarui kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan;
d. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Jasa Armada Indonesia Tbk kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
e. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK;
f. Menindaklanjuti hasil rekomendasi KPK atas penetapan status barang gratifikasi;
g. Berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan/atau tim KPK terkait dengan pelaksanaan gratifikasi di lingkungan kerja Perusahaan.

2. Tim Area Perusahaan
   a. Para General Manager area menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan UPG Kantor Pusat;
   b. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Area Perusahaan;
   c. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal Area kepada Tim UPG Kantor Pusat;
   d. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Tim UPG Kantor Pusat.

PELAPORAN DAN SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

PELATIHAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI KEPADA KARYAWAN

Untuk memperkuat budaya bisnis yang berintegritas, Perusahaan menyelenggarakan Pelatihan Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh karyawan. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman kolektif terhadap praktik bisnis yang bersih, sekaligus memberikan wawasan mendalam mengenai konsekuensi hukum dan reputasi dari tindakan korupsi. Di tahun 2025, pelatihan ini telah dijalankan secara menyeluruh, mencakup:

1. **Pelindo *Good Corporate Governance* (PGood)**
   P-Good merupakan program tahunan dari Pelindo Group yang wajib diikuti seluruh karyawan, termasuk di IPCM, sebagai bentuk penguatan budaya antikorupsi dan gratifikasi. Kegiatan ini terdiri dari pelatihan, pengisian kuisioner, dan penandatanganan pakta integritas. Sebelum menandatangani pakta, karyawan diminta membaca seluruh peraturan perusahaan, termasuk kode etik dan kebijakan antikorupsi. Kuisioner

c. Reviewing and updating policies on management, the creation of an anti-gratification environment, and the prevention of corruption within the Company;
d. Receiving reports, compiling, and reporting gratification from internal parties of PT Jasa Armada Indonesia Tbk to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and/or the Corruption Eradication Commission;
e. Store gratuities until their status is determined by the KPK;
f. Follow up on the KPK's recommendations regarding the determination of the status of gratuities;
g. Coordinate with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and/or the KPK team regarding the implementation of gratuities within the Company's work environment.

2. Company Area Team
   a. Area General Managers are responsible for their respective areas of work and coordinate with the Head Office UPG;
   b. Conduct socialization of gratification control within the Company Area;
   c. Receive reports, recapitulate and report gratification from internal parties within the Area to the Head Office UPG Team;
   d. Store gratification items until their status is determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) and report them to the Head Office UPG Team.

GRATIFICATION REPORTING

Violation of the provisions in the gratuity Guidelines will be subject to sanctions in accordance with the provisions and regulations applicable in the Company.

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION TRAINING FOR EMPLOYEES

To strengthen a culture of integrity in business, the Company conducts Anti-Corruption and Gratification Training for all employees. This program aims to increase collective awareness and understanding of clean business practices, while providing in-depth insight into the legal and reputational consequences of corrupt practices. By 2025, this training will have been implemented comprehensively, covering:

1. **Pelindo Good Corporate Governance (PGood)**
   P-Good is an annual program from Pelindo Group that all employees, including those at IPCM, are required to participate in as a form of strengthening the culture of anti-corruption and gratification. This activity consists of training, filling out questionnaires, and signing an integrity pact. Before signing the pact, employees are asked to read all Company regulations, including the code of ethics and anti-corruption

yang diisi akan menghasilkan skor pemahaman, dengan target maksimal 100. Pada tahun 2025, capaian rata-rata IPCM mencapai 100%. Program ini menjadi alat ukur sekaligus komitmen nyata terhadap penerapan tata kelola yang bersih.

2. **Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)**
   Sebagai bagian dari pelatihan Anti Korupsi dan Gratifikasi, IPCM memanfaatkan momentum HAKORDIA 2025 untuk memperdalam pemahaman karyawan terhadap nilai-nilai integritas. Kegiatan ini tidak hanya mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang bebas korupsi, tetapi juga menyajikan pemaparan konkret dari aparat penegak hukum mengenai modus korupsi yang kerap terjadi di lingkungan bisnis. Dengan pendekatan langsung dan aplikatif, pelatihan HAKORDIA memperkuat komitmen seluruh Insan Perusahaan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab.

SOSIALISASI ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

IPCM menegaskan komitmen terhadap integritas dan transparansi melalui sosialisasi rutin terkait pencegahan korupsi dan gratifikasi. Program ini membangun budaya kerja berkeadilan, memperkuat pemahaman karyawan akan etika bisnis, dan menegaskan penolakan tegas terhadap setiap praktik yang dapat merusak integritas perusahaan.

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) melaksanakan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi dengan cara yang berbeda dimana tiap Divisi dan Area Perusahaan memainkan games bersama-sama dengan pertanyaan terkait anti korupsi dan gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Selain itu, semangat antikorupsi juga disuarakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh pekerja JAI pada sosial media dan saluran komunikasi perusahaan serta momentum Lebaran dan Natal 2025. Kegiatan ini turut diperkuat dengan penandatanganan pakta integritas di awal tahun sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas di lingkungan kerja.

MEKANISME PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Segala laporan atau pengaduan terkait penerimaan gratifikasi ditindaklanjuti secara serius dan sistematis sebagai berikut:

policies. The completed questionnaire will generate an understanding score, with a maximum target of 100. In 2025, IPCM's average achievement reached 100%. This program serves as a measuring tool as well as a tangible commitment to the implementation of clean governance.

2. **World Anti-Corruption Day (HAKORDIA)**
   As part of its Anti-Corruption and Gratification training, IPCM took advantage of the momentum of HAKORDIA 2025 to deepen employees' understanding of the values of integrity. This activity not only reminds employees of the importance of building a corruption-free work culture, but also provides concrete explanations from law enforcement officials regarding the modes of corruption that often occur in the business environment. With a direct and practical approach, HAKORDIA training strengthens the commitment of all company personnel in realizing clean and responsible governance.

ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION SOCIALIZATION

IPCM affirms its commitment to integrity and transparency through regular socialization programs related to the prevention of corruption and gratification. This program builds a culture of fairness, strengthens employees' understanding of business ethics, and affirms a firm rejection of any practices that could damage the company's integrity.

In commemoration of World Anti-Corruption Day (HAKORDIA) 2025, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) conducted anti-corruption and gratification outreach in a unique way, where each Division and Area of the Company played games together with questions related to anti-corruption and gratification within the Company.

Additionally, the spirit of anti-corruption was also voiced through awareness campaigns conducted by all JAI employees on social media and Company communication channels, as well as during the 2025 Eid al-Fitr and Christmas holidays. This initiative was further reinforced by the signing of an integrity pact at the beginning of the year as a collective commitment to maintaining integrity in the workplace.

GRATIFICATION INCOMING REPORT MECHANISM

All reports or complaints related to the acceptance of gratuities are followed up seriously and systematically as follows:



Mulai
Start

Terima Gratifikasi
Receive Gratification

Lapor ke KPK via GOL
Report to KPK via GOL

Proses oleh KPK (maks. 30 hari kerja)
Processed by KPK (max. 30 working days)

Lihat dugaan pelanggaran gratifikasi
Suspected gratification violation

Lapor ke Tim UPG
Report to UPG Team

Laporan via *Whistleblowing System* (Pelindo Bersih)
Report via Whistleblowing System (Pelindo Bersih)

Tim UPG rekap & lapor ke KPK (maks. 14 hari kerja)
UPG Team recap & report to KPK (max 14 working days)

Penetapan status oleh KPK
Determination to status by KPK

Tindak lanjut sesuai penetapan KPK
Follow up based on KPK determination

Selesai
Finish



Setiap penerimaan hadiah, cenderamata, atau hiburan yang melebihi batas yang ditetapkan perusahaan wajib dilaporkan oleh seluruh Insan Perusahaan melalui:

1. Tim UPG membuat rekapitulasi Laporan Gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh Tim UPG Perusahaan untuk selanjutnya mendapat penetapan status objek Gratifikasi oleh KPK.
   a. Untuk penerimaan Gratifikasi kadaluarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud.
   b. Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang seperti Cinderamata/Uang/Makanan yang tidak cepat kadaluarsa, dan sebagainya menunggu penetapan objek Gratifikasi oleh KPK untuk tindak lanjut.
2. *Whistleblowing System* yang dikelola PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang mana dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui *Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem *Whistleblowing System*.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI TAHUN 2025

Di tahun 2025, IPCM mencatat 4 (empat) penerimaan gratifikasi berupa parsel makanan. Penerimaan tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan karena bersifat barang cepat rusak. UPG IPCM telah menindaklanjuti penerimaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyalurkannya kepada petugas *Office Boy* dan *Security* di lingkungan Perusahaan.

Any acceptance of gifts, souvenirs, or entertainment that exceeds the limits set by the company must be reported by all Company Personnel through:

1. The UPG Team prepares a recap of Gratification Reports and submits them to the KPK no later than 14 (fourteen) working days from the date the Gratification Report is received by the Company's UPG Team, for further determination of the gratification status by the KPK.
   a. For perishable gratification (e.g., food and beverages), such items may be handed over to a social institution, with proof of handover submitted to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the date of receipt of the gratification.
   b. For gratification in the form of goods such as souvenirs/cash/food that are not perishable, etc., these shall await determination of their status by the KPK for further action.
2. The Whistleblowing System managed by PT Jasa Armada Indonesia Tbk, which is carried out if the reporter is a Company Employee or other parties (customers, business partners, and the public) who are not directly involved but are aware of gratuities in the Company that have the potential for abuse of authority/position. Reporting through the Whistleblowing System is carried out in accordance with a separate mechanism that regulates the Whistleblowing System.

INCOMING GRATIFICATION REPORT IN 2025

In 2025, IPCM recorded four instances of gratuities in the form of food parcels. These gratuities were classified as non-reportable because they were perishable goods. UPG IPCM followed up on these gratuities in accordance with applicable regulations by distributing them to office boys and security guards within the Company.



Kebijakan Pencegahan *Insider Trading*

Kebijakan Pencegahan Insider Trading

Peraturan perundang-undangan mengharuskan setiap Anggota Direksi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk melarang keterlibatan dalam perdagangan orang dalam (*insider trading*) demi kepentingan dan/atau keuntungan pribadi.

Regulation governs that each member of the Board of Directors comply with applicable provisions, including the prohibition of involvement in insider trading for personal interest or gain.

Demikian pula, dalam pengaturan *Board Manual* Anggota Dewan Komisaris, dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat/pekerja instansi pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

It is also crucial to avoid personal or emotional involvement with competitors, vendors, or similarly, the Board Manual stipulates that members of the Board of Commissioners are prohibited from offering or receiving anything of value directly or indirectly to influence a customer or government official/worker, in accordance with applicable laws and regulations.

Seluruh individu di PT Jasa Armada Indonesia Tbk diharapkan untuk menghindari konflik kepentingan seperti ini, dan jika terjadi, diwajibkan melaporkan situasi tersebut kepada atasan langsung untuk mengklarifikasi konflik kepentingan. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mengakibatkan tindakan disipliner yang tegas terhadap individu yang bersangkutan.

All individuals at PT Jasa Armada Indonesia Tbk are expected to avoid conflicts of interest and report any such situations to their immediate superior for clarification. Violations of this code of ethics will result in strict disciplinary action.

Dalam hal ini, penting pula untuk menghindari hubungan pribadi atau keterlibatan emosional dengan kompetitor, vendor, atau bawahan yang dapat memengaruhi kemampuan pengambilan keputusan, untuk mencegah konflik kepentingan.

It is also crucial to avoid personal or emotional involvement with competitors, vendors, or subordinates that could influence decision making, thus preventing conflicts of interest.

Insan PT Jasa Armada Indonesia Tbk harus selalu menghindari segala bentuk keterlibatan keluarga dalam hubungan bisnis untuk menghindari konflik kepentingan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan keterlibatan ini harus dihindari dan didiskusikan terlebih dahulu dengan atasan, atasan daripada atasan, atau SDM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PT Jasa Armada Indonesia Tbk personnel must refrain from engaging in business relationships with family members to avoid conflicts of interest. Any transactions involving family members must be discussed with superiors or HR in accordance with regulations.

Sepanjang tahun 2025 dan pada tahun-tahun sebelumnya, tidak terdapat insiden perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang melibatkan Direksi, Komisaris, atau manajemen pekerja.

Throughout 2025 and in previous years, there were no incidents of insider trading involving the Board of Directors, Board of Commissioners, or management.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods v Services Procurement Policy

IPCM menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif guna memastikan kelancaran rantai bisnis sekaligus mencapai target mutu, waktu, dan biaya. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin setiap proses pengadaan berjalan optimal, sesuai standar mutu, serta tepat waktu dan biaya.

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan atas Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 25 September 2024.

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN

Prosedur dan Tata Cara proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 25 September 2024 dan dijabarkan lebih detail pada Buku Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

PELAKSANAAN KEGIATAN/JENIS PROGRAM DI TAHUN 2025

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2025, Perusahaan telah menyelesaikan sebanyak 93 Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Adapun jenis pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pengadaan tersebut secara garis besar merupakan kebutuhan utama dan

IPCM implements an effective goods and services procurement system to ensure a smooth business chain while achieving quality, time, and cost targets. This policy is designed to ensure that every procurement process runs optimally, in accordance with quality standards, and on time and on budget.

POLICIES AND GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The policy on the procurement of goods and services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk refers to the Board of Directors Regulation of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 dated June 27, 2024 concerning Guidelines for the Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as amended by PT Jasa Armada Indonesia Tbk Board of Directors Regulation Number: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 dated September 25, 2024.

PROCUREMENT PROCEDURES AND GUIDELINES

The policy on the implementation of procurement of goods and services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk refers to the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK 01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 dated June 27, 2024 regarding Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as amended by the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 dated September 25, 2024.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES/ TYPES OF PROGRAMS IN 2025

As of the 4th quarter of 2025, the Company has completed 93 Goods and Services Procurement Contracts within PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The types of goods and services procured by the Procurement Division are broadly categorized as essential and routine requirements that support the Company's performance, including Ship



rutin yang menunjang kinerja Perusahaan, antara lain Pekerjaan *Docking* Kapal, Sewa-Menyewa Kapal, *General Overhaul* Mesin Kapal, Jasa Konsultansi, Pembangunan Aplikasi/Sistem, dan lainnya. Selama kurun waktu Triwulan IV Tahun 2025 total nilai pekerjaan dari seluruh kontrak yang ada mencapai Rp236.654.278.598,34 dari total nilai HPS/OE sebesar Rp241.940.159.914,00. Dari paparan total nilai pekerjaan dan HPS/OE tersebut dapat dilihat bahwa Divisi Pengadaan telah berhasil mencapai penghematan biaya sebesar Rp5.285.881.315,66 atau dengan rata-rata persentase di setiap Paket sebesar 2,18%. Selanjutnya ditinjau dari sisi metode pemilihan penyedia bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang telah diselenggarakan oleh Divisi Pengadaan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tender Terbatas : 4 Kontrak Pekerjaan;
2. Penunjukan Langsung : 72 Kontrak Pekerjaan; dan
3. Pengadaan Langsung : 31 Kontrak Pekerjaan.

Docking Services, Ship Chartering, General Overhaul of Ship Engines, Consulting Services, Application/System Development, and others. During the 4th quarter of 2025, the total value of work from all existing contracts reached Rp236,654,278,598.34 from a total HPS/OE value of Rp241,940,159,914.00. From the presentation of the total value of work and HPS/OE, it can be seen that the Procurement Division has succeeded in achieving cost savings of Rp5,285,881,315.66 or an average percentage of 2.18% for each package. Furthermore, from the perspective of the provider selection method, the procurement process for goods and services carried out by the Procurement Division used the following methods:

1. Limited Tender: 4 Work Contracts;
2. Direct Appointment: 72 Work Contracts; and
3. Direct Procurement: 31 Work Contracts.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Violation Reporting System

Perusahaan menegakkan prinsip tata kelola yang baik melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi, suap, dan kecurangan. *Whistleblowing System* (WBS) berperan sebagai mekanisme deteksi dini untuk mencegah pelanggaran yang berpotensi menimbulkan dampak finansial maupun nonfinansial serta merusak reputasi Perusahaan. Sistem ini memberikan kesempatan bagi seluruh Insan Perusahaan dan pihak terkait untuk melaporkan indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan terhadap potensi tindakan balasan, selama laporan disampaikan dengan bukti yang sahih dan niat baik.

Sebagai bagian dari kebijakan tata kelola, Perusahaan mengacu pada Pedoman *Whistleblowing System* PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sesuai dengan dokumen Nomor: HK.01/7/11/6/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 7 November 2025. Kebijakan ini menetapkan mekanisme pelaporan pelanggaran yang terstruktur untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

The Company upholds the principle of good governance through the implementation of a violation reporting system as a preventive measure against corruption, bribery, and fraud. The Whistleblowing System (WBS) acts as an early detection mechanism to prevent violations that could potentially cause financial and non-financial impacts and damage the company's reputation. This system provides an opportunity for all Company personnel and related parties to report indications of violations of applicable ethical values, with a guarantee of confidentiality of the reporter's identity and protection against potential retaliation, as long as the report is submitted with valid evidence and good intentions.

As part of its governance policy, the Company refers to the Whistleblowing System Guidelines of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, in accordance with document Number: HK.01/7/11/6/KGC/DUT/JAI-25 dated November 7, 2025. This policy establishes a structured mechanism for reporting violations to ensure transparency and accountability in all of the Company's operational activities.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Perusahaan secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran kepada seluruh Insan IPCM untuk meningkatkan pemahaman mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif IPCM Bersih, yang diperkuat oleh Manajemen melalui pemanfaatan saluran pelaporan resmi Pelindo Bersih di lingkungan Pelindo Grup.

Selain itu, Perusahaan secara konsisten memberikan edukasi kepada pihak internal maupun eksternal mengenai tata cara penggunaan saluran pelaporan tersebut. Pengelolaan sistem dilakukan oleh pihak independen untuk memastikan kerahasiaan informasi dan melindungi identitas pelapor.

SOCIALIZATION OF VIOLATION SYSTEM

The Company regularly conducts outreach on its Violation Reporting System policy to all IPCM employees to improve their understanding. This activity is part of the Clean IPCM initiative, which is reinforced by Management through the use of the official Pelindo Bersih reporting channel within the Pelindo Group.

In addition, the Company consistently educates both internal and external parties on how to use these reporting channels. The system is managed by an independent party to ensure the confidentiality of information and protect the identity of reporters.



MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Bagan di bawah ini menggambarkan mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Perusahaan.

MECHANISM FOR SUBMITTING VIOLATION REPORTS

The chart below illustrates the mechanism of the Violation Reporting System within the Company.

Mulai
Start

1. **Pengaduan yang disampaikan kepada saluran Pelindo Bersih akan diadministrasikan sesuai jenis pelanggaran oleh Komite Pelindo Bersih untuk kemudian dilakukan verifikasi untuk memeriksa pengaduan tersebut sudah sesuai atau memenuhi syarat/ kriteria pengaduan.**
The reports submitted through the Pelindo Bersih channel will be administered according to the type of violation by the Pelindo Bersih Committee, and subsequently verified to assess whether the complaint meets the required criteria.

2. **Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka Komite Pelindo Bersih tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam file berkas pengaduan.**
If the complaint does not meet the requirements, the Pelindo Bersih Committee will not proceed with further action, and the complaint will be archived in the complaint records.

3. **Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang disusun secara sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut.**
The results of the verification are documented in a verification report prepared in a systematic, concise, clear, and accountable manner, containing conclusions, supported by relevant data and recommendations for follow-up actions.

4. **Untuk tindak lanjut pelaporan Anak Perusahaan maka laporan akan diteruskan Komite Pelindo Bersih kepada Tim WBS IPCM untuk ditindaklanjuti dan investigasi sesuai dengan laporan yang diterima.**
For follow-up on reports related to Subsidiaries, the Pelindo Bersih Committee will forward the report to the IPCM WBS Team for further action and investigation in accordance with the report.

5. **Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Tim WBS IPCM dapat meminta persetujuan Direktur Utama untuk mendapat persetujuan pelaksanaan investigasi dengan dibantu fungsi Satuan Pengawasan Internal dan atau fungsi Hubungan Industrial.**
If further investigation is required, the IPCM WBS Team may seek approval from the President Director to proceed with the investigation, supported by the Internal Audit function and/or the Industrial Relations function.

6. **Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dan/atau perundang-undangan. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner sesuai dengan Peraturan Direksi Terkait Indispliner.**
The reported who is found to be in violation may be subject to sanctions in accordance with applicable Company regulations and/or prevailing laws and regulations. The imposition of sanctions may be carried out by the Disciplinary Team in accordance with the relevant Board of Directors Regulation on disciplinary matters.

7. **Hasil tindak lanjut dari laporan akan dilaporkan juga kepada Komite Pelindo Bersih PT Pelabuhan Indonesia (Persero).**
The results of the follow-up actions will also be reported to the Pelindo Bersih Committee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).PT Pelabuhan Indonesia (Persero).



Rincian mengenai mekanisme pengaduan pelanggaran dapat dijabarkan seperti berikut:

1. Laporan dapat ditindaklanjuti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Termasuk pada kriteria jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan;
   b. Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan IPCM;

Details regarding the whistleblowing mechanism can be described as follows:

1. Reports may be followed up if they meet the following criteria:
   a. They fall within the predefined categories of violations;
   b. They involve misconduct committed by IPCM personnel;

c. Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi Perusahaan;
d. Manajemen Perusahaan akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.

2. Persyaratan laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal di bawah ini:
   a. Identitas Pelapor;
      Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari manajemen Perusahaan dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Pelapor diperbolehkan untuk tidak menyertakan identitas (anonim), tetapi untuk kebutuhan verifikasi laporan dibutuhkan identitas pelapor.
   b. Uraian pelanggaran yang dilaporkan paling sedikit memuat:
      - Permasalahan: Pelanggaran yang diadukan merupakan pelanggaran yang terkait dengan aktivitas perusahaan dan/atau anak perusahaan;
      - Lokasi kejadian;
      - Waktu kejadian.
   c. Data terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada).
   d. Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya.
   e. Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterimanya laporan oleh Komite Pelindo Bersih.
3. Bukti-bukti sebagaimana poin 2.(d). meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
   a. Bukti tertulis berupa dokumen, surat, kuitansi atau nota tagihan yang dituangkan di atas kertas ataupun dalam bentuk data atau surat elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum;
   b. Bukti tidak tertulis berupa saksi, rekaman suara (audio), rekaman visual atau gambar (video);
   c. Bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan melalui *Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem *Whistleblowing System* yang dapat diakses melalui:

c. They have an impact on the Company's performance and reputation;
d. The Company's management will prioritize follow-up on reports submitted by whistleblowers who disclose their identity and provide at least 2 (two) supporting pieces of evidence.

2. The submitted report must include at least the following:
   a. Whistleblower's identity;
      The whistleblower is required to disclose their identity to obtain protection from the Company's management and to facilitate follow-up should additional information be required. Anonymous reporting is allowed; however, identity details are necessary for verification purposes.
   b. Description of the reported violation, which must include at least:
      - Issue: The reported violation must be related to the Company's and/or its subsidiaries' activities;
      - Location of the incident;
      - Time of the incident.
   c. Information on the reported party and other involved parties, including their respective units (if any);
   d. Supporting documents and/or other evidence;
   e. Reports that will be processed further must relate to incidents/events that occurred within the last 3 (three) years from the date the report is received by the Pelindo Bersih Committee.
3. The evidence referred to in point 2(d) includes, but is not limited to, the following:
   a. Written evidence in the form of documents, letters, receipts, or invoices, whether in physical form or as data/electronic documents that can be read and legally substantiated;
   b. Non-written evidence such as witness statements, audio recordings, or visual recordings/images (videos);
   c. Other forms of evidence in accordance with applicable regulations.

Reporting through the Whistleblowing System is carried out in accordance with a specific mechanism governing the Whistleblowing System, which can be accessed through:



Telepon	: +6221 2782 2345
Faximile	: +6221 2782 3456
SMS/Whatsapp	: +62 811 933 2345/+62 811 951 1665
Email	: pelindobersih@whistleblowing.link
Website	: https://pelindobersih.pelindo.co.id/
Po Box	: Pelindo Bersih Po Box 1074, JKS 12010



PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Pelaporan dapat dilakukan dengan atau tanpa menyebutkan identitas (anonim). Bagi pelapor yang mencantumkan identitasnya, manajemen memberikan perlindungan serta kemudahan dalam proses tindak lanjut jika diperlukan informasi tambahan. Melalui mekanisme ini, setiap Insan Perusahaan maupun *stakeholder* yang melaporkan pelanggaran dijamin kerahasiaan identitasnya serta dilindungi dari kemungkinan tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

The reporting can be done with or without mentioning identity (anonymous). For reporters who state their identity, management provides protection and ease in the follow-up process if additional information is needed. Through this mechanism, every employee of the Company and stakeholders who report violations are guaranteed the confidentiality of their identity and are protected from possible retaliation by the reported party.

PROSES PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

Dalam implementasi *Whistleblowing System*, Perusahaan memanfaatkan infrastruktur yang disediakan oleh induk perusahaan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek kegiatan bisnis dan program kerja.

PROCESS FOR HANDLING VIOLATION COMPLAINTS

The Company utilizes the infrastructure provided by its parent company, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), to implement the Whistleblowing System. This step was taken as part of the commitment to internalize GCG principles in every aspect of business activities and work programs.

PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/7/11/7/KGC/DUT/JAI-25 tanggal 7 November 2025, Perusahaan membentuk Komite WBS IPCM, yang anggotanya terdiri dari:

1. Ketua (Merangkap Anggota): EVP Sekretaris Perusahaan
2. Wakil Ketua (Merangkap Anggota): Kepala Audit Internal
3. Sekretaris (Merangkap Anggota): DVP Komunikasi Perusahaan, GCG dan CSR
4. Anggota: VP SDM dan Umum
5. Anggota: VP Hukum

VIOLATION REPORTING SYSTEM MANAGER

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/7/11/7/KGC/DUT/JAI-25 dated November 7, 2025, the Company formed the IPCM WBS Committee, whose members consist of:

1. Chairman (also Member): EVP Corporate Secretary
2. Vice Chairperson (also Member): Head of Internal Audit
3. Secretary (also Member): DVP Corporate Communications, GCG and CSR
4. Members: VP Human Resources and General Affairs
5. Members: VP Legal

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES SERTA SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat laporan masuk, sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini.

NUMBER OF COMPLAINTS INCOMING AND PROCESSED AND SANCTIONS/FOLLOW UP FOR COMPLAINTS THAT HAVE COMPLETED IN 2025

Throughout 2025, there were no reports submitted, as shown in the table below.

	2025	2024
Jumlah pengaduan yang masuk Incoming reports	**Nihil** None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang diproses Processed reports	**Nihil** None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang telah selesai Settled Reports	**Nihil** None	Nihil None

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency of Bad Governance Practices

Sampai dengan akhir tahun 2025, IPCM tidak melakukan tindakan maupun menetapkan kebijakan terkait praktik *Bad Corporate Governance* yang tercantum berikut:

Until the end of 2025, IPCM will not take any action or establish any policies related to the following Bad Corporate Governance practices:

No.	Praktik Practice	Keterangan Description
1	Laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan. Report on Company activities that harm the environment.	Nihil None
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Material legal cases involving the Company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners currently in office are not disclosed in the Annual Report.	Nihil None
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan. Non-compliance in the disclosure of tax obligation fulfillment.	Nihil None
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK. Non-conformity in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and SAK.	Nihil None
5	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan. No disclosure of operating segments in the Financial Statements.	Nihil None
6	Kasus terkait buruh dan karyawan. Cases related to labor and employees.	Nihil None
7	Ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan dengan Laporan Tahunan Digital. Discrepancies between the Printed Annual Report and the Digital Annual Report.	Nihil None



Penerapan Pedoman
Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of Public Company Governance Guidelines

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor: 32/SEOJK.04/2015 mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, regulasi ini memberikan panduan tata kelola bagi perusahaan terbuka, yang meliputi lima aspek, delapan prinsip utama, serta 25 rekomendasi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berikut ini disampaikan implementasi aspek dan prinsip tata kelola yang diterapkan oleh IPCM. Hasil *mapping* GCG untuk setiap aspek dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan *Assessment* Penerapan GCG Tahun Buku 2025, sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/2015, pada Laporan Tahunan ini.

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) Number: 21/POJK.04/2015 and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) Number: 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Corporate Governance of Public Companies, this regulation provides corporate governance guidelines for public companies, covering five aspects, eight main principles, and 25 recommendations for the implementation of Good Corporate Governance principles. The following is a description of the implementation of governance aspects and principles applied by IPCM. The results of the GCG mapping for each aspect are explained further in the discussion of the 2025 GCG Implementation Assessment, in accordance with POJK 21/POJK.04/2015 Guidelines on Corporate Governance for Public Companies, in this Annual Report.

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham **Aspect 1:** Relationship between Public Companies and Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights	**Prinsip 1:** Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **Principle 1:** Enhancing the value of the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS)	**1.1** Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham. Public companies shall have technical methods or procedures for collecting votes, either openly or privately, that prioritize the independence and interests of shareholders.	Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., sebagaimana tertera dalam Risalah RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2025. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company were present at the Annual General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., as stated in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 18, 2025.	Terpenuhi (*Comply*)
		1.2 Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company were present at the Annual GMS.	Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., sebagaimana tertera dalam Risalah RUPS Tahunan tanggal 18 Juni 2025. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company were present at the Annual General Meeting of Shareholders of PT Jasa Armada Indonesia (JAI), Tbk., as stated in the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 18, 2025.	Terpenuhi (*Comply*)
	Prinsip 2: Meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham **Principle 2:** Improve the quality of public company communication with Shareholders	**2.1** Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor. Public companies have a policy of communicating with shareholders or investors.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor, yaitu Layanan e-PPID adalah layanan *online* yang ditujukan untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam menyampaikan permohonan informasi dan dokumentasi kepada PT Jasa Armada Indonesia Tbk. The Public Company has a communication policy with shareholders or investors, namely the e-PPID Service, which is an online service intended to facilitate applicants for public information in submitting requests for information and documentation to PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	Terpenuhi (*Comply*)

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
		2.2 Kebijakan komunikasi harus diungkapkan di Situs Web. The communication policy must be disclosed on the Website.	Kebijakan komunikasi telah diungkapkan di Situs Web, yaitu https://ipcmarine.co.id/hubungan-investor/. The communication policy has been disclosed on the Website, namely https://ipcmarine.co.id/hubungan-investor/.	Terpenuhi (*Comply*)
		2.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the GMS minutes shall be available on the Public Company's website for at least 1 (one) year.	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun, yaitu https://ipcmarine.co.id/pengumuman__pemanggilan/. A summary of the AGM minutes has been available on the Public Company Website for at least 1 (one) year, namely https://ipcmarine.co.id/pengumuman__pemanggilan/.	Terpenuhi (*Comply*)
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect 2: Functions and Roles of the Board of Commissioners	**Prinsip 3:** Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris **Principle 3:** Strengthen the membership and composition of the Board of Commissioners	**3.1** Kondisi Perusahaan senantiasa menjadi landasan pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Dewan Komisaris. The Company's condition shall always be the basis for consideration in determining the number of members of the Board of Commissioners.	Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini berjumlah 4 (empat) orang, dengan 2 (dua) orang di antaranya merupakan Komisaris Independen. The Board of Commissioners currently consists of 4 (four) members, 2 (two) of whom serve as Independent Commissioners.	Terpenuhi (*Comply*)
		3.2 Penentuan komposisi Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of the Board of Commissioners shall take into account the diversity, expertise, knowledge, and experience required.	Jumlah anggota Dewan komisaris telah memperhatikan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perusahaan. The number of members of the Board of Commissioners has taken into account the expertise, knowledge, and experience required by the Company.	Terpenuhi (*Comply*)



Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
	Prinsip 4: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris **Principle 4:** Improving the quality of the Board of Commissioners' duties and responsibilities	**4.1** Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has its own self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners.	Diatur dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: HK-56/4/10/3/MS-21 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Regulated in Joint Decree Number: HK-56/4/10/3/MS-21 dated October 4, 2021 concerning the Work Procedures of the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.	Terpenuhi (*Comply*)
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*Self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report of the Public Company.	Kebijakan penilaian sendiri (*Self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Commissioners has been disclosed in the Annual Report of the Public Company.	Terpenuhi (*Comply*)
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	Berdasarkan Permen BUMN 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014 dan juga AD/ART Perusahaan, bahwa setiap anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dengan alasan apapun termasuk didalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka jabatannya sebagai Dewan Komisaris dapat diberhentikan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan dalam mekanisme RUPS. Based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation 03/03/2023, POJK 33/POJK.04/2014 and also the Company's Articles of Association, any member of the Board of Commissioners who does not meet the requirements to be a member of the Board of Commissioners for any reason, including involvement in financial crimes, may be dismissed from their position as a member of the Board of Commissioners. In the event that the member of the Board of Commissioners resigns, it will be decided through the General Meeting of Shareholders mechanism	Terpenuhi (*Comply*)
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that performs the Nomination and Remuneration function shall formulate a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi yang terdapat pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris. The Board of Commissioners or Committee that performs the Nomination and Remuneration functions has formulated a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors, as contained in the Decree of the Board of Commissioners of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 concerning the Policy on Supervision and Advisory Services of the Board of Commissioners.	Terpenuhi (Comply)

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi **Aspect 3:** Functions and Roles of the Board of Directors	**Prinsip 5:** Memperkuat keanggotaan dan Komposisi Direksi **Principle 5:** Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	**5.1** Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan serta efektivitas dalam pengambilan Keputusan. The determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of the Company and the effectiveness of decision-making.	Karena kondisi Perusahaan dan pengambilan keputusan yang efektif senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Direksi. The Company's conditions and effective decision-making are always the basis for determining the number of Board members.	Terpenuhi (*Comply*)
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Directors shall take into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Komposisi Direksi saat ini berdasarkan kajian dokumen CV para anggota Direksi dan berdasarkan konfirmasi diketahui sudah mencerminkan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perusahaan. The current composition of the Board of Directors, based on a review of the CVs of the Board members and based on confirmation, is known to reflect the diversity of expertise, knowledge, and experience required by the Company.	Terpenuhi (*Comply*)
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors who oversee accounting or finance must have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Perusahaan memiliki anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan yang memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. The Company has members of the Board of Directors who oversee accounting and finance and who have expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Terpenuhi (*Comply*)
	Prinsip 6: Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi **Principle 6:** Improving the quality of the Board of Directors' duties and responsibilities	**6.1** Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate its performance	Direksi memiliki kebijakan *self-assessment* yang dilakukan secara berkala berdasarkan KPI mereka, yang hasilnya ditinjau dan dievaluasi oleh komite Nominasi dan Remunerasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors has a self-assessment policy that is carried out periodically based on their KPIs, the results of which are reviewed and evaluated by the Nomination and Remuneration Committee and reported to the Board of Commissioners.	Terpenuhi (*Comply*)
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (*Self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors is disclosed in the Annual Report of the Public Company.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi, telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy for evaluating the performance of the Board of Directors has been disclosed in the Public Company's Annual Report.	Terpenuhi (*Comply*)



Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes.	Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 03/03/2023 dan POJK 33/POJK.04/2014 dan juga AD/ART PT JAI, Tbk. Bahwa setiap anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Direksi dengan alasan apapun termasuk didalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka akan diberhentikan sebagai anggota Direksi. Dalam hal anggota Direksi tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan dalam mekanisme RUPS. Based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation 03/03/2023 and POJK 33/POJK.04/2014 as well as the Articles of Association of PT JAI, Tbk. Any member of the Board of Directors who does not meet the requirements to be a member of the Board of Directors for any reason, including involvement in financial crimes, will be dismissed as a member of the Board of Directors. In the event that a Board member resigns, the decision will be made through the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism.	Terpenuhi (*Comply*)
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan **Aspect 4:** Stakeholder Participation	**Prinsip 7:** Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan **Principle 7:** Improve corporate governance through stakeholder participation	**7.1** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Public Company has a policy to prevent insider trading.	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* dalam Pedoman Etik Bisnis yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris tanggal 7 November 2025. The Company has a policy to prevent insider trading in its Business Ethics Guidelines, which were approved by the Board of Directors and Board of Commissioners on November 7, 2025.	Terpenuhi (*Comply*)
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti penipuan. The Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading* dalam Pedoman Etik Bisnis yang telah disahkan oleh Direksi dan Komisaris tanggal 7 November 2025. The Company has a policy to prevent insider trading in its Business Ethics Guidelines, which were approved by the Board of Directors and Board of Commissioners on November 7, 2025.	Terpenuhi (*Comply*)
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*. The Company has a policy on the selection and improvement of suppliers or vendors.	Perseroan telah melakukan seleksi pemasok (*vendor*) berdasarkan SOP/kebijakan terkait pengadaan yang sudah ditetapkan Perseroan. Perseroan juga melakukan evaluasi pemasok (*vendor*) berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. The Company has selected suppliers (vendors) based on the SOP/policy related to procurement that has been established by the Company. The Company also conducts periodic evaluations of suppliers (vendors) once every 1 (one) year.	Terpenuhi (*Comply*)
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Company has a policy on fulfilling the rights of creditors.	Perseroan telah memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditur. Hal ini dikelola oleh Divisi keuangan yang mengatur dan mengelola pembayaran hak-hak kreditur. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam perjanjian yang mengikat secara hukum. The Company has a policy to fulfill the rights of creditors. This is managed by the Finance Division, which regulates and manages the payment of creditors' rights. These rights are also stated in a legally binding agreement.	Terpenuhi (*Comply*)
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. The Public Company has a whistleblowing system policy.	Perseroan telah memiliki kebijakan sistem whistleblowing system (WBS) yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT JAI, Tbk tanggal 7 November 2025. The Company has established a Whistleblowing System (WBS) policy, which was formally approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT JAI Tbk on November 7, 2025.	Terpenuhi (*Comply*)

Aspek Aspect	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Pelaksanaan Implementation	Status Status
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Perseroan telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi yaitu berupa tantiem dan karyawan dalam bentuk bonus (reward). The Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors in the form of tantiems and to employees in the form of bonuses (rewards).	Terpenuhi (*Comply*)
Aspek 5: Keterbukaan Informasi **Aspect 5:** Information Disclosure	**Prinsip 8:** Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi **Principle 8:** Enhancing the implementation of information disclosure	**8.1** Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Public companies utilize information technology more broadly than just websites as a medium for information disclosure.	Disamping menggunakan situs web resmi perusahaan (https://ipcmarine.co.id/) dan pelaporan secara elektronik seperti IDXNet dan OJK Reporting. Perseroan juga memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti IG, LinkedIn, Twitter/Threads untuk mengungkapkan informasi tentang IPCM. In addition to using the company's official website (https://ipcmarine.co.id/) and electronic reporting such as IDXNet and OJK Reporting, the Company also utilizes various social media platforms such as IG, LinkedIn, Twitter/Threads to disclose information about IPCM.	Terpenuhi (*Comply*)
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report of a Public Company shall disclose the ultimate beneficial owners of at least 5% (five percent) of the shares of the Public Company, in addition to disclosing the ultimate beneficial owners of the shares of the Public Company through the major and controlling shareholders.	Perseroan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% dalam Laporan Tahunan ini. The Company has disclosed the ultimate beneficial owners of at least 5% of the Company's shares in this Annual Report.	Terpenuhi (*Comply*)



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors		
Rekomendasi Recommendation			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: ▪ Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; ▪ Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; ▪ Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta ▪ Berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes: ▪ To be competitive and focused on long-term performance; ▪ To be ethical and responsible in conducting business; ▪ To have positive contributions to the community and the environment; ▪ As well as d. to be able to survive and grow (corporate resilience).	*Apply*	Direksi menjalankan kepemimpinan perusahaan sesuai dengan tata kelola peraturan yang berlaku untuk mencapai visi dan misi perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang telah disampaikan kepada pemegang saham dengan arahan dan masukan dari Dewan Komisaris. The Board of Directors leads the company in accordance with the applicable governance regulations to achieve the company's vision and mission, as well as the company's Long-Term Plan (RJPP), which has been communicated to shareholders with guidance and input from the Board of Commissioners.
Panduan Guideline			
1.1.1.1	Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. The Board of Directors maintains high standards of business ethics and ensures the implementation of a code of ethics that creates a corporate culture of integrity.	*Apply*	Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk berkomitmen mewujudkan standar etika bisnis dengan mengimplementasikan kebijakan Kode Etik Bisnis Perusahaan Nomor: HK.01/7/11/5/KGC/DUT/JAI-25 serta implementasinya, Direksi dan Dewan Komisaris telah menandatangani pakta integritas. The Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia Tbk is committed to realizing business ethics standards by implementing the Company's Code of Business Ethics policy Number: HK.01/7/11/5/KGC/DUT/JAI-25. In addition to its implementation, the Board of Directors and Board of Commissioners have signed an integrity pact.
1.1.1.2	Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi. The Board of Directors fosters a corporate culture that ensures that employees understand their responsibility to behave in accordance with corporate values and high standards of business ethics.	*Apply*	Perusahaan rutin melaksanakan sosialisasi untuk melibatkan karyawan perusahaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi. The Company regularly conducts socialization to engage employees in behaving according to corporate values and high business ethics standards.
1.1.1.3	Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. The Board of Directors ensures the fulfillment of corporate social and environmental responsibilities. The Board of Directors has a clear strategic plan in carrying out corporate social and environmental responsibilities.	*Apply*	Dalam rapat Direksi perusahaan terdapat monitoring Implementasi perencanaan strategis tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. In the company's Board of Directors meetings, there is monitoring of the implementation of the strategic planning for corporate social responsibility and environmental responsibility.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional. The Board of Directors ensures that the corporation is financially strong and operationally agile.	*Apply*	Secara rutin Direksi memonitoring pencapaian kinerja finansial dan operasional perusahaan dan melaporkan kinerja melalui Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2025. The Board of Directors regularly monitors the company's financial and operational performance and reports the performance through the Company's 2025 Management Report.
Rekomendasi Recommendation			
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies, as well as annual and mid-term plans are consistent with long term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	*Apply*	Perusahaan melakukan pemanfaatan inovasi dan teknologi dengan menyertakannya kepada Visi, Misi dan RJPP. The Company utilizes innovation and technology by incorporating them into its Vision, Mission, and Long-Term Corporate Plan (RJPP).
Panduan Guideline			
1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. When developing strategies and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of advanced technologies to increase competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibilities.	*Apply*	Dalam penyusunan RJPP dan RKAP Perusahaan, Direksi menyertakan Inovasi dan Teknologi Mutakhir untuk meningkatkan value serta daya saing perusahaan dengan tetap memperhatikan harapan pemangku kepentingan dan TJSL. In preparing the Company's RJPP and RKAP, the Board of Directors includes Innovation and Cutting-Edge Technology to increase the company's value and competitiveness while still paying attention to the expectations of stakeholders and TJSL.
1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi. The Board of Directors prioritizes and promotes a corporate culture that includes innovation and incorporates innovation into corporate strategy, operational development planning, and operational supervision.	*Apply*	Budaya Inovasi di perusahaan sudah rutin dilakukan, dimana Pelindo Group setiap tahunnya melaksanakan *Innovation Award* dan pada penyusunan RJPP dan RKAP Perusahaan memperhatikan aspek inovasi. The culture of innovation within the company is regularly implemented, with Pelindo Group holding the Innovation Award annually. In the preparation of the RJPP and RKAP, the Board of Directors ensures that innovation aspects are taken into account.
1.1.2.3	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra. The Board of Directors drives innovation that enhances long-term value creation for the business in a changing environment. Such innovation can include designing innovative business models, products and services, promoting research, improving production processes and operations, and collaborating with partners.	*Apply*	Perusahaan berupaya menjadikan inovasi sebagai nilai tambah yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan produksi dan operasi serta berkolaborasi dengan stakeholder perusahaan. The company strives to make innovation an added value that can be implemented to improve production and operations, as well as collaborate with the company's stakeholders.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies, as well as complying with applicable laws and regulations and standards.	*Apply*	Direksi PT JAI Tbk berkomitmen dalam penerapan manajemen risiko dimana pada tahun pelaporan disesuaikannya struktur organisasi untuk menguatkan implementasi manajemen risiko untuk melindungi nilai dalam pencapaian target perusahaan. The Board of Directors of PT JAI Tbk is committed to the implementation of risk management, where during the reporting year, the organizational structure was adjusted to strengthen the implementation of risk management to protect value in achieving the company's targets.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporation.	*Apply*	Penyusunan laporan Keuangan Perusahaan telah sesuai dengan kebijakan Akuntansi yang berlaku dan dilakukan sesuai periode yang ditetapkan dengan informasi yang akurat. The preparation of the company's financial statements has been in accordance with the applicable accounting policies and conducted within the designated period with accurate information.
Panduan Guideline			
1.1.4	Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai. The Board of Directors ensures that everyone involved in the preparation and disclosure of corporate information has relevant knowledge, skills and experience, reflected, among other things, in relevant professional certifications issued by reputable institutions. Apart from that, the Board of Directors also ensures the availability of adequate resources (including employees).	*Apply*	Executive Vice President Sekretaris Perusahaan sebagai pengungkap informasi perusahaan diangkat dengan memperhatikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidangnya serta di setiap tahunnya melaksanakan pengembangan kompetensi yang relevan dan bereputasi. The Executive Vice President Corporate Secretary, as the company's information discloser, is appointed based on their knowledge, skills, and experience in their field, and undergoes relevant and reputable competency development every year.
1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain Pendapat Komite Audit Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. When approving information disclosures (including periodic disclosures of financial information), the Board of Directors considers all of the following factors: Results of evaluation of design accuracy and effectiveness of internal control system implementation External auditor's opinion on financial reports, observations of the internal control system, and other observations through other sources Audit Committee Opinion Consistency with goals, strategies and policies.	*Apply*	Laporan Keuangan Perusahaan senantiasa diaudit oleh auditor independen, yaitu Kantor Akuntan Publik, sehingga pelaporan keuangan Perusahaan dan pengungkapannya tepat waktu dan akurat atas semua informasi yang material tentang Perusahaan. The Company's financial statements are always audited by an independent auditor, namely a Public Accounting Firm, ensuring that the financial reporting and disclosures are timely and accurate for all material information about the Company.
1.1.4.3	Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi. The Board of Directors submits a report that comments on the Quarterly Financial Report and is published simultaneously with the Quarterly Financial Report so that it is useful for investors and analysts who will review the corporation's financial fundamentals and performance	*Apply*	Perusahaan memastikan bahwa laporan keuangan Audited perusahaan telah di *publish* di *Annual Report* dan *website* perusahaan serta disampaikan kepada regulator terkait. The Company ensures that its audited financial statements have been published in the Annual Report and on the company's website, and are also submitted to the relevant regulators.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.	*Apply*	Perusahaan telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku untuk emiten dan perusahaan publik per 1 Januari 2021. Selain itu, kami juga berpedoman pada Standard GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan Pelindo telah dipublikasikan pada website Perusahaan. The company has prepared a Sustainability Report referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which became effective for issuers and public companies on January 1, 2021. In addition, we also adhere to the GRI Standards issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) – an organization established by the Global Reporting Initiative (GRI) to oversee the development of sustainability reporting standards. Pelindo's sustainability report has been published on the company's website.
Panduan Guideline			
1.1.5.1	Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. Sustainability reports are prepared based on a reporting framework that is appropriate to the size and complexity of the corporation and meets national and/or global standards.	*Apply*	Perusahaan telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku untuk emiten dan perusahaan publik per 1 Januari 2021. Selain itu, kami juga berpedoman pada *Standard* GRI (GRI *Standards*) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI). The company has prepared a Sustainability Report referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which became effective for issuers and public companies on January 1, 2021. In addition, we also adhere to the GRI Standards issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) – an organization established by the Global Reporting Initiative (GRI).
1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. Corporate sustainability reporting reflects corporate practices that support sustainable value creation.	*Apply*	Laporan Keberlanjutan mencerminkan praktik Perusahaan untuk mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan Visi Misi Perusahaan. The Sustainability Report reflects the Company's practices in supporting the creation of sustainable value in accordance with the regulations and the Company's Vision and Mission.
Rekomendasi Recommendation			
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, encourages business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.	*Apply*	Direksi PT JAI Tbk membuat kebijakan dalam RJPP terkait kerangka kerja governansi teknologi informasi (TI) yang selaras dengan IT *Masterplan* Pelindo Group 2022-2025. The Board of Directors of PT JAI Tbk has established a policy in the RJPP regarding the information technology (IT) governance framework that aligns with the Pelindo Group IT Masterplan 2022-2025.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal. The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that ensures adequate and optimal investment and allocation of IT resources.	*Apply*	Terdapat bagian dalam Struktur Perusahaan yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal di Perusahaan. There is a division within the Company's Structure that ensures adequate and optimal investment and allocation of IT resources in the Company.
1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI. The Board of Directors ensures that corporate risk management includes IT risk management.	*Apply*	Dalam implementasi manajemen risiko di perusahaan, salah satunya termasuk terkait IT yang dilakukan monitoring mitigasi. In the implementation of risk management within the company, one of the aspects includes IT, which is monitored for mitigation.
1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. The Board of Directors ensures that the corporation has IT security policies and procedures, including protection of data security and confidentiality.	*Apply*	PT JAI Tbk Memiliki kebijakan terkait IT yang telah disahkan oleh Direksi dan disosialisasikan kepada seluruh lini Perusahaan yang salah satunya adalah perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. PT JAI Tbk has a policy related to IT that has been approved by the Board of Directors and communicated to all levels of the company, one of which is the protection of data security and confidentiality.
Rekomendasi Recommendation			
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	*Explain*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk menjalankan kegiatan usaha tidak berlandaskan prinsip syariah. PT Jasa Armada Indonesia Tbk conducts its business activities without being based on sharia principles.
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Directors' Charter or by a Directors' Decree.	*Apply*	Direksi dan Dewan Komisaris PT JAI Tbk telah memiliki kebijakan *Board Manual* Perusahaan yang terus dijalankan dan ditinjau secara periodik. The Board of Directors and the Board of Commissioners of PT JAI Tbk have a Company Board Manual policy that is continuously implemented and reviewed periodically.
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	*Apply*	Telah tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Kebijakan *Board Manual*. It is outlined in the Company's Articles of Association and the Board Manual Policy.
1.2	Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya. Performance Assessment – Board of Directors and its Members.		
Rekomendasi Recommendation			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	*Apply*	Dewan Komisaris melakukan evaluasi efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur Perusahaan. The Board of Commissioners conducts an evaluation of the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director of the Company.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors. The results of the self-assessment are submitted to the Board of Commissioners to be assessed and if necessary adjusted to the assessment of the Board of Commissioners.	*Apply*	Direksi memiliki kebijakan self-assessment yang dilakukan secara berkala berdasarkan KPI mereka, yang hasilnya ditinjau dan dievaluasi oleh komite Nominasi dan Remunerasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors has a self-assessment policy that is conducted periodically based on their KPIs, the results of which are reviewed and evaluated by the Nomination and Remuneration Committee and reported to the Board of Commissioners.
1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris. Self-assessment policies or other assessment policies are based on assessment benchmarks that are specific, measurable, achievable and relevant and in accordance with those determined by the Board of Commissioners based on the considerations of the Nomination and Remuneration Committee and as a basis for assessing the accountability of the Board of Directors regarding the level of success of the Corporation in achieving targets. The selected benchmarks are included in the work agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	*Apply*	Setiap tahunnya disusun Kontrak Kinerja Direksi dan KPI yang dimonitoring dan evaluasi oleh Dewan Komisaris. Each year, a Performance Contract for the Board of Directors and KPIs are established, which are monitored and evaluated by the Board of Commissioners.
1.2.1.3	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada direktur, komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. The remuneration scheme in the form of shares given to directors, commissioners and employees must obtain approval from shareholders.	*Explain*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk tidak memberikan remunerasi dalam bentuk saham kepada direktur, komisaris, dan karyawan. PT Jasa Armada Indonesia Tbk does not provide remuneration in the form of shares to the directors, commissioners, and employees.
1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a director's term of office is based on satisfactory performance evaluation results regarding his or her contribution.	*Apply*	Perpanjangan masa jabatan Direktur didasari dengan evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of the Director's term is based on a satisfactory performance evaluation of their contributions.
Rekomendasi Recommendation			
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	*Apply*	Komite Nominasi dan Remunerasi menentukan kriteria dan memonitoring kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya sebagaimana *charter* dan agenda rapat. The Nomination and Remuneration Committee determines the criteria and monitors the performance of the President Director and other members of the Board of Directors in accordance with the charter and meeting agenda.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. The Board of Commissioners ensures that the President Director's performance evaluation is based on predetermined criteria which have been communicated to him in advance. Performance criteria or evaluation must provide incentives to the President Director to carry out his role in supporting the achievement of corporate goals and the creation of sustainable value.	*Apply*	Kinerja Direktur Utama diukur dengan kriteria yang telah ditetapkan dan diberikan insentif terhadap pencapaiannya. The performance of the President Director is measured against the established criteria, and incentives are provided based on their achievements.
1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, carries out an annual performance evaluation of the President Director. The Board of Commissioners or the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners communicates the results (including development areas) of performance evaluation to the President Director.	*Apply*	Hasil pengukuran kinerja disampaikan kepada Direktur Utama dalam Rapat Gabungan. The performance measurement results are presented to the President Director in the Joint Meeting.
1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara objektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. The Board of Commissioners, with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, approves the performance evaluation criteria for other members of the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of other members of the Board of Directors objectively and accurately based on previously determined performance evaluation criteria.	*Apply*	Direktur utama mengevaluasi dan memonitoring kinerja anggota Direksi lainnya dan melaporkannya kepada Dewan komisaris. The President Director evaluates and monitors the performance of other members of the Board of Directors and reports it to the Board of Commissioners.
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and short term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	*Apply*	Dewan Komisaris telah memberikan telaah terhadap penyusunan RJPP 2023-2027 yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners has reviewed the preparation of the 2023-2027 Long-Term Corporate Plan (RJPP) submitted by the Board of Directors.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	*Apply*	Keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah diungkapkan pada laporan tahunan PT JAI Tbk 2025 pada bab Tata Kelola Perusahaan. Decisions that require the approval of the Board of Commissioners have been disclosed in the 2025 Annual Report of PT JAI Tbk in the Corporate Governance section.
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, anatrgolongan, dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and is decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicity, religion, race, group and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	*Apply*	Telah terdokumentasi dalam dokumen usulan Dewan Komisaris terkait pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS. It has been documented in the proposal document from the Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to the GMS.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	*Apply*	Kebijakan suksesi telah terdapat dalam charter Komite Nominasi dan Remunerasi dan terdokumentasi dalam rapat komite nominasi dan remunerasi. The succession policy is included in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee and is documented in the meetings of the Nomination and Remuneration Committee.
1.3.5	Dewan Komisaris ▪ Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; ▪ Secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners ▪ Submit to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; ▪ Periodically review the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Dewan Komisaris mengusulkan penetapan remunerasi kepada RUPS berdasarkan usulan Komite Nominasi & Remunerasi setelah dikonsultasikan kepada Pemegang Saham Utama. The Board of Commissioners proposes the determination of remuneration to the GMS based on the proposal of the Nomination & Remuneration Committee after being consulted with the Majority Shareholder.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners monitors the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	*Apply*	Dewan Komisaris melakukan review atas kebijakan-kebijakan perangkat GCG PT JAI Tbk. The Board of Commissioners conducts a review of the GCG framework policies of PT JAI Tbk.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
1.3.6.1	Dewan komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen. The board of commissioners ensures that regular evaluations are carried out on the implementation of corporate governance policies, both independently and using independent external consultants.	*Apply*	Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan *assessment* GCG menggunakan parameter ACGS dan POJK yang juga dipantau oleh Dewan Komisaris. In 2025, the company conducted a GCG assessment using ACGS parameters and POJK, which was also monitored by the Board of Commissioners.
Rekomendasi Recommendation			
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with corporate goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	*Apply*	Terdokumentasi dalam Charter/kebijakan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit serta dalam risalah rapat. Documented in the Charter/policies of the Risk Monitoring Committee and the Audit Committee, as well as in the meeting minutes.
1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: ▪ Penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (*risk appetite*) korporasi, ▪ Kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (*early warning signals*) atas risiko material, ▪ Kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that: ▪ Establishing and implementing risk management policies is consistent with corporate goals, objectives, strategies and risk appetite, ▪ Risk management policies can provide early warning signals for material risks, ▪ Risk management policies are reviewed periodically, for example every year.	*Apply*	Dalam agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi salah satunya membahas terkait penerapan manajemen risiko pada Perusahaan. One of the items on the agenda of the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors is the discussion of the implementation of risk management in the Company.
1.3.7.3	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal. The Board of Commissioners monitors and provides input so that main risks are identified through consideration of internal and external factors.	*Apply*	Dalam agenda rapat melalui Komite Pemantau Risiko membahas terkait penerapan manajemen risiko pada Perusahaan. The agenda of the meeting through the Risk Monitoring Committee discusses the implementation of risk management in the Company.
1.3.7.4	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risks occurring have been assessed, and that appropriate risk mitigation strategies and plans are in place.	*Apply*	Dalam agenda rapat melalui Komite Pemantau Risiko membahas terkait penerapan manajemen risiko pada Perusahaan. The agenda of the meeting through the Risk Monitoring Committee discusses the implementation of risk management in the Company.
1.3.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of risk management and the corporation's internal control system.	*Apply*	Rapat membahas terkait penerapan manajemen risiko pada Perusahaan dilakukan secara periodik. The meeting discussing the implementation of risk management in the Company is conducted periodically.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	*Apply*	Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, oversees the financial statements.
Panduan Guideline			
1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif. Before approving the financial report, the Board of Commissioners received a statement from the President Director and Finance Director of the corporation, that in their opinion, the entity's financial records have been managed well and the financial report has been prepared in accordance with applicable accounting standards and presents a fair presentation of the corporation's financial position and performance. and that their opinion is formed based on an appropriately designed and effectively implemented risk management and internal control system.	*Apply*	Direksi meminta masukan dan arahan kepada Dewan Komisaris atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan. The Board of Directors seeks input and guidance from the Board of Commissioners regarding the preparation of the company's financial statements.
Rekomendasi Recommendation			
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual reports and sustainability reports and ensures their integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.	*Apply*	Pada Laporan Tahunan dan laporan keberlanjutan 2025 terdapat pengesahan dari Dewan Komisaris. The 2025 Annual Report and Sustainability Report include an endorsement from the Board of Commissioners.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	*Apply*	Kebijakan *Board Manual* dilakukan tinjauan secara periodik. The Board Manual policy is reviewed periodically.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	*Apply*	Perusahaan memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dalam *Board Manual.* The Company has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners in the event of involvement in financial crimes, as stipulated in the Board Manual.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	*Apply*	Komisaris Independen memberikan masukan dalam setiap rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan maupun rapat bersama komite dibawah Dewan Komisaris. The Independent Commissioner provides input at every Board of Commissioners meeting, joint meeting, and meetings with committees under the Board of Commissioners.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
1.3.12.1	Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: a) mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; b) dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; c) mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas. If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, then the Board of Commissioners appoints an Independent Commissioner or senior Independent Commissioner (if there is more than one Independent Commissioner) to carry out the role of President Commissioner for tasks of the President Commissioner that have potential conflicts of interest with affiliated parties. The criteria for appointing a senior Independent Commissioner are: a) able to convey opinions/arguments constructively to the President Commissioner; b) compared to other commissioners, has more knowledge about the corporation, including its performance, market and stakeholders; c) able to provide balanced views/ thoughts on the issues and concerns of the majority shareholder.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.
1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar: ▪ Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; ▪ Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; ▪ Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan ▪ Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. In carrying out their role as members of the Board of Commissioners, independent Commissioners must: ▪ Acting in the best interests of the corporation; ▪ Monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors and Board of Commissioners or controlling shareholders; ▪ Taking independent account of the views of minority shareholders and other stakeholders; and ▪ Encourage dialogue between management, shareholders and other stakeholders.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.
1.3.12.3	Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas komisaris independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. The corporation revealed the reasons for the end of the independent commissioner's duties which occurred before the term of office ended.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan dan pada tahun pelaporan tidak ada komisaris independen yang berakhir masa jabatannya. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual, and in the reporting year, there were no independent commissioners whose term of office ended.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The Chief Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Apart from that, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.
Panduan Guideline			
1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the duties of the President Commissioner are disclosed in the annual report and corporate website.	*Apply*	Tertuang dalam Laporan Tahunan pada Bab GCG, Sub Bab Dewan Komisaris, tugas Dewan Komisaris It is outlined in the Annual Report in the Corporate Governance Chapter, under the Subchapter of the Board of Commissioners, which details the duties of the Board of Commissioners.
1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. The President Commissioner coordinates the distribution of supervisory roles among members of the Board of Commissioners, chairs meetings of the Board of Commissioners and represents the Board of Commissioners in matters with parties outside the Board of Commissioners.	*Apply*	Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris. The Board of Commissioners' Decree on the Allocation of Duties of the Board of Commissioners.
1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former President Directors and members of the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners cannot be immediately appointed as President Commissioner. There needs to be a cooling off period of 2 (two) years before being reappointed as President Commissioner. If the Board of Commissioners decides that the former President Director/member of the Board of Directors needs to become President Commissioner, then the Board of Commissioners provides reasons and explanations in the Annual Report.	*Apply*	Kebijakan ini sudah terdapat pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan. This policy is already stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.4	Pembentukan Komite Committee Establishment		
	Rekomendasi Recommendation		
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.	*Apply*	Dewan Komisaris memiliki komite sebagai berikut: 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Nominasi dan Remunerasi The Board of Commissioners has the following committees: 1. Audit Committee 2. Risk Monitoring Committee 3. Nomination and Remuneration Committee
	Panduan Guideline		
1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya. For Committees that are not required by law, if they do not have a Committee, the corporation discloses this fact and discloses the process used to ensure that the function of the Committee is carried out by the Board of Commissioners as it should.	*Apply*	Komite yang dimiliki oleh organ Dewan Komisaris telah sesuai dengan aturan perundangan. The committees owned by the Board of Commissioners are in accordance with the applicable laws and regulations.
	Rekomendasi Recommendation		
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	*Apply*	Komite Audit telah memiliki Piagam Charter. The Audit Committee has a Charter.
	Panduan Guideline		
1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan. The Committee has a charter that clearly defines its role and provides it with all the authority necessary to carry out its role. This authority includes, among other things, the right to obtain information, meet with related parties in connection with the implementation of their duties (with or without the presence of management), and request advice from independent external consultants/experts if the committee deems it necessary.	*Apply*	Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi di PT JAI Tbk telah memiliki piagam/charter. The Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee at PT JAI Tbk have their own charters.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner may not be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	*Apply*	Ketua Komite Audit PT JAI Tbk bukan merupakan Komisaris Utama. The Chairperson of the Audit Committee at PT JAI Tbk is not the President Commissioner.
1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Commissioners and its Members		
Rekomendasi Recommendation			
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees and each individual commissioner.	*Apply*	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap komite sebagaimana tertuang dalam agenda rapat Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has conducted an evaluation of the committees as outlined in the Board of Commissioners' meeting agenda.
Panduan Guideline			
1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self -assessment*) untuk menilai kinerja sebagai dewan secara keseluruhan. The Board of Commissioners can have a self assessment policy to assess performance as a board as a whole.	*Apply*	Metode *self assessment* dimungkinkan dalam menilai kinerja kolegial Dewan Komisaris. The self-assessment method is possible for evaluating the collective performance of the Board of Commissioners.
1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other assessment policies are based on benchmarks or assessment criteria that are specific, measurable, achievable and relevant and in accordance with those determined by the Board of Commissioners.	*Apply*	Tolok ukur penilaian kinerja Dewan Komisaris telah ditetapkan sebelum dijalankan dan diukur. The performance evaluation criteria for the Board of Commissioners have been established before being implemented and measured.
1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of the commissioner's term of office is based on satisfactory performance evaluation results regarding his contribution.	*Apply*	Perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris salah satunya didasarkan oleh evaluasi kinerja yang dilakukan. The extension of the term of office for the Board of Commissioners is partly based on the performance evaluation conducted.
1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners regularly engages independent external consultants at least once during their term of office, to facilitate objective and honest performance evaluations of the Board of Commissioners.	*Apply*	Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara self assessment dan dibantu konsultan eksternal independen secara periodik. Performance evaluations are conducted through self assessment and supported by an independent external consultant periodically.
1.6	Benturan Kepentingan Conflict of Interest		



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function, before accepting a new appointment as director or commissioner of a publicly traded corporation, other directorship or other position with a significant time commitment.	*Apply*	Pada tahun pelaporan terdapat 1 anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam kebijakan Board Manual Perusahaan. In the reporting year, there was 1 member of the Board of Directors who held multiple positions and had obtained approval from the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Board Manual policy.
Panduan Guideline			
1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris. The Board of Commissioners ensures clear policies and Pilotagelines for members of the Board of Directors who serve or wish to serve as directors or commissioners in other corporations. The policy should specify the permitted appointments and the permitted number of corporations in which they are permitted to simultaneously serve as directors or commissioners.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the issue of dual positions held by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Rekomendasi Recommendation			
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	*Apply*	Aturan terkait penandatangan telah diatur dalam Peraturan terkait rangkap jabatan juga diatur dalam Peraturan Direksi terkait *Board Manual*. Pada tahun pelaporan, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan penandatangan pakta integritas. The rules regarding signing authority have been regulated in the regulations, and dual positions are also governed by the Board Manual regulations. In the reporting year, the Board of Commissioners and the Board of Directors have signed an integrity pact.
Panduan Guideline			
1.6.2.1	Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (*abstain*) benturan kepentingan tersebut. The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest do not participate in decision making related to (abstain) the conflict of interest.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations in place regarding conflicts of interest in decision-making by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.6.2.2	Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau partner bisnis lainnya. Each member of the Board of Commissioners immediately informs the Board of Directors and Board of Commissioners if there is a potential conflict of interest, including as a result of their position as a consultant or official in a customer company, supplier, creditor or other business partner.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait benturan kepentingan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations in place regarding conflicts of interest for the Board of Commissioners.
1.6.2.3	Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan. All members of the Board of Directors immediately disclose potential conflicts of interest to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and do not participate in decision making in cases where they have a conflict of interest.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait rangkap jabatan Direksi. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations in place regarding the dual positions of the Board of Directors.
1.6.2.4	Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan. In its report, the Board of Commissioners informed the GMS of the existence of a material conflict of interest and its treatment. A material conflict of interest that is more than temporary in nature may result in termination of office as a member of the board.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations in place regarding dual positions held by the Board of Directors and the Board of Commissioners.
1.7	Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Improvement of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	*Apply*	Aturan mengenai pelatihan ditetapkan dalam kebijakan Board Manual dan sepanjang tahun pelaporan Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan beberapa pelatihan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan PT JAI Tbk. The rules regarding training are set forth in the Board Manual policy, and throughout the reporting year, the Board of Commissioners and the Board of Directors have undergone several training sessions coordinated by the Corporate Secretary of PT JAI Tbk.
Panduan Guideline			
1.7.1.1	Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. The Board of Directors ensures that newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners receive a formal and adequate induction program as well as all information relevant to their roles and responsibilities.	*Apply*	Pada tahun pelaporan telah dilaksanakan pengenalan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat pada bulan Juni 2025, yaitu Bpk Mitchell Julius Tupamahu, Bpk Doni Istyanto Hari Mahdi, dan Bpk Arief Hermawan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. In the reporting year, the company was introduced to the newly appointed Board of Commissioners and Directors in June 2025, namely Mr. Mitchell Julius Tupamahu, Mr. Doni Istyanto Hari Mahdi, and Mr. Arief Hermawan, coordinated by the Corporate Secretary.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
1.7.1.2	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate and sustainable training and knowledge development programs.	*Apply*	Aturan mengenai pelatihan ditetapkan dalam kebijakan Board Manual dan sepanjang tahun pelaporan Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan beberapa pelatihan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan PT JAI Tbk. The rules regarding training are established in the Board Manual policy, and throughout the reporting year, the Board of Commissioners and the Board of Directors have participated in several training sessions coordinated by the Corporate Secretary of PT JAI Tbk.
1.7.1.3	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive accurate, timely and clear information regarding the latest developments in relevant laws and regulations and standards, other applicable obligations, risk factors and the corporate business environment.	*Apply*	Direksi dan Dewan Komisaris membahas perkembangan terkini perihal perusahaan dalam Rapat Gabungan sebagaimana terdokumentasi dalam risalah rapat. The Board of Directors and the Board of Commissioners discuss the latest developments regarding the company in the Joint Meeting, as documented in the meeting minutes.
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors		
Rekomendasi Recommendation			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.	*Apply*	Dilakukan rapat khusus pada Komite Nominasi dan remunerasi untuk melakukan validasi atas usulan yang disampaikan Dewan Komisaris. A special meeting was held in the Nomination and Remuneration Committee to validate the proposals submitted by the Board of Commissioners.
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and skills required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait seleksi jabatan Anggota Direksi. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the selection of the Board of Directors members.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: ▪ Identitas calon dan alasan pengangkatan; ▪ Kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; ▪ Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; ▪ Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; ▪ Lama masa jabatan; ▪ Kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan ▪ Setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information about prospective Directors must be disclosed in the election/re-election process and must be available from the date the GMS summons is issued until the GMS is held and can be downloaded via the Public Company website and/ or e-GMS, including: ▪ Identity of the candidate and reasons for appointment; ▪ Core competencies, qualifications, and professional background; ▪ Current positions at other corporations, as well as key roles at non-profit/charitable organizations; ▪ Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; ▪ Length of term of office; ▪ Attendance at Board of Directors meetings (except for new Directors); And ▪ Any share ownership in the corporation.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait calon seleksi jabatan Anggota Direksi. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the selection process for candidates for the position of Board of Directors members.
Rekomendasi Recommendation			
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.	*Apply*	Keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan, pada Bab GCG, Sub Bab Dewan Komisaris. serta dituangkan pula pada Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. Diversity within the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report, in the GCG chapter, under the sub-chapter on the Board of Commissioners, and is also outlined in the Board Manual policy of PT JAI Tbk.
Panduan Guideline			
2.1.3.1	Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. The corporation reports in the Annual Report the current diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners, measurable composition targets and the progress achieved in achieving these targets. Information should include references to how diversity is achieved through appropriate succession planning in the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan, pada Bab GCG, Sub Bab Dewan Komisaris. serta dituangkan pula pada Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. Diversity within the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report, in the GCG chapter, under the sub-chapter on the Board of Commissioners, and is also outlined in the Board Manual policy of PT JAI Tbk.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
2.1.4	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait transparansi seleksi jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulations regarding the transparency of the selection process for members of the Board of Commissioners.
Panduan Guideline			
2.1.4.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/ atau e-RUPS, meliputi: ▪ Identitas calon dan alasan pengangkatan; ▪ kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; ▪ Jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; ▪ Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; ▪ Lama masa jabatan; ▪ Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk komisaris baru); dan ▪ Setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information about Commissioner candidates must be disclosed in the election/re-election process and must be available from the date of the summons to the GMS until the GMS is held and can be downloaded via the Public Company website and/ or e-GMS, including: ▪ Identity of the candidate and reasons for appointment; ▪ Core competencies, qualifications, and professional background; ▪ Current positions at other corporations, as well as key roles at non-profit/charitable organizations; ▪ Factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; ▪ Length of term of office; ▪ Attendance at Board of Commissioners and committee meetings (except for new commissioners); and ▪ Any share ownership in the corporation.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait transparansi seleksi jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has provisions regarding the transparency of the selection process for members of the Board of Commissioners.
2.1.4.2	Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan. If the Board of Commissioners uses an independent external consultant in the nomination process, then relevant information regarding the independent external consultant is disclosed in the annual report, including information regarding independence and conflicts of interest.	*Apply*	Seleksi calon Dewan Komisaris tahun pelaporan menggunakan internal Pelindo Group. The selection of candidates for the Board of Commissioners during the reporting year used internal personnel from the Pelindo Group.
Rekomendasi Recommendation			
2.1.5	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee which carries out the nomination function determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	*Apply*	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham. The implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process is conducted by the shareholders.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
2.1.6	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota -anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	*Apply*	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan. Proses ini dilakukan oleh pemegang saham. The implementation has been carried out in accordance with the provisions. This process is conducted by the shareholders.
Panduan Guideline			
2.1.6.1	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi. At least one Commissioner has previous experience in the main sector in which the corporation operates.	*Apply*	Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai ketentuan, Komisaris Utama memiliki pengalaman dibidang kepelabuhanan. The implementation has been carried out in accordance with the provisions, and the President Commissioner has experience in the port sector.
2.1.6.2	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. Determining the number of members of the Board of Commissioners takes into account the condition of the corporation.	*Apply*	Penentuan jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan dan kondisi Perusahaan. The determination of the number of the Board of Commissioners has been in accordance with the provisions and the conditions of the Company.
Rekomendasi Recommendation			
2.1.7	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and th	*Apply*	Jumlah anggota Dewan Komisaris saat tahun pelaporan ada 4 Orang dengan jumlah Anggota Komisaris Independen ada 2. The number of members of the Board of Commissioners during the reporting year is 4, with 2 Independent Commissioners.
Panduan Guideline			
2.1.7.1	Mantan direktur utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former president directors/members of the Board of Directors can join the Board of Commissioners as Independent Commissioners only in extraordinary circumstances and there must be a gap period between these positions of at least 2 (two) years.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the positions of the members of the Board of Commissioners.
2.1.7.2	Mantan komisaris independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former independent commissioners can be reappointed as Independent Commissioners only in extraordinary circumstances and there must be a gap period between these positions of at least 2 (two) years.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the positions of the members of the Board of Commissioners.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
2.1.7.3	Masa jabatan komisaris independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (Sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/sepuluh tahun, seorang komisaris independen dapat terus menjabat hanya sebagai komisaris. The term of office of an independent commissioner may not exceed the time limit of 9 (nine) years. For corporations with a term of office of 5 (five) years, the term of office may not exceed 10 (ten) years. After nine/ten years, an independent commissioner can continue to serve only as a commissioner.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait jabatan Anggota Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT JAI Tbk has regulated the positions of the members of the Board of Commissioners.
Rekomendasi Recommendation			
2.1.8	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi yang terdapat pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Nomor: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris. The Board of Commissioners or the Committee responsible for Nomination and Remuneration functions has developed a succession policy for the Nomination process of the Board of Directors members, as outlined in the Board of Commissioners' Decree of PT Jasa Armada Indonesia Number: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 concerning the Supervisory and Advisory Policy of the Board of Commissioners.
Panduan Guideline			
2.1.8.1	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: a. Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada dewan komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya. b. Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota komisaris dan anggota komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada dewan komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan dewan komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut. 2. Secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi direksi dan dewan komisaris. 3. Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite. 4. Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	*Apply*	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi yang terdapat pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Nomor: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
	The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include but are not limited to: 1. Develop Pilotagelines to ensure that all commissioners allocate sufficient time to the corporation to carry out their responsibilities effectively. These Pilotagelines include: a. In appointing the main commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a description of the job specifications, including time commitment requirements which also takes into account the need for time commitment in times of crisis. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the board of commissioners prior to appointment and disclosed in the annual report. Changes in commitments must be immediately reported to the board of commissioners and their impacts explained in the next annual report. b. In appointing commissioners, the Nomination and Remuneration Committee determines the terms and conditions for appointing commissioners. These terms and conditions are available for inspection. The expected time commitment is stated in the letter of appointment of commissioner members and commissioner members must have sufficient time to fulfill the expected time commitment. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the board of commissioners prior to appointment, along with an indication of the time commitment required and the board of commissioners must be notified of any changes to these commitments. 2. Proactively lead and be responsible for the development, implementation and ongoing review of succession planning for directors and board of commissioners. 3. Uphold the principle of independence in handling conflicts of interest (and potential conflicts of interest) between committee members in carrying out the Committee's duties. 4. Consider and be responsible for appointing nominated independent consultants, including the selection and requirements for their assignment, as well as disclosing the identity and costs of consulting services.		The Board of Commissioners or the Committee responsible for Nomination and Remuneration functions has developed a succession policy for the Nomination process of the Board of Directors members, as stated in the Board of Commissioners' Decree of PT Jasa Armada Indonesia Number: SK.DK/27/04/02/JAI-2017 concerning the Supervisory and Advisory Policy of the Board of Commissioners.
2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	*Apply*	Kebijakan Board Manual PT JAI Tbk telah mengatur terkait Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk has provisions related to the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
2.2.1.1	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. Remuneration policies are reasonable and fair, both in structure and amount, and are determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourage competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and community norms.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Remunerasi Pekerja di lingkungan PT JAI Tbk yang mengacu kepada Kebijakan Pelindo Group. As per the remuneration policy for employees within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, it refers to the Pelindo Group's policy
2.2.1.2	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*). The corporation has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and in line with the achievement of the corporation's long-term interests, such as the following performance measures: share ownership options, deferred bonuses, provisions for the return of part or all of the bonuses/incentives that have been paid (clawback).	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy and the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
2.2.1.3	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive other facilities apart from the facilities already provided at the corporation's General Meeting of Shareholders.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Rekomendasi Recommendation			
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. Apart from that, consideration must also be given to his position as President Commissioner and chairman as well as his membership in committees.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Panduan Guideline			
2.2.2.1	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. The remuneration of the Board of Commissioners must be a fixed remuneration. If members of the Board of Commissioners are given remuneration related to performance, the basis for the award must be related to the long-term development of the corporation and is different from members of the Board of Directors.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
2.2.2.2	Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus. Independent Commissioners may not receive stock options, shares linked to performance, or bonuses.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk Komisaris Independen Tidak menerima opsi saham dikaitkan dengan kinerja atau bonus. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Independent Commissioners do not receive stock options linked to performance or bonuses.
Rekomendasi Recommendation			
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by taking into account corporate operational performance, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Panduan Guideline			
2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi: ▪ Menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan. ▪ Mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang. ▪ Secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak direktur/komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik. ▪ Mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi direktur dan komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk direktur dan komisaris yang hampir pensiun. ▪ Menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite. ▪ Mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT JAI Tbk.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
	In carrying out its role the Nomination and Remuneration Committee: ▪ Determine the appropriate and balanced proportion between fixed and performance related remuneration components, remuneration components that are paid directly or that are deferred. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support the achievement of long-term corporate performance. Remuneration incentives are ensured in accordance with corporate risk policies. Apart from that, there is a determination of an upper limit on remuneration and this upper limit is disclosed in the annual report, ▪ Consider whether directors and commissioners qualify for annual bonuses and/or allowances under long-term incentive schemes. ▪ Carefully consider the compensation obligations (including pension contributions and all other components) that the director/commissioner is entitled to if dismissed early. The aim is to avoid giving rewards for poor performance, ▪ Consider the consequences of pension obligations and other long-term benefits for directors and commissioners for the corporation, including the impact of increases in employee benefits and other changes, especially for directors and commissioners who are nearing retirement. ▪ Uphold the principle of independence in handling conflicts of interest (and potential conflicts of interest) between committee members in carrying out the Committee's duties. ▪ Consider and be responsible for appointing an independent consultant for remuneration, including the selection and requirements for assignment, as well as disclosing the identity and costs of consulting services.		As per the Board Manual policy and the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners		
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Relationship		
Rekomendasi Recommendation			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	*Apply*	Terdapat Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, dimana di dalam nya dibahas mengenai hal-hal strategis. There is a Coordination Meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors, where strategic matters are discussed.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	*Apply*	Buku RJPP disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. The RJPP book is submitted to the Board of Commissioners for approval.
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
3.1.3.1	Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: ▪ Memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi. ▪ Memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. ▪ Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah. ▪ Mengatur dan memfasilitasi orientasi direktur/komisaris/anggota komite baru dan pengembangan profesional direktur/komisaris/anggota komite. ▪ Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/investor, baik lokal maupun asing. The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to: Ensure a good flow of information between the Board of Commissioners and its committees and between the Board of Commissioners and the Board of Directors ▪ Monitoring the development of corporate governance, including ensuring that the charter of the Board of Commissioners, Directors and committees is fully implemented, assisting and providing advice to the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance practices to meet stakeholder expectations. ▪ Manage all meeting requirements of the Board of Commissioners, Board of Directors, Directors and Board of Commissioners, committees formed by the Board of Commissioners, attend and record minutes of all meetings and facilitate communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that discussions and decisions at meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are recorded accurately in treatise. ▪ Organize and facilitate the orientation of new directors/commissioners/committee members and professional development of directors/commissioners/committee members. ▪ Manage investor relations activities to maintain and improve communication between corporations and shareholders/investors, both local and foreign.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.
3.1.3.2	Setiap direktur dan komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan sekretaris korporat dan sebaliknya. Each director and commissioner can communicate directly with the corporate secretary and vice versa.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.
3.1.3.3	Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi. The Board of Commissioners provides consideration to the Board of Directors in the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
3.2	Akses informasi Dewan Komisaris Access to Information for the Board of Commissioners		
Rekomendasi Recommendation			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual dan Pedoman GCG PT JAI Tbk. As per the Board Manual and GCG Guidelines of PT JAI Tbk.
Panduan Guideline			
3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait. The Board of Commissioners has a process that allows members of the Board of Commissioners, including Independent Commissioners, to have access to the Board of Directors and related senior management.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual of PT JAI Tbk.
3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut. The President Director or Corporate Secretary immediately informs the Board of Commissioners about major material and important events regarding the condition, performance and management of the corporation. If necessary, a Board of Commissioners meeting is held to discuss the incident.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual of PT JAI Tbk.
3.2.1.3	Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Between Board meetings, the Board of Commissioners communicates regularly with the Board of Directors to keep them informed of corporate developments that need the attention of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can carry out their duties more effectively.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. As per the Board Manual of PT JAI Tbk.
3.3	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners on Impacts of the Structure		

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk terkait kepemilikan saham Perusahaan. As per the Board Manual policy of PT JAI Tbk regarding the ownership of the Company's shares.
Panduan Guideline			
3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya. The Board of Directors and Board of Commissioners understand the shareholder ownership structure and relationships between corporate shareholders, and consider the impact on control over the corporation, including written and unwritten family agreements as controlling shareholders, agreements between shareholders, or policies of the business group of which the corporation is a part of it.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk terkait kepemilikan saham Perusahaan. As per the Board Manual policy of PT JAI Tbk regarding the ownership of the Company's shares.
3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and Board of Commissioners ensure that the shareholder ownership structure and relationships between corporate shareholders do not affect the implementation of the roles and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, (including in relation to the Directors' succession plan) in the best interests of the corporation.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Board Manual PT JAI Tbk terkait kepemilikan saham Perusahaan. As per the Board Manual policy of PT JAI Tbk regarding the ownership of the Company's shares.
3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi. The Board of Commissioners monitors and the Board of Directors ensures that information is disclosed correctly when conditions exist that impact control over the corporation.	*Apply*	Setiap informasi material yang akan diungkapkan telah disampaikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris sebagaimana terdokumentasi pada agenda rapat gabungan. Any material information that will be disclosed has been communicated to the Board of Commissioners in advance, as documented in the joint meeting agenda.
4	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Ethical and Responsible Conduct		
4.1	Pedoman Etika dan Perilaku Code of Conduct		



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: ▪ Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi. ▪ Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi. ▪ Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. ▪ Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya. ▪ Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi. ▪ Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi. ▪ Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. ▪ Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. ▪ Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. ▪ Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. ▪ Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya. This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly express the corporation's expectations that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees will: ▪ Acting in the best interests of the corporation. ▪ Act honestly and with high standards of integrity. ▪ Be independent and act on complete information, in good faith, with due diligence and care. ▪ Comply with the laws and regulations that apply to the corporation and its operations. ▪ Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical Pilotagelines. ▪ Not be involved or participate in any activities that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will have a negative impact on the corporation's reputation. ▪ Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes losses to the corporation and its customers. ▪ Not taking advantage of his position or the opportunities generated by his position for personal gain. ▪ Avoid acts of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for oneself or for other people which creates a conflict of interest/providing benefits to third parties in violation of statutory regulations. ▪ Respect differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. ▪ Ensure complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. It is outlined in the Board Manual policy of PT JAI Tbk.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors determines policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Board Manual dan Pengelolaan Gratifikasi PT JAI Tbk. It is outlined in the Board Manual and the Gratification Management policy of PT JAI Tbk.
Panduan Guideline			
4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis. The Board of Directors develops and establishes a system that can be used as an effort to prevent money laundering and terrorist financing, anticorruption, offering or accepting bribes as well as payments or other inducements to commit acts that violate laws and regulations or are unethical.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Board Manual dan Pengelolaan Gratifikasi PT JAI Tbk. It is outlined in the Board Manual and the Gratification Management policy of PT JAI Tbk.
4.1.2.2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan antikorupsi kepada pemangku kepentingan. The Board of Directors communicates anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption policies by providing training to staff and making efforts to expand anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption efforts to stakeholders.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Board Manual dan Pengelolaan Gratifikasi PT JAI Tbk. It is outlined in the Board Manual and the Gratification Management policy of PT JAI Tbk.
4.1.2.3	Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris. Any material violation of anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption policies must be informed to the Board of Directors and Board of Commissioners or the Board of Commissioners Committee.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Board Manual PT JAI Tbk. It is outlined in the Board Manual policy of PT JAI Tbk.
4.1.2.4	Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris. The Board of Directors establishes and regularly reviews a transparent policy on political engagement, which includes lobbying and donations to political causes or candidates where permitted by law, and ensures that the benefits and risks of the approach taken are understood, monitored and regularly reviewed by Board of Commissioners.	*Apply*	Telah tertuang dalam kebijakan Pengelolaan Gratifikasi dan Kode Etik PT JAI Tbk. It is outlined in the Gratuity Management and Code of Conduct policy of PT JAI Tbk.
4.2	Nilai – nilai dan Budaya Organisasi Corporate Values and Culture		
Rekomendasi Recommendation			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. Corporations articulate, cultivate and express corporate culture and values.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam kebijakan budaya Perusahaan dan laporan program kerja implementasi budaya / nilai-nilai Perusahaan PT JAI Tbk. As outlined in the company's culture policy and the work program report on the implementation of the company's culture/values at PT JAI Tbk.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku. The corporation fosters a corporate culture that ensures that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees understand and are committed to carrying out their responsibilities to behave in accordance with ethical and behavioral Pilotagelines.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Conduct policy at PT JAI Tbk.
4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi. There is adequate training and outreach at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all corporate employees mentioned above for all aspects related to corporate culture, values and ethics.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Conduct policy at PT JAI Tbk.
4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. There is an assessment and monitoring program so that all Directors, Board of Commissioners and all corporate employees understand the relevant code of ethics and implement it effectively to avoid corporate involvement in inappropriate behavior.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Conduct policy at PT JAI Tbk.
4.3	Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Enforcement and Communication of the Code of Ethics, Values, and Culture		
Rekomendasi Recommendation			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	*Apply*	Perusahaan telah melakukan sosialisasi perdir kode etik bisnis kepada seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka, menggunakan media internal perusahaan. The company has conducted a socialization of the business code of ethics regulation to all employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. The socialization was carried out in person, using the Company's internal media.
Panduan Guideline			
4.3.1.1	Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik. Corporation has violation reporting Pilotagelines that can be used to encourage reporting of behavior that violates laws and regulations or is unethical, which also includes a Pilotageline on how the corporation protects whistleblowers who have good intentions.	*Apply*	PT JAI Tbk telah memiliki kebijakan Kode Etik Perusahaan dan *Whistleblowing System* dimana didalamnya terdapat pengaturan terkait perlindungan pelapor. PT JAI Tbk has a Company Code of Ethics and Whistleblowing System policy, which includes provisions regarding the protection of whistleblowers.
4.3.1.2	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and committees are immediately notified if there is a material violation of ethical and behavioral Pilotagelines.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Ethics policy at PT JAI Tbk.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
4.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and Committees are immediately notified if any material incidents are reported based on the violation reporting policy.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik dan *Whistleblowing System* di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Ethics and Whistleblowing System policy at PT JAI Tbk.
4.3.1.4	Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. The Board of Directors ensures that violations of the Pilotagelines result in disciplinary action, including dismissal. If there is a violation, the Board of Directors is obliged to take preventive action so that the violation does not happen again.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Kode Etik di PT JAI Tbk. In accordance with the Code of Conduct policy at PT JAI Tbk.
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1	Pengendalian Internal, dan Kepatuhan Internal Control, and Compliance		
Rekomendasi Recommendation			
5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	*Apply*	Setiap tahun Direksi Perusahaan melakukan *review* atas penerapan tata kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko pada Dewan Komisaris. Every year, the Company's Board of Directors conducts a review of the implementation of governance, risk management, and corporate compliance in coordination with the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners.
Panduan Guideline			
5.1.1.1	Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: ▪ Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; ▪ Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya; ▪ Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; ▪ Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan ▪ Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.	*Apply*	Setiap tahun Direksi Perusahaan melakukan *review* atas penerapan tata kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko pada Dewan Komisaris.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
	Periodic reviews carried out by the Board of Directors specifically consider: ▪ There have been changes since the last periodic review regarding the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in its business and external environment; ▪ The scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control systems, the role of the internal audit function and other assurance service providers; ▪ The scope and frequency of communication of the above monitoring results to the Board of Commissioners (or to the Audit Committee) which enables the Board of Commissioners to comprehensively assess the condition of internal control and its effectiveness in risk management; ▪ The occurrence of failures or deficiencies in internal control discovered in the period reviewed and the extent of contingent impacts that have, can, or may occur in the future, which have a material impact on the corporation's financial condition or performance; and ▪ Effectiveness of internal controls relating to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.		Every year, the Company's Board of Directors conducts a review of the implementation of governance, risk management, and corporate compliance, in coordination with the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners.
5.1.1.2	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi. The Board of Directors ensures that the corporation has a function whose role is to always follow changes in various applicable laws and regulations related to its business and laws and regulations in general, as well as having a system to ensure corporate compliance with applicable laws and corporate internal regulations.	*Apply*	Untuk memastikan perusahaan mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada struktur organisasi terdapat Divisi Hukum. To ensure the company complies with changes in various applicable laws and regulations, the organizational structure includes a Legal Division.
5.2	Manajemen Risiko Risk Management		
Rekomendasi Recommendation			
5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Board Manual dan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Board Manual and Risk Management policies at PT JAI Tbk.
Panduan Guideline			
5.2.1.1	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif. The Board of Directors leads the implementation of risk management to be utilized by all levels of management in creating and protecting value for the corporation, by setting an example and being a role model in terms of controlling and managing risks in business and operational activities in order to instill, strengthen and develop a risk-aware culture that is based on compliance. and effective internal control.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy at PT JAI Tbk.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
5.2.1.2	Direksi mengungkapkan a) risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan b) apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut. The Board of Directors discloses a) the main risks faced by the corporation and their management; and b) whether there is material exposure to environmental or social risks and, if so, how to manage or intend to manage those risks.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy at PT JAI Tbk.
5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures the suitability of the internal control system and risk management framework with the characteristics of the corporation's needs and business processes so that the internal control and risk management processes cover all types of risks faced by the corporation, including communication and reporting about risks, risk management, audits and their effectiveness, can be implemented effectively in line with stakeholder expectations.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy at PT JAI Tbk.
5.2.1.4	Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan *cyber*, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors ensures risk governance processes in Information Technology including disruption, cyber security, disaster recovery, to ensure that all major risks are identified, managed and reported to the Board of Commissioners.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy at PT JAI Tbk.
Rekomendasi Recommendation			
5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko dan Piagam Komite Pemantau Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Management policy and the Charter of the Risk Monitoring Committee at PT JAI Tbk.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk diantaranya: ▪ Memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; ▪ Memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (*fraud risk*); ▪ Mereviu setiap kejadian material yang melibatkan fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang; ▪ Menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; ▪ Menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; ▪ Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan ▪ Mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan. The role of the Risk Management Monitoring Committee includes: ▪ Monitor corporate performance against the risk management framework, including monitoring whether the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; ▪ Monitor control of key risks, including major financial reporting risks and fraud risks; ▪ Reviewing every material incident involving fraud or significant weaknesses in corporate risk control, as well as lessons learned to prevent recurrence in the future; ▪ Receive reports from internal auditors regarding the results of reviews of the adequacy of corporate risk management processes; ▪ Receive reports from management regarding new and emerging sources of risk as well as risk control and mitigation steps that have been carried out by the Board of Directors to handle these risks; ▪ Prepare recommendations to the Board of Commissioners regarding changes that must be made to the entity's risk management framework or risk appetite as approved by the Board of Commissioners; and ▪ Oversee corporate insurance programs, taking into account corporate business and insurable risks.	*Apply*	Sesuai dengan Piagam Komite Pemantau Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Monitoring Committee Charter at PT JAI Tbk.
5.2.2.2	Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif. The number of members of the Risk Management Monitoring Committee is adequate and the majority are independent; among its members have the necessary technical knowledge and sufficient understanding of the industry in which the entity operates, to be able to carry out the committee's mandate effectively.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Pemantau Risiko di PT JAI Tbk. In accordance with the Risk Monitoring Committee Charter at PT JAI Tbk.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
5.3	Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management, and Compliance		
Rekomendasi Recommendation			
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.	*Apply*	Perusahaan telah membentuk Komite Governance, Risk and Compliance (GRC) PT JAI Tbk. The Company has formed the Governance, Risk and Compliance (GRC) Committee of PT JAI Tbk.
Panduan Guideline			
5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directors ensures coordination and increased capability between the main GRC systems which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management and internal audit systems so that the corporation remains on the right track in achieving its goals.	*Apply*	Perusahaan memastikan Komite GRC PT JAI Tbk melaksanakan peningkatan kapabilitas melalui pelatihan. The company ensures that the GRC Committee of PT JAI Tbk carries out capability disclosure through training.
Rekomendasi Recommendation			
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	*Apply*	Kepala Divisi Hukum/Fungsi Kepatuhan tidak ada rangkap fungsi. Head of Legal Division/Compliance Function does not have any dual functions.
5.4	Audit Internal Internal Audit		
Rekomendasi Recommendation			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.	*Apply*	Dalam pelaksanaan GRC di Perusahaan berkoordinasi dengan Komite Audit Dewan Komisaris. In implementing GRC in the Company, coordinate with the Audit Committee of the Board of Commissioners.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggung jawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi. Internal audits are carried out objectively and independently from corporate management and from the function being audited. Thus, Internal Audit is functionally responsible and reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and Board of Commissioners and can communicate and meet directly with the Audit Committee and Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk. In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk.
5.4.1.2	Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. The Board of Commissioners, through the audit committee, ensures that the internal audit function has adequate authority, resources and access to information to carry out its role effectively.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk. In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk.
5.4.1.3	Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal. The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit, scope of work, and budget for the Internal Audit function.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk. In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk.
5.4.1.4	Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal. The Audit Committee reviews the effectiveness of internal audit implementation and evaluates Internal Audit performance every year and submits the results to the Board of Commissioners. Every three years, taking into account the recommendations of the Audit Committee, the Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of the Internal Audit.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk. In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk.
5.4.1.5	Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Internal audit creates an audit plan, involving the President Director, Board of Commissioners with consideration by the Audit Committee. The internal audit plan is submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners for approval.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit dan Audit Internal di PT JAI Tbk. In accordance with the Audit Committee and Internal Audit Charter policy at PT JAI Tbk.
5.4.1.6	Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi. The Audit Committee ensures that the implementation of internal audits is carried out based on applicable internal audit professional standards and by upholding the professional code of ethics and the organization's code of ethics.	*Apply*	Sesuai dengan kebijakan Piagam Komite Audit di PT JAI Tbk. In accordance with the Audit Committee Charter policy at PT JAI Tbk.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
6	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
6.2	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy		
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki peraturan Direksi terkait penyebaran informasi dan PPID Nomor: HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 Tanggal 20 Agustus 2024. The Company has a Board of Directors regulation regarding the dissemination of information and PPID Number: HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 dated August 20, 2024.
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and in a timely manner relevant material information about the corporation must be fulfilled.	*Apply*	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Direksi terkait penyebaran informasi dan PPID Nomor: HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 Tanggal 20 Agustus 2024. In accordance with the Company's Articles of Association and the Board of Directors' Regulations regarding the dissemination of information and PPID Number: HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 dated August 20, 2024.
Panduan Guideline			
6.1.2.1	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku. The corporation has and discloses written policies in carrying out continuous disclosure obligations/ information disclosure based on applicable regulations.	*Apply*	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Direksi terkait penyebaran informasi dan PPID Nomor: HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 Tanggal 20 Agustus 2024. In accordance with the Company's Articles of Association and the Board of Directors' Regulations regarding the dissemination of information and PPID Number: HK.01/20/8/2/KGC/DUT/JAI-24 dated August 20, 2024.
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports		
Rekomendasi Recommendation			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	*Apply*	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris melalui Komite Audit memiliki tugas meneliti dan menelaah laporan berkala termasuk laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. In accordance with the Company's Articles of Association and the Audit Committee Charter, the Board of Commissioners through the Audit Committee has the task of examining and reviewing periodic reports including interim financial reports to be published.
Panduan Guideline			
6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: ▪ Pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim, ▪ Peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/ pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim, ▪ Peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. Disclosure of systems and procedures includes at least: ▪ Internal control over financial reporting, including interim financial reports, ▪ The role of the risk management/compliance/ management oversight function and the internal audit function in ensuring the integrity of interim financial reports, ▪ The role of the Audit Committee in reviewing interim financial reports to be published.	*Apply*	Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Piagam Komite Audit, Dewan Komisaris melalui Komite Audit memiliki tugas meneliti dan menelaah laporan berkala termasuk laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. In accordance with the Company's Articles of Association and the Audit Committee Charter, the Board of Commissioners through the Audit Committee has the task of examining and reviewing periodic reports including interim financial reports to be published.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.	*Apply*	Laporan Keuangan *Audited* PT JAI Tbk yang dilakukan auditor eksternal dikoordinasikan kepada Komite Audit. The Audited Financial Report of PT JAI Tbk conducted by the external auditor is coordinated with the Audit Committee.
Panduan Guideline			
6.2.2.1	Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya. The external auditor selection process through tender is carried out transparently so that shareholders can observe and monitor the process if they wish.	*Explain*	Proses seleksi auditor Perseroan dilakukan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS. The Company's auditor selection process is carried out through decision-making at the GMS.
6.2.2.2	Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. The Audit Committee ensures that in the contract with the auditor there are no clauses that could interfere with the auditor's independence or competence in carrying out the financial statement audit.	*Apply*	Proses kontrak auditor eksternal dikoordinasikan juga dengan Komite Audit. The external auditor contract process is also coordinated with the Audit Committee.
6.2.2.3	Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu *management letter* yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen. The Audit Committee carries out adequate dialogue with the external auditor without the presence of management and monitors interactions between management and the external auditor, including reviewing the management letter provided by the external auditor and monitoring management's response.	*Apply*	Proses komunikasi auditor eksternal dikoordinasikan juga dengan Komite Audit. The external auditor's communication process is also coordinated with the Audit Committee.
6.2.2.4	Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit. The Board of Commissioners, or Audit Committee, ensures that the external auditor immediately informs all significant findings and problems discovered by the external auditor during the audit.	*Apply*	Proses audit oleh Auditor Eksternal berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit. The audit process by the External Auditor is coordinated with the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
6.2.2.5	Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor. The Audit Committee reviews every non-audit service provided by the external auditor and its affiliates and related costs, to ensure that such services do not compromise the auditor's independence.	*Apply*	Proses audit oleh Auditor Eksternal berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dan atau Komite Audit. The audit process by the External Auditor is coordinated with the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and prepared in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	*Apply*	Perusahaan telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku untuk emiten dan perusahaan publik per 1 Januari 2021. Selain itu, berpedoman pada Standard GRI (GRI *Standards*) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan PT JAI Tbk telah dipublikasikan pada website Perusahaan. The Company has prepared a Sustainability Report by referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which will be effective for issuers and public companies as of January 1, 2021. In addition, it is guided by the GRI Standards (GRI Standards) issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) - an institution formed by the Global Reporting Initiative (GRI) to handle the development of sustainability reporting standards. PT JAI Tbk's sustainability report has been published on the Company's website.
Panduan Guideline			
6.2.3.1	Laporan keberlanjutan diberikan asurans oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten. Sustainability reports are provided with assurance by independent and competent external parties.	*Apply*	Penyusunan *Sustainability Report* PT JAI Tbk berpedoman pada Standard GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI). The preparation of PT JAI Tbk's Sustainability Report is guided by the GRI Standards (GRI Standards) issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) - an institution formed by the Global Reporting Initiative (GRI).
Rekomendasi Recommendation			
6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Corporations publish integrated annual reports that put historical performance into context and describe the corporation's risks, opportunities and future prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	*Apply*	Perusahaan telah membuat Laporan Keberlanjutan dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku untuk emiten dan perusahaan publik per 1 Januari 2021. Selain itu, berpedoman pada Standard GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) – lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan PT JAI Tbk telah dipublikasikan pada website Perusahaan. The Company has prepared a Sustainability Report by referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which will be effective for issuers and public companies as of January 1, 2021. In addition, it is guided by the GRI Standards (GRI Standards) issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) - an institution formed by the Global Reporting Initiative (GRI) to handle the development of sustainability reporting standards. PT JAI Tbk's sustainability report has been published on the Company's website.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
6.3	Diseminasi Informasi Information Dissemination		
Rekomendasi Recommendation			
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	*Apply*	▪ Perusahaan telah memiliki peraturan terkait penyebaran informasi dan PPID. ▪ Saluran penyebaran informasi yang digunakan berupa *Website* perusahaan, *Annual Report*, Sosial Media, *Email* Perusahaan dan Kontak. ▪ The Company has regulations related to the dissemination of information and PPID. ▪ The information dissemination channels used are the company's website, annual report, social media, company email and contacts.
Panduan Guideline			
6.3.1.1	Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan. Corporations regularly hold meetings with financial analysts.	*Apply*	Perusahaan bertemu dengan analis keuangan secara berkala pada tahun 2025. The Company meets with financial analysts periodically in 2025.
6.3.1.2	Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Corporations utilize information technology effectively and more widely apart from websites as a medium for information disclosure.	*Apply*	Perusahaan telah memiliki peraturan terkait penyebaran informasi dan PPID. Saluran penyebaran informasi yang digunakan salah satunya adalah Website perusahaan. The company has regulations related to the dissemination of information and PPID. One of the information dissemination channels used is the company's website.
6.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya. The corporation ensures that the security of the information it disseminates is maintained and protected.	*Apply*	Perlindungan dan keamanan informasi yang disampaikan diatur dalam peraturan penyebaran informasi dan PPID Perusahaan. Protection and security of information submitted is regulated in the Company's information dissemination regulations and PPID.
Rekomendasi Recommendation			
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Pilotagelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Pilotage is available on the website for a minimum period of five years.	*Apply*	Perusahaan senantiasa membuka berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses publik. Informasi disampaikan melalui berbagai sarana seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), media cetak dan elektronik, serta platform media sosial termasuk X, Facebook, Youtube, Instagram, dan Tiktok. Selain itu, Perusahaan juga memanfaatkan situs web resminya sebagai media penyampaian informasi yang transparan. Laporan Tahunan ini juga telah mencantumkan pernyataan tahunan terkait penerapan Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia. The Company always opens various communication channels that can be accessed by the public. Information is delivered through various means such as the General Meeting of Shareholders (GMS), print and electronic media, and social media platforms including X, Facebook, Youtube, Instagram, and Tiktok. In addition, the Company also utilizes its official website as a medium for delivering transparent information. This Annual Report has also included an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia.
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk *listing* utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on the capital market in jurisdictions other than the home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented.	*Apply*	Perusahaan selalu menerapkan Kode Etik Bisnis dalam setiap kegiatan berusahanya dan perusahaan tidak terdaftar (*listing*) dalam bursa lain selain yuridiksi asal. The company always applies the Code of Business Ethics in all its business activities and the company is not registered (listed) on any stock exchange other than the jurisdiction of origin.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
7	Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of the Rights of Shareholders		
7.1	Hak Pemegang Saham Rights of Shareholders		
Rekomendasi Recommendation			
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	*Apply*	Sebagaimana tertuang dalam kebijakan PPID PT Jasa Armada Indonesia Tbk. As stated in the PPID policy of PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Panduan Guideline			
7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan. Shareholders, including institutional shareholders, are permitted to consult with each other on issues regarding basic shareholder rights as stipulated in these Principles, but this must not be abused.	*Apply*	Sebagaimana telah disampaikan pada agenda RUPS kepada para pemegang saham PT JAI Tbk. As stated in the GMS agenda to the shareholders of PT JAI Tbk.
7.1.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang. Corporations encourage constructive dialogue between shareholders (especially institutional investors) and management. The corporation responded to requests from shareholders to engage in dialogue to support sustainable growth and increase corporate value in the medium to long term.	*Apply*	Sebagaimana telah disampaikan pada agenda RUPS kepada para pemegang saham dan risalah RUPS PT JAI Tbk. As stated in the agenda of the GMS to shareholders and the minutes of the GMS of PT JAI Tbk.
7.1.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. Corporations provide a forum or platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	*Apply*	Telah disediakan kontak perusahaan yang dimuat pada media komunikasi Perusahaan. Company contacts have been provided and published on the Company's communication media.
7.1.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. The Corporation promptly discloses to the public all material new facts that are available to financial analysts and other similar parties.	*Apply*	Informasi telah disediakan dan dimuat pada media komunikasi Perusahaan. Information has been provided and published on the Company's communication media.
7.1.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan. Corporations disclose corporate communication policies with shareholders or investors in websites and reports.	*Apply*	Informasi telah disediakan dan dimuat pada media komunikasi Perusahaan. Information has been provided and published on the Company's communication media.
Rekomendasi Recommendation			
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation, which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.	*Explain*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk bukan merupakan entitas induk. PT Jasa Armada Indonesia Tbk is not a parent entity.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: ▪ Wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukkan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; ▪ Efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan ▪ Pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya; ▪ Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain Perusahaan terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. Corporate governance framework and policies in subsidiaries include written policies regarding, among other things: ▪ Authority to appoint commissioners and directors. Generally, for subsidiaries with relatively large sizes, the Board of Commissioners needs to be involved in appointing management in the subsidiary. For smaller subsidiaries, the Board of Directors has the authority to implement it; ▪ Effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; and ▪ Timely and accurate disclosure of material information on subsidiaries, including financial information, transactions with related parties and other material information; ▪ If a corporation owns/forms a legal entity other than a limited liability company, the corporation ensures that its corporate governance policies apply to that entity according to the context of the type of legal entity.	*Explain*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk bukan merupakan entitas induk. PT Jasa Armada Indonesia Tbk is not a parent entity.
7.1.2.2	Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak. For investments in subsidiaries that are significant but below the majority (such as ownership between 20 percent and 50 percent of shares), the Board of Directors ensures that there is a shareholder agreement or other agreement that allows the corporation to monitor corporate performance and participate in management, including for approval of transactions and decisions which is significant. This is necessary, among other things, to ensure that the corporation has adequate, accurate and timely information on subsidiaries.	*Explain*	PT Jasa Armada Indonesia Tbk bukan merupakan entitas induk. PT Jasa Armada Indonesia Tbk is not a parent entity.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Kebijakan Pengembangan Bisnis PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association and Business Development Policy of PT JAI Tbk.
Panduan Guideline			
7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. Corporations clearly disclose these rules and procedures so that investors understand their rights and the right to obtain compensation.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Kebijakan Pengembangan Bisnis PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association and Business Development Policy of PT JAI Tbk.
7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan (*anti-take-over devices*) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. Tactics that prevent takeover (anti-take-over devices) must not be used to protect management and the Board of Commissioners from accountability.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Kebijakan Pengembangan Bisnis PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association and Business Development Policy of PT JAI Tbk.
7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment to all Shareholders		
Rekomendasi Recommendation			
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b).pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that ensure all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, b). disclosure of such rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
Panduan Guideline			
7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham. To ensure transparency of shareholders' rights to obtain a share of profits, corporations disclose measurable dividend policies, for example the target dividend payment ratio/dividends per share.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Investors obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they buy them. Any change in the economic value of shares or voting rights requires the approval of the class of shares negatively affected.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
7.2.1.3	Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen). So that shareholders can know the ultimate beneficial owner (beneficial owner) of a corporation with significant ownership, the corporation discloses the ultimate beneficial owner in share ownership through the main and controlling shareholders and the ultimate beneficial owner in share ownership of at least 5% (five percent).	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: a). perjanjian antar pemegang saham, b). *voting cap*, c). *multiple voting rights*, d). perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. The corporation discloses: a). agreement between shareholders, b). voting cap, c). multiple voting rights, d). other agreements that allow certain shareholders to have voting rights over their ownership in the corporation.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.1.5	Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. The Corporation provides mechanisms/procedures that enable shareholders to have the opportunity to obtain effective compensation for violations of their rights in accordance with applicable laws and regulations at a reasonable cost and without excessive delay.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
Rekomendasi Recommendation			
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.	*Apply*	Perusahaan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, tanpa membedakan asal-usul domestik atau non-domestik. Informasi yang relevan bagi pemegang saham disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses, seperti situs web resmi Perusahaan. Laporan Tahunan ini juga mengungkapkan bahwa Perusahaan senantiasa memastikan transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Potensi benturan kepentingan telah dikelola secara tepat guna melindungi kepentingan Perusahaan dan seluruh pemegang saham. Selain itu, Perusahaan telah menerapkan kebijakan pencegahan insider trading. The Company upholds the principle of equality by providing equal treatment to all shareholders, both majority and minority, without distinguishing between domestic or nondomestic origins. Relevant information for shareholders is conveyed openly to the public through easily accessible media, such as the Company's official website. This Annual Report also discloses that the Company always ensures that transactions with related parties are carried out in accordance with applicable laws. Potential conflicts of interest have been managed appropriately to protect the interests of the Company and all shareholders. In addition, the Company has implemented a policy to prevent insider trading.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
7.2.2.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (*arm's length transaction*). Corporations have standard operational policies and procedures that ensure that transactions with related parties are carried out in such a way as to ensure that transactions are fair and reasonable (arm's length transactions).	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk dan mengacu pada Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK-01/27/6/3/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk Nomor: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 tanggal 25 September 2024 dan dijabarkan lebih detail pada Buku Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk and referring to the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK-01/27/6/3/PGDN/ DUT/JAI-24 dated June 27, 2024 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk, as amended by the Regulation of the Board of Directors of PT Jasa Armada Indonesia Tbk Number: HK.01/25/9/2/PGDN/DUT/JAI-24 dated September 25, 2024 and described in more detail in the Technical Instructions Book concerning Procedures for Procurement of Goods and Services within PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
7.2.2.2	Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan. Material related party transactions, including consulting service agreements and other services or work between directors/commissioners and their affiliates with the corporation must obtain approval in accordance with applicable laws and regulations. Apart from those that have been regulated for approval in statutory regulations, material related party transactions obtain approval from the Board of Commissioners. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in granting approval.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut: Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; kalaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar serta mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. The corporation has a policy that transactions that are certain to harm public/minority shareholders are prohibited. Examples of such transactions: Financial assistance/subsidies to Directors or Commissioners at interest rates below reasonable; Even if there is a loan, it must be made at a reasonable interest rate and terms and obtain approval from the Board of Commissioners. Financial assistance/subsidies to entities other than entities wholly owned by the corporation.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar PT JAI Tbk. As stipulated in the Articles of Association of PT JAI Tbk.
7.2.2.4	Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. The Board of Commissioners discloses the process policy for approving, reviewing and monitoring related party transactions and any inherent conflicts of interest.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Board Manual PT JAI Tbk. As regulated in the Articles of Association and Board Manual of PT JAI Tbk.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
7.2.2.5	Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi. The conclusions of the Audit Committee's review of related party transactions/significant conflicts of interest are disclosed in the corporation's Annual Report.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Board Manual PT JAI Tbk. As regulated in the Articles of Association and Board Manual of PT JAI Tbk.
Rekomendasi Recommendation			
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. Corporations have and disclose policies to prevent insider trading. Corporations have clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market.	*Apply*	Perusahaan memastikan perlakuan setara bagi seluruh pemegang saham, tanpa membedakan mayoritas atau minoritas, domestik maupun asing. Informasi penting disampaikan secara terbuka melalui media yang mudah diakses, termasuk situs web resmi. Laporan Tahunan ini juga menegaskan bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sesuai regulasi, dan potensi benturan kepentingan dikelola untuk melindungi kepentingan Perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan pun telah memiliki kebijakan untuk mencegah praktik *insider trading*. The Company ensures equal treatment for all shareholders, without distinction between majority or minority, domestic or foreign. Important information is conveyed openly through easily accessible media, including the official website. This Annual Report also confirms that transactions with related parties are carried out in accordance with regulations, and potential conflicts of interest are managed to protect the interests of the Company and shareholders. The Company also has a policy to prevent insider trading practices.
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
Rekomendasi Recommendation			
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation calls for a GMS with the GMS agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed via electronic means such as through the corporate website.	*Apply*	Perusahaan telah melakukan pemanggilan RUPS Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. The Company has issued a summons for a GMS in accordance with applicable provisions.
Panduan Guideline			
7.3.1.1	Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (rationale) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS. In the material on the GMS agenda, the corporation submits relevant and complete information needed for decision making, including explanations and justifications (rationale) for the decisions proposed for approval at the GMS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
Rekomendasi Recommendation			
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
7.3.2.1	Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS. The corporation provides infrastructure that allows the presence of all domestic and foreign shareholders, including institutional investors, at the GMS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
7.3.2.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners were present at the Annual GMS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
7.3.2.3	Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS. Chairs of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, and other committees are ready to provide meaningful responses to questions addressed to them at the GMS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: ▪ Mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan, ▪ Memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS, dan ▪ Mengajukan usulan resolusi. Shareholders have the opportunity, within reasonable limits, to: ▪ Ask questions at the GMS, including questions relating to the results of the annual external audit, ▪ Include an event on the GMS agenda, and ▪ Submit a proposed resolution.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: ▪ Lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham ▪ Pemungutan secara tertutup (*poll-voting*) dan bukan dengan mengacungkan tangan (*show of hands*) ▪ Memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan. Corporation has technical voting methods or procedures that prioritize independence and the interests of shareholders, namely: ▪ GMS location that is easily accessible to most shareholders ▪ Closed voting (poll-voting) and not by show of hands (show of hands) ▪ Ensure that there are no GMS requirements and procedures that prevent shareholders from participating in making decisions.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
7.3.2.6	Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara. Corporation is working on electronic voting procedures and taking steps to build infrastructure that enables electronic voting or use existing infrastructure in the voting ecosystem.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
7.3.2.7	Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (*bundling*). Each vote at the GMS is only for one decision, there is no combining of several decisions into the same resolution (bundling).	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
7.3.2.8	Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/ inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The corporation appoints an independent party (supervisor/inspector) to count and/or ratify the votes at the GMS and disclose this in the minutes of the GMS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
7.3.2.9	Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali. If the resolution approved by the controlling shareholder conflicts with the majority of noncontrolling shareholders' votes, then post-GMS, the corporation discloses what actions it took to understand and respond to the non-controlling shareholder's concerns that caused it to vote .differently from the controlling shareholder.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
Rekomendasi Recommendation			
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	*Apply*	Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham. Determination of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners through a GMS attended by shareholders.
Panduan Guideline			
7.3.3.1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, carries out an in-depth examination of Director and Commissioner candidates and conveys all material relevant information regarding the candidates to shareholders in the process of selecting board members. The information disclosed includes information regarding Director or Commissioner positions in other corporations, and whether they are considered independent from the corporation's perspective.	*Apply*	Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Determination of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners through a GMS attended by shareholders, after prior examination by the Nomination and Remuneration Committee.
7.3.3.2	Direktur dan komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali. Directors and commissioners are nominated for election at least once every three years or five years for corporations whose regulations require five years. It would be better if nominations were carried out once a year.	*Apply*	Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Board Manual Perusahaan dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT JAI Tbk. As stated in the Company's Board Manual Policy and the Nomination and Remuneration Committee Charter of PT JAI Tbk.
7.3.3.3	Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat direktur dan komisaris. Shareholders vote separately for each candidate for director and commissioner.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
Rekomendasi Recommendation			
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. In the invitation to the GMS, the corporation identifies and informs prospective external auditors who will be appointed or re-appointed at the GMS.	*Apply*	Sesuai dengan pemanggilan dan agenda RUPS Tahun 2025. In accordance with the summons and agenda of the 2025 GMS.
7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The corporation ensures that external auditors attend the GMS and are obliged to answer questions from shareholders related to the audit of financial statements.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
Rekomendasi Recommendation			
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025, agenda dan risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
Panduan Guideline			
7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. The minutes of the GMS are communicated to shareholders no later than 30 working days after the GMS.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025 dan agenda serta risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. The minutes of the GMS contain questions asked by shareholders and answers given by the chairman of the meeting or the party who answered.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025 dan agenda serta risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The holding of the GMS, along with all meeting materials, reports and related documents which include, among other things, the annual report and voting results, including the relevant meeting agenda are published on the company's official website or digital communication media and are available for at least 10 (ten) years.	*Apply*	Sebagaimana terdapat pada Laporan Tahunan 2025 dan agenda serta risalah RUPS Tahun 2025. As contained in the 2025 Annual Report, agenda and minutes of the 2025 GMS.
8	Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders		
8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*) Stakeholder Engagement		
Rekomendasi Recommendation			
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The Corporation, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	*Apply*	Perusahaan telah melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan kunci serta melibatkan harapan dan keluhan pemangku kepentingan. The Company has communicated with key stakeholders and involved stakeholders' expectations and complaints.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Panduan Guideline			
8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. The corporation revealed the process for identifying and selecting key stakeholders to be involved.	*Apply*	Telah Terdapat pada Laporan Tahunan tahun 2025. Available in the 2025 Annual Report.
8.1.1.2	Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci. The corporation discloses its approach and activities in handling key stakeholder engagement including its frequency based on type and key stakeholder group.	*Apply*	Telah Terdapat pada Laporan Tahunan tahun 2025. Available in the 2025 Annual Report.
8.1.1.3	Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. Corporation provides channels through which key stakeholders (e.g. customers, suppliers, the general public, etc.) can express their opinions and input, voice their complaints and/or complain about possible violations of their rights.	*Apply*	Sebagaimana Kebijakan *Whistleblowing* PT JAI Tbk. As per the Whistleblowing Policy of PT JAI Tbk.
8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: ▪ Respons korporasi, dan ▪ Kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. The corporation expresses significant views, input and complaints submitted by key stakeholders obtained from key stakeholder engagement, including: ▪ Corporate response, and ▪ Key stakeholder groups who provide views and input.	*Apply*	Sebagaimana Kebijakan *Whistleblowing* PT JAI Tbk. As per the Whistleblowing Policy of PT JAI Tbk.
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainability Integration into Business Model		
Rekomendasi Recommendation			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, main action plans and risk management.	*Apply*	Sebagaimana tertuang pada RJPP PT JAI Tbk dan Agenda Rapat Direksi dan Dewan Komisaris. As stated in the RJPP of PT JAI Tbk and the Agenda of the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting.
Panduan Guideline			
8.2.1.1	Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that corporate sustainability strategies, priorities and targets as well as performance against these targets are communicated to stakeholders.	*Apply*	Sebagaimana tergambar dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT JAI Tbk. As described in the Long Term Plan document of PT JAI Tbk.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
8.2.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya. The Board of Directors and Board of Commissioners always follow and understand sustainability issues that are relevant to the corporation and its business.	*Apply*	Sebagaimana tergambar dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT JAI Tbk. As described in the Long Term Plan document of PT JAI Tbk.
8.2.1.3	Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi. Evaluation of the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners includes their performance in monitoring and handling significant risks and opportunities regarding corporate sustainability.	*Apply*	Telah terimplementasi sebagaimana kebijakan manajemen risiko PT JAI Tbk. Has been implemented as per PT JAI Tbk's risk management policy.
8.2.1.4	Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi. The Board of Directors appoints someone in management who has a special role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations into corporate activities.	*Apply*	Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Struktur Organisasi PT JAI Tbk. As stated in the Organizational Structure Policy of PT JAI Tbk.
8.3	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection to Stakeholders		
Rekomendasi Recommendation			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the implementation of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Kode Etik dan tata kelola perusahaan yang baik PT JAI Tbk. As per the Code of Conduct and good corporate governance policy of PT JAI Tbk.
Panduan Guideline			
8.3.1.1	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi. The corporation implements and discloses policies regarding corporate responsibility to customers, including considering customer information security, sales ethics and behavior, after-sales service according to product age/service period, as well as following up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations should promote responsible consumption and be conducted responsibly, including avoiding misleading customers, or causing misunderstandings about the products and services offered by the corporation.	*Apply*	Telah terdapat pada kebijakan Kode Etik PT JAI Tbk. It is included in the PT JAI Tbk Code of Conduct policy.
8.3.1.2	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Pengadaan PT JAI Tbk.



No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
	The corporation implements and discloses policies that include criteria for selecting suppliers, transparent procurement mechanisms, efforts to increase supplier capabilities, and fulfillment of rights related to suppliers. The corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, carry out social and environmental responsibilities, treat their employees, staff and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable and value-based business policies and procedures.		As per the Procurement policy of PT JAI Tbk.
8.3.1.3	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara kongkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat. Corporation carries out and express social responsibility by applying corporate business knowledge and experience to develop and produce socially responsible activities that concretely provide added value to society, including encouraging community independence.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Kode Etik dan Kebijakan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT JAI Tbk. As per the Code of Conduct and Social and Environmental Responsibility Implementation Policy of PT JAI Tbk.
8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: ▪ Bahan baku, ▪ Energi, ▪ Penggunaan air, ▪ Pemanfaatan sumber daya terbarukan, ▪ Pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. Corporation carries out and express environmental responsibility by preventing, reducing and managing negative impacts on the environment from all aspects of corporate operations, including the use of: ▪ Raw Material, ▪ Energy, ▪ Water usage, ▪ Utilization of renewable resources, ▪ Utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management and reducing the impact of greenhouse gases and carbon emissions.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta penyusunan laporan keberlanjutan PT JAI Tbk. As per the policy of Implementing Social and Environmental Responsibility and preparing the sustainability report of PT JAI Tbk.
8.3.1.5	Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik antipersaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar. The corporation implements and discloses fair competition policies by prioritizing ethical business behavior and not engaging in anti-competitive practices to gain or protect market position.	*Apply*	Sebagaimana Tertuang dan implementasi kebijakan Kode Etik PT JAI Tbk. As stated in the Code of Ethics policy of PT JAI Tbk.
8.3.1.6	▪ Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditur. ▪ Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi. ▪ Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. ▪ The Board of Directors has a policy to protect the rights of creditors. ▪ The Board of Commissioners supervises and the Board of Directors monitors the corporation's financial liquidity and solvency. ▪ The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial difficulties are immediately identified, managed, mitigated and reported. The Board of Commissioners monitors the Directors' handling of financial risks or difficulties and receives regular reports.	*Apply*	Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan Board Manual PT JAI Tbk. As regulated in the articles of association and Board Manual of PT JAI Tbk.

No.	Uraian Description	Apply/Explain	Keterangan Penerapan Description of Implementation
Rekomendasi Recommendation			
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.	*Apply*	Tertuang Dalam Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan. Stated in the Company's Joint Work Agreement.
Panduan Guideline			
8.3.2.1	Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. The corporation has a policy of providing long-term incentives to employees, which encourages sustainable value creation.	*Apply*	Tertuang Dalam Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan. Stated in the Company's Joint Work Agreement.
8.3.2.2	Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (*risk-adjusted return*), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan. Performance-based remuneration for employees must take into account the element of risk, including measuring risk-adjusted returns, to ensure that no incentives are provided for undesirable risk taking.	*Apply*	Tertuang Dalam Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan. Stated in the Company's Joint Work Agreement.
8.3.2.3	Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun. The Board of Directors properly manages conflicts of interest that may arise between employees as recipients of pension fund benefits and the corporation as pension fund manager.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Kode Etik PT JAI Tbk. As per the Code of Conduct policy of PT JAI Tbk.
8.3.2.4	Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman. The Board of Directors ensures that the corporation has an effective human resource development and management program to ensure that the corporation has an adequate number of employees who are knowledgeable, skilled and experienced.	*Apply*	Perusahaan memiliki kebijakan pengembangan kompetensi pekerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. The company has a policy of developing employee competencies which is implemented annually.
8.3.2.5	Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur. When filling managerial positions in a corporation, the Board of Directors considers elements of diversity, non-discrimination and provides equal opportunities to all candidates without distinction of ethnicity, religion, race, class and gender. The diversity policy is accompanied by measurable goals.	*Apply*	Sebagaimana kebijakan Kode Etik PT JAI Tbk. As per the Code of Ethics policy of PT JAI Tbk.



Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecards

Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecards

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
A.	**Hak Pemegang Saham** Shareholder Rights		
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights		
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh rapat umum pemegang saham untuk dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen tersebut dalam waktu 60 hari. Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	Ya Yes	200-201
A.2	Hak Untuk Berpartisipasi Secara Efektif dan Memberikan Suara Dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Harus Mengetahui Peraturan, termasuk Prosedur Pemungutan Suara, yang mengatur Rapat Umum Pemegang Saham		
A.2.1	Apakah pemegang saham mempunyai kesempatan, yang dibuktikan dengan mata acara, untuk menyetujui remunerasi (fee, tunjangan, benefit natura, dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi direktur/komisaris non-eksekutif? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	Ya Yes	255-270
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non pengendali untuk mencalonkan calon direksi/komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	Ya Yes	255
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham memilih direktur/komisaris secara individu? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	Ya Yes	255-270
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	Ya Yes	256-270
A.2.5	Apakah risalah RUPS terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	Ya Yes	256-270
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk seluruh keputusan/setiap mata acara RUPS terkini? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	Ya Yes	256-270
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPS terakhir? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	Ya Yes	256-270
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota dewan direksi dan CEO (jika dia bukan anggota dewan direksi) menghadiri RUPS terakhir? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM	Ya Yes	256-270
A.2.9	Apakah perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara in-absentia? Does the company allow voting in absentia?	Ya Yes	256-270

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (dan bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPS terbaru? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	Ya Yes	256-270
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan telah menunjuk pihak independen (pemeriksa/ pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPST? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/ inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	Ya Yes	256-270
A.2.12	Apakah perusahaan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya hasil pemungutan suara pada RUPS/RUPSLB terkini untuk semua keputusan? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	Ya Yes	256-270
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelumnya untuk semua RUPS dan RUPSLB? Does the company provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	Ya Yes	256-270
A.2.14	Apakah perseroan memberikan alasan dan penjelasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemanggilan RUPS/surat edaran dan/ atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	Ya Yes	256-270
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan mata acara rapat umum dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	Ya Yes	256-270
A.3	Pasar untuk Pengendalian Perusahaan Harus dibiarkan Berfungsi secara Efisien dan Transparan		
A.3.1	Dalam hal merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/komisaris perseroan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	N/A	-
A.4	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Seluruh Pemegang Saham, Termasuk Investor		
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham agar terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	Ya Yes	202-203
A.5	Saham dan Hak Suara		
A.5.1	Apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing kelas saham tersebut (misalnya melalui website perusahaan/laporan/bursa/website regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	N/A	-
A.6	Pemanggilan RUPS Notice of GMS		



No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
A.6.1	Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, yaitu tidak ada penggabungan beberapa hal menjadi satu keputusan yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	Ya Yes	256-270
A.6.2	Apakah pemberitahuan RUPS/surat edaran terbaru perusahaan sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	Ya Yes	256
Apakah pemanggilan RUPS/surat edaran memuat rincian sebagai berikut: Does the notice of AGM/circulars have the following details:			
A.6.3	Apakah profil direksi/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di emiten lain) yang ingin dipilih/dipilih kembali disertakan? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	Ya Yes	271-276
A.6.4	Apakah auditor yang ingin diangkat/diangkat kembali diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	Ya Yes	271-276
A.6.5	Apakah dokumen proksi tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?	Ya Yes	256
A.7	Perdagangan Orang Dalam dan Transaksi Mandiri yang Bersifat Kekerasan Harus Dilarang		
A.7.1	Apakah direksi/komisaris wajib melaporkan transaksi saham perseroan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors/commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	Ya Yes	136-137
A.8	Transaksi Pihak Berelasi oleh Direktur dan Eksekutif Kunci Related party transactions by directors and key executives		
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari direktur/komisaris independen untuk meninjau materi RPT (transaksi dengan pihak yang terafiliasi) untuk menentukan apakah RPT tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/ commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	Ya Yes	204-207
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direktur/ komisaris) untuk tidak ikut serta dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu jika ada konflik? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	Ya Yes	204-207
A.8.3	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pinjaman kepada direksi dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	Ya Yes	204-207
A.9	Melindungi Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Sewenang-Wenang Protecting minority shareholders from abusive actions		
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa RPT tersebut adil dan wajar? Does the company disclose that RPTs (Transaksi Related-party) are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	Ya Yes	207
A.9.2	Dalam hal transaksi pihak berelasi memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	Ya Yes	204-207

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
B.	**Keberlanjutan dan Ketahanan** Sustainability and Resilience		
B.1	Pengungkapan Terkait Keberlanjutan Harus Konsisten, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Diandalkan, serta Mencakup Informasi Material yang Bersifat Retrospektif dan Berwawasan ke Depan yang Dianggap Penting oleh Investor Dalam Membuat Keputusan Investasi atau Pemungutan Suara		
Informasi penting terkait Keberlanjutan harus disebutkan Material Sustainability-related information should be specified			
B.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG (*Environmental*, *Social*, *and Governance*) yang penting bagi strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	Ya Yes	*Sustainability Report*
B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu? Does the company identify climate change as an issue?	Ya Yes	*Sustainability Report*
B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terintegrasi, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Ya Yes	*Sustainability Report*
Jika perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus menyediakan matrik yang andal dan diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form.			
B.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability target?	Ya Yes	*Sustainability Report*
B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	Ya Yes	*Sustainability Report*
B.1.6	Apakah perusahaan memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporannya telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	Ya Yes	*Sustainability Report*
B.2	Kerangka Tata Kelola Perusahaan Harus Memungkinkan Terjadinya Dialog Antara Perusahaan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan untuk Bertukar Pandangan Mengenai Masalah Keberlanjutan		
B.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?.	Ya Yes	*Sustainability Report*
B.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Ya Yes	*Sustainability Report*
B.3	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Harus Memastikan Bahwa Dewan Direksi Secara Memadai Mempertimbangkan Risiko dan Peluang Keberlanjutan yang Material Ketika Memenuhi Fungsi Utama Mereka Dalam Meninjau, Memantau, dan Memandu Praktik Tata Kelola, Pengungkapan Informasi, Strategi, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Internal, Termasuk Sehubungan Dengan Risiko Fisik dan Transisi Risiko yang Berkaitan dengan Iklim		
B.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan melakukan peninjauan setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	Ya Yes	192-194
B.4	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan Harus Mengakui Hak-Hak Pemangku Kepentingan yang Ditetapkan oleh Hukum atau Melalui Kesepakatan Bersama dan Mendorong Kerja Sama Aktif antara Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam Menciptakan Kekayaan, Lapangan Kerja, dan Keberlanjutan Perusahaan yang Sehat Secara Finansial		



No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas: Does the company disclose a policy and practices that address :			
B.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan dalam mengatasi kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Ya Yes	57-58
B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	Ya Yes	387-388
B.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mendorong pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Ya Yes	80-81
B.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Ya Yes	80-81
B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan? The company's anti-corruption programmes and procedures?	Ya Yes	380-385
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?	N/A	-
B.4.7	Apakah perusahaan mempunyai laporan/bagian terpisah yang membahas upayanya dalam isu lingkungan/ekonomi dan sosial? Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	Ya Yes	474-475
B.5	Apabila Kepentingan Pemangku Kepentingan Dilindungi oleh Undang-Undang, Maka Pemangku Kepentingan Harus Mempunyai Kesempatan untuk Mendapatkan Ganti Rugi yang Efektif atas Pelanggaran Hak-Hak Mereka		
B.5.1	Apakah perusahaan memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Ya Yes	346-347
B.6	Mekanisme Partisipasi Karyawan Harus Dibiarkan Berkembang		
B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	Ya Yes	226, 369
B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	Ya Yes	224-226
B.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	Ya Yes	308, 421
B.7	Para Pemangku Kepentingan Termasuk Karyawan Perorangan dan Badan Perwakilan Mereka, Harus Dapat Secara Bebas Mengkomunikasikan Keprihatinan Mereka Tentang Praktik-Praktik Ilegal atau Tidak Etis Kepada Dewan Direksi dan Hak-Hak Mereka Tidak Boleh Dikompromikan untuk Melakukan Hal Ini		
B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan *whistleblowing* yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan Does the company have a whistleblowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report	Ya Yes	389-392
B.7.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkap dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	Ya Yes	392

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
C	**Pengungkapan dan Transparansi** Disclosure and Transparency		
C.1	Struktur Kepemilikan yang Transparan Transparent ownership structure		
C.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat yang memiliki 5% kepemilikan saham atau lebih? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	Ya Yes	133, 444
C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (yang dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/ or substantial shareholders?	Ya Yes	133, 138
C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) oleh direktur (komisaris)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	Ya Yes	135
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham manajemen senior secara langsung dan tidak langsung (dianggap)? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	Tidak No	-
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian perusahaan induk/induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, usaha patungan, dan perusahaan/kendaraan bertujuan khusus (SPE)/ (SPV)? Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	Ya Yes	138, 142
C.2	Kualitas Laporan Tahunan		
C.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objectives	Ya Yes	87
C.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	Ya Yes	20, 23
C.2.3	Indikator kinerja non keuangan Non-financial performance indicators	Ya Yes	35, 164
C.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	Ya Yes	201, 443
C.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal penunjukan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur lainnya di perusahaan tercatat) dari seluruh direktur/komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/ commissioners	Ya Yes	94, 109
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement		
C.2.6	Apakah Laporan Tahunan berisi pernyataan yang menegaskan kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode etik tata kelola perusahaan dan jika terdapat ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan setiap permasalahan tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	Ya Yes	248, 251
C.3			
C.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk direktur/ komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	Ya Yes	308, 309
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik] rincian remunerasi setiap karyawan non-eksekutif? direktur/komisaris? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	Ya Yes	308, 309



No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan, dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif dan ukuran kinerja jangka pendek dan jangka panjang) untuk direktur eksekutif dan CEO? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	Ya Yes	308, 421
C.3.4	Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	Ya Yes	308, 309
C.4	Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Disclosure of related party transactions		
C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT yang material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	Ya Yes	414, 444
C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai setiap RPT material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	Ya Yes	414, 416
C.5	Direksi dan Komisaris Berurusan Dengan Saham Perusahaan Directors and commissioners dealings in shares of the company		
C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	Ya Yes	135, 136
C.6	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor External auditor and Auditor Report		
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	Ya Yes	329, 355
C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	Tidak No	-
C.7	Media Komunikasi Communication Media		
C.7.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	Ya Yes	149, 150
C.7.2	Situs Perusahaan Company website	Ya Yes	72, 150
C.7.3	Pengarahan analis Analyst's briefing	Ya Yes	365, 461
C.7.4	Pengarahan media/konferensi pers Media briefings /press conferences	Ya Yes	365
C.8			
C.8.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun buku? Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?	Ya Yes	355
C.8.2	Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Ya Yes	3
C.8.3	Apakah laporan/laporan keuangan tahunan telah ditegaskan secara benar dan wajar/wajaran oleh direksi/komisaris dan/atau pejabat perusahaan terkait? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Ya Yes	66, 67
C.9	Situs Perusahaan Company website		

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut: Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:			
C.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulanan terbaru) Financial statements/reports (latest quarterly)	Ya Yes	150, 151
C.9.2	Materi diberikan dalam briefing kepada analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	Ya Yes	150, 151
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report	Ya Yes	3, 150
C.9.4	Pemanggilan RUPS dan/atau RUPSLB Notice of AGM and/or EGM	Ya Yes	150, 151
C.9.5	Risalah RUPS dan/atau RUPSLB Minutes of AGM and/or EGM	Ya Yes	150, 411
C.9.6	Anggaran dasar perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, nota kesepahaman dan anggaran dasar) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	Tidak No	-
C.10	Hubungan dengan Investor Investor relations		
C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari pejabat/ kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations?	Ya Yes	346, 365
D.	**Tanggung Jawab Dewan** Board Duties and Responsibilities		
D.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	Ya Yes	248, 271
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed ?	Ya Yes	271, 276
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab direksi/komisaris disebutkan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated ?	Ya Yes	271, 276
Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission			
D.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?	Ya Yes	87
D.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	Ya Yes	277, 286
D.1.6	Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi penerapan strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy	Ya Yes	276, 339
D.2			
D.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Ya Yes	244, 378
D.2.2	Apakah seluruh direktur/komisaris, manajemen senior, dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik ini? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	Ya Yes	244, 378
D.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	Ya Yes	244, 378



No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition			
D.2.4	Apakah jumlah direktur/komisaris independen minimal 50% dari dewan direksi/ komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/ commissioners?	Ya Yes	279, 281
D.2.5	Apakah perusahaan mempunyai batasan masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing- masing lima tahun untuk direktur/komisaris independen? 1 Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years1 each for its independent directors/ commissioners? 1 The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Ya Yes	259, 279
D.2.6	Apakah perusahaan telah menetapkan batas lima kursi dewan direksi yang dapat dipegang oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif secara bersamaan? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	Ya Yes	279, 281
D.2.7	Apakah perusahaan mempunyai direktur eksekutif yang menjabat pada lebih dari dua dewan perusahaan tercatat di luar grup? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	Tidak No	-
Komite Nominasi Nominating Committee			
D.2.8	Apakah perusahaan mempunyai Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	Ya Yes	321, 333
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/ komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/ commissioners?	Tidak No	-
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/ komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	Tidak No	-
D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/ piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	Ya Yes	335, 337
D.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	Ya Yes	335, 336
Komite Remunerasi/Komite Kompensasi Remuneration Committee / Compensation Committee			
D.2.13	Apakah perusahaan mempunyai Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	Ya Yes	321, 333
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direktur/ komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/ commissioners with a majority of independent directors/commissioners ?	Tidak No	-
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan direktur/ komisaris independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	Tidak No	-
D.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola /piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/ charter of the Remuneration Committee?	Ya Yes	337, 338
D.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan pertemuan setidaknya dua kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	Ya Yes	335, 336

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
Komite Audit Audit Committee			
D.2.18	Apakah perusahaan mempunyai Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	Ya Yes	321, 325
D.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/ komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/ komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	Tidak No	-
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	Ya Yes	325, 327
D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/ piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	Ya Yes	327, 349
D.2.22	Apakah setidaknya salah satu direktur/komisaris independen komite mempunyai keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	Ya Yes	325, 327
D.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan pertemuan setidaknya empat kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	Ya Yes	329, 330
D.2.24	Apakah Komite Audit mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	Ya Yes	329, 438
D.3	Proses Dewan Board Processes		
D.3.1	Apakah rapat dewan direksi dijadwalkan sebelum awal tahun buku? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	Ya Yes	313, 316
D.3.2	Apakah dewan direksi/komisaris mengadakan pertemuan minimal enam kali dalam setahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	Ya Yes	313, 316
D.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari seluruh rapat dewan yang diselenggarakan sepanjang tahun? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	Ya Yes	313, 316
D.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	Ya Yes	313
D.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan bertemu secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	N/A	-
Akses ke informasi Access to information			
D.3.6	Apakah kertas rapat dewan direksi/komisaris diberikan kepada dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	Ya Yes	316
D.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Ya Yes	344, 347
D.3.8	Apakah sekretaris perusahaan terlatih dalam bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan perusahaan dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	Ya Yes	344, 345



No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
Pengangkatan Dewan dan Pemilihan Kembali Board Appointments and Re-Election			
D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/ komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Ya Yes	271, 335
D.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/ commissioners?	Ya Yes	271, 335
D.3.11	Apakah seluruh direktur/komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan tercatat di negara yang peraturan perundang-undangannya menetapkan jangka waktu masing-masing 5 tahun? 2 Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years each? 2 The five years term must be required by legislation which pre-existed the i ntroduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Ya Yes	271, 279
Masalah Remunerasi Remuneration Matters			
D.312	Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Ya Yes	308, 407
D.3.13	Apakah perusahaan mempunyai standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti penarikan kembali kembali bonus yang sudah diberikan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	N/A	-
Audit internal Internal Audit			
D.3.14	Apakah perusahaan mempunyai fungsi audit internal tersendiri? Does the company have a separate internal audit function?	Ya Yes	344, 348
D.3.15	Apakah kepala audit internal sudah diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	Ya Yes	348
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	Ya Yes	327, 329
Pengawasan Risiko Risk Oversight			
D.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	Ya Yes	361, 402
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa dewan direksi/ komisaris telah melakukan peninjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/ commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	Ya Yes	357, 402
D.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi oleh perusahaan (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan hidup, sosial, ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	Ya Yes	361, 408

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan direksi/ komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	Ya Yes	357, 402
D.4	Orang-Orang di Dewan People on the Board		
D.4.1	Apakah ada orang yang berbeda yang mengambil peran sebagai ketua dan CEO? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	N/A	-
D.4.2	Apakah ketuanya adalah direktur/komisaris independen? Is the chairman an independent director/commissioner?	N/A	-
D.4.3	Apakah ada di antara direktur yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	Tidak No	-
D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	Ya Yes	276
Direktur Independen Utama Lead Independent Director			
D.4.5	Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk Pemimpin/Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	N/A	-
Keterampilan dan Kompetensi Skills and Competencies			
D.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif mempunyai pengalaman kerja di sektor utama tempat perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	Ya Yes	94, 97
D.5	Kinerja Dewan Board Performance		
Pengembangan Direksi Directors Development			
D.5.1	Apakah perusahaan mempunyai program orientasi bagi direksi/komisaris baru? Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	Ya Yes	276, 419
D.5.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan dan praktik serta program aktual yang mendorong direksi/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesi berkelanjutan atau berkelanjutan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	Ya Yes	419, 424
Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif CEO/Executive Management Appointments and Performance			
D.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Utama/ Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	Tidak No	-
D.5.4	Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/ Direktur Utama/Presiden? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	Ya Yes	299, 301
Penilaian Direktur Director Appraisal			
D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap dewan direksi/ komisaris dan mengungkapkan kriteria serta proses yang dilakukan untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/ commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes	299, 413



No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/ commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes	413
Penilaian Komite Committee Appraisal			
D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria serta proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes	413
Bonus dan Penalti Bonus and Penalty			
(B). A. Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders			
(B) A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.		
(B) A.1.1	Apakah perusahaan menerapkan pemungutan suara elektronik yang aman dan real-time secara in-abstia pada rapat umum pemegang saham? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	Ya Yes	256, 257
(B) A.2	Pemanggilan RUPS Notice of AGM		
(B) A.2.1	Apakah perusahaan mengeluarkan pemanggilan RUPS (dengan rincian agenda dan penjelasan surat edaran), sebagaimana diumumkan kepada Bursa, paling lambat 28 hari sebelum tanggal rapat? Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	Ya Yes	256
(B) B.1	Hak dan Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders		
(B) B.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan cara mereka mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	Ya Yes	403, 439
(B) B.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Sustainability Reporting-nya mendapat jaminan dari pihak eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report/Sustainability Reporting is externally assured?	Ya Yes	403
(B) B.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan ESG (Environmental, Social, and Governance)? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	Ya Yes	250
(B) B.1.4	Apakah perusahaan mempunyai unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab mengelola urusan keberlanjutan? Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	Ya Yes	409
(B) B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan dewan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Ya Yes	409
(B) B.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Tidak No	-
(B) B.1.7	Apakah *Whistleblowing System* perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen? Is the company's Whistleblowing System managed by independent parties / institutions?	Ya Yes	389, 391

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
(B). C.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
(B) C.1	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report		
(B) C.1.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan? Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end?	Tidak No	-
(B). D.	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board		
(B) D.1	Kompetensi dan Keberagaman Dewan Board Competencies and Diversity		
(B) D.1.1	Apakah perusahaan memiliki minimal satu direktur/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	Tidak No	-
(B) D.1.2	Apakah perusahaan mempunyai kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keberagaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives??	Ya Yes	279, 281
(B) D.2	Struktur Dewan Board Structure		
(B) D.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari direktur/ komisaris independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?	Tidak No	-
(B) D.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kualitas direktur yang selaras dengan arahan strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	Ya Yes	335, 337
(B) D.3	Pengangkatan Dewan dan Pemilihan Kembali Board Appointments and Re-Election		
(B) D.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencari profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti database direktur yang dibuat oleh direktur atau badan pemegang saham) ketika mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	Tidak No	-
(B) D.4	Struktur & Komposisi Dewan Board Structure & Composition		
(B) D.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen mencakup lebih dari 50% dewan direksi/komisaris pada perusahaan yang ketuanya independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50%of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	Ya Yes	279, 281
(B) D.5	Pengawasan Risiko Risk Oversight		
(B) D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan telah mengidentifikasi risiko-risiko utama yang terkait dengan teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	Ya Yes	433, 440
(B) D.6	Kinerja Dewan Board Performance		
(B) D.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?	Ya Yes	321
(P). A			



No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
(P) A.1	Hak dasar pemegang saham Basic shareholder rights		
(P) A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan yang sama dalam pembelian kembali saham kepada seluruh pemegang saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	Tidak No	-
(P) A.2	Para pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diperbolehkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.		
(P) A.2.1	Apakah terdapat bukti adanya hambatan yang menghalangi pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	Tidak No	-
(P) A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.		
(P) A.3.1	Apakah perusahaan mencantumkan agenda tambahan yang tidak diumumkan sebelumnya dalam pemanggilan RUPST/RUPSLB? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	Tidak No	-
(P) A.3.2	Apakah Ketua Dewan dan Ketua seluruh Komite Dewan serta CEO tidak hadir dalam Rapat Umum terakhir? Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	Tidak No	-
(P) A.4	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed. enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.		
Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan: Did the company fail to disclose the existence of:			
(P) A.4.1	Perjanjian pemegang saham? Shareholders agreement?	Tidak No	-
(P) A.4.2	Batasan pemungutan suara? Voting cap?	Tidak No	-
(P) A.4.3	Hak pilih ganda? Multiple voting rights?	Tidak No	-
(P) A.5	Struktur dan pengaturan permodalan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.		
(P) A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas? Is a pyramid ownership structure and/ or cross holding structure apparent?	Ya Yes	138
(P) A.6	Perdagangan orang dalam dan transaksi mandiri yang bersifat kekerasan harus dilarang Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.		

No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
(P) A.6.1	Apakah terdapat kasus insider trading yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	Tidak No	-
(P) A.7	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang Protecting minority shareholders from abusive action		
(P) A.7.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan sehubungan dengan transaksi pihak berelasi yang material dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	Tidak No	-
(P) A.7.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs (Transaksi Related-party) that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arms length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	Tidak No	-
(P). B	Peran Pemangku Kepentingan Roles of Stakeholders		
(P) B.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.		
(P) B.1.1	Apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan/ ketenagakerjaan/konsumen/kebangkrutan/komersial/kompetisi atau lingkungan hidup? Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/ consumer/ insolvency/ commercial/competition or environmental issues?	Tidak No	-
(P) B.2	Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.		
(P) B.2.1	Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	Tidak No	-
(P) B.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas *greenwashing*? Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	Tidak No	-
(P). C	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
(P) C.1	Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan Sanctions from regulator on financial reports		
(P) C.1.1	Apakah perusahaan menerima "pendapat wajar dengan pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	Tidak No	-
(P) C.1.2	Apakah perusahaan menerima "opini buruk" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	Tidak No	-
(P) C.1.3	Apakah perusahaan menerima "*disclaimer opinion*" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	Tidak No	-
(P) C.1.4	Apakah perusahaan dalam satu tahun terakhir telah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	Tidak No	-
(P) D	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board		



No.	Hak Pemegang Saham Shareholder Rights	Keterangan Penyajian Disclosure Information	Halaman Page
(P) D.1	Kepatuhan terhadap aturan pencatatan, peraturan dan hukum yang berlaku Compliance with listing rules, regulations and applicable laws		
(P) D.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan selain peraturan pengungkapan selama setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	Tidak No	-
(P) D.1.2	Pernahkah ada kejadian di mana direktur/komisaris non-eksekutif mengundurkan diri dan mengangkat permasalahan terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	Tidak No	-
(P) D.2	Struktur Dewan Board structure		
(P) D.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan selain peraturan pengungkapan selama setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	Tidak No	-
(P) D.1.2	Pernahkah ada kejadian di mana direktur/komisaris non-eksekutif mengundurkan diri dan mengangkat permasalahan terkait tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	Tidak No	-
(P) D.2	Struktur Dewan Board structure		
(P) D.2.1	Apakah Perseroan mempunyai direktur/komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? 1 Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (which ever is higher) in the same capacity? 1 The five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Tidak No	-
(P)D.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan tepat gambaran seluruh direkturnya sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	Tidak No	-
(P) D.2.3	Apakah perusahaan mempunyai direktur/non eksekutif/komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima dewan di perusahaan publik? Does the company have any independent directors/non-executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	Tidak No	-
(P) D.3	Audit Eksternal External Audit		
(P) D.3.1	Apakah ada di antara direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	Tidak No	-
(P) D.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board structure and composition		
(P) D.4.1	Apakah ketuanya pernah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the company CEO in the last three years?	Tidak No	-
(P) D.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif menerima opsi, bagi hasil atau bonus? Do non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses?	Ya Yes	308, 309

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibilities





Melalui program TJSL yang inklusif dan berorientasi dampak—mencakup pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta kontribusi sosial budaya—Perusahaan menegaskan komitmennya sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Through inclusive and impact-oriented TJSL programs—covering community empowerment, environmental preservation, and socio-cultural contributions—the Company reinforces its commitment as a responsible and sustainable business entity.







Perusahaan terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sepanjang tahun 2025. Seluruh inisiatif dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan para pemangku kepentingan serta prinsip keberlanjutan, sehingga program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus mendukung kualitas lingkungan di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Sebagai wujud tanggung jawab, setiap kegiatan TJSL diarahkan tidak hanya untuk memperkuat kontribusi sosial, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Dengan pendekatan yang menekankan keberlanjutan, Perusahaan berupaya membangun hubungan yang konstruktif dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya, sehingga tercipta sinergi yang memperkuat reputasi serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

The Company continues to demonstrate its commitment to delivering positive impacts on society and the environment through the implementation of Social and Environmental Responsibility (SER or TJSL) programs throughout 2025. All initiatives were designed by taking stakeholder needs and sustainability principles in consideration, ensuring that the programs were able to deliver concrete benefits while supporting environmental quality in the areas surrounding the Company's operations.

As part of this responsibility, each TJSL activity is directed not only to strengthen the Company's social contributions but also to preserve environmental sustainability. By focusing on sustainability, the Company strives to build constructive relationships with communities and other relevant parties, thereby creating synergies that enhance the Company's reputation and support long-term business sustainability.

Seluruh informasi mengenai pelaksanaan TJSL tahun 2025 telah disajikan secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2025 yang dipublikasikan secara terpisah, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Penyajian tersebut mengacu pada ketentuan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021, serta GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) sebagai kerangka pelaporan berkelanjutan yang diakui secara internasional dan diadopsi oleh Perusahaan.

Adapun substansi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan;
2. Ikhtisar Aspek Kinerja Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup);
3. Profil Singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Penjelasan Direksi;
5. Tata Kelola Keberlanjutan;
6. Kinerja Keberlanjutan;
7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen;
8. Lembar Umpan Balik (*feedback*) untuk Pembaca; dan
9. Tanggapan Perusahaan terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya.

All information regarding the implementation of TJSL programs in 2025 has been presented in its entirety in the Sustainability Report for the 2025 Financial Year, which is published separately but remains an integral part of this Annual Report. The presentation refers to the provisions of POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, the Financial Services Authority Circular No. 16/SEOJK.04/2021, as well as the GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) as an internationally recognized and adopted framework for sustainable reporting by the Company.

The substance presented in the 2025 Fiscal Year Sustainability Report includes the following:

1. Explanation of the Sustainability Strategy;
2. Overview of Sustainability Performance Aspects (Economic, Social, and Environmental);
3. Brief Profile of the Issuer or Public Company;
4. Statement from the Board of Directors;
5. Sustainability Governance;
6. Sustainability Performance;
7. Written Verification by an Independent Party;
8. Feedback Form for Readers; and
9. The Company's Response to Feedback from the Previous Year's Report.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

Laporan Keuangan
Financial Report



Melalui program TJSL yang inklusif dan berorientasi dampak—mencakup pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta kontribusi sosial budaya—Perusahaan menegaskan komitmennya sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Through inclusive and impact-oriented TJSL programs—covering community empowerment, environmental preservation, and socio-cultural contributions—the Company reinforces its commitment as a responsible and sustainable business entity.


PELINDO
PELINDO
PELINDO



PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements as of December 31, 2025 and
for the year then ended with independent auditor's report

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGALTERSEBUT
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : Shanti Puruhita
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung Pelindo Tower Lt. 8
   Jl. Yos Sudarso No.9, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Taman Century 2, jalan Tanjung I blok C No. 17 RT/RW 001/023, Kel. Pekayon, Kec. Bekasi Selatan
   Jabatan/*Title* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Dessy Emastari Prihatiningtyas
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung Pelindo Tower Lt. 8
   Jl. Yos Sudarso No.9, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Perumahan Metland Menteng Jl. Menteng Purnama II Blok D5/22, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960
   Jabatan/*Title* : Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko/*Director of Finance, HR, and Risk Management*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
   b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTORS' STATEMENT ON THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK

We, the undersigned below:

declare that:

1. *We responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Company as of December 31, 2025 and for the year then ended.*
2. *The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Company, and*
   b. *The financial statements of the Company do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
4. *We are responsible for the Company internal control system.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 13 Maret 2026 / *March 13, 2026*

METERAI TEMPEL
B4AMX226314098

Shanti Puruhita
Direktur Utama/
President Director

Dessy Emastari Prihatiningtyas
Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko/
Director of Finance, HR, and Risk Management



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi | ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	6-81	*Notes to the Financial Statements*

****

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Jasa Armada Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit Utama (lanjutan)

Kecukupan Penyisihan Atas Kerugian Kredit Ekspektasian

Penjelasan atas hal audit utama:

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo piutang usaha setelah penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian ("KKE") adalah sebesar Rp360 miliar. Penilaian atas piutang usaha penting bagi audit kami karena jumlahnya material terhadap laporan keuangan dan pengukuran KKE melibatkan pelaksanaan pertimbangan manajemen yang signifikan, seperti segmentasi eksposur risiko kredit serta penentuan metode untuk memperkirakan KKE dan asumsi yang akan digunakan dalam model KKE (yaitu, exposure at default (EAD), probability of default (PD) dan loss given default (LGD)).

Pengungkapan terkait piutang usaha dan penyisihan atas KKE disajikan dalam Catatan 2f dan 6 atas laporan keuangan.

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman tentang metodologi yang diterapkan oleh Perusahaan dalam menentukan jumlah KKE dari penggunaan model KKE. Kami melibatkan spesialis internal kami dalam mengevaluasi metodologi dan asumsi utama yang digunakan dalam model.

Kami menguji asumsi utama dalam model KKE seperti PD, LGD, dan EAD dengan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh dari sumber input, analisis koleksi historis, dan menganalisa umur piutang usaha. Kami membandingkan informasi ekonomi yang digunakan dalam skenario berwawasan ke depan dalam model KKE dengan data ekonomi makro, informasi yang tersedia untuk umum, dan pengetahuan industri. Kami menguji akurasi aritmetika dari penyisihan KKE. Kami juga menilai kecukupan pengungkapan mengenai piutang usaha dan KKE yang dibuat dalam laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

Adequacy of Allowance for Expected Credit Loss

Description of the key audit matter:

As of December 31, 2025, the balance of trade receivables after allowance for expected credit loss ("ECL") amounted to Rp360 billion. The valuation of trade receivables is significant to our audit as the amount is material to the financial statements and the measurement of ECL involves the exercise of significant management judgment, such as segmentation of credit risk exposure and determination of method to estimate ECL and assumptions to be used in the ECL model (i.e., the exposure at default (EAD), the probability of default (PD) and the loss given default (LGD)).

The disclosures of trade receivables and allowance for ECL are presented in Notes 2f and 6 to the financial statements.

Audit response:

We obtained an understanding of the methodology applied by the Company in determining the ECL amount through the use of an ECL model. We involved our internal specialist in evaluating the methodologies and key assumptions used in the model.

We tested key assumptions in the ECL model such as PD, LGD and EAD by comparing them with the information obtained from source inputs, historical collection analysis, and analyzing trade receivables aging. We compared the economic information used in the forward-looking scenarios in the ECL model against macro-economic data, publicly available information and industry knowledge. We tested the arithmetical accuracy of the allowance for ECL. We also assessed the adequacy of the disclosures regarding trade receivables and ECL made in the accompanying financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 (Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2025 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00169/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Budi Hartono, CPA

Registrasi Akuntan Publik No.: AP. 1832/Public Accountant Registration No.: AP. 1832

13 Maret 2026/March 13,2026

A member firm of Ernst & Young Global Limited



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2025	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	554.126.337	5,25,26,27,28	473.084.134	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto		4,6,27,28		*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	152.630.907		121.041.712	*Third parties*
Pihak berelasi	207.861.159	25	276.766.238	*Related parties*
Persediaan	23.227.241	7	21.596.039	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	45.372.460	14a	40.855.517	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	32.099.773	8,27,28	5.493.970	*Other current assets*
TOTAL ASET LANCAR	**1.015.317.877**		**938.837.610**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - neto	581.022.048	9	562.431.197	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	70.015.186	10	79.936.685	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan - neto	16.962.940	14e	18.986.597	*Deferred tax assets - net*
Taksiran tagihan restitusi pajak	-	14f	49.658.080	*Estimated claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	31.199.389	8,27,28	130.846	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**699.199.563**		**711.143.405**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**1.714.517.440**		**1.649.981.015**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2025	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha		11,27,28		*Trade payables*
Pihak ketiga	15.874.269		15.263.232	*Third parties*
Pihak berelasi	9.870.132	25	14.112.757	*Related parties*
Uang titipan	14.939.729	12,27,28	12.475.836	*Deposits*
Beban akrual	201.638.099	13,27,28	185.986.435	*Accrued expenses*
Utang pajak	16.132.985	14b	21.318.132	*Taxes payable*
Utang dividen		18,27,28		*Dividend payables*
Pihak ketiga	5.348.229		2.424.078	*Third parties*
Pihak berelasi	17.904.940	25	17.627.653	*Related parties*
Liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	69.093.934	10,27,28	84.927.058	*Current maturities of long-term lease liabilities*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**350.802.317**		**354.135.181**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.920.945	10,27,28	6.735.657	*Long-term lease liabilities - net of current maturities*
TOTAL LIABILITAS	**354.723.262**		**360.870.838**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 15.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.284.811.100 saham	528.481.110	15	528.481.110	*Share capital - par value Rp100 (full amount) per share Authorized capital - 15,000,000,000 shares Issued and fully paid capital - 5,284,811,100 shares*
Saham tresuri	-	16	(1.617.838)	*Treasury stocks*
Tambahan modal disetor	318.975.899	17	317.981.175	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	163.856.958		158.421.458	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	348.480.211		285.844.272	*Unappropriated*
EKUITAS NETO	**1.359.794.178**		**1.289.110.177**	***NET EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.714.517.440**		**1.649.981.015**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
Pendapatan	1.474.807.574	19,25,30	1.345.030.257	*Revenues*
Beban pokok pendapatan	(1.045.017.043)	20,25,30	(926.892.911)	*Cost of revenues*
LABA BRUTO	**429.790.531**		**418.137.346**	***GROSS INCOME***
Beban umum dan administrasi	(181.483.641)	21,30	(203.273.321)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya	2.733.175	22,30	1.341.816	*Other operating income*
Beban operasi lainnya	(3.818.965)	4,23,30	(7.037.641)	*Other operating expenses*
LABA USAHA	**247.221.100**		**209.168.200**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	17.405.669	4,24a,30	16.168.375	*Finance income*
Beban keuangan	(9.375.276)	24b,30	(11.148.283)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**255.251.493**		**214.188.292**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan badan - neto	(58.813.601)	14c,14d,30	(47.345.409)	*Corporate income tax expenses - net*
LABA TAHUN BERJALAN	**196.437.892**		**166.842.883**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	**-**		**-**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**196.437.892**		**166.842.883**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**37,22**	**2o, 32**	**31,62**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Share capital - issued and fully paid*	Saham tresuri/ *Treasury stocks*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/*Retained earnings*		Ekuitas neto/ *Net equity*	
					Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2023		**528.481.110**	**(1.617.838)**	**317.981.175**	**126.889.061**	**268.786.232**	**1.240.519.740**	***Balance as of December 31, 2023***
Pembagian dividen kas	18	-	-	-	-	(118.252.446)	(118.252.446)	*Distribution of cash dividend*
Pembentukan cadangan umum	18	-	-	-	31.532.397	(31.532.397)	-	*General reserve appropriation*
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	166.842.883	166.842.883	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2024		**528.481.110**	**(1.617.838)**	**317.981.175**	**158.421.458**	**285.844.272**	**1.289.110.177**	***Balance as of December 31, 2024***
Pembagian dividen kas	18	-	-	-	-	(128.366.453)	(128.366.453)	*Distribution of cash dividend*
Pembentukan cadangan umum	18	-	-	-	5.435.500	(5.435.500)	-	*General reserve appropriation*
Penjualan kembali saham tresuri	16	-	1.617.838	994.724	-	-	2.612.562	*Resale of treasury stocks*
Total laba komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	196.437.892	196.437.892	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2025		**528.481.110**	**-**	**318.975.899**	**163.856.958**	**348.480.211**	**1.359.794.178**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ Notes**	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	1.511.184.761		1.341.667.290	*Receipts from customer*
Pembayaran kepada pemasok	(1.114.132.758)		(915.789.555)	*Payment to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(108.629.231)		(119.513.351)	*Payment to employees*
Penerimaan pajak	47.643.169	14f	-	*Cash receipt of taxes*
Penerimaan dari pendapatan keuangan	17.405.669	24a	16.168.375	*Cash receipts of finance income*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	92.000	8	(42.738)	*Placement of restricted cash*
Pembayaran beban keuangan	(33.797)		(15.131)	*Payments for finance expenses*
Penerimaan dari kegiatan operasi lain	2.198.224		6.981.915	*Receipt from other operating activities*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**355.728.037**		**329.456.805**	***Net cash flows provided by operating activities***
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FOR INVESTING ACTIVITY***
Perolehan aset tetap	(29.710.476)	9,31	(26.147.743)	*Acquisitions of fixed assets*
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FOR FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen	(125.165.015)	18	(118.252.446)	*Dividend payment*
Pembayaran liabilitas sewa	(122.422.905)	10	(120.788.859)	*Payments of lease liabilities*
Penerimaan dari penjualan kembali saham tresuri	2.612.562	16	-	*Receipt from resale of treasury stocks*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(244.975.358)**		**(239.041.305)**	***Net cash flows used in financing activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**81.042.203**		**64.267.757**	***NET INCREASE IN CASH AND AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**473.084.134**	5	**408.816.377**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**554.126.337**	5	**473.084.134**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 10 Juli 2013 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-47228.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 9 September 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 2013. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No. 44 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tanggal 23 Juni 2022, mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan operasional di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan kapal, penumpang, barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan, dapat melakukan kegiatan:

a. Kegiatan usaha utama Perusahaan untuk menyediakan:
   - Pelayanan kepelabuhan laut;
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum;
   - Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan;
   - Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang;
   - Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
   - Angkutan laut luar negeri untuk barang umum;
   - Pergudangan dan penyimpanan;
   - Reparasi mesin untuk keperluan umum;
   - Penanganan kargo (bongkar muat barang).

1. GENERAL

a. Establishment of the Company and General Information

PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("the Company") was established based on Notarial Deed No. 24 dated July 10, 2013 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-47228.AH.01.01.TAHUN 2013 dated September 9, 2013, and has been published in the State Gazette No. 78 dated September 27, 2013. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently through Notary Deed No. 44 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, dated June 23, 2022, regarding changes to the Company's Articles of Association, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0047245.AH.01.02.TAHUN 2022 dated July 8, 2022.

Based on the Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to carry out operational activities in the scope of organizing and operating ship services, passengers, goods and activities related to ports as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and highly competitive services to obtain or pursue profits in order to increase the value of the Company, may carry out activities:

a. The Company's main business activities are to provide:
   - *Maritime port services;*
   - *Domestic sea transportation for general goods;*
   - *River and lake transportation for general goods and/or animals;*
   - *Domestic sea freight port for goods;*
   - *Domestic sea transportation for special goods;*
   - *International sea transportation for general goods;*
   - *Warehousing and storage;*
   - *General machinery repair for public needs;*
   - *Cargo handling (loading and unloading goods).*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum (lanjutan)

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagai berikut:
- Industri kapal dan perahu;
- Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung.

Saat ini, perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa pengepilan, jasa pengangkutan laut, jasa penyewaan kapal, dan jasa pengoperasian kapal.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 September 2014.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Pelindo Tower Lantai 8 dan 9, Jl Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM") dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 22 Desember 2017, Perusahaan telah menawarkan 1.215.506.500 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, yang mewakili sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat. Saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan harga penawaran perdana sebesar Rp380 (nilai penuh) per saham.

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 18 Juli 2025 dari Dr. Putra Hutomo, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, menyetujui mengangkat:
1. R. R. Dewi Ariyani sebagai Komisaris Utama menggantikan Zuhri Iryansyah;
2. Fransiscus Budi Prayitno sebagai Komisaris;
3. Dony Istyanto Hari Mahdi sebagai Komisaris Independen menggantikan Bay Mokhamad Hasani;
4. Mitchell Julius Tupamahu sebagai Komisaris Independen;
5. Arief Hermawan sebagai Direktur Armada dan Operasi menggantikan Muhammad Iqbal.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment of the Company and General Information (continued)

b. Supporting business activities that support the main business activities are as follows:
- *Vessel and boat manufacturing;*
- *Vessel, boat, and floating structure repair service.*

Currently, the Company operates in pilotage services, tug services, mooring services, maritime transportation services, vessel leasing services, and vessel operations services.

The Company started its commercial operations on September 1, 2014.

The Company's head office is located at Pelindo Tower, 8th and 9th Floor, Jl Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, North Jakarta 14230.

The Company's direct parent entity is PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM") and the Company's ultimate parent entity is the Government of the Republic of Indonesia.

b. Public Offering of the Company's Shares of Stock

On December 22, 2017, the Company offered 1,215,506,500 shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share, representing 23% (twenty-three percent) of the issued and paid-up capital of the Company following the Initial Public Offering to the public. These shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) at an initial offering price of Rp380 (full amount) per share.

c. Key Management and Other Informations

Based on Notarial Deed No. 26 dated July 18, 2025 of Dr. Putra Hutomo, S.H, M.Kn., Notary in Jakarta regarding General Meeting of Shareholders, approve the appointment of:
1. *R. R. Dewi Ariyani as President Commissioner replacing Zuhri Iryansyah;*
2. *Fransiscus Budi Prayitno as Commissioner;*
3. *Dony Istyanto Hari Mahdi as Independent Commissioner replacing Bay Mokhamad Hasani;*
4. *Mitchell Julius Tupamahu as Independent Commissioner;*
5. *Arief Hermawan as Director of Fleet and Operations replacing Muhammad Iqbal.*

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya (lanjutan)

Susunan manajemen kunci Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	R. R. Dewi Ariyani	*President Commissioner*
Komisaris	Fransiscus Budi Prayitno	*Commissioner*
Komisaris Independen	Dony Istyanto Hari Mahdi	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mitchell Julius Tupamahu	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Shanti Puruhita	*President Director*
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	Shanti Puruhita	*Acting Director of Commercial and Business Development*
Direktur Armada dan Operasi	Arief Hermawan	*Director of Fleet and Operations*
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko	Dessy Emastari Prihatiningtyas	*Director of Finance, Human Resources and Risk Management*

Pada tanggal 31 Desember 2024, susunan manajemen kunci Perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Zuhri Iryansyah	*President Commissioner*
Komisaris	R. R. Dewi Ariyani	*Commissioner*
Komisaris Independen	Bay Mokhamad Hasani	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Fransiscus Budi Prayitno	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Shanti Puruhita	*President Director*
Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis	Shanti Puruhita	*Acting Director of Commercial and Business Development*
Direktur Armada dan Operasi	Muhammad Iqbal	*Director of Fleet and Operations*
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko	Dessy Emastari Prihatiningtyas	*Director of Finance, Human Resources and Risk Management*

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Dony Istyanto Hari Mahdi	Bay Mokhamad Hasani	*Head*
Anggota	Dyah Ayu Anggraheni Sugiri	Dyah Ayu Anggraheni Sugiri	*Member*
Anggota	Jaja Suparman	Jaja Suparman	*Member*
Sekretaris Perusahaan	Eddy Haristiani	Eddy Haristiani	***Corporate Secretary***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah karyawan yang bekerja di Perusahaan masing-masing sejumlah 112 dan 123 karyawan yang merupakan karyawan perbantuan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (tidak diaudit).

1. *GENERAL (continued)*

c. *Key Management and Other Informations (continued)*

The composition of the Company's key management, consisting of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2025, are as follows:

As of December 31, 2024, the composition of the Company's key management, which consists of Board of Commissioners and Directors are as follow:

The members of the Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

As of December 31, 2025 and 2024, the number of employees working at the Company was 112 and 123 employees, respectively, who were seconded personnel from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (unaudited).



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan

1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor: 91202075920050001 telah menerbitkan izin usaha sebagai Pelaku Usaha tanggal 20 Mei 2019 yang telah diperbaharui tanggal 5 Februari 2024 kepada Perusahaan sehingga Perusahaan dapat melakukan aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, meliputi:

- Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- Memelihara kelestarian lingkungan;
- Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

2) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No. BX-311/AL 001 tanggal 8 Agustus 2014 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. SIUPAL berlaku selama Perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022. Kepemilikan SIUPAL/SIOPSUS Perusahaan telah beberapa kali dilakukan evaluasi dan verifikasi data administrasi dan teknis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang terakhir berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS No. AL.010/3048/DA-2024 tanggal 20 September 2024.

1. GENERAL (continued)

d. Permits

1) The Head of the Investment Coordinating Board, through Risk-Based Business Licensing Standard Certificate Number: 91202075920050001, has issued a business permit to the Company as a Business Operator dated May 20, 2019 which has been updated on February 5, 2024 enabling the Company to carry out maritime port service activities, which include:

- *Providing and maintaining the suitability of port facilities;*
- *Providing service to port service users in accordance with the service standards set by the government;*
- *Maintaining the security, safety, and orderliness of the operated port facilities;*
- *Contributing to the maintenance of safety, security, and orderliness concerning transportation in waters;*
- *Preserving the environment;*
- *Fulfilling obligations in accordance with the concession in the agreement; and*
- *Complying with the provisions of laws and regulations, both national and international.*

2) Letter of Permit for Sea Transportation Company (SIUPAL) No. BX-311/AL 001 dated August 8, 2014 from the Minister of Transportation Directorate General of Sea Transportation. SIUPAL is valid as long as the Company is still conducting its operational activities and evaluated once every 2 (two) years by the Director General in accordance with Minister of Transportation Regulation Number PM 93 Year 2013 juncto Minister of Transportation Regulation Number PM 74 Year 2016 juncto Minister of Transportation Regulation Number PM 23 Year 2022. The ownership of SIUPAL by the Company has been evaluated and verified by the Minister of Transportation Directorate General of Sea Transportation, most recently based on Minute No. AL.010/3048/DA-2024 dated September 20, 2024.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

---

1. UMUM (lanjutan)

d. Perizinan (lanjutan)

3) Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi juncto Permenhub Nomor 13 Tahun 2023. Pada 20 Mei 2019, Perusahaan telah melakukan *Online Single Submission* (OSS) dan telah menerima Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120207592005 dari Lembaga OSS (BKPM) dengan berbasis Risiko dan telah melakukan perubahan pertama pada tanggal 3 November 2023. Oleh karena itu, masa izin usaha Perusahaan berlaku "Selama Badan Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya".

e. Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 13 Maret 2026. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

1. GENERAL (continued)

d. Permits (continued)

3) Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) No. 12 of 2021 concerning The Standard of Business Activity and Product on the Implementation of Risk Based Business License in Transportation Sector juncto Permenhub Number 13 Year 2023. On May 20, 2019, the company has made an Online Single Submission (OSS) and has received a Business Registration Number (NIB): 9120207592005 from the OSS Institution (BKPM) based on risk and has made the first changes on November 3, 2023. Therefore, the Company's business permit is applicable "As long as the Business Entity runs its business and/or activities".

e. Issuance of Financial Statements

The management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements, which were completed and authorized for issuance by the Company's Directors on March 13, 2026. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the financial statements

*The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (*Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia *or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("*Otoritas Jasa Keuangan*" or "*OJK*").*

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the financial statements.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2025, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran

Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran (exchangeability) tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

Amandemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Company are consistently applied for the years covered by the financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Changes in accounting principles

On January 1, 2025, there are new and revised or amended towards several standards that are relevant to the Company operation which is effective for application from that date as follows:

Amendment PSAK 221: The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability

The amendments specifies how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking. The amendments also require disclosure of information that enables users of its financial statements to understand how the currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows.

This amendment did not have any impact on the Company's financial statements.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.

Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan:

- Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (*variable fee approach*);
- Pendekatan yang disederhanakan (*premium allocation approach*) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek.

Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- diekspektasikan akan direalisasi, dimaksudkan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in accounting principles (continued)

PSAK 117: Insurance Contracts

PSAK 117 is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. PSAK 117 replaces PSAK 104 Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that issue them as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features.

The overall objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model, supplemented by:

- *A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach);*
- *A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts.*

The new standard had no impact on the Company's financial statements.

c. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- *expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- *held primarily for the purpose of trading,*
- *expected to be realized within 12 months after the reporting period, or*
- *cash or cash equivalents unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other assets are classified as non-current.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:
- diekspektasikan akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- untuk diperdagangkan,
- akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

d. Pengukuran nilai wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan pada nilai wajar. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Current and non-current classification (continued)

A liability is current when it is:
- *expected to be settled in the normal operating cycle,*
- *held primarily for the purpose of trading,*
- *due to be settled within 12 months after the reporting period, or*
- *there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. Fair value measurement

The Company initially measure financial instruments at fair value. The Company also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:
i) In the principal market for the asset or liability, or
ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liabilities are measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati *(observable)* baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati *(unobservable)*.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Fair value measurement (continued)

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Tim pelaporan keuangan Perusahaan bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Perusahaan dan penilai eksternal.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan yang terdiri dari kas di bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun disajikan sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya" sebagai bagian dari "aset lancar lainnya". Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai bagian dari "aset tidak lancar lainnya" (Catatan 8).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Fair value measurement (continued)

The Company's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Company and external valuers.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of financial position comprise cash in banks and short-term deposits with a maturity of 3 (three) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents which are restricted for repayment of current maturing obligations are presented as "restricted cash" under "other current assets". Cash and cash equivalents which are restricted for repayment of obligations maturing after 1 (one) year are presented as part of "other non-current assets" (Note 8).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115, seperti diungkapkan pada Catatan 2k.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115, as disclosed in Note 2k.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:
- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha serta kas yang dibatasi penggunaannya, dikelompokkan sebagai aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur melalui NWPKL dan NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:
- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost include cash and cash equivalents, trade receivables and also restricted cash, which are classified as other current assets and other non-current assets.

The Company has no financial assets measured in FVOCI and FVTPL.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
  atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
  or
- *The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.



PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Perusahaan menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment

The Company recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Company applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company reassesses the internal credit rating of the debt instrument.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Selain itu, Perusahaan mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan ketika pembayaran kontraktual lebih dari 365 hari dari tanggal jatuh tempo.

Perusahaan menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 365 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Perusahaan juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Perusahaan tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Perusahaan. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR dan utang.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang, seperti utang usaha, uang titipan, beban akrual, utang dividen, dan liabilitas sewa.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

In addition, the Company considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 365 days past due.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 365 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL and payables.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities as payables, such as trade payables, deposits, accrued expenses, dividend payables, and lease liabilities.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada NWLR (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Perusahaan dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang)

1. Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

   Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

2. *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)*

f. *Financial Instruments (continued)*

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

Financial liabilities at FVTPL (continued)

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entere into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at FVTPL.

Financial liabilities at amortized cost (Borrowings)

1. *Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings*

   Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang) (lanjutan)

1. Utang Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga (lanjutan)

   Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

2. Utang dan Akrual

   Liabilitas untuk utang usaha, beban akrual, uang titipan, utang dividen dan liabilitas sewa, dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Borrowings) *(continued)*

1. Long-term Interest-bearing Borrowings (continued)

   Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

2. Payables and Accruals

   Liabilities for trade payable, accrued expenses, deposits, dividend payables and lease liabilities are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

Financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.*

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 25.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

h. Persediaan

Persediaan dicatat menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang dan terutama terdiri atas persediaan bahan bakar.

i. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

g. Transactions with Related Parties

The Company have transactions with related parties as defined in PSAK 224: Related Party Disclosure.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 25.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the financial statements are unrelated parties.

h. Inventories

Inventory is measured using the weighted-average cost method and primarily consists of fuel.

i. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Perusahaan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Fixed Assets (continued)

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Company and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	5-25	*Buildings*
Kapal	3-20	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	5	*Port facilities*
Kendaraan	5	*Vehicles*

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Constructions in progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban *docking* dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan selama 2,5 tahun.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of docking is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and is depreciated 2.5 years.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Perusahaan mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Perusahaan atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas UPK terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Impairment of Non-financial Assets

The Company assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Companys of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each CGU's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi.

Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Impairment of Non-financial Assets (continued)

If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss.

After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Untuk pendapatan, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat jasa telah diserahkan kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Revenue and Expenses

The Company has adopted PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

For revenues, performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognized, when the services has been transferred to the customer (a point in time).

Expense Recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode yang bersangkutan. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31,* 2025	**31 Desember/ *December 31,* 2024**	
Dolar AS	Rp16.782	Rp16.162	*US Dollar*

m. Sewa

Perusahaan menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Perusahaan sebagai Penyewa

Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Foreign Currency Transactions and Balances

The financial statements are presented in Rupiah, which is The Company's functional currency and presentation currency. Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average buying and selling rates of exchange quoted by Bank Indonesia at the closing of the last banking day of the period. The resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

The exchange rates used as of December 31, 2025 and 2024 were as follows:

m. Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company as Lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Perusahaan mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Note 2j).

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Leases (continued)

Right-of-use assets

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2j).

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made.

**PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Perusahaan juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Perusahaan sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontinjensi tersebut diperoleh.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Leases (continued)

Lease liabilities (continued)

In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Company also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company as Lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Taxation

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;

ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

ii) in respect of deductible temporary differences, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:
- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: *Pajak Penghasilan.*

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:
- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the statement of financial position.

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 212: Income Tax.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang saham yang beredar sepanjang tahun berjalan.

Total rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yaitu masing-masing sebesar 5.277.925.558 dan 5.276.771.300 saham (Catatan 32).

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2025.

p. Saham Tresuri

Instrumen ekuitas sendiri yang diperoleh kembali (saham tresuri) diakui pada harga perolehan kembali dan dikurangi dari ekuitas. Tidak ada laba atau rugi yang diakui pada laba rugi atas perolehan, penjualan kembali, penerbitan atau pembatalan dari instrumen ekuitas Perusahaan. Selisih antara jumlah tercatat dan penerimaan, bila diterbitkan kembali, diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor pada ekuitas (Catatan 17).

q. Informasi Segmen

Perusahaan secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 30, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

r. Biaya emisi saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of shares outstanding during the year.

Total weighted average number of shares outstanding for the years ended December 31, 2025 and 2024 are 5,277,925,558 and 5,276,771,300 shares, respectively (Note 32).

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2025.

p. Treasury Shares

Own equity instruments that are reacquired (treasury shares) are recognized at reacquisition cost and deducted from equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments. Any difference between the carrying amount and the consideration, if reissued, is recognized as part of additional paid-in capital in the equity (Note 17).

q. Segment Information

The management regularly review the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance.

Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 30, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.

r. Issuance Costs of Share Capital

Costs incurred in connection with the Company's issuance of share capital to the public were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the statement of financial position.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbang kan relevan terhadap Perusahaan pada saat efektif.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrument Keuangan

Amandemen tersebut mencakup klarifikasi atas suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada "tanggal penyelesaian" serta memperkenalkan pilihan kebijakan akuntansi (apabila kondisi tertentu terpenuhi) untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian. Selain itu, panduan tambahan ditambahkan mengenai bagaimana arus kas kontraktual untuk aset keuangan dengan fitur lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) serta fitur serupa harus dinilai. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa saja yang merupakan fitur non-recourse dan karakteristik instrumen yang terkait secara kontraktual. Selain itu, amandemen tersebut memperkenalkan persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi serta persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (OCI).

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan hanya untuk klasifikasi aset keuangan dan pengungkapan terkait. Perusahaan tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Accounting standards issued but not yet effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company's financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Company when they become effective.

Effective beginning on or after January 1, 2026

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments

The amendments includes a clarification that a financial liability is derecognised on the 'settlement date' and the introduction of an accounting policy choice (if specific conditions are met) to derecognise financial liabilities settled using an electronic payment system before the settlement date. Further, additional guidance is added on how the contractual cash flows for financial assets with environmental, social and corporate governance (ESG) and similar features should be assessed. The amendments also clarifiies what constitute 'non-recourse features' and what are the characteristics of contractually linked instruments. The amendments also introduces of disclosures for financial instruments with contingent features and additional disclosure requirements for equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (OCI).

The Amendments are effective for annual periods starting on or after January 1, 2026 with early adoption permitted for classification of financial assets and related disclosures only. The Company does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Company's financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Standar akuntansi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Penyesuaian tahunan 2024

DSAK IAI menerbitkan Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia), yang mencakup klarifikasi, penyederhanaan, koreksi, atau perubahan untuk meningkatkan konsistensi dalam PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109 Instrumen Keuangan, dan PSAK 207 Laporan Arus Kas. Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan lebih awal diperkenankan dan harus diungkapkan. Amandemen tersebut tidak diharapkan menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201. Standar baru ini memperkenalkan persyaratan baru terkait penyajian dalam laporan laba rugi, termasuk total dan subtotal tertentu. Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam salah satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan.

Standar ini juga mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja yang didefinisikan manajemen, subtotal pendapatan dan beban, serta mencakup persyaratan baru terkait agregasi dan disagregasi informasi keuangan

PSAK 118 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. PSAK 118 akan diterapkan secara retrospektif.

Perusahaan saat ini sedang mengidentifikasi seluruh dampak yang akan timbul atas laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan terkait implementasi amandemen tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Accounting standards issued but not yet effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Annual Improvements 2024

The DSAK IAI issued Annual Improvements 2024 to SAK Indonesia, which include clarifications, simplifications, corrections or changes to improve consistency in, PSAK 107 Financial instruments: Disclosure, PSAK 109 Financial Instruments and PSAK 207 Statements of Cash Flows. The amendments will be effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2026. Earlier application is permitted and must be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Company's financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements

PSAK 118 will replace PSAK 201. The new standard introduces new requirements for presentation within the statement of profit or loss, including specified totals and subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations.

The standard requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and it also includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.

PSAK 118 are effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, but earlier application is permitted and must be disclosed. PSAK 118 will apply retrospectively.

The Company is currently working to identify all impacts the amendments will have on the primary financial statements and notes to the financial statements.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 14.

Taksiran tagihan restitusi pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 14f.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Management believes that the following represent a summary of the significant judgments, estimates and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details regarding taxation are disclosed in Note 14.

Claims for tax refund

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 14f.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa.

Perusahaan mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Perusahaan menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 10.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Compay's accounting policies disclosed in Note 2f.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Company as lessee

The Company has several lease contracts that include extension and termination options. The Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not.

The Company considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 10.

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimates and Assumptions

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha (lanjutan)

Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estmasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Penjelasan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 6.

Beban pajak kini

Perusahaan mengakui beban pajak kini berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak periode berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables (continued)

A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for Groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly

At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

Further details on trade receivables are disclosed in Note 6.

Current tax expense

The Company recognizes current tax expense based on the estimated taxable income for the period computed using the prevailing tax rates.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada masa depan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Penyusutan, estimasi nilai sisa dan masa manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 25 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 9.

3. MANAGEMENT'S USE OF ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that the deductible temporary differences can be utilized to reduce taxable income in the future. Significant estimates by management are required in determining the total deferred tax assets that can be recognized, based on the timing of utilization, the level of future taxable income, and future tax planning strategies.

Depreciation, estimate of residual values and useful life of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 to 25 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details on fixed asset are disclosed in Note 9.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. REKLASIFIKASI AKUN

Perusahaan melakukan reklasifikasi pada beberapa akun pada dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

4. ACCOUNT RECLASSIFICATION

The Company reclassified several accounts financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended to conform with the presentation for the financial statements as of December 31, 2025, and for the year then ended. The reclassifications are as follows:

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	***Reklasifikasi/ Reclassification***	**Setelah reklasifikasi/ *After reclassified***	
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Piutang usaha - neto				*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	44.891.610	76.150.102	121.041.712	*Third parties*
Pihak berelasi	147.564.783	129.201.455	276.766.238	*Related parties*
Aset kontrak - neto				*Contract assets - net*
Pihak ketiga	76.150.102	(76.150.102)	-	*Third parties*
Pihak berelasi	129.201.455	(129.201.455)	-	*Related parties*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Beban operasi lainnya	(8.801.910)	1.764.269	(7.037.641)	*Other operating expenses*
Pendapatan keuangan	17.932.644	(1.764.269)	16.168.375	*Finance income*
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENT OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	1.344.743.520	(3.076.230)	1.341.667.290	*Receipts from customer*
Pembayaran kepada pemasok	(941.722.511)	22.532.138	(919.191.373)	*Payment to suppliers*
Pembayaran kepada karyawan	(118.472.625)	2.360.092	(116.111.533)	*Payment to employees*
Penerimaan dari pendapatan keuangan	17.932.644	(1.764.269)	16.168.375	*Cash receipts of finance income*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pembayaran dividen	(98.200.715)	(20.051.731)	(118.252.446)	*Payment to suppliers*

5. KAS DAN SETARA KAS / *5. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 25)			*Related parties (Note 25)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	197.054.237	54.743.932	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	90.975.134	15.913.956	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.970.428	1.799.079	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.126.538	1.401.985	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Dolar AS			*US Dollar*
Pihak berelasi (Catatan 25)			*Related party (Note 25)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	225.182	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub-total kas di bank	**296.126.337**	**74.084.134**	***Sub-total cash in banks***
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 25)			*Related parties (Note 25)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	143.000.000	78.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	115.000.000	115.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	206.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Sub-total deposito berjangka	**258.000.000**	**399.000.000**	***Sub-total time deposits***
Total kas dan setara kas	**554.126.337**	**473.084.134**	***Total cash and cash equivalents***

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Annual interest rates on the time deposits are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2025	2024	
Rupiah	3,50% - 6,75%	3,50% - 6,80%	*Rupiah*

Pada tanggal pelaporan, tidak terdapat kas dan setara kas yang dijadikan sebagai jaminan.

As of the reporting date, there was no cash and cash equivalents pledged as collateral.

Saldo kas dan setara kas dibatasi penggunaannya, pada tanggal pelaporan, diklasifikasikan sebagai aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 8).

Cash and cash equivalents were restricted to use at the reporting date, classified as other current assets and other non-current assets (Note 8).



6. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

6. *TRADE RECEIVABLES*

The details of trade receivables per customer are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			***Third parties***
Difakturkan			*Billed*
PT Langlang Laju Layang	17.785.297	-	*PT Langlang Laju Layang*
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	10.063.712	6.289.917	*PT Trimegah Bangun Persada Tbk*
PT Bali Infra Gas	8.186.104	8.186.104	*PT Bali Infra Gas*
PT Bhaskara Inti Samudera	4.580.690	-	*PT Bhaskara Inti Samudera*
PT Riandy Fiesta Samudera	3.030.089	4.612.903	*PT Riandy Fiesta Samudera*
PT Adhika Samudera Jaya	2.851.404	1.735.027	*PT Adhika Samudera Jaya*
PT Penascop Maritim Indonesia	2.672.631	4.268.341	*PT Penascop Maritim Indonesia*
PT Bahari Eka Nusantara	2.057.621	1.893.843	*PT Bahari Eka Nusantara*
PT Lintas Bahari Nusantara	1.862.010	2.453.478	*PT Lintas Bahari Nusantara*
PT HUA Indonesia Agensi	1.446.841	532.836	*PT HUA Indonesia Agensi*
PT Energy Marine Indonesia	1.196.611	5.267.163	*PT Energy Marine Indonesia*
PT Bahtera Mitra Sepupu	1.141.877	1.306.936	*PT Bahtera Mitra Sepupu*
PT Asia Maritim Line	992.078	1.586.884	*PT Asia Maritim Line*
PT Lintas Samudra Sejahtera	739.502	-	*PT Lintas Samudra Sejahtera*
PT Wiratrans Samudra	699.041	427.702	*PT Wiratrans Samudra*
PT Pelayaran Sinar Dhafitha Utama	596.955	561.121	*PT Pelayaran Sinar Dhafitha Utama*
PT Bilqis Mutiara Bahari	579.445	721.770	*PT Bilqis Mutiara Bahari*
PT Tirta Permai Bahari	485.121	774.190	*PT Tirta Permai Bahari*
PT Prima Lestari Segara Abadi	271.418	603.077	*PT Prima Lestari Segara Abadi*
PT Karya Pacific Shipping	151.987	2.404.696	*PT Karya Pacific Shipping*
PT Dwidaya Agensi Indonesia	143.761	598.327	*PT Dwidaya Agensi Indonesia*
PT IDT Trans Agency	142.299	649.507	*PT IDT Trans Agency*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	5.354.172	4.160.101	*Others (below Rp500,000 each)*
Sub-total difakturkan	67.030.666	49.033.923	*Sub-total billed*
Belum difakturkan			*Unbilled*
PT Langlang Laju Layang	94.719.708	77.058.450	*PT Langlang Laju Layang*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	-	1.353.830	*Others (below Rp500.000 each)*
Sub-total belum difakturkan	94.719.708	78.412.280	*Sub-total unbilled*
Sub-total pihak ketiga	161.750.374	127.446.203	*Sub-total third parties*
Penyisihan penurunan nilai	(9.119.467)	(6.404.491)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	**152.630.907**	**121.041.712**	***Third parties - net***

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of trade receivables per customer are as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Pihak berelasi (Catatan 25)			***Related parties (Note 25)***
Difakturkan			*Billed*
SPJM	66.514.603	72.713.764	*SPJM*
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	20.039.784	52.184.561	*PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")*
PT Pertamina Trans Kontinental	8.955.655	8.171.454	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Adhi Guna Putera	5.262.117	2.517.006	*PT Adhi Guna Putera*
PT PLN Energi Gas	2.936.493	8.809.480	*PT PLN Energi Gas*
PT Pelabuhan Tanjung Priok	2.287.249	2.590.198	*PT Pelabuhan Tanjung Priok*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	2.711.017	947.714	*Others (below Rp500,000 each)*
Sub-total difakturkan	108.706.918	147.934.177	*Sub-total billed*
Belum difakturkan			*Unbilled*
SPJM	76.219.800	68.695.589	*SPJM*
Pelindo	15.062.933	50.849.700	*Pelindo*
PT Adhi Guna Putera	6.249.961	5.770.461	*PT Adhi Guna Putera*
PT PLN Energi Gas	2.678.555	2.473.055	*PT PLN Energi Gas*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	-	1.412.650	*Others (below Rp500,000 each)*
Sub-total belum difakturkan	100.211.249	129.201.455	*Sub-total unbilled*
Sub-total pihak berelasi	208.918.167	277.135.632	*Sub-total related parties*
Penyisihan atas penurunan nilai	(1.057.008)	(369.394)	*Allowance for impairment*
Sub-total pihak berelasi - neto	**207.861.159**	**276.766.238**	***Sub-total related parties - net***
Neto	**360.492.066**	**397.807.950**	***Net***

Seluruh transaksi piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

All trade receivable transactions are denominated in Rupiah.

Piutang usaha tidak dijaminkan dan tidak dikenakan bunga.

Trade receivables are unsecured and non-interest bearing.

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Lancar	196.799.835	233.599.008	*Current*
Telah jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	112.867.676	29.698.712	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	14.269.946	67.763.489	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	1.364.431	2.447.054	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	45.366.653	71.073.572	*More than 90 days*
Total	370.668.541	404.581.835	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(10.176.475)	(6.773.885)	*Allowance for impairment*
Neto	**360.492.066**	**397.807.950**	***Net***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / 6. *TRADE RECEIVABLES (continued)*

Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	6.773.885	3.697.657	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan	3.402.590	3.076.228	*Allowance for the year*
Saldo akhir	**10.176.475**	**6.773.885**	***Ending balance***

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha dicatat pada beban umum dan administrasi di laporan laba rugi dan komprehensif lainnya.

Allowance for impairment of trade receivables recognized in general and administrative expenses on statement of profit or loss and other comprehensive income.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible expected credit losses that may arise from the un-collectability of trade receivables.

7. PERSEDIAAN / 7. *INVENTORIES*

Akun ini seluruhnya merupakan persediaan bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan.

The account represents fuel used for the Company's operational activities.

Persediaan tidak diasuransikan karena manajemen menilai risiko kerugian adalah minimal.

Inventories are not covered by insurance, as management has assessed the risk of loss as minimal.

Pada tanggal pelaporan, tidak terdapat persediaan yang dijadikan sebagai jaminan.

As of the reporting date, there are no inventories pledged as collateral.

8. ASET LAINNYA / 8. *OTHER ASSETS*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Aset lancar lainnya			***Other current assets***
Uang muka	31.998.502	3.444.078	*Advances*
Kas yang dibatasi penggunaannya	101.271	96.122	*Restricted cash*
Beban dibayar dimuka	-	1.953.770	*Prepaid expenses*
Total aset lancar lainnya	**32.099.773**	**5.493.970**	***Total other current assets***
Aset tidak lancar lainnya			***Other non-current assets***
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	31.165.692	-	*Prepaid taxes - non-current portion*
Kas yang dibatasi penggunaannya	33.697	130.846	*Restricted cash*
Total aset tidak lancar lainnya	**31.199.389**	**130.846**	***Total other non-current assets***

8. ASET LAINNYA (lanjutan)

Uang muka merupakan uang muka atas biaya operasi lainnya dan uang muka atas pembelian bahan bakar yang mulai berlaku sejak tahun 2025.

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan tantiem Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing tahun 2022 dan 2023 yang ditangguhkan dan akan distribusikan selama satu hingga tiga tahun kedepan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar merupakan pajak dibayar di muka atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") tahun 2024 yang dalam proses untuk restitusi.

8. OTHER ASSETS (continued)

Advances mainly represent advances for other operating expenses and advance for purchases of fuel which takes effect in 2025.

Restricted cash represents the deferred bonuses for the Board of Commissioners and Directors, on 2022 and 2023, respectively which will be distributed over a period of one to three years. This matter regulated in Ministerial Regulation SOE 03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Prepaid tax - non-current portion represents the prepaid Value Added Tax ("VAT") for fiscal year 2024, which is in processed for restitution.

9. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

9. FIXED ASSETS

This account consists of the following:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/
Year ended December 31, 2025

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan	12.359.784	-	-	-	12.359.784	*Buildings*
Kapal	808.456.325	61.553.744	-	-	870.010.069	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	5.400.603	39.105	-	-	5.439.708	*Port facilities*
Kendaraan	580.000	-	-	-	580.000	*Vehicle*
Aset dalam penyelesaian	1.025.422	6.486.889	-	-	7.512.311	*Construction in progress*
Total harga perolehan	827.822.134	68.079.738	-	-	895.901.872	*Total acquisition cost*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(725.545)	(4.930.566)	-	-	(5.656.111)	*Buildings*
Kapal	(260.321.469)	(43.751.006)	-	-	(304.072.475)	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(4.285.923)	(691.315)	-	-	(4.977.238)	*Port facilities*
Kendaraan	(58.000)	(116.000)	-	-	(174.000)	*Vehicle*
Total akumulasi penyusutan	(265.390.937)	(49.488.887)	-	-	(314.879.824)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**562.431.197**				**581.022.048**	***Net book value***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/
Year ended December 31, 2024

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan	12.359.784	-	-	-	12.359.784	*Buildings*
Kapal	785.328.899	23.127.426	-	-	808.456.325	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	5.400.603	-	-	-	5.400.603	*Port facilities*
Kendaraan	-	580.000	-	-	580.000	*Vehicle*
Aset dalam penyelesaian	-	1.025.422	-	-	1.025.422	*Construction in progress*
Total harga perolehan	803.089.286	24.732.848	-	-	827.822.134	*Total acquisition cost*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(241.041)	(484.504)	-	-	(725.545)	*Buildings*
Kapal	(218.437.510)	(41.883.959)	-	-	(260.321.469)	*Vessels*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(3.405.014)	(880.909)	-	-	(4.285.923)	*Port facilities*
Kendaraan	-	(58.000)	-	-	(58.000)	*Vehicle*
Total akumulasi penyusutan	(222.083.565)	(43.307.372)	-	-	(265.390.937)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**581.005.721**				**562.431.197**	***Net book value***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

9. ASET TETAP / 9. *FIXED ASSETS*

Seluruh aset tetap dimiliki secara langsung oleh Perusahaan.

All fixed assets are directly owned by the Company.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan kondisi yang mengindikasikan adanya potensi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Management believes that there are no events and conditions that indicate a potential impairment of fixed assets as of December 31, 2025 and 2024.

Aset dalam penyelesaian terdiri dari: / *Construction in progress consists of:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Kapal	7.512.311	1.025.422	*Vessels*

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian (2 buah kapal) pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The percentages of completion and estimated completion periods of construction in progress (2 vessels) as of December 31, 2025 are as follows:

Jenis aset	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of Completion***	**Target penyelesaian/ *Target of completion***	***Type of assets***
Kapal	0,64% - 73,17%	2027	*Vessels*

Penyusutan aset tetap dibebankan sebagai berikut:

Fixed assets depreciation is charged as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	43.751.006	41.883.959	*Cost of revenues (Note 20)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	5.737.881	1.423.413	*General and administrative expenses (Note 21)*
Total	**49.488.887**	**43.307.372**	***Total***

Tidak terdapat aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Perusahaan.

There are no fixed assets that have been fully depreciated but are still used to support the Company's operations.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mengasuransikan aset tetap kapal sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the Company insured its vessels as follows:

31 Desember 2025: / *December 31, 2025:*

Perusahaan Asuransi/ *Insurance Company*	**Risiko Asuransi/ *Insurable Risk***	**Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount***
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT BRI Asuransi Indonesia PT Asuransi Ramayana Tbk PT Asuransi Central Asia PT Arthagraha General Insurance PT Asuransi Jasaraharja Putera PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Risiko kerugian yang disebabkan kerusakan mesin dan hull (machinery breakdown) / *risk of loss caused by machine and hull damage (machinery breakdown)*	Rp466.990.212

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

31 Desember 2024:

Perusahaan Asuransi/ *Insurance Company*	Risiko Asuransi/ *Insurable Risk*	Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount*
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT BRI Asuransi Indonesia PT Asuransi Ramayana Tbk PT Asuransi Central Asia PT Arthagraha General Insurance PT Asuransi Jasaraharja Putera PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Risiko kerugian yang disebabkan kerusakan mesin dan hull (machinery breakdown) / *risk of loss caused by machine and hull damage (machinery breakdown)*	Rp531.038.536

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Pada tanggal pelaporan, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan.

9. *FIXED ASSETS - NET (continued)*

December 31, 2024:

Management believes the insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

As of the reporting date, there are no fixed assets pledged as collateral.

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

10. *RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES*

The movements in right-of-use assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31*, 2025					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Bangunan	21.655.334	-	(1.927.792)	-	19.727.542	*Buildings*
Kapal tunda	186.343.094	101.780.267	(15.611.432)	-	272.511.929	*Tug vessels*
Kendaraan	2.918.371	768.744	(146.136)	-	3.540.979	*Vehicles*
Total harga perolehan	210.916.799	102.549.011	(17.685.360)	-	295.780.450	*Total acquisition costs*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	(15.220.312)	(6.435.022)	1.927.792	-	(19.727.542)	*Buildings*
Kapal tunda	(112.841.432)	(105.266.744)	15.611.432	-	(202.496.744)	*Tug vessels*
Kendaraan	(2.918.370)	(768.744)	146.136	-	(3.540.978)	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	(130.980.114)	(112.470.510)	17.685.360	-	(225.765.264)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**79.936.685**				**70.015.186**	***Net book value***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31*, 2024					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Bangunan	21.735.650	1.318.460	(1.398.776)	-	21.655.334	*Buildings*
Kapal tunda	106.577.392	151.923.580	(72.157.878)	-	186.343.094	*Tug vessels*
Kendaraan	2.969.406	445.510	(496.545)	-	2.918.371	*Vehicles*
Total harga perolehan	131.282.448	153.687.550	(74.053.199)	-	210.916.799	*Total acquisition costs*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	(8.918.789)	(7.700.299)	1.398.776	-	(15.220.312)	*Buildings*
Kapal tunda	(81.161.061)	(103.838.249)	72.157.878	-	(112.841.432)	*Tug vessels*
Kendaraan	(2.694.642)	(720.273)	496.545	-	(2.918.370)	*Vehicles*
Total akumulasi penyusutan	(92.774.492)	(112.258.821)	74.053.199	-	(130.980.114)	*Total accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**38.507.956**				**79.936.685**	***Net book value***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA / *10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES*

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut: / *The detail of lease liabilities is as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Liabilitas sewa			***Lease liabilities***
Bagian jangka pendek	69.093.934	84.927.058	*Current portion*
Bagian jangka panjang	3.920.945	6.735.657	*Non-current portion*
Total	**73.014.879**	**91.662.715**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut: / *Amounts recognized in statement of profit or loss are as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 24b)	9.341.479	11.133.152	*Interest expense on lease liabilities (Note 24b)*
Beban penyusutan aset hak-guna	112.470.510	112.258.821	*Depreciation expense of right-of-use assets*

Penyusutan aset hak-guna dibebankan sebagai berikut: / *Right-of-use assets depreciation is charged as follows:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 20)	105.266.744	103.838.249	*Cost of revenues (Note 20)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	7.203.766	8.420.572	*General and administrative expenses (Note 21)*
Total	**112.470.510**	**112.258.821**	***Total***

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Perusahaan sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Perusahaan. Perusahaan mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Perusahaan mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Perusahaan.

Some leases contain extension options exercisable by the Company before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Company. The Company assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Company reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut: / *Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	91.662.715	39.515.452	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	102.549.011	153.687.551	*Addition during the year*
Arus kas	(122.422.905)	(120.788.859)	*Cash flow*
Perubahan non-kas	1.226.058	19.248.571	*Non-cash changes*
Total	**73.014.879**	**91.662.715**	***Total***

11. UTANG USAHA / *11. TRADE PAYABLES*

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on vendors are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	5.665.796	5.463.543	*PT Trimegah Bangun Persada Tbk*
PT Humpuss Transportasi Curah	3.402.000	-	*PT Humpuss Transportasi Curah*
PT Barokah Gemilang Perkasa	1.792.500	-	*PT Barokah Gemilang Perkasa*
PT Pelayaran Nusantara Putra Samudra	570.000	1.180.000	*PT Pelayaran Nusantara Putra Samudra*
PT Petro Gasindo Intiniaga	-	2.389.608	*PT Petro Gasindo Intiniaga*
PT Hokari Linex Pratama	-	1.395.285	*PT Hokari Linex Pratama*
PT Panca Bina Persada	-	1.021.601	*PT Panca Bina Persada*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000)	4.443.973	3.813.195	*Others (below Rp1,000,000 each)*
Sub-total pihak ketiga	15.874.269	15.263.232	*Sub-total third parties*
Pihak berelasi (Catatan 25)			***Related parties (Note 25)***
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	2.979.708	2.391.779	*PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")*
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")	1.403.415	-	*PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")*
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")	1.259.244	-	*PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")*
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	1.359.451	2.721.787	*PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia("PMLI")*
PT Nusantara Regas	-	2.238.749	*PT Nusantara Regas*
Pelindo	-	2.231.310	*Pelindo*
PT Pelindo Solusi Maritim ("PSM") (dahulu PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI"))	-	1.721.133	*PT Pelindo Solusi Maritim ("PSM") (formerly PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI"))*
PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI")		1.227.688	*PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI")*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000)	2.868.314	1.580.311	*Others (below Rp1,000,000 each)*
Sub-total pihak berelasi	9.870.132	14.112.757	*Sub-total related parties*
Total	**25.744.401**	**29.375.989**	***Total***

Seluruh transaksi utang usaha Perusahaan denominasi dalam Rupiah Indonesia.

All of the Company's trade payables transaction denominated in Indonesian Rupiah.

12. UANG TITIPAN / *12. DEPOSITS*

Akun ini merupakan uang titipan pelanggan dan uang titipan atas potongan penghasilan karyawan yang akan disalurkan ke dana pensiun karyawan, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan dan PT Taspen (Persero).

The account represents customer deposits and deposits for employee income deductions that will be disbursed to pension fund, BPJS Employment, BPJS Health and PT Taspen (Persero).



13. BEBAN AKRUAL / *13. ACCRUED EXPENSES*

Beban akrual terdiri dari: / *Accrued expenses consist of:*

	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	
Pemeliharaan kapal	74.240.540	38.467.210	*Ship maintenances*
Kerja sama mitra usaha	51.965.235	54.568.444	*Partnership*
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	42.568.758	46.492.476	*Salaries, allowance and employee welfare*
Bahan bakar dan pelumas	26.853.737	35.124.161	*Fuel and lubricants*
Asuransi	29.484	2.250.686	*Insurance*
Pencadangan pajak	-	3.476.066	*Tax provision*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500.000)	5.980.345	5.607.392	*Others (below Rp500,000 each)*
Total	**201.638.099**	**185.986.435**	***Total***

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan pelanggan atas kegiatan pelayanan kapal dan beban pegawai non-organik.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with customers for ship services and outsourcing expenses.

14. PERPAJAKAN / *14. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

Rincian pajak dibayar di muka terdiri dari: / *Details of prepaid tax consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	
Pajak penghasilan lain-lain:			*Other income taxes:*
Pasal 15	22.162	-	*Article 15*
Pasal 23	2.588.363	-	*Article 23*
Pajak pertambahan nilai	42.761.935	40.855.517	*Value added tax*
Total	**45.372.460**	**40.855.517**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

Rincian utang pajak terdiri dari: / *Details of taxes payable consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income taxes:*
Pasal 29	11.610.244	19.157.863	*Article 29*
Pajak penghasilan lain-lain:			*Other income taxes:*
Pasal 4 (2)	445.725	245.519	*Article 4 (2)*
Pasal 15			*Article 15*
Pasal 21	1.243.391	1.233.122	*Article 21*
Pasal 23	881.511	114.550	*Article 23*
Pasal 25	1.882.528	567.078	*Article 25*
Pasal 26	69.586	-	*Article 26*
Total	**16.132.985**	**21.318.132**	***Total***

14. PERPAJAKAN (lanjutan) / *14. TAXATION (continued)*

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated tax income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Years ended December 31*,		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	255.251.493	214.188.292	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Akrual bonus	(15.412.325)	17.270.763	*Accrued bonus*
Aset tetap	3.231.402	(4.337.601)	*Fixed assets*
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	(610.917)	2.603.114	*Right-of-use assets and lease liabilities*
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	3.402.592	3.076.228	*Allowance for impairment of trade receivables*
Perbedaan permanen:			*Permanent differences:*
Kesejahteraan karyawan, imbalan kerja dan beban lainnya	22.591.619	16.809.491	*Employee welfare, employee benefits and other expenses*
Promosi dan pemasaran	7.054.115	7.139.144	*Promotion and marketing*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(17.371.872)	(16.168.375)	*Finance income subject to final tax*
Hasil pemeriksaan pajak	-	1.898.168	*Tax letter assessment result*
Taksiran penghasilan kena pajak	**258.136.107**	**242.479.224**	***Estimated taxable income***

Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

The calculation of current income tax expense - current year and estimated payable corporate income tax are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Taksiran penghasilan kena pajak	258.136.107	242.479.222	*Estimated taxable income*
Pajak penghasilan badan - tahun berjalan	56.789.944	53.345.429	*Corporate income tax - current year*
Dikurangi:			*Less:*
Pajak penghasilan dibayar di muka:			*Prepaid income taxes:*
Pasal 23	26.669.487	20.837.759	*Article 23*
Pasal 25	18.510.213	13.349.807	*Article 25*
Taksiran utang pajak tahun berjalan - Pasal 29	**11.610.244**	**19.157.863**	***Estimated tax payable current year - Article 29***



14. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

14. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculate and pay tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Years ended December 31*,		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	255.251.493	214.188.292	*Income before corporate income tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	(56.155.330)	(47.121.424)	*Income tax calculated at applicable rate*
Dampak perbedaan permanen:			*Effect of permanent differences:*
Kesejahteraan karyawan, imbalan kerja dan beban lainnya	(4.970.155)	(3.698.088)	*Employee welfare, employee benefits and other expenses*
Promosi dan pemasaran	(1.551.905)	(1.570.612)	*Promotion and marketing*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	3.821.811	3.557.042	*Finance income subject to final tax*
Hasil pemeriksaan pajak		(417.597)	*Tax letter assessment result*
Penyesuaian	41.978	1.905.270	*Adjustments*
Beban pajak penghasilan	**(58.813.601)**	**(47.345.409)**	***Income tax expense***

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2025 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2025.

The calculation of estimated taxable income for the year 2025 will be used as basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return for the year 2025.

d. Beban pajak penghasilan

Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

d. Income tax expenses

The details of income tax expenses is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Kini	(56.789.944)	(53.345.429)	*Current*
Tangguhan	(2.023.657)	6.000.020	*Deferred*
Beban pajak penghasilan	**(58.813.601)**	**(47.345.409)**	***Income tax expense***

14. PERPAJAKAN (lanjutan) / *14. TAXATION (continued)*

e. Pajak tangguhan / *e. Deferred taxes*

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/ *Year ended December 31, 2025*				
		Dibebankan pada/*Charged to*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Laporan Laba Rugi/ *Statement of Profit or Loss*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Akrual bonus	13.271.666	(3.390.711)	(98.012)	9.782.943	*Accrued bonus*
Aset tetap	1.644.951	710.908	1.925.380	4.281.239	*Fixed assets*
Liabilitas sewa	20.165.795	(24.877.914)	20.775.393	16.063.274	*Lease liabilities*
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	1.490.253	748.570	2	2.238.825	*Allowance for impairment of trade receivables*
Total	**36.572.665**	**(26.809.147)**	**22.602.763**	**32.366.281**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Aset hak-guna	(17.586.068)	24.743.512	(22.560.785)	(15.403.341)	*Right-of-use assets*
Total	**(17.586.068)**	**24.743.512**	**(22.560.785)**	**(15.403.341)**	***Total***
Aset pajak tangguhan, neto	**18.986.597**	**(2.065.635)**	**41.978**	**16.962.940**	***Deferred tax assets, net***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/ *Year ended December 31, 2024*				
		Dibebankan pada/*Charged to*			
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Laporan Laba Rugi/ *Statement of Profit or Loss*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset pajak tangguhan					***Deferred tax assets***
Akrual bonus	9.379.890	3.799.568	92.208	13.271.666	*Accrued bonus*
Aset tetap	2.571.553	(954.272)	27.670	1.644.951	*Fixed assets*
Liabilitas sewa	8.693.399	(24.124.257)	35.596.653	20.165.795	*Lease liabilities*
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	813.483	676.770	-	1.490.253	*Allowance for impairment of trade receivables*
Total	**21.458.325**	**(20.602.191)**	**35.716.531**	**36.572.665**	***Total***
Liabilitas pajak tangguhan					***Deferred tax liabilities***
Aset hak-guna	(8.471.748)	24.696.941	(33.811.261)	(17.586.068)	*Right-of-use assets*
Total	**(8.471.748)**	**24.696.941**	**(33.811.261)**	**(17.586.068)**	***Total***
Aset pajak tangguhan, neto	**12.986.577**	**4.094.750**	**1.905.270**	**18.986.597**	***Deferred tax assets, net***



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan) / *14. TAXATION (continued)*

f. Taksiran tagihan restitusi pajak dan Surat Ketetapan Pajak / *f. Estimated claims for tax refund and Tax Assessment Letter*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Pajak Pertambahan Nilai	-	49.658.080	*Value Added Tax*
Total	**-**	**49.658.080**	***Total***

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa 2022 dan 2023

Pada tanggal 24 Oktober 2025 Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp48.011.226 dari pengajuan restitusi PPN masa 2022 dan 2023 yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2024 sebesar Rp49.658.080.

Pada tanggal 13 November 2025, Perusahaan menerima pembayaran atas SKPLB tersebut sebesar Rp47.643.169 setelah dikompensasi dengan Surat Tagihan Pajak ("STP") dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") sebesar Rp368.057.

Selisih antara pengajuan restitusi awal dengan SKPLB serta kompensasi atas STP dan SKPKB sehubungan dengan proses restitusi PPN ini telah diprovisikan pada tahun 2024.

Value Added Tax Refunds Period 2022 and 2023

On October 24, 2025, the Company received a Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") amounting to Rp48,011,226 related to the VAT refund request for the 2022 and 2023 tax period submitted on October 18, 2024 amounted to Rp49,658,080.

On November 13, 2025, the Company received the payment of the SKPLB amounted Rp47,643,169 after being offset against a Tax Collection Letter ("STP") and a Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") amounted to Rp368,057.

The difference between the initial refund request and the SKPLB amount, including the compensation for STP and SKPKB related to this VAT refund process has been provided in 2024.

15. MODAL SAHAM / *15. SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah:

The shareholder of the Company as of December 31, 2025 are as follows:

Pemegang Saham	**Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Nominal/ *Amount***	***Shareholders***
PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	4.063.504.600	76,89%	406.350.460	*PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")*
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	5.800.000	0,11%	580.000	*PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")*
Dewan Komisaris:				*Board of Commisioner:*
R. R. Dewi Ariyani	387.600	0,01%	38.760	*R. R. Dewi Ariyani*
Direksi:				*Board of Director:*
Shanti Puruhita	1.072.100	0,02%	107.210	*Shanti Puruhita*
Masyarakat:				*Public:*
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	569.551.400	10,78%	56.955.140	*PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")*
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	644.495.400	12,19%	64.449.540	*Others (less than 5% each equity for shareholders)*
Total	**5.284.811.100**	**100%**	**528.481.110**	***Total***

15. MODAL SAHAM (lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah:

15. SHARE CAPITAL (continued)

The shareholder of the Company as of December 31, 2024 are as follows:

Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Nominal/ *Amount*	*Shareholders*
PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	4.063.504.600	76,89%	406.350.460	*PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")*
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")	5.800.000	0,11%	580.000	*PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")*
Dewan Komisaris:				*Board of Commisioner:*
R. R. Dewi Ariyani	387.600	0,01%	38.760	*R. R. Dewi Ariyani*
Direksi:				*Board of Directors:*
Shanti Puruhita	1.072.100	0,02%	107.210	*Shanti Puruhita*
Muhammad Iqbal	964.100	0,02%	96.410	*Muhammad Iqbal*
Masyarakat:				*Public:*
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	569.551.400	10,78%	56.955.140	*PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")*
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	635.491.500	12,02%	63.549.150	*Others (less than 5% each equity for shareholders)*
	5.276.771.300	99,85%	527.677.130	
Saham tresuri	8.039.800	0,15%	803.980	*Treasury stocks*
Total	**5.284.811.100**	**100%**	**528.481.110**	***Total***

Saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 1.459.700 lembar dan 2.423.800 lembar saham atau 0,03% dan 0,05% dari jumlah lembar saham modal ditempatkan dan disetor.

Shares owned by the Board of Commisioner and Board of Director for year ended December 31, 2025 and 2024 respectively, amounted to 1,459,700 shares and 2,423,800 shares, or 0.03% and 0.05% from the total number of issued and fully paid-in capital shares.

16. SAHAM TRESURI

Dalam Berita Acara Kesepakatan Direksi pada tanggal 18 Maret 2020 dan 2 Juli 2020, para pemegang saham menyetujui rencana manajemen untuk melaksanakan pembelian kembali saham yang beredar di Masyarakat, dalam jangka waktu, antara tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 dan 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020, dengan pembelian maksimum masing-masing sejumlah 20.000.000 saham dan 15.000.000 saham dari seluruh saham Perusahaan yang beredar di masyarakat.

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham tresuri sebanyak 8.039.800 saham dengan harga perolehan sebesar Rp1.617.838, yang disajikan sebagai akun "Saham Tresuri" yang mengurangi ekuitas pada laporan posisi keuangan.

Pada 13 Oktober dan 28 November 2025, Perusahaan telah melakukan penjualan seluruh saham tresuri melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai transaksi sebesar Rp2.612.562.

16. TREASURY STOCKS

In the Minutes of the Directors' Agreement dated March 18, 2020, and July 2, 2020, the shareholders approved the management's plan to repurchase shares outstanding in the public within the periods from March 20, 2020, to June 18, 2020, and from July 7, 2020, to September 30, 2020, with a maximum purchase of 20,000,000 shares and 15,000,000 shares, respectively, from all shares of the Company outstanding in the public.

The Company has purchased amounting to 8,039,800 treasury stock with acquisition price amounting to Rp1,617,838, which presented as "Treasury Stocks" account that deducted the equity in the statement of financial position.

On October 13 and November 28, 2025, the Company sold all of its treasury stocks through the Indonesia Stock Exchange with a total transaction value of Rp2,612,562.



16. SAHAM TRESURI (lanjutan)

Pelaksanaan penjualan saham tresuri tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 POJK No. 13/2023 juncto Pasal 49 POJK No. 29/2023 dengan tetap mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selisih antara pembelian dan penjualan saham tresuri sebesar Rp994.724 dicatat pada ekuitas sebagai bagian dari tambahan modal disetor untuk tanggal 31 Desember 2025.

16. *TREASURY STOCKS (continued)*

The sale of the treasury stocks was carried out in accordance with Article 13 of POJK No. 13/2023 in conjunction with Article 49 of POJK No. 29/2023, and with reference to POJK No. 30/POJK.04/2017 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies issued by the Otoritas Jasa Keuangan. The entire process has complied with the applicable disclosure requirements and prevailing laws and regulations.

The difference between the purchase and resale of treasury stocks amounting to Rp994,724 has been recorded in equity as part of additional paid-in capital as of December 31, 2025.

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan agio saham yang berasal dari selisih lebih hasil penawaran umum perdana atas nilai nominal saham setelah dikurangi biaya penerbitan (Catatan 1b) dan selisih antara pembelian dan penjualan saham tresuri (Catatan 16).

17. *ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Additional paid-in capital represents the premium on stock from excess of proceeds from the initial public offering of shares over par value after deducting the issuance cost (Note 1b) and the difference between the purchase and resale of treasury stocks (Note 16).

18. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN

Pada tanggal 19 Desember 2025, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim untuk tahun 2025 sebesar Rp4,40 (nilai penuh) per saham atau seluruhnya sebesar Rp23.253.169 dan dibayarkan pada tanggal 12 Januari dan 26 Februari 2026.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 18 Juni 2025, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penggunaaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2024 untuk dividen dan cadangan umum masing-masing sebesar Rp125.165.015 dan Rp5.435.500. Dividen terdiri dari dividen interim sebesar Rp20.051.731 yang telah dibagikan pada tanggal 8 dan 17 Januari 2025 dan dividen tunai sebesar Rp105.113.284 pada tanggal 17 Juli, 21 Juli dan 23 Juli 2025.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 12 Juni 2024, para pemegang saham Perusahaan menyetujui penggunaaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2023 untuk dividen dan cadangan umum masing-masing sebesar Rp118.252.446 dan Rp31.532.397. Dividen terdiri dari dividen interim sebesar Rp20.051.731 yang telah dibagikan pada tanggal 24 Januari 2024 dan 16 Februari 2024 dan dividen tunai sebesar Rp98.200.715 pada tanggal 10 Juli, 17 Juli dan 8 Agustus 2024.

18. *GENERAL RESERVE AND DIVIDEND*

On December 19, 2025, the Company declared the distribution of an interim dividend for 2025 amounting to Rp4.40 (full amount) per share or in total amounting to Rp23,253,169 and paid on January 12 and February 26, 2026.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated June 18, 2025, the Company's shareholders agreed the utilization of the Company's net income year 2024 for dividend and general reserve amounting to Rp125,165,015 and Rp5,435,500, respectively. The dividend consists of interim dividend amounting to Rp20,051,731 which were paid on January 8 and 17, 2025 and cash dividend amounting to Rp105,113,284 which were paid on July 17, July 21 and July 23, 2025.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders dated June 12, 2024, the Company's shareholders agreed the utilization of the Company's net income year 2023 for dividend and general reserve amounting to Rp118,252,446 and Rp31,532,397, respectively. The dividend consists of interim dividend amounting to Rp20,051,731 which were paid on January 24, 2024 and February 16, 2024 and cash dividend amounting to Rp98,200,715 which were paid on July 10, July 17 and August 8, 2024.

19. PENDAPATAN / *REVENUES*

Pendapatan usaha menurut jenis usaha adalah sebagai berikut:

Revenues based on type of operating are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Jasa pelayanan kapal:			*Ship services:*
Jasa penundaan	1.320.062.660	1.209.515.449	*Tug services*
Jasa pemanduan	105.072.894	91.734.911	*Pilotage services*
Jasa pelayanan kapal	1.425.135.554	1.301.250.360	*Ship services*
Jasa pengangkutan dan lainnya	49.672.020	43.779.897	*Freight and other services*
Total	**1.474.807.574**	**1.345.030.257**	***Total***

Jasa pelayanan kapal merupakan kegiatan operasional utama Perusahaan yang berupa penyediaan jasa pemanduan dan penundaan kapal untuk membantu kapal masuk hingga keluar pelabuhan.

Ship services are the Company's main operational activity in the form of providing pilotage and tug services to help ships enter and leave the port.

Rincian pendapatan berdasarkan jenis pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of revenues based on customer type are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga	508.976.063	425.756.385	*Third parties*
Pihak berelasi	965.831.511	919.273.872	*Related parties*
Total pendapatan	**1.474.807.574**	**1.345.030.257**	***Total revenues***

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Details of customers which represent more than 10% of the total revenues are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*				
	Pendapatan/*Revenue*		**Persentase dari total pendapatan/*Percentage of total revenue***		
	2025	**2024**	**2025**	**2024**	
SPJM	822.235.427	765.149.068	55,75	56,89	*SPJM*



20. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *20. COST OF REVENUES*

Beban pokok pendapatan menurut jenis usaha adalah sebagai berikut:

Cost of revenues based on type of operating are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Jasa pelayanan kapal	1.009.820.514	897.075.453	*Ship services*
Jasa pengangkutan dan lainnya	35.196.529	29.817.458	*Freight and other services*
Total	**1.045.017.043**	**926.892.911**	***Total***

Rincian beban pokok pendapatan berdasarkan jenis biaya adalah sebagai berikut:

Details of cost of revenues based on type of expenses are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Bahan bakar, pelumas, air dan makanan	347.734.858	330.734.000	*Fuel, lubricant, water and food*
Kerjasama mitra usaha	339.982.782	270.854.066	*Partnership*
Penyusutan (Catatan 9 dan 10)	149.017.750	145.722.208	*Depreciation (Notes 9 and 10)*
Perbaikan dan pemeliharaan	127.632.974	104.805.150	*Repair and maintenance*
Gaji	36.058.011	41.607.356	*Salaries*
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	22.232.397	14.434.361	*Non-tax state income*
Surat kapal	15.312.067	11.725.143	*Ship letter*
Asuransi	4.299.902	5.502.882	*Insurance*
Lainnya (masing-masing dibawah Rp2.000.000)	2.746.302	1.507.745	*Others (below Rp2,000,000 each)*
Total	**1.045.017.043**	**926.892.911**	***Total***

Pembelian dari pemasok dengan melebihi 10% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

Purchases from supplier which represent more than 10% of the total revenue are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*				
	Beban/*Expense*		Persentase dari total pendapatan/*Percentage of total revenue*		
	2025	**2024**	**2025**	**2024**	
LEGI	278.824.287	210.015.270	18,91	15,61	*LEGI*

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Gaji	68.657.769	78.098.392	*Salaries*
Umum	65.792.760	66.835.566	*General*
Kerjasama mitra usaha	17.713.354	30.854.763	*Partnership*
Penyusutan (Catatan 9 dan 10)	12.941.647	9.843.985	*Depreciation (Notes 9 and 10)*
Bahan bakar, pelumas, air dan makanan	8.272.290	7.772.024	*Fuel, lubricant, water and food*
Perbaikan dan pemeliharaan	6.206.703	7.142.520	*Repair and maintenance*
Asuransi	1.343.647	2.179.533	*Insurance*
Administrasi kantor	555.471	546.538	*Office administrative*
Total	**181.483.641**	**203.273.321**	***Total***

22. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA / *22. OTHER OPERATING INCOME*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan denda	2.198.224	536.800	*Penalty income*
Lain-lain	534.951	805.016	*Others*
Total	**2.733.175**	**1.341.816**	***Total***

23. BEBAN OPERASI LAINNYA / *23. OTHER OPERATING EXPENSES*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban berasal dari PPN yang tidak dapat direkditkan	3.511.945	-	*Expenses from non-creditable value added tax*
Pencadangan pajak	-	3.476.066	*Tax provision*
Beban berasal dari surat ketetapan pajak	-	1.898.168	*Expenses from tax assessment letter*
Lain-lain	307.020	1.663.407	*Others*
Total	**3.818.965**	**7.037.641**	***Total***

24. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN / *24. FINANCE INCOME AND EXPENSES*

a. Pendapatan keuangan / *a. Finance income*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan bunga deposito	15.487.758	14.175.519	*Interest on time deposit*
Pendapatan bunga jasa giro	6.147.801	3.757.125	*Interest on current accounts*
Pajak final atas pendapatan bunga	(4.229.890)	(1.764.269)	*Final tax on interest income*
Total	**17.405.669**	**16.168.375**	***Total***



24. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN (lanjutan) / *24. FINANCE INCOME AND EXPENSES (continued)*

b. Beban keuangan / *b. Finance expenses*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,* 2025	2024	
Beban bunga sewa (Catatan 10)	9.341.479	11.133.152	*Lease interest expenses (Note 10)*
Beban administrasi bank	33.797	15.131	*Bank administrative expenses*
Total	**9.375.276**	**11.148.283**	***Total***

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI / *25. RELATED PARTIES INFORMATION*

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties are as follows:

Sifat relasi/ *Nature of relationship*	Nama pihak berelasi/ *Name of related party*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
Pemegang saham/*Shareholders*	PT Pelindo Jasa Maritim	Penjualan jasa dan dividen/ *Sales of services and dividend*
	PT Multi Terminal Indonesia	Dividen/*Dividend*
	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Dividen/*Dividend*
Entitas induk SPJM/ *Parent entity of SPJM*	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Penjualan dan pembelian jasa dan imbalan kerja/ *Sales and purchase of services, and employee benefits*
Entitas sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/*Entities under common control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Pelindo Solusi Maritim (dahulu PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia/*formerly PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia)*	Penjualan dan pembelian jasa/ *Sales and purchase of services*
	PT Pendidikan Mairitim dan Logistik Indonesia	Pembelian jasa/Purchase of services
	PT Electronic Data Interchange Indonesia	Pembelian jasa/*Purchase of services*
	PT Pelindo Daya Sejahtera	Pembelian jasa/*Purchase of services*
	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Pembelian jasa/*Purchase of services*
	PT Lamong Energi Indonesia	Pembelian barang/*Purchase of good*
Entitas berelasi dengan pemerintah/ *Government-related entity*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa perbankan/*Banking services*
	PT PLN Energi Gas	Penjualan jasa/*Sales of services*

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties are as follows: (continued)

Sifat relasi/ ***Nature of relationship***	**Nama pihak berelasi/** ***Name of related party***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transaction***
	PT Adhi Guna Putera	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi/ *Purchase of insurance services*
	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pembelian jasa asuransi/ *Purchase of insurance services*
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Nusantara Regas	Penjualan jasa/*Sales of services*
	PT Jawa Satu Power	Pembelian jasa/*Purchase of services*

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Remunerasi personil manajemen kunci

Jumlah gaji, tantiem dan tunjangan lainnya yang dibayar atau diakru kepada manajemen kunci Perusahaan adalah sebesar Rp15.234.623 dan Rp14.069.485 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Key management personnel remuneration

The amount of salary, tantiem and other benefits paid or accrued to the Company's key management were Rp15,234,623 and Rp14,069,485 for the year ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

Perjanjian dan perikatan yang signifikan dengan pihak berelasi

a. Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian tentang Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan di Lingkungan Pelindo dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut:
   - Kerjasama penyediaan dan pengelolaan kapal tunda dengan bagi hasil sebesar 85% dan 15% masing masing untuk Perusahaan dan Pelindo, dihitung dari pendapatan jasa penundaan dikurangi PNBP, PPh pasal 23, nota koreksi serta pungutan resmi berdasarkan ketentuan yang berlaku dari pemerintah dan/atau regulator.
   - Kerjasama pengelolaan kapal pandu dengan besaran biaya pengelolaan kapal pandu yang diterima Perusahaan sebesar Rp4.500.000 per bulan pada tahun 2023.

The significant agreements and commitments with related parties

a. On December 21, 2018, the Company and Pelindo have signed an agreement regarding the Provision of Supporting Facilities and Infrastructure in Pelindo with the following conditions:
   - *Supply and management cooperation of tug vessels with a sharing fee of 85% and 15% for the Company and Pelindo respectively shall be calculated from tug service revenue after deducting PNBP, Income tax payable of article 23, correction note and and official collection based on applicable regulations from the government and/or regulators.*
   - *Cooperation in the management of pilotage vessel with the management fee of pilotage vessel received by the Company amounting to Rp4,500,000 per month for 2023.*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian dan perikatan yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

a. Pada tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan dan Pelindo menandatangani perjanjian tentang Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan di Lingkungan Pelindo dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut: (lanjutan)
   - Jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

   Pada tanggal 11 November 2023, Perusahaan dan Pelindo menandatangani pengakhiran atas perjanjian tersebut terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023.

   Pada tanggal 11 Desember 2023, Perusahaan dan SPJM menandatangani Kerjasama Pengelolaan dan Penyediaan Sarana bantu Pemanduan dan Penundaan (SBPP) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 No. KS.02/11/12/2/KOS/DUT/JAI-23 dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2033. Berdasarkan perjanjian, besaran bagi hasil untuk Perusahaan sebagai berikut:
   - Jasa pemanduan 5%
   - Jasa penundaan 90%

a. Pada tanggal 31 Juli 2025, Perusahaan dan SPJM menandatangani addendum terkait Perubahan Persentase *Revenue Sharing* Pemanduan dan Penundaan No. HK.301/31/7/2/PPAK/DRUT/PLJM-25, dengan perubahan besaran bagi hasil untuk Perusahaan sebagai berikut:
   - Cabang Tanjung Priok: jasa penundaan 88%
   - Cabang Palembang: jasa penundaan 83%
   - Cabang Jambi: jasa pemanduan 3%, jasa penundaan 46%

b. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara PTP dengan Perusahaan pada tanggal 10 Oktober 2019, PTP sepakat untuk melakukan penyelesaian utang kepada Perusahaan sebesar Rp31.062.213 paling lambat tanggal 5 November 2019. Perusahaan telah menerima pembayaran sebesar Rp28.472.015. Pada tanggal 31 Desember 2025 and 2024, sisa saldo piutang kepada PTP masing-masing sebesar Rp2.287.249 dan Rp2.590.198 (Catatan 6).

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

The significant agreements and commitments with related parties (continued)

a. On December 21, 2018, the Company and Pelindo have signed an agreement regarding the Provision of Supporting Facilities and Infrastructure in Pelindo with the following conditions:
   - *The period of this agreement is from January 1, 2019 to December 31, 2028.*

   On November 11, 2023, the Company and Pelindo signed a termination of the agreement, effective from August 1, 2023.

   On December 11, 2023, the Company and SPJM signed a Management and Provision of Pilotage and Tug Services (SBPP) Cooperation within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 No. KS.02/11/12/2/KOS/DUT/JAI-23, with a duration of 10 (ten) years, effective from August 1, 2023 to July 31, 2033. Based on agreement, the revenue sharing portion for the Company, are as follows:

   - *Pilotage services 5%*
   - *Tug services 90%*

a. On July 31, 2025, the Company and SPJM signed an amendment regarding the Revenue Sharing Percentage for Pilotage and Tug Services No. HK.301/31/7/2/PPAK/DRUT/PLJM-25, which sets forth the revised revenue-sharing portions for the Company as follows:
   - *Tanjung Priok Branch: tug services 88%*
   - *Palembang Branch: tug services 83%*
   - *Jambi Branch: pilotage services 3%, tug services 46%*

b. Based on Minutes of Agreement between PTP and the Company dated October 10, 2019, PTP agreed to settle its payables to the Company amounting to Rp31,062,213 by November 5, 2019, at the latest. The Company has received payment amounting to Rp28,472,015. As of December 31, 2025 and 2024, outstanding receivables to PTP are Rp2,287,249 and Rp2,590,198, respectively (Note 6).

25. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (lanjutan)

Perjanjian dan perikatan yang signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan karyawan, pada 1 Oktober 2014, Perusahaan melakukan kerjasama dengan Pelindo, untuk menempatkan beberapa karyawan Pelindo ke Perusahaan. Kerjasama tersebut meliputi pembinaan, pengembangan kompetensi serta penghasilan dan remunerasi pegawai sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah karyawan Pelindo yang ditugaskan di Perusahaan masing-masing sebanyak 115 dan 123 karyawan.

d. Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan, Pelindo, dan SPJM sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama No. HK.566/30/11/3/MS-22 tentang Penerapan *Fuel Surcharge* atas Penggunaan Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan Pelindo. Perjanjian ini menyepakati besaran bagi hasil adalah 60% untuk Perusahaan, 30% untuk Pelindo, dan 10% untuk SPJM. Jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan 30 November 2027.

d. Pada tanggal 9 Januari 2023, Perusahaan, Pelindo, dan SPJM sepakat untuk membuat addendum Perjanjian Kerjasama tentang Penerapan *Fuel Surcharge* atas Penggunaan Sarana Bantu Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan Pelindo. Perjanjian ini menyepakati perubahan besaran bagi hasil adalah 65% untuk Perusahaan, 25% untuk SPJM dan 10% untuk Pelindo.

25. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

The significant agreements and commitments with related parties (continued)

c. In order to meet the needs of employees, on October 1, 2014, the Company entered into agreement with Pelindo, to register several of Pelindo employees in the Company. The Agreement including coaching, competency development employee's income and remuneration in accordance with the agreement of both parties. As of December 31, 2025, and 2024, the number of Pelindo employees assigned in the Company are 115 and 123 employees, respectively.

d. On November 30, 2022, the Company, Pelindo and SPJM agreed to enter into Agreement No. HK.566/30/11/3/MS-22 regarding Application of Fuel Surcharge for the Use of Guide Motors and Tugboats within Pelindo. The Agreement agrees to amount of revenue sharing is 60% for the Company, 30% for Pelindo, and 10% for SPJM. A duration of 5 (five) years, effective from November 30, 2022, to November 30, 2027.

d. On January 9, 2023, the Company, Pelindo and SPJM agreed to made an addendum of Agreement regarding Application of Fuel Surcharge for the Use of Guide Motors and Tugboats within Pelindo. This agreement agrees to changes amount of revenue sharing is 65% for the Company, 25% for SPJM and 10% for Pelindo.

26. ASET MONETER DALAM MATA UANG ASING

26. MONETARY ASSETS DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

	31 Desember/*December 31,*				
	2025		**2024**		
Aset					***Asset***
Kas dan setara kas	-	AS/US	13.933		*Cash and cash equivalents*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

27. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan merefleksikan nilai wajarnya. Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, bukan dalam penjualan yang dipaksakan atau penjualan likuidasi.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Instrumen keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, kas yang dibatasi penggunaannya, utang usaha, uang titipan, beban akrual, utang dividen, dan liabilitas sewa. Nilai wajar instrumen keuangan tersebut dianggap mendekati nilai tercatatnya.

Liabilitas keuangan jangka panjang

Nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka panjang diasumsikan sama dengan nilai tunai yang akan diterima atau dibayarkan karena saat jatuh temponya tidak dinyatakan dalam kontrak-kontrak terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menentukan kapan liabilitas keuangan jangka panjang tersebut akan direalisasi dan dilunasi.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

- Tingkat 1 : Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

27. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying amounts of financial instruments reflect the estimated fair value. Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current arm's length transaction between knowledgeable willing parties, other than in a forced or liquidation sale.

The methods and assumptions used to estimate the fair value of financial instruments are as follow:

Current financial assets and current financial liabilities

Short-term financial instruments with maturities of one year or less includes cash and cash equivalents, trade receivables, restricted cash, trade payables, deposits, accrued expenses, dividend payables, and lease liabilities. The fair values of these financial instruments are approximately the same with their carrying amounts.

Long-term financial liabilities

The fair values of non-current financial liabilities are assumed to be the same as the cash amount that will be received or paid due to the fact that their maturities are not stated in the related contracts, therefore it is not possible to determine when the financial liabilities will be realized and settled.

Fair value estimation is judgmental and involves various boundaries, including:

- *Fair value presented does not consider the impact of future currency fluctuation.*
- *Fair value estimations are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.*

- *Level 1 : Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 : Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*

27. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Liabilitas keuangan jangka panjang (lanjutan)

- Tingkat 3 : Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.

Selain aset dan liabilitas keuangan yang disebutkan di atas, Perusahaan tidak mempunyai aset dan liabilitas lain yang diukur dan disajikan pada nilai wajar, oleh karena itu, Perusahaan tidak menyajikan hirarki nilai wajar sesuai PSAK 113 "Pengukuran Nilai Wajar".

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Level 1 dan Level 2, dan tidak terdapat pengalihan dari Level 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan selain yang telah dijelaskan diatas.

Tabel berikut menunjukkan jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

27. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Long-term financial liabilities (continued)

- *Level 3 : Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs), either directly or indirectly.*

Other than financial assets and financial liabilities mentioned above, the Company does not have other assets or liabilities measured and disclosed at fair value, therefore the Company does not present fair value hierarchy under PSAK 113 "Fair Value Measurements".

As of December 31, 2025 and 2024, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed other than above explained.

The following table sets out the carrying amounts and estimated fair values of the Company's financial instruments as of December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember/*December 31*, 2025		31 Desember/*December 31*, 2024		
	Jumlah tercatat/ *Carrying Amount*	Nilai wajar/ *Fair Value*	Jumlah tercatat/ *Carrying Amount*	Nilai wajar/ *Fair Value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	554.126.337	554.126.337	473.084.134	473.084.134	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	360.492.066	360.492.066	397.807.950	397.807.950	*Trade receivables - net*
Kas yang dibatasi penggunaannya	134.968	134.968	226.968	226.968	*Restricted cash*
Total	**914.753.371**	**914.753.371**	**871.119.052**	**871.119.052**	***Total***
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Utang usaha	25.744.401	25.744.401	29.375.989	29.375.989	*Trade payables*
Uang titipan	14.939.729	14.939.729	12.475.836	12.475.836	*Deposits*
Beban akrual	201.638.099	201.638.099	185.986.435	185.986.435	*Accrued expenses*
Utang dividen	23.253.169	23.253.169	20.051.731	20.051.731	*Dividend payables*
Liabilitas sewa	73.014.879	73.014.879	91.662.715	91.662.715	*Lease liabilities*
Total	**338.590.277**	**338.590.277**	**339.552.706**	**339.552.706**	***Total***

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from the Company's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The Directors review and agree policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset Perusahaan yang terekspos terhadap risiko suku bunga:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Interest Rate Risks

Interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at floating interest rates are exposed to cash flows risk.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Company's assets exposed to interest rate risk:

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	Total	
31 Desember 2025						***December 31, 2025***
Kas dan setara kas	296.057.049	-	258.000.000	-	554.126.337	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	101.271	33.697	-	-	134.968	*Restricted cash*
31 Desember 2024						***December 31, 2024***
Kas dan setara kas	74.084.134	-	399.000.000	-	473.084.134	*Cash and cash equivalents*
Kas yang dibatasi penggunaannya	96.122	130.846	-	-	226.968	*Restricted cash*

Dampak perubahan tingkat suku bunga per tahun deposito berjangka terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The effect of changes in the annual interest rates of time deposits to profit before income tax is as follows:

Variabel	Kenaikan/ (Penurunan)/ *Increase/ (Decrease)*	(Penurunan)/Kenaikan Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ *(Decrease)/Increase in Profit Before Tax*	*Variable*
31 Desember 2025			*December 31, 2025*
Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ *basis points*	(Rp1.231.667)/Rp1.231.667	*Floating interest rate*
31 Desember 2024			*December 31, 2024*
Tingkat suku bunga mengambang	50/(50) basis poin/ *basis points*	(Rp1.509.583)/Rp1.509.583	*Floating interest rate*

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Perusahaan. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas dalam mata uang Dolar AS.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Company. Exposure of the Company against exchange rate fluctuations is mainly derived from cash and cash equivalents denominated in US Dollar.

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	Kenaikan (penurunan) nilai tukar mata uang/ *Increases (decreases) on foreign exchange rates*	Dampak/ *Effect*	
Perubahan kurs mata uang asing 2024	(+)100bps	2.251	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2024*
	(-)100bps	(2.251)	

Pada tanggal 31 Desember 2025, berdasarkan simulasi yang dilakukan secara rasional, Perusahaan tidak memiliki eksposur risiko nilai tukar. Hal ini disebabkan karena Perusahaan tidak mempunyai saldo maupun transaksi dalam mata uang asing yang dapat menimbulkan potensi risiko perubahan nilai tukar.

Pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan simulasi yang rasional, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebesar 1%, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp2.251, terutama sebagai akibat dari kerugian/keuntungan selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas dalam Dolar AS.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Perusahaan dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Foreign currency risk (continued)

Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follows:

As of December 31, 2025, based on a rational simulation, the Company is not exposed to foreign currency risk. This is because the Company does not have any balances or transactions denominated in foreign currencies that could give rise to potential exchange rate fluctuations.

As of December 31, 2024, based on a sensible simulation, had the exchange rate of Rupiah against the US Dollar depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, income before tax for the period ended December 31, 2024 would have been lower/higher Rp2,251, respectively, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents denominated in US Dollar.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counter parties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Company manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Company and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.



28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha - neto dan kas yang dibatasi penggunaannya. Dalam hal kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya, Perusahaan menempatkannya di bank yang memiliki modal kuat, bereputasi baik, memiliki pangsa pasar luas serta produk dan jasa keuangan yang lengkap sesuai kebutuhan Perusahaan. Sebagian besar piutang usaha adalah kepada perusahaan berelasi sehingga risiko kreditnya dapat dikelola dengan baik.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

The Company is exposed to credit risk primarily from cash and cash equivalents, trade receivables - net and restricted cash. In the case of cash and cash equivalents and restricted cash, the Company places them in banks that have strong capital, good reputation, have broad market share and complete financial products and services according to the Company's needs. Most of the trade receivables are related parties so that credit risk can be managed properly.

Credit risk exposure relating to assets in the statements of financial position is as follow:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Kas dan setara kas	554.126.337	473.084.134	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	360.492.066	397.807.950	*Trade receivables - net*
Kas yang dibatasi penggunaannya	134.968	226.968	*Restricted cash*
Total	**914.753.371**	**871.119.052**	***Total***

Risiko Likuiditas

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.

Perusahaan secara teratur mengevaluasi informasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasikan kesempatan melakukan penggalangan dana yang mencakup pasar modal.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto, yang mencakup beban bunga terkait:

Liquidity Risk

The Company manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiative, including equity market.

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments, which include the related interest charges:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*					
	< 1 tahun/ *< 1 year*	**1 - 2 tahun/ *1 - 2 years***	**2 - 3 tahun/ *2 - 3 years***	**> 3 tahun/ *> 3 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha	25.744.401	-	-	-	25.744.401	*Trade payables*
Utang titipan	14.939.729	-	-	-	14.939.729	*Deposits*
Beban akrual	201.638.099	-	-	-	201.638.099	*Accrued expenses*
Utang dividen	23.253.169	-	-	-	23.253.169	*Dividend payables*
Liabilitas Sewa	69.093.934	3.920.945	-	-	73.014.879	*Lease Liabilities*
Total	**334.669.332**	**3.920.945**	**-**	**-**	**338.590.277**	***Total***

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto, yang mencakup beban bunga terkait: (lanjutan)

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Liquidity Risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments, which include the related interest charges: (continued)

31 Desember 2024/
December 31, 2024

	< 1 tahun/ *< 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	29.375.989	-	-	-	29.375.989	*Trade payables*
Utang titipan	12.475.836	-	-	-	12.475.836	*Deposits*
Beban akrual	185.986.435	-	-	-	185.986.435	*Accrued expenses*
Utang dividen	20.051.731	-	-	-	20.051.731	*Dividend payables*
Liabilitas Sewa	84.927.058	6.735.657	-	-	91.662.715	*Lease Liabilities*
Total	**332.817.049**	**6.735.657**	**-**	**-**	**339.552.706**	***Total***

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Perusahaan dan berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company manages its capital to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain a balance between the level of borrowing and the equity position to ensure optimal capital structure to reduce the cost of capital.

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang Tbk

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan dan PT Cemindo Gemilang Tbk sepakat membuat dan menandatangani surat Perjanjian Nomor HK-566/31/3/1/MS-22 dan 061/CG-JAI/III/2023 tentang Kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal serta penyediaan sarana bantu pemanduan melalui mekanisme *revenue sharing* dengan persentase untuk Perusahaan sebesar 100% untuk pemanduan dan 10% untuk penundaan.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Cooperation Agreement for Pilotage and Tug services at Terminal PT Cemindo Gemilang Tbk

On March 31, 2022, the Company and PT Cemindo Gemilang Tbk agreed and signed an Agreement Letter Number HK-566/31/3/1/MS-22 and 061/CG-JAI/III/2023 regarding Cooperation in Ship Pilotage and Tug Services and the provision of pilotage aids through a revenue sharing mechanism with a percentage for The Company is 100% for pilotage and 10% for tug.



29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang Tbk (lanjutan)

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tanggal 24 Maret 2025, Perusahaan dan PT Cemindo Gemilang Tbk kembali menandatangani Perjanjian No. PJ.01/24/3/2/KOD/DKB/JAI-25 untuk memperpanjang kerja sama selama 1 (satu) tahun, berlaku mulai 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026. Perpanjangan tersebut mencakup Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal serta Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan berupa Kapal Tunda dan Pengawakan pada Terminal Khusus Industri Semen PT Cermindo Gemilang Tbk di Bayah, Provinsi Banten.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian sedang dalam proses perpanjangan.

b. Perjanjian sewa kapal tunda untuk wilayah operasional PT Jawa Satu Power

Pada tanggal 5 Februari 2021, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power menandatangani perjanjian No. HK-566/05/02/01/MS-21 tentang Sewa Kapal Tunda untuk Wilayah Operasional PT Jawa Satu Power. Total biaya sewa 2 (dua) unit Kapal Tunda dengan sistem *Time Charter* adalah sebesar Rp3.561.360 setiap bulan belum termasuk PPN 10% dengan biaya sewa sejak dimulainya jangka waktu sewa.

Biaya sewa dengan sistem *On Call* sebesar Rp794.480 untuk setiap kegiatan, akan ditagihkan bersama dengan sewa 2 (dua) unit kapal tunda dengan sistem *Time Charter* periode bulan berikutnya. Perjanjian ini telah beberapa kali dilakukan perpanjangan, terakhir pada tanggal 1 Februari 2023 dengan perubahan tarif menjadi Rp3.294.258 untuk sistem *Time* Charter dan Rp734.894 untuk sistem *On Call* serta berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Pada tanggal 1 September 2023, Perusahaan dan PT PLN Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera sebagai penyedia jasa Kapal Tunda untuk wilayah operasional Jawa Satu Power menandatangani perjanjian atas perjanjian Sewa Kapal Tunda Untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power yang dituangkan dalam Perjanjian No. 2963/126/IX/Direksi-2023 dan PD.02/1/9/1/SPB/DUT/JAI-23.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Cooperation Agreement for Pilotage and Tug services at Terminal PT Cemindo Gemilang Tbk (continued)

This agreement has been amended several times, most recently on March 24, 2025, the Company and PT Cemindo Gemilang Tbk signed Agreement Number PJ.01/24/3/2/KOD/DKB/JAI-25 to extend the cooperation for a period of 1 (one) year, effective from April 1, 2025 to March 31, 2026. The extension covers the provision of Ship Pilotage and Tug Services, including pilotage support facilities such as tugboats and crew, at Private Terminal for the Cement Industry of PT Cemindo Gemilang Tbk in Bayah, Banten Province.

As of the completion date of these financial statements, the agreement is still in the process of extension.

b. Tugboat rental agreement for PT Jawa Satu Power operational area

On February 5, 2021, the Company and PT Jawa Satu Power signed agreement No. HK-566/05/02/01/MS-21 regarding Tugboat Rental for PT Jawa Satu Power Operational Area. The total cost of renting 2 (two) units of Tugboats with Time Charter system is Rp3,561,360 per month excluding 10% VAT with rental fees from the beginning of lease term.

Rental fees with On Call system is Rp794,480 for each activity and will be billed together with the rental of 2 (two) units of tugboats with the Time Charter system. The agreement has been amended several times, last amendment on February 1, 2023 with a rate change to Rp3,294,258 for Time Charter system and Rp734,894 for On Call system, valid until June 30, 2023.

On September 1, 2023, the Company and PT PLN Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera as a provider of Tugboat services for the operational area of Jawa Satu Power signed agreement to the Tugboat Rental agreement for the Jawa Satu Power Operational Area as outlined in Agreement No. 2963/126/IX/Direksi-2023 and PD.02/1/9/1/SPB/DUT/JAI-23.

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian sewa kapal tunda untuk wilayah operasional PT Jawa Satu Power (lanjutan)

Dalam Perjanjian ini, disepakati perubahan atas total biaya sewa 2 (dua) unit Kapal Tunda dengan sistem Time Charter menjadi Rp3.094.258 setiap bulan belum termasuk PPN dan juga atas biaya sewa dengan sistem On Call menjadi sebesar Rp685.000 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2028 untuk setiap kegiatan.

Pada tanggal 23 November 2023, Perusahaan dan PT PLN Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera sebagai penyedia jasa Kapal Tunda untuk wilayah operasional Jawa Satu Power menandatangani addendum perjanjian atas perjanjian Sewa Kapal Tunda Untuk Wilayah Operasional Jawa Satu Power yang dituangkan dalam addendum perjanjian No. 3198/126/X/Direksi-2023 dan PJ.01/31/10/1/TPB/DUT/JAI-23.

Dalam addendum perjanjian ini, disepakati perubahan nama perseroan PT PLN Gas & Geothermal menjadi PT PLN Energi Gas. Selain itu, disepakati pula ketentuan besaran persentase dari total nilai sewa (Time Charter & On Call) sebagai berikut:

- 70% penagihan (sebelum PPN) kepada PT PLN Energi Gas
- 30% penagihan (sebelum PPN) kepada PT Adhi Guna Putera.

c. Perjanjian kerjasama pelayanan jasa kapal di terminal khusus PT Jawa Satu Power

Pada tanggal 15 April 2021, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power menandatangani perjanjian No. HK-566/15/4/11/MS-21 tentang pelayanan jasa kapal di terminal khusus PT Jawa Satu Power. Berdasarkan perjanjian, disepakati pula ketentuan besaran persentase pembagian pendapatan yang diterima oleh Perusahaan sebagai berikut:

- Jasa Pandu: 70% setelah dipotong PNBP pemanduan;
- Stand by Pandu: 90% dari tarif;
- Jasa Tunda: 5% setelah dipotong PNBP penundaan;
- Stand by Kapal Tunda: 5% dari tarif.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Tugboat rental agreement for PT Jawa Satu Power operational area (continued)

In this agreement, it was agreed to change the total cost of renting 2 (two) units of Tugboats with the Time Charter system to Rp3,094,258 every month excluding VAT and also the rental fee using the On Call system to Rp685,000 starting from July 1, 2023 until June 30, 2028 for each activity.

On November 23, 2023, the Company and PT PLN Gas & Geothermal dan PT Adhi Guna Putera as a provider of Tugboat services for the operational area of Jawa Satu Power signed addendum agreement to the Tugboat Rental agreement for the Jawa Satu Power Operational Area as outlined in Agreement No. 3198/126/X/Direksi-2023 and PJ.01/31/10/1/TPB/DUT/JAI-23

In this addendum agreement, it was agreed the changes name of PT PLN Gas & Geothermal into PT PLN Energi Gas. Furthermore, the agreed-upon provision also specifies the percentage of the total lease value (Time Charter & On Call) as follows:

- *70% billing (before VAT) towards PT PLN Energi Gas*
- *30% billing (before VAT) towards PT Adhi Guna Putera.*

c. Ship service agreement at PT Jawa Satu Power's Terminal

On April 15, 2021, the Company and PT Jawa Satu Power signed an agreement No. HK-566/15/4/11/MS-21 regarding ship services at the PT Jawa Satu Power's Terminal. Based on the agreement, it is also agreed that the percentage of sharing revenue received by the Company is as follows:

- *Pilotage Service: 70% after net off Non-Tax State Income;*
- *Stand by Pilot: 90% from tariff;*
- *Towage Service: 5% after net off Non-Tax State Income;*
- *Stand by Tug Boat: 5% dari tariff.*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Perjanjian kerjasama pelayanan jasa kapal di terminal khusus PT Jawa Satu Power (lanjutan)

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power menandatangani addendum perjanjian, dimana disepakati perjanjian kerjasama ini diperpanjang hingga 31 Desember 2025. Selain itu terdapat perubahan ketentuan besaran persentase pembagian pendapatan yang diterima oleh Perusahaan sebagai berikut:

- Jasa Pandu: 70% setelah dipotong PNBP pemanduan;
- Stand by Pandu: 70% dari tarif;
- Jasa Tunda: 10% setelah dipotong PNBP penundaan;
- Stand by Kapal Tunda: 10% dari tarif.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tanggal 23 Desember 2025, Perusahaan dan PT Jawa Satu Power kembali menandatangani addendum untuk memperpanjang kerja sama sampai dengan 31 Maret 2026.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, perjanjian sedang dalam proses perpanjangan.

d. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh, Aceh

Pada tanggal 18 November 2021, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh Provinsi Aceh yang tertuang dalam Perjanjian No. HK-566/18/11/1/MS-21.

Nilai kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 80% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 20% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c. Ship service agreement at PT Jawa Satu Power's Terminal (continued)

On December 24, 2024, the Company and PT Jawa Satu Power signed an addendum to the agreement, where it was agreed that the agreement was extended until December 31, 2025. In addition, there are changes in the provisions of the percentage of sharing revenue received by the Company as follows:

- *Pilotage Service: 70% after net off Non-Tax State Income;*
- *Stand by Pilot: 70% from tariff;*
- *Towage Service: 10% after net off Non-Tax State Income;*
- *Stand by Tug Boat: 10% dari tariff.*

This agreement has been amended several times, most recently on December 23, 2025, the Company and PT Jawa Satu Power signed addendum of Agreement to extend the cooperation until March 31, 2026.

As of the completion date of these financial statements, the agreement is still in the process of extension.

d. Agreement for Provision of Guiding Assistance Facilities in the Form of Tugboats for Ship Towing Services in Meulaboh Waters, Aceh

On November 18, 2021, the Company and PT Langlang Laju Layang signed a Agreement for the Provision of Guiding Aids in The Form of Tugboats for Towing Ships in Meulaboh Waters, Aceh Province as stipulated in Agreement No. HK-566/18/11/1/MS-21.

The value of the cooperation agreed in this agreement is that the Company gets 80% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 20% of gross revenue from ship towing services.

The term of this agreement is for 5 (five) years from the signing of Berita Acara Mulai Kerja (BAMK).

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh, Aceh (lanjutan)

Pada tanggal 1 Juli 2024, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Meulaboh Provinsi Aceh No. PU.01.01/1/7/3/SPB/TPB/JAI-24.

Addendum tersebut mengubah persentase nilai kerjasama menjadi Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 72% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 28% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

e. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Weda (Teluk Weda) Maluku Utara

Pada tanggal 17 November 2022, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani perjanjian Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda Untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Perairan Pelabuhan Weda (Teluk Weda) Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Perjanjian No. HK-566/17/11/1/MS-22. Nilai kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 83% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 17% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

Pada tanggal 1 Juli 2024, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani addendum perjanjian. Addendum tersebut mengubah persentase nilai kerjasama menjadi Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 80% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 20% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Operasi ditandatangani.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d. Agreement for Provision of Guiding Assistance Facilities in the Form of Tugboats for Ship Towing Services in Meulaboh Waters, Aceh (continued)

On July 1, 2024, the Company and PT Langlang Laju Layang signed an Addendum to the Agreement for the Provision of Guiding Aids in The Form of Tugboats for Towing Ships in Meulaboh Waters, Aceh Province, No. PU.01.01/1/7/3/SPB/TPB/JAI-24

The addendum modifies the revenue sharing percentage to the Company gets 72% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 28% of gross revenue from ship towing services.

e. Agreement on the Provision of Pilotage Facilities in the Form of Tugboats for Tug Services in Weda Waters (Weda Bay) North Maluku

On November 17, 2022, the Company and PT Langlang Laju Layang signed a agreement to Provide Pilotage Assistance in the Form of Tugboats for Tug Services in Weda Waters (Weda Bay) of North Maluku Province as stated in Agreement No. HK-566/17/11/1/MS-22. The value of the cooperation agreed in this agreement is that the Company gets 83% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 17% of gross revenue from ship towing services.

On July 1, 2024, the Company and PT Langlang Laju Layang signed an addendum that modifies the revenue sharing percentage to the Company gets 80% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 20% of gross revenue from ship towing services.

The agreement period is 5 (five) years from the signing of the Minutes of Commencement of Work (BAMK).



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara

Pada tanggal 23 Desember 2024, Perusahaan dan PT Langlang Laju Layang menandatangani Perjanjian No.PU.01.01/23/12/3/TPB/DUT/JAI-24 tentang Penyediaan Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda untuk Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara. Perusahaan mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 85% dan PT Langlang Laju Layang mendapatkan 15% dari pendapatan bruto atas pelayanan jasa penundaan kapal.

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

g. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda dan Awak Kapal dengan Sistem *On Call* di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Bukit Asam Tbk

Pada tanggal 20 Oktober 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian No. HK-566/20/10/3/MS-22 tentang Kerjasama Penyediaan Sarana Bantu Pemanduan Berupa Kapal Tunda dan Awak Kapal dengan Sistem *On Call* di Terminal milik PT Bukit Asam Tbk.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tanggal 13 November 2025, Perusahaan dan PT Pelabuhan Bukit Prima kembali menandatangani perjanjian No. KS.02/13/11/2/KOD/DUT/JAI-25 untuk memperpanjang kerja sama selama 2 (dua) tahun, berlaku mulai 13 November 2025 sampai dengan 12 November 2027.

h. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Kepulauan Seribu

Pada Tanggal 27 Februari 2020, Perusahaan dan PT Nusantara Regas sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Kepulauan Seribu. Perjanjian ini menyepakati besaran tarif yang dikenakan terhadap kapal LNG pihak ketiga dan kapal LNG yang dikelola PT Nusantara Regas di Terminal Khusus.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f. Agreement on the Provision of Pilotage Facilities in the Form of Tugboats for Tug Services at Tarakan Port, North Kalimantan

On December 23, 2024, the Company and PT Langlang Laju Layang signed an Agreement No. PU.01.01/23/12/3/TPB/DUT/JAI-24 on the Provision of Pilotage Facilities in the Form of Tugboats for Tug Services at Tarakan Port, North Kalimantan. the Company gets 85% revenue sharing and PT Langlang Laju Layang gets 15% of gross revenue from ship towing services.

The agreement is valid for a period of 2 (two) years, effective from the date of signing.

g. Agreement on Provision of Guiding Aid Facilities in the Form of Tugboats and Crews with On Call Systems at Terminals for PT Bukit Asam Tbk's Own Interests

On October 20, 2022, the Company signed agreement No. HK-566/20/10/3/MS-22 for the Provision of Guidance Assistance in the Form of Tugboats and Crews with an On Call System at the PT Bukit Asam Tbk's own terminal.

This agreement has been amended several times, most recently on November 13, 2025, the Company and PT Pelabuhan Bukit Prima signed Agreement Number KS.02/13/11/2/KOD/DUT/JAI-25 to extend the cooperation for a period of 2 (two) years, effective from November 13, 2025 to November 12, 2027.

h. Ship service cooperation agreement at the Terminal of PT Nusantara Regas in Kepulauan Seribu

On February 27, 2020, the Company and PT Nusantara Regas agreed to sign a Ship Service Agreement at PT Nusantara Regas Terminal in Kepualauan Seribu. This agreement agrees on the rate on third party LNG vessels and LNG vessels managed by PT Nusantara Regas at the PT Nusantara Regas Special Terminal.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

29. PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kapal di Terminal Khusus PT Nusantara Regas di Kepulauan Seribu (lanjutan)

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan dan PT Nusantara Regas sepakat untuk menandatangani adendum perubahan besaran tarif kapal LNG, pihak ketiga dan kapal LNG yang dikelola PT Nusantara Regas di Tersus Nusantara Regas dan mengubah hak kedua belah pihak.

Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tanggal 23 Desember 2025, Perusahaan dan PT Nusantara Regas kembali menandatangani addendum perjanjian yang menyepakati perubahan besaran bagi hasil kedua belah pihak dan jangka waktu perjanjian sampai dengan 31 Desember 2027.

i. Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Pada Tanggal 12 Juni 2024, Perusahaan dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk menandatangani Perjanjian Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus. Berdasarkan perjanjian, besaran bagi hasil untuk Perusahaan sebagai berikut:
- Jasa pandu 100%
- Jasa tunda 7,5%

Jangka waktu perjanjian berlaku sampai dengan 15 Juni 2025.

Perjanjian ini telah dua kali mengalami perubahan, terakhir pada tanggal 1 Desember 2025, Perusahaan dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk kembali menandatangani addendum perjanjian yang menyepakati perubahan jangka waktu perjanjian selama 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal 15 Juni 2024 hingga 15 Desember 2027 atas Kerjasama Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Terminal Khusus PT Trimegah Bangun Persada Tbk.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h. Ship service cooperation agreement at the Terminal of PT Nusantara Regas in Kepulauan Seribu (continued)

On April 18, 2023, the Company and PT Nusantara Regas agreed to changes of the tariff for third party LNG vessels and LNG vessels managed by PT Nusantara Regas in Tersus Nusantara Regas revised the rights of both parties.

This agreement has been amended several times, most recently on December 23, 2025, the Company and PT Nusantara Regas signed an addendum agreement which includes revisions to the revenue-sharing proportion for both parties and extend the agreement until December 31, 2027.

i. Agreement for Pilotage and Tugboat Services at PT Trimegah Bangun Persada Tbk's Private Terminal

On June 12, 2024, the Company and PT Trimegah Bangun Persada Tbk agreed to sign an agreement for Pilotage and Tug Services at Private Terminal. Based on agreement, the revenue sharing portion for the Company, are as follows:
- Pilotage services 100%
- Tug services 7,5%

The agreement is valid until June 15, 2025.

This agreement has been amended two times, most recently on December 1, 2025, the Company and PT Trimegah Bangun Persada Tbk signed an Addendum to amend the term of the agreement for a period of 42 (fourty two) months, effective from June 15, 2024 to December 15, 2027, relating to the Cooperation for Ship Pilotage and Tug Services at Terminal of PT Trimegah Bangun Persada Tbk.



30. INFORMASI SEGMEN / *30. SEGMENT INFORMATION*

Perusahaan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen yang menyediakan jasa pelayanan kapal, pengangkutan dan pengelolaan kapal.

The Company operates and manages business in a single segment which provides vessel, freight and fleet management services.

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut:

Information concerning the Company geographical segment are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan			***Revenue***
Jasa kapal - Pelabuhan umum			***Ship services - Public port***
Tanjung Priok	426.944.081	381.268.327	*Tanjung Priok*
Panjang	50.171.411	47.537.918	*Panjang*
Banten	38.737.068	58.947.257	*Banten*
Teluk Bayur	35.063.267	33.540.977	*Teluk Bayur*
Palembang	21.895.937	33.659.175	*Palembang*
Pontianak	20.080.982	16.416.580	*Pontianak*
Bengkulu	5.897.693	5.673.030	*Bengkulu*
Pangkal Balam	4.070.851	3.085.964	*Pangkal Balam*
Cirebon	3.484.870	3.600.754	*Cirebon*
Tanjung Pandan	58.908	62.863	*Tanjung Pandan*
Sub-total	606.405.068	583.792.845	*Sub-total*
Jasa kapal - Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)			***Ship services - Private port***
Banten	152.648.904	130.964.355	*Banten*
Palembang	71.029.259	58.400.975	*Palembang*
Teluk Bayur	25.499.763	13.870.791	*Teluk Bayur*
Tanjung Priok	18.550.720	8.986.457	*Tanjung Priok*
Panjang	10.365.276	10.584.675	*Panjang*
Pontianak	6.723.027	6.226.762	*Pontianak*
Pangkal Balam	1.293.395	921.871	*Pangkal Balam*
Bengkulu	170.430	285.944	*Bengkulu*
Jambi	97.148	61.228	*Jambi*
Tanjung Pandan	23.716	17.957	*Tanjung Pandan*
Cirebon	19.744	371.321	*Cirebon*
Sub-total	286.421.382	230.692.336	*Sub-total*
Jasa kapal - Terminal khusus			***Ship services - Special port***
Maluku Utara	198.996.635	130.478.006	*North Maluku*
Palembang	140.479.662	153.007.186	*Palembang*
Tanjung Priok	57.766.743	39.954.215	*Tanjung Priok*
Cirebon	47.414.180	63.157.294	*Cirebon*
Meulaboh	37.878.098	57.677.127	*Meulaboh*
Banten	34.461.380	37.012.941	*Banten*
Tarakan	13.199.544	-	*Tarakan*
Panjang	2.112.862	207.690	*Panjang*
Batam	-	5.270.720	*Batam*
Sub-total	532.309.104	486.765.179	*Sub-total*

30. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

30. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company geographical segment are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Jasa pengangkutan dan lainnya			***Freight and other services***
Cirebon	49.672.020	43.779.897	*Cirebon*
Sub-total	49.672.020	43.779.897	*Sub-total*
Total	**1.474.807.574**	**1.345.030.257**	***Total***

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Tanjung Priok	237.165.579	310.677.126	*Tanjung Priok*
Banten	74.151.005	69.575.325	*Banten*
Panjang	70.648.437	65.749.524	*Panjang*
Palembang	41.965.021	26.091.260	*Palembang*
Lain-lain	275.269.521	239.050.170	*Others*
Total	**699.199.563**	**711.143.405**	***Total***

Aset tidak lancar - lain-lain terutama merupakan aset tetap - neto, aset hak - guna - neto, aset pajak tangguhan - neto, taksiran tagihan restitusi pajak, pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Non-current assets - others represent fixed assets - net, right of use asset - net, deferred tax assets - net, estimated claims for tax refund, prepaid tax - non-current portion and restricted cash.



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

30. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi mengenai segmen yang dilaporkan dengan rekonsiliasi antara ukuran segmen dengan jumlah yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

30. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information about reportable segments and reconciliation between segment measure and the amount recognized in the Financial Statement are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/*Year ended December 31, 2025*			
	Jasa kapal/ *Ship services*	**Jasa pengangkutan dan lainnya/ *Freight and other services***	**Total/ *Total***	
Pendapatan segmen	1.425.135.554	49.672.020	1.474.807.574	*Segment revenues*
Beban pokok pendapatan segmen	(1.009.820.514)	(35.196.529)	(1.045.017.043)	*Segment cost of revenues*
Laba bruto			**429.790.531**	***Gross income***
Beban umum dan administrasi			(181.483.641)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya			2.733.175	*Other operating income*
Beban operasi lainnya			(3.818.965)	*Other operating expenses*
Laba usaha			**247.221.100**	***Income from operations***
Pendapatan keuangan			17.405.669	*Finance income*
Beban keuangan			(9.375.276)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan			**255.251.493**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan				***Corporate income tax***
Kini			(56.789.944)	*Current*
Tangguhan			(2.023.657)	*Deferred*
Laba tahun berjalan			**196.437.892**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan			-	*Other comprehensive income for the year*
Total laba komprehensif tahun berjalan			**196.437.892**	***Total comprehensive income for the year***
Aset dan liabilitas				*Assets and liabilities*
Aset segmen	1.000.257.711		1.000.257.711	*Segment assets*
Aset yang tidak dapat dialokasikan			714.259.729	*Unallocated assets*
Total aset			**1.714.517.440**	***Total assets***
Liabilitas segmen	238.193.933		238.193.933	*Segment liabilities*
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			116.529.329	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas			**354.723.262**	***Total liabilities***
Informasi lainnya				***Other information***
Penyusutan segmen	149.017.750		149.017.750	*Segment depreciation*
Penyusutan segmen yang tidak dapat dialokasikan			12.941.647	*Unallocated segment depreciation*

30. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen geografis Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

30. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Company geographical segment are as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/*Year ended December 31, 2024*			
	Jasa Kapal/ *Ship services*	**Jasa pengangkutan dan lainnya/ *Freight and other services***	**Total/ *Total***	
Pendapatan segmen	1.301.250.360	43.779.897	1.345.030.257	*Segment revenues*
Beban pokok pendapatan segmen	(897.075.453)	(29.817.458)	(926.892.911)	*Segment cost of revenues*
Laba bruto			**418.137.346**	***Gross income***
Beban umum dan administrasi			(203.273.321)	*General and administrative expenses*
Pendapatan operasi lainnya			1.341.816	*Other operating income*
Beban operasi lainnya			(7.037.641)	*Other operating expenses*
Laba usaha			**209.168.200**	***Income from operations***
Pendapatan keuangan			16.168.375	*Finance income*
Beban keuangan			(11.148.283)	*Finance expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan badan			**214.188.292**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan				***Corporate income tax***
Kini			(53.345.429)	*Current*
Tangguhan			6.000.020	*Deferred*
Laba tahun berjalan			**166.842.883**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan			-	*Other comprehensive income for the year*
Total laba komprehensif tahun berjalan			**166.842.883**	***Total comprehensive income for the year***
Aset dan liabilitas				*Assets and liabilities*
Aset segmen	835.688.953		835.688.953	*Segment assets*
Aset yang tidak dapat dialokasikan			814.292.062	*Unallocated assets*
Total aset			**1.649.981.015**	***Total assets***
Liabilitas segmen	312.544.405		312.544.405	*Segment liabilities*
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan			48.326.433	*Unallocated liabilities*
Total liabilitas			**360.870.838**	***Total liabilities***
Informasi lainnya				***Other information***
Penyusutan segmen	145.722.208		145.722.208	*Segment depreciation*
Penyusutan segmen yang tidak dapat dialokasikan			9.843.985	*Unallocated segment depreciation*



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

31. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

31. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Significant activities which did not affect the Company's cash flows are as follows:

	31 Desember/*December 31*		
	2025	**2024**	
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	102.549.011	153.687.551	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	41.263.196	2.893.934	*Addition of fixed assets through trade payables*

Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2025/ *January 1, 2025*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2025/ *December 31, 2025***	
Liabilitas sewa	91.662.715	(122.422.905)	1.226.058	102.549.011	73.014.879	*Lease liabilities*

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Pengakuan bunga/ *Interest recognition***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Liabilitas sewa	39.515.452	(120.788.859)	19.248.571	153.687.551	91.662.715	*Lease liabilities*

32. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

32. EARNINGS PER SHARE

The reconciliation of earnings per share calculation is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/*Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba tahun berjalan	196.437.892	166.842.883	*Profit for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham	5.277.925.558	5.276.771.300	*Weighted average number of shares*
Total	**37,22**	**31,62**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat efek yang berpotensi dikonversi menjadi saham biasa yang dapat menimbulkan pengaruh dilusi pada laba per saham.

As of December 31, 2025 and 2024, there were no securities potentially converted into ordinary shares that would give rise to a dilution of earnings per share.

PELINDO
JASA MARITIM
JASA ARMADA INDONESIA



Referensi Silang SEOJK No. 16 / SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference NO. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
Ketentuan Umum General Terms	
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	✓
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	✓
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	✓
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik. A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company.	✓
e. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	✓
f. Direksi: Board of Directors:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓

Keterangan Description	Halaman Page
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	✓
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. 2) for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	✓
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	✓
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. 2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	✓
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	✓



Keterangan Description	Halaman Page
Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	✓
Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	✓
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	✓
Bentuk Laporan Report Format	
Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	✓
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	✓
Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	✓
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam *Portable Document Format* (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	✓
Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	20-23
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	24-25
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	50-65
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	42-49
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	68-151
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	152-213
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	240-470
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	472-475
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	478-570
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	66-67
Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	

Keterangan Description	Halaman Page
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	20-23
» pendapatan/penjualan; income/sales;	✓
» laba bruto; gross profit;	✓
» laba (rugi); profit (loss);	✓
» jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	✓
» total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	✓
» jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	✓
» laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	✓
» jumlah aset; total assets;	✓
» jumlah liabilitas; total liabilities;	✓
» jumlah ekuitas; total equity;	✓
» rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	✓
» rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	✓
» rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	✓
» rasio lancar; current ratio;	✓
» rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	✓
» rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	✓
» informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	✓
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	✓
» saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	24-25
c. jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	✓
d. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	✓
e. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	✓



Keterangan Description	Halaman Page
f. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	✓
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	25
dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	✓
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	✓
b. rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	
dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	25
dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	
Laporan Direksi Board of Directors' Report	50-65
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
a. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
» strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	✓
» peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	✓
» proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	✓
» perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	✓
» kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	✓
b. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	
c. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	✓

Keterangan Description	Halaman Page
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	42-49
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	✓
b. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	✓
c. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	✓
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	68-151
a. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	✓
b. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	
» alamat; address;	✓
» nomor telepon; telephone number;	✓
» alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	✓
» alamat situs web; website address;	✓
c. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	✓
d. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	✓
e. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	✓
f. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	✓
g. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	✓
h. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	✓
i. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	110-118



Keterangan Description	Halaman Page
» nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	✓
» foto terbaru; recent photograph;	✓
» usia; age;	✓
» kewarganegaraan; nationality;	✓
» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	✓
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
j. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	✓
k. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	✓
l. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
» hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	✓
» perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	✓
a. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	96-109
» nama dan jabatan; name and position;	✓
» foto terbaru; recent photograph;	✓
» usia; age;	✓
» kewarganegaraan; nationality;	✓
» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	✓
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	✓
b. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	✓
c. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	✓

Keterangan Description	Halaman Page
d. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	✓
e. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
» hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	✓
» pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	✓
» perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	✓
dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	109
jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	130-131
nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	132-135
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	✓
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	✓
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	✓
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	✓



Keterangan Description	Halaman Page
persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	136-137
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	✓
jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	133-134
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	✓
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	✓
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	✓
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	✓
informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	138
nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	138-139
kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	141
informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	142
informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 20) information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	142
a. nama dan alamat; name and address;	✓
b. periode penugasan; assignment period;	✓
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	✓
d. biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	✓

Keterangan Description	Halaman Page
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	✓
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/aliances can be presented in tabular form.	✓
nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	143
Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion	152-213
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	
tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	166-178
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	✓
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	✓
c. profitabilitas; profitability;	✓
kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	179-190
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	✓
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	✓
c. ekuitas; equity;	✓
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	✓
e. arus kas; cash flows;	✓
kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	190-192
tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	192-193
struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	193-194
bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	194
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	✓
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	✓
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	✓



Keterangan Description	Halaman Page
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	✓
bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	195
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	✓
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	✓
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	✓
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	196
prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	208-209
perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	197-198
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	✓
b. laba (rugi); profit (loss);	✓
c. struktur modal (*capital structure*); atau capital structure; or	✓
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	✓
target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: 11) targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	198-199
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	✓
b. laba (rugi); profit (loss);	✓
c. struktur modal (*capital structure*); capital structure;	✓
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	✓
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	✓
aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	164-165
uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	200-201
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	✓
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	✓
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	✓
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	✓

Keterangan Description	Halaman Page
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	✓
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 14) realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	201-202
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	✓
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	✓
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	203-204
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	✓
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	✓
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	✓
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	✓
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	✓
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	✓
pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); dan (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	✓
peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	✓
untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	✓
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	✓



Keterangan Description	Halaman Page
untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	✓
dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	-
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	209-211
perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	212
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Issuer or Public Company Governance	240-470
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
a. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	256-270
» Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	256-270
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (1) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	✓
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; (2) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	✓
b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	257-258
Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	281-292
Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; a. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	✓
b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	✓
c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS.	✓
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	290-291
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	✓

Keterangan Description	Halaman Page
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	✓
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	292
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	✓
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	✓
f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	292
Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	271-280, 299-317, 321-342
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	✓
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	✓
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	✓
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	✓
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	✓
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	✓
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	✓
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	299-308
» prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	✓
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	✓
» pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	✓
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	321, 324-342



Keterangan Description	Halaman Page
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	✓
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	✓
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	331-337
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	✓
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	308-309
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	✓
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	✓
» besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	✓
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	✓
a. nama; name;	✓
b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	✓
c. periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	✓
d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	✓
e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	✓
Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:	323-331
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	✓
b. usia; age;	✓
c. kewarganegaraan; nationality;	✓
d. riwayat pendidikan; educational history;	✓
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	325-326
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	✓
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓

Keterangan Description	Halaman Page
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	✓
g. pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	✓
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	✓
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	✓
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	✓
komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 7) the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	331-337
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	✓
b. usia; age;	✓
c. kewarganegaraan; nationality;	✓
d. riwayat pendidikan; educational history;	✓
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	*333*
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	✓
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	333-334
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	334
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	336
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	334-335
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); a statement that it has a guideline or charter;	332, 335
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	336
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	337
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	-
» alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	-
» pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	-



Keterangan Description	Halaman Page
komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	337-342
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	✓
b. usia; age;	✓
c. kewarganegaraan; nationality;	✓
d. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	✓
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	*339*
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	✓
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	339
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	339
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	✓
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	339-340
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	338
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	341-342
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	342
Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	344-347
a. nama; name;	✓
b. domisili; domicile;	✓
c. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	*344-345*
» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
d. riwayat pendidikan; educational history;	*344-345*
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	346
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	346

Keterangan Description	Halaman Page
Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	347-352
a. nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	
b. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	348
» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	✓
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	✓
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	348
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	351
e. struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	350
f. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	349-350
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	348-349
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	352-353
uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	357-359
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	✓
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	✓
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	✓
sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	360-369
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	✓
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	✓
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	✓
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	✓
perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	370-371
a. pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	✓
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	✓
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	✓



Keterangan Description	Halaman Page
informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 14) information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	*371*
informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: 15) information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	375-379
a. pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	✓
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	✓
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	✓
uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); 16) a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	202-203
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	202-203
a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	✓
b. jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	✓
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	✓
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	✓
uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	134-137
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan a) share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	✓
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	✓
uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	389-392
a. cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	✓
b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	✓
c. penanganan pengaduan; complaint handling;	✓
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	✓
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	392
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	✓
» tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	✓

Keterangan Description	Halaman Page
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	✓
uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	380-385
a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	✓
b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	✓
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	-
penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	394-470
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	✓
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	✓
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	✓
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	
Perusahaan telah Menyusun Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.04/2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. The Company has prepared the Sustainability Report separately from the Annual Report in accordance with OJK Regulation No. 51/POJK.04/2017 regarding Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.	
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	478
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	✓
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	✓

2025 Annual Report
Laporan Tahunan

Elevating Impact, Evolving Forward

Meningkatkan Dampak, Berkembang dengan Bergerak Maju

www.ipcmarine.co.id

PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

Pelindo Tower, Lantai 8 & 9
Jl. Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja,
Jakarta Utara, Jakarta 14230
E-mail: corsec@ipcmarine.co.id